# IDE-IDE REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN

**KUMPULAN TULISAN TAHUN 2024**

*Chryshnanda Dwilaksana*

*Lemdiklat Polri*

# IDE-IDE REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN
**KUMPULAN TULISAN TAHUN 2024**

**Penulis :**
Chryshnanda DL

**ISBN :**

**Editor :**
Agus Boyo
Budi, S.Kom

**Penyunting :**
Budi, S.kom
Denny

**Layout & Design:**
Budi, S.kom
Alam

**Penerbit :**
Lemdiklat Polri

**Cetakan Pertama, 2025**
i-viii + 854 Halaman, ukuran 14,8 cm x 21 cm
Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# Daftar Isi


1. Ide Ide Bagi Reformasi Birokrasi Kepolisian ..... 1
2. Polisi dan Pemolisian yang Harmoni Dinamis dan Berbagi Kebahagiaan ... 13
3. Penyandang Disabilitas, Polisi dan Pemolisiannya ..... 21
4. Road Safety Policing dan Petugas Penyandang Disabilitas ..... 25
5. Forensic Policing dan Penyandang Disabilitas ..... 27
6. Akuntabilitas Sebagai Profesi ..... 31
7. Pitutur Hoegeng: Bertutur ..... 35
8. Sespim Lemdiklat Polri Siapkan Kader Pemimpin Polri Masa Depan ..... 39
9. Keutamaan Bagi Petugas Polisi Dalam Pemolisiannya ..... 65
10. Polisi Ojo Ilang Kamanungsane Keutamaan Bagi Petugas Polisi ..... 71
11. Pencegahan Kejahatan ..... 95
12. Presisi Smart Policing Yang Mengedepankan Pada Pencegahan Kejahatan ..... 99
13. Community Policing: Filosofi dan Strategy Crime Prevention ..... 103
14. Polisi dan Pemolisiannya Dalam Pespektif Pencegahan Kejahatan ..... 107
15. Model Pemolisian yang Mengedepankan Pencegahan dalam Masyarakat Majemuk Indonesia ..... 111
16. Cooling System Diera Post Truth ..... 115
17. Art Policing: Moralitas Dasar bagi Keutamaan Pemolisian ..... 119
18. Membangun Literasi: Merubah Citra Buruk Pendidikan dan Menjadi Pusat Unggulan ..... 125
19. Perspektif Sespim Lemdiklat Polri Sebagai Executive Education ..... 129
20. Mengapa Perlu Dibangun Model Smart City ..... 133
21. Registrasi dan Identifikasi : Pengemudi dan Kendaraan Bermotor ..... 143
22. Literasi Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri ..... 149
23. Reformasi Birokrasi Kepolisian ..... 153
24. 10 Keunggulan Alumni Sespim Lemdiklat Polri ..... 163
25. Pemolisian di Era Digital ..... 165
26. Etika Polisi dalam Pemolisian: Antara yang Ideal dan Aktual ..... 173
27. Democratic Policing ..... 181
28. Bhabinkamtibmas Ikon Polmas ..... 185

29. Rukun : Membangun Solidaritas dan Keteraturan Sosial ..... 187
30. Smart Policing dalam Situasi Gawat Darurat ..... 193
31. Leader Branding: Rekam Jejak dan Prestasi ..... 199
32. Keutamaan dan Kemuliaan Petugas Polisi ..... 209
33. Pemimpin dan Kepemimpinannya ..... 217
34. Manajemen Media Menjadi Fungsi Utama Dalam Pemolisian di Era Digital ..... 225
35. Pemimpin: Guru Sang Pencerah ..... 233
36. Penegakan Hukum dan Keadilan Demi Kemanusiaan dan Peradaban ..... 235
37. Apa yang Harus Dilakukan oleh Polisi dalam Menangani Lalu Lintas ..... 237
38. Model Pemikiran Teknologi Kepolisian ..... 251
39. Mengapa Keamanan itu Penting dan Mendasar? ..... 261
40. Pencegahan Kejahatan ..... 263
41. Literasi Polisi dan Pemolisiannya Membangun Peradaban ..... 265
42. Media Pilar Literasi? ..... 267
43. Pemimpin dan Kepemimpinan Ikon Kualitas Literasi dalam Institusi yang Dipimpinnya ..... 273
44. Passion Sang Pemimpin ..... 275
45. Undang Undang Kepolisian ..... 277
46. Bagimu Negeri, Passion Sespim Lemdiklat Polri ..... 281
47. Birokrasi Rendah Literasi ..... 285
48. Literasi dan Pelayanan Publik ..... 287
49. Pemimpin Wajib Urun Angan dan Turun Tangan ..... 289
50. Uji Publik Pelayanan Publik dan Kepercayaan Publik ..... 291
51. Sespim Lemdiklat Polri: Bahagia Sehat Jiwa Raga ..... 293
52. Literasi dan Anti Korupsi ..... 295
53. Tulus Hati dan Bereaksi dengan Cepat ..... 297
54. Literasi Media dan Kepemimpinan di Era Digital ..... 299
55. Ide Ide bagi Reformasi Polri; KKLN di Jepang ..... 307
56. Media Policing ..... 321
57. Mengapa Digital Leadership Harus Disiapkan? ..... 327
58. Polisi Dalam Negara yang Demokratis: Penjaga Kehidupan Pembangun Peradaban dan Pejuang Kemanusiaan? ..... 333
59. Polisi dan Pemolisiannya Menuju Indonesia Emas 2045 ..... 347
60. Polisi dan Pemolisiannya dalam Masyarakat Majemuk Indonesia ..... 357

61. Polisi: Penegak Hukum, Penegakan Hukum dan Keadilan ..... 369
62. Pandawa Dadhu: Perjudian, Supata dan Karma dari Judi Konvensional sampai Judi Online ..... 373
63. Digital Leadership: Jago Sosial? ..... 377
64. Debat Akademik dan Debat Publik Dimulai dari Lembaga Pendidikan ..... 379
65. Bambang Ekalaya dan Model Belajar Virtual ..... 385
66. Mengapa Digital Leadership dan E Policing harus Disiapkan? ..... 391
67. Pemimpin Digital ..... 393
68. "Hukum, Penegakan Hukum dan Keadilan": Era Postruth Proxy War Leadership Digital dan E Policing ..... 397
69. Sespim Lemdiklat Polri, Bermoralitas Tegas Humanis ..... 413
70. Jangan lelah menabur walau kita tidak menuai apa apa ..... 447
71. Harmoni Model Polisi dan Pemolisian Bahagia dan Dinamis ..... 453
72. Mengapa Harus Belajar Berlalu Lintas? ..... 461
73. Pendidikan: "Refleksi Institusi dan Pusat Unggulan?" ..... 469
74. "Rukun" membangun dan menata solidaritas sosial dalam bingkai Kebhinekaan ..... 473
75. In vanum lingua laborat si cor non orat ..... 481
76. Manajemen Keamanan dan Keselamatan ..... 483
77. Smart Policing: Model Grand Strategy Polri Menuju Indonesia Emas ..... 487
78. Smart Campus for Smart Policing ..... 507
79. Polisi dan Pemolisian Pilar Sistem Nasional Bagi Kedaulatan Daya Tangkal, Daya Tahan dan Daya Saing Bangsa Serta Negara ..... 511
80. Pemetaan Perlambatan Dan Analisa Dampak Kemacetan Lalu Lintas ..... 543
81. Data Security dan Protokol Data ..... 547
82. Algoritma pada Smart Campus ..... 551
83. Filsafat Ilmu Kepolisian ..... 553
84. Smart Campus dan Reformasi Pendidikan ..... 561
85. Untuk apa Ilmu Kepolisian bagi Polri? ..... 567
86. Kejahatan AI Perspektif Pemolisian ..... 577
87. Forensic Policing ..... 583
88. Pemolisian di Era Vuca ..... 587
89. Keamanan Dalam Negeri dalam Konteks Pemolisian di Era Digital ..... 595
90. Polisi Masa Depan: Futuristic and Transformative Policing ..... 601

91. O2H : Humanisme Policing ..... 611
92. Smart Policing: Implementasi Situasi Emerjensi dan Kontijensi ..... 615
93. Kajian Dan Pengembangan Sespim Lemdiklat Polri ..... 621
94. Polisi dan Pemolisiaannya yang PCBM ..... 627
95. Pantas, Benar, Layak dan Menyelamatkan bagi Polisi dalam Pemolisiannya ..... 633
96. Teknologi Kepolisian bagi Polisi dalam Pemolisiannya ..... 637
97. Ojek On Line antara Kepentingan dan Kewajiban ..... 643
98. Perlukah Ilmuwan kepolisian? ..... 651
99. Futuristik Policing : Reformasi Birokrasi, Inisiatif Anti korupsi dan Terobosan Kreatif ..... 655
100. Digital Leadership dan Pemolisian yang Futuristik ..... 661
101. Seni Kontemporer dalam Masyarakat Urban ..... 663
102. Futuristic Policing: Prediksi, Antisipasi dan Solusi ..... 669
103. Dunia Virtual Akan Mendukung Atau Sebaliknya Menjadi Petaka di Dunia Aktual ..... 677
104. Dunia Virtual dan Keteraturannya ..... 687
105. Cooling System untuk Menjaga Keteraturan Sosial di Masa Suhu Politik yang Memanas ..... 695
106. Study and Learning Menjadi Pembelajar di Era Digital ..... 697
107. Bhabinkamtibmas dan Cooling System ..... 705
108. Colling System di Era Post Truth ..... 709
109. Lemdiklat Polri Siapkan Polisi Masa Depan yang Dipercaya Publik ..... 711
110. Senjata Api Dalam Pemolisian Bagi Kemanusiaan Keteraturan Sosial dan Peradaban ..... 717
111. Komunikasi Sosial Model Pembelajaran di Lemdiklat Polri ..... 719
112. Bhabinkamtibmas Talk ..... 725
113. Alumni Lemdiklat Adalah Petugas Polisi Bajik Yang Bijak ..... 733
114. Pendidikan Virtual Bagi Pendidikan Pembentukan Kepolisian ..... 737
115. 10 Point Kampus Modern Lemdiklat Polri Berbasis Smart ..... 743
116. 10 Point Kampus Integritas, Unggul, Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga dan Modern Berbasis Smart Campus Lemdiklat Polri ..... 745
117. 10 Point Kampus Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga Lemdiklat Polri ..... 749
118. Gerakan Moral dan Gerakan Sosial dari Rumah untuk Ketahanan Pangan ..... 751
119. Literasi Polisi Dan Pemolisian nya Basis Pendidikan dan Latihan Lemdiklat Polri ..... 759

120. Lemdiklat Polri Menanamkan Kebanggaan dan Kecintaan sebagai Polisi ..... 765
121. Lemdiklat Polri Mengajarkan dan Mengembangkan Maritime Policing di Pusdik Polair ..... 769
122. Lemdiklat Polri Mengajarkan dan Mengembangkan "International Policing" di Sebasa Polri ..... 775
123. Lemdiklat Polri Mengajarkan, Melatih dan Mengembangkan "POLICE SCIENCE" di STIK PTIK ..... 779
124. Lemdiklat Polri Mengajarkan, Melatih dan Mengembangkan "EMERGENCY AND CONTIGENCY POLICING" di Pusdik Brimob ..... 789
125. Lemdiklat mengajarkan, melatih dan mengembangka "COMMUNITY POLICING AND ART POLICING" di Pusdik Binmas ..... 795
126. Lemdiklat Polri Mengajarkan,Melatih Dan Mengembangkan "SCIENTIFIC INVESTIGATION POLICING"Di Diklat Reserse ..... 801
127. Lemdiklat Polri Mengajarkan, Melatih dan Mengembangkan "ADMINISTRATION STRATEGIC POLICING" di Pusdik Administrasi ..... 813
128. Lemdiklat Polri Mengajarkan, Melatih dan Mengembangkan "SMART POLICING" di Pusdik Intel ..... 817
129. Lemdiklat Polri Mengajarkan, Melatih dan Mengembangkan "COMMUNITY POLICING dalam Model MOTHER POLICING" di Sepolwan ..... 821
130. Lemdiklat Polri Mengajarkan, Melatih dan Mengembangkan"POLICE STUDIES BASED ON COMMUNITY POLICING" di Sekolah Polisi Negara ..... 823
131. Lemdiklat Polri mengajarkan, melatih dan mengembangkan "ROAD SAFETY POLICING" di Pusdik Lantas ..... 831
132. Lemdiklat Polri Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul ..... 843
133. Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul Refleksi Perilaku Organisasi Lemdiklat Polri ..... 849

# IDE IDE BAGI REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN [1]

Spirit Polisi dalam Pemolisian yang berhati nurani menunjukan sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban dan pejuang kemanusiaan. Keutamaan Polisi dalam Pemolisiannya adalah pada :

1. Kemanusiaan.
2. Keteraturan sosial.
3. Peradaban.

Kesadaran, tanggung jawab dan disiplin serta bekerja keras dalam menyelenggarakan tugasnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat . Dengan cinta dan bangga akan pekerjaannya, setia serta loyal kepada institusi Kepolisian, terus berjuang meningkatkan kualitas kinerja, sehingga profesional, cerdas, bermoral dan modern yang bekerja dengan tulus serta bereaksi dengan cepat secara proaktif dan problem solving dalam menjaga keamanan dan rasa aman warga masyakat.

Dari keutamaan Kepolisian tersebut di atas dapat dikembangkan menjadi inspirasi reformasi birokrasi secara struktural, instrumental maupun kultural.

Reformasi adalah usaha perubahan menuju sesuatu yang lebih baik atau menjadi lebih baik atau setidaknya ada upaya peningkatan kualitas. Adapun birokrasi dapat dimaknai sebagai tata kerja institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Birokrasi dapat dimaknai pula dengan pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi dengan pembagian beban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan tugas dalam institusi untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Jadi, demikian reformasi birokrasi merupakan segala usaha atau upaya menjadikan birokrasi berfungsi secara professional mampu memberikan pelayanan yang prima dan menjadi ikon pelayanan,

1 https://polisiindonesia.id/2024/01/18/cdl-ide-ide-bagi-reformasi-birokrasi-kepolisian/

perlindungan pengayoman kepada masyarakat, juga sebagai penegak hukum dan keadilan yang tegas berwibawa serta humanis.

Selain itu juga diawaki oleh petugas (Sumber Daya Manusia) yang berkarakter, memiliki integritas,komitmen kompetensi dan keunggulan. Perilaku organisasinya benar benar menunjukan kecintaan dan kebanggaan akan institusinya dan pekerjaannya.

Implementasi penyelenggaraan tugas Kepolisian dalam pemolisannya dapat dikategorikan pada ranah birokrasi maupun masyarakat yang kualitas prima dalam memberikan pelayan kepada publik.

Pendekatan birokrasi yang profesional ada pada hubungan-hubungan yang sifatnya impersonal atau hubungan kompetensi. Birokrasi demikian disebut juga dengan birokrasi yang rasional. Artinya, konsep-konsep dan kebijakan-kebijakan bersifat tertulis. Keputusan ada pada pimpinan tetapi dia bertanggung jawab sebagai manajer atas kewenangan yang diberikan dan keputusan yang diambilnya.

Sangat berbeda bahkan bertentangan dengan birokrasi yang patrimonial, feodal, dan tidak rasional dan pendekatan personal akan menjadi andalannya.

Dalam mereformasi birokrasi, hal penting dan mendasar dilakukan adalah perubahan kultur yang dimulai dari perubahan mind set. Reformasi secara struktural, instrumental dan kultural diperlukan pembenahan dimulai konsep grand strateginya, aturannya, infrastruktur dan sistem pendukung yang berbasis IT.

Kepemimpinan yang transformatif, pembinaan Sumber Daya Manusia yang berkarkter, tata kelola lembaga pendidikannya, adanya keteladanan serta penegakkan hukum maupun aturan secara tegas dan berkeadilan. Birokrasi yang terus mereformasi akan mampu menjadi ikon bagi pelayanan publik yang prima yang berstandar pada : kecepatan, ketepatan, keakurasian, transparansi, akuntabilitas, informatis dan mudah diakses.

Hakikat reformasi birokrasi secara mendasar yang paling sulit adalah reformasi secara kultural untuk melakukan perubahan mendasar atas

nilai-nilai budaya, pedoman-pedoman, keyakinan-keyakinan, dan teori maupun konseptual yang dimilikinya, yang digunakan secara selektif prioritas dalam pemolisiannya untuk mengimplementasikan pelayanan publik secara prima.

Hal yang dapat menghambat reformasi birokrasi secara kultural salah satunya adalah diskresi birokrasi yang cenderung menjadi korupsi. Diskresi birokrasi ini ditunjukkan adanya kepemimpinan yang otoriter dalam birokrasi patrimonial dengan pendekatan personal.

Banyak kebijakan lisan dari pimpinan atau kebijakan yang tidak tersurat namun tersirat dan mau tidak mau wajib dijadikan dijadikan pedoman bagi anggota bawahanya dalam menyelenggarakan tugas pemolisiannya.

Diskresi birokrasi ini memiliki kecenderungan korup, karena acuanya adalah keputusan yang subyektif dengan pendekatan personal sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara administratif, secara hukum, scr fungsional maupun secara sosial.

Perubahan mind set tidak mungkin dilakukan dengan instan, tidak mungkin juga dengan cara-cara fisik atau kegiatan seremonial ataupun supervisial sesaat. Tidak mungkin juga dilakukan dengan suatu perintah, ” Siap Grak Berubah Grak …”. Perubahan mind set adalah kemauan, keberanian, dan kepedulian bahkan kerelaan berkorban dari segenap unsur pimpinan di semua lini karena para pemimpin akan menjadi teladan atau panutan yang menjadi agen perubahan. Karena Para pemimpin mempunyai kekuasaan dan legitimasi untuk melakukan perubahan.

Keteladanan, integritas, komitmen moral, dari para pimpinan ditujukan dalam kebijakannya yang :

1. Berani belajar dan memperbaiki kesalaham di masa lalu.
2. Siap mengatasi tuntutan, tantangan, harapan bahkan ancaman di masa kini.
3. Mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Kebijakan para pemimpin akan menjadi dasar pijakan perubahan mind set bahkan culture set. Political will pimpinan menjadikan tiang pancang untuk tautan, karena tanpanya sistem akan hancur berantakan. Aspek lain yang perlu dilakukan adalah edukasi bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan bahkan sepanjang hayat untuk menjadikan birokrasi yang pembelajar. Pada tahap ini semua level pimpinan wajib mengedukasi bawahannya, mampu mentor yang mampu menjembatani memotivasi memberdayakan bahkan membantu memberikan berbagai solusi.

Perubahan nilai-nilai budaya yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan penegakkan hukum dan disiplin harus dilakukan. Tentu ini tidak dilakukan dengan cara-cara otoriter tetapi bagaimana kesadaran dapat dibangun dan bagaimana kepekaan dan tanggung jawab diwujudkan. Yang tidak kalah penting adalah membangun karakter institusi yang ditinjukan dari profesionalisme, keunggulan-keunggulan, maupun sikap moralitas.

Kesadaran merupakan tingkatan moral tertinggi yang dapat mendorong pd kepekaan kepedulian bahkan empati serta belarasa yang menjadikan humanis dalam mengangkat harkat dan martabat manusia.

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan legitimasi dari berbagai pihak merupakan soft power yang dapat dijadikan landasan dan langkah awalnya atau modal dasar reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi, pemahamannya dapat dimaknai sebagai upaya menuju birokrasi yang rasional, modern, yang berdasarkan kompetensi, profesional, cerdas, modern, inovatif kreatif , transparan, akuntabel dan proaktif serta problem solving.

Reformasi birokrasi Kepolisian dapat dipahami sebagai upaya Kepolisian menjadi Polisi sipil yang profesional, cerdas, kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, modern, proaktif, problem solving, kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta seantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di dalam masyarakat yang modern dan demokratis sbg ikon peradaban, kemanusiaan. Reformasi secara struktural, instrumental dan kultural.

Dalam mereformasi kepolisian ada 3 pola dasar yang meliputi upaya untuk :

1. Belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu.

   Yang harus berani ditunjukan apa kesalahan-kesalahan masa lalu dan tentu saja bukan karena subyektifitas serta sifat defense yang berlebihan. Tentu saja bukan untuk menyalahkam atau mencari kesalahan tetapi untuk memperbaiki kesalahan baik di bidang pembinaan maupun bidang operasional. Termasuk konsep-konsep dan peraturan-peraturan maupun pedoman-pedoman yang telah ada. Selain kesalahan tentu ada potensi-potensi yang bisa mendukung yang bisa diberdayakan atau direvitalisasi.

2. Siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masa kini.

   Reformasi birokrasi kepolisian mewujudkan harapan dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat di masa kini. Yang harus cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah. Untuk mencapainya tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan tidak mungkin terwujud.

3. Menyiapkan masa depan yang lebih baik.

   Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional. Sebagai contoh dalam pembinaan SDM baik dari rekrutmen sampai pengakhiran dinas berdasarkan standar kompetensi atau produktifitas, yang transparan, akuntabel.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka dalam reformasi birokrasi kepolisian, yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Political will yang visioner dan mendukung proses reformasi birokrasi,
2. Adanya kepemimpinan yangvtrqnsformatif,
3. Pembqngunan infrastruktur yang berbasis IT,
4. Menyiapkan tim transformasi sebagai tim back up dan tim monitoring serta evaluasi,

5. Menyiapkan sdm yang berkarakter sebagai penjaga kehidupan pembangun peradaban,
6. Memiliki program unggulan mencapai standar dan kualitas tinggi (world class),
7. Menyiapkan pilot project sebagai model percontohan,
8. Monitoring dan evaluasi dan melakukan evaluasi,
9. Mengembangkan apa yang sudah dicanangkan pada wilayah-wilayah lainnya.

Implementasi reformasi birokrasi kepolisian dapat dijabarkan dalam 8 program yang menckup :

1. Birokrasi mampu menjadi institusii yang tepat fungsi, dan tepat ukuran (right size).
2. Tatalaksana (sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance).
3. Peraturan/ UU (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih).
4. SDM (sdm beritegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, dan sejahtera).
5. Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN).
6. Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi).
7. Pelayanan publik (pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).
8. Budaya kerja (birokrasi dengaan integritas dan kinerja tinggi).

8 hal tersebut merupakan yang diprioritaskan pada :

1. SDM (kompetensi),
2. Instrument dan metode,
3. Kelembagaan (struktur dan kultur).

Implementasinya dijabarkan oleh masing-masing satker dan sub satker dari tingkat Mabes sampai dengan Polres.

Mereformasi birokrasi kepolisian secara prinsip bisa sama namun implementasinya disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaanya, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing yang dapat dikembangkan dalam membangun kepolisian sebagai polisi sipil dalam masyarakat yang modern dan demokratis ( membangun supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan dan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat).

Yang ditunjukan dari kinerja Polri yang : profesional, cerdas, transparan dan akuntabel, cepat, tepat, akurat, informatif, mudah di akses, proaktif, problem solving yang mengutamakan pada tindakan pencegahan.

Dengan demikian reformasi birokrasi kepolisian adalah membangun sistem pemolisian yang :

1. Berbasis pada supremasi hukum
2. Pemolisiannya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, secara hukum, secara fungsional dan kemanfaatanya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat maupun secara moral karena tugas-tugasnya adalah untuk memanusiakan manusia dalam arti mengangkat harkat, martabat manusia, yang dibangun di atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Walaupun sebagai polisi yang modern dan handal perlu dibangun model ” Smart Policing ” yang mampu mengharmonikan antara conventional policing, electronic policing maupun forensic policing.

Penjabaran konsep-konsep tersebut perlu dilakukan pada tataran kepemimpinan, administrasi, operasional, dan peningkatan kapasitas; mulai dari tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek dan sub-sektor, dan bahkan sampai Babinkamtibmas.

Model pemolisian yang sekarang ini banyak diadopsi dalam kepolisian-kepolisian yang modern dan demokratis adalah community policing. Dalam penyelenggaraaan tugas Polri dikenal sebagai Polisi Masyarakat (Polmas). Pemolisian model e-policing dapat dipahami

sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian baik pada tingkat manajemen dan operasional, dengan atau tanpa upaya paksa, dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (kamtibmas). Pada era digital reformasi birokrasi ini, kepolisian sudah membangun sistem-sistem dan infrastruktur modern pemolisian secara online (e-policing).

Selain sistem, reformasi birokrasi kepolisian juga membangun ikon atau simbol-simbol bagi para petugasnya: simbol keahlian (profesionalisme), kemanusiaan, aparat yang berkarakter, dan simbol perubahan. Melaksanakan simbol-simbol itu merupakan wujud dari keunggulan dan keunikan Polri yang membawa manfaat signifikan bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Perwujudan ikon atau simbol itu akan menjadi kebanggaan yang sekaligus memecahkan beberapa masalah yang internal maupun eksternal. Jika para petugasnya mampu menjadi ikon, maka masalah yang dihadapi secara internal dapat diminimalisir atau bahkan nyaris tidak ada lagi.

**E Policing mendukung program E Goverment dalam membangun smart city**

Smart city saat ini memang sedang menjadi trend di Indonesia. Bukan sekedar sebagai gengsi, melainkan sebuah langkah dalam memajukan kota di suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Smart city dapat diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif.

Sedangkan aspek utama pembangun smart city menurut Frost dan Sullivan pada tahun 2014 yaitu :

1. Smart Governance,
2. Smart Technology,
3. Smart Infrastructure,
4. Smart Healthcare,
5. Smart Mobility,

5. Smart Building,

6. Smart Energy Dan

7. Smart Citizen.

Tujuan dari smart city itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Perbankan Elekronik / E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.

Adapun persyaratan pelayanan prima antara lain: 1. aplikasi mudah digunakan; 2. layanan dapat dijangkau dari mana saja; 3. murah; 4. dapat dipercaya; dan 5. dapat diandalkan (reliable).

E Policing adalah pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi.

Bisa juga dipahami e-policing sebagai model pemolisian yang membawa community policing pada sistem online. Dengan demikian E-Policing ini merupakan model pemolisian di era digital yang berupaya menerobos sekat-sekat ruang dan waktu sehingga pelayanan-pelayanan kepolisian dapat terselenggara dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel informatf dan mudah diakses.

Sistem ini bisa menjadi strategi inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan creative break through. Dikatakan sebagai inisiatif antikorupsi karena dengan sistem-sistem online dapat meminimalisir bertemunya person to person. Dalam pelayanan-pelayanan kepolisian di bidang administrasi contohnya sudah dapat digantikan secara online melalui e-banking, atau melalui ERI (Electronic Registration and Identification).

E-Policing bukan dimaksudkan untuk menghapus cara-cara manual yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekatan dan persahabatan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Sebaliknya, sistem ini justru untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas kinerja sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.

E-Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbasis elektronik yang berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar fungsi/ bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

Pemolisian tersebut dapat dikatakan memenuhi standar pelayanan prima yang berarti: Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Akuntabel, Informatif dan mudah diakses. Pelayanan prima dapat diwujudkan melalui dukungan SDM yang berkarakter, pemimpin-pemimpin yang transformatif, sistem-sistem yang berbasis IT, dan melalui program-program yang unggul dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman bahkan sampai dengan penegakkan hukumnya.

Pembahasan E-Policing dapat dikategorikan dalam konteks : 1. Kepemimpinan, 2. Administrasi, 3. Operasional, 4. Capacity Building (pembangunan kapasitas bagi institusi).

Smart city bukanlah sebagai tujuan utama melainkan meningkatnya kualitas hidup masyarakatlah tujuanya. Kota yang humanis aman nyaman asri termasuk lalu lintasnya yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sejalan dengan hal tersebut program IT for road safety merupakan langkah mendasar untuk memetakan, membuat model, penanganan

secara holistik atau sistemik, pendekatan berbasis pada scientific dan teknologi, terbangunya big data dalam back office. yang diinput melalui berbagai aplikasi dan juga akan dikaji melalui riset secara ilmiah.

Hal-hal yang dilakukan inputing data adalah membuat kategori mengidentifikasi akar masalah penyebab dari setiap permasalahan. Mengimplementasikan e policing berbasis smart management yaitu membangun kinerja profesional yang berbasis SOP yang mencakup:

a) Job Description dan Job Analysis masing-masing bagian.

b) Standardisasi keberhasilan tugas.

c) Sistem penilaian kinerja.

d) Sistem reward and punishment.

e) Etika kerja ( apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan/do dan don't) Point a sampai dengan e inilah yang tercakup pada smart management.

Implementasi e policing akan diawaki petugas-petugas cyber cops yang siap 1×24 jam dan 7 hari seminggu tanpa putus memberikan pelayanan virtual dan aktual. Petugas-petugas cyber cops akan bertugas pada back office untuk inputing data, menganalisa dan menghasilkan produk-produk untuk prediksi, antisipasi dan solusi yang dinamis bahkan sell on time dan real time.

Menjadi Polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern merupakan proses panjang yang setidaknya dimulai dari pemikiran-pemikiran visioner yang luar biasa atau berbeda dengan pemikiran-pemikiran pada umumnya dalam birokrasi yang rasional (berdasar pada kompetensi), kepemimpinan yang visioner, transformasional dan problem solving dalam membangun model pemolisian di era digital dengan berbasis pada sistem online (Electronic Policing).

Selain itu juga diawaki SDM yang profesional yang memiliki attitude yang baik dan sebagai pekerja keras dan pembelajar serta mind set sebagai polisi ideal (penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus). Hal ini ditunjukkan pada birokrasi yang mempunyai Tata Kelola Lembaga Prima ( National Class Institution)

yang memiliki program-program unggulan yang inspiratif, inovatif, kreatif serta dinamis untuk senantiasa mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, kebutuhan tantangan, ancaman serta harapan masa kini, mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Dukungan infrastuktur dengan teknologi yang modern masih dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Yang perlu menjadi perhatian juga dalam penganggaran yang terus diperbaiki nilai sejak perencanaan, monitor dan evaluasi untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian.

Polisi sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas adalah simbol peradaban pelindung pengayom dann pelayan mayarakat. Yang mampu memberikan pelayanan prima dan ikon penjaga kehidupan Pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

# POLISI DAN PEMOLISIAN YANG HARMONI DINAMIS DAN BERBAGI KEBAHAGIAAN [2]

Nglaras dapat dimaknai adanya yang selaras (Harmoni) di sela sela kehidupan. Nglaras itu sederhana yaitu ada rasa bahagia walau serba sederhana dan apa adanya.

Kita dapat menganalogikan tubuh kita yang harmoni dalam sistem sistemnya. Ada yang tidak beres sedikit saja rasanya tidak nyaman. Ada sesuatu yang nyelip di gigi rasa tidak nyaman bisa ke mana mana gangguannya.

Oleh karena itu, Sespim Lemdiklat Polri dalam membimbing dan menyiapkan para calon pemimpin di masa depan diperlukan adanya harmoni dalam proses transformasinya.

Pemimpin dapat dianalogikan sebagai dirigen dalam suatu orkestra yang mampu mengharmonikan para pemain musik yang berbeda untuk memainkan alunan lagu dengan nada yang indah.

Pemimpin bukan segala galanya, namun dari kebijakan pemimpin bisa melakukakan segala galanya, maka moralitas, pengendalian diri sebagai

keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban menjadi penting bagi pendidikan calon pemimpin.

Sekolah pemimpin sejatinya merupakan sharing of happiness. Pendidikan dengan pendekatan dari hati ke hati sejatinya untuk berbagi dalam kebahagiaan.

Anthony de Mello spiritualis dari India mengatakan : kebahagian adalah buah sesuatu, bukan sesuatu.

2 https://polisiindonesia.id/2024/01/23/cdl-polisi-dan-pemolisian-yang-harmoni-dinamis-dan-berbagi-kebahagiaan/

Rabindranath Tagore mengatakan : di dalam mimpi aku mendapatkan bahwa hidup adalah kebahagian. Tatkala aku bangun ak mendapatkan bahwa hidup itu ternyata kewajiban. Dan tatkala aku memenuhi kewajiban aku menemukan kebahagiaan.

Ki Ageng Suryomentaram spiritualis atau bisa dikatakan filsuf yangi mencari dan menemukan " begja" atau hidup bahagia. Bahagia menurut Ki Ageng Suryomentaram sejatinya adalah hal yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Bahagia itu sederhana dan dalam kesederhanaan ada kebahagiaan.

Seorang Pemimpin dalam kepemimpinannya salah satunya mampu melihat potensi potensi kebahagiaan di dalam institusi yang dipimpinnya maupun dslam masyarakat yang dilayaninya.

Sekalipun dalam kondisi serba terbatas dan sederhana namun tatkala hati dan jiwa bahagia di situ ada energi positif.

Sekolah bagi para calon pemimpin merupakan sekolah moralitas, pengendalian diri untuk mampu menemukan kebahagiaan sejatinya. Mulai dari religi, seni, tradisi, hobi, komuniti bahkan teknologi dan sebagainya.

Karena jika kita bicara Bahagia, itu harus dimulai dari diri sendiri yang mampu melihat sisi kebaikan dan mensyukurinya.

Hakekat seorang pemimpin dengan kepemimpinannya adalah berbagi kebahagiaan, karena dengan hidup bahagia akan ada kepekaan, kepedulian dan bela rasa bagi kemanusiaan, semakin manusiawinya manusia.

Ketulusan, kecintaan dan kebanggaan diajarkan dilatihkan secara berkesinambungan. Bukan karena kepentingan yang sarat tipu daya topeng rekayasa.

Hidup yang bahagia tatkala dalam hidupnya mampu memahami, mensyukuri walaupun dalam berbagai tantangan bahkan kesulitan kehidupan. Kebahagiaan itu apa adanya dan menikmati serta mampu memberdayakan apa yang bisa serta dari apa yang ada.

Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik pula. Di situlah seni dalam hidup, walau kadang dianggap biasa biasa dan seakan semua orang bisa. Seni itu salah satu cara membuat orang bisa bahagia.

Pemimpin dengan kebahagiaannya berbagi kebahagiaan menuju hidup bahagia sesungguhnya menuju pada jati dirinya. Sederhana dan mudah dilakukan dengan kesadaran yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Bahagia sejati tidak menyusahkan apalagi mengeksploitasi dari kesusahan orang lain. Kebahagiaan yang tercipta di atas penderitaan orang lain bukanlah kebahagiaan melainkan penindasan. Kebahagiaan akan sirna tatkala hidup diisi dengan sikap cengeng yang terus mengeluh dan selalu minta dikasihani. Seni yang membahagiakan tatkala hidupnya mampu memberi ruang bernagi bagi orang lain bisa ikut menikmati. Tentu saja itu semua penuh dengan ketulusan yang apa adanya tanpa mengada ada.

Keteraturan sosial yang dikaitkan dalam keamanan dalam negeri untuk mendukung produktifitas agar masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Dalam konteks melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum maka keamanan dan rasa aman wujud harmoni dalam kebahagiaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang merupakan ikon peradaban. Hakekat Keamanan Dalam Negeri :

1. Adanya Keamanan dan Rasa Aman warga masyarakat
2. Harmoni dalam Kebhinekaan
3. Tegak dan adanya Budaya Patuh Hukum
4. Pemberdayaan Sumber Daya bagi Keadilan Sosial
5. Penanganan Konflik Secara Beradab
6. Semakin Manusiawinya Manusia
7. Terwujud dan Terpelihara Keteraturan Sosial
8. Transparan dan Akuntabel
9. Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
10. Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada publik

berstandar Prima

Passion Polisi dalam Pemolisiannya menunjukan :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan

2. Polisi sebagai pembangun peradaban

3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan

4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan

5. Pemolisiannya menunjukkan tingkat dan kuakitas : profesional, cerdas bermoral dan modern yang dilandasi : kesadaran, tangagung jawab dan disiplin

6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing

7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum

8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM

9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial

10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Polisi dan pemolisiannya dalam pespektif perilaku organisasi sejatinya membuat harmoni dan berbagi kebahagiaan dengan terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman.

Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial. Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktiftas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan, hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

Ancaman hambatan dan gangguan harmoni dan kebahagiaan dalam sosial kemasyarakatan yang berakibat pada terganggunya aktivitas produksi masyarakat karena adanya:

1. Premanisme

Premanisme tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, pendekatan personal, lemahnya penegakkan hukum

2. Berbagai bentuk kejahatan

Kejahatan konvensional, kejahatan trans national, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika

3. Berbagai bentuk pelanggaran

Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal

4. Faktor alam dan lingkungan

Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya

5. Faktor sumber daya manusia

Tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia sangat mendasar bagi terwujudnya keteraturan sosial.

6. Faktor politik dan kebijakan publik

Politik yang tanpa hati nurani kebijakan publiknya kontra produktif. Lebih pada kepentingan diri dan kroninya.

7. Perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi

Perubahan begitu cepat menembus batas ruang dan waktu. Media dan sistem komunikasi transportasi saling adu kekuatan. Muncul era post truth, hoax, serangan siber, dsb.

8. Corak masyarakat dan kebudayaannya

Masyarakat yang majemuk akan mengagungkan primordial. Dari

situlah legitimasi dan solidaritas dibangun dsn mudah diikuti walau kontraproduktif, tidak rasional dan sarat emosional. Tatkala primordial dijadikan alat maka kebencian akan menjadi penyulut konflik sosial bagkan perang saudara.

9. Sistem pelayanan publik

Pelayanan kepada publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan tatkala dalam birokrasi yang sarat dengan KKN maka akan kontra produktif dan terjadi palak memalak. Kekuatan dan kekuasaan untuk mendominasi sumberdaya dengan cara personal in group out group.

10. Sistem ekonomi, industri dan perdagangan.

Point 1 sd 9 semua bermuara pada point 10.

Polisi dan pemolisiannya setidaknya pada tingkat manajemen dan operasionalnya ditujukan untuk mengatasi 10 point di atas. Pola pola pemolisian dapat secara filosofis dan strategis megacu model community policing.

Secara operasionalnya dapat dikategorikann berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah.

Di era digital dan era pandemi covid 19 model pemolisian dapat dikembangan melalui smart policing agar ada harmoni antara : conventional policing, electronic policing dan forensic policing.

Sietem sistem mendasar pada pemolisian dapat dilihat dari :

1. Ranah Birokrasi yang dikategorikan :

a. Kepemimpinan

b. Administrasi

c. Opersional

d. Capacity

2. Ranah Masyarakat yang dapat dilihat dari :

a. Kemitraan

b. Pelayanan publik

c. Pemecahan masalah

d. Jejaring atau net working

Perilaku organisasi kepolisian dibangun secara profesional, cerdas, bermoral dan modern. Dengan pendekatan yang impersonal berbasis kompetensi

Walau penuh : keterbatasan, tekanan dan tantangan bahkan ancaman sekalipun, tatkala suasana kerja harmoni dan bahagia maka akan nyaman, jiwa tenteram serta penuh harapan maka : 1. Kinerja akan terus meningkat kualitasnya.

2. Menurunnya tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Manusia bukan robot. Robot bisa saja lebih canggih dalam bekerja namun tak memiliki hati, tidak ada kebijaksanaan yang memberi harapan sebagai motivasi akan meningkatkan kualitas kinerja.

Perubahan suatu keniscayaan. Tertinggal dari perubahan akan ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan jaman. Mengimbangi perubahan akan lelah terengah engah. Mampu melampaui perubahan baru mampu mengatasi dan mengendalikan perubahan dan dampak dampaknya.

Perubahan begitu cepat. Tatkala terlambat atau tidak tepat maka cepat atau lambat pasti sekarat. Dalam membangun institusi yang profesional cerdas bermoral dan modern diperlukan adanya budaya organisasi yang dilandasi nilai nilai inti yang berbasis democratic policing yaitu :

1. Supremasi hukum

2. Jaminan dan perlindungan HAM

3. Transparansi

4. Akuntabilitas

5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

6. Pembatasan dan pengawasan kewenangan

Democrtic policing dalam implementasinya menunjukan polisi dan pemolisiannya demi kemanusiaan, membangun dan memelihara keteraturan sosial dan peradaban. Hal tersebut dapat ditunjukkan adanya :

1. Kepemimpinan yang transformatif

2. SDM dengan kompetensi yang ahli kreatifitas dan visioner,

3. Dinamis dengan penuh kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya.

4. Didukung dengan modernisasi insfrastruktur dan sistem sistemnya

5. Tim transformasi sebagai tim back up

6. Program program unggulan yang menjadi fokus dalam operasional yang bersifat rutin, khusus, maupun kontijensi

7. Penerapan pada pilot project

8. Sistem monitoring dan evaluasi

9. Pola pola pengembangan

Polisi dan pemolisiannya yang harmoni, dinamis dan membagikan kebahagiaan dalam perspektif perilaku organisasi dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif gaya atau model pemolisiannya. Dari berbasis wilayah, berbasis fungsi maupun berbasis dampak masalah.

# PENYANDANG DISABILITAS, POLISI DAN PEMOLISIANNYA [3]

Disrupsi selain cepat juga berdampak pada berbagai produktifitas dalam kehidupan juga pada keteraturan sosial. Tatkala pengendalian atau penanganan atas disrupsi polisi dalam pemolisiannya dituntut mampu mengatasi berbagai dampak yang kontra produktif dan meganggu keteraturan sosial maupun masalah kemanusiaan.

Di sinilah perlu ada pemikiran bagaimana polisi dan pemolisiannya mampu menangani atau mengatasi disrupsi secara proaktif dan problem solving.

Pada era digital atau revolusi industri 4.0 yang juga menuju society 5.0 model pemolisian selain profesional cerdas bermoral dan modern adalah dapat fungsional atau smart, namun tetap memberikan jaminan dan perlindungan HAM.

Polisi dalam pemolisiannya dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagai wujud dalam memberikan jaminan dan perlindungan ham.

Dalam konteks tersebut model smart policing memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat menjadi petugas polisi.

Smart policing merupakan model harmoni antara conventional policing, electronic policing dan forensic policing yang doharapkan mampu mengatasi berbagai masalah gangguan keteraturan sosial (Kamtibmas) yang konvensional, masalah masalah siber atau virtual di era digital juga masalah masalah forensik di era kenormalan baru.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka model smart policing diimplementasikan dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah untuk memberikan pelayanan kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun

3 https://transindonesia.co/2024/01/24/penyandang-disabilitas-polisi-dan-pemolisiannya/
https://polisiindonesia.id/2024/01/23/cdl-penyandang-disabilitas-polisi-dan-pemolisiannya/

kontijensi. Yang berkaitan dengan pelayanan:

1. Keamanan
2. Keselamatan
3. Hukum
4. Administrasi
5. Informasi
6. Kemanusiaan

Smart policing dalam implementasinya secara conventional policing, e policing dan forensic policing konsepnya berbasis otak otot dan hatinurani (menurut Prof Satjipto Rahardjo O2H) yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Conventional policing

Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas pelindung pengayom yang dilakukan dengan mengandalkan fisik, crime fighter, law inforcement, reactive policing seperti cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP (tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran secara fisik konvensional yang memerlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya. Penanganan berbagai masalah dengan reaksi cepat, penangan konflik sosial yang melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik lapangan, premanisme jalanan maupun blue collar crime, perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb. Penanganan pelayanan kepolisianyang berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi

dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan2 dan kompetensi conventional policing.

2. Electronic Policing (e-policing)

Pemolisian secara elektronik merupakan pemolisian yang saling terhubung atau on line yang mampu memberikan pelayanan secara virtual dan mampu mendukung pemolisian yang konvensional. Landasan dasar E policing adalah melalui back office ( sebagai operation room atau pusat k3i ( komunikasi, koordinasi, komando pemgendalian dan informasi) sebagai big data system. Yang di dukung aplication berbasis Artificial intellegence ( AI) juga networking yang berbasis internet of things (IoT). Aplikasi berbasis AI diharapkan mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda, kendaraan, lingkungan hingga aktifititas. Melalui AI dapat dikonstruksi menjadi model untuk dapat menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma tersebut berfungsi sebagai prediksi, antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, any time dan on time. Algoritma menjadi landasan atau acuan indeks atau setidaknya sebagai potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial. Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber (cyber cops) yang mengawaki e policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untuk menghasilkan algoritma. Memahami prinsip dasar  era digital dan sistem IT dan proses pembangunan big data yang terintegrasi dalam one stop service system. Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian early warning dan problem solving yang prediktive antisipative serta solutive. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management maupum smart operation agar pemolisian secara aktual maupun virtual ada suatu sistem yang sejalan saling menguatkan atau saling mendukung. Permasalahan perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakkan, bahkan cyber crime, dsb, akan terus berkembang polisi siber yang profesional mampu menganalisa dan menemukan potensi kejahatan dan melakukan upaya upaya pencegahan kejahatan. Kejahatan white collar crime tentu dilakukan secara teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya orang yang memiliki kompetensi. Dengan demikian cyber security menjadi sangat penting dan memdasar.

3. Forensik Policing

Di era disrupsi perkembangan masalah nuklir biolgi maupun kimia bahkan fisika (nubika), masalah sosialpun dapat di rancang menjadi suatu masalah sosial yang menghambat, merusak bahkan matikan hidup dan kehidupan masyarakat. Era post truth melalui media akan dijadikan senjata melalui hoax yang digunakan untuk mengobok obok opini publik yang kontra produktif. Forensik policing memerlukan kompetensi dan pengetahuan dasar tentang nubika maupun sosial budaya. Dampak atas penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika maupun penyalahgunaan sosial budaya oleh kaum penjahat dapatmenteror secara masaal dan berdampak luas yang dpat menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi para petugas forensic policing secara mendasar berkaitan dengan teoritikal, konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun masalah sosial yang mendukung petugas polisi dalam pemolisian siber maupun pemolisian yang konvensional. Pelayanan secara forensik dapat dikembangkan pada pengamanan pada sector : private, industrial, public, ecological maupun cyber.

Dalam smart policing dukungan penelitian dan pengembangan serta pembangunan laboratorium menjadi sangat penting dan mendasar. Penelitian merupakan bagian penting mendukung smart policing konseptual maupun teoritikal dengan berbagai pendekatan. Model smart policing dapat dibangun dan terus ditumbuhkembangkan secara: teoritikal, konseptual, fisik, kompetensi, scientific, secara infrastruktur dan sistem pendukungnya juga kurikulum dan pengajarannya.

Para penyandang disabilitas dengan berbagai kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi petugas kepolisian pada bidang bidang Electronic policing maupun forensic policing.

# ROAD SAFETY POLICING DAN PETUGAS PENYANDANG DISABILITAS [4]

Program program kegiatan road safety policing yang dapat diawaki petugas polisi penyandang disabilitas dalam menangani lalu lintas di era digital antara lain  program program:

1. Road safety policing model pemolisian untuk menangani lalu lintas dalam mencapai tujuan road safety (lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar)

2. It for road safety / smart city model yang dapat dijabarkan dalam :

a. TMC (traffic management centre)

b. SSC (safety and security centre)

c. ERI (electronic registration and identificatiob)

d. SDC (safety driving centre)

e. INTAN (intellegent traffaic analysis)

f. ETLE (electronic traffic law enforcement)

f. TAR (traffic attitude record)

g. DMPS (de merit point system)

h. SMART management

i. IRSMS  (integrated road safety management system) / sistem data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas

3. Literacy road safety

4. Road safety coaching

4 https://www.facebook.com/share/p/VuL3ykitNL2jw3Wg/?mibextid=qi2Omg
https://transindonesia.co/2024/01/28/road-safety-policing-dan-petugas-penyandang-disabilitas/
https://polisiindonesia.id/2024/01/28/cdl-road-safety-policing-dan-petugas-penyandang-disabilitas/

5. Intellegent road safety media management (IRSMM)
6. Algoritma road safety
7. Indexs road safety
8. Road safety for tourism
9. Road safety border
10. Road safety high way police
11. Big data
12. One stop service system
13. Cyber cops
14. Road safety research and development
15. Safety driving/ riding centre)
16. Sistem pengamanan kota
17. Emergency policing
18. Tarc (traffic accident research centre)
19. Rsrd (road safety research and development)
20. Road safety expo.

# FORENSIC POLICING DAN PENYANDANG DISABILITAS [5]

Pemolisian forensik merupakan bagian membangun Polisi super/ Super cops yaitu petugas Polisi yang pemolisiannya berbasis kompetensi yang berkualitas tinggi agar mampu memberikan pelayanan kepada publik secara prima.

Di era digital Polisi super ini mampu bekerja secara aktual, secara virtual maupun secara forensik. Secara aktual dapat dikategorikan dalam hal pemolisian yang konvensional lebih mengandalkan pekerjaan secara manual atau bertemu face to face atau pekerjaan pekerjaan yang mengandalkan fisik. Pemolisian secara virtual dapat dikategorikan sebagai electronik Policing atau pemolisian secara elektronik yang berbasis pada back office, aplication (Dengan Artificial Intellegence) dan net work ( berbasis internet of thing) untuk big data system dan one stop service system.

Pemolisian forensik dalam konteks ini bisa saja membangun pola pemolisiannya maupun penyiapan petugas kepolisian yang dapat diawaki petugas penyandang disabilitas.

Polisi super dalam konteks aktual, virtual dan forensik merupakan basis bagi polisi dan pemolisiannya karena dalam era digital sekalipun cara aktual masih diperlukan dan kemampuan dasar pencegahan kejahatan konvensional diperlukan polisi tangguh. Pemolisian virtual mapun forensik diperlukan otak atau kemampuan secara intelejensia tinggi untuk mampu menghadapi kejahatan siber maupun kejahatan biologi kimia maupun nuklir maupun yang didesain secara sosial. Pelemahan atas pertahanan suatu bangsa dapat dimulai menggerus dari keamanan dan rasa aman.

Masalah nuklir biologi kimia dan fisika (Nubika) pun sosial menjadi trend kejahatan baru yang dapat melumpuhkan produktifitas masyarakat dan memicu terjadinya konflik sosial yang berdampak luas.

5 https://polisiindonesia.id/2024/01/25/cdl-forensic-policing-dan-penyandang-disabilitas/

Masalah pandemi Covid 19 misalnya, melanda hampir di seluruh dunia, mampu melemahkan bahkan mematikan secara fisik maupun psikis yang tentu saja kontra produktif. Kekuatan Polisi super ini tentu juga dituntut memiliki spirit sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Membangun Polisi super dapat dari penyandang disabilitas yang memiliki komoetensi di bidang electronic policing maupun forensic policing merupakan energi besar bagi polisi dan pemolisiannya.

Hal itu dapat dimulai dari proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya. Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo yang memikirkan bagaimana seorang petugas Polisi memiliki otak, otot dan hati nurani sebagai Bhayangkara Sejati (Penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan sebagai pejuang kemanusiaan).

Proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, proses pemeliharaan dan perawatan hingga proses pengakhiran dinasoses pemeliharaan dan perawatan hingga pengakhiran dinas.

Pada konteks Polisi super penyandang disabilitas tetap dapat dibangun dengan pendekatan secara O2H (Otak Otot dan Hati Nuraninya).

Pemolisian di era digital para penyandang disabilitas dengan kompetensinya di bidang E policing atau pemolisian yang berbasis elektronik dapat menjadi petugas dalam sistem big data yang menjadi bagian dasar one stop service, yang mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik). Di samping sebagai petugas dalam E Policing juga dapat menjadi petugas dalam forensic Policing.

Forensic policing adalah pemolisian yang berbasis pada ilmu pengetahuan secara makro maupun mikro sebagai pemolisian di era new normal yang berkaitan dengan masalah nuklir, biologi, kimia, fisika (Nubika) maupun ilmu ilmu lainnya. Penanganan gangguan keteraturan sosial yang menganggu atau menghambat bahkan merusak produktifitas akibat Nubika maupun masalah sosial perlu penanganan secara profesional yang tidak sebatas kulit kulitnya melainkan sampai tingkat yang paling mendasar maupun pengembangan lainnya.

Dampak dari Nubika maupun masalah sosial yang by design sangat membahayakan dan dapat berdampak luas. Kompetensi petugas kepolisian bidang forensik perlu dibangun berbasis forensic policing. Pemolisian forensik (forensic policing) memang sudah dilakukan namun perlu ditumbuh kembangkan secara komprehensif mulai dari rekrutmen pendidikan penggunaan hingga pengakhiran dinasnya.

Kepolisian sudah memiliki satuan tugas identifikasi, satuan tugas nubika, laboratorium forensik, laboratorium sosial maupun penelitian dan pengembangan.

Manusia sebagai mahkluk sosial diputus secara sosial karena adanya pandemi Covid 19 yang mematikan manusia dengan tingkat penularannya yang tinggi dan untuk menghambat penularannya diperlukan physical distancing bahkan social distancing.

Tatkala kita teliti lebih mendalam Covid 19 merupakan virus yang menyebar dengan begitu cepat dan dapat menimbulkan kematian perlu penanganan secara tepat di sinilah fungsi Forensic policing di perlukan. Di era new normal atau kenormalan baru berbagai cara baik teknologi maupun sosial telah dilakukan secara profesional dan ditambah standar protokol kesehatan akan lebih cepat mengatasi tatkala forensic policing sudah menjadi model pemolisian.

Model pemolisian forensik saatnya ditumbuh kembangkan dalam memberikan pelayanan keamanan dan keselamatan bahkan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan kejahatan yang didesain maupun dampak dari rekayasa sosial.

Kejahatan maupun gangguan keteraturan sosial di era kenormalan baru dapat dijadikan alat atau sarana rekayasa sosial untuk menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas, maka polisi dan pemolisiannya yang berbasis forensic prolicing tetap dapat memberikan pelayanan secara prima.

Penyiapan SDM yang bersumber dari para penyandang disabilitas yang kompeten akan mengawakinya.Peralatan pendukung (Laboratorium forensik, laboratorium sosial dan sebagainya). Program program riset atau penelitian bagi pencegahan penanganan hingga rehabilitasi dampak rekayasa Nubika maupun sosial dapat terus dibangun dan dikembangkan.

Tim transformasi sebagai support team dapat mendukung secara konseptual maupun manajerial. Model model implementasi dalam suatu pilot project yang penyelenggaraannya terus dimonitor dan dievaluasi serta dapat dibuat model pola pengembangannya disesuaikan dengan model model untuk prediksi antisipasi serta solusinya.

# AKUNTABILITAS SEBAGAI PROFESI [6]

Akuntabilitas suatu profesi setidaknya mencakup :

1. Moral (Niat baik dan benar).
2. Hukum (Secara Hukum benar/tidak melanggar).
3. Administrasi (Secara Administrasi benar/tidak melanggar).
4. Fungsional (Sesuai SOP).
5. Berdampak penguatan institusi.
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi.
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima.
8. Visioner, proaktif dan problem solving.
9. Dinamis dan dialogis.
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan suatu fungsi kontrol atas berbagai sistem untuk mencapai tujuan.

Sistem bukan tujuan melainkan sarana atau alat mencapai tujuan. Seringkali kita memuja atau mengutamakan alat atau sarana dan mengabaikan tujuan. Sistem merupakan suatu sarana dalam mendukung pencapaian tujuan.

Tujuan merupakan hakekat dari sesuatu atas proses yang menjadi puncak pencapaian atas proses tersebut. Sistem sosial misalnya sistem sistem yang ada dalam kehidupan sosial baik itu politik ekonomi seni budaya hukum teknologi dll merupakan proses atau sarana mencapai keadilan sosial maupun kesejahteraan sosial atau peradaban yang mampu membuat kehidupan sosial semakin memanusiakan manusia.

6 https://polisiindonesia.id/2024/01/27/cdl-akuntabilitas-sebagai-profesi/

Manusia menjadi fokus utama. Demi keamanan misalnya maka manusia dan kemanusiaannya bisa saja diabaikan bahkan dikorbankan yang penting aman walaupun tanpa adanya rasa aman. Cara ala mafia atau premanisme pun seakan menjadi suatu kebenaran yang diagung agungkan sebagai suatu kepahlawanan.

Sebagai contoh menjadikan tindak pidana korupsi sebagai label untuk menyerang menghakimi secara sosial atau membunuh karakter orang orang yang dianggap berseberangan.

Anti korupsi merupakan sistem atau sarana bukan tujuan. Tujuannya adalah mensejahterakan kehidupan sosial yang berbasis keadilan sosial.

Di sinilah sistem anti korupsi dapat dinilai dan diukur antara lain dari :

1. Pemimpin dan kepemimpinannya melalui apa kebijakannya dan tindakan tindakannya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir adanya korupsi.

2. Sistem reformasi birokrasi.

3. Sistem sistem online yang berbasis elektronik yang dibangun menuju big data system dan one stop service.

4. Sistem penegakkan hukum maupun aturan aturannya.

5. Sistem akuntabilitasnya.

Seorang Pemimpin dan kepemimpinan tatkala msih dalam koridor produk KKN dan produk hutang budi maka kebijakannya bukan pada anti korupsi melainkan upaya upaya balas budi yang menghalalkan segala cara walaupun terjerumus KKN. Mereka akan menjadi agen maupun tentakel dari suatu sistem yang korup.

Produk hutang budi tatkala memiliki kekuasaan akan mati matian mencari pengembalian modal sampai mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Kesibukannya habis untuk membalas budi. Di sinilah letak kualitas dari pemimpin dan kepemimpinannya tatkala berbasis pendekatan personal maka akan melanggengkan sistem yang sarat KKN yang

menjadikan lingkungan kerjanya menjadi pasar tawar menawar wani piro oleh piro.

Sistem reformasi birokrasi yang "bukan sebatas lip service" dimulai dari niatnya atau moralitasnya untuk benar benar merubah "core value yang berbeda atau bertentangan dengan yang ideal" untuk mendasari perubahan mindset bahkan culture setnya dengan memulai mengimplementasikan keutamaannya.

Tatkala masih banyak peluang terjadinya penyimpangan dan terus dibiarkan, ini juga akan terus menggurita bagai sarang naga yang tak tersentuh atau siapapun yang akan menyentuh pasti dikeroyok dihakimi bahkan dimatikan hidup dan kehidupannya.

Meminimalisir terjadinya peluang menyimpang inilah yang semestinya menjadi ukuran dari keberhasilan reformasi birokrasi.

Sistem apapun termasuk elektronik sejatinya hanya sebatas sarana pendukung point di atas. Seringkali pembangunan sistem elektronik yang semestinya menjadi jerat dan jebakan tikus.

Namun sayangnya seringkali menjadi sarang tikus. Lagi lagi proyek elektronik sarat kepentingan dan premanisme yang mengagungkan KKN, menjadi keunggulan dan kebijakan.

Membangun sistem elektronik berbasis ipo yang ada pada back office aplication dan net work yang semuanya itu merupakan iot dan ai yang menjadi sistem recognize yang ditunjukan adanya algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang berbasis sistem big data dan adanya one stop service.

Sistem online yang berbasis elektronik yang meminimalisir kesempatan terjadinya KKN semestinya produknya mampu merecognize menganalisa dan menghasilkan produk yang berupa algoritma dalam bentuk info statistik info grafis dan info virtual yang on time any time dan real time. Yang dapat digunakan sbg prediksi antisipasi dan solusi.

Sistem penegakkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik maupun institusi secara profesional maupun personal. Akuntabilitas secara moral yang menunjukkan bahwa semua dimulai dari niatan yang baik dan benar.

Di sini ditunjukkan dari grand strategi aturan dan penyiapan sdmnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Etika kerja yang berkaitan dgn do dan dont benar benar menjadi acuannya. Akuntabilitas secara hukum ini menunjukkan tidak menyimpang atau melawan hukum dan aturan yang ada yang ada. Akuntabilitas secara administrasi dapat ditunjukkan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya, proses laporan dan dokumen pendukungnya dengan baik dan benar.

Juga Akuntabilitas secara fungsional, apa yang dikerjakan menunjukkan suatu upaya pencapaian tujuan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas secara sosial dapat dilihat pada kemanfaatan bagi hajat hidup hidup masyarakat yang ditandainya semakin manusiawinya manusia dan meningkatnya kualitas hidup.

Sistem elektronik atau sistem sistem on line, menjadi tanda adanya reformasi birokrasi dan anti korupsi dan upaya memberikan pelayanan prima kepada publik. Namun sayangnya yang menggiurkan bukan keutamaannya melainkan pada angka besaran proyeknya.

Gilanya lagi dijadikan bancakan sumber daya. Hal tersebut yang semestinya diluruskan melalui upaya upaya untuk kembali melihat pada keutamaannya dalam pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi dan secara fungsional.

# PITUTUR HOEGENG: BERTUTUR [7]

Pitutur bisa dimaknai sebagai petuah atau keteladanan, bisa juga dimaknai spirit maupun moralitas. Pitutur dari pak Hoegeng Iman Santosa merupakan suatu kekuatan integritas seorang polisi bernama Hoegeng yang memiliki iman yang sentosa. Integritas itu ditunjukan pak Hoegeng dalam pikiran, perkataan dan perbuatan secara konsisten hingga akhir hayatnya. Pitutur Hoegeng hingga kini masih bertutur dan relevan dalam ruang dan waktu yang berbeda di masa hidupnya. Sespim Lemdiklat Polri bersama seniman dan budayawan akan membuat suatu gerakan moral membangun literasi tentang Hoegeng Iman Santosa, yang merupakan bagian dari program pembelajaran di Sespim yaitu : leader branding, leader heritage, dialog kebangsaan. Selain itu juga untuk mendukung pak Hoegeng sebagai pahlawan nasional.

Gerakan moral melalui : pitutur hoegeng bertutur ini menjadi wadah bagaimana apresiasi terhadap pak Hoegeng Iman Santosa sebagai polisi yang bersahaja. Mengapa pak Hoegeng begitu kuat dengan komitmennya ? Mungkin ini pertanyaan mendasar bagi banyak orang. Pak Hoegeng bukan superman, beliau manusia biasa seperti kita, namun ajaran dari keluarga, pendidikannya, kesadarannya sebagai polisi, dukungan dari istri dan putra putrinya, ini mungkin sebagai pilar kekuatannya.

Pitutur pak Hoegeng akan direspons atau bertutur melalui karya karya seniman dan budayawan dalam bentuk : sastra, rupa, nada, suara, gerak atau gabungan dari semua itu. Dari kaca mata saya, setidaknya ada 10 point penting yang bisa menjadi acuan bagi para seniman dan budayawan bertutur tentang pitutur pak Hoegeng.

10 Point “Hoegeng Iman Santosa” Orang Baik dan Orang Penting:

1. Menginspirasi dari pikiran perkataan dan perbuatannya

2. Konsisten dengan komitmennya memegang teguh imannya yang

7 https://transindonesia.co/2024/02/09/pitutur-hoegeng-bertutur/
https://news.detik.com/kolom/d-7184747/pitutur-hoegeng-bertutur

sentosa

3. Pendidikan dalam keluarga, sekolah dan lingkungan yang membentuk karakternya
4. Pecinta seni Lukis, musik, public speaking
5. Mencintai dan bangga sebagai polisi, pelopor di bidang road safety, petugas profesional dalam reserse maupun intelejen
6. Menjalankan keutamaan sebagai seorang polisi bagi :
   a. Kemanusiaan
   b. Keteraturan sosial
   c. Peradaban
7. Sikap dan implementasi anti korupsi dalam hidup dan kehidupannya sebagai polisi maupun di dalam keluarga
8. Bekerja dengan sikap tulus, jujur, baik dan benar
9. Tegar dengan sikapnya yang didukung oleh keluarganya walau lingkungan menggerus dan memberi tekanan berat sekalipun
10. Tetap bersahaja walau dipensiundinikan pada usia 49 th

Hoegeng Iman Santosa: polisi yang seniman dan seniman yang polisi. Beliau dikenal sebagai polisi yang jujur tegas bersahaja dan humanis. Itu semua landasan seni dan budaya yang dicintainya dan pak Hoegeng jadikan bagian dari kehidupannya sebagai polisi. Melukis, main musik, bernyanyi, aktif sebagai penyiar radio menjadi hobi yang ditekuninya.

Hakekat polisi dalam pemolisiannya adalah berupaya untuk memanusiakan atau nguwongke yang bermakna terwujud dan terpelihara keteraturan sosial bagi meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Penyelenggaraan tugas polisi yang mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman akan mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial yang menjadi ikon peradaban.

Seni budaya merupakan jembatan hati pikiran perkataan bahkan perbuatan bagi semakin manusiawinya manusiawi. Seni dalam nada

suara rupa bahkan rasa menjadi bagian kehidupan masyarakat untuk penyeimbang atau solusi duka lara. Dengan demikian seni merupakan suatu kesatuan antara jiwa pikiran dan raga yanga ada dalam semua gatra kehidupan bagi manusia sebagai mahkluk sosial untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Seni dalam kehidupan masyarakat menjadi tanda adanya hidup yang beradab.

Polisi dalam pemolisiannya bukan sebatas melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum melainkan juga sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Di sinilah seni budaya menjadi bagian yang terintegrasi antara polisi dan masyarakatnya melalui berbagai model atau pola pola pemolisian. Apa yang dimaksud dengan pola pola pemolisian, model atau gaya pemolisian dibangun melalui model atau prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban bisa sama, namun implementasinya dapat bervariasi menyesuaikan corak masyarakat dan kebudayaannya.

Jendral Hoegeng berkesenian bukan ikut ikutan, melainkan adanya kesadaran bahwa tugas polisi itu memanusiakan atau nguwongke tadi sehingga seni budaya menjadi landasannya. Ada pepatah mengatakan jangan harap memiliki polisi yang sehat kalau masyarakatnya sakit. Namun perdebatan ini sama dengan memperdebatkan mana duluan antara ayam dengan telur. Pak Hoegeng menyadari itu kalau polisi lah yang semestinya menjadi pelopor kesehatan bagi masyarakatnya. Apa yang ingin ditunjukkan di sini adalah "janganlah menyapu memakai sapu yang kotor" karena itu sama saja akan menularkan kekotoran. Seni budaya bagi pak Hoegeng Iman Santosa menjadi kekuatan luar biasa untuk menjadi polisi yang pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Pak Hoegeng menjaga idealismenya seperti namanya dengan Iman yang Santosa mampu dilakoni hingga akhir hayatnya.

Pitutur dan apa yang dirintis pak Hoegeng terus menginspirasi banyak kalangan dan diakui sebagai oase dalam padang kerinduan anti korupsi. Pak Hoegeng layak diteladani bagi generasi muda yang cinta bangga akan bangsanya sebagai patriot melalui para seniman dan budayawan pitutur pak Hoegeng akan terus betutur yang tak lekang oleh labirin

ruang dan waktu. Pak Hoegeng bukan sebatas milik Polri melainkan menjadi aset dan kebanggaan bangsa ini yang layak dikatakan sebagai polisi yang humanis, penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sebagai role model bahkan pahlawan anti korupsi.

# SESPIM LEMDIKLAT POLRI SIAPKAN KADER PEMIMPIN POLRI MASA DEPAN [8]

Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri merupakan Sekolah pengkaderan atau untuk menyiapkan calon pimpinan tingkat lokal, regional, nasional dalam tugas Kepolisian.

Dimana Polisi menyelenggarakan tugasnya pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat, itu yang dikenal dengan Pemolisian. Maka hakekat dari Sespim adalah : Pendidikan bagi calon Pemimpin dalam Pemolisian dalam level Pertama, level Menengah maupun Level Tinggi yang paradigmanya " Keamanan Dalam Negeri yang mendukung Proses Pembangunan Nasional.

Pemolisian dapat dipahami sebagai segala usaha dan upaya Kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya pada tingkat manajemen maupun operasional dalam ranah birokrasi, maupun ranah masyarakat, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (Keamanan, ketertiban masyarakat kamtibmas).

Sespim sejatinya lembaga pendidikan yang berbasis pada moral, yang maknanya adalah pada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Selain itu juga menegakan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Sespim Polri secara konseptual dapat dilihat dalam konstruksi : Pendidikan, Pemimpin, Polisi.

Dengan demikian Sespim merupakan Lembaga Pendidikan yang Membangun dan Merawat Peradaban bagi Manusiawinya Manusia, dalam konteks Keamanan Dalam Negeri yang Mendukung Pembangunan Dalam Negeri. Hakekat Polisi dalam pemolisiannya adalah : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

8 https://polisiindonesia.id/2024/02/01/cdl-sespim-lemdiklat-polri-siapkan-kader-pemimpin-polri-masa-depan/

Keteraturan sosial dalam konteks Polisi dan pemolisiannya terefleksi dari sistem keamanan dan pengamanan hingga terjaminnya keamanan dan rasa aman secara pribadi, di ranah publik, ranah lingkungan hidup dan kehidupan, ranah ekonomi dan industri, ranah mayantara hingga ranah forensik.

Keamanan dalam negeri dalam pendekatan pemolisian di era kenormalan baru dijabarkan pada pemolisian yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah secara konvensional, elektronik dan forensik. Konteks pemolisian yang fungsional ditunjukan adanya sinergitas dan harmoninya model konvensinal dan konterporer yang mampu diimplementasikan secara proaktif dan adanya penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keamanan dalam negeri menjadi simbol peradaban kedaulatan ketahanan dan daya saing suatu bangsa. Keamanan dalam negeri konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun derlandaskan demokrasi yang mencakup :

1. Supremasi hukum
2. Adanya jaminan dan perlindungan HAM
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan.

Keamanan dalam negeri dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat demgan memberdayakan kekayaan dan keindahan serta kebhinekaan salah satunya melalui masyarakat yang sadar wisata. Sistem pengamanan untuk keamanan dalam negeri dibangun melalui :

1. Tegak dan kokohnya idiologi bangsa
2. Political will yang kuat
3. Keamanan secara ekonomi
4. Keamanan secara sosial budaya
5. Keamanan secara siber maupun forensik

6. Keamanan infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya
7. Sumberdaya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
8. Sistem sistem pelayanan publik yang prima
9. Sistem monitoring dan evaluasi serta sistem akuntabilitas kepada publik yang transparan dan akuntabel
10. Sistem sistem yang siap dalam kondisi emerjensi maupun kontijensi.

Keamanan dalam negeri merupakan dasar bagi suatu bangsa untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Menjaga dan merawat kedaulatan bangsa agar dapat berdayatahan, berdaya tangkal bahkan berdaya saing. Di samping hal itu juga untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa bangsa lain di dunia. Keamanan di dalam negeri secara astagatra dapat dilihat dari sisi : geografi, sumberdaya alam,demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Delapan pendekatan tersebut dapat dikembangkan dalam hukum, teknologi, dan media.

Konflik antar sesama anak bangsa dapat menggunakan isu isu dari gatra dari semua lini. Konteks konflik sosial dari isu akan menjadi labeling hingga kebencian. Penggunaan media di era post truth dengan hoaks akan sangat berdampak tatkala masyarakatnya mudah terprovokasi atau mudah percaya atas sesuatu informasi.

Model berita hoaks tersebut didesain orang yang memiliki kompetensi mengaduk aduk fakta dengan kebohongan mengubah kebenaran menjadi pembenaran, yang terus diviralkan hingga diyakini sebagai kebenaran.

Keamanan dalam negeri merupakan keteraturan sosial untuk mendukung produktifitas agar masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Dalam konteks melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum maka keamanan dan rasa aman wujud harmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bisnis keamanan biasanya dikuasai atau dilakukan dengan gaya premanisme. Premanisme merupakan benalu bagi kehidupan sosial yang kontra produktif anarkis dan merusak peradaban.

Apa yang dilakukan para preman memaksa, mengancam, bahkan melakukan anarkisme sehingga aman namun tidak ada rasa aman.

Terjaminnya keamanan dan rasa aman masyarakat merupakan refleksi peradaban suatu bangsa. Dalam konteks ini tentu saja berbasis pada demokrasi di mana supremasi hukum dapat diimplementasikan sebagai mana hukum menjadi panglima. Supremasi hukum ditunjukan tegaknya hukum secara beradab, terkontrolnya keteraturan sosial dan adanya jaminan dan perlindungan HAM. Pembangunan dan perbedayaan infrastruktur dan sistem sistem teknologi untuk adanya keteraturan sosial merupakan bentuk perlindungan dan pengayoman.

Tingkat kualitas keteraturan sosial dapat ditunjukan pada indeks keamanan yang meliputi :

1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Keamanan dan rasa aman. Di era digital indeks keamanan dilihat secara virtual maupun secara aktual.

Mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial di era digital model smart policing dapat menjadi model yang menharmonikan dan mensinergikan antara conventional policing, electronic policing dan forensic policing. Basis implementasinya di dukung back office, application yang berbasis artificial intellegent, internet of things yang menampilkan indeks keamanan dalam wujud info grafis, info statistik maupun info virtual secara real time.

Keamanan dalam negeri dalam memberikan pelayanan kepada publik pada konteks negara demokrasi. Pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan dilakukan oleh aparat yang profesional cerdas bermoral dan modern. Yang mengikis bahkan menghilangkan model premanisme dan anarkisme. Keamanan dan rasa aman menjadi standar bagi warga masyarakat untuk beraktifitas menghasilkan produksi untuk dapat hidup dan meningkat kualitas hidupnya.

***" Non scholae, sed vitae discismus"***
***Kita belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup***.

Pendidikan apapun latar belakangnya, tujuannya adalah mendidik. Mendidik dalam konteks pendidikan adalah untuk memanusiawikan manusia atau semakin manusiawinya manusia. Pendidikan landasan utamanya moralitas yang dibangun dengan pendekatan kesadaran. Pendidikan yang keras dan tegas untuk menanamkan disiplin agar kelak mampu menghadapi berbagai masalah atau tantangan atas hidup dan kehidupan, namun tetap humanis yang penuh welas asih. Tujuannya tetap bagi kemanusiaan, agar kelak para pemimpin dengan kekuatan dan kewenangannya mampu mengambil keputusan untuk memanusiakan manusia demi semakin manusiawinya manusia dalam lingkup maupun konteks level apapun. Pendidikkan yang di luar bagi semakin manusiawinya manusia sejatinya bukan pendidikkan karena bisa menjadi anti bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban. Pendidikkan yang ada bisa menjadi semacam balas dendam,

mengeksploitasi para murid atau peserta didik. Bisa saja dirasuki unsur kebrutalan yang merusak peradaban, karena dihasilkannya adalah kaum luka batin yang berdampak pada berbagai penyimpangan atas kemanusiaan.

Pendidikkan dimulai dari gurunya atau pengajarnya. Peran dan fungsi guru berpengaruh besar atas hasil didik dari pendidikan. Kualitas guru bukan sebatas pada intelektualnya namun juga moralitasnya. Guru menjadi kunci bagi keberhasilan suatu pendidikkan. Pendidikkan yang mendidik dan memcerahkan setidaknya dapat dilihat dari :

1. Lembaga atau wadah yang merupakan institusi pendidikkan menjadi ikon pencerahan dan pencerdasan bagi Otak, Otot dan Hatinuraninya
2. Implementasi atas visi dan misi pendidikan dilaksanakan berbasis pembangunan karakter secara konsisten dan konsekuen
3. Kualitas guru sebagai tenaga pengajar/ pendidik adalah orang orang yang mampu menjadi ikon dan layak dijadikan panutan atas pikiran perkataan dan perbuatannya
4. Sistem pengajaran pelatihan dan pengasuhannya berbasis pada

standar standar pendidikan yang universal dan global walaupun dapat menggunakan kearifan lokal

5. Kurikulum pelajarannya berbasis pada pencerdasan intelektual, emosional dan sosial
6. Pola pengajarannya dibangun dengan landasan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
7. Infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya atau sarana prasarananya untuk mendukung proses belajar berlatih dengan pendekatan holistik dan sistemik yang dinamis sesuai dengan perubahan maupun kebutuhan kekinian
8. Tradisi dan nuansa akademis yang membudaya dalam lingkungan lembaga pendidikkan
9. Ada wadah bagi penampungan pemikiran dan ide ide kreatif seperti jurnal maupun penerbitan
10. Kualitas rekrutmen peserta didik berbasis pada kejujuran transparan akuntabilitas secara moral, secara administrasi, secara hukum yang berbasis pada standar nasional maupun internasional
11. Para peserta didik dapat merasakan dirinya tercerahkan
12. Prestasi hasil didik yang mampu menjadi ikon kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban
13. Pengakuan dan apresiasi dari masyarakat luas atas prestasi dan kinerja hasil didik yang profesional cerdas bermoral dan modern.

Masih banyak yang dapat dikembangkan untuk membangun lembaga pendidikkan. Namun ke 13 point tersebut setidaknya dapat menjadi acuan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan bukanlah sebatas persyaratan untuk karier melainkan untuk membangun suatu kesadaran, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam suatu peradaban. Moralitas menjadi salah satu kunci penting atas hasil pendidikan. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang secara akademik maupun ketrampilannya tinggi namun moralnya rendah, ia bisa menjadi orang jahat yang membahayakan bagi hidup dan kehidupan. Kepandainya tidak lagi bagi kemaslahatan banyak orang.

Bisa juga dengan kepandaiannya menipu bahkan menjajah rakyatnya. Bagian lain dari pendidikan adalah: “patuh, taat pada hukum bukan karena keterpaksaan atau ketakutan melainkan adanya kesadaran untuk memahami bahwa hidupnya tidak hanya sendiri yang juga memikirkan bagi orang lain yang hidup bersama dengan dirinya”. Membangun hukum yang menjadi kesepatan aata hidup bersama dalam keteraturan sosial dan dapat ditegakan dengan berbasis moralitas yang ditunjukan dari kejujuran, kebenaran dan keadilan.

” Sivis pacem parabelum”, kalau ingin berdamai harus siap untuk berperang. Kempuan memerangi kebodohan, kemiskinan, sikap moralitas yang buruk, korupsi, kolusi, nepotisme dan banyak hal lain yang kontraproduktif inilah musuh biang keladi kehancuran suatu peradaban.Membangun dan menyelenggarakan pendidikan bukan sebatas mencerdaskan melainkan juga mencerahkan dan mampu menemukan bahkan mengembangan imajinasi.Pencerahan pada suatu pendidikan adalah untuk menemukan keutamaan. Tatkala pendidikan sebatas persyaratan maka cara cara instan hingga yang melanggar etikapun akan dihalalkan.Tatkala guru status sosialnya rendah maka kualitas pendidikan akan jauh dari memuaskan.

Hasil didik merupakan cermin dari kualitas lembaga pendidikan. Maka pendidikan wajib mengajarkan dan menanamkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin untuk menemukan keutamaan kepada para siswanya. Pendidikan memang bukan segala galanya namun melalui pendidikan dapat mengetahui segala sesuatu. Pendidikan menjadi ruang transformasi pengetahuan ketrampilan moralitas agar semakin manusiawinya manusia. Guru sebagai kunci pendidikan menjadi energi transformasi yang mencerahkan hidup dan kehidupan para muridnya. Kualitas guru dalam hidup dan kehidupannya harus dirwat dan diperhatikan kesejahteraanya.tatkala para guru sulit dalam hidup dan kehidupannya dan tidakendapatkan tempat yang layak dalam stratifikasi sosial maka pendidikan akan redup bahkan padam. Tatkala para guru kehilangan semangatnya maka tinggal menunggu waktu bencana suatu bangsa akan tiba. Bukan diserang dsri luar melainkan saling serang sesama anak bangsa. Karena tidak mampu hidup dalam suatu peradaban dan mudah diadu domba. Hidup dalam suatu peradaban

diperlukan kemampuan untuk memahami, membatasi, empati, peduli, saling menghormati, dan mampu saling menghidupi.

Peserta didik di era digital kadang merasa sudah lebih tahu dari guru gurunya. Maka para guru bukan sekedar memberitahu apa dan bagaimana namun menjadikan siapa melalui pengajaran akan :moralitas, nilai nilai kemanusiaan, soliditas, merawat kebhinekaan, patriotisme. Kecerdasan intelektual saja tidaklah cukup dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Romo Mangun mengatakan : " Pada Pendidikanlah Tergantung Masa Depan Bangsa". Jangan berharap masa depan lebih maju kalau pendidikannya amburadul.

Disinilah Guru kadang dituntut menjadi superman yang bisa segala hal, namun energi menjadi super terabaikan. Mungkin kalau dikritik tajam ada yang membantah dan membela diri dengan memamerkan segala seremonialannya.

Puja puji dan pengakuan serta penghargaan dibsana sini. Namun dalam fakta lagi lagi guru dijadikan ganjel pelengkap pemderita. Cerita duka lara ada di mana mana. Namun sejatinya karya guru guru yang mencintai pekerjaannya tidaklah sia sia. Setiap jaman ada orangnya setiap orang ada jamannya.

Guru tetaplah menjadi pilar bangsa. Muridmu yang bengal sekalipun mengakui siapa guru yang mulia. Entah ia kelak menjadi apa saja, akan tetap ingat keteladananmu. Walau sikap dan perilakunya nyebelin itu tanda sayang dan cinta kepada guru. Memandaikan manusia memang bukan hal mudah. Tidak mungkin demgan teriakan : siap grak, pinter grak. Semua membutuhkan proses panjang dan perjuangan.

Lembanga pendidikan kepolisian merupakan pengejawantahan atas " Pengembangan Ilmu Kepolisian". Ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang:

1. Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial
2. Hukum dan keadilan
3. Kejahatan dan penanganannya

4. Pemolisian
5. Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
6. Teknik dan teknis dasar umum dan khusus kepolisian.

Paradigma ilmu kepolisian dapat dilihat secara :

1. Filosofis :

   Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.

2. Geo politik dan geo strategis

   Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial

3. Yuridis

   Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

4. Globalisasi dan modernisasi

   Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

5. Akademis,

   Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan ( S1, S2 dan S3), pengembangan kepemeimpinan dan majerial, kompetensi khusus dan fungsional ( cyber, forensik, untuk hal hal yang bersifat ekstra ordinary )

6. Pragmatis,

   ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi : keselamtan ( safety) contoh ( safety driving centre), keamanan ( private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security).

Pengembangan ilmu kepolisian sejalan dengan yang ilmu yang dipelajari (Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial, Hukum dan keadilan, Kejahatan dan penanganannya, Pemolisian,Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat) setidaknya dapat dikembangkan pada Fakultas :

1. Polisi dan pemolisian
2. Keamanan
3. Keselamatan
4. Intelejen
5. Hukum dan penegakan hukum
6. Penyelidikan dan penyidikan
7. Forensik
8. Siber dan teknologi kepolisian
9. Kajian konflik sosial
10. Kajian Terorisme
11. Kajian kejahatan luar biasa
12. Manajemen sekuriti Dan sebagainya.

Kurikulum dan pengajaranya dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pengajaran dasar ilmu kepolisian
    a. Filsafat ilmu pengetahuan
    b. Etika Publik
    c. Metodologi Penelitian
2. Pengajaran pokok ilmu kepolisian
    a. Ilmu ilmu sosial
    b. Ilmu hukum, penegakan hukum dan keadilan
    c. Ilmu kriminologi
    d. Ilmu administrasi dan operasionalnya
    e. Ilmu teknologi informasi
    f. Hubungan antar suku bangsa (Konteks masayarakat Indonesia yang multikultural)
    g. Ilmu humaniora Dan sebagainya.
3. Kapita Selekta yang berkaitan demgan isu isu penting dan aktual yang terjadi dalam masyarakat antara lain :
    a. Idiologi
    b. Politik

c. Ekonomi
d. Sosial budaya
e. Keamanan
f. Pertahanan Dan sebagainya.

Pendukung pengembangan ilmu kepolisian dengan adanya :

1. Pusat penelitian dan pengkajian
2. Lembaga lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian
3. Forum atau asosiasi dosen pemgajar, alumni maupun pemerhati ilmu kepolisian
4. Penerbitan buku
5. Jurnal ilmiah
6. Laboratorium sosial.

Pengembangan pendidikan untuk kompetensi khusus dan pragmatis yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Safety driving centre
2. Security training centre
3. Sekolah penyidik
4. Pendidikan ilmu kepolisian level D1 dan D3
5. Kursus kursus singkat
6. Pelatihan pelatihan bagi master trainer dan trainer Dan sebagainya.

Sespim Polri yang Presisi merupakan lembaga pendidikan yang mendidik dan menyiapkan kader pemimpin Polri masa depan sebagai polisi yang profesional Cerdas Bermoral dan Modern ( PCBM). Para alumninya kelak saat menjadi pemimpin mampu mewujudkan Polri dalam Pemolisiannya sebagai :

1. Penjaga Kehidupan,
2. Pembangun Peradaban
3. Pejuang Kemanusiaan.

Kepolisian dapat dimaknai sebagai institusi, sebagai fungsi dan sebagai petugas yang PCBM sebagai penjaga kehidupan pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaa dapat dijabarankan sebab :

1. Polisi yang profesional menunjukkan pada kompetensi atau keahliannya yang berbasis pada ilmu kepolisian dalam mengimplementasikan smart policing. Petugas yang ahli memiliki mental dan fisik yang siap menjadi pelayan pelindung dan pengayom masyarakat. Di samping itu juga sebagai aparat penegak hukum dan keadilan bangsa dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Yang mampu diimplementasikan pada operasi yang bersifat rutin, khusus atau kontijensi yaitu kondisi ekstrim sekalipun, agar tetap terwujud dan terjaga keteraturan sosial
2. Cerdas bermoral mampu ditunjukkan bahwa polisi merupakan jalan hidup atau panggilan hidup sbg patriot bangsa. Yang dibangun atas dasar kesadaran tanggung jawab dan disiplin serta mampu menunjukkan kreatifitas maupun inovasinya. Untuk mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Yang memiliki spirit kebangsaan nasionalisme yang tinggi sebagai anak bangsa dalam membangun dan membuat bangsa menjadi berdaulat bertahan dalam kondisi aman damai dan sejahtera. Spirit patriotisme merupakan spirit rela berkorban dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan disiplin karena kecintaan dan kebanggaan dalam profesi dan sebagai anak bangsa.
3. Modern konteks pemolisian yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mendukung pd sistem smart policing yang tergelar dalam model conventional policing, electronic policing dan forensic policing. Sehingga mampu memberikan pelayan prima (Cepat Tepat Akurat Transparan Akuntabel Informatif dan mudah diakses) di bidang pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan.
4. Penjaga Kehidupan

   Polisi dengan pemolisiannya sebagai penjaga kehidupan yaitu : keberadaan polisi adalah mampu menjamin keamanan dan rasa aman

sehingga warga masyarakat dapat beraktifitas untuk berproduksi.

Produktifitas tersebut membuat masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Polisi sebagai "co producer" tidak bermain main dengan hal hal yang ilegal dan tidak membiarkan penyimpangan yang contra productive (Tidak terima suap dan tidam melakukan pemerasan).

5. Polisi sebagai pembangun peradaban di mana keberadaan Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan mampu menunjukkan bahwa hukum sebagai simbol peradaban. Di dalam proses penegakkannya adalah untuk : menyelesaikan konflik secara beradab. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Membangun budaya tertib. Agar ada kepastian. Bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan

   Walaupun dengan upaya paksa sekalipun konteks humanisme ini yang menjadi dasar yaitu pada produktifitas dan peradaban serta keteraturan sosial, sehingga segala usaha dan upaya yang dilakukan pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa adalh tetap bagi semakin manusiawinya manusia.

Ketiga kredo tadi dibangun dengan kesadaran. Kesadaran konteks ini adalah mampu memahami peran dan fungsinya sebagai polisi penjaga kehidupan, polisi sebagai pembangun peradaban dan polisi sebagai pejuang kemanusiaan. Birokrasi kepolisian menjadi ikon peradaban. Ikon kecepatan kedekatan dan persahabatan.

Keberadaan polisi mampu mengurangi rasa takut warga masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas. Polisi dengan pemolisiannya bekerja secara proaktive problem solving. Membangun kemitraan, mengutamakan pencegahan dan keberaannya diterima dan didukungbwarga masyarakat yang dilayaninya.

Pada era digital dan era kenormalan baru maka konteks pemolisian dikembangkan dalam model "smart policing" yang merupakan contemporary policing yang berbasis community policing sehingga adanya harmoni antara conventional policing, E policing dan Forensic

policing yang mampu memberikan pelayanan prima (Cepat Tepat Akurat Transparan Akuntabel Informatif dan mudah diakses) kepada masyarakat.

" Polisi kehebatannya bukan pada pangkat jabatan, kepandaian atau kewenangannya, melainkan pada perilakunya, manakala mampu menjadi role model / ikon dan panutan yang dipercaya masyarakat. Sejalan dengan spirit polisi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan yang PCBM. Maka semangat atau spirit Sespim sebagai lembaga pendidikan bagi calon calon pemimpin di masa depan di level first line supervisior, midle manager maupun top manager dalam menyelenggarakan pendidikannya menunjukkan lembaga pendidikan kepolisian yang dinamis dan modern yang memiliki visi membangun kader-kader pimpinan kepolisian bahkan sebagai pimpinan bangsa di berbagai lini kehidupan yang mampu membawa bangsa yang memiliki daya tahan, berdaulat, rakyatnya aman, sejahtera, adil dan makmur.

Untuk mewujudkan proses pengkaderan bagi penyiapan calon polisi yang PCBM dan kader pimpinan Polri di masa depan maka beberapa point-point penting yang dibutuhkankan antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakkan pimpinan sebagai political will mendukung perwujudan visi misi dan tujuan Sespim
2. Pemimpin yang Transformatif
3. Menyiapkan dan membangun infrastruktur dan sistem-sistem pendidikan dan latihan yang visioner modern dengan model-model :
    a. Implementasi conventional policing, E policing dan Forensic policing
    b. Penanganan operasi yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi
    c. Studi kasus atas issue issue penting yang terjadi dalam masyarakat
    d. Manajemen media untuk mengatasi dan menghadapi era post truth,
    e. Forensik Policing untuk menghadapi :" gangguan keteraturan sosial atas serangan teror dari nuklir, mikro biologi dan kimia

dsb”

f. Pemolisian yang berbasis wilayah, berbasis fungsional dan dampak masalah spt: ideologi politik ekonomi, sosial budaya hingga penanganan konflik-konflik sosial skala besar dalam negeri termasuk terorisme hingga bencana alam,
g. Model-model intelejen dan fungsi teknis kepolisian lainnya
h. Model kajian dan rekayasa sosial dalam masyarakat yang modern dan demokratis dan sebagainya
i. Model infrakstruktur dan sistem-sistem ini bisa dibangun dalam model laboratorium, simulator dan paktek lapangan yang sesuai konteksnya.

4. Membangun dan menyiapkan SDM yang profesional sebagai tenaga staf pengajar dan pelatih yang memiliki kualitas sebagai guru mentor dan panutan. Karena guru merupakan Ikon Pendidikan. Guru menjadi kunci dalam pendidikan dan merupakan tokoh sentral dalam pendidikan untuk mengajarkan, mentransformasi, memotivasi, menginsprasi, mendampingi, menjadi konsultan bagi para taruna untuk memiliki karakter sebagai prajurit patriot yang profesional. Spiritualitas guru inilah yang hendaknya menjadi acuan dalam pendidikan berkrakter untuk menyadarkan dan menanamkan rasa tanggung jawab, jiwa korsa dan semangat kemanusiaan.

   Pendidikan menjadi ikon kejujuran, kebenan dan keadilan dimana guru- guru adalah para pejuang kemanusiaan.

5. Program-program pendidikan dan pengasuhan dapat dibangun dalam berbagai model dinamis

   a. Pola pendidikan yang mencakup akademik secara konsep teoritikal, training untuk skill problem solving (dengan model-model yang tercakup pada point 2 dan skenario-skenario melalui sistem-sistem simulasi modern maupun laboratorium serta praktek lapangan) dan penanganan berbagai isu aktual yang terjadi agar para taruna juga memahami dunia luar apa yang menjadi isu aktual. Semua itu dalam pengaturan silabus yang mencakup teoritikal dan model proaktif prediksi, antisipasi dan solusi.

b. Pengasuhan ini sebagai sistem transformasi olah raga dan olah rasa (Religi, Seni, Tradisi, Hobby, Komuniti hingga Tekhnologi) model-modelnya dapat disesuaikan secara dinamis. Penerapan art policing pada pembinaan mentaf fisik dan spiritual.

c. Di samping itu pola mentorship pola coach dibangun pola-pola penanaman budaya kepolisian sehat, edukatif dan visioner dalam membangkitkan jiwa polisi yang PCBM dengan berbasis kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.

d. Pola tanggap tanggon trengginas dikembangkan dengan pola-pola visioner modern sebagai pengkaderan pimpinan masa depan.

6. Sistem belajar mengajar dengan nuansa akademis, nuansa kepolisian yang modern dan nuansa kehidupan yang menjadi ikon peradaban untuk menumbuhkan jiwa-jiwa pemimpin Polri yang PCBM bahkan pemimpin bangsa di masa depan.
7. Sistem monitoring dan evaluasi prestasi dan berbagai kendala pendidikkan atas para anggota tetap, dosen, instruktur, pelatih hingga para peserta didik secara online dan dalam sistem big data sehingga sistem pendidikan ini fair dan mampu menunjukkan pola pendidikan yang mampu menjadi icon world class education.
8. Sistem reward and punishment yang berbasis pada sistem-sistem penilaian kinerja atau SOP atau etika taruna yang termaktub dalam peratutan-peraturan Kalemdiklat maupun kode etik peserta didik sespim atau berbagai peraturan lainnya secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dan ditegakan.
9. Sistem pendidikan lanjutan secara nasional maupun internasional pada jenjang akademik, training dan benchmark serta untuk seminar atau berbagai kegiatan simposium nasional maupun internasional.
10. Pemeliharaan dan perawatan semua aset-aset pendukung pendidikan :
    a. lingkungan kampus dan perkantoran, lingkungan latihan, lingkungan pembinaan-pembinaan olah raga dan olah rasa (Religi, Seni, Tradisi, Hobby, Komunitas dan Tekhnologi) dan sebagainya.
    b. Pembinaan karier personil Akpol dalam promosi, mutasi dan

demosi.

c. Kesejahteraan personil pada asrama dan lain-lain.
d. Infrastruktur sarpras/ logistic.
e. Rumah sakit dan pelayanan kesehatan.
f. Tempat ibadah dan sebagainya.

Lembaga pendidikan menjadi ikon peradaban kekuatan kedaulatan dan kemajuan hingga modernitas suatu bangsa. Sespim dengan spirit-spirit di atas menjadi lembaga pendidikan acuan kebanggaan yang berstandar World Class Executif Studies.

Polisi dan Pemolisiaannya yang Presisi diwujudkan dan polisi yang PCBM. Polisi bekerja dalam ranah birokrasi dan ranah masyarakat, benang merahnya itulah yang dikatakan pemolisian. Policing (Pemolisian) merupakan segala upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Dengan demikian spirit polisi dalam pemolisiannya secara manajerial maupun operasional adalah untuk kemanusiaan dengan PCBM (Profesional, Cerdas, Bermoral dan Modern) dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepolisian kepada publik mencakup :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan.

Standar pelayanan kepolisian kepada publik adalah : cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.

Polisi dalam menegakan hukum adalah demi semakin manusiawinya manusia, yang merupakan upaya membangun peradaban agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Konteks inilah yang dikatakan tujuan pemolisian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman serta terwujudnya

keteraturan sosial. Pola pola pemolisian bisa dikembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Model pemolisian dapat dibuat sebagai acuan pengembangan kualitas kepemimpinan, infrastruktur dan model modelnya sebagai berikut :

1. Model pemolisian yang berbasis wilayah :
    a. Border policing (Pemolisian di kawasan perbatasan)
    b. Maritime policing (Pemolisian di kawasan maritim atau kepulauan atau kawasan pantai)
    c. Industrial policing (Pemolisian di kawasan industri)
    d. Disaster policing (Pemolisian di kawasan rawan bencana )
    e. Bisa dikembangkan dari model orientasi kegiatan masyarakatnya (Community oriented policing) pada masayarakat perkotaan, pertanian, nelayan, perkebunan, buruh dan sebagainya.
2. Model pemolisian yang berbasis pada fungsinya : fungsi utama, fungsional maupun fungsi pendukung sebagai berikut:
    a. Road safety policing ( pemolisian berbasis pada road safety atau lalu lintas
    b. Paramilitary policing, model pemolisian ala paramiliter
    c. Cyber policing, pemolisian dalam memberikan pelayanan secara virtual
    d. International policing, pemolisian internasional seperti : pasukan misi perdamaian PBB, laision officer, hubungan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan, studi banding dan pertukaran kemampuan polisi, dsb
    e. Emergency policing, model pemolisian menghadapi situasi kegawat daruratan Dan sebagainya.
3. Model Pemolisian yang berbasis dampak masalah :
    a. Democratic policing
    b. Electronic policing, pemolisian secara elektronik yang merupakan model pemolisian di era digital atau era revolusi industri 4.0

c. Forensic policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru dan sebagainya.

Memahami polisi dan pemolisiannya dari model di atas adalah secara holistik atau sistemik yang tidak dipahami secara parsial.

Polisi dalam pemolisiannya dalam bertindak tegas sekalipun spiritnya tetap untuk: 1. melindungi, 2. mengayomi dan 3. melayani agar ada keteraturan sosial. Hal ini menunjukan bahwa manusia adalah aset utama bangsa maka di situlah hakekat pemolisian untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Polisi dengan pemolisiannya dalam menegakan hukum untuk :

1. Menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab
2. Mencegah agar konflik meluas atau semakin besar
3. Melindungi mengayomi melayani korban dan pencari keadilan
4. Membangun budaya tertib
5. Adanya kepastian hukum
6. Edukasi

Keberhasilan pelakasanaan tugas polisi dengab pemolisiannya bukan semata mata pada pengungkapan perkara namun juga dilihat dari keteraturan sosial dan tingkat kepercayaan publik serta kualitas pelayanannya. Polisi dalam pelayanannya kepada publik merupakan ikon atau simbol : kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial. Polisi dalam pemolisiannya dilihat dari tingkat : profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya dan modernitasnya. Membangun kepolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern dapat dibangun melalui :

1. Pembangunan pendidikan yang berlandaskan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
2. Kepemimpinan yang tranformasional
3. Keteladanan
4. Penanaman nilai nilai kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial
5. Membangun infrastruktur dan sistem sistemnya yang berefek pada budaya malu dan kualitas pelayanan publik yang prima. Polisi

melalui pemolisiannya merupakan bagian bahkan refleksi dari masyarakat yang dilayaninya. Soft Power dari Kebiasaan yang baik akan membawa kepada hati nurani yang baik.

Kalau kita melihat siaran NHK (TV Nasional Jepang) yang disiarkan suasana teduh damai dengan berbagai pendekatan seni budaya. Hal tersebut dilakukan dan dipertontonkan serta diajarkan bagaimana mempertahankan hidup dengan tetap menghargai kehidupan. Ada film tentang sikap pemain dan suporter sepak bola yang kalah bertanding tetap menunjukan sikap yang hormat ada rasa terimakasih dan juga menunjukan sesuatu yang humanis beradab. Sebelum meninggalkan stadion mereka membersihkan sisa sisa kotoran dan menunjukan stadion bisa lebih bersih dari sebelum pertandingan.

Ada sebuah analogi just kiding/ joke antara polisi Jepang dengan polisi Indonesia. Pada saat polisi Indonesia berkunjung ke Jepang dan melihat polisi Jepang melakukan tindakan yang humanis, dialogis, polisi Indonesia memuji mujinya. Polisi Jepang itu heran, mengapa harus dipuji. Dan mengatakan ini hal yang biasa karena merupakan pekerjaan kami.

Pada suatu kesempatan polisi Jepang ke Indonesia dan melihat polisi Indonesia melakukan tindakan kekerasan, melakukan hal hal yang berbeda dengan sebagaimana keutamaan polisi, polisi Jepang komplain : mengapa anda melakukan penyimpangan? Polisi Indonesia terheran heran, saya tidak menyimpang, Ini pekerjaan saya. Kita bisa melihat tata cara adat orang Jepang meminum teh " cha no yu" betapa mereka sangat lembut dan menghormati dan menikmati atas nikmat rasa meminum teh. Saya bukan memuja muja Jepang lebih hebat, namun yang ingin saya tunjukan adalah kebiasaan yang baik akan membawa kepada hati nurani yang baik. Kebiasaan ini diajarkan dilatihkan terus menerus sehingga menjadi habitus dan semua dijalankan secara reflek. Bangsa berbudaya akan menghargai seni budaya dan mampu menata keteraturan sosial dan mengemas menjadi pariwisata.

Sumberdaya yang ada akan dibangun dalam kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Kebiasaanpun akan menjadikan suatu keahlian . "Kebiasaan yang baik membawa kita pada hati nurani yang

baik". Kebiasaan sebagai sesuatu yang telah terpola, berulang dari waktu ke waktu untuk mengerjakan sesuatu yang terstruktur. Kebiasaan hampir-hampir mendekati insting (Reflek), kalau dilatih terus menerus akan menjadi suatu kepekaan dan keahlian. Sering kali kita melihat pemain-pemain acrobat, mereka sangat mahir melakukan berbagai atraksi yang tidak semua orang bisa/berani melakukan.

Kebiasaan melakukan sesuatu yang baik memang harus dilatih dengan penuh ketekunan, apalagi kebiasaan yang memerlukan kompetensi. Tanpa pendidikan dan latihan sulit bagi seseorang mempunyai kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menjadikan seseorang memiliki hati nurani yang baik. Keahlian yang berguna/ bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia dimulai dari pendidikan dan latihan untuk membiasakan yang baik.

Dasar dari pendidikan dan latihan yang baik dimulai dari kesadaran dan tanggung jawab. Membangun kesadaran dan tanggung jawab melalui sistem/mekanisme untuk merubah mind set seseorang. Membangun mind set, dalam masyarakat diperlukan rekayasa sosial yang didukung dengan sistem, program dan teknologi. Kebiasaan yang baik perlu dijabarkan indikator-indikatornya, sehingga kebiasaan yang baik dapat dinilai kompetensinya. Dalam suatu organisasi maupun institusi, kebiasaan yang baik dapat dikategorikan sebagai perilaku organisasi.

Perilaku organisasi dapat dibuat acuan pada etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika kerja menjadi bagian dari SOP (standard operational procedure) yang terdiri dari, job description dan job analysis, standar keberhasilan tugas, sistem penilaian kinerja, dan sistem reward dan punishment.

Kebiasaan baik tidak akan muncul tatkala banyak peluang untuk menyimpang, kesadaran tanggung jawabpun akan ikut menghilang tatkala tidak ada sistem yang unggul.

Tatkala kebiasaan yang baik tidak ada maka keahlianpun tidak didapatkan. Menjadi ahli karena terbiasa dan mempunyai kompetensi.tatkala disatukan pada komitmen dan keunggulan yang akan menjadi karakter. Karakter dapat dipahami dari komitmen, integritas dan keunggulan. Itu semua dimulai dari sang pemimpin dan

kepemimpinannya. Tatkala pemimpin mampu menunjukan sesuatu dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk melindungi, mendidik dan mampu menjadi ikon maka ini juga akan mampu bagi pembangunan karakter dan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Prof Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa polisi adalah kumpulam orang baik. Polisi bekerja melalui O2H (Otak Otot dan Hati nurani ). Maka pemimpin dalam kepemimpinannya perlu empati, kepekaan kepedulian dan bela rasa.

**Empati Seorang Pemimpin**

Sebuah cerita klasik dari relief candi Mendut, tentang burung berkepala dua bisa kita jadikan analogi untuk melihat pemimpin dan kepemimpinannya. Kepala bagian atas memakan buah-buahan dan makanan-makanan yang segar, enak, dan manis. Kepala yang satunya (Kepala bawah) memakan sisa-sisa dari apa yang dimakan oleh kepala atas. Suatu ketika kepala bawah protes kepada kepala atas agar sesekali diberinya makanan yang enak seperti yang dimakannya.

Tak disangka kepala atas mengatakan: “Wahai kepala bawah, terimalah dan syukurilah apa yang kau nikmati. Kita toh satu tembolok. Jadi, makanlah apa yang menjadi makananmu.” Mendengar jawaban seperti itu, kepala bawah merasa dilecehkan. Dalam hati ia berkata: “Kalau begitu aku akan makan sembarangan, toh satu tembolok juga”. Pada suatu hari kepala bawah nekat makan jamur beracun. Matilah burung berkepala dua tadi.

Cerita di atas dapat dikaitkan kepada pemimpin dan gaya kepemimpinannya yang kelihatan anggun dan berwibawa. Ia menempatkan posisi pada menara gading dikelilingi kemewahan puja puji dan berbagai kenikmatan duniawi. Di lain pihak, anak buah yang menjadi bawahannya seakan budak yang dijadikan ganjalan penyangga kemegahannya itu. Ia tak mempedulikan kesedihan dan kesusahan bawahannya. Ia juga tidak mempedulikan kesengsaraan masyarakat luas akibat kebijakan yang diambilnya.

Cepat atau lambat bawahan, anak buah ini bisa saja nekad, melakukan harakiri, melakukan tindakan fatal yang muaranya memang

pimpinan tadi akan rontok di singgasananya. Mereka bisa saja nekad karena pemimpin sudah lupa Pemimpin tidak jarang malahan menyakiti mereka. Anak buah sudah biasa sengsara, tidak usah dimanja nanti malah nglunjak dan repot mengatasinya, demikian pikir sang pemimpin. Bayangkan saja, betapa tega seorang pemimpin menjadikan bawahannya sebagai ganjel kesuksesan dan keberhasilannya.

Empati seorang pemimpin terhadap anak buah seharusnya merupakan kesegaran roh dan jiwa mereka dalam bekerja.

Pemimpin yang berempati tidak mematikan tetapi menyadarkan, membangkitkan, menghidupkan, memberi daya gerak dan daya untuk menjadi dinamis tumbuh dan berkembang. Dirinya bukan menjadi matahari tetapi justru menjadi bulan, memberi pencerahan dan penerangan di saat kegelapan.

Di saat terjadi kesesatan, di saat terjadi kelesuan, di saat terjadi keputusasaan pemimpin tampil sebagai sang penuntun, pembimbing, bintang pedomam, arah, dan tujuan. Hidupnya siap berkorbaan dalam membangun dan mencapai sasaran. Tak gentar terhadap hambatan, tantangan, ancaman yang bisa merusak dan mematikan dirinya maupun keluarganya.

Jiwa solidaritas seorang pemimpin akan melegenda. Pemimpin dikenang bukan dari kekayaannya, kezalimannya, tetapi karena kerendahatiannya, empatinya, rasa senasib sepenanggungan, kerelaan berkorban, kemampuan membawa kemajuan, menempatkan pada tempat sebagaimana yang seharusnya. Dadi ratu kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane. Ratu iku anane mung winates dadi kawulo tanpo winates.

“Saya lebih senang dan bangga berada di tengah-tengah anak buah saya,” demikian dikatakan oleh Jenderal Sudirman. Walau sakit dan harus ditandu, ia ikut bergerilya untuk merasakan apa yang menjadi penderitaan anak buahnya.

Kehebatan seorang pemimpin bukanlah pada dirinya dan tebar pesonanya, tetapi ada suatu transformasi menjadi kebaikan dan selalu ada pebaikan. Mahatma Gandi sebagai pemimpin berani dan mau memberi

teladan dengan menenun sendiri pakaiannya. Ia tidak harus dengan berjas dasi. Martin Luther King Jr, pemimpin pergerakan antirasialis di Amerika, pun memperjuangkan hak-hak kaumnya dan berempati untuk tidak dengan kekerasan.

Bahkan, ia pun menjadi korban kekerasan yang menghilangkan nyawanya. Demikian pula Mahatma Gandhi.

Lagi-lagi pemimpin memang yang akan memberi warna menjadi bintang pedoman arah dan tujuan. Menginspirasi, mampu memberdayakan dan mengajak anak buahnya mewujudkan mimpi-mimpinya. Di zaman modern ini pemimpin diituntut untuk berani, cerdas, dan murah hati, yang melayani.

Dia mau menjembatani dan mau memahami bahkan menjadi role model bagi rekan dan bawahannya. Ki Hajar Dewantoro tokoh pergerakan nasional pendidikan mengajarkan filosofi :

1. Ing Ngarso Sung Tulodo
2. Ing Madyo Mangun Karso
3. Tut Wuri Handayani.

Keutamaan Pemimpin dalam Kepemimpinannya setidaknya mencakup :

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kratifitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu,
5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini
6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi

8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan memdapat dukungan secara internal maupun eksternal.

Pemimpin simbol dan sumber energi. Pemimpin itu memberi warna, cerah kusam hingga gelap yang merupakan refleksi kinerjanya. Pemimpin mewakili dari banyak orang dan mengemban amanah atas kekuasaan dan kekuatan untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada. Pemimpin sang pemimpi. Pemimpin yang tidak memiliki mimpi bukan pemimpin. Mimpi dalam konteks ini bukanlah halayanatau bualan pepesan kosong melainkan memiliki pemikiran yang visioner. Agar mampu memperbaiki kesalahan di masa lalu, menjaga marwah dan nilai nilai luhur yang telah dirintis para pendahulunya. Mampu dan siap di era kekinian dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Pemimpin dengan kepemimpinanya merupakan legacy. Pemimpin memiliki gaya kepemimpinan dari otoriter hingga demokratis yang gaya gaya tersebut dapat diterapkan sesuai dengan konteksnya. Pemimpin ini bagai dirigen yang memainkan orkestra dengan harmoni menyanyikan lagu lagu indah. Pemimpin merupakan kekuatan untuk menggerakkan dan memainkan kinerja sesuai standar standar yang dibuatnya untuk dapat mencapai tujuan.

Pemimpin sebagai simbol dan sumber energi. Kemampuan menjadi simbol dan sumber energi akan muncul dari upaya mewujudkan mimpinya agar dapat menjadi kenyataan. Pemimpin sebagai simbol energi, keberadaannya mampu menjadi kekuatan baru penyegaran dan harapan. Pemimpin sumber energi kekuatan dan kekuasaannya mampu menghasilkan kinerja yang berguna bagi terwujud dan terpeliharanya kehidupan serta meningkatnya kualitas hidup banyak orang. Pemimpin yang mampu menjadi simbol dan sumber energi ini akan mampu membawa apa saja yang dipimpinnya mendapatkan kepercayaan banyak orang. Dan mengangkat harkat dan martabat scr lingkup kecil terbatas hingga lingkup yang luas bahkan mengglobal. Kekuatan seorang pemimpin pada energi yang dihasilkan dapat dilihat dari kebijakan

kebijakannya.

Kita dapat belajar dari gelar Sultan Agung hanyokro kusumo senopati ing ngalogo sayidin panoto gomo khalifatuloh. Secara bebas dapat dimaknai sebagai berikut : Raja sang pemimpin besar, kusuma bangsa panglima perang pemimpin agama dan utusan Tuhan. Kekuatan dan kekuasaan pemimpin menjadi sangat penting dan mendasar untuk memiliki ketahanan, daya tangkal bahkan daya saing. Karena dalam hubungan apapun senantiasa ada hubungan kekuatan.

Sespim: lembaga pendidikan yang mendidik calon calon pimpinan di masa depan didasarkan pada moralitas, kesadaran, tanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan dan dan memelihara keamanan dalam negeri dan mendukung pembangunan nasional.

Suatu bangsa yang berdaulat memiliki ketahanan atas berbagai gerusan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu juga memiliki kemampuan memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya. Keamanan dalam negeri adalah keteraturan sosial secara idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya secara pribadi, di ruang publik, profesi dan berbagai pekerjaan, lingkungan hidup, dan mayantara yang dapat mendukung produktifitas maupun upaya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keamanan dalam negeri diwujudkan dalam keteraturan sosial sehingga terjaminnya keamanan segala sumberdaya negara dari manusianya, kekayaan alamnya, idiologi, politik ekonomi dan sosial budayanya untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang sehingga berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal bahkan berdaya saing.

# KEUTAMAAN BAGI PETUGAS POLISI DALAM PEMOLISIANNYA [9]

Keutamaan bagi petugas Polisi dapat ditunjukan tatkala pemolisiannya merupakan upaya-upaya bagi :bkemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dapat diimplementasikan dan berfungsi secara optimal. Keutamaan menjadi acuan moralitas bagi petugas Polisi atau pengendalian antara niat baik, niat buruk untuk tetap berjalan sesuai aturan yang sebagaimana seharusnya serta bertanggungjawab atas tindakannya.

Keutamaan menanamkan : kesadaran tanggung jawab dan disiplin. Pengendalian inilah menjadi suatu tanda keutamaan bagi petugas Polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya yang mampu menjadi : ikon pelindung pelayan dan pengayom masyarakat serta penegak hukum dan berkeadilan dan bijaksana. Dimana, Keutamaan dalam konteks bagi petugas kepolisian dalam pemolisiannya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat serta penegak hukum dan keadilan dapat berfungsi optimal dengan pantas dan benar, layak dan menyelamatkan yaitu terjaminnya keamanan dan rasa aman warga masyarakat.

Dengan adanya jaminan keamanan dan rasa aman dalam masyarakat berarti masyarakat dapat menjalankan aktivitas untuk menghasilkan produktifitas yang dapat digunakan untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang.

Pada sistem pendidikan kepolisian pembelajaran keutamaan adalah mendidik dan melatih bagi para petugas Polisi agar memiliki keberanian dan kemampuan mengatasi berbagai masalah dan persoalan dalam menuju kebaikan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, terus bekerja keras penuh semangat untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.

9 https://polisiindonesia.id/2024/02/05/cdl-keutamaan-bagi-petugas-polisi-dalam-pemolisiannya/

Nilai-nilai kemanusiaan ditanamkan agar para petugas Polisi ini menjadi penolong bagi kaum yang rentan dan lemah.

Bagi petugas Polisi dalam pemolisiannya bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban dapat dijabarkan dari karakternya yaitu :

1. Integritas,
2. komitmen,
3. kompetensi,
4. keunggulan.

Membangun keutamaan Polisi dalam pemolisiannya dapat dilakukan mulai dari sistem pembinaan sumber daya manusia : proses rekrutmen dan pendidikkan baik dasar maupun lanjutan, penggunaannya, pemeliharaannya hingga pengakhirannya.

Kesadaran dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu pada sistem pendidikan, moralitas merupakan dasar bagi penanaman kesadaran. Kesadaran, tanggung jawab dan disiplin merupakan hal pertama dan utama yang wajib dibangun sebagai strata tertinggi dari moralitas kemanusiaan dalam kehidupan bersama sebagainya mahkluk sosial. Hidup bersama di tingkat keluarga, komunitas, institusi, masyarakat, bangsa, dan negara memerlukan kesepakatan yang mampu menata kehidupan sosial yang sesuai dengan konteksnya.

Sebagai petugas Polisi dalam pemolisiannya selain sebagai pelindung pengayom juga sebagai penegak hukum dan keadilan. Serta Bagi petugas Polisi disiplin, patuh dan taat pada aturan perundang undangan maupun kode etik kepolisian yang dilakukan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab secara : moral, hukum, administrasi, fungsional maupun sosial merupakan bentuk penghormatan tertinggi akan nilai-nilai kemanusiaan dengan terwujudnya keteraturan sosial bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban.

Kerelaan untuk mentaati adalah suatu pengorbanan atas kepentingannya dan merupakan empati bahkan sebagainya wujud solidaritas sosial. Kesadaran dan tanggung jawab ini merupakan buah dari pendidikan. Segala sesuatu ada karena dimengerti (filsuf Berkley). Adanya kesadaran

dan tanggung jawab karena mempunyai pengertian atau karena dipahami. Bagaimana bisa memahami? Dari pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang mampu memberikan transformasi, bukan yang sifatnya menghafal. Model pembelajaran menghafal, didoktrin, dipaksa, diancam seperti ini penuh dengan kekerasan simbolik dan bukan pembelajaran yang transformatif.

Pembelajaran yang tidak transformatif menimbulkan keterpaksaan dan ketakutan adanya tekanan. Akibatnya, yang belajar pun dipenuhi oleh kemunafikan, kepura-puraan, dan kepalsuan sehingga yang dilakukan bisa bertentangan dengan hati nuraninya. Apabila ini yang terjadi, cepat atau lambat, akar-akar penunjang kehidupan sosial akan putus dan perlahan-lahan roboh.

Pertanyaanya, "Bagaimana membangun kesadaran dan tanggung jawab?" Membangun kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin bagi petugas Polisi dilakukan dalam proses pendidikan yang ketat namun humanis :

1. Dimulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari hari di asrama pengecekan dari setelah bagun pagi, kegiatan olah raga pagi, makan pagi, mengikuti perkukialahan dan pelatihan, makan siang, kegiatan pengasuhan sore hari, makan malam, belajar apel malam sd jqm istirahat malam semua diatur scr ketat dan penilaian secara merit system.
2. Pola pendidikan mentorship pengasuhan oleh wali kelas atau patun dan asisten yang secara terus menerus mendampingi para peserta didik.
3. Pendidikan sepanjang hayat yang terus saling asah asih dan asuh walaupun sudah berdinas ( mentorship ).
4. Pengajaran tentang kompetensi kepolisian yang berkaitan dengan ilmu kepolisian
5. Bela diri kendo dan judo dan sebagainya, sebagai penanaman kejujuran kebenarian ketangguhan dan rasa percaya diri.
6. Latihan penangkapan tersangka.
7. Latihan menembak untuk melindungi masyarakat maupun diri sendiri.

8. Acara tradisi yang menyentuh hati dan penanaman pesan moral seperti :
   - Penyerahan kartu anggota
   - Penyerahan peluru
   - Pesan jangan mati dalam tugas
   - Rasa asih asah dan asuh ini menjadi bekal hidup kecintaan dan kebangaan atas pilihan mnjadi polisi.
   - Upacara perpisahan. Dan masih banyak lagi yang dapat dikembangkan.

Keutamaan bagi petugas Polisi dalam pemolisiannya dituntut untuk : peka, peduli dan berani berbela rasa akan kemanusiaan merupakan produk dari kecintaan, perhatian, empati, pemberian kepercayaan, dan keteladanan. Nilai nilai humanisme ditransformasikan secara terua menerus dan ada keteladanan dari para pengasuh, guru, dosen, widya iswara sehingga para peserta didik maupun calon petugas Polisi, terinspirasi, tersentuh akan hal-hal yang hakiki dalam hati nurani manusia sehingga kesadaran merupakan respon dari apa yang diperolehnya dalam proses pembelajaran

Selain itu, yang tak kalah penting adalah infrastruktur pendukung yang memberikan ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya suatu kesadaran dan tanggung jawab. Infrastruktur pendukung pendidikkan yang memenuhi standar kemanusiaan akan berdampak pada sikap perilaku humanis yang menjadi habitus bagi para siswa.

Selain itu pemberian sanksi tegas bagi para pelanggar juga merupakan bentuk pendisiplinan dan penanaman rasa yanggung jawab sbg penegak hukum dan keadilan.

Edukasi, infrastruktur, penegakkan hukum merupakan satu kesatuan yang secara simultan dibangun bersama untuk saling mendukung dan melengkapi. Ketiganya merupakam sistem.yang mempunyai standardisasi baik untuk masukan, proses, maupun keluarannya.

Kesadaran dan tanggung jawab merupakan dampak atau produk dari edukasi dan pembangunan infrastruktur penegakkan hukum yang transformatif sekaligus merupakan produk kinerja para penyelenggara

kehidupan sosial dari tingkat keluarga hingga negara yang mampu menunjukan adanya (1) kebijaksanaan, (2) empati, (3) kecintaan, (4) ketulusan, (5) pengorbanan, (6) keteladanan, (7) kecerdasan, (8) wawasan yang luas, (8) empowering, (9) integritas, dan (10) komitmen. Semua itu merupakan bentuk dari kesadarian dan tanggungjawabnya atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemampuan memanusiakan manusia ini terwujud dari adanya kesadarian dan tanggung jawab yang akan menganggkat harkat dan martabat manusia, citra, dan harga diri.

Keutamaan bagi petugas Polisi dalam pemolisiannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban sangatlah penting untuk mendorong bagaimana dirinya mampu menjadi role model/ ikon/ role model yang menjadi panutan.

Keutamaan petugas Polisi dalam pemolisiannya, setidaknya dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Memiliki kesadaran memperbaiki, siap dimasa kini, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik,
2. Visioner,
3. Mampu membawa dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup,
4. Memahami hal-hal yang utama dalam bidangnya,
5. Memiliki kemampuan membangun sehingga orang mudah melakukan hal-hal yang utama.

Diera digital Core value yang menjadi keutamaan bagi petugas Polisi untuk menumbuh kembangan rasa kebanggaan dan kecintaan sebagai petugas Polisi dan Polisi dapat dipercaya dan menjadi ikon akan keamanan, keselamatan dan kemanusiaan.

Spirit kemanusiaan yang kuat akan menjadikan /Polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Spirit tadi akan menjdi nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran dan harus diperjuangkan untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang di setiap petugas Polisi dan pemolisianyapun menjadi cerminan dari kemanusiaan tersebut. Pikiran, perkataan dan perbuatan Polisi dalam pemolisianya baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai pribadi.

Pelayanan kepolisian adalah pelayanan kemanusiaan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya.

Menjadi petugas Polisi merupakan suatu profesi yang dituntut profesional. Makna profesional bagi petugas Polisi dapat ditunjukkan dari kemampuan Polisi mengembangkan pemolisiannya sehingga ahli yang mengacu pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, mengacu pada pemikiran beilay maupun Profesor Parsudi Suparlan, dinyatakan sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang (1) masalah sosial dan penangannya; (2) isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat; (3) keteraturan dan penataannya; (4) penegakan hukum dan keadilan; (5) penyelidikan dan penyidikan kriminalitas dan pencegahanya.

Ilmu Kepolisian, sebagai dasar profesi Kepolisian, bersifat mempelajari apa yang dikerjakan atau yang menjadi pekerjaan Polisi. Membahas kepolisian dapat dilihat polisi sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi.

Ketiga pendekatan Polisi dalam pemolisannya keutamaannya sama yaitu bagi: kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang terselenggara dalam pemolisian yang proaktif, problem solving dengan mengedepankan pencegahan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya berbagai terobosan yang profesional, cerdas, bermoral dan modern antara lain dari:

1. Kepemimpinan;
2. Komitmen;
3. Integritas;
4. Core value;
5. Think out of box;
6. Komunikasi;
7. Pemberdayaan (Empowerment);
8. Program unggulan;
9. Konsistensi, dalam monitoring dan evaluasi
10. Pola pengembangan.

# POLISI OJO ILANG KAMANUNGSANE KEUTAMAAN BAGI PETUGAS POLISI [10]

***Dadi Polisi kudu ono lelabuhane. Ora ono lelabuhane ora ono gunane, Dadi Polisi iku anane wong winates dadi kawulo tanpo winates.***

**Pendahuluan :**

Menjadi Polisi harus ada manfaatnya, kalau tidak ada manfaatnya maka tidak ada gunanya.

Menjadi polisi itu ada batasnya, menjadi masyarakat itu tanpa batas. Kalimat tersebut diadopsi dari tulisan Sindunata (1999) untuk menunjukkan bahwa keberadaan polisi karena adanya kebutuhan pelayanan kepolisian yang menjadi bagian dari masyarakatnya yang diterima dan mendapatkan dukungan dari masyayarakat yang dilayaninya karena keberadaanya mampu mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, adanya keamanan dan rasa aman.

Polisi dapat dikatakan sebagai bayang-bayang dari masyarakatnya, jangan berharap punya Polisi yang sehat dalam masyarakat yang sakit. Membahas Kepolisian dapat dilihat dari pemolisiannya, Polisi sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi. Polisi bekerja melalui pemolisian .

Ketiga pendekatan Polisi tersebut terdapat dalam sebuah birokrasi kepolisian maupun dalam masyarakat. Penilaian tentang Kepolisian dan pemolisiannya dipelajari dan dikaji serta dikembangkan dalam ilmu Kepolisian.

Pemolisian dapat dimaknai sebagai segala usaha maupun upaya Kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau

10 https://polisiindonesia.id/2024/02/11/cdl-polisi-ojo-ilang-kamanungsane-keutamaan-bagi-petugas-polisi/

tanpa upaya paksa dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan (lihat Bayley, 1995; Rahardjo. 2002; Suparlan, 1997, 1999, 2004, 2009).

Pemolisian dapat menjadi suatu karakter bagi institusi Kepolisian yang dapat dibangun menjadi model yang bervariasi antara satu tempat dengan yang lainnya. Model pemolisian dapat dibangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan institusi kepolisian.
2. Wilayah, masalah yang dihadapi, potensi-potensi yang dapat diberdayakan, corak masyarakat dan kebudayaannya, nilai-nilai kearifan lokal, dan sebagainya.
3. Fungsi dan tugas pokok Polisi, baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas kepolisian. Arah untuk menuju kepolisian sebagai institusi yang profesional (ahli), cerdas (kreatif dan inovatif), bermoral (berbasis pada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin) dan modern.
4. Model-model pembinaan baik untuk kepemimpinan, bidang administrasi, bidang operasional maupun capacity building.

Penyelenggaraan pemolisian sebagai karakter bagi institusi dan petugas Polisi dalam menyelenggarakan tugasnya juga mencerminkan Keutamaan bagi petugas polisi.

Keutamaan sering diungkapkan, namun maknanya dan implementasinya dalam pemolisian belum banyak dibahas/ jarang ditemukan. Keutamaan dalam konteks pekerjaan bagi petugas Polisi dapat dikaitkan dengan bagaimana petugas polisi dalam hidup dan kehidupanya dan pemolisiannya menjadi optimal, bijaksana yang dilakukan atas dasar kesadaran.

Implementasi keutamaan dalam pemolisiannya diselenggarakan secara profesional, cerdas, bermoral dan modern yang ditunjukan dengan kemampuanya mengendalikan diri dari berbagai keinginan-keinginan baik yang rasional maupun tidak rasional untuk keutamaan (keugaharian) (Wibowo, Setyo 2015).

Selain itu juga dapat membawa manfaat bagi sesama, alam lingkungan dan kehidupan. Keutamaan secara singkat dapat juga di pahami sebagai upaya memanusiakan manusia/ kemanusiaan, mampu membuat diri dan sesamanya bahagia, apa yang menjadi hal utamanya tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah dan secara optimal.

Melakukan sesuatu secara optimal bukan karena sesuatu (ketakutan, keterpaksaan, dipaksa, diancam, menginginkan sesuatu, atau ada pamrih) melainkan karena ada kesadaran. Kesadaran melakukan keutamaan dalam pemolisiannya secara optimal merupakan pemahaman dan penghayatan akan sesuatu dari dirinya yang merupakan refleksi atas kehidupan yang menunjukkan dirinya tercerahkan sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya (otak, otot dan hati nuraninya) untuk melakukan yang terbaik, bersahaja, bijaksana sehingga membawa manfaat, menggembirakan, dan membawa perbaikan/ peningkatan dan kemajuan bagi masyarakat yang dilayaninya.

Polisi sebagai fungsi maupun institusi yang didirikan sebagai bagian dari pemerintahan untuk mewujudkan, memelihara keteraturan sosial dapat diselenggarakan secara optimal dan sebagai refleksi atas keutamaan adalah terwujud dan terpeliharanya yaitu adanya keamanan dan rasa aman masyarakat.

Dengan demikian keutamaan dalam pemolisiannya adalah bagaimana Polisi dapat memanusiakan manusia dan mengangkat harkat serta martabat manusia. Kautamaan bagi petugas Polri dapat ditunjukkan dari kesadaranya untuk mampu mawas diri, mengambil keputusan secara bijaksana yang menjadi core / inti pekerjaannya dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat dan memberikan bantuan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, moral masyarakat, isu-isu penting yang terjadi dan penegakan hukum serta keadilan. Menurut Prof. Franz Magnis Suseno (1999) keutamaan dimaknai :

“ Tidak sulit untuk menjadi baik dan tidak sulit untuk menjalankan yang baik dan benar bahkan apa yang dilakukan untuk kebaikan dan kebenaran akan mendapat dukungan dan menjadi core valuenya” .

Dengan demikian keutamaan bagi petugas Polisi adalah kemanusiaan,

yang ditunjukkan pada pola-pola pemolisiannya yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia pada tingkat management maupun operasional baik dengan maupun tanpa upaya paksa.

Polisi dalam pemolisiannya bukan sekedar sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum melainkan juga mampu menjadi penjaga kehidupan. Maka penjaga kehidupan dapat dipahami: bahwa dalam masyarakat untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktivitas.

Dalam proses produktivitas tersebut ada kemungkinan terjadi ancaman, hambatan, gangguan yang dapat menghambat, merusak dan mematikan produktivitas sehingga untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang produktif diperlukan adanya aturan, norma, moral, etika dan hukum untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan adanya institusi yang menangani salah satunya adalah Polisi.

Dalam konteks ini Polisi dapat dimaknai sebagai Co Producer dan spiritnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat . dalam konteks ini, hal tersebut dapat ditunjukkan produk kinerj apolisi adalah terwujud dan terpeliharanya kemanan dan rasa aman. Dengan demikian polisi tidak bermain-main dengan hal-hal yang ilegal, tidak menerima suap, tidak memeras dan menjadi backing dalam berbagai perikehidupan ( Suparlan 1999, Chryshnanda DL, 2009, 2011, 2014).

Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang produktif. Hukum dan keadilan merupakan ikon peradaban, Polisi dalam menegakkan hukum menjadi bagian pembangun peradaban. Polisi menegakkan hukum adalah untuk :

1. Menyelesaikan konflik secara beradab.
2. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.
3. Melindungi, mengayomi, melayani korban dan pencari keadilan.
4. Adanya kepastian sehingga hukum bisa menjadi sandaran.
5. Bagian dari edukasi (membangun budaya patuh hukum).

Tatkala bagi Petugas Polisi untuk melakukan hal-hal yang menjadi keutamaan mengalami kesulitan atau dipersulit, tidak mendapat dukungan artinya apa yang ideal bukanlah menjadi keutamaan dalam implementasi pemolisian, sehingga antara yang ideal dengan yang aktual berbeda bahkan bisa bertentangan.

Apa yang salah atau yang tidak benar telah mejadi habitus , bahkan bisa juga menjadi kebanggaanya. Salah satu penyebabnya yang ideal tergerus oleh yang aktual karena adanya sistem-sistem pendekatan personal dalam birokrasi yang patrimonial, sehingga birokrasi menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan kemanusiaan akan diabaikan bahkan bisa dihilangkan.

Namun tatkala kemanusiaan menjadi keutamaan maka Polisi akan menjadi kebanggaan dan yang akan dicari serta dibutuhkan dan dirasakan keberadaanya oleh masyarakat. Dan dijadikan acuan karena Polisi mampu menujukkan standar dasar dalam pemolisiannya sehingga Polisi dapat penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan menjadi pejuang-kemanusiaan.

Tatkala Polisi kehilangan keutamaannya maka Kerugian besar (social cost yang mahal) bagi polisi adalah kehilangan atau tidak mendapat kepercayaan. Pepatah orang jawa menyebutkan “Kelangan bondo iku ora kelangan, kelangan nyowo iku kelangan separo, kelangan kepercayaan, kelangan sak kabehane (kehilangan harta itu tidak kehilangan, kehilangan nyawa kehilangan setengah, kehilangan kepercayaan kehilangan semuanya).

Pada kenyataanya yang semestinya menjadi keutamaan, justru dianggap menjadi penghambat / benalu dan sering disalah gunakan / menyimpang sehingga tanpa disadari keutamaan telah dihilangkan / dimatikan dari / dengan nilai-nilai hedonisme, keserakahan, KKN yang bukan semestinya.

Selain itu, juga sulit untuk meyakinkan hal-hal yang baik dan benar karena tidak ada temannya / tidak mendapatkan dukungan bahkan bisa diserang, ini sebenarnya telah terjadi pembusukan dan pelapukan-pelapukan dari dalam. “Bener yen ra umum iku salah, salah yen wis

umum iku dadi bener “. Hadap kanan grak ! Satu hadap kanan sembilan puluh sembilan hadap kiri, siapa yang salah dan siapa yang dibenarkan ? Cepat atau lambat tatkala Polisi kehilangan keutamaan, maka Polisi secara pribadi, secara fungsional maupun institusi akan mengalami kemunduran, kerusakan bahkan kematian, akibatnya keberadaan Polisi tidak dipercaya, tidak dianggap penting dan di label buruk.

Keutamaan memang harus terus dibangun disadarkan, dibangkitkan dan diberdayakan agar terus dapat tumbuh, hidup dan berkembang.

**Polisi Tidur Saja Bikin Masalah**

Seringkali kita mendengar anekdot dan plesetan-plesetan tentang Polisi yang semuanya mencerminkan suatu ungkapan kekecewaan, sakit hati yang disampaikan sebagai bentuk grundelan-grundelan/ humor-humor saat mereka berkeluh kesah.

“ Polisi tidur saja bikin masalah bagaimana yang bangun?”. Polisi dalam menjalankan pemolisianya sering di label sebagai tindakan ngerusuhi / mengganggu walaupun tidak semuanya benar. Ada kalanya pelaksanaan pemolisianya juga diganggu / dirusuhi dan Polisi dijadikan kambing hitam / yang dipersalahkan. Ngrusuhi (mengganggu) sebagai sebuah penyimpangan sosial yang menghambat, merusak, menggagalkan, bahkan mematikan produktivitas msyarakat.

Ngrusuhi dampak dari perebutan sumber daya, perebutan pendistribusian sumber daya maupun harga diri yg dilandasi sifat iri dengki, ketidaksukaan terhadap sesuatu, anti terhadap sesuatu yang akarnya adalah kebencian dan intoleransi (Suparlan, 1999, 2004, 2009).

Tatkala ngrusuhi sudah menjadi pembenaran maka akan timbul labeling, prasangka dan puncaknya adalah kebencian. Tatkala sudah menjadi kebencian sebenarnya tinggal menunggu triger saja untuk meledak dan menjadi konflik.

Dengan kebencian dan intoleransi, maka siapa yang kuat atas yang lemah akan memaksakan kehendak “pokok’e”. Kelompok yang lebih kuat mendominasi kelompok yang lemah. Tidak ada lagi pertimbangan serta tidak mempedulikan orang lain maupun dampaknya. Ngrusuhi ini

jelas menjadi benalu yang mengerat dan menggerogoti produktivitas masyarakat karena kehilangan rasionalitasnya.

Kelompok primordialpun akan dijadikan alat untuk mencari legitimasi dan solidaritas, karena tidak rasional, yang mengedepankan emosional dan spiritual.

Sikap ngrusuhi sebenarnya adalah tindakan kontra produktif yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan Polisinya, sebagai dampak dari birokrasi feodal yang membanggakan produk-produk hutang budi dari kaum bebek yang tidak memiliki jati diri. Sifatnya pasti hanya cari enaknya dan menyengsarakan rakyatnya. Mungkin dapat dianalogikan sebagai musang tak berbulu yang menyalahi kodrat dan takdirnya sebagai musang yang semestinya berbulu. Kalau sebagai aparatur penyelenggara negara yang menyalahi kodratnya, ia semestinya menjadi penjaga malah menjadi pemangsa.

Orang yang senang atau memprovokasi untuk ngrusuhi, ingin mendominasi dan menjadi dominan dalam penguasaan sumber daya maupun pendistribusianya (by design). Mereka adalah golongan preman yaitu seseorang / sekelompok orang yang menikmati hasil dari keringat orang lain, dengan mengatasnamakan berbagai kebenaran dengan pembenaran-pembenaran.

Mereka sebenarnya orang-orang pengecut, penghianat, dan tidak memiliki keutamaan serta jahat hati nuraninya. Mengapa demikian? Karena tidak berani menghadapi kenyataan, tidak berani sebagai fighter dan jelas kelasnya sebagai pecundang. Kegemaraan mereka lempar bom sembunyi identitas, menyulut kekacauan tanpa rasa bersalah, dan menghembuskan kebencian untuk mengadu domba. Semua ini dilakukan dengan tujuan :

(1) membuat tidak nyaman.

(2) melemahkan.

(3) memfitnah.

(4) memutarbalikan fakta.

(5) menghembuskan kebencian.

(6) mempermalukan.

(7) menggagalkan program atau usaha baik lainnya.

Pertanyaanya, mengapa semangat ngrusuhi ini terus ada, tumbuh dan berkembang? Jawabanya tentu sangat kompleks, tetapi setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan benang merah sebagai akar masalahnya antara lain :

1. "Sistem feodalisme" yang terus ditumbuh-kembangkan. Menjadi akar dari birokrasi patrimonial dengan aneka pedekatan personal yang sarat dengan KKN.
2. Rasa nasionalisme yang buruk atau lebih bangga dan mengembangkan ego sektoral.
3. Berbagai kebanggaan semu yang menjadi keyakinan sebagai nilai-nilai budaya yang terus ditumbuh-kembangkan. Sehingga susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah.
4. Orientasinya bukan pada peningkatan kualitas hidup rakyatnya, tetapi untuk kesenangan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Sehingga dalam semangatnya terus saja memperkeruh suasana untuk keuntungan-keuntungan baginya yang menggerogoti rakyatnya.
5. Politiknya penguasaan dan kekuasaan dengan cara-cara kotor dan memalukan, Pemerasan, penyuapan, dan berbagai pungutan tidak resmi menjadi pemandangan yang biasa ditemukan dalam birokrasi, bahkan dianggap telah membudaya (sebagai habitus) yang dipertahankan para kelompok status quo/ comfort zone. Apa yang diselenggarakan penuh kepura-puraan dan supervisial, semuanya semu (tipu-tipu/ pseudo), dan sebatas seremonial dalam program-program birokrasi.

Pemimpinnya sering merupakan produk hutang budi, tidak berkompetensi dan tidak mampu dijadikan role model sehingga kebijakan dan transformasinya kacau dan mengacaukan yang bisa ngerusuhi/ dirusuhi.

Nasehat leluhur: ojo sok ngrusuhi yang artinya: jangan suka mengganggu. Karena yang suka ngrusuhi itu benalu, pecundang, pengecut, penghianat, pengerat yang memamerkan ketololannya. Akibat dari pikiran dan tindakan ngrusuhi ini : memuakkan, njelehi, ngriseni, dan menjadi kontra produktif.

Etika bagi pejabat Kepolisian : kesadaran, Tanggung jawab dan Disiplin

**Moralitas bagi pejabat polisi dapat di maknai dari etika pejabat publik.**

Etika publik adalah refleksi atau penghayatan atas standar / norma yang menentukan baik / buruk, benar / salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan yang diambil oleh para pejabat publik dalam rangka mengimplementasikan pelayanan public (Haryatmoko, 2014).

Etika publik merupakan integritas bagi pejabat publik dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan kepada publik yang buruk akibat sarat kepentingan dan korupsi. Yang berdampak pengabaian kepentingan publik dan lebih mengedepankan kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Pelayanan publik tanpa standar kompetensi dan lemahnya komitmen akan menggerus integritas para pejabat dan politisi.

Kalau sudah tergerus bagaimana akan care dan bagaimana akan meningkatkan kualitasnya? Tentu saja pelayanannya justru dapat membebani dan mempersulit bagi publik yang menerima pelayanan.

Para petugas Polisi sebenarnya merupakan bagian dari pejabat publik yang semestinya mempunyai standar etika publik yang mencakup :

1. Sistem, Prosedur, Instrumen.
2. Pelayanan publik.
3. Integritas yang tidak lepas dari kompetensinya. Etika publik menjadi refleksi bagaimana menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata. Sistem dan prosedur serta instrumen bagi pelayanan publik juga terkait dengan pembangunan infrastruktur dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter.

Aturan yang bisa mengawasi pejabatnya. Semua ini adalah untuk membangun institusi yang adil.

Institusi yang adil dibangun atas spirit untuk menyelenggarakan tugasnya secara profesional, cerdas, bermoral dan modern yang mampu memberikan pelayanan prima. Dari institusi yang adil akan bisa membangun pelayanan publik. Membangun karakter, membangun kepercayaan, membangun kemitraan dalam penyelenggaraan tugas mencerminkan sebagai institusi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern. Polisi sebagai aparatur pelayanan publik diberi kewenangan di bidang :

1. Perijinan.
2. Pengawasan / fungsi kontrol.
3. Upaya paksa. Kewenangan tersebut sarat kekuatan yang wajib dipertanggung jawabkan baik secara administrasi, secara hukum dan secara moral, karena sarat dengan potensi penyimpangan yang harus ada pembatasan dan pengawasan kewenangan.

Kewenangan tatkala tidak dibatasi dan tidak diawasi akan berpotensi untuk disalah gunakan. Salah satu bentuk pembatasan dan pengwasan kewenangan pollisi adalah etika kerja yang dijadikan pedoman apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Pembatasan dan pengawasan kerja bagi petugas polisi dalam masyarakat yang demokratis merupakan bentuk tanggungjawab kepada publik atas kualitas kinerja, produk dari kinerja dan penggunaan kewenangan. ” Power tends to corrupt, power absolutly corupt absolutly” (John Emerich Edward Dalberg Acton, first Baron Acton, 1834–1902).

Tatkala kekuasaan / kewenangan tanpa pembatasan / tanpa pengawasan maka akan menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Korupsi kepolisian dapat dipahami sebagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan priibadi / kelompoknya, yang menjadi beban atau menjadi kontra produktif dalam masyarakat. Korupsi Kepolisian ini antara lain :

1. Merencanakan sesuatu yang tidak sesuai sebagaimnaa yang semestinya yang direkayasa seolah-olah benar (mark up, membuat kegiatan fiktif, membuat laporan palsu dan sebagainya. Tindakan ini sebagai bentuk dari niat untuk mencari keuntungan pribadi / kelompok yang merugikan keuangan negara.
2. Meminta sesuatu dari masyarakat atas pelayanan kepolisian (pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, membuat sistem pelayanan yang bertingkat tingkat waktunya sehingga perlu dana tambahan untuk dipercepat, melakukan tebang piliih (yang tidak memberi sesuatu ditindak dan membiarkan bagi yang sudah memberi sesuatu).
3. Menakut-nakuti / membuat/ memberi informasi yang tidak benar yang mengakibatkan masyarakat takut dan memilih jalan-jalan pintas dengan memberi sesuatu kepada Polisi).
4. Menjadi backing atas tindakan-tindakan yang illegal / tindakan-tindakan yang kontra produktif.
5. Melakukan tindakan pembiaran atas pelanggaran karena telah mendapat sesuatu dari pelanggar.
6. Bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan tindakan yang kontra produktif / yang berdampak pada terhambat, rusak bahkan matinya produktifitas masyarakat.
7. Mempermainkan hukum sebagai alat untuk memperoleh sesuatu baik dari tersangka, korban maupun saksi (Chryshnanda DL, 2009).

Tindakan korupsi pada kepolisian bisa digolongkan sebagai grass eater (sekedar untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari) dan meat eater (membangun sistem yang bisa memperkaya pribadi/ kelompoknya sampai 7 turunan dan 8 tanjakan). Itu semua dilakukan melalui kolusi dan nepotisme.

Memberantas korupsi salah satunya adalah membangun sistem, edukasi untuk menanamkan kesadaran bagi para petugas Kepolisian dan penegakkan hokum yang tegas dan tidak tebang pilih.

Etika kerja ini sebagai bentuk moralitas bagi petugas polisi untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya . Tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif atau berdampak menjadi korupsi atau hal-hal yang merusak nama baik kepolisian. Etika kerja ini berlaku di semua lini yang bervariasi sesuai dengan fungsi, bidang /kelompok tugasnya yang mencakup : kepemimpinan, administrasi, operasional dan capacity building.

**Nek wani ojo wedi-wedi , nek wedi ojo wani wani**

Makna dari :Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani wani, secara singkat jangan ragu-ragu.

" Ragu-ragu mundur". Tatkala akan melakukan keutamaan sebagai perbuatan yang baik dan benar belum tentu jalannya lancar / mendapat dukungan dari semua pihak, bisa saja sebaliknya. Yang menjadi sahabat, teman seperjuangan, pendukung loyal sekalipun bisa menghambat, merusak / mematikan dan membuat ragu-ragu (minggrang-minggring).

Dalam pementasan theater gandrik yang berjudul tangis ada contoh sikap minggrang minggring tadi. Den baguse ngarso (susilo) yang memerankan orang gila yang menimang-nimang sebuah benda : " iki telek opo roti (ini kotoran ayam/ roti) ini diucapkan berkali kali dan akhirnya dipegang dan di bau sambil berteriak :" ow telek".

Tatkala akan melakukan sesuatu yang baik dan benar, ragu-ragu atau tidak tegas bisa jadi keputusannya bukan lagi menemukan solusi tetapi menemukan telek (analogi bagi / musibah yang menyengsarakan bagi banyak orang).

Kalau sudah dipikirkan dengan matang, dengan tekad bulat apa yang akan dilakukan sehingga yang baik dan benar harus tegas, what ever will be, do it. Terutama dalam memberantas KKN, semakin ragu-ragu akan semakin banyak telek yang kita pegang.

Memang membuat tidak ragu-ragu bukanlah hal yg mudah, karena diperlukan adanya berbagai persyaratan baik akademis, sosiologis, politis, ekonomis dan banyak hal. Merubah sesuatu diperlukan ide, power, massa pendukung dan waktu yang tepat, namun tatkala sudah

diputuskan segera saja dilaksanakan yakin kalau yang dipegang roti bukan telek lagi, Semoga.

Standar moral dan profesional dibuat untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, penegakkan hukum serta tindakan-tindakan pencegahan maupun edukasi agar terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman. Standar dibuat dimaksudkan untuk peningkatan kinerja aparatur yang dianggap lamban, memihak, takut, melakukan pembiaran dan bahkan merekayasa. Keamanan dan rasa aman bervariasi coraknya dan bertingkat-tingkat dan semestinya ditangani dengan sinergis dan cara-cara yang bervariasi pula walau pada prinsipnya bisa sama.

Upaya mewujudkan keamanan dan rasa aman merupakan implementasi dari upaya membangun daya tangkal dari masyarakat serta menumbuhkembangkan rasa bangga dan kecintaan terhadap manusia dan kemanusiaan sebagai anak bangsa indonesia.

Dalam prosesnya aparatur penyelenggara negara bisa saja sebagai pelopor / penjurunya namun ia bukan untuk mendominasi / menyamaratakan dan bahkan menguasainya. Spirit dalam mewujudkan keamanan dan rasa aman serta keteraturan sosial adalah demokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengangkat harkat dan martabat manusia yang muaranya pada capacity building dan image building bagi institusi kepolisian, masyarakat bahkan negara dan bangsa.

Makna dari spirit ini adalah para aparatur penyelenggara negara ( eksekutif, legislatif dan yudikatif ) mampu menunjukan keutamaanya sebagai pejabat pelayan publik yang diberi kewenangan, kekuasaan dan tanggung jawab, mampu menunjukkan adanya pelayanan prima (pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).

Membangun Keutamaan memerlukan keberanian yang sebenarnya merupakan bentuk profesionalisme, kreatifitas, moralitas yang diselenggarakan atas dasar kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Dan yang penting dari semua itu adalah tidak membiarkan tumbuh dan

berkembangnya premanisme / mafia birokrasi dan tiadanya lagi cara-cara preman. Dengan demikian, pemerasan, suap dan permainan atas hal-hal yang ilegal akan menjadi hal yang tabu.

"nguwongke" (memanusiakan manusia, kemanusiaan) menjadi hal yang utama dapat berfungsi secara optimal

Keutamaan bagi Polisi dapat ditunjukan tatkala pemolisiannya sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan dapat berfungsi secara optimal.

Keutamaan menjadi acuan atau pengendalian antara niat baik, niat buruk untuk tidak saling mencari jalan sendiri sendiri. Pengendalian inilah menjadi suatu tanda kewarasan mampu mengaca dan mawas diri menjadi bijaksana. Bagi pemimpin keutamaanya adalah kesadaran untuk mawas diri, pengendalian diri, mampu mengatakan cukup dan tidak serakah. Pengendalian diri inilah tanda kewarasan, tanda kemampuan untuk mengendalikan nafsu-nafsu akan keduniawian dan Hedonisme.

Keutamaan dalam konteks yang utama dapat berfungsi optimal karena ada keberanian dan mampu mengatasi uji-uji nyali dalam menuju kebaikan dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan. Keberanian inilah yang akan menunjukan keutamaan polisi yang berarti bukan anthek, bukan safety player tentu bukan penjilat dan bukan penghianat.

Pada keutamaan ini, nilai-nilai utama menjadi bagian yang diperjuangkan dan menjadi bagian yang terus menerus di jaga dan dijadikan acuan / referensi dalam implementasi pemolisianya. Keutamaan dalam hal ini dapat di analogikan sebagai sais yang mengendalikan kuda hitam dan kuda putih untuk menyatu pada satu tujuan.

Pemimpin yang memegang teguh pada keutamaan ia memiliki integritas, komitmen, kompetensi dan keunggulan.

Keutamaan bagi petugas Polisi dapat dilihat analogi keutamaan Resi Bisma dan keutamaan Yudistira terutama dalam cerita Pandawa seda . Di jaman sekarang kita melihat perebutan-perebutan jabatan, kekuasaan demi berbagai kepentingan yang mengabaikan keutamaan. Perebutan jabatan dengan berbagai cara dihalalkan, dari menitipkan diri,

dari link terdekat penguasa, makelar-makelar jabatan, pengusaha, sanak keluarga bahkan dengan nyonya besarnya. Selain itu, memberikan upeti, membayar secara langsung bahkan juga membagi bagi sesuatu kepada orang-orang yang berwenang dan berpengaruh akan dilakukan juga, mulai dari pengelola personel hingga ajudan, sekertaris pribadi hinga cantrik-cantrik lainya.

Masih adakah di jaman sekarang yang memegang keutamaan seperti Bisma? mungkin ada, namun sangat jarang mungkin ia akan mati dengan idealismenya atau kering dalam kesendirian dan diskriminasi. Bisma dianugerahi umur yang sangat panjang, kesaktian dan kesempatan gugur sebagai pahlawan di medan laga Barata Yudha.

Tumbang bukan karena kesaktian Srikandi, melainkan ia menepati karma Dewi Amba. Walau dihujani ribuan panah di tubuhnya ia tetap tegar dan diijinkan menyaksikan kemenangan Pandawa hingga Bharata Yudha usai.

Polisi dipercaya karena memiliki keutamaan, yaitu apa yang menjadi kebijakannya membawa dampak bagi meningkatnya kualitas hidup, tingkat kesadaran, kecerdasan dan moralitasnya. Tatkala sebagai pemimpin tidak memiliki / tidak tahu keutamaannya maka sebenarnya ia kehilangan makna dan kepercayaanya bahkan bisa saja ia hanyalah simbol / boneka / pesuruh saja.

Keutamaan bagi pemimpin sangatlah penting dan sangat mendasar bagaimana ia menjadi role model. Menjadi suatu ikon / role model memang tidak mudah bahkan memerlukan suatu perjuangan dan upaya-upaya dalam pencapaiannya. Pemimpin yang berkeutamaan setidaknya pemimpin yang :

1. Memiliki kesadaran memperbaiki , siap dimasa kini, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik.
2. Visioner.
3. Mampu membawa dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup.
4. Memahami hal-hal yang utama dalam bidangnya.

5. Memiliki kemampuan membangun sehingga orang mudah melakukan hal-hal yang utama. Yudistira menjadi ikon refleksi , keutamaan, dharma, cipta, karsa dan karya dalam kehidupan manusia.

Dalam era globalisasi, Core value yang menjadi keutamaan bagi petugas Polisi sebenarnya sudah ditunjukan dan ditulis dalam Tribrata , Catur Prasetya sebagai inti pedoman kinerja dan pedoman hidup kepolisian Republik Indonesia, untuk menumbuh kembangan rasa kebanggaan dan kecintaan sebagai petugas Polisi sehingga Polisi dapat dipercaya dan menjadi ikon akan keamanan, keselamatan serta kemanusiaan.

Spirit kemanusiaan yang kuat akan menjadikan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.

Spirit tadi akan menjdi nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran dan harus diperjuangkan untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang di setiap petugas polisi dan pemolisianyapun menjadi cerminan dari kemanusiaan tersebut. Core value bagi polisi yang humanis antara lain :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
2. Mengabdi dan berjuang demi kejayaan bangsa dan negara.
3. Berani berkorban demi masyarakat yang dilayaninya untuk: Menjaga kehidupan, Membangun peradaban.
4. Patut diteladani dan dijadikan ikon / role model.
5. Diterima serta mendapat dukungan karena dapat dipercaya. Spirit yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam setiap pikiran, perkataan dan perbuatan polisi dalam pemolisianya baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai pribadi.

Pelayanan kepolisian adalah pelayanan kemanusiaan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya secara profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Makna profesionalisme bagi petugas Polisi dapat ditunjukkan dari kemampuan Polisi mengembangkan pemolisiannya sehingga ahli yang mengacu pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, mengacu pada pemikiran Profesor Parsudi Suparlan, dinyatakan sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang :

1. Masalah sosial dan penangannya.
2. Isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
3. Keteraturan dan penataannya.
4. Penegakan hukum dan keadilan.
5. Penyelidikan dan penyidikan kriminalitas dan pencegahanya. Ilmu Kepolisian, sebagai dasar profesi Kepolisian, bersifat mempelajari apa yang dikerjakan atau yang menjadi pekerjaan Polisi.

Membahas Kepolisian dapat dilihat Polisi sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi. Ketiga pendekatan Polisi tersebut terdapat dalam sebuah birokrasi kepolisian. Membahas birokrasi Kepolisian dapat dikategorikan menjadi 4 bidang, yakni :

1. Kepemimpinan.
2. Administrasi.
3. Operasional.
4. Capacity building.

Dari penjabaran konsep-konsep yang terkandung dalam ilmu kepolisian dapat diketahui bahwa ilmu kepolisian, selain digunakan dalam institusi Kepolisian, juga diimplementasikan dalam masyarakat. Benang merah antara pembangunan profesionalisme Kepolisian dan perwujudan, pemeliharaan keamanan, dan rasa aman, adalah pada segala usaha maupun upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan (pemolisian) (lihat Bayley, 1995; Rahardjo. 2002; Suparlan (ed). 2004).

Kecerdasan Polisi adalah kemampuan membuat terobosan-terobosan kreatif. Creative break through adalah tindakan-tindakan untuk meciptakan terobosan-terobosan yang proaktif, problem solving, yang inspiratif, profesional dan dapat menjadi unggulan serta diunggulkan.

Creative break through dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai : komitment, integritas, pengetahuan, wawasan, mimpi, harapan, berpikir jauh kedepan, berani mengambil resiko, kemampuan mengatas masalah, kemampuan memberdayakan dan think out of the box (berpikir luar biasa). Creative break through dalam konteks pemolisian dapat diselenggarakan baik pada tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek bahkan tingkat petugas Kepolisian di lapangan. Tentu saja antar fungsi, bagian, divisi dapat berbeda, namun prinsip yang mendasar dan berlaku umum adalah sama. Satu prinsip seribu gaya. Prinsip-prinsip dapat terlaksananya creative break through antara lain:

1. Kepemimpinan.
2. Komitmen.
3. Integritas.
4. Core value
5. Think out of box.
6. Komunikasi.
7. Pemberdayaan (empowerment).
8. Program unggulan.
9. Konsistensi.

**“Polisi Ojo Ilang Kemanungsane”**

Polisi jangan hilang kemanusiaanya, Keutamaan Polisi adalah kemanusiaan, memanusiakan manusia (meningkatkan harkat dan martabat manusia).

“Wong Jowo ojo ilang Jawane”, Pepatah jawa yang diungkapkan bagi orang-orang jawa yang telah lupa / menghilangkan nilai-nilai budaya jawa atau juga yang sudah tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai luhur budaya jawa. Bagai mana dengan ” polisi ilang kamanungsane”

(Polisi yang hilang kemanusiaanya)? Hakekat polisi adalah untuk "nguwongke" (memanusiakan manusia). Keberadaan polisi adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Dengan segala fungsi, kewenangan dan berbagai model pemolisianya intinya adalah agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Tatkala polisi hilang akan kemanusiaanya maka dapat dikatakan telah terjadi abuse (penyimpangan / penyalahgunaan wewenang). Walaupun itu masih dalam pikiran, karena itu sudah menjadi niat. Niat ini akan menjadi kejahatan apabila ada kesempatan.

Polisi yang ideal adalah polisi yang mampu memanusiakan manusia. Keberadaaanya diterima dan di dukung oleh masyarakat yang dilayaninya.

Polisi juga dapat dijadikan ikon kemanusiaan, ikon kota, ikon perubahan, ikon hukum dan yang terpenting adalah ikon keamanan dan keselamatan. Itu semua bukan tiba-tiba melainkan harus dibangun dan dimulai dari pimpinanya. "Kebiasaan yg baik akan menjadi hati nurani yang baik". Polisi yang humanis dapat dilihat dari :

1. Bangunan /perkantorannya dan lingkunganya. Bangunan / perkantoran dan lingkungan kerja Polisi merupakan cerminan dari kebudayaan dari institusi. Kantor Polisi/ lingkungn kerja polisi yang humanis memang ada sentuhan-sentuhan seni yang membuat orang nyaman, welcome sehingga orang yang datang ke kantor Polisi merasa aman dan nyaman.

   Tentu saja didukung dengan kebersihan, kerapihan dan keasrian alam sekitar juga menjadi pendukung kehangatan dan kedekatan Polisi dengan masyarakat. Hiasan, tulisan, warna dan sebagainya juga mencerminkan nuansa yang menyejukan hati.

2. Pemimpin dan kepemimpinanya. Pemimpin dengan kepemimpinanya akan sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Kebijakan-Kebijakan yang diambil. Oleh pemimpin akan menjadi acuan / pedoman bagi anak buahnya. Dan pada level pelaksana akan menjabarkanya lagi dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan diantara mereka untuk mengimplementasikanya.

3. Pola-pola pemolisianya. Pola-pola pemolisan ini merupakan model implementasi dari kebijakan-kebijakan pimpinanya atau bisa juga dikatakan sebagai budaya yang aktual. Pada Institusi kepolisian yang humanis yang aktual ini bisa sama / tidak terjadi gap yang dalam dengan yang ideal.

   Pikiran, perkataan dan perbuatan menjadi frame bagi polisi yang humanis. Kewenangan-kewenangan polisi dalam menegakkan hukum dan upaya paksa sekalipun juga demi manusia/ perlindungan pada manusia-manusia yang produktif.

Tindakan-tindakan tegas dan upaya paksa dikenakan pada tindakan-tindakan yang kontra produktif. Polisi yang humanis ditunjukan dari pemolisianya yang mengupayakan pada : supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, tansparan, akuntabel, berorientasi pada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan adanya pengawasan serta pembatasan kewenangan kepolisiannya. Polisi ikon keamanan dan rasa aman yang semuanya bagi memanusiakan manusia. Polisi tidak boleh kehilangan kemanusiaanya.

**Penutup :**

"Polisine Rakyat iku Jujur Ora Ngapusi". Jujur ora ngapusi (jujur tidak membohongi) merupakan keutamaan bagi petugas polisi dalam pemolisiannya yang diharapkan, diidolakan, menjadi sahabat yang diterima serta didukung oleh rakyat. Mayoritas rakyat adalah orang-orang yang sederhana, tergolong marjinal, kelompok yang menjadi korban atau sering dikorbankan.

Mereka menginginkan dan mengidolakan Polisi yang peduli terhadap mereka, yang berempati, yang berani dan mau memperjuangkan suara, atau setidaknya menjadi teman dalam penderitaan atau kesusahan.

Polisi yang mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, bersahaja, dan memperjuangkan masyarakat yang dilayani atau demi kepentingan banyak orang.

Dia akan menjadi ikon atau role model (panutan) bagi rakyat kebanyakan. Sebaliknya, aparat yang merasa derajatnya lebih tinggi,

ja'im (jaga image), eksklusif, memeras, membebani, mengancam, menakut-nakuti, akan menyengsarakan banyak orang.

Model aparat seperti ini jangankan diterima, keberadaannya pun membuat muak. Rakyat tinggal menunggu saat yang tepat untuk bisa membalas dendam.

Keutamaan bagi petugas polisi dalam pemolisiannya, perilakunnya dalam sikap, tutur kata, dan pelayananya kepada publik, mencerminkan suatu ketulusan hati dan simbol core value yang membanggakan.

Sikap tulus dan bangga sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan yang tidak turun dari langit ataupun terwujud dengan tiba-tiba. Core value harus dipersiapkan, dilatih, dan diperjuangkan yang membantu dan melawan bagi polisi untuk bersih dan menjalankan keutamaannya adalah yang tidak berbuat adalah orang-orang dalam sendiri, para kelompok status quo, kelompok zona nyaman, dan mereka yang anti perubahaan karena takut kehilangan hak-hak istimewanya.

Perubahan mendasar bukan dimulai dari bawah, melainkan dari atas. Perubahan yang dimulai dari perjuangan dan pengorbanan dari sang pemimpin.

Pemimpin yang datang untuk melayani bukan dilayani, membawa harapan, dan mampu menjadi sandaran di saat muncul kesusahan.

Pemimpin perubahan itu bukan karbitan, bukan orang titipan, bukan produk hutang budi, dan bukan yang menjadi simbol uang.

"Fox populi fox Dei", suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau ingin menjadi polisinya rakyat, tunjukan keutamaannya, dengarkanlah suara rakyat, pahami aspirasi mereka, berjuanglah bersama mereka, tulus dan jujur sebagai dasarnya.

**Daftar pustaka :**

Ainsworth, Peter B. and Ken Pease. 1987. Police Work (Psychology in Action). United kingdom: Routledge

Bayley Wiliiam G, 1995, The Encyclopedia of Police Science ( second edition ), Newyork & London, Garland Publishing.

Bayley David H , 1994, Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto),jakarta, Cipta Manunggal.

Coser, Lewis, 1956, The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press, 1956.

Chryshnanda, 2009, Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

————————-, 2009, Polisi penjaga kehidupan, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

————————-, 2011a, Kenapa Masyarakat Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

————————-, 2011b, Pokoknya Anda Saya Tilang, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

————————-, 2014, Polisi Rakyat Iku Jujur Ora Ngapusi, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,1993, Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal,.

Friedmann Robert, 1992, Community Policing, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Haryatmoko,2014, Etika Publik, Yogyakarta, Kanisius Kunarto, 1995. Polisi harapan dan Kenyataan. Klaten: CV Sahabat.

———. 1997. Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta manunggal.

———. 1998. Tri Brata. Jakarta: Cipta Manunggal.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1999. Reformasi menuju Polri yang Mandiri. Jakarta: Mabes Polri.

Mangunwijaya, YB. 1999. Pasca Indonesia Pasca Einstein. Yogyakarta: Kanisius.

Meliala, Adrianus, 2002, Mengkritisi Polisi, Yogyakarta, Kanisius.

———————, 2002, Problema reformasi Polri, Jakarta, Trio repro.

Rahardjo, Satjipto, 2002, Polisi Sipil,Jakarta, Gramedia

Reiner, Robert, 2000, The Politic of The Police, Oxford University Press.

Reksodiputro Mardjono, 1997, Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat, makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK UI, jakarta, 6 Agustus 1997.

Suparlan Parsudi,1997, Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat, makalah Diskusi dengan Angkatan I KIK UI, jakarta, 6 Agustus 1997.

———————, 1999, "Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar Sukubangsa". Dalam I. Wibowo (ed), Restropeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina. Jakarta: Gramedia. Hal 149-173.

———————, 2004 (ED), Bunga Rampai Ilmu Kepolisian, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

———————, 2009, Ilmu Kepolisian, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian Sindhunata, 1999, Bayang-bayang Ratu Adil, Jakarta, Gramedia.

Suseno, Frans Magniz. 1999, Kuasa dan moral. Jakarta: Gramedia.

————, 1999. Etika Politik. Jakarta: Gramedia.

Trojanowicz Robert, 1998, Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com's Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH.

Wibowo, Setyo, 2010, Arete: Hidup Sukses Menurut Platon, Yogyakarta, Kanisisus Wibowo, Setyo, 2015, Platon: Xarmides (Tentang Keugaharian), Yogyakarta, Kanisius

e-Policing Sebagai Model Pemolisian | TransIndonesia.co

http://transindonesia.co/2014/08/e-policing-sebagai-model-pemolisian

http://m.detik.com/news/read/2014/08/24/121515/2670876/103/electronic-policing-sebagai-strategi-keluar-dari-zona-nyaman.

e-Policing Berbasis Dampak Masalah Sebagai Model Polmas | TransIndonesia.co http://transindonesia.co/2014/08/e-policing-berbasis-dampak-masalah-sebagai-model-polmas /.

# PENCEGAHAN KEJAHATAN [11]

Di era kekinian polisi dalam pemolisiannya lebih ditekankan pada upaya pencegahan kejahatan maupun pelanggaran dan hal hal yang kontra produktif. Segala sesuatu yang kontra produktif termasuk pelanggaran maupun kejahatan menyebabkan terganggu, terhambat bahkan matinya produktifitas. Terganggunya keteraturan sosial dan terabaikannya kemanusiaan.

Pola pola pemolisian yang kekinian benang merahnya setidaknya menunjukkan upaya-upaya untuk:

1. Membangun kemitraan bagi terwujudnya soft power dan smart power
2. Membangun sistem untuk melakukan pencegahan yang setidaknya meliputi :
    a. Membangun model E policing yang berbasis pada 1) back office sebagai operation room dan pusat data dan pelayanan one stop service; 2) application yang berbasis pada artificial intellegence 3) net work yang berbasis pada internet of thing 4) algoritma yang berupa info grafis, info statistik dan info virtual lainnya yang dapat diakses real time, on time dan any time.
    b. Membuat pemetaan yang berbasis : 1) wilayah, 2) masalah 3) potensi dsb
    c. Membangun kepolisian untuk dapat menjadi ikon atau simbol : 1) Kedekatan, 2) kecepatan 3) persahabatan. Yang bekerja dengan tulus dan bereaksi dengan cepat dalam merespon laporan maupun aduan masyarakat.
    d. Menerapkan model community policing atau polmas dengan pemolisian yang : 1) berbasis wilayah, 2) berbasis fungsi 3) berbasis dampak masalah yang dikendalikan bagian operasional

11 https://benuanews.com/irjen-pol-prof-dr-chrysnanda-dwilaksanamencegah-kejahatan/
https://transindonesia.co/2024/02/13/pencegahan-kejahatan/
https://polisiindonesia.id/2024/02/13/cdl-pencegahan-kejahatan/

e. Membangun model pemolisian yang sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang dikendalikan dari Binmas

f. Menerapkan sistem sistem patroli terpadu secara aktual maupun virtual yang dikendalikan dari fungsi fungsi utama dan pendukung

g. Membangun sistem intelejen yang mampu untuk: mengumpulkan data, menganalisa, menghasilkan produk maupun net working

h. Membangun sistem penegakan hukum yang berbasis smart policing yang mampu menangani kejahatan konvensional, kejahatan siber maupun kejahatan forensik

i. Membangun road safety policing yang berbasis pada model smart city untuk adanya penanganan agar terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangunnya budaya tertib.

j. Membangun sistem sistem pelayanan publik yang berbasis pada big data system dan one stop service untuk pelayanan : 1) keamanan 2) keselamatan 3) hukum 4) administrasi 5) informasi 6) kemanusiaan

k. Sistem akuntabilitas secata : 1) moral 2) hukum 3) administrasi 4) fungsional 5) sosial

l. Membangun rekayasa sosial (social engineering) yang berbasis pada pendekatan pemolisian

3. Membangun model pembinaan pada birokrasi :

a. Menyiapkan pemimpin yang transformatif

b. Menyiapkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang profesional, cerdas, bermoral dan modern

c. Menyiapkan model model logistik bagi smart policing bagi perorangan, unit atau kelompok maupun kesatuan

d. Membangun sistem anggaran yang berbasis kinerja

e. Membangun sistem operasional yang bersifat : 1) rutin 2) khusus 3) kontijensi

4. Membangun model pembinaan dalam masyarakat yang mencakup:

   a. Kemitraan

   b. Pelayanan kepada publik

   c. Upaya upaya pencegahan secara proaktif dan problem solving

   d. Membangun jejaring

5. Menyiapkan aturan aturan sebagai payung hukum dan pedoman yang tercakup dalam : undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala kepolisian negara RI, dsb

6. Menjabarkan aturan aturan dalam vademikum, SOP hingga panduan panduan praktisnya

7. Membuat sistem untuk :

   a. Standar keberhasilan pelaksanaan tugas

   b. Sistem penilaian kinerja

   c. Sistem reward and punishment

8. Membuat program program unggulan yang menjadi model pencegahan kejahatan secara berkala dan berkesinambungan

9. Membangun tim transformasi sebagai tim kendali mutu dan supporting team

10. Membuat pilot project dan melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi

10 point di atas bisa dikembangkan dalam konteks konseptual maupun pragmatisnya. Pencegahan kejahatan maupun hal hal yang kontraproduktif dibangun dalam sistem birokrasi yang rasional, dengan kepemimpinan yang transformatif, diawaki SDM yang profesional cerdas bermoral dan modern, dan sistem pelayanan publik yang prima ( cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan mudah diakses), sistem

akuntabilitas publik secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial.

Kesemua itu memerlukan adanya literasi untuk merubah mind set bahkan culture set kepolisian yang mampu menerapkan smart policing yaitu harmoninya antara conventional policing, electronic policing maupun forensic policing.

# PRESISI SMART POLICING YANG MENGEDEPANKAN PADA PENCEGAHAN KEJAHATAN [12]

Makna dari kata Presisi adalah tepat atau akurat dapat juga dikaitkan dengan prima, yang unsurnya adalah cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses. Dari kata presisi ini dapat didalami sebagai wujud pelayanan pada masyarakat demokratis di era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0, manusia dan kemanusiaannya menjadi keutamaan Polisi dalam Pemolisiannya.

Prediktif atau dapat dikatakan mampu melihat ke depan visioner yang secara proaktif antisipatif dan solutif ( problem solving) mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Tentu saja dilakukan dalam pemolisian yang responsibilitas dapat dikatakan sebagai tindakan yang peka peduli dan berbelarasa pada keutamaan Polisi dalam pemolisiannya yaitu pada :

Kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Pada konteks ini dikaitkan pada sistem pelayanan publik yang berkaitan dengan kamtibmas atau Polisi mendukung produktifitas masyarakat. Transparan maknanya adalah bekerja terukur dapat dilihat dan dipertanggung jawabkan secara moral, secara hukum, secara administratif dan secara fungsional dalam memberikan pelayanan publik di bidang :

Keamanan, Keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan. Makna humanis konteks pemolisian dapat dipahami Polisi mampu mewujudkan sebagau penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Tatkala kita melihat hal tersebut secara holistik presisi secara harafiah maupun akronimnya dapat dikatakan smart.

12 https://polisiindonesia.id/2024/02/14/cdl-presisi-smart-policing-yang-mengedepankan-pada-pencegahan-kejahatan/
https://transindonesia.co/2024/02/14/presisi-smart-policing-yang-mengedepankan-pada-pencegahan-kejahatan/

Makna smart pada pemolisian adalah profesional, cerdas, bermoral dan modern yang semua itu fungsional. Tatkala berbicara fungsi maka ada standardization of work input, standardization of work process dan standardization of work out put. Smart policing sendiri akan dapat dijabarkan melalui model model pemolisian yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Dalam konteks kekinian dan dalam masyarakat yang muktikultural maka model pemolisian dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai demgan corak masyarakat dan kebudayaannya.

Dan model community policing sebagai basis dari konteks pengembangan pemolisian lainnya. Sejalan dengan hal di dalam masyarakat yang demokrasi maka pemolisian adalah berbasis dan menuju pada :

1. Supremasi hukum.
2. Memberikan jaminan dan perlindungan Ham.
3. Transparansi.
4. Akuntabel.
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup atau humanis.
6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian.

Di era digital era revolusi industry 4.0 yang menuju masyarakat 5.0 maka sistem elektoronik atau sistem on line yang berbasis back office, aplication dan net work yg semuanya berbasis pd artificial intellegence dan internet of thing yang dapat ditunjukkan melalui algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang real time yang dapat diakses secara on time maupun any time. Semua itu merupakan prediksi antisipasi dan solusi.

LANDASAN

Pengembangan e policing di masa kenormalan baru berbasis pada pola : preemtif, preventif, represif dan rehabilitasi. Kejahatan, pelanggaran, dan berbagai hal yang kontra produktif menghantam kemanusiaan sebagai mahkluk sosial. Mengatasi masalah keteraturan sosial diperlukan adanya :

1. Political will yang kuat dan mendukung upaya upaya pencegahan.
2. Pemimpin dengan kepemimpinan yang transformasional.
3. SDM yang profesional cerdas bermoral dan modern yang berbasis pada ilmu kepolisian.
4. Kemampuan teknologi dan forensik pengembangan electronic dan forensic policing.

Konteks fungsi polisi dalam pemolisiannya yang mengedepankan pencegahan sebagai pelayan pelindung pengayom dan penegak hukum dapat dipahami :

1. Profesional dalam memberikan pelayanan publik dengan prima.
2. Konteks melindungi adalah mampu membangun sistem penjagaan pengaturan pengawasan dan penanganan keteraturan sosial ( kamtibmas) secara manual scr ciber atau virtual atau elektronik maupun secara forensik.
3. Konteks mengayomi adalah Polisi mampu menjadi ikon menjadi simbol sbg penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus sebahak pejuang kemanusiaan.
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan karena polisi adalah penegak hukum yang hidup. Prinsip kepolisian menegakkan hukum adalah :
    a. Menyelesaikan konflik secara beradab.
    b. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.
    c. Melindungi mengayomi warga masyarakat yg menjadi korban dan para pencari keadilan.
    d. Sebagai upaya membangun budaya tertib.
    e. Supaya ada kepastian.
    f. Merupakan bagian edukasi. Tatkala dikatakan penegak keadilan Polisi dapat mengambil tindakan lain atas hukum atau perundang undangan yang berlaku pada saat menegakkan hukum tidak dapat diketemukan rasa keadilan atau kemanusiaan

dalam konteks diskresi, alternative dispute resolution maupun Restorative justice.

Polisi dalam melakukan pemolisiannya ada pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Dalam ranah birokrasi dapat dilihat pada :

a. Kepemimpinan
b. Administrasi
c. Operasional
d. Capacity building.

Pada ranah masyarakat dapat dikategorikan :

a. Kemitraan.
b. Pelayanan publik.
c. Problem solving.
d. Networking.

Apa yang dijabarkan di atas merupakan model atas presisi sebagai smart policing yang menekankan pada pencegahan lejahatan maupun hal hal yang kontra produktif. Tingkat keberhasilan Polisi dalam pemolisiannya tidak sebatas dilihat pada pengungkapan kasus semata melainkan juga pada kemampuan mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman pada situasi kamtibmas yang kondusif.

# COMMUNITY POLICING: FILOSOFI DAN STRATEGY CRIME PREVENTION [13]

Polisi bekerja dalam ranah birokrasi dan ranah masyarakat, benang merahnya itulah yang dikatakan pemolisian. Policing ( pemolisian ) merupakan segala upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Dengan demikian spirit polisi dalam pemolisiannya secara manajerial maupun operasional adalah untuk kemanusiaan dengan PCBM ( profesional, cerdas, bermoral dan modern) dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Model pemolisian yang kekinian dikembangkan dalam community policing, dengan filosofi dan strategi crime prevention atau hal hal yang kontra produktif. Filosofi community policing dalam implementasinya menekankan pada upaya upaya proactive and problem solving dengan strategi :

1. Membangun kemitraan yang adanya kesejajaran polisi dengan mitra mitranya
2. Memahami kebutuhan akan keamanan dan rasa aman dari masyarakat yang dilayaninya
3. Mampu menjadi pihak ketiga yang adil dan dapat dipercaya publik
4. Membangun ikon kedekatan, kecepatan dan persahabatan
5. Membangun institusi yang profesional cerdas bermoral dan modern yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

13 https://transindonesia.co/2024/02/15/community-policing-filosofi-dan-strategy-crime-prevention/
https://www.merdekanews.co/read/27108/Community-Policing-Filosofi-dan-Strategy-Crime-Prevention
https://radarikn.id/nasional/read/7328/Community-Policing-Filosofi-dan-Strategy-Crime-Prevention.html
https://polisiindonesia.id/2024/02/15/cdl-community-policing-filosofi-dan-strategy-crime-prevention/

Pelayanan kepolisian kepada publik mencakup :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan

Standar pelayanan kepolisian kepada publik adalah : cepat, tepat, akurat transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Konteks crime prevention dalam menegakan hukum adalah demi semakin manusiawinya manusia, yang merupakan upaya membangun peradaban agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Konteks inilah yang dikatakan tujuan pemolisian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman serta terwujudnya keteraturan sosial. Kesemuanya itu untuk menunjukan adanya upaya :

1. Menyelesaikan konflik secara beradab
2. Ada dampak pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan
3. Perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan
4. Membangun budaya tertib
5. Supremasi hukum, hukum menjadi panglima dan adanya kepastian
6. Edukasi

Pola pola pemolisian untuk crime prevention bisa dikembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Model pemolisian dapat dibuat sebagai acuan pengembangan kualitas kepemimpinan, infrastruktur dan model modelnya sbb :

1. Model pemolisian yang berbasis wilayah :
    a. Border policing ( pemolisian di kawasan perbatasan )
    b. Maritime policing ( pemolisian di kawasan maritim atau kepulauan atau kawasan pantai)

c. Industrial policing ( pemolisian di kawasan industri)
d. Disaster policing ( pemolisian di kawasan rawan bencana )
e. Bisa dikembangkan dari model orientasi kegiatan masyarakatnya ( community oriented policing) pada masyarakat perkotaan, pertanian, nelayan, perkebunan, buruh, dsb.

2. Model pemolisian yang berbasis pada fungsinya : fungsi utama, fungsional maupun fungsi pendukung sbb:
   a. Road safety policing ( pemolisian berbasis pada road safety atau lalu lintas
   b. Paramilitary policing, model pemolisian ala paramiliter
   c. Cyber policing, pemolisian dalam memberikan pelayanan secara virtual
   d. International policing, pemolisian internasional seperti : pasukan misi perdamaian PBB, laision officer, hubungan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan, studi banding dan pertukaran kemampuan polisi, dsb
   e. Emergency policing, model pemolisian menghadapi situasi kegawat daruratan, dsb.
3. Model Pemolisian yang berbasis dampak masalah :
   a. Democratic policing
   b. Electronic policing, pemolisian secara elektronik yang merupakan model pemolisian di era digital atau era revolusi industri 4.0
   c. Forensic policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru, dsb

Memahami filosofi dan strategi polisi dalam pemolisiannya dapat mengembangkan model model di atas secara holistik atau sistemik yang tidak dipahami secara parsial.

Polisi dalam pemolisiannya dalam bertindak tegas sekalipun spiritnya tetap untuk: 1. melindungi, 2. mengayomi dan 3. melayani agar ada keteraturan sosial. Hal ini menunjukan bahwa manusia adalah aset utama bangsa maka di situlah hakekat pemolisian untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Polisi dengan pemolisiannya dalam menegakan hukum juga menegakan keadilan untuk :

1. Menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab
2. Mencegah agar konflik meluas atau semakin besar
3. Melindungi mengayomi melayani korban dan pencari keadilan
4. Membangun budaya tertib
5. Adanya kepastian
6. Edukasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas polisi dalam pemolisiannya bukan semata mata pada pengungkapan perkara namun juga dilihat dari keteraturan sosial dan tingkat kepercayaan publik serta kualitas pelayanannya. Polisi dalam pelayanannya kepada publik merupakan ikon atau simbol: kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial. Polisi dalam pemolisiannya dilihat dari tingkat :

1. profesionalismenya,
2. kecerdasannya,
3. moralitasnya dan
4. modernitasnya

Membangun kepolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern dapat dibangun melalui :

1. Pembangunan pendidikan yang berlandaskan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
2. Kepemimpinan yang tranformasional
3. Keteladanan
4. Penanaman nilai nilai kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial
5. Membangun infrastruktur dan sistem sistemnya yang berefek pada budaya malu dan kualitas pelayanan publik yang prima.

Filosofi dan strategi polisi melalui pemolisiannya merupakan bagian bahkan refleksi dari masyarakat yang dilayaninya yang ditunjukan dari terkendalinya hal hal yang kontra produktif, terwujud dan terpelihara keteraturan sosial, meningkatnya kualitas hidup masyarakat!

# POLISI DAN PEMOLISIANNYA DALAM PESPEKTIF PENCEGAHAN KEJAHATAN [14]

Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial. Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktiftas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan, hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

Salah satu ancaman hambatan dan gangguan aktivitas produksi masyarakat adalah karena tidak terkendalinya kejahatan seperti:

1. Maraknya Premanisme

   Premanisme tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, pendekatan personal, lemahnya penegakkan hukum

2. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans national, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika

14 https://www.merdekanews.co/read/27132/Polisi-dan-Pemolisiannya-dalam-Pespektif-Pencegahan-Kejahatan
https://radarikn.id/nasional/read/7341/Polisi-dan-Pemolisiannya-dalam-Pespektif-Pencegahan-Kejahatan.html
https://polisiindonesia.id/2024/02/16/cdl-polisi-dan-pemolisiannya-dalam-perspektif-pencegahan-kejahatan/
https://transindonesia.co/2024/02/16/polisi-dan-pemolisiannya-dalam-pespektif-pencegahan-kejahatan/
https://polisiindonesia.id/2024/02/16/cdl-polisi-dan-pemolisiannya-dalam-perspektif-pencegahan-kejahatan

3. Berbagai bentuk pelanggaran

   Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal

4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya

5. Faktor sumber daya manusia

   Tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia sangat mendasar bagi terwujudnya keteraturan sosial.

6. Faktor politik dan kebijakan publik

   Politik yang tanpa hati nurani kebijakan publiknya kontra produktif. Lebih pada kepentingan diri dan kroninya.

7. Perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi

   Perubahan begitu cepat menembus batas ruang dan waktu. Media dan sistem komunikasi transportasi saling adu kekuatan. Muncul era post truth, hoax, serangan siber, dsb.

8. Corak masyarakat dan kebudayaannya

   Masyarakat yang majemuk akan mengagungkan primordial. Dari situlah legitimasi dan solidaritas dibangun dsn mudah diikuti walau kontraproduktif, tidak rasional dan sarat emosional. Tatkala primordial dijadikan alat maka kebencian akan menjadi penyulut konflik sosial bagkan perang saudara.

9. Sistem pelayanan publik

   Pelayanan kepada publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan tatkala dalam birokrasi yang sarat dengan KKN maka akan kontra produktif dan terjadi palak memalak. Kekuatan dan kekuasaan untuk mendominasi sumberdaya dengan cara personal in group out group.

10. Sistem ekonomi, industri dan perdagangan hingga keamanan dalam negeri sampai kedaulatan bangsa

    Point 1 sd 9 semua bermuara pada point 10.

Polisi dan pemolisiannya setidaknya pada tingkat manajemen dan operasionalnya ditujukan untuk mengatasi dan mengendalikan 10 point hal kontra produktif di atas. Pola pola pemolisian dapat secara filosofis dan strategis megacu model community policing yang proactive, problem solving membangun kemitraan yang mengedepankan pencegahan hal hal yang kontra produktif dan upaya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Secara operasionalnya dapat dikategorikan berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah.

Di era digital dan era kenormalan baru model pemolisian dapat dikembangan melalui smart policing agar ada harmoni antara : conventional policing, electronic policing dan forensic policing. Sistem sistem mendasar pada pemolisian dapat dilihat dari :

1. Ranah Birokrasi yang dikategorikan :
    a. Kepemimpinan
    b. Administrasi
    c. Opersional
    d. Capacity
2. Ranah Masyarakat yang dapat dilihat dari :
    a. Kemitraan
    b. Pelayanan publik
    c. Pemecahan masalah
    d. Jejaring atau net working

Perilaku organisasi kepolisian dibangun agar : profesional, cerdas, bermoral dan modern. Dengan pendekatan yang impersonal berbasis kompetensi.

Walau penuh : keterbatasan, tekanan dan tantangan bahkan ancaman sekalipun, tatkala suasana kerja nyaman dan jiwa tenteram serta penuh harapan maka kinerja akan terus meningkat kualitas kinerja. Menurunnya tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Manusia bukan robot. Dalam bekerja memberi harapan sebagai motivasi akan meningkatkan kualitas kinerja.

Perubahan suatu keniscayaan. Tertinggal dari perubahan akan ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan jaman. Mengimbangi perubahan akan lelah terengah engah. Mampu melampaui perubahan baru mampu mengatasi dan mengendalikan perubahan dan dampak dampaknya.

Perubahan begitu cepat. Tatkala terlambat atau tidak tepat maka cepat atau lambat pasti sekarat. Dalam membangun institusi yang profesional cerdas bermoral dan modern diperlukan adanya budaya organisasi yang dilandasi nilai nilai inti yang berbasis democratic policing yaitu :

1. Supremasi hukum
2. Jaminan dan perlindungan HAM
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Pembatasan dan pengawasan kewenangan

Pengimplementasian polisi dan pemolisian dalam membangun dan memelihara keteraturan sosial dapat dikategorikan sbb :

1. Kepemimpinan yang transformatif
2. SDM dengan kompetensi yang ahli kreatifitas dan visioner,
3. Dinamis dengan penuh kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya.
4. Didukung dengan modernisasi insfrastruktur dan sistem sistemnya
5. Tim transformasi sebagai tim back up
6. Program program unggulan yang menjadi fokus dalam operasional yang bersifat rutin, khusus, maupun kontijensi
7. Penerapan pada pilot project
8. Sistem monitoring dan evaluasi
9. Pola pola pengembangan

Melihat polisi dan pemolisiannya yang dinamis dalam perspektif perilaku organisasi dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif gaya atau model pemolisiannya.

# MODEL PEMOLISIAN YANG MENGEDEPANKAN PENCEGAHAN DALAM MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA [15]

Kejadian di minneapolis akibat kematian George Floyd memicu kemarahan publik dan kerusuhan di Minneapolis, yang merambah ke berbagai bagian di Amerika Serikat. Kejadian di Minneapolis bisa saja sebagai trigernya atau ledakan puncak gunung es. bisa saja masalah masalah di bawah gunung es sudah bertumpuk dan tinggal menunggu triger untuk meledak. Apalagi ada kepentingan politik kepentingan bisnis maka para aktor intelektual tinggal memainkannya.

Apa yang terjadi di minneapolis mungkinkah terjadi di Indonesia? Mungkin saja, bahkan sangat mungkin melihat masyarakat Indonesia yang majemuk yang sarat dengan potensi konflik yang memanfaatkan issue primordial.

Di dalam masyarakat majemuk Indonesia primordialisme sangat kental dan banyak dijadikan alat tunggangan agar potensi konflik menjadi konflik. Primordialisme sangat rawan dan mudah digunakan untuk memicu amuk massa.

Issue primordial dikembangkan menjadi labeling yang akan berkembang menjadi kebencian.

15 https://transindonesia.co/2024/02/17/model-pemolisian-yang-mengedepankan-pencegahan-dalam-masyarakat-majemuk-indonesia/
https://polisiindonesia.id/2024/02/17/cdl-model-pemolisian-yang-mengedepankan-pencegahan-dalam-masyarakat-majemuk-indonesia/
https://radarikn.id/nasional/read/7356/Model-Pemolisian-yang-Mengedepankan-Pencegahan-dalam-Masyarakat-Majemuk-Indonesia.html
https://www.merdekanews.co/read/27173/Model-Pemolisian-yang-Mengedepankan-Pencegahan-dalam-Masyarakat-Majemuk-Indonesia

Apabila kebencian terus menerus berkembang dan tidak ditangani dengan baik dan benar maka akan meledak menjadi konflik sosial. Apalagi mendapatkan legitimasi dan solidaritas yang dilandasi primordialisme, semakin sulit dipadamkan.

Konflik sosial di dalam masyarakat majemuk Indonesia secara umum dipicu adanya perebutan sumber daya, perebutan pendistribusian sumber daya atau karena harga diri. Tatkala pada proses perebutan sumber daya dikuasai dan dijalankan dengan cara yang tidak fair maka premanisme atau mafia bermunculan, dari yang pragmatis di jalanan sampai dengan yang dekat kekuasaan di dalam birokrasi akan semakin deras bergulir.

Kekecewaan kekecewaan, mulai menjadi endapan, perlawanan walau pada tataran gerundelan terus menerus diungkapkan.

Tatkala tidak terselesaikan akar masalahnya dengan baik dan benar maka munculah masalah yang mengendap di bawah puncak gunung es dapat meletus. Akar masalah konflik sosial dapat muncul dari isu:

1. Proses kekuasaan dan penguasaan sumber daya yang tidak fair, sarat KKN
2. Primordialisme (sara) menjadi label dan kebencian, ini menjadi bom waktu menunggu meledaknya saja.
3. Premanisme yang menghambat produktifitas
4. Kebijakan publik yang tidak memihak bagi hajat hidup banyak orang
5. Pola pola penanganan konflik yang otoriter
6. Berkembangnya sesuatu yang ilegal
7. Keterlibatan aparat yang menjadi backing, memeras atau terima suap
8. Penegakan hukum yang lemah dan tebang pilih
9. Penguasaan sumber daya oleh kaum oligarki yang mengabaikan sosial budaya
10. Ketidak percayaan publik terhadap para aparaturnya

Polisi dan pemolisiannya tatkala hanyut dan dilabel buruk serta kurang dipercaya, bahkan dianggap menjadi bagian dari mereka maka akan dilabel dan masuk dalam golongan yang mereka benci.

Cepat atau lambat akan menjadi sasaran kebencian, semua itu tinggal

menunggu ttigernya saja untuk diledakkan. Polisi di dalam masyarakat majemuk Indonesia dengan pola pemolisian kekinian atau kontemporer dibangun tidak sebatas top down atau perintah dari atas tetapi juga bottom up yang didasarkan pada corak masyarakat dan kebudayaannya. Masyarakat perkotaan akan berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Masyarakat sekitar hutan berbeda masyarakat di wilayah pantai atau masyarakat petani. Issue kebutuhan akan keamanan dan rasa aman berbeda satu dengan lainnya bahkan ada variasi yang sangat signifikan tidak dapat diterapkan pada wilayah atau masalah yang berbeda.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kepolisian nasional dalam menjalankan pemolisiannya secara prinsip yang mendasar dan berlaku umum sama, namun secara pragmatis implementasinya bisa saja berbeda satu sama lainnya yang disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Model pemolisiannya dapat mengadopsi model community policing atau polmas.

Community policing atau polmas dipahami bahwa pemolisian pada tingkat komunity (RT atau RW atau kelurahan), juga berbasis kelompok kepentingan (community of interest), maupun berbasis dampak masalah.

Prinsip-prinsip yang mendasar pada community policing/ polmas antara lain:

1. Polisi keberadaannya diterima dan mendapatkan dukungan dari warga yang dilayaninya.
2. Adanya kemitraan dan komunikasi dari hati ke hati dan ada persahabatan erat antara masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya dengan polisi.
3. Mampu menjembatani bila terjadi konflik dan dipercaya mampu menyelesaikannya.
4. Mampu memahami kebutuhan keamanan warga yang dilayaninya.
5. Mampu mendapatkan informasi atas hal hal yang kontra produktif dan berpotensi terjadinya konflik. Informasi secara formal maupun non formal menjadi sumber data maupun informasi.
6. Mampu bertindak proaktif dan menyelesaikan konflik dan menangani potensi-potensi konflik.

7. Pola pemolisiannya lebih mengutamakan pencegahan.
8. Mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman di wilayah yang dilayaninya.
9. Adanya quick respone system di mana ada back up system dari back office dan dengan sistem aplikasi yang berbasis pada AI dan IoT
10. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sistem pragmatis di ranah terdepan ada back up system secara virtual melalui model smart city, sistem call and command centre, crisis centre untuk menangani masalah emerjensi maupun kontijensi scr prima ( cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses).

Di samping itu juga ada sistem big data yang mendukung one stop service serta algoritma yang berupa info grafis, info statistik dan info virtual lainnya sebagai indeks kamtibmas yang dapat diakses secara real time dan any time.

# COOLING SYSTEM DIERA POST TRUTH [16]

Konflik sosial pada umumnya terjadi karena perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Bisa juga dikarenakan masalah harga diri. Suatu konflik terjadi sebenarnya merupakan puncak gunung es. Permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan sudah menumpuk dan tinggal menunggu ada triger untuk ledakannya. Permasalahan yang tidak terselesaikan akan menimbulkan kekecewaan hingga kemarahan walaupun masih dapat dipendam.

Sejatinya akan terus di omongkan ke mana mana dan bagi orang yang tidak pernah mengalami pun bisa ikut menceriterakan. Dari mulut ke mulut ditambah tambahi dan saling memiliki penafsiran yang berbeda dari faktanya. Ini gosip. Semakin digosok semakin sip. Gosip ini tatkala berlapis lapos dan terus menerus dilakukan ini akan menjadi labeling.

Pemberian label ini bisa untuk perorangan bisa untuk kelompok. Tatkala labeling ini terus dihembuskan seolah olah menjadi kebenaran maka akan menjadi kebencian. Apa yang dilakukan di atas ini sangat mudah memicu konflik sosial apalagi tatkala dikaitkan atau dihubung hubungkan dengan primordialisme. Primordial merupakan hal yang utama dan pertama bisa Sara bisa juga komunitas atau kelompok kelompok kategorial (bisa dikatakan SARA : suku, agama, ras dan antar golongan).

Di dalam primordial, emosional, spiritual diutamakan dan kadang mengabaikan rasionalitas. Pokok e atau dengan semangat siap membantu mengeroyok atau balas dendam dan menyerbu. Kelompok primordial tatkala sudah saling melabel saling membenci dari konflik perorangan pun bisa terjadi. Primordial dipilih atau digunakan karena untuk mendapatkan legitimasi walau hanya pada pembenaran bukan kebenaran.

Apalagi kebenaran yang tidak berbasis hal hal yang hakiki hanya berdasarkan persepsi. Kambing tatkala diteriaki orang banyak sebagai anjing, bisa saja semua meyakini itu anjing.

16 https://polisiindonesia.id/2024/02/18/cdl-cooling-system-diera-post-truth/

Di dalam masyarakat yang majemuk, aprimordialisme sangat mudah untuk memecah belah atau mengadu domba satu sama lain. Antar suku antar ras antar agama antar kelompok menjadi basis solidaritas pokok e yang sebenarnya pekok e. Rasionalitasnya koprol dibuang. Yang ada dikepalanya hanyalah hajar serbu hancurkan mereka musuh menghina kita.

Spirit premanisme muncul walau kembali dengan keroyokan dan pengkambinghitaman. Siapa yang lemah disalahkan dan ditumbalkan. Tatkala kelompok kelompok primordial ini bersatu dan sudah menjadi crowd, maka akan muncul gerakkan anarkisme walaupun hanya dengan hembusan bullshit. Contohnya si C mengaku dikeroyok si A dan si B mengarang kejadian seolah dirinya teraniaya. Sifat orang orang yang cengeng, daya nalar rendah, tingkat emosionalnya tinggi, mudah di berdayakan untuk membakar amarah. Sikap Ksatria rela digantungkan untuk diganti nalar koprol, mereka saat itu seakan penuh jiwa yang heroik walaupun melakukan hal hal yang di luar nalar. Otaknya seakan dibekukan dicocok hidungnya diseret untuk mengamini anarkisme. Kesadaran kolektif sudah tidak mampu lagi dikendalikan. Seakan orang mabuk ia lupa dengan dirinya dan sadar menyesal dibelakang hari.

Oleh karena itu Diera digital "Post Truth" melalui media semakin merajalela. Post Truth sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman dahulu walaupun tidak separah di era digital apalagi pada media sosialnya. Menghasut memecah belah untuk saling membenci. Kita bisa belajar dari pemberontakan pemberontakan mulai dari Ken Arok, hingga penyerbuan tentara China ke Kediri, pengusiran pasukkan Khubilaikan, pemberontakkan jaman Majapahit, masa kolonialisme, masa pra kemerdekaan hingga masa kini terus saja ada. Primordialisme menjadi pilihan apalagi kalau sudah mengatasnamakan apa saja apalagi yang berkaitan dengan harga diri ini mudah memicu konflik. Kadang kala pelakunya bisa dari orang gila. Tatkala diperiksa dinyatakan gila.

Ini putus mata rantainya. Konflik sosial ini "by design" walaupun kadang tanpa kesengajaan. Bullshit di Era Post Truth seolah kebenaran walaupun sarat trik intrik pembenaran. Memang ujung ujungnya juga kekuasaan penguasaan pendominasian sumber daya.

Masyarakat majemuk memerlukan adanya suatu pencerdasan hingga mampu menggunkan nalar atau logikanya secara baik dan bwnar sehingga tidak mudah dikoprolkan. Paradigma multikulturalisme ini mungkin mampu merasukkan kebanggaan akan kebhinekaan. Patriotisme cinta bangga akan bangsa dan negara tatkala bukan pada solidaritas semu apalagi dengan berbagai hal yang menjurus kepada premanisme. Kekuatan massa khususnya bagi masyarakat suatu bangsa dan negara layak untuk dijaga atau ditumbuh kembangkan kekayaan seni budayanya dalam konteks karakter bangsa bagi hidup tumbuh dan berkembangnya.

Multikulturalisme ini menjadi kekuatan bagi pelestarian kebhinekaan dan mencerdaskan untuk memberdayakan melestarikan salah satunya melalui masyarakat sadar wisata. Kesadaran akan wilayahnya orang orangnya suku bangsa bahasa dan seni budayanya menjadi aumber daya baru. Penanaman cinta bangsa bukan lagi doktrin namun penumbuhkembangam nalar dan daya logika waras. Lagi lagi ujung nya memang politik sehat waras lah yang mampu menjaga dan membawa suatu bangsa maju dan sejahtera. Di Era Post Yruth, Plintiran dengan memanipulasi sesuatu dengan menambahkan, mengurangi, merubah,dsb sebagai pembenaran yang berdampak :

1. Salah persepsi.
2. Memfitnah.
3. Membodoh bodohi.
4. Mengadu domba.
5. Saling menghakimi.
6. Munculnkan solidaritas sosial yang kontra produktif.
7. Merusak citra.
8. Menghilangkan rasa saling percaya.
9. Tergerusnya kepercayaan publik.
10. Memicu konflik sosial.

Jaman edan Post Truth kebohongan diagungkan. Kebohongan dikemas sedemikian rupa walau dengan fakta dijadikan suatu pembenaran. Yang terus menerus diviralkan, dihembus hembuskan agar diyakini sebagai kebenaran bahkan sampai si pembuatnya mempercayai kebohongan itu sebagai suatu kebenaran.

Situasi dan kondisi masyarakat majemuk yang kental dengan primordial tatkala dihembusi kebohongan diacak acak emosinya bahkan jiwanya hingga tidak lagi tahu mana yang benar mana yang salah. Platon dalam bukunya the republik menganalogikan masyarakat sebagai, binatang yang besar buas dan liar, kesenangannya makan minum dan sex (big animal and beast), para pawang pengendali binatang (kaum sofis) atau kaum plitikus atau kaum yang tahu cara mengendalikan atau menyenang nyenangkan binatang tadi. Tahu bagaimana memberi kesukaan atau kesenangan binatang tadi.

Tahu kapan mengalah saat binatang itu ngamuk bahkan tahu bagaimana mengancam atau menakut nakuti hingga memberdayakan si binatang tadi.

Untuk itu Colling system di Era Post Truth bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial dan perdamaian diperlukan adanya pendinginan atau cooling system, yang setidaknya melakukan langkah langkah :

1. Membuat event event dengan berbagai program yang membuat happy dan mencerahkan.
2 Membuat dan berdaya area publik atau tempat tempat nongkrong untuk interaksi sosial.
3. Membuat model dialog langsung atau melalui media.
4. Membuat model model komunitas.
5. Membuat kesepakatan melalui berbagai cara untuk tetap rasional dan penyelesaian masalah dengan mengedepankan cara cara damai.
6. Memberdayakan soft power dan smart power.
7. Memberdayakan seni budaya.
8. Membuat model model counter issue yang mendamaikan, mendinginkan dan mencerdaskan.
9. Membangun role model dari tokoh tokoh formal dan non formal yang inspiratif.
10. Memberdayakan sistem edukasi formal maupun non formal.

Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan dalam menjaga keteraturan sosial, salah satunya membangun cooling system.

# ART POLICING: MORALITAS DASAR BAGI KEUTAMAAN PEMOLISIAN [17]

Tugas polisi melalui pemolisiannya ambigu dan berpotensi konflik atau berdampak pada citra positif maupun negatif. Pekerjaan polisi pada hakekatnya adalah untuk memanusiakan dan semakin manusiawinya manusia, terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial untuk membangun dan merawat peradaban. Oleh sebab itu pemolisian sebagai upaya polisi menjaga kehidupan dan membangun peradaban serta berjuang bagi kemanusiaan merupakan seni. Membangun pemolisian berbasis seni budaya dan pariwisata dapat dikatakan sebagai art policing. Basis polisi dan pemolisan yang sejalan dengan keutamaannya adalah moralitas.

Moralitas dibangun atas dasar "kesadaran" orang yang sadar akan bertanggung jawab dan disiplin. Moralitas dalam pemolisian setidaknya dapat ditunjukan sbb:

1. Dapat menjadi role modelnya. Ada tokoh di berbagai bagian dan lini kepolisian patut jadi panutan dan teladan.
2. Keutamaan polisi dan pemolisiannya terus menerus diajarkan melalui core valuenya pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban
3. Membangun budaya malu untuk tidak berbuat cela
4. Membangun penghargaan bagi orang orang yang baik dan benar sebagai local heroes

17 https://www.merdekanews.co/read/27192/Art-Policing-Moralitas-Dasar-Bagi-Keutamaan-Pemolisian
https://radarikn.id/nasional/read/7361/Art-Policing-Moralitas-Dasar-Bagi-Keutamaan-Pemolisian.html
https://transindonesia.co/2024/02/19/art-policing-moralitas-dasar-bagi-keutamaan-pemolisian/
https://posbekasi.com/2024/02/19/art-policing-moralitas-dasar-bagi-keutamaan-pemolisian/
https://polisiindonesia.id/2024/02/19/cdl-art-policing-merupakan-salah-satu-moralitas-dasar-bagi-keutamaan-pemolisian/

5. Membangun marwah lembaga pendidikan sebagai wandah pendidikan bagi para :
    a. Petugas penjaga kehidupan
    b. Pembangun peradaban
    c. Pejuang kemanusiaan
6. Pola pengasuhan penanaman budaya kepolisian :
    a. Olah jiwa pada spiritualitas keagamaan
    b. Olah rasa pada seni budaya
    c. Olah raga
7. Membangun lingkungan kepolisian dalam nuansa kemanusiaan
8. Mewujudkan polisi sebagai penegak hukum dan keadilan
9. Kurikulum mata pelajaran dapat dibuat dengan pengkategorian sbb :
    a. Mata pelajaran dasar :
        1) filsafat ilmu pengetahuan,
        2) etika publik ( anti korupsi )
        3) budaya dan gaya hidup sebagai polisi
        4) metodologi penelitian
    b. Mata pelajaran pokok :
        1) ilmu-ilmu sosial dan humaniora,
        2) hukum, penegakan hukum dan keadilan,
        3) penanganan pelanggaran, kejahatan dan penyimpangan sosial,
        4) administrasi kepolisian
        5) operasional kepolisian,
        6) teknik dan teknis pemolisian dari pencagahan, penanganan dan rehabilitasi,
        7) studi kasus dan penyelesaian masalah,

8) public relation dan membangun jejaring,

9) model dan alternatif gaya pemolisian,

10) media management,

11) bisa di tambah hal hal yang bersifat kearifan lokal yang sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya,

12) teknologi kepolisian

c. Kapita selekta

Kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat : 1) idiologi, 2) politik 3) ekonomi, 4) sosial budaya 5) pertahanan 6) keamanan dsb

10. Sistem reward and punishment diterapkan dengan baik dan benar sesuai prestasi dan dapat dikatakan sebagai :

a. Tindakan anti korupsi

b. Reformasi birokrasi

c. Terobosan kreatif

Polisi dan pemolisiannya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Citra positif akan diperoleh tatkala ada ketulusan, kerendah hatian, ketegasan dan keberanian untuk berbuat baik dan memperbaiki serta mampu mengapresiasi orang orang yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Setiap langkah pemolisian dapat dipertanggung jawabkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial.

Seni merupakan energi yang mampu memberikan spirit hidup dalam kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial, untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Seni akan menjadi jembatan dialog antara rasa antara indera dengan jiwa. Manusia hidup dari roh atau kekuatan yang tak nampak namun ada. Bahkan tatkala roh itu pergi maka raga akan menjadi bangkai onggokkan daging belaka. Seni akan menjadi harmoni atas hidup dan kehidupan dan menjadi kebutuhan adab. Seni memerlukan cinta dan rasa untuk terus menerus ada. Seni dipahami melalui dialog atau komunikasi, penghayatan atau kontemplasi yang mendalam sehingga energi yang ada

mampu mentransformasi ke dalam jiwa yang menghasilkan cipta karsa dan karya.

Polisi dalam model pemolisian yang kekinian atau yang dikenal dengan community policing ( polmas ) berbasis komunikasi dari hati ke hati saling menghargai, memberikan ruang atau peluang dan kesempatan untuk tampil dalam menunjukkan eksistensinya dsb. Polisi memberdayakam energi yang ada untuk membangun kemitraan, melakukan pencegahan, pemenuhan kebutuhan adab maupun untuk meningkatkan kualitas hidup. Penghargaan atas manusia dan kemanusiaannya merupakan core value di dalam hidup bersama. Sumber daya manusia adalahbaset utama bangsa. Sesuatu yang hidup dalam kehidupan memerlukan energi untuk raga maupun jiwanya. Dalam kebutuhan jiwa merupakan kebutuhan adab, menjadi penyeimbang atau harmoni dalam kehidupan. Energi dalam pemolisian tidak sebatas materi namun nutrisi jiwa akan menjadi bagian untuk mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang walau dalam kondisi serba sarat dengan keterbatasan.

Secara pragmatis seni dalam pemolisian untuk memberikan pelayanan kepada publik ( pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan ) yang berstandar prima, perlu adanya :

1. Sentra Pelayanan Publik merupakan Operation Room, Back office sebagai Pusat K3i ( komunikasi, komando pengendalian, koordinasi dan informasi )
2. Merupakan One Stop Service berbasis Big Data System
3. Sistem pengoperasionalanya dapat mengacu Model Asta Siap
    a. Siap piranti lunak atau standar acuan pedoman atau panduan managerial maupun operasionalnya
    b. Siap posko ( sebagai sentra atau back office atau operation room yang menjalankqn fungsi k3i)
    c. Siap model pelayanan ( keamanan, keselamatan, administrasi, hukum, informasi, dan kemanusiaan)
    d. Siap sistem jejaring
    e. Siap mitra ssebagai soft power dan smart power

f. Siap SDM

g. Siap sarana prasarana

h. Siap anggaran secara budgeter maupun non budgeter

3. Tugas pokok pada sentra pelayanan secara proaktif dan problem solving

4. Pemetaan Masalah, Pemetaan Wilayah, Pemetaan Potensi

5. Para apetugas di Sentra Pelayanan, memetakan apa yang menjadi

   a. Tugas pokoknya

   b. Memetakan permasalahan berbasis wilayah atau area

   c. Membuat model sistem sistem pelayanan secara langsung atau melalui media

   d. Membuat standar kompetensi petugas pelayanan publik

   e. Memberdayakan IT sebagai pendukungnya

6. Monitoring

   a. Monitoring laporan petugas petugas lapangan

   b. Monitoring media

   c. Monitoring CCTV

7. Komunikasi melalui call centre atau media lainnya

   a. Menerima laporan

   b. Menerima aduan

   c. Komunikasi secara vertikal, horisontal maupun diagonal

8. Koordinasi :

   Untuk menjembatani atau menyalurkan kepada fungsi terkait

9. Komando dan pengendalian

   a. Quick response

   b. Penanganan TKP

c. Sistem laporan

d. Penanganan pada situasi emergency atau kontijensi

10. Informasi

Memberikan informasi kepada publik tentang situasi kondisi dan tentang sistem pelayanan kepada publik yang ada melalui media atau keterangan langsung.

# MEMBANGUN LITERASI: MERUBAH CITRA BURUK PENDIDIKAN DAN MENJADI PUSAT UNGGULAN [18]

Lembaga pendidikan semestinya menjadi pusat unggulan, tempat yang mencerahkan, mencerdaskan dan membahagiakan. Faktanya tidak selalu sama antara yang ideal dan aktual. Hal itu setidaknya dikarenakan:

1. Lembaga pendidikan sebatas formalitas mendapatkan ijazah
2. Proses pembelajaran dan kurikulum membebani dan membelenggu kebebasan dan keberanian berpikir
3. Para guru seakan menjadi dewa pengetahuan yang kastanya paling tinggi yang mengutamakan kegiatan menilai, mengoreksi yang sibuk pada menyalahkan bahkan mematikan karakter
4. Nilai dan ranking menjadi keutamaan, walaupun sarat pembenaran yang jauh dari kebenaran
5. Model feodalisme, otoritarianisme yang berdampak pada kekerasan simbolik hingga fisik, berdampak pada kejahatan dalam pendidikan
6. Model hafalan dan copy paste sehingga sulit untuk berubah atau diajak melakukan perubahan akibat kemapanan dan kenyamanan
7. Peserta didik lelah, malas dan lemah dalam berpikir dan mengandalkan pemikiran orang lain, dampaknya sebatas menjadi ekor, penuh ketakutan, berorientasi pada cara cara instan
8. Tidak adanya nuansa kebahagiaan yang mencerahkan dan mencerdaskan, berdampak pada sistem doktrin, mandatori

18 https://transindonesia.co/2024/02/20/membangun-literasi-merubah-citra-buruk-pendidikan-dan-menjadi-pusat-unggulan/

yang membuat dialog yang topdon, sikap apatis dan berupaya menyenangkan para guru maupun bagian penilaian

9. Perdebatannya sebatas pada hal hal yang membuat kontra produktif
10. Penuh dengan kepura puraan yang berdampak pada trik dan intrik yang menghalalkan segala cara

Sejatinya masih banyak lagi yang dapat dikategorikan dalam berbagai kelemahan dan pelemahan lembaga pendidikan. Tatkala hal di atas tidak dianggap sebagai masalah yang mendasar maka hasil didik tidak berkembang dan bisa jadi mereka mengembangkan hal hal jahat tatkala memiliki kekuatan dan kekuasan. Setelah lulus pendidikan tiada lagi kebanggaan bahkan mereka akan membuat plesetan plesetan yang menyudutkan atau refleksi kekecewaan terhadap lembaga pendidikan.

Tatkala lembaga pendidikan malas, enggan bahkan takut merefleksi diri maka reformasi sebatas pada kepentingan supervisial yang diutamakan. Buruknya pendidikan akan menjadi bom waktu di masa depan. Kebanggaan akan kecurangan, keculasan dan kemunafikan berdampak menyubur KKN.

Mereformasi pendidikan menjadi hal yang pertama dan utama tatkala ingin suatu bangsa ingin berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal dan berdaya saing. Mereformasi pendidikan setidaknya ditunjukan dan dilakukan melalui :

1. Political will yang kuat untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat unggulan dengan menerapkan keutamaannya
2. Memperbaiki proses pembelajaran yang kekinian
3. Meminimalisir sekecil mungkin potensi potensi terjadinya penyimpangan
4. Membangun literasi
5. Menyiapkan guru guru yang berkualitas prima
6. Menerapkan sistem pembelajaran dalam dialog peradaban
7. Mereformasi sistem penugasan dan ujian
8. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan produktifitas

9. Dalam berbagai kegiatan pembelajaran ada sharing of happines
10. Para guru menjadi ikon sebagai : inspirator, motivator, mentor, stimulator, problem solver
11. Ada grand strategy, road map, program unggulan, yang mampu menjadi brand kualitas pendidikan
12. Menerapkan merit system dan akuntabilitas secara : moral, hukum, administrasi, fungsional maupun sosial
13. Senantiasa berjuang menempatkan marwah dan keutamaan lembaga pendidikan sebagaimana yang semestinya
14. Menerapkan kurikulum dan proses pembelajaran kekinian
15. Manajemen media untuk mendukung literasi, branding, debat publik, expo dalam berbagai program dialog
16. Bakti masyarakat dalam berbagai aktivitas tidak sebatas karitas namun juga social engineering yang menunjukan keberadaanya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan
17. Modernisasi proses belajar mengajar
18. Membangun, membina dan mengembangkan komunitas yang sesuai dengan keutamaan lembaga pendidikan.

Sejalan dengan point point di atas kuncinya ada pada literasi untuk merubah mind set tentang pendidikan. Literasi merupakan suatu dasar bagi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatkala literasi lemah maka sumberdaya manusia akan lemah juga. Membangun lembaga pendidikan menjadi pusat unggulan yang memiliki citra positif maka point point di atas baik yang melemahkan maupun yang menguatkan dikerjakan dengan baik. Produktifitas pendidikan dalam mendukung literasi setidaknya dapat dilihat dari bidang :

1. Moral spiritual
2. Akademik
3. Kesehatan fisik maupun lingkungan

4. Seni budaya
5. Manajemen media
6. Bhakti masyarakat
7. Dialog peradaban
8. Personal branding
9. Social engineering
10. Pengembangan inovasi dan kreatifitas.

# PERSPEKTIF SESPIM LEMDIKLAT POLRI SEBAGAI EXECUTIVE EDUCATION [19]

Pendidikan eksekutif merupakan suatu pendidikan bagi para profesional yang memiliki perspektif baru atau keunggulan dari pendidikan pendidikan lainnya.

Tujuan dari eksekutif education adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dalam pekerjaannya : profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Oleh karena itu, Sespim Lemdiklat Polri dalam pengembangannya menitik beratkan pada keutamaannya yaitu :

1. Moralitas yang ditunjukan pada kesadaran tanggung jawab dan disiplin.
2. Pengendalian diri.
3. Bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
4. Profesional, cerdas, bermoral dan modern.
5. Mampu menjadi ikon atau role model.

Sespim memfokuskan pada kepemimpinan. Management dikatakan sebagai seni bagaimana para pemimpin mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara proactive dan problem solving untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

19 https://lovebandung.com/index.php/2024/02/21/perspektif-sespim-lemdiklat-polri-sebagai-executive-education/
https://polisiindonesia.id/2024/02/21/cdl-perspektif-sespim-lemdiklat-polri-sebagai-executive-education/

Selain itu di Sespim diajarkan bagaimana para peserta didik menjadi pemimpin yang pemikir yang berani untuk melihat dengan perspektif baru melalui dialog peradaban.

Dialog peradaban merupakan model transformasi dalam membimbing maupun mencerahkan kepada para calon pemimpin di masa depan menemukan keutamaannya sebagai pemimpin dalam kepemimpinannya.

Pemimpin dituntut sehat semangat dan smart dengan jiwa bahagia yang merdeka. Semua itu dapat dicapai dengan membuka ruang dialog peradaban bagi semakin manusiawinya manusia.

"Dialog Peradaban" berbasis pada keutamaan pembelajaran dengan mentransformasi dan mencerahkan atas keutamaan Kepolisian bagi : Kemanusiaan, Keteraturan sosial dan Peradaban. Di dalam dialog peradaban pembelajaran akan dikaitkan dengan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi ekstrim, fakta brutal (emergensi/ kontijensi).

Keutamaan sang pemimpin sebagai sang pencerah adalah keberanian dan kemampuannya mengambil keputusan bagi menjaga kehidupan, membangun peradaban dan perjuangan kemanusiaan.

Yang dapat dijabarkan dalam keutamaan pemimpin dalam kepemimpinannya.

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan.
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kratifitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan,
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu.
5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini.

6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik.
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi.
8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power.
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif.
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan mendapat dukungan secara internal maupun eksternal.

Pengembangan Sespim juga bekerja sama dengan organisasi dan lembaga lain (negara atau swasta) untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan profesional bagi peserta program pendidikan.

Ini dapat mencakup kolaborasi dengan kementrian lembaga, sekolah, universitas, asosiasi profesional, dan perusahaan swasta untuk berbagi sumber daya dan praktik terbaik. Kerja sama dapat berupa :

1. Benchmarking.
2. Joint education program/courses.
3. Joint research projects.
4. Joint curriculum development.
5. Research partnerships.
6. Equipment and technology sharing.

Model sharing dan kerja sama untuk menjadikan :

1. Professional.
2. Top expert di bidang masing-masing.
3. Project konsultasi.
4. Membangun lab/center of policing technology.
5. Innovation bagi para guru/ pengajar maupun bagi peserta didik.dan sebagainya.

Point point dibatas dinamis dan terus diupdate sehingga Sespim Lemdiklat Polri mampu menyiapkan calon pemimpin di masa depan, yang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai hal seperti : Sistem teknologi terbaru dan perubahan maupun perkembangan yang kekinian.

# MENGAPA PERLU DIBANGUN MODEL SMART CITY [20]

Pekerjaan polantas melalui pemolisian untuk mencapai tujuan road safety dan mengimplementasikan UULLAJ. Standar keberhasilannya dapat diukur melalui algoritma road safety yang mampu menunjukkan :

1. Tingkat kualitas keamanan lalu lintas
2. Tingkat keselamatan lalu lintas
3. Tingkat ketertiban
4. Tingkat kelancaran
5. Tingkat kualitas keselamatan berlalu lintas
6. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan
7. Terbangunnya budaya tertib
8. Pelayanan yg prima di bidang llaj : Pelayanan keamanan :
    a. Pelayanan keselamatan
    b. Pelayanan hukum
    c. Pelayananadministrasi
    d. Pelayanan informasi
    e. Pelayanan kemanusiaan

Semua itu pengukuranya ditunjukkan melalui algoritma yg berbasis info grafis info statistik info virtual yg on time real time dan any time. Adapun landasan dasar pemolisiannya dalam memanage road safety adalah melalui :

1. Manajemen kebutuhan
2. Manajemen kapasitas

20 http://www.dinamikanews.com/2024/02/mengapa-perlu-dibangun-model-smart-city.html

3. Manajemen prioritas
4. Manajemen kecepatan
5. Manajemen emergensi

Manajemen di atas diimplementasikan pada fungsi Kepolisian dalam menangani lalu lintas melalui bidang :

1. Edukasi yang dikembangkan pd literasi road safety
2. Engineering yang berbasis pd penanganan black spot trouble spot, road safety kawasan ( perbatasan, hutan perkebunan pertanian, industri, lintasan, perkotaan, rawan bencana dll ). Selain itu juga untuk membuat model bagi antar moda transportasi angkutan umum, angkutan sungai danau dan penyeberangan, kajian jqlqn toll, dan beebagai lokasi yg dpt dikembangkan mjd rekayasa jalan.
3. Penegakkan hukum proses penegakkan hukum berbasis pd big data dan sistem2 etle, e sidik
4. Regident registrasi dan identifikasi kendaraan maupun pengemudi untuk : a. memberikan jaminan legitimasi keabsaan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor, b. Legitimasi pengoperasionalanya, c. Forensik kepolisian, d. Mendukung penegakkan hukum, traffic attitude record dan de merit point syste., e. Memberikan pelayanan di bidang lla dg standar prima.
5. K3i (komunikasi komando pemgendalian koordinasi dan informasi) yang mampu memantau dan memberikan pelayanan yg cepat dalam berbagai situasi baik rutin khusus maupun kontijensi.
6. Analisa dampak lalu lintas ( andalalin

secara teknis andalalin mencakup :

1. Cara pemetaan wilayah dan pengumpulan data sensus atau data dr stake holder maupun data di lapangan
2. Penggunaan alat2 pemetaan manual maupun elektronik
3. Peta data dan cara menganalisa dg mempertimbangkan yang berbasis pd :

- Kebutuhan
- Kapasitas
- Prioritas
- Kecepatan
- Emergensi

4. Hasil analisa berupa prediksi antisipasi dan solusi bagi lalu lintas pd saat rutin atau ada hal2 khusus

maupun kontijensi

5. Konsep dasar andalalin adalah smart city. Unsur unsur smart city dijadikan landasan pengkajiannya.
6. Laporan atau produk dapat dijadikan bahan masukan maupun untuk jurnal
7. Panduan penegakkan hukum atas pelanggaran andalalin

Program Program Dasar bagi Polisi menangani lalu lintas di era digital antara lain :

- Road Safety Policing
- It For Road Safety
- Tmc ( Traffic Management Centre)
- Ssc ( Safety And Security Centre)
- Eri ( Electronic Registration And Identificatiob)
- Sdc ( Safety Driving Centre)
- Intan ( Intellegent Traffaic Analysis)
- Etle ( Electronic Traffic Law Enforcement)
- Tar ( Traffic Attitude Record)
- Dmps ( De Merit Point System)
- Smart Management
- IRSMS ( Integrated Road Safety Management System) / Sistem Data Kecelakaan Dan Pelanggaran Lalu Lintas
- Literacy Road Safety

- Road Safety Coaching
- Intellegent Road Safety Media Management ( IRSMM)
- Algoritma Road Safety
- Road Safety For Tourism
- Road Safety Border
- Road Safety High Way Police
- Big Data
- One Gate Service System
- Cyber Cops
- Road Safety Research And Development
- Safety Driving/ Riding Centre)
- Sistem Pengamanan Kota
- Emergency Policing

**Model Smart City**

Smart city menjadi model atas sistem yang cerdas atau fungsional dalam suatu kota untuk keamanan, kenyamanan, keselamatan, keteraturan sosial dan berbagai pelayanan publik yang prima. Model smart city dengan pendekatan E policing merupakan model implementasi pemolisian yang presisi yang mendukung SPBE ( sistem pemerintahan berbasis elektronik ).

Smart city dengan pendekatan E policing berbasis IT for road safety dengan back office, application yang berbasis AI ( artificial intellegent ) dan net work yang berbasis IoT ( internet of Think ) untuk memberikan pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan.

10 Point Pentingnya Smart City dalam Pendekatan Road Safety Policing :

1. Mendukung SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2. Model E Policing pada Fungsi Lalu Lintas
3. Didukung dg IT for Road Safety

4. Smart living and smart mobility
5. Quick Response Time
6. Berbasis Big Data System
7. One Stop Service
8. Pelayanan berstandar Prima
9. Sinergitas dengan para pemangku kepentingan lainnya
10. Mendukung pingkatan kualitas hidup masyarakat

**Smart city dengan pendekatan E policing**

Smart city dengan pendekatan E policing merupakan sistem yang mendukung berbagai program pemerintah maupun stake holder lainnya. Dalam pendekatan road safety policing, program smart city dapat mendukung RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) dengan divisi sbb,:

1. TMC untuk mendukung road safety managemet
2. SSC ( safety and security centre ) untuk mendukung safer road
3. ERI ( electronic registration and identification ) untuk mendukung safer road
4. SDC ( safety driving centre ) untuk mendukung safer people
5. Intan ( intellegent traffic analysis) untuk mendukung post crash care

Smart city dalam sistem operasinalnya didukung berbagai progran salah satunya ETLE ( electronic traffic law enforcemet) yang dikembangkan pada program TAR ( traffic attitude record) dan de merit point system.

Smart city merupakan sistem pengamanan kota dengan standar pelayanan prima ( cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses) menuju one stop service dengan berdasar big data system untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman selamat, tertib, lancar, asri dan ngangeni.

Sistem sistem pelayanan Smart city dapat dilihat dalam bentuk algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual yang dapat diakses secara real time on time dan any time yang dapat dikembangkan menjadi index road safety

Smart city dalam pendekatan e policing dalam wujud pemolisian yang berbasis elektronik dalam mewujudkan keteraturan sosial yang dapat saling sinergis dalam sistem operasional yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi.

10 Point Keberhasilan Smart City dalam Pendekatan Road Safety Policing :

1. Back office, Application yg berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma Road Safety
2. Dapat menjadi Pusat K3i ( Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengenadalian serta Informasi)
3. Didukung IT for Road Safety yang mencakup :
    a. TMC ( Traffic Management Centre ) untuk mendukung Road Safety Management
    b. SSC ( Safety and Security Centre ) untuk mendukung Safer Road
    c. ERI ( Electronic Registration and Identification ) untuk mendukung Safer Vehicle
    d. SDC ( Safety Driving Centre ) untuk mendukung Safer People
    e. INTAN ( Intellegent Traffic Analysis ) untuk mendukung Post Crash
4. Diimplementasikan dalam Smart Management dan Smart Operation
5. Diawaki petugas polisi siber ( cyber cops )
6. Didukung Management Media
7. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas teritama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya.

8. Algoritma Road safety mampu memberikan prediksi antisipasi dan solusi yang dapat diakses on time dan real time serta any time
9. Mendukung Sistem Pengamanan Kota ( Sispam Kota )
10. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem

**Kemanfaatan Smart City Dalam Pendekatan Road Safety Policing Sebagai Wujud Implementasikan UULLAJ**

1. Kemanusiaan

   Segala usaha dan upaya yang dilakukan secara managerial maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa bertujuan mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar

2. Kamseltibcar lantas

   Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Di mana suatu masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang memerlukan adanya produktifitas, yang dihasilkan dari aktivitas, yang didukung atau melalui lalu lintas. Selain itu lalu lintas dapat dilihat sebagai refleksi budaya bangsa.

3. Meningkatkan kualitas keselamatan

   Mausia adalah aset utama bangsa yang harus ditingkatkan kualitas keselamatannya dari membangun infrastruktur dan sistem sietemnya, membangun literasi dan edukasi, mengembangkan sistem uji dan penerbitan SIM, mengembangkan sistem penegakan hukum, membangun penelitian dan pengkajian lalu lintas

4. Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan

   Tatkala kompetensi para pengguna lalu lintas dan sistem sistemnya saling mendukung maka apa yang dilakukan point 1, 2 dan 3 dijadikan standar untuk menilai atau mengukur kinerja. Fatalitas korban kecelakaan penyebab utamanya adalah KECEPATAN. maka sistem manajemen kebutuhan, manajemen

kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan emergency saling terkait satu dengan lainnya dan disinergikan dalam operasionalnya.

5. Memberikan pelayanan di bidang LLAJ yang mencakup pelayanan: a. keamanan, b. keselamatan, c. hukum, d. administrasi, e. informasi dan f. kemanusiaan secara prima

6. Kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ( NKRI )

   Dalam pendekatan geopolitik dan geostrategis road safety policing dalam menangani lalu lintas juga untuk kesatuan dan persatuan bangsa yang berada dalam kawasan NKRI. Sistem sistem yang saling terpadu saling terhubung sinergis, secara manual maupun elektronik dalam mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar.

7. Siap menghadapi globalisasi

   Di era globalisasi dunia tanpa sekat labirin ruang dan waktu. Secara aktuan jalur jalur lalu lintas mulai dibangun secara nasional maupun internasional salah satunya ide gahasan membangun BRI ( belt road inisiative )

8. Siap menghadapi disrupsi

   Disrupsi begitu cepat dan para pemangku kepentingan dan aparaturnya dituntut siap menghadapi untuk tetap eksis dan melayani publik secara prima. Dalam road safety poling menyiapkan IT for road safety sbb :

   a. TMC ( sebagai back up untuk mendukung Road safety management yang penjurunya Bappenas)

   b. SSC ( safety and security centre mendukung Safer Road yang penjurunya kementrian PUPERA)

   c. ERI ( electronic registration and identification mendukung Safer Vihecle yang penjurunya kementrian Perhubungan)

   d. SDC ( safety driving centre mendukung Safer People yang penjurunya Polri)

e. INTAN ( intellegent traffic analysis mendukung Post Crash yang pendukungnya Kemenkes )

Dari ke lima point tsb (8) Road safety policing membangun dan mengembangkan :

a. TAR ( traffic attitude record) dan De merit point system untuk perpanjangan SIM,
b. smart managemet dalam sistem manajemen dan pengelolaannya operasional secara online berbasis elektronik yang diawaki cyber cops untuk memberikan pelayanansecara virtual,
c. Literasi Road Safety,
d. SDC dalam sekolah mengemudi sistem uji dan penerbitan SIM,
e. TARC ( traffic accident research centre ),
f. RSRD ( road safety researach and development),
g. intellegent Road safety, h. management media,
h. Model pengelolaan smart city,
i. Analisa dampak lalu lintas,
j. Kajian kajian yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah,
k. Master trainer, trainer dan training serta road safety coaching,
l. Etle ( penindakan pelanggaran secara elektronik),
m. Penyelidikan dan Penyidikan lalu lintas yang berbasis pada macro dan micro evidence dan research,
n. Algoritma dan index road safety sebagai akuntabilitas kepada publik.

9. Siap di era kenormalan baru

Di era kenormalan baru road safety policing berbasis smart policing yang siap secara conventional policing, e policing dan forensic policing

10. Mendorong para pemangku kepentingan LLAJ ada sinergitas dan menjadi profesional serta modern Melalui RSPA ( Road Safety Partnership Action) sbgai forum road safety untuk bersama sama membangun sinergitas antar pemangku kepentingan dan mendorong terbangunnya Smart city.

    Hal tsb di atas merupakam akuntabilitas kepada publik secara :

    a. moral,
    b. hukum,
    c. administrasi
    d. fungsional
    e. sosial

# REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI : PENGEMUDI DAN KENDARAAN BERMOTOR [21]

Registrasi dan identifikasi ( reg ident) sebagai salah satu fungsi polisi lalu lintas. Dalam implementasinya merupakan upaya atau strategi mendukung pencapaian tujuan Road safety.

Regident dapat dikategorikan menjadi regident pengemudi atau yg dikenal dengan SIM. Adapun regiden kendaraan bermotor dikenal dengan BPKB, STNK dan TNKB. Fungsi Reg ident pengemudi dan kendaraan bermotor ditangani kepolisian merupakan amanah konstitusi yang dijabarkan dalam Undang Undang kepolisian, UU cipta kerja maupun UULLAJ untuk mencapai tujuan road safety ( lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar). Lalu lintas dimaknai sebagai :

1. Urat nadi kehidupan;
2. Refleksi budaya bangsa;
3. Cermin tingkat modernitas.

Regident pengemudi dan kendaraan bermotor yang ditangani kepolisian untuk menunjukkan fungsinya sebagai berikut :

1. Jaminan legitimasi keabsahan kbm (BPKB);
2. Jaminan legitimasi pengopsnalan kbm (STNK dan TNKB);
3. Jaminan legitimasi kompetensi (SIM)
4. Sebagai pendukung fungsi penegakkan hukum atau fungsi kontrol lainnya (manual, semi elektronik maupun elektronik);
5. Sebagai pendukung forensik kepolisian kaitan dg pembuktian dan pengungkapan perkara2 pidana dan untuk memberikan pelayanan keamanan;

21 http://www.polisi.my.id/2024/02/registrasi-dan-identifikasi-pengemudi.html

6. Bentuk pelayanan prima ( cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif; dan mudah diakses) kepada publik di bidang: a. Keamanan, b. Keselamatan, c. Hukum, d. Administrasi, e. Informasi dan f. Kemanusiaan

Maka di dalam mewujudkan dan mengimplementasikan fungsi reg ident tersebut yang telah dan sedang serta akan dibangun oleh kepolisian khususnya korlantas dengan jajarannya adalah melalui program :

1. Membangun back office, aplication yang berbasis AI dan network yg berbasis iot yang dikenal demgan ERi (electronic registration and identification) dari eri akan mendukung program2 pemerintah spt : a. ERP, b, ETC, c. E Parking, d. E Samsat f. E Banking, g. ETLE dsb
2. Membangun big data system melalui sistem2 aplikasi yg merupakan program2 recognize maupun inputing data yg akan dianalisa dan menjadi algoritma road safety.
3. Membangun one gate service system untuk pelayanan prima scr on line maupun manual
4. Membangun sistem2 pendukung legitimasi operasional dg adanya ANPR
5. Membangun De merit point sistem untuk perpanjang sim dan stnk yg berbasis pd TAR
6. Membangun sistem2 pendukung legitimasi kompetensi : a. Isdc b. Sistem uji Sim c. Sistem penerbitan Sim
7. Sistem2 analisa reg ident sbg bagian pilar safer road untuk mencapai tujuan road safety
8. Membangun sistem jaringan dan sistem2 konektifitas dengan fungsi2 lainnya

Menangani regident pengemudi maupun kendaraan bermotor memerlukan adanya sinergitas yang menunjukkan :

1. Kepekaan kepedulian akan kemanusiaan, yaitu meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas

2. Mendukung produktifitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Membangun budaya tertib
4. Memberikan pelayan prima

Sejalan dengan pemikiran tsb maka lalu lintas paradigmanya bukan pada kekuatan dan kekuasaan dan perebutan sumber daya melainkan melihat dan membangun dg pendekatan :

1. Filosofis bgm mewujudkan dan memelihara lalu lintas sbg urat nadi kehidupan yg aman selamat tertib dan lancar. Bgm terwujudnya budaya tertib sbg refleksi budaya bangsa. Dan bgm lalu lintas sbg cermin tingkat mordernitas dibangun scr dinamis mengikuti perubahan jaman dan mampu menyusaikan corak masyarakat dan kebudayaannya.
2. Geopolitik dan geostrategis bgm melihat kesatuan dan persatuan bangsa negara kepulauan shg lalu lintas mampu mendukung kedaulatan, daya tahan, daya tangkal dan daya saing bangsa.
3. Sosiologis konteks yg dilihat pada masyarakat yg multikultural. Yg berbeda corak masyarakat dan kebudayaannya. Maka dlm implementasinya juga mempertimbangkan kearifan lokal. Satu prinsip seribu gaya
4. Globalisasi yg dilihat dg pengaruh globalisasi yg bgt kuat adanya pasar bebas, perdagangan bebas, akan dibangunnya BRI belt road inisiative, indonesia sbg perlintasan, dampak laut cina selatan dan pulau2 terluar serta permasalahan perbatasan dan antar moda transportasi angkutan umum
5. Modernisasi yg menuntut ada pelayanan2 prima di era revolusi industri 4.0 dengan berbagai teknologi canggih namun jg mengarah kpd society 5.0 krn sumber daya manusia adalah aset utama bangsa.
6. Operasional mampu mengimplementasikan point 1 sd 5 yg bersifat rutin khusus maupun kontijensi
7. Pelayanan kpd publik yg berkaitan dg :
   a. Pelayanan keamanan

b. Pelayanan keselamatan

c. Pelayanan hukum

d. Pelayanan administrasi

e. Pelayanan informasi

f. Pelayanan kemanusiaan

8. Yuridis sbg payung hukum legitimasi atas point 1 sd 7 sbg wujud dr peradaban bangsa yg mampu mjd acuan atau pedoman pelaksanaan tugas yg hakekatnya adalah untuk:

   a. Menyelesaikan konflik scr beradab

   b. Mencegah agar jangan terjadi konflik yg lbh luas

   c. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kpd korban dan para pencari keadilan

   d. Membangun budaya tertib

   e. Adanya kepastian

   f. Edukasi

Penjabaran atas reg ident pengemudi dan kendaraan bermotor merupakan bagian untuk membangun lalu lintas yg aman selamatbtertib dan lancar karena lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Mendukung upaya upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan upaya2 untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Membangun budaya tertib berlalu lintas krn lalu lintas merupakan refleksi budaya bangsa. Dan memberikan pelayanan prima yg dibangun berbasis IT dan juga melihatnpd kearifan lokal. Satu prinsip seribu gaya.

**STNK dan TNKB : Sistem data dan sistem pelayanan bagi pencapaian tujuan road safety**

STNK ( surat tanda nomor kendaraan ) dan TNKB ( tanda nomor kendaraan bermotor) merupakN cara atau sarana mencapai tujuan road safety. Cara mencapai tujuan road safety dibangun sistem pd STNK dan TNKB sbg legitimasi pengoperasionalan. Tujuan road safety adalah : 1. Terwujudnya lalu lintas yang aman selamat tertib

dan lancar, 2. Meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, 3. Terbangunnya budaya tertib dan 4. Adanya pelayanan yang prima di bidang LLAJ. Mengapa di dalam mengoperasionalkan kendaraan bermotor memerlukan legitimasi? Analogi ekstrim memiliki mobil spt memiliki sejata api yg bisa disalahgunakan yg dpt merusak menghambat bahkan mematikan produktifitas dirinya maupun orang lain. Maka proses legitimasi pengoperasionalan dilakukan dengan :

1. Sistem data kepemilikan, kendaraan, yang mengacu pd sistem pendataan pd BPKB
2. Sistem pajak kendaraan bermotor
3. Sistem asuransi
4. Sistem pengawasan
5. Sistem penegakkan hukum
6. Sistem forensik kepolisian
7. Sistem pelayanan publik

**Sistem data kepemilikkan kendaraan**

Siststem data kepemilikan kendaraan dan asal usulnya ini mengacu dr sistem data pd BPKB yang telah diverifikasi secara fisik maupun dokumennya. Dengan keluarnya BPKB dapat dinyatakan keabsahan kepemilikan dan asal usul kendaraan bermotor dapat dilegitimasi. Sistem pendataan kendaraan bermotor pd STNK dikaitkan dengan sistem sistem lainnya yg tertera pd point 2 sd 7. Sistem data kendaraan bermotor pd STNK dalam pengoperasionalannya dikaitkan dg TNKB. Sistem TNKB untuk mendukung ke 7 point di atas dilakukan dg sistem ANPR ( Automatic number plates recognation ) atau plat nomor kendaraan bermotor yg dpt kaitkan dg sistem penegakkan hukum secara elektronik (ETLE : electronic number traffic law enforcement). Sistem ANPR dielaborasi sistem on board unit ( OBU ), RFID ( radio frequency identification) yg dpt digunakan untuk pencatatan atau recognize perilaku berlalu lintas yg dpt dikaitkan dg program TAR ( traffic attitude record) dan de merit point system.

Sistem data pd STNK dan TNKB merupakan landasan penting bagi terbangunnya sistem sistem pengelolaan manajemen lalu lintas seperti: ERP ( electronic road pricing), E Parking, E samsat, Electronic Toll Cillection, E banking maupun Etle. Kesemua sistem yg ada pd STNK dan TNKB merupakan bagian dr sistem manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan hingga manajemen emergency. Kesemua itu saling kait mengkait pd sistem IT for road safety. Sistem yg di bangun pd TMC ( traffic management centre ), SSC ( Safety and security centre ), ERI ( electtonic registration and identification ), SDC ( safety driving centre), INTAN ( intellegence traffic analysis ), smart management, road safaty intellegent, road safety algoritma dan sistem sistem lainya.

Sistem pelayanan pd STNK dan TNKB untuk mencapai tujuan road safety mencakup :

1. Sitem pelayanan keamanan
2. Sistem pelayanan keselamatan
3. Sistem pelayanan hukum
4. Sistem pelayanan administrasi
5. Sistem pelayanan informasi
6. Sistem pelayanan kemanusiaan

Sistem sistem di atas merupakan satu bagian dari sistem pelayanan yang berstandar prima.

# LITERASI PEMBELAJARAN DI SESPIM LEMDIKLAT POLRI [22]

Literasi merupakan landasan dasar bagi pendidikan untuk merubah mindset atau cultureset.

Dengan demikian literasi sangat kompleks yang menunjukan adanya sesuatu yang holistik atau sistemik, namun setidaknya literasi dapat dilihat dari :

1. Moral spiritual yang dapat dijabarkan dalam kegiatan yang berkaitan :
   a. Iman kepercayaan.
   b. Keagamaan.
   c. Spiritualitas kemanusiaan.
   d. Tradisi.
   e. Penanaman nilai nilai melalui mentoring / pengasuhan.
2. Akademik, yang dapat dijabarkan dalam bidang :
   a. Pembelajaran di kelas.
   b. Penulisan.
   c. Penerbitan.
   d. Jurnal.
   e. Buku maupun produk produk pembelajaran dalam berbagai media.
   f. Perpustakaan.
   g. Pengkajian dan penelitian.

22 https://polisiindonesia.id/2024/02/22/cdl-literasi-pembelajaran-di-sespim-lemdiklat-polri/

h. Debat publik.
i. Dialog kebangsaan.
j. FGD, seminar, Workshop.
k. Bench mark.
l. Bedah buku.
m. Leader expo dsb.

3. Kesehatan fisik maupun lingkungan dapat dikaitkan dengan kegiatan :
   a. Olah raga.
   b. Penataan lingkungan.
   c. Pengelolaan sampah.
   d. Pemberdayaan alam lingkungan sekitar.
   e. Kompetisi, pertandingan olah raga.
   f. Pengelolaan sumber mata air.
   g. Penanaman pohon dsb.
4. Seni budaya dapat dikaitkan dengan kegiatan :
   a. Seni musik.
   b. Seni rupa.
   c. Seni suara.
   d. Seni tari.
   e. Seni pertunjukan.
   f. Merawat dan mengembangkan tradisi dan budaya.
   g. Membangun komunitas seni budaya dan pariwisata.
   h. FGD, diskusi, seminar, workshop seni budaya.
   i. Podcast dsb.

5. Manajemen media dapat dikaitkan dengan kegiatan :
   a. Pengelolaan media elektronik, online, sosial.
   b. Back office, application dan net work terkait sistem inputing dan sharing data.
   c. Produk produk cetak maupun virtual.
   d. Podcast.
   e. Leader branding.
   f. Komunikasi sosial dsb.
6. Bhakti masyarakat, dapat dikaitkan dengan kegiatan :
   a. Social engineering.
   b. Bantuan sosial.
   c. Membangun dan merawat sumber air dan udara sehat.
   d. Tata kelola sampah.
   e. Sistem pelayanan publik.
   f. Sistem keamanan dan pola pola pengamanan.
   g. Penanggulangan bencana alam.
   h. Kesehatan masyarakat ,berupa klinik, Rumah sakit.
   i. Bakti sosial dsb.
7. Dialog peradaban dapat dikaitkan dengan point 1 sd 6 yang difokuskan bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
8. Personal branding dikaitkan dengan kualitas pengendalian diri yang ditunjukan adanya :
   a. Kesadaran.
   b. Tanggung jawab.
   c. Disiplin.
9. Social engineering secara khusus dapat dikaitkan pada point di atas yang berkaitan dengan pokitical will :

a. Membangun model smart city.
b. Sitem penataan kawasan kawasan.
c. Sistem sistem penanggulangan konflik sosial.
d. Sistem sistem penanggulangan bencana.
e. Sistem sistem penataan lingkungan dan sumber dayanya.
f. Sistem sistem pengembangan industri dan pariwisata.
g. Sistem sistem ekonomi.
h. Sistem sistem penegakan hukum dan keadilan.
i. Soft power dan smart power dsb.

10. Pengembangan inovasi dan kreatifitas dapat dikaitkan dengan point 1 sd 9.

Literasi dibangun mulai dari konseptual dan teoritikalnya hingga tindakan tindakan pragmatis. Untuk itu diperlukan pemimpin yang pemikir dan berkarakter yang mampu untuk menjadi sumber energi.

Berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Siap menghadapi tuntutan tantangan, ancaman dan harapan di masa kini dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

# REFORMASI BIROKRASI KEPOLISIAN [23]

Dalam studi banding pada sistem kepolisian Jepang, pada tataran konseptual dan implementasi dari NPA ( markas besar ) sampai tingkat Koban, benang merah yang dapat ditarik sebagai kesimpulannya yaitu: kepolisian Jepang memiliki spirit untuk menjadi polisi sebagai pejuang kemanusiaan yang dibangun atas dasar kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Disiplin dan bekerja keras dalam ketulusan hati ditunjukan dalam pemolisiannya.

Kecinntaan dan kebanggaan akan pekerjaannya dilakukan dengan sepenuh hati setia serta loyal kepada masyarakat, bangsa dan negara serta institusi kepolisian.

Pemolisiannya terus dikembangkan dan terus berjuang bagi upaya upaya kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Semua itu dilakukan dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern bekerja dengan tulus serta bereaksi dengan cepat. Semua itu menjadi bagian dalam menjaga keamanan dan rasa aman warga masyakat.

Keutamaan Polisi dalam pemolisiannya untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Reformasi adalah usaha perubahan menuju sesuatu yang lebih baik atau menjadi lebih baik. Birokrasi dapat dimaknai sebagai tata kerja institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Birokrasi dapat dimaknai pula dengan pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi dengan pembagian beban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan tugas dalam institusi.

Reformasi birokrasi adalah segala usaha atau upaya menjadikan birokrasi berfungsi secara professional mampu memberikan pelayanan yang prima dan menjadi ikon pelayanan, perlindungan pengayoman

23 https://polisiindonesia.id/2024/02/24/cdl-reformasi-birokrasi-kepolisian/

masyarakat juga sbg penegak hukum dan keadilan yg tegas berwibawa serta humanis. Selain itu juga diawaki oleh SDM yang berkarakter yang memiliki integritas komitmen kompetensi dan keunggulan. Benar benar mencintai dan bangga akan institusinya.

Implementasi penyelenggaraan tugas kepolisian dapat dilihat dalam ranah birokrasi maupun masyarakat yang ditunjukkan dengan kualitas prima dalam memberikan pelayan kepada publik.

Pendekatan birokrasi yang profesional ada pada hubungan-hubungan yang sifatnya impersonal atau hubungan kompetensi. Birokrasi demikian disebut juga dengan birokrasi yang rasional. Artinya, konsep-konsep dan kebijakan-kebijakan bersifat tertulis.

Keputusan ada pada pimpinan tetapi dia bertanggung jawab sebagai manajer atas kewenangan yang diberikan dan keputusan yang diambilnya. Sangat berbeda bahkan bertentangan dengan birokrasi yang patrimonial, feodal, dan tidak rasional dan pendekatan2 personal menjadi andalannya.

Dalam mereformasi birokrasi, hal penting dan mendasar dilakukan adalah perubahan kultur yang dimulai dari perubahan mindset. Reformasi secara struktural, instrumental dan kultural diperlukan pembenahan mulai dari konsepnya, aturannya, infrastruktur dan sistem pendukung yang berbasis it, melalui kepemimpinan yang transformatif, pembinaan sdm yang berkarkter adanya keteladanan serta penegakkan hukum yang tegas dan berkeadilan. Lebih menekankan pada pencegahan, membangun kemitraan yang dengan demikian mampu menjadikan birokrasi sebagai ikon bagi pelayanan publik yang berstandar prima.

Hakikat reformasi secara mendasar yang paling sulit adalah reformasi kultural sebagai wujud perubahan mendasar atas nilai-nilai budaya, pedoman-pedoman, keyakinan-keyakinan, dan teori-teori yang digunakan secara selektif prioritas dalam mengimplementasikan pelayanan kepada publik, sehingga mampu menjadi ikon kepercayaan publik dengan standar pelayanan yang prima.

Hambatan reformasi birokrasi secara kultural, salah satunya adalah kepemimpinan yang melakukan diskresi birokrasi, yang cenderung mjd korupsi. Diskresi birokrasi ini ditunjukkan adanya kepemimpinan yang

otoriter dalam birokrasi patrimonial, kebijakan lisan atau kebijakan tidak tersurat namun tersirat dan mau tidak mau harus dijadikan pedoman bagi anggota bawahanya dalam menyelenggarakan tugas. Diskresi birokrasi ini memiliki kencenderungan korup, karena acuanya adalah keputusan yang subyektif dengan pendekatan personal sehingga secara moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional, secara sosial sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Reformasi birokrasi merupakan perubahan mindset yang tidak mungkin dilakukan dengan cara instan, tidak mungkin juga dengan cara-cara fisik atau kegiatan seremonial ataupun supervisial sesaat. Tidak mungkin juga dilakukan dengan suatu perintah, "siap grak berubah grak …".

Perubahan mindset adalah proses yang memerlukan kemauan, keberanian, dan kepedulian bahkan kerelaan berkorban dari pimpinan hingga segenap unsur pimpinan di semua lini karena para pemimpin ini semestinya menjadi agen perubahan, teladan atau panutan yang mempunyai kekuasaan, kesempatan dan legitimasi untuk melakukan perubahan. Keteladanan, integritas, komitmen moral, dari pimpinan menjadi dasar pijakan perubahan mind set bahkan culture set. Political will pimpinan menjadikan tiang pancang untuk tautan, karena tanpanya sistem akan hancur berantakan.

Aspek lain yang perlu dilakukan adalah edukasi bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan bahkan sepanjang hayat untuk menjadikan birokrasi menjadi pembelajar.

Pada tahap ini semua level pimpinan wajib mengedukasi bawahannya sebagai mentor yang mampu menjembatani memotivasi memberdayakan bahkan membantu memberikan berbagai solusi.

Perubahan nilai-nilai budaya yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan penegakkan hukum dan disiplin harus dilakukan. Tentu ini tidak dilakukan dengan cara-cara otoriter tetapi bagaimana kesadaran dapat dibangun dan bagaimana kepekaan dan tanggung jawab diwujudkan. Yang tidak kalah penting adalah membangun karakter institusi yang ditinjukan dari profesionalisme, keunggulan-keunggulan, maupun sikap moralitas.

Kesadaran merupakan tingkatan moral tertinggi yang dapat mendorong : kepekaan kepedulian bahkan empati serta belarasa yang menjadikan humanis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan legitimasi dari berbagai pihak merupakan soft power yang dapat dijadikan landasan dan langkah awalnya atau modal dasar reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi, pemahamannya dapat dimaknai sebagai upaya menuju birokrasi yang rasional, modern, yang berdasarkan kompetensi, profesional, cerdas, modern, inovatif kreatif , transparan, akuntabel dan proaktif serta problem solving. Reformasi birokrasi kepolisian dapat dipahami sebagai upaya kepolisian menjadi Polisi sipil yang profesional, cerdas, kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, modern, proaktif, problem solving, kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta seantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di dalam masyarakat yang modern dan demokratis sebagai ikon peradaban, kemanusiaan. Reformasi secara struktural, instrumental dan kultural. Dalam mereformasi kepolisian ada 3 pola dasar yang meliputi upaya untuk :

1. Belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu.

   Yang harus berani ditunjukan apa kesalahan-kesalahan masa lalu dan tentu saja bukan karena subyektifitas serta sifat defense yang berlebihan. Tentu saja bukan untuk menyalahkam atau mencari kesalahan tetapi untuk memperbaiki kesalahan baik di bidang pembinaan maupun bidang operasional. Termasuk konsep-konsep dan peraturan-peraturan maupun pedoman-pedoman yang telah ada. Selain kesalahan tentu ada potensi-potensi yang bisa mendukung yang bisa diberdayakan atau direvitalisasi.

2. Siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masa kini.

   Reformasi birokrasi kepolisian mewujudkan harapan dan kebutuhan serta tuntutan masyarakat di masa kini. Yang harus cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah.

   Untuk mencapainya tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan tidak mungkin terwujud.

3. Menyiapkan masa depan yang lebih baik.

   Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional. Sebagai contoh dalam pembinaan SDM baik dari rekrutmen sampai pengakhiran dinas berdasarkan standar kompetensi atau produktifitas, yang transparan, akuntabel.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka dalam reformasi birokrasi kepolisian hal hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Political will yang visioner dan mendukung proses reformasi birokrasi,
2. Adanya kepemimpinan yang transformatif.
3. Pembangunan infrastruktur yg berbasis IT.
4. Menyiapkan tim transformasi sebagai tim back up dan tim monitoring serta evaluasi.
5. Menyiapkan sdm yang berkarakter sbg penjaga kehidupan pembangun peradaban.
7. Memiliki program unggulan mencapqi standar dan kuqlitas tinggi (world class).
8. Menyiapkan pilot project sebagai model percontohan.
9. Monitoring dan evaluasi dan melakukan evaluasi
10. Mengembangkan apa yang sudah dicanangkan pada wilayah wilayah lainnya.

Implementasi reformasi birokrasi kepolisian dapat dijabarkan dalam 8 program yang mencakup :

1. Birokrasi mampu menjadi institusii yang tepat fungsi, dan tepat ukuran (right size).
2. Tatalaksana (sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance).
3. Peraturan/ UU (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih).

4. SDM (sdm beritegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, dan sejahtera)
5. Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn)
6. Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi).
7. Pelayanan publik (pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).
8. Budaya kerja (birokrasi dengaan integritas dan kinerja tinggi).

8 hal tersebut merupakan yang diprioritaskan pada :

a. Sdm (kompetensi),
b. Instrument dan metode,
c. Kelembagaan (struktur dan kultur).

Implementasinya dijabarkan oleh masing-masing satker dan sub satker dari tingkat Mabes sampai dengan Polres.

Mereformasi birokrasi kepolisian secara general prinsipnya bisa sama namun implementasinya dapat disesuaikan dengan corak masyatakat dan kebudayaanya, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing yang dapat dikembangkan dalam membangun kepolisian sebagai polisi sipil dalam masyarakat yang modern dan demokratis ( membangun supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan dan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat).

Yang ditunjukan dari kinerja Polri yang : profesional, cerdas, transparan dan akuntabel, cepat, tepat, akurat, informatif, mudah di akses, proaktif, problem solving yang mengutamakan pada tindakan pencegahan.

Dengan demikian reformasi birokrasi kepolisian dalam membangun sistem pemolisian yang :

1. Berbasis pada supremasi hukum
2. Pemolisiannya dapat dipertanggungjawbkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial, kemanfaatanya bagi peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Prinsip prinsip moralitas menjadi dasar karena tugas-tugasnya adalah untuk memanusiakan manusia dalam arti mengangkat harkat, martabat manusia, yang dibangun di atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin.

Walaupun sebagai Polisi yang modern dan handal dalam mengimplementasikan electronic policing maupun forensik sekalipun Polisi tetap dikenal hati nurani humanis.

Penjabaran konsep-konsep tersebut perlu dilakukan pada tataran kepemimpinan, administrasi, operasional, dan peningkatan kapasitas; mulai dari tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek dan Sub-sektor, dan bahkan sampai Bhabinkamtibmas.

Model pemolisian yang sekarang ini banyak diadopsi dalam kepolisian-kepolisian yang modern dan demokratis adalah community policing.

Dalam penyelenggaraaan tugas Polri dikenal sebagai Polisi Masyarakat (Polmas). Pemolisian model e-policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian baik pada tingkat manajemen dan operasional, dengan atau tanpa upaya paksa, dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (kamtibmas). Pada era digital reformasi birokrasi ini, kepolisian sudah membangun sistem-sistem dan infrastruktur modern pemolisian secara online (e-policing).

Selain sistem, reformasi birokrasi kepolisian juga membangun ikon atau simbol-simbol bagi para petugasnya: simbol keahlian (profesionalisme), kemanusiaan, aparat yang berkarakter, dan simbol perubahan. Melaksanakan simbol-simbol itu merupakan wujud dari keunggulan dan keunikan Polri yang membawa manfaat signifikan bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Perwujudan ikon atau simbol itu akan menjadi kebanggaan yang sekaligus memecahkan beberapa masalah yang internal maupun eksternal. Jika para petugasnya mampu menjadi ikon, maka masalah yang dihadapi secara internal dapat diminimalisir atau bahkan nyaris tidak ada lagi.

E Policing mendukung program E Goverment dlm membangun smart city. Smart city saat ini memang sedang menjadi trend di Indonesia. Bukan

sekedar sebagai gengsi, melainkan sebuah langkah dalam memajukan kota di suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Smart city dpt diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif.

Sedangkan aspek utama pembangun smart city menurut Frost dan Sullivan pada tahun 2014 yaitu :

1. Smart Governance,
2. Smart Technology,
3. Smart Infrastructure,
4. Smart Healthcare,
5. Smart Mobility,
6. Smart Building,
7. Smart Energy dan
8. Smart Citizen.

Tujuan dari smart city itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Perbankan Elekronik / E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.

Adapun persyaratan pelayanan prima antara lain: a). aplikasi mudah digunakan; b). layanan dapat dijangkau dari mana saja; c). murah; d). dapat dipercaya; dan e). dapat diandalkan (reliable).

E Policing adalah pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi.

Bisa juga dipahami e-policing sebagai model pemolisian yang membawa community policing pada sistem online. Dengan demikian E-Policing ini merupakan model pemolisian di era digital yang berupaya menerobos sekat-sekat ruang dan waktu sehingga pelayanan-pelayanan kepolisian dapat terselenggara dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel informatf dan mudah diakses.

Sistem ini bisa menjadi strategi inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan creative break through. Dikatakan sebagai inisiatif antikorupsi karena dengan sistem-sistem online dapat meminimalisir bertemunya person to person.

Dalam pelayanan-pelayanan kepolisian di bidang administrasi contohnya sudah dapat digantikan secara online melalui e-banking, atau melalui ERI (Electronic Registration and Identification).

E-Policing bukan dimaksudkan untuk menghapus cara-cara manual yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekatan dan persahabatan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Sebaliknya, sistem ini justru untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas kinerja sehingga Polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.

E-Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbasis elektronik yang berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar fungsi/bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

Pemolisian tersebut dapat dikatakan memenuhi standar pelayanan

prima yang berarti: Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Akuntabel, Informatif dan mudah diakses.

Pelayanan prima dapat diwujudkan melalui dukungan SDM yang berkarakter, pemimpin-pemimpin yang transformatif, sistem-sistem yang berbasis IT, dan melalui program-program yang unggul dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman bahkan sampai dengan penegakkan hukumnya.

Pembahasan E-Policing dapat dikategorikan dalam konteks : 1. Kepemimpinan, 2. Administrasi, 3. Operasional, 4. Capacity Building (pembangunan kapasitas bagi institusi).

Smart city bukanlah sebagai tujuan utama melainkan meningkatnya kualitas hidup masyarakatlah tujuanya. Kota yang humanis aman nyaman asri termasuk lalu lintasnya yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sejalan dengan hal tersebut program IT for road safety merupakan langkah mendasar untuk memetakan, membuat model, penanganan secara holistik atau sistemik, pendekatan berbasis pada scientific dan teknologi, terbangunnya big data dalam back office.

Yang diinput melalui berbagai aplikasi dan juga akan dikaji melalui riset secara ilmiah. Hal-hal yang dilakukan inputing data adalah membuat kategori mengidentifikasi akar masalah penyebab dari setiap permasalahan

Mengimplementasikan e policing berbasis smart management yaitu membangun kinerja profesional yg berbasis SOP yang mencakup:

a) Job Description dan Job Analysis masing-masing bagian
b) Standardisasi keberhasilan tugas
c) Sistem penilaian kinerja
d) Sistem reward and punishment
e) Etika kerja ( apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan/do dan don't)

Point a sampai dengan e inilah yang tercakup pada smart management.

# 10 KEUNGGULAN ALUMNI SESPIM LEMDIKLAT POLRI [24]

Keunggulan alumni Sespim Lemdiklat Polri, sebagai Pemimpin di masa depan dapat dikategorikan sebagau berikut :

1. Memiliki karakter kepemimpinan transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme
3. Memiliki pemahaman dan mampu mengimplementasikan keutamaan polisi dalam pemolisiannya
4. Memiliki wawasan dan pengetahuan serta kampuan menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emergensi maupun kontijensi
6. Memiliki keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu
7. Memiliki kesiapan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini
8. Memiliki kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik
9. Mampu menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern

24 https://transindonesia.co/2024/02/25/10-keunggulan-alumni-sespim-lemdiklat-polri/ https://polisiindonesia.id/2024/02/25/cdl-10-keunggulan-alumni-sespim-lemdiklat-polri/

10. Mampu membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional

# PEMOLISIAN DI ERA DIGITAL [25]

Di era digital seakan media menjadi arena baru pada dunia virtual yang menjadi disrupsi. Tatkala tidak siap bermedia maka dalam memanfaatkan media berdampak pada COI (conflick of interest). Memberdayakan media yang semestinya mendukung produktifitas dan meningkatkan kualitas hidup bisa bisa menjadi sesuatu yang kontra produktif. Apalagi ini di era post truth, media seakan menjadi market place yang dapat digunakan sebagai ajang untuk mempengaruhi bahkan membangun opini publik melalui berita hoax yang memviralkan pembenaran agar dianggap sebagai kebenaran. Saling hujat saling serang seakan dunia virtual tidak membutuhkan keteraturan. Netizen pun semestinya dibangun bagi kemajuan suatu peradaban.

Rekayasa sosial dalam ranah virtual secara by design dapat digunakan dalam kepentingan apa saja. Boleh dikatakan kaum milenial paham dan menggunakan media sosial. Apa yang di sampaikan bisa langsung di share ke berbagai penjuru dunia atau secara global dalam hitungan detik. Dunia tanpa batas ruang dan waktu. Apa saja kapan saja dan siapa saja bisa. Media menjadi power on hand yang dapat membantu atau sebaliknya dalam berbagai aktivitas manusia dalam berbagai gatra kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, hukum, pertahanan. Berbagai isu mudah dan cepat dihembuskan. Media sosial banyak menggeser tatanan kehidupan dari cara konvensional bergeser ke arah yang kekinian. Tatkala konten yang didesign untuk kepentingan tertentu atau kelompok tertentu maka akan menjadi potensi konflik dan kontra produktif.

Pilar dengan berbagai sendi kehidupan sebagai simbol kedaulatan dan peradaban bangsa dapat digerus.

25 https://transindonesia.co/2024/02/26/pemolisian-di-era-digital/
https://polisiindonesia.id/2024/02/26/cdl-pemolisian-diera-digital/

Sehingga, sumber daya utama dan penting bagi kedaulatan dan daya tahan bangsa dapat diganggu hingga diambil alih. Oleh sebab itu di dalam memanage media setidaknya dilakukan untuk:

1. Memberitakan yang baik dan benar
2. Sesuai dengan fakta tidak mengada ada dan tidak direkayasa
3. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
4. Berpihak pada kemanusiaan supremasi hukum transparan akuntabel, informatif komunikatif dan mudah diakses
5. Menginspirasi, memotivasi dan memberi solusi serta mengedukasi
6. Membuat counter issue secara akademis dan yuridis atas sesuatu yang menjadi dampak era post truth terutama yang berkaitan dengan hoax
7. Menghibur, fun dan tetap pada norma norma etika dan moralitas Dsb

Di era digital, dunia virtual semakin marak faktanya banyak hal negatif yang dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas. Pembunuhan karakter hingga mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Berita hoax pembodohan penyesatanpun secara virtual banyak menjadi pilihan. Memang ada yang marah merasa dikungkung atau dibungkam atau banyak hal yang menuntut kebebasan sebebas bebasnya. Hujat menghujat dengan kalimat tidak sepatutnyapun seakan menjadi pameran ketololan dan sikap pengecut. Netizen +62 dilabel paling buruk tatakramanya. Entah itu refleksi budaya atau oknum yang tak lagi bisa menghargai orang lain. Sikap budaya bangsa yang adiluhung seakan luntur akibat evoria dunia maya. Tatkala diminta pertanggungjawaban kembali air mata maaf bahkan sikap minta dikasihani memelas yg ditampilkan. Ujaran kebencian menghakimi luar biasa memalukan kata katanya. Seakan memang otak dan hatinya lupa segala edukasinya.

Kritik disamakan dengan hujatan. Tabiat buruk seakan menjadi moralitas. Provokasi pembodohan menjadi sesuatu yang membanggakan. Kalau menampilkan hujatan seakan juara jagoan dan merasa pahlawan. Menyedihkan. Dalam kehidupan sosial di era digital

maka keteraturan sosial di dunia virtual memang dioerlukan tatanan dan pertanggungjawaban. Mau tidak mau tatkala segala sesuatu yang berdampak pada konflik dan berbagai hal yang kontrta produktif menjadi tanggung jawab kita semua mengatasinya. Konteks demokrasi menjadi acuan bebas bertwnggungjawab, jaminan perlindungan HAM, supremasi hukum, transparan dan akuntabilitas orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menjaga kedaulatan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan ketahanan dan daya tangkal bahkan daya saing. Kritis atas penyimpangan atau ketidak benaran merupakan suatu kecerdasan keberanian bahkan juga wujud tanggung jawab moral. Keras dalam prinsip dan penyampaian secara elegan akan mengundang simpatik dan solidaritas.

Kekerasan simbolik ujaran kebencian pembodohan hingga pengadilan sosial bukan sesuatu yang spontan melainkan by design. Era post truth antara fakta dan kebobongan diolah sedemikian lupa pembenaran seolah menjadi kebenaran. Dan dilakukan orang orang cerdik pandai yang terus menerus diviralkan hingga seolah menjadi kebenaran. Bumbu bumbu hoax dengan primordialisme menjadi penyedap. Keteraturan sosial dalam dunia virtual belum sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang kontra produktif. Namun sebenarnya tanpa sadar taburan taburannya sdh dapat merasuki bahkan mencandui pikiran hingga emosi publik. Dunia virtual jembatan harapan dalam era digital. Hal yang positif tentu banyak sekali dan mendukung pencerdasan dan pembangunan karakter bangsa yang mampu menembus sekat ruang dan waktu. Namun hal hal yang kontra produktif dan menjadi potensi rusaknya karakter bahkan kedaulatan bangsa apakah dimaklumi dan dianggap biasa biasa saja?

Media sosial menjadi arena di era digital. Media sosial sekarang ini begitu marak, mampu menggusur keberadaan media media konvensional. Media sosial menjadi ruang yang terbuka atau menjadi arena apa saja yang diberdayakan menjadi wadah berbagai kepentingan. Fungsi media sosial antara lain :

1. Media informasi
2. Media komunikasi

3. Media sosialisasi
4. Media edukasi
5. Media kepentingan politik
6. Media untuk labeling
7. Media bisnis
8. Media penggalangan solidaritas
9. Media penghakiman sosial
10. Media membangun jejaring sosial
11. Media laboratorium sosial
12. Media colling system

Dan masih banyak fungsi media sosial lainnya. Efek media sosial di era digital antara lain adanya post truth yang berdampak negatif yang mampu mempengaruhi persepsi dan interpretasi publik. Di era post truth banyak kebenaran dikalahkan oleh pembenaran yang disebarkan melalui media sosial. Berbagai hal dapat di design, dikemas sedemikian rupa mengelaborasi antara fakta dan kebohongan yang diviralkanterus menerus sampai yang membuatnyapun merasa itu sebagai kebenaran. Warga net sekarang ini lebih berani namun juga lebih mudah diobok obok opininya. Suasana di media sosial bisa saja panas walau suasana dalam fenomena sebenarnya adem adem saja. Komunikasi dalam media sosial mampu menggerus logika menghanyutkan dalam opini maupun pembenaran yang mereka taburkan dalam berbagai wujud informasi yang provokatif. Pada masa lampau dengan kebijakan 3 in 1 muncul joki, era media sosial, muncul buzer, menjadi pasukan bayaran untuk saling serang dan menjatuhkan. Perang opini dalam media ini tidak lagi mencerdaskan akan terus saling menabur isu hingga melabel yang tujuannya kebencian. Konflik antar buzer ini menjadi arena baru yang dilontarkan dengan kata kata kasar bahkan ucapan yang amoral yang selayaknya disampaikan dalam komunikasi publikpun bisa di sampaikanpun dengan tanpa rasa malu maupun bersalah. Netizen Indonesia dinilai oleh beberapa pengamat media sosial sebagai netizen yang paling buruk dalam berkomunikasi. Tiada lagi tata krama sopan

santun. Walaupun ada UUITE dan sudah banyak yang ditindak tegas dan diberi sanksi hukum tetap saja banyak yang terus saja mengeluarkan kata kata kasarnya. Seakan akan senang dan bangga memamerkan kedunguannya. Sebentar marah dan bila tertangkap, menangis merengek rengek untuk meminta maaf.

Media sosial merajai sistem informasi dan komunikasi dari perorangan sampai berkelompok mereka memiliki suatu tatanan baru. Dalam dunia yang serba on line dari iklan sd penjualan bahkan penolakan bisa dilakukan.

Aktivitas netizen menjadi suatu pola baru tatkala dapat dipetakan atau dipolakan dalam berbagai algoritma menunjukan sebagai arena sumberdaya. Sistem kajian media sosial semakin berkembang semakin menjadi salah satu pilihan komunkikasi informasi dengan berbagai strategi untuk kepentingan pengeksploitasian sumber daya. Perebutan dalam pemberdayaan sumberdaya dari berbagai kepentiangan tsb tatkala dikategorikan antara lain memanfaatkan :

1. Primordialisme sebagai pemersatu maupun pemecah belah.
2. Menggunakan hobby dan kesukaan untuk membuka pintu masuk jembatan komunikasi dan membangun solidaritas sosial maupun legigimasinya
3. Profesi pekerjaan untuk membuka pasar virtual dengan memanfaatkan viewer dan follower
4. Melihat dan mempengaruhi opini/ pendapat publik melalui berbagai survey/ kajian
5. Memberikan counter issue maupun hiburan Dsb

Fungsionalisasi media sosial begitu luas, tentu akan berdampak pada perilaku netizen dengan peradaban barunya. Berbagai informasi komunikasi dapat di jembatani secara cepat yang mampu menembus batas ruang dan waktu tatkala ada kekuatan yang seimbang atau lebih kuat untuk mempengaruhinya. Tatkala tidak ada yang dominan atau menjadi acuan atau dasar kebenaran maka informasi dan berita hoax tidak terkendali yang berdampak luas. Media sosial bisa digunakan untuk merontokkan atau menyerang dengan berbagai kepentingan.

Di sinilah fungsi intelejen media akan menjadi bagian penting untuk menata atau menjaga keteraturan sosial pada warga net. Prinsip kinerja intelejen dari : pengumpulan data, analisa, produk dan networking ini dapat dilakukan dengan memberdayakan media sosial sebagai arena atau bahkan laboratorium sosial. Dalam kehidupan masyarakat boleh dikatakan sebagian telah ada dalam media sosial. Dari pemetaan pembuatan pola polanya dan pengumpulan data maka akan dapat dihubung hubungkan. Dapat dianalisa untuk menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma tadi dpt digunakan sebagai fooding atau model untuk memprediksi mengantisipasi dan memberi solusi. Intelejen media akan membantu menjembatani untuk membangun cooling system yang akan terus berkembang secara variatif. Fungsi media sosial secara positif akan mendukung upaya mencerdaskan kehidupan berbagsa dan bernegara demikian juga sebaliknya. Keteraturan sosial dalam dunia virtual menjadi kewajiban warga net untuk mematuhinya agar tidak hanyut dan terprovokasi informasi informasi hoax. Selain itu juga bagi dengan adsnya aturan hukum maka penegakkan hukum terhadap warga net yang dengan sengaja memperkeruh atau mengganggu keteraturan sosial dapat ditegakan.

Keamanan dan rasa aman merupakan dasar bagi suatu masyarakat untk dapat hidup tumbuh dan berkembang. Bisa dibayangkan apa yang akan dihasilkan bila tidak ada keamanan dan rasa aman. Tentu akan sarat ketakutan, kekawatiran bahkan gangguan nyatapun merebak dan menjadi pemandangan biasa. Keamanan dan rasa aman inilah yang menjadi standar bagi suatu peradaban. Mengamankan mungkin semua pihak dapat mengklaim mampu mengamankan, namun memberikan rasa aman ini yg boleh di katakan perlu kerja dg o2h ( otak otot dan hati nurani). Itulah mengapa polisi perlu ada.

Polisi bekerja pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat melalui pemolisian. Di sinilah pemolisian dinamikanya yang terus berkembang seiring dengan kemajuan dan perubahan jaman. Dengan harapan keberadaan polisi di dlm masyarakat yang modern dan demokratis di era digital, dinamis dan mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi masyarakat.

Polisi dan pemolisianya di era digital dalam masyarakat yang modern dan demokratis dapat dikatakan democratic policing. Di dlm implementasinya perlu merubah mind set dan culture set serta diperulakan usaha dan upaya luar biasa yang konsisten dan berkesinambungan. Permasalahan yang dohadapi polisipun semakin kompleks dan ancaman gangguanpun akan terus meningkat. Di era digital sekarang ini cara cara parsial, konvensional dan manual boleh dikatakan menjadi sarang terjadinya berbagai penyimpangan atau dalam pelayananya dapat dipastikan jauh dari standar pelayanan prima.

Pemolisian di era digital diperlukan adanya sistem pemolisian yang berbasis it atau yg dikenal dengan electronic policing ( e policing).

E policing merupakan model pemolisian berbasis pada IT yang diimplementasikan melalui : back office abg pusat k3i, aplication dan network. Sistem2 tsb merupakan sistem terpadu dan terintegrasi yang berbasis data dan mampu memberikan pelayan prima dlm model one stop service. Dengan demikian pelayanan publik di bidang: keamanan, keselamatan, administrasi, hukum, informasi dan keamanan dpt diimplementasikan scr tepat, akurat, transparan, aluntabel dan midah diakses memenuhi standar pelayanan yang prima.

Bagi Polri ( kepolisian negara Republik Indonesia) dg kebijakan promoter ( profesional, modern dan terpercaya) konsep polisi dan pemolisian di era digital sudah saatnya diimplementasikan di berbagai lini.

Polri sebagai institusi besar di dalam mereformasi birokrasi telah melakukan banyak hal dan prestasi dalam memberikan jaminan keamanan dan rasa aman. Perilaku para oknum yang sengaja atau karena kelalaian maupun kurang profesional tidak boleh diabaikan dan perlu perbaikan, peningkatan kualitas dan pembangunan secara tangible maupun yang untangible.

Memberikan jaminan keamanan dan rasa aman merupakan pekerjaan berat untk mampu mengangkat harkat martabat manusia dan untk semakin manusiawinya manusia. Di sinilah tugas polisi dapat menunjukan sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan

sekaligus pejuang kemanusiaan. Kesemuanya itu benang merahnya adalah terjaminya keamanan dan rasa aman shg trs meningkatnya kualitas hidup.

# ETIKA POLISI DALAM PEMOLISIAN: ANTARA YANG IDEAL DAN AKTUAL [26]

Etika kerja polisi dalam pemolisiannya (policing) dapat dipahami secara pragmatis pada apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara: moral, hukum, administratif, fungsional dan secara sosial.

Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Setidaknya yang ideal bagi polisi dalam pemolisannya mencakup :

1. Berdasar pada keutamaan polisi dalam pemolisiannya :
   a. Kemanusiaan
   b. Keteraturan Sosial
   c. Peradaban
2. Mendukung Supremasi Hukum dengan patuh hukum dan peraturan yang berlaku, Transparan dan Akuntabel
3. Menghormati nilai nilai sosial yang berlaku
4. Memberikan Jaminan dan Perlindungan HAM
5. Tindakan Pemolisiannya pada ranah Administrasi maupun ranah Operasional dapat dipertanggungjawabkan secara :
   a. Moral
   b. Hukum

26 https://transindonesia.co/2024/02/27/etika-polisi-dalam-pemolisian-antara-yang-ideal-dan-aktual/ https://polisiindonesia.id/2024/02/27/cdl-etika-polisi-dalam-pemolisiannya-antara-ideal-dan-aktual/

c. Administrasi
d. Fungsional
e. Sosial

6. Pikiran, Perkataan dan Perbuatannya menunjukan :
   a. Profesionalisme
   b. Humanisme
   c. Komunikatif
   d. Solutif
7. Upaya Paksa maupun Penegakan Hukum yang dilakukan merupakan tindakan :
   a. Kemanusiaan
   b. Pencegahan
   c. Perlindungan, Pelayanan, Pengayoman, Pencegahan
   d. Kepastian
   e. Edukasi
8. Menginspirasi, Memotivasi, Menjadi Role Model atau Panutan
9. Berjiwa Penolong
10. Tidak melakukan tindakan yang kontra produktif atau merusak citra institusi.

Apa yang ideal dengan yang aktual dapat berbeda bahkan bertentangan, karena core value yang diyakini memang bukan pada keutamaannya.

"Bener yen ora umum dadi salah, salah yen wis umum dadi bener".

Hal di atas dapat dianalogikan antara polisi negara A dengan Polisi negara B. Pada saat polisi negara A berkunjung ke negara B melihat polisi polisi melayani, humanis, tertib dsb. Dipuji pujilah oleh polisi dari negara A: " anda kok baik hati humanis ". Polisi negara B bingung dan berkata :" saya biasa biasa saja, ini pekerjaan saya". Sebaliknya tatkala polisi negara B berkunjung ke negara A, melihat polisi kasar, membentak bentak, terima suap bahkan ada yang memeras, polisi

negara B terheran heran dan bertanya :" anda kok jahat ". Polisi negara A kebingungan dan menjawab : " saya tidak jahat, ini biasa saja, dan ini pekerjaan saya".

Analogi di atas menunjukkan betapa cara pandang yang berbeda bahkan bertentangan dengan apa yang semestinya. Setidaknya faktor penyebabnya antara lain :

1. Pemimpin dan kepemimpinannya yang mengajarkan bahkan memerintahkan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Ada dikotomi jabatan basah dan kering. Jabatan basah dipuja dihormati dan dibangga banggakan, Jabatan jabatan basah yang diidolakan antara lain :
   a. Memiliki wilayah
   b. Memiliki kewenangan penegakan hukum dan upaya paksa
   c. Mengatur dan memberdayakan sumber daya
   d. Memiliki kewenangan pengawasan dan auditing
   e. Memiliki kewenangan perijinan
   f. Pelayanan administrasi
3. Birokrasi yang patrimonial
4. Pendekatan personal, yang berdampak pada terbangunnya klik ( clique )
5. Sistem reward and punishment yang lemah dan tidak jelas
6. Lembaga pendidikan dikait kaitkan dengan jabatan terutama yang ada di point 2
7. Gaya hidup yang tergerus arus hedonisme
8. Etiket yang buruk, terefleksi pada : pikiran perkataan dan perbuatan
9. Pelayanannya diimplentasikan model pasar: tawar menawar dan transaksional

10. Lembaga pendidikan belum sepenuhnya menjadi wadah pencerah atau think thank

Dari ke 10 point di atas berdampak pada sikap : arogan, tamak dan amarah. Hal yang semestinya dihindari bagi polisi di semua lini malah dibangga banggakan. Contoh perilaku yang merusak citra :

1. Sikap arogan
2. Memeras, menakut nakuti, mengancam, menerima suap
3. Pelayanan buruk
4. Menjadi backing yang ilegal
5. Melakukan kekerasan simbolik ataupun fisik
6. Menang menangan, memaksakan kehendak
7. Memutar balikan fakta
8. Penegakan hukum dijadikan alat atau senjata
9. Transaksional dalam perekrutan, pendidikan, pemempatan
10. Diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada publik, dsb.

Apabila dilakukan penelitian secara kualitatif untuk memahami, menganalisa dan membuat laporannya yang berbasis ilmu ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora (kemanusiaan), yang bercorak interpretatif atau hermeneutik,suatu kebenaran dalam kehidupan sosial ada dalam interpretasi, bukan pada fakta-fakta sosial. Yang terefleksk dalam kelakuan manusia dan ungkapan-ungkapannya, sebagai paradigmanya.

Untuk membangun agar yang ideal dengan yang aktual tidak bertentangan atau setidaknya gapnya tidak terlalu jauh antara lain mencakup :

1. Adanya political will yang kuat
2. Kepemimpinan yang transformatif
3. Tim transformasi sebagai back up system
4. Membangun birokrasi yang rasional dengan pendekatan yang impersonal berbasis kompetensi

5. Membuat dan menerapkan SOP yang berisi
    a. Job description dan job analysis
    b. Standardisasi keberhasilan pelaksanaan tugas
    c. Sistem penilaian kinerja
    d. Sistem reward and punishment
    e. Etika kerja
6. Menyiapkan SDM yang akan mengawaki atau bisa menjadi ikon atau panutan
7. Menerapkan model smart management yang berbasis pada siatem on line dan menerapkan merit system
8. Mereformasi lembaga pendidikan dan pembinaan SDM
9. Monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal
10. Membuat pola pola pengembanganny

Point poit di atas bisa dilakukan dalam reformasi birokasi dan melakukan perubahan perilaku organisasi kepolisian. Tentu saja perubahan ini dilakukan dari tingkat atas sd tingkat bawah. Mulai dari membangun infrastuktur, pembangunan SDMnya, penataan kembali aturan aturannya hingga penerapan penegakannya.

Citra buruk menunjukan ketidak percayaan publik kepada polisi. Akhir hayat birokrasi ? Di dalam birokrasi yang rasional maka akan berbasis pada :

1. Logika
2. Petugas yang profesional,
3. Sistem yang terintegrasi sehingga mampu menjembatani dan memberikan solusi.
4. Publik terlayani dengan standar prima yaitu : cepat, tepat, akurat, transparan akuntabel, informatif dan mudah diakses.
5. Para petugasnya berorientasi kerja dan gaji.

6. Tingkat produktifitas menjadi kebanggaan dan standar bagi kariernya.
7. Apa yang dikerjakan ada standarnya dapat diukur dan diaudit baik di dalam birokrasi maupun dilihat dari tingkat kepuasan publik atas pelayanan kepolisian.

Namun faktanya birokrasi sering malah melilit dan membuat sulit serta berbelit belit. Berurusan dengan birokrat identik dengan duit. Tanpa duit jangan harap bisa terlayani dengan baik. Bisa saja malah hilang entah kemana. Birokrasi menjadi lahan atau ajang penguasaan sumber daya. Para birokrat berebut jabatan dan kesempatan pada posisi yang bisa dominan dan mendominasi sumber daya.

Secara faktual dapat dilihat adanya zona basah dan kering. Golongan air mata dan mata air. Pendekatan tidak rasionalpun menjangkit dan semakin mengurita para mafia birokrasi. Klik, kroni dan berbagai kelompok personal semakin kental dan tajam dalam pengoperasionalanya. Kaum di zona nyaman akan mempertahankan status quo akan tetap senang dengan cara yang parsial konvensional dan manual. Cara cara tersebut menjadi sarang bagi adanya : kolusi korupsi dan nepotisme.

Merombak birokrasi untuk menjadi rasional, bisa dianalogikan seperti Romo Mangun Wijaya analogikan : bagai putri duyung yang mendamba ekornya untuk menjadi kaki. Golongan yang rasional,idealis terus berjuang memperbaiki dapat digolongkan sebagai bagian atas yaitu golongan manusia dari putri duyung tsb.

Namun lingkungan kebanyakan yang ingin mempertahankan status quo, cara manual konvensional dan parsial, dapat dianalogikan dan dikategorikan sebagai bagian ekor atau bagian bawah putri duyung.

Golongan manusia jika mengikuti pola ekor atau binatang maka ia akan gila. Sebaliknya golongan ekor tidak mungkin mengikuti golongan manusia. Tatkala ingin dipotong atau dipisahkan maka akan mati keduanya. Bagai buah simalakama yang dilematis.

Mewaraskan birokrasi bagai mengajak ekor berevolusi mjenjadi kaki manusia. Mungkin saja yang mengajak waras dianggap gila atau bajakan diserang atau bahkan untuk dimatikan.

Francis Fukuyama menulis the end of history : the last man yang menggambarkan dunia sudah sampai puncaknya dan akan mengalami kehancuran untk memulai sejarah peradaban baru. Mungkinkah analogi Fukuyama digunakan untuk the end of bureaucracy? Di era digital tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Dlm pewayangan ruang dan waktu dianalogikan Bethara Kala sang penguasa gelap dan menguasai ruang dan waktu.

Namun antara badan dan kepala kala dipisahkan agar tidak menghabiskan isi jagat raya ini. Di dalam ceritera gerhana matahari digambarkan sang Bathara menelan matahari karena tidk ada badanya maka matahari akan bersinar lagi. Di era digital yang memangkas bethara kala adalah sistem online yang terhubung dan berbasis elektronik.

birokrasi yang tersekat sekat dlm labirin yang memusingkan dapat dipangkas dan di terobos dalam satu sistem pelayanan. One stop service menjadi bagian yang terintegrasi dalam model : back officice, aplication dan network. Pola ini akan berkembang dalam sistem big data. Semakin mengurangi sentuhan person to person semakin menghindari potensi penyimpangan dan pengurangan potensi penyalah gunaan kewenangan.

Rasionalisasi birokrasi menjadi tantangan setiap pemimpin untuk mewaraskan dan mengakhiri kegilaan birokrasi. Selain itu memangkas mafia birokrasi adalah melawan "god fathernya" bagai naga. Para pemimpin akan diuji nyali melawan naga mafia birokrasi yang sarat dengan kesaktian yang dapat dianalogikan memiliki pangkat, jabatan, uang, media, jaringan, kekuatan hukum bahkan massa.

Tatkala pemimpin produk hutang budi maka jangankan melawan pasti kerjanya hanya cium tangan dan bahkan sungkem sibuk memberi buluh bekti glondong pangareng areng. Pemimpin transformatid yang layak sebagai pejuang dan berani berkorban dan bernyali tinggi dinanti untuk menebas sang naga mafia birokrasi adalah berani membangun

sistem online berbasis elektronik. Dengan sistem online maka akan ada digital recordnya para mafia tanpa dibunuh akan mati dengan sendirinya. Dan kegilaan birokrasi walau perlahan dapat diakhiri.

# DEMOCRATIC POLICING [27]

Polisi bekerja melalui pemolisian, pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat, pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Polisi dan pemolisiannya secara prinsip dan mendasar dapat dimaknai pada : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Konteks demokrasi dalam prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum dapat dilihat melalui :

1. Supremasi Hukum
2. Jaminan dan Perlindungan HAM
3. Transparan
4. Akuntabel
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup
6. Pengawasan dan pembatasan kewenangan

Democratic policing atau pemolisian secara demokratis dapat dimaknai sebagai model pemolisian " dialog kemanusiaan, peradaban untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial". Implementasi pemolisian yang demokratis dapat dilakukan melalui:

1. Pendekatan soft policing dengan dialog seni budaya dan pariwisata
2. Pendekatan hard power untuk mengatasi civil disorder yang berdampak pada anarkisme, dan kerusakan keteraturan sosial, akibat adanya konflik sosial yang didesign melalui issue : politik, primordial, sumber daya,sosial, kemanusiaan, korupsi
3. Pendekatan soft power untuk mengatasi berbagai potensi terjadinya ivil disobidience atau pembangkangan pembangkangan sipil
4. Smart power sebagai dukungan pari para akademisi, pakar atau orang orang yang memiliki pengaruh luas dan memiliki massa pendukung
5. Memberdayakan Electronic Policing sebagai model pemolisian di era digital

27 https://transindonesia.co/2024/02/28/democratic-policing-2/

6. Mengembangkan intellegent policing
7. Menerapkan Restorative justice untuk rehabilitasi kerusakan sosial atas adanya tindakan yang kontra produktif
8. Manajemen dan intelejen media untuk inspirasi, edukasi, komunikasi dan counter issue yg contra produktif

Demokratic policing sebagai model dialog peradaban untuk membangun citra dan kepercayaan publik dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Masalah sosial yang mengganggu keteraturan sosial, seperti konflik sosial sebagai teror merusak citra yang bertujuan membuat "un trust nasional" . Dalam implementasinya dapat dimulai dari pemetaan wilayah, pemetaan masalah, potensi, pemetaan orang. Democratic policing model proaktif, problem solving pada semua gatra secara soft power dan smart power. Democratic policing dalam konteks kemanusiaan dapat diwujudkan melalui sharing of happines

Strategi Democratic Policing secara akademis, yuridis, geo politik dan geo strategis, sosial budaya, pragmatis, dsb.

**Polisi dan Pemolisiaannya yang PCBM.**

Spirit democratic policinh secara manajerial maupun operasional adalah untuk kemanusiaan dengan PCBM ( profesional, cerdas, bermoral dan modern) dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepolisian kepada publik mencakup :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan

Standar pelayanan kepolisian kepada publik adalah : cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses. Dalam democratic policing, polisi dalam menegakan hukum juga penegak keadilan, demi

semakin manusiawinya manusia, yang merupakan upaya membangun peradaban agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Konteks inilah yang dikatakan tujuan pemolisian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman serta terwujudnya keteraturan sosial.

Pola pola democratic policing bisa dikembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Model pemolisian dapat dibuat sebagai acuan pengembangan kualitas kepemimpinan, infrastruktur dan model modelnya sbb:

1. Model pemolisian yang berbasis wilayah:
    a. Border policing (pemolisian di kawasan perbatasan)
    b. Maritime policing (pemolisian di kawasan maritim atau kepulauan atau kawasan pantai)
    c. Industrial policing (pemolisian di kawasan industri)
    d. Disaster policing (pemolisian di kawasan rawan bencana)
    e. Bisa dikembangkan dari model orientasi kegiatan masyarakatnya (community oriented policing) pada masyarakat perkotaan, pertanian, nelayan, perkebunan, buruh, dsb.
2. Model pemolisian yang berbasis pada fungsinya : fungsi utama, fungsional maupun fungsi pendukung sbb:
    a. Road safety policing ( pemolisian berbasis pada road safety atau lalu lintas
    b. Paramilitary policing, model pemolisian ala paramiliter
    c. Cyber policing, pemolisian dalam memberikan pelayanan secara virtual
    d. International policing, pemolisian internasional seperti : pasukan misi perdamaian PBB, laision officer, hubungan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan, studi banding dan pertukaran kemampuan polisi, dsb
    e. Emergency policing, model pemolisian menghadapi situasi kegawatdaruratan, dsb.

3. Model Pemolisian yang berbasis dampak masalah :

   a. Democratic policing
   b. Electronic policing, pemolisian secara elektronik yang merupakan model pemolisian di era digital atau era revolusi industri 4.0
   c. Forensic policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru, dsb.

Memahami democratic policing dari model di atas adalah secara holistik atau sistemik yang tidak dipahami secara parsial.

Polisi dalam pemolisiannya dalam bertindak tegas sekalipun spiritnya tetap untuk: 1. melindungi, 2. mengayomi dan 3. melayani agar ada keteraturan sosial. Hal ini menunjukan bahwa manusia adalah aset utama bangsa maka di situlah hakekat pemolisian untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Democratic policing, polisi dalam menegakan hukum untuk:

1. Menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab
2. Mencegah agar konflik meluas atau semakin besar
3. Melindungi mengayomi melayani korban dan pencari keadilan
4. Membangun budaya tertib
5. Adanya kepastian
6. Edukasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas polisi dengan pemolisiannya bukan semata mata pada pengungkapan perkara namun juga dilihat dari keteraturan sosial dan tingkat kepercayaan publik serta kualitas pelayanannya. Polisi dalam pelayanannya kepada publik merupakan ikon atau simbol : kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial. Polisi dalam pemolisiannya dilihat dari tingkat: profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya dan modernitasnya.

# BHABINKAMTIBMAS IKON POLMAS [28]

Bhabinkamtibmas menjadi petugas Polisi yang terdepan dan terdekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana Wilayah tugas Bhabinkamtibmas memang tidak luas, hanya tingkat kelurahan atau sebatas komuniti. Pada kawasan itulah diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat berkomunikasi dari hati ke hati, saling mengenal satu sama lainnya.

Selain itu, Keberadaan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat diterima oleh warga komuniti yang dilayaninya. Disamping itu juga diakui keberadaannya dan menjadi bagian dari warga komuniti tersebut. Para Bhabinkamtibmas ini memiliki tugas berat sehingga kepercayaan warga masyarakat menjadi kekuatannya. Oleh karena itu, Polmas merupakan implementasi community policing dalam penyelenggaraan tugas Polri. Prinsip mendasar Polmas antara lain :

1. Membangun kemitraan antara Polisi dengan masyarakat.
2. Proaktif dan problem solving.
3. Lebih mengutamakan pencegahan.
4. Keberadaannya mampu mengurangi rasa ketakutan warga masyarkat akan adanya gangguan kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.
5. Mampu menjembatani dalam berbagai penanganan masalah Kamtibmas.
6. Mengedepankan patroli, sambang atau kunjungan ke warga masyarakat yang dilayaninya.
7. Melakukan pemetaan wilayah, pemetaan masalah dan pemetaan potensi.
8. Melakukan inputing data dan informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas.
9. Melakukan dialog dengan warga secara langsung maupun dengan media.

28 https://polisiindonesia.id/2024/03/01/cdl-bhabinkamtibmas-ikon-polmas/

10. Siap membantu masyarakat dalam menghadapi masalah ataupun masalah yamg bersifat emerjensi.

Para petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya dengan jiwa penolong, yang cepat, dekat dan bersahabat. Bereaksi dengan tulus dan bertindak dengan cepat.

Dekat menunjukan jarak yang hanya tiga digit antara Polisi dengan masyarakat, misalnya Call Centre 110. Petugas Bhabinkamtibmas menjadi sahabat warga komuniti yang dilayaninya.

Dialog menjadi bagian dasar para petugas Bhabinkamtibmas. Dalam membangun Bhabinkamtibmas sebagai ikon Polmas setidaknya mencakup:

1. Kekuatan dan fungsinya dapat menjadi simbol keamanan dan rasa aman warga masyarakat yang dilayaninya.
2. Menjadi terdepan sebagai pilar, citra dan kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara Kamtibmas.
3. Keberadaannya aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Menjadi simbol kedekatan, kecepatan dan persahabatan dengan warga masyarakat yang dilayaninya.
5. Sistem Electronic Policing, menjadi Penguatan Kinerja Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat.
6. Mengedepankan dialog, kemitraan secara proaktif dan pemecahan masalah.
7. Membangun kemitraan, mencari akar Masalah Kamtibmas dan Menemukan Solusi yang diterima serta di dukung semua pihak.
8. Lini terdepan dalam membangun dan memelihara keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya.
9. Pejuang Kemanusiaan bagi semakin manusiawinya manusia.
10. Memegang teguh Keutamaannya pada Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

# RUKUN : MEMBANGUN SOLIDARITAS DAN KETERATURAN SOSIAL [29]

Persahabatan bagi kemanusiaan merupakan bentuk solidaritas sosial. Dalam kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial sering kali dicabik-cabik adanya konflik sosial, pertikaian bersenjata hingga peperangan dengan berbagai dalih atau atas nama apa saja semua merusak sendi-sendi kemanusiaan. Martabat manusia menjadi terkoyak bahkan dicampakkan dan terus dikorbankan atau yang menjadi korban kepentingan segelintir orang atau sekelompok orang.

Anak-anak, kaum perempuan, kaum lanjut usia paling rentan menjadi korban. Mereka harus terpisah dari keluarganya, cacat, menderita kemiskinan, berpenyakit hingga kematian akan dihadapi dan menjadi pemandangan di mana-mana.

Kerukunan persahabatan solidaritas sosial menjadi kekuatan bagi manusia dan kemanusiaan. Manusia untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktifitas. Konflik sosial dan berbagai hal yang tidak rukun berdampak pada sesuatu yang kontraproduktif.

Pepatah jawa mengatakan : "rukun agawe santosa crah agawe bubrah". rukun akan menjadikan sejahtera dan konflik berdampak pada kehancuran. Koteks rukun ini juga dapat dikaitkan dalam kesatuan dan persatuan yang merupakan soft power bagi pembangunan masyarakat bangsa dan negara.

Manusia sebagai mahkluk sosial membutuhkan kawanan atau kelompok yang dapat menerima, melindungi, membelanya atau

29 https://radarikn.id/nasional/read/7472/Rukun-Membangun-Solidaritas-dan-Keteraturan-Sosial.html
https://www.merdekanews.co/read/27532/Rukun-Membangun-Solidaritas-dan-Keteraturan-Sosial
https://transindonesia.co/2024/03/03/rukun-membangun-solidaritas-dan-keteraturan-sosial-cdl/

sebagai tempat untuk hidup. Dalam kehidupan sosial ada keteraturan sosial yang dibangun melalui kesepakatan-kesepakantan. Di balik kesepakatan tersebut ada kewajiban, tanggungjawab, ada sanksi bila melanggar.

Dalam kehidupan sosial tatanan bagi keteraturan sosial ada rekayasa sosial yang merefleksikan karakter mereka. Semakin kompleks maka akan semakin ketat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan menjadi hukum.

Hukum dapat dikatakan sebagai produk politik untuk mewujudkan, merawat keteraturan sosial sehingga dapat mendukung untuk tercapainya tujuan bersamanya. Di dalam hukum ada sistem penegakannya, akuntabilitasnya. Di situlah hukum menjadi refleksi atas suatu peradaban. Tingkat kepatuhan hukum bagi masyarakatnya menjadi bagian dari budaya bangsa. Kualitas penegak hukum dalam menegakan hukum menjadi refleksi hidupnya hukum dan menjadi kekuatan pilar kedaulatan suatu negara.

Keutamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kesadaran untuk patuh hukum menunjukan tanggung jawabnya. Hal tersebut terwujud dalam disiplin di kehidupan sehari-harinya. Kesadaran menjadi pilar membangun keutamaan. Tatkala dipenuhi kepentingan yang berseberangan dengan aturan atau hukum yang telah disepakati maka akan terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan karena ada sumber daya yang diperebutkan.

Perebutan sumber daya dalam masyarakat yang beradab ada keteraturan sosial ada keadilan, ada kekuatan untuk menjaga dan memberi sanksi atas ketidak adilan itu. Para penegak hukum adalah pihak ke tiga yang dipercaya dalam menjalankan tugasnya dengan atau tanpa upaya paksa. Penegak hukum adalah ikon dari : penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.

Hukum mengatur segala sesuatu yang menjadi prinsip-prinsip mendasar dan berlaku umum. Secara pragmatis banyak peluang atau

celah-celah untuk disalahgunakan, atau berlindung atas pemyimpangan yang dilakukan.

Hukum ditegakan untuk : 1. Menyelesaikan konflik secara beradab, 2. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas, 3. Melindungi, mengayomi dan melayani korban dan para pencari keadilan, 4. Membangun budaya tertib, 5. Adanya kepastian, 6. Edukasi.

Hukum dan penegakannya berkaitan dengan power and authority namun di sini keutamaan menjadi kekuatanya agar mampu tebang habis, agar tetap tajam dan tidak tumpul. Walaupun dalam penegakannya penegak hukum juga penegak keadilan.

Dengan landasan kemanusiaan, keadilan, kepentingan yang lebih luas dan edukasi. Akuntabilitasnya dapat ditunjukan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial. Karena hukum bagi meningkatnya kualitas hidup dan semakin manusiawinya manusia.

**Media sosial : arena jati diri sampai dengan laboratorium sosial**

Media sosial di era digital sekarang ini begitu marak, mampu menggusur ketenaran media-media konvensional. Media sosial menjadi ruang yang terbuka atau menjadi arena apa saja untuk menjadi wadah berbagai kepentingan. Media sosial dapat menjadi :

1. Media informasi
2. Media komunikasi
3. Media sosialisasi
4. Media edukasi
5. Media kepentingan politik
6. Media untuk labeling
7. Media bisnis
8. Media penggalangan solidaritas
9. Media penghakiman sosial
10. Media membangun jejaring sosial
11. Media laboratorium sosial

Dan masih banyak fungsi media sosial lainnya.

Media sosial di era post truth banyak juga dampak negatifnya untuk mempengaruhi persepsi dan interpretasi publik. Di era post truth banyak kebenaran dikalahkan oleh pembenaran. Berbagai hal dapat dikemas dalam kebohongan atau dikemas sedemikian rupa dan diviralkan terus menerus sampai yang membuatpun merasa itu sebagai kebenaran.

Warga net sekarang ini lebih rame lebih panas suasana dan komunikasinya tatkala hanyut dalam bernagai provokasi media sosial. Buzer bermunculan bahkan menjadi pasukan bayaran untuk saling serang dan menjatuhkan. Konflik antar buzer ini menjadi arena baru yang dengan kata-kata kasar bahkan ucapan yang tidak selayaknya di sampaikanpun bisa keluar.

Netizen Indonesia dinilai oleh beberapa pengamat media sosial sebagai netizen yang paling buruk dalam komunikasinya. Tiada lagi tata krama sopan santun. Walaupun ada UUITE dan banyak yang sudah ditindak tegas dengan sanksi hukum yang cukup berat, namun tetap saja banyak yang terus saja mengeluarkan kata-kata kasarnya. Seakan-akan senang dan bangga memamerkan kedunguannya. Sebentar-sebentar marah menghujat dan sama sekali jauh dari budaya timur khususnya budaya bangsa yang beradab.

Media sosial merajai sistem informasi dan komunikasi dari perorangan sampai berkelompok mereka memiliki suatu tatanan baru. Semua serba on line dari iklan sampai penjualan. Dalam kegiatan para netizen akan dapat dipetakan atau dipolakan dalam berbagai algoritma.

Sistem kajian media sosial semakin berkembang, semakin menjadi salah satu pilihan komunkikasi informasi dengan berbagai strategi untuk kepentingan pengeksploitasian sumber daya.

Pemetaan dari berbagai kepentiangan tersebut antara lain memanfaatkan :

1. Primordialisme sebagai alat pemersatu.
2. Menggunakan hobby
3. Profesi sebagai jembatan komunikasi dan solidaritas

4. Membuka pasar virtual
5. Mencari viewer dan follower
6. Mencari pendapat publik melalui survey
7. Memberikan hiburan

Fungsionalisasi media sosial begitu luas tentu akan berdampak pada perilaku netizen dengan peradaban barunya. Berbagai informasi komunikasi dapat di jembatani secara cepat yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Dampak luas media sosial ini jangan dianggap remeh mampu merontokkan berbagai kepentingan yang sudah lama eksisting

Intelejen media akan menjadi bagian penting untuk menata atau menjaga keteraturan sosial pada warga net. Prinsip kinerja intelejen dari : pemgumpulan data, analisa, produk dan networking ini dapat dilakukan dengan memberdayakan media sosial sebagai bagian dari laboratorium sosial.

Dalam kehidupan masyarakat boleh dikatakan ada juga dalam media sosial. Dari pemetaan pembuatan pola-polanya dan pengumpulan data maka akan dapat dihubung-hubungkan. Dapat dianalisa untuk menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya.

Algoritma tadi dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi mengantisipasi dan memberi solusi. Intelejen media akan membantu menjembatani untuk terus berkembangnya fungsi media sosial secara positif dan mencerdaskan para warga net untuk tidak hanyut dalam berita hoax. Selain itu juga bagi penegakkan hukum kepada warga net yang dengan sengaja memperkeruh atau mengganggu keteraturan sosial.

Hidup dan kehidupan manusia memerlukan adanya penyelaras atau harmoni dalam kehidupannya. Penyelaras atau harmoni merupakan suatu jalan tengah atau jembatan untuk rukun sehingga mampu berkomunikasi atau mencari solusi untuk mereduksi maupun menyelesaikan suatu konflik sosial. Atau setidaknya sebagai pelepasan kepenatan atau mencegah terjadinya penyimpangan atas kesepakatan

yang telah dibuat. Rukun menjadi salah satu solusi atas penyimpangan sosial yang kontraproduktif. Selain itu juga mampu mencegah atau menyelesaikannya dalam tataran kemanusiaan atau peradaban.

# SMART POLICING DALAM SITUASI GAWAT DARURAT [30]

Disrupsi selain cepat juga berdampak pada berbagai produktifitas dalam kehidupan juga pada keteraturan sosial. Tatkala pengendalian atau penanganan atas disrupsi tidak mampu mengimbangi atau tertinggal maka berbagai hal yang kontra produktif dan terganggunya keteraturan sosial akan bermunculan. Tatkala bermunculan isu di era digital akan ada serangan yang berdampak gawat darurat atau emerjensi misalnya situasi menjadi "no electric dan no internet" tentu akan banyak masalah keteraturan sosial, yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sinilah perlu ada pemikiran bagaimana polisi dan pemolisiannya mampu menangani atau mengatasi disrupsi dengan berbagai dampaknya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, secara proaktif dan problem solving.

Pada era digital atau revolusi industri 4.0 tata kehidupan sosial banyak bergantung dari listrik maupun internet dan sistem sistem aplikasi on line yang berbasis elektronik. Tatkala kenormalan baru serangan forensik muncul dalam berbagai hal yang berdampak chaos. Polisi dalam pemolisiannya tetap dituntut untuk bertugas secara: profesional, cerdas, bermoral dan modern dan fungsional atau smart. Model smart policing merupakan model pemolisian yang mampu model orkestra yang mengharmonikan antara pemolisian konvensional, pemolisian elektronik maupun pemolisian forensik. Smart policing model pemolisian untuk mengatasi berbagai masalah kontra produktif yang konvensional, masalah masalah siber atau virtual di era digital juga masalah masalah forensik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas model smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah

30 https://transindonesia.co/2024/03/05/smart-policing-dalam-situasi-gawat-darurat-2/
https://polisiindonesia.id/2024/03/05/cdl-smart-policing-dalam-situasi-gawat-darurat/

masyarakat. Yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

Smart policing dalam implementasi conventional policing, e policing dan forensic policing secara konseptual ditunjukkan sbb :

1. Conventional policing

   Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas sebagai pelindung pengayom yang dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP ( tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran secara konvensional diperlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya. Penanganan berbagai masalah dengan reaksi cepat, penangan konflik sosial yang melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik sosial, premanisme jalanan (blue collar crime), perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb. Penanganan pelayanan kepolisian yang berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan pengetahuan dan kompetensi conventional policing.

2. Electronic Policing (E policing)

   Pemolisian secara elektronik merupakan pemolisian yang saling terhubung atau on line yang mampu memberikan pelayanan secara virtual dan mampu mendukung pemolisian yang konvensional. Landasan dasar E policing adalah melalui back office ( sebagai operation room atau pusat k3i ( komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi)). Yang di dukung aplication yg berbasis Artificial intellegence ( AI) juga

networking yg berbasis internet of things (IoT). Aplikasi yang berbasis AI mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda, kendaraan, lingkungan hingga aktifititas. Melalui AI dapat dikonstruksi menjadi model untuk ditemukan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma dapat berfungsi sebagai prediksi, antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, any time dan on time. Algoritma dapat menjadi landasan atau acuan indeks atau setidaknya sebagai potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial. Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber (cyber cops) yang mengawaki e policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untuk menghasilkan algoritma. Memahami prinsip prinsip dasar di era digital dan sistem IT dan proses pembangunan big data. Maupun sistem sistem terintegrasi menuju one gate service system. Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian early warning dan problem solving yang prediktive antisipative serta solutive. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management agar pemolisian secara aktual maupun virtual ada suatu sistem yang sejalan saling menguatkan atau saling mendukung. Permasalahan perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakkan, bahkan cyber crime akan terus berkembang sehingga memerlukan polisi siber yang profesional, mampu menganalisa dan menemukan potensi kejahatan. Kejahatan white collar crime tentu dilakukan secara teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya kaum yang memiliki kompetensi. Dengan demikian cyber security menjadi sangat penting dan mendasar.

3. Forensic Policing

Di era disrupsi perkembangan masalah nuklir biologi maupun kimia bahkan fisika (nubika) hal hal sosial dapat menjadi suatu masalah bagi terjaminnya keteraturan sosial. Era post truth dengan senjata hoaxpun dapat digunakan untuk menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas. Forensik policing memerlukan kompetensi dan pengetahuan dasar ttg nubika. Dampak atas

penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika oleh penjahat yang dapat menteror atau mematikan produktivitas secara masaal dan berdampak luas. Kompetensi para petugas forensic policing secara mendasar yang berkaitan dengan konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun masalah masalah sosial yang akan dijadikan senjatanya. Kemampuan forensik didukung dengan sistem peralatan yang dapat didukung petugas polisi siber maupun pemolisian yang konvensional. Pelayanan di bidang forensik berkaitan pada sistem security yang dapat dikembangkan pada pengamanan pada sector : private, industrial, public, ecological maupun cyber.

Smart policing sebagai model pemolisian yang senantiasa siap memberikan pelayanan kepada publik dalam berbagai situasi, juga dalam situasi emerjensi maupun kontijensi sekalipun.

Masa pandemi manusia sebagai mahkluk sosial diputus rantai sosialnya. Sistem online yang berbasis elektronik masih memungkinkan menjembatani. Tatkala listrik dan internet terganggu atau bahkan sampai hilang sama sekali tentu diperlukan era kenormalan baru untuk menjadi solusinya. 10 Point Smart Policing setidaknya mencakup :

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian ( policing )
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving

9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emerjensi maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

dukungan penelitian dan pengembangan serta pembangunan laboratorium menjadi sangat penting dan mendasar.

Penelitian merupakan bagian penting mendukung smart policing secara konseptual maupun teoritikal dengan berbagai pendekatan. Model smart policing dapat dibangun secara konseptual, secara fisik, secara scientific, secara infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya, selain itu juga pada kurikulum dan pengajarannya, agar tetap fungsional dalam kondisi emerjensi sekalipun.

10 Point model smart policing untuk menangani masalah emergency ( Emergency Policing)

1. Model Pemolisian Transplantasi sebagai penjaga, pengamat, jembatan penghubung, pelatih, back up system dsb, hingga yang diback up dapat berfungsi kembali.
2. Pola-pola pemolisian secara managerial setidaknya mencakup: 4 unsur:
    a. Kepemimpinan,
    b. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarana, prasarana dan anggaran),
    c. Operasional,
    d. Capacity building.
3. Implementasinya dapat mengacu pada community policing/ polmas
4. Di back up dengan sistem-sistem online yang berbasis elektronik
5. Personilnya bersifat ad hoc merupakan gabungan dari berbagai fungsi maupun antar wilayah

6. Perkantoran dengan membangun tenda-tenda lapangan, kontainer atau memanfaatkan tempat-tempat/ lokasi yang biasa diberdayagunakan.
7. Membangun posko-posko sebagai pusat K3i yang berisi peta-peta dan jaringan-jaringan elektronik maupun kontak- kontak person. Dapat dibuat pengkategorian : Merah : Rawan dua, Kuning : Rawan satu, hijau : kondisi normal. Model pergeseran pasukan untuk back up kontijensi dengan peta rute dari dan ke lokasi sasaran dengan berbagai alternatifnya serta pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Kesiapan Logistik, transportasi darat, laut maupun udara, ambulans, untuk evakuasi dan bantuan kemanusiaan.
9. Rumah sakit lapangan dan perlengkapan, obat obatan dan tenaga medisnya.
10. Operasionalnya dapat menerapkan model Asta Siap. Siap : Posko, Piranti Lunak, model penanganan lapangan, siap mitra, jejaring, personil, logistik, anggaran.

# LEADER BRANDING: REKAM JEJAK DAN PRESTASI [31]

Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri dimulai dari "company profile" yang menjabarkan Apa keunggulannya, bagaimana proses pembelajarannya dan menjawab mengapa Sespim Lemdiklat Polri itu penting bagi Pemimpin di masa depan.

Selain itu juga guna melatih membranding menjadi siapa dan apa karya karyanya :

Melatih para serdik unjuk prestasi dan dapat menjadi ikon dalam keutamaan Polri.

Apa yang dicita citakan dan menjadi tujuan lembaga pendidikan Sespim Lemdiklat Polri didukung adanya "Literasi kepemimpinan".

Materi pelajaran dengan konteks dan kontens yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengetahuan membangun karakter pemimpin di masa depan dengan adanya : Quotes, Referensi pendukung, E jurnal, E book,E library dan sebagainya.

Karena Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengambil kebijakan melainkan juga mengkomunikasikan. Maka dikembangkan program : "Leadership dialog" Podcast tentang pemimpin dan kepemimpinannya.

Kemampuan seorang pemimpin ada pada saat menghadapi situasi emergency maupun contigency sehingga policing / pemolisian yang diajarkan atau dilatih dalam bernagai model emergency maupun contigency policing:

Pola pola pemolisian dalam berbagai situasi dan kondisi krisis, pengambilan keputusan pemimpin untuk mengatasi dan mengembalikan keteraturan sosial yang rusak.

31 https://radarikn.id/nasional/read/7496/Leader-Branding-Rekam-Jejak-dan-Prestasi.html
https://www.merdekanews.co/read/27604/Leader-Branding-Rekam-Jejak-dan-Prestasi
https://polisiindonesia.id/2024/03/06/cdl-leader-branding-rekam-jejak-dan-prestasi/

Pemimpin di masa depan wajib memahami "Masdarwis" masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Dalam membangun keutamaannya bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

" Cooling System " menjadi salah satu hal yang dapat dibangun melalui : Seni budaya dan pariwisata bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Para pemimpin tidak sebatas linier dan terjebak dalam zona nyaman maka kreatifitas dan inovasi :

Hal hal baru dan kebaruan menjadi suatu standar bagi kualitas maupun tingkat keberhasilannya.

Karena itu, Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri tidak sebatas memahami konsep dan teori melainkan juga "Studi kasus" :

Belajar dari berbagai kejadian atau isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat, mencari akar masalah dan solusinya sebagai upaya penanganannya baik pra, saat maupun pasca kejadian.

Sespim Lemdiklat Polri melakukan "Bench marking". Studi banding dalam dan luar negeri. Bench mark luar negeri berdialog dari pendekatan bagaimana :

1. Polisi dalam pemolisiannya melaksanakan keutamaannya untuk, kemanusiaan dalam mewujudkan dan memeliharara keteraturan sosial yang merupakan suatu peradaban.
2. Political will yang berkaitan dengan posisi Kepolisian dalam administrasi negara.
3. Sistem kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada publik :
    a. Keamanan.
    b. Keselamatan.
    c. Hukum.
    d. Administrasi.
    e. Informasi.
    f. Kemanusiaan.

4. Keutamaan atau sebagai core value birokrasi dapat dilaksanakan.
5. Networking dan kemitraan dengan berbagai helix / stake holder.
6. Kaderisasi kepemimpinan maupun pembinaan karier.
7. Sistem edukasi dari pembentukan hingga pengembangannya.
8. Membangun ikon dan kebanggaan sebagai esprit de corps yang fair dan sehat sebagai petugas polisi yang menyelenggarakan pemolisian.
9. Police act atau hukum kepolisian dan kode etiknya.
10. Tata kelola lingkungan kerja secara birokratis maupun secara sosial.

Hal konseptual dan pragmatis saling menguatkan untuk kita bisa mengkonstruksi bagi pengembangan kemitraan maupun menjalin kemitraan.

Kegiatan "bench mark dalam negri" dalam dialognya juga merupakan bakti kepada institusi dan kepada masyarakat dalam konteks membangun kualitas kinerja dan profesionalisme TNI, Polri, Kementrian dan Lembaga dalam memberikan pelayanan kepada publik yang berstandar prima.

Apa yang didiskusikan dalam dialog peradabannya mencakup kebijakan dan implementasi :

A. Kerja TNI, Polri, Kementrian dan Lembaga di dalam ranah birokrasi yang mencakup :
    1. Kepemimpinan.
    2. Adminstrasi.
        a. Kepemimpinan
        b. Pokok pokok manajerial : Ren Org Lak Was Dal.
        c. Pembinaan SDM.
        d. Pembinaan Logistik.
        e. Pembinaan Anggaran.
    3. Operasional :
        a. Rutin
        b. Khusus
        c. Kontijensi

4. Capacity building

   Inovasi dan kreatifitas :

B. Kinerja TNI, Polri, Kementrian dan Lembaga di Ranah Masyarakat.

1. Kemitraan.
2. Pelayanan publik.

   Di lihat pda sentra sentra pelayanan publik dijabarkan konteks :

   a. Pelayanan keamanan.
   b. Pelayanan keselamatan.
   c. Pelayanan hukum.
   d. Pelayanan administrasi.
   e. Pelayanan informasi.
   f. Pelayanan kemanusiaan.
3. Pemecahan masalah dan pencegahan.
4. Networking atau membangun jejaring.

Pekerjaan di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat dapat dilihat bagaimana :

1. Konteks kebijakannya.
2. Core value dan budaya organisasi.
3. Kualitas kinerja.
4. Kualitas tingkat kepercayaan publik.
5. Konteks keamanan dan rasa aman dikaitkan isu isu penting dalam masyarakat dengan pendekatan gatra yang ada. Bisa dikembangkan dengan konteks lainnya yang relevan.

Pemimpin itu juga guru yang dapat dikembangkan dalam "Leadership coaching"

Dialog Sespim Lemdiklar Polri secara aktual maupun virtual bagi Indonesia majumelalui tema antara lain :

a. Sispam kota.
b. Perbatasan.
c. Konflik sosial.

d. Bhabinkamtibmas.
e. Model model pemolisian.
f. Pemimpin dan kepemimpinannya.
g . Pengamanan pemilu serentak.
h. Penanganan bencana.
i. Modernisasi Polri.
j. Social engineering dan Sebagainya.

Di era digital kemampuan membangun keamanan dan rasa aman para pemimpin juga wajib memahami ” Smart City” sebagai modelnya.Smart City dalam konteks model pemolisian setidaknya mencakup :

1. Adanya Back office, Application yang berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things, yang dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma maupun indexs safety maupun indexs security.
2. Dapat menjadi Pusat K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengenadalian serta Informasi).
3. Dalam pendekatan safety, membangun model ” IT for Road Safety” yang mencakup :
    a. TMC ( Traffic Management Centre ) untuk mendukung Road Safety Management.
    b. SSC ( Safety and Security Centre ) untuk mendukung Safer Road.
    c. ERI ( Electronic Registration and Identification ) untuk mendukung Safer Vehicle.
    d. SDC ( Safety Driving Centre ) untuk mendukung Safer People.
    e. INTAN ( Intellegent Traffic Analysis ) untuk mendukung Post Crash.
4. Dalam pendekatan security membangun “Harmoni” : pemeliharaan komunitas ( berbasis wilayah, fungsional maupun dampak masalah ) yang modern dan manusiawi yang diimplementasikan melalui Smart Management dan Smart Operation.
5. Diawaki petugas polisi siber ( cyber cops ).

6. Didukung Management Media maupun intellegent media.
7. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas maupun komunitas terutama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya.
8. Algoritma Road safety maupun Harmoni yang mampu memberikan prediksi antisipasi dan solusi yang dapat diakses on time dan real time serta any time dalam bentuk : infografis, info statistik, info virtual lainnya.
9. Mendukung Sistem Pengamanan Kota ( Sispam Kota ) melalui smart policing : conventional policing, electronic policing maupun forensic policing.
10. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakan ( pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan ).

Yang perlu ditekankan kembali bagi para pemimpin adalah mampu memahami dan membangun cooling system dalam kebijakan kebijannya melalui media dan mengembangkan Art Policing. Pemimpin dalam kebijakannya adalah bijaksana bagi :" Kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban" yang merupakan keutamaannya dalam konteks keIndonesiaan maka:" Seni budaya dan pariwisata merupakam pilarnya". Di dalam masyarakat konflik dan berbagai hal yang kontra produktif akan merusak menghambat bahkan mematikan produktifitas. Kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban rusak akibat terjadinya berbagai hal yang kontra produktif antara lain :

1. Propaganda yang menyesatkan dan mengadu domba yang dibumbui ujaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan primordialisme.
2. Pemberitaan dan informasi hoaks.
3. Pembenaran yang mengalahkan kebenaran dengan pemutarbalikan fakta.
4. Black campaign.
5. Premanisme di berbagai bidang dan Sebagainya.

Banyak hal lain yang dilakukan untuk pembodohan dan mengobok obok opini publik yang berujung konflik sosial dan chaos. Di dalam "Art policing" atau pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata membangun cooling system untuk menyadarkan, memberdayakan dan mengcounter atas hal hal yang kontra produktif di atas dengan daya nalar / logika yang waras agar kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban tetap terjaga.

Art policing untuk adanya cooling system dapat dilakukan melalui media untuk :

1. Menyadarkan.
2. Menginspirasi.
3. Memotivasi.
4. Memberi solusi.
5. Mencounter issue hoaks.
6. Menghibur.

Management media menjadi jembatan hati yang merupakan dialog peradaban dalam implementasi art policing antara lain :

1. Membangun portal atau web site atau bekerja sama dengan media main stream atau dengan apa saja yang dapat menjadi rujukan atas kebenaran atau sesuai fakta dalam pemberitaan.
2. Memberdayakan media sosial dengan berbagai informasi yang mencerdaskan dan menyadarkan agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan tindakan yang kontra produktif.

Di Sespim Lemdiklat Polri untuk pembelajaran dalam konteks cooling system pembelajaran on campus dan off campus melalui " Leader Branding " dengan :

1. Model pod cast
   a. Peserta didik menampilkan keutamaan sebagai polisi.
   b. Menceritakan pengalaman dan keahliannya dalam sharing pengetahuan.
   c. Mendiskusikan pelajaran pelajaran di Sespim secara proaktif dan problem solving.

d. Mendiskusikan isue isue penting yang terjadi dalam masyarakat.

2. Model coaching
   a. Dialog dengan para petugas di lapangan secara daring sd lini terdepan di wilayah masing masing peserta didik sebelum masuk Sespim.
   b. Menyampaikan hal hal yang informatif edukatif serta inputing data dan ada dialog untuk solusinya.
3. Model forum diskusi dan informasi
   a. Forum Bhabinkamtibmas
   b. Forum Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata
   c. Forum Ikatan Sakura Indonesia
   d. Forum Hukum dan Keadilan
   e. Forum Ilmu Kepolisian
   f. Forum Safety and Security Dan Sebagainya.
4. Model membranding
   a. Kampung tertib, kampung tangguh Dan Sebagainya.
   b. Local heroes.
   c. Lomba dan pemberian penghargaan.
   d. Kampung Iklim.
   e. Desa Wisata Dan Sebagainya.
5. Model expo atau pameran , FGD dan seminar.
   a. Leaders Expo
   b. FGD, Seminar tentang kebhinekaan, toleransi, narkoba, korupsi Dan Sebagainya.
   c. Pameran dan festival seni budaya.
6. Model Kemitraan
   a. PKB Juang.
   b. Kampus Kebangsaan.
   c. Kemitraan dengan para stake holders untuk membangun soft power dan smart power.

d. Bakti masyarakat dan Sebagainya.

7. Model debat publik

   Mengemas model dialog peradaban untuk menunjukan kebaruan dan pembaharuan hasil pemikiran para peserta didik.

Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri merupakan suatu dialog peradaban untuk menyiapkan pemimpin di masa depan yang profesional cerdas bermoral dan modern.

Program Leader Branding dinamis danbterus ditumbuhkembangkan dengan membuat produk tertulis maupun virtual yang berkaitan dengan :

1. Company profile Sespim :

   Apa bagaimana mengapa sespim.

2. Siapa dan apa karyanya:

   Menampilkan para serdik yang berprestasi.

3. Literasi kepemimpinan:

   Materi pelajaran

   Kontens yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengetahuan

   Quotes

   Referensi

   E jurnal

   E book

   E library.

4. Leadership dialog:

   Podcast tentang kepemimpinan.

5. Emergency policing dan Contigency policing:

   Pola pola pemolisian dalam berbagai situasi dan kondisi serta pengambilan keputusannya.

6. Masdarwis dan cooling system:

   Seni budaya dan pariwisata bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

7. Kreatifitas dan inovasi:

   Hal hal baru dan kebaruan.

8. Studi kasus :

   Belajar dari berbagai kejadian atau isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.

9. Bench marking:

   Studi banding dalam dan luar negeri.

10. Leadership coaching:

    Dialog Sespim bagi Indonesia.

    a. Sispam kota
    b. Perbatasan
    c. Konflik sosial
    d. Bhabinkamtibmas
    e. Model model pemolisian
    f. Pemimpin dan kepemimpinannya
    g. Pengamanan pemilu serentak
    h. Penanganan bencana
    i. Modernisasi Polri
    j. Social engineering Dan Sebagainya.

Produk produk tersebut menjadi salah satu akuntabilitas proses belajar mengajar dan mengimplementasikan keutamaan dalam pemolisian di lembaga pendidikan.

# KEUTAMAAN DAN KEMULIAAN PETUGAS POLISI [32]

Keutamaan bagi petugas Polisi dapat ditunjukan tatkala pemolisiannya merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dapat diimplementasikan dan berfungsi secara optimal pada : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Keutamaan akan menjadi kemuliaan tatkala dapat menjadi acuan moralitas. Demikian halnya bagi petugas Polisi tatkala mampu mengimplementasikan kemuliaannya maka akan dapat mengendalikan antara yang baik dan benar dengan yang buruk dan salah.

Dengan demikian tetap mampu untuk berjalan sesuai aturan yang sebagaimana seharusnya. Dalam pikiran dan jiwanya tertanam kesadaran tanggung jawab dan disiplin.

Pengendalian inilah menjadi suatu tanda atas keutamaan dan kemuliaan bagi petugas Polisi tentu saja diharapkan mampu menjadi ikon : pelindung pelayan dan pengayom masyarakat serta penegaj hukum dan keadilan yang bijaksana.

Keutamaan dalam konteks kemuliaan bagi petugas Kepolisian sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat serta penegak hukum serta keadilan dapat berfungsi pada kemanusiaan, keteraturan sosial yang optimal dapat dikatakan sebagai membangun peradaban.

Secara pragmatis hasil kerja Polisi melalui pemolisiannya dapat ditunjukan dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Dengan adanya jaminan keamanan dan rasa aman dan meningkatnya kualitas hidup dalam masyarakat berarti polisi tidak memeras, tidak menerima suap, tidak memutar balikan fakta, tidak bermain main dengan hal ilegal serta tidak melakukan tindakan yangbkontra produktif.

32 https://polisiindonesia.id/2024/03/08/cdl-keutamaan-dan-kemuliaan-petugas-polisi/

Dengan demikian masyarakat dapat menjalankan aktivitas yang menghasilkan produktifitas yang digunakan untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang.

Pada sistem pendidikan kepolisian penanam keutamaan adalah mendidik dan melatih bagi para petugas Polisi agar memiliki keberanian dan kemampuan mengatasi berbagai masalah dan persoalan dalam menuju kebaikan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, terus bekerja keras penuh semangat untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Nilai-nilai kemanusiaan ditanamkan sebagai penolong kaum yang rentan dan lemah. Pikiran perkataan dan perbuatan bagi kemaslahatan banyak orang. Keutamaan bagi petugas polisi dapat dijabarkan dari :

1. Integritas,
2. Komitmen,
3. Kompetensi dan
4. Keunggulan.

Membangun keutamaan sebagai Polisi yang : profesional, cerdas, bermoral dan modern yang humanis dapat dilakukan dimulai dari : pemimpin dan kepemimpinannya, sistem pembinaan sumber daya manusia, proses rekrutmen dan pendidikkan baik dasar maupun lanjutan.

Kesadaran dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu pada sistem pendidikan penanaman kesadaran ini merupakan hal utama yang dibangun sebagai strata tertinggi dari moralitas kemanusiaan dalam kehidupan bersama sebagainya mahkluk sosial.

Hidup bersama di tingkat keluarga, komunitas, institusi, masyarakat, bangsa, dan negara memerlukan kesepakatan yang mampu menata kehidupan sosial yang sesuai dengan konteksnya.

Sebagai petugas polisi selain sebagai pelindung pengayom adalah juga sebagai penegak hukum.

Bagi petugas Polisi disiplin dan taat pada aturan (kode etik kepolisian) yang dilakukan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab merupakan bentuk penghormatan tertinggi akan nilai-nilai kemanusiaan.

Kerelaan untuk mentaati adalah suatu pengorbanan atas kepentingannya dan merupakan empati bahkan sebagainya wujud solidaritas sosial. Kesadaran dan tanggung jawab ini merupakan buah dari pendidikan.

Segala sesuatu ada karena dimengerti (filsuf Berkley). Adanya kesadaran dan tanggung jawab karena mempunyai pengertian atau karena dipahami.

Bagaimana bisa memahami? Dari pendidikan. Pendidikan seperti apa? Pendidikan yang mampu memberikan transformasi, bukan yang sifatnya menghafal. dipelajarinya karena.

Model pembelajaran seperti ini bukan pembelajaran yang transformatif. Pembelajaran yang tidak transformatif menimbulkan keterpaksaan dan ketakutan adanya tekanan. Akibatnya, yang belajar pun dipenuhi oleh kemunafikan, kepura-puraan, dan kepalsuan sehingga yang dilakukan bisa bertentangan dengan hati nuraninya.

Apabila ini yang terjadi, cepat atau lambat, akar-akar penunjang kehidupan sosial akan putus dan perlahan-lahan roboh.

Pertanyaanya, “Bagaimana membangun kesadaran dan tanggung jawab?” Membangun kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin bagi petugas polisi dilakukan dalam proses pendidikan yang ketat namun humanis :

1. Dimulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari hari : di asrama pengecekan, setelah bagun pagi, kegiatan olah raga pagi, makan pagi, mengikuti perkuliahan dan pelatihan, makan siang, kegiatan pengasuhan sore hari, makan malam, belajar apel malam sd jam istirahat malam semua diatur secara ketat.

2. Pola pendidikan mentorship pengasuhan oleh wali kelas dan asisten yang secara terus menerus mendampingi para siswa.
3. Pendidikan sepanjang hayat yang saling asah asih dan asuh walaupun sdh berdinas.
4. Pengajaran tentang kompetensi kepolisian yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.
5. Beladiri kendo dan judo sebagai penanaman kejujuran kebenarian ketangguhan dan rasa percaya diri.
6. Latihan teknis kepolisian dasar di lapangan.
7. Latihan menembak untuk melindungi masyarakat maupun diri sendiri.
8. Acara tradisi yang menyentuh hati dan penanaman pesan moral yang memginspirasi.
    - Penyerahan kartu anggota
    - Penyerahan peluru
    - Pesan mengingatkan jangan melakukan kesalahan resikonya mati atau masuk bui.

      Rasa asih asah dan asuh ini menjadi bekal hidup kecintaan dan kebangaan atas pilihan menjadi Polisi.
    - Upacara penghormatan atau pemberian penghargaan hingga perpisahan dan sebagainya.

Keutamaan bagi petugas Polisi yang humanis akan membuat para petugas Polisi : peka peduli dan berani berbela rasa akan kemanusiaan merupakan produk dari kecintaan, perhatian, empati, pemberian kepercayaan, dan keteladanan. Nilai humanisme ditransformasikan sehingga para siswa calon polisi tersentuh dan terinspirasi akan hal-hal yang hakiki dalam hati nurani manusia sehingga kesadaran merupakan respon dari apa yang diperolehnya.

Sealain itu, yang tak kalah penting adalah infrastruktur pendukung yang memberikan ruang gerak bagi tumbuh dan berkembangnya suatu

kesadaran dan tanggung jawab. Infrastruktur pendukung pemdidikkan yang memenuhi standar kemanusiaan akan berdampak pada sikap perilaku humanis yang menjadi habitus bagi para siswa.

Selain itu pemberian sanksi tegas bagi para pelanggar juga merupakan bentuk pendisiplinan dan penanaman rasa yanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan.

Edukasi, infrastruktur, penegakkan hukum merupakan satu kesatuan yang secara simultan dibangun bersama untuk saling mendukung dan melengkapi.

Ketiganya merupakan sistem.yang mempunyai standarisasi baik untuk masukan, proses, maupun keluarannya.

Kesadaran dan tanggung jawab merupakan dampak atau produk dari edukasi dan pembangunan infrastruktur penegakkan hukum yang transformatif sekaligus merupakan produk kinerja para penyelenggara kehidupan sosial dari tingkat keluarga hingga negara yang mampu menunjukan adanya :

(1) Kebijaksanaan.

(2) Empati.

(3) Kecintaan

(4) Ketulusan.

(5) Pengorbanan.

(6) Keteladanan.

(7) Kecerdasan.

(8) Wawasan yang luas.

(9) Empowering.

(10) Integritas.

(11) Komitmen.

Semua itu merupakan bentuk dari kesadarian dan tanggungjawbnya atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Kemampuan memanusiakan

manusia ini terwujud dari adanya kesadarian dan tanggung jawab yang akan menganggkat harkat dan martabat manusia, citra, dan harga diri.

Keutamaan dan kemuliaan bagi petugas Polisi merupakan hal penting dan mendasar untuk mendorong bagaimana dirinya mampu menjadi role model/ikon/role model yang menjadi panutan.

Keutamaan petugas Polisi yang humanis setidaknya dapat dikategorikan sebagai betikut :

1. Memiliki kesadaran memperbaiki , siap dimasa kini, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik.
2. Visioner.
3. Mampu membawa dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup.
4. Memahami hal-hal yang utama dalam bidangnya.
5. Memiliki kemampuan membangun sehingga orang mudah melakukan hal-hal yang utama.

Dalam era digital Core value yang menjadi keutamaan bagi petugas Polisi untuk menumbuh kembangan rasa kebanggaan dan kecintaan sebagai petugas Polisi dan Polisi dapat dipercaya dan menjadi ikon akan keamanan, keselamatan dan kemanusiaan.

Spirit kemanusiaan yang kuat akan menjadikan Polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.

Spirit tadi akan menjdi nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran dan harus diperjuangkan untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang di setiap petugas Polisi dan pemolisianyapun menjadi cerminan dari kemanusiaan tersebut.

Pikiran, perkataan dan perbuatan Polisi dalam pemolisianya baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai pribadi. Pelayanan kepolisian adalah pelayanan kemanusiaan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya.

Menjadi petugas Polisi merupakan suatu profesi yang dituntut profesional. Makna profesional bagi petugas Polisi dapat ditunjukkan dari kemampuan Polisi mengembangkan pemolisiannya sehingga ahli yang mengacu pada ilmu kepolisian.

Ilmu kepolisian, mengacu pada pemikiran beilay maupun Profesor Parsudi Suparlan, dinyatakan sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang :

(1) Masalah sosial dan penangannya.

(2) Isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat.

(3) Keteraturan dan penataannya.

(4) Penegakan hukum dan keadilan.

(5) Penyelidikan dan penyidikan kriminalitas dan pencegahanya.

Ilmu Kepolisian, sebagai dasar profesi Kepolisian, bersifat mempelajari apa yang dikerjakan atau yang menjadi pekerjaan polisi. Membahas kepolisian dapat dilihat Polisi sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi.

Ketiga pendekatan Polisi tersebut keutamaannya sama yaitu : Kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Yang terselenggara dalam pemolisian yang proaktif problem solving yang mengedepankan pencegahan kejahatan yang terlaksan dengan berbagai terobosan yang kreatif antara lain :

(1) Kepemimpinan.

(2) Komitmen.

(3) Integritas.

(4) Core value.

(5) Think out of box.

(6) Komunikasi.

(7) Pemberdayaan (empowerment).

(8) Program unggulan.

(9) Konsistensi.

# PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINANNYA [33]

Sebuah cerita klasik dari Borobudur tentang burung berkepala dua bisa kita jadikan analogi untuk melihat pemimpin dan kepemimpinannya.

Dimana Kepala bagian atas selalu memakan buah-buahan dan makanan-makanan yang segar, enak, dan manis.

Sedangkan Kepala yang satunya (kepala bawah) hanya mendapat makanan sisa-sisa dari apa yang dimakan oleh kepala atas.

Suatu ketika kepala bawah protes kepada kepala atas, agar sesekali diberinya makanan yang enak seperti yang dimakannya.

Tak disangka kepala atas mengatakan: "Wahai kepala bawah, terimalah dan syukurilah apa yang kau nikmati.

Kita toh satu tembolok. Jadi, makanlah apa yang menjadi makananmu." Mendengar jawaban seperti itu, kepala bawah merasa dilecehkan.

Dalam hati ia berkata: "Kalau begitu aku akan makan sembarangan, toh satu tembolok juga". Pada suatu hari kepala bawah nekat makan jamur beracun. Matilah burung berkepala dua tadi.

Cerita di atas dapat dikaitkan kepada pemimpin dan gaya kepemimpinannya yang kelihatan anggun dan berwibawa. Ia menempatkan posisi pada menara gading dikelilingi kemewahan puja puji dan berbagai kenikmatan duniawi.

Di lain pihak, anak buah yang menjadi bawahannya seakan budak yang dijadikan ganjalan penyangga kemegahannya itu.

33 https://polisiindonesia.id/2024/03/09/cdl-pemimpin-dan-kepemimpinannya/

Ia tak mempedulikan kesedihan dan kesusahan bawahannya. Ia juga tidak mempedulikan kesengsaraan masyarakat luas akibat kebijakan yang diambilnya.

Cepat atau lambat bawahan, anak buah ini bisa saja nekad, melakukan harakiri, melakukan tindakan fatal yang muaranya memang pimpinan tadi akan rontok di singgasananya.

Mereka bisa saja nekad karena pemimpin sudah lupa Pemimpin tidak jarang malahan menyakiti mereka. Anak buah sudah biasa sengsara, tidak usah dimanja nanti malah nglunjak dan repot mengatasinya, demikian pikir sang pemimpin.

Oleh karena itu, seorang Pemimpin di dalam kepemimpinannya semestinya : peka, peduli, berempati, dan berbelarasa tidak mematikan tetapi menyadarkan, membangkitkan, menghidupkan, memberi daya gerak dan daya untuk menjadi dinamis tumbuh dan berkembang.

Dirinya bukan hanya menjadi matahari tetapi justru menjadi bulan, memberi pencerahan dan penerangan di saat kegelapan. Di saat terjadi kesesatan, di saat terjadi kelesuan, di saat terjadi keputusasaan pemimpin tampil sebagai sang penuntun, pembimbing, bintang pedomam, arah, dan tujuan.

Hidupnya siap berkorban dalam membangun dan mencapai sasaran. Tak gentar terhadap hambatan, tantangan, ancaman yang bisa merusak dan mematikan dirinya maupun keluarganya.

Jiwa seorang pemimpin akan melegenda. Pemimpin dikenang bukan dari kekayaannya, kezalimannya, tetapi karena kerendahatiannya, empatinya, rasa senasib sepenanggungan, kerelaan berkorban, kemampuan membawa kemajuan, menempatkan pada tempat sebagaimana yang seharusnya.

Dadi ratu kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane. Ratu iku anane mung winates dadi kawulo tanpo winates.

Pemimpin itu bukan seberapa bernilai dirinya, melainkan seberapa bermanfaat dirinya bagi hidup dan kehidupan serta bagi semakin manusiawinya manusia.

“Saya lebih senang dan bangga berada di tengah-tengah anak buah saya,” demikian yang dikatakan oleh Jenderal Sudirman.

Walau sakit dan harus ditandu, beliau terus memimpin gerilya. Beliau bisa merasakan apa yang menjadi penderitaan dan kesusahan serta kesulitan anak buahnya.

Kehebatan seorang pemimpin bukanlah pada dirinya yang pandai tebar pesona, tetapi ada suatu transformasi menjadi kebaikan dan selalu ada perbaikan.

Mahatma Gandi sebagai pemimpin berani dan mau memberi teladan dengan menenun sendiri pakaiannya. Ia tidak harus dengan berjas dasi.

Martin Luther King Jr, pemimpin pergerakan anti rasialis di Amerika, pun memperjuangkan hak-hak kaumnya dan berempati untuk tidak dengan kekerasan.

Bahkan, ia pun menjadi korban kekerasan yang menghilangkan nyawanya. Demikian pula Mahatma Gandhi.

Lagi-lagi pemimpin memang yang akan memberi warna menjadi bintang pedoman arah dan tujuan.

Menginspirasi, mampu memberdayakan dan mengajak anak buahnya mewujudkan mimpi-mimpinya. Di zaman modern ini pemimpin diituntut untuk berani, cerdas, dan murah hati, bukan dilayani. Dia mau menjembatani dan mau memahami bahkan menjadi role model bagi rekan dan bawahannya.

Ki Hajar Dewantoro tokoh pergerakan nasional pendidikan mengajarkan filosofi kepemimpinan:

1. Ing Ngarso Sung Tulodo.
2. Ing Madyo Mangun Karso.
3. Tut Wuri Handayani.

Pemimpin memang harus memiliki empati dan mau berbagi rezeki dengan cara meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya.

Keunggulan sang pemimpin :

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan.
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kratifitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan.
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu.
5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini.
6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik.
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi.
8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power.
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif.
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan memdapat dukungan secara internal maupun eksternal.

Merubah mindset, memerlukan pemimpin yang kebijakannya bijaksana dan serta siap mendukung maupun menghadapi perubahan.

Pemimpin adalah orang orang yang menjadi ikon atau panutan dan agen agen perubahan juga sebagai motor penggeraknya.

Pemimpin dengan penuh kesadararan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten dan berkesinambungan.

Membangun apa saja termasuk dalam berbagai profesi, passion seorang pemimpin sangat menentukan tingkat keberhasilannya.

Sedangkan passion sendiri bisa dibangun dari kecintaan. Dengan kecintaan akan melampaui batas normatif atau yang semestinya.

Tanpa kecintaan apapun akan seumur jagung. Apalagi menghadapi tantangan hambatan atau berbagai goncangan badai dalam kehidupan.

Dengan adanya kecintaan maka akan ada keberanian untuk tetap bertahan atau bahkan menempuhnya dengan penuh kegigihan dan keyakinan akan menghasilkan sesuatu atau ada solusinya.

Passion bukan karbitan atau hidup di bawah ketiak. Kaum mapan nyaman tidak akan bertahan dan pasti akan layu. Perilakunya tinggal glanggang colong playu.

Tidak ada kebanggaan dan rasa tanggung jawab. Kelasnya memang pecundang tidak akan mampu menjadi pejuang.

Apapun yang dikerjakan sebatas lip service atau lamis manis di bibir dan tentu pamrih tidak ada ketulusan.

Kekuatannya pada pendekatan personal yang tega bahkan sengaja mematikan kompetensi. Ketidaktulusan inilah yang membuat lemah dan lunturnya patriotisme.

Jiwa berkorban atau pengorbanan digantikan materi. Kasih uang habis perkara. Pendekatan materi dengan cara personal akan menjadi pilihan.

Tatkala ini dilakukan terus menerus maka akan ada balas membalas. Kekuasaan akan sentralistik. Model patrimonial yang cenderung otoriter akan meraja dan berpotensi terbangun sistem yang korup.

Kecintaan akan melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok/ golongan. Apa yg dilakukan akan berdasarkan rasa hati dan logika bahkan mampu mengarahkan kepada passion yang patriotik.

Katakan menjadi seniman dengan kecintaannya ia berani mengorbankan hidupnya dalam menegakkan kesenimanannya.

Menjadi militer, menjadi politikus, menjadi Polisi, menjadi guru, menjadi pelaku bisnis dsb semua itu tatkala dilandasi dengan kecintaan maka di dalam bekerja akan menjadikan pekerjaannya sebagai panggilan atau jalan hidup.

Bagaimana menanamkan kecintaan dan kebanggaan? Tatkala kita melihat dalam kehidupan sehari hari di manapun juga maka :

1. Para pemimpin dengan kepemimpinannya mampu menjadi ikon atau simbol keteladanan maupun agen perubahan yang transformatif, senantiasa menginspirasi mencerdaskan dan solutif.
2. Sistem politik mengacu berpegang teguh pada upaya pewujudan amanat konstitusi.
3. Para guru dan lembaga pendidikan menjadi centre of excellent.
4. Sistem pelayanan publik dan ruang publiknya berstandar prima.
5. Sistem edukasi, training dan coaching, mentransformasi dan mencerahkan ssbagai bagian mencerdaskam kehidupan berbangsa.
6. Pembangunan moral bangsa gaya hidup dan nasionalisme menjadi core value anti korupsi.
7. Memodernisasikan menuju pada sistem pelayanan one gate service system.
8. Sistem monitoring yang merecognize lingkungan, manusia, kendaraan, pergerakkan bahkan alam untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran ataupun penyimpangan.
9. Sistem penegakkan hukum yang tebang habis bukan tebang pilih.

Dan masih banyak lagi yang bisa dikaitkan dalam membangun kecintaan dan kebanggaan bahkan patriotisme.

Setidaknya 9 point di atas untuk dapat dipenuhi atau sebagai sistem menata keteraturan sosial dan membangkitkan passion. Dengan harapan core value yang rasional profesional cerdas bermoral dan modern yang melandasi kebudayaan benar benar dan mampu sebagai acuan atau basis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga kedaulatan yang mampu berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saing.

**Pemikiran, Perkataan dan Perbuatan sang Pemimpin.**

Pemimpin juga merupakan orang yang dipercaya atau orang yang memegang kewenagan dan kekuasaan atas sesuatu yang dipimpinnya, yang digunakan dalam kebijakannya secara bijaksana.

Pemimpin diperlukan dan menjadi penentu keberhasilan mencapai tujuan, karena memiliki kekuatan, kewenangan untuk mengambil kebijakan dan kebijaksanaan.

Keputusan-keputusan ada padanya. Pemimpin diberi banyak previlage dan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan untuk mampu mencapai tujuan institusi yang dipimpinya.

Bagi pemimpin publik kepemimpinanya tercermin dalam perilaku organisasi dan pelayanan kepada publik. Karena disitulah kebijakan-kebijakannya diambil dan diputuskan dan bagaimana ia mampu merubah mind set dan culture set yang dipimpinya.

Inti dari administrasi adalah management, inti dari management adalah kepemimpinan, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, inti pengambilan keputusan adalah human relation. Pemimpin akan menjadi role model bagi anak buahnya.

Pemimpin yang dijadikan role model/ikon pembaharuan oleh anak buahnya, karena memiliki integritas, komitmen, kompetensi dan keunggulan.

Itulah karakter pemimpin. Pemikiran-pemikiran pemimpin yang transformasional adalah pemikiran yang :

1. Visioner.
2. Problem solving.
3. Kreatif dan inovatif
4. Menjadikan unggul.

Perkataan-perkataannya adalah :

1. Memotivasi.
2. Menyadarkan.

3. Memberdayakan.
4. Menguatkan.
5. Menyejukan.
6. Membawa pada harapan.

Perbuatan-perbuatannya :

1. Secara pribadi mampu menunjukan moralitasnya.
2. Mampu menunjukan kepiawaianya dalam berpikir yang visioner dan kompetensinya dalam bekerja.
3. Mencerminkan kecintaan dan kebanggaan pada pekerjaanya.
4. Menunjukan disiplin dan tanggung jawabnya.

Tatkala pemimpin pemikiran, perkataan dan perbuatannya tidak konsisten, mencerminkan tingkat kualitas berpikirnya, kompetensinya, juga attitudenya. Pemimpin publik tercermin dari pelayanan publiknya dan perilaku anak buah yang dipimpinnya.

# MANAJEMEN MEDIA MENJADI FUNGSI UTAMA DALAM PEMOLISIAN DI ERA DIGITAL [34]

Media di era digital menjadi arena atau ruang yang dipilih dan digunakan untuk berbagai kepentingan hidup dan kehidupan manusia di semua gatra.

Karena kehidupan bisa dilakukan di sana. Dari masalah pribadi sampai masalah politik kenegaraan, ekonomi, sosial budaya hingga pelayanan publik pun bisa dilakukan.

Warga pengguna dunia virtual pun memiliki nama (warga net atau netizen). Mereka menjalankan aktivitas dalam dunia virtual. Media terutama media sosial mampu menggeser media konvensional.

Informasi dan komunikasi begitu cepat. Apa saja ada dan apa saja bisa bahkan dimana saja siapa saja pun bisa.

Dampak kemajuan teknologi informasi berdampak pada munculnya "Post Truth". Post Truth merupakan era penumpulan daya nalar yang dapat berdampak mengobok obok emosi dan persepsi publik yang dapat dikendalikan untuk menimbulkan potensi konflik.

Logika tidak lagi diutamakan yang dipentingkan emosional spiritual. Kemasan primordialisme digelorakan agar kebencian semakin membara. Tanpa pikir panjang peradilan sosialpun merebak di semua lini.

Saling menuduh saling menyalahkan saling menghina saling mengobok obok jiwa hingga harga diri. Tanpa sebutir peluru keluar moncong laras senjata perang dapat dimulai.

34 https://polisiindonesia.id/2024/03/10/cdl-manajemen-media-menjadi-fungsi-utama-dalam-pemolisian-di-era-digital/

Post truth kontra produktif, pembodohan menggelora di mana mana. Sesal tiada guna. Era Post Truth menjadi ajang pemutar balikkan fakta.

Isi media diacak adul sehingga antara fakta dan kebohongan bahkan kemasan dalam primordialisme akan dapat dikembangkan menjadi pemicu konflik.

Mulai Dari melempar issue, melabel hingga ujaran ujaran kebencian. Opini publik dapat diobok obok dan dibingungkan dengan primordialisme untuk menggerus nalar dan ujungnya pada kebencian.

Tatkala kebencian sudah merasuk di dalam opini publik tinggal menunggu triger untuk meledakkannya.

Berbagai masalah di era Post Truth yang berdampak pada gangguan keteraturan sosial antara lain :

1. Premanisme yang tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, dan Kesewenang wenangan.
2. Birokrasi yang lebih menekankan pada pendekatan personal yang berdampak buruknya pelayanan kepada publik.
3. Berbagai bentuk kejahatan.

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika.

   Berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal.
4. Faktor alam dan lingkungan.

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya.
5. Faktor sumber daya manusia tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang redah yang sarat dengan primordialisme.

6. Faktor politik dan kebijakan publik, politik yang terlambat atau tidak mampu menghadapi perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi, perubahan begitu cepat.
7. Era post truth, hoax, serangan siber, dan sebagainya melalui media.
8. Gaya hidup hedonisme yang berdampak tergerusnya nilai nilai budaya luhur.
9. Lemahnya penegak hukum dan penegakan hukum dan sistem hukumnya.
10. Sistem yang manual, parsial dan konvensional sehingga berdampak potensi penyimpangan yang begitu besar.

Manajamen media bagi Polisi dan pemolisiannya di era Post Truth menjadi bagian penting bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban. Berita atau informasi apapun dapat diperoleh dengan cepat dan mampu menembus sekat batas ruang dan waktu. Berbagai isu yang terjadi dapat diputarbalikan menjadi suatu pembenaran yang menafikan kebenaran.

Media dapat dikatakan jembatan hati, penyambuh lidah, corong informasi bahkan sebagai sistem transformasi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun sebaliknya media juga sebagai penyerang perusak bahkan pembunuh karakter. Saling serbu dengan model proksi dari pemberitaan buruk, hoax hingga fitnah bisa ditebarkan.

Bahkan untuk kepentingan politik sekalipun mampu digulirkan untuk mendongkrak popularitasnya.

Post truth bukan kebohongan semata melainkan olahan fakta dan kebohongan yang diviralkan melalui berita hoax untuk mempengaruhi otak hati hingga pada suatu keyakinan pembenaran dijadikan kebenaran, bahkan yang membuatnyapun meyakini sebagai kebenaran. Efek dari era post truth kebenaran dikalahkan dengan pembenaran.

Tatkala tiada standar media bagi berita atau informasi yang menjadi standar fakta kebenaran maka, pembenaran akan terus viral

yang efeknya akan membodohi bahkan menjerumuskan bahkan mampu merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui manajemen media diharapkan mampu untuk :

1. Menjadi standar informasi atau berita yang benar sesuai fakta dan data.
2. Mampu menginspirasi yg artinya kreatif dan inofatif.
3. Mendorong orang lain berbuat baik dan benar / membangun budaya atau peradaban.
4. Mampu memberitakan hal hal yang up to date.
5. Mampu mengcounter issue.
6. Mampu membuat sesuatu yang fun indah dan menghibur.
7. Mendukung pembangunan literasi.

Manajemen media menjadi basis keteraturan sosial dunia virtual. Di era digital, dunia virtual menjadi wahana bagi hidup dan kehidupan yang dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas.

Pembunuhan karakter hingga mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Hoaks menjadi cara pembodohan penyesatanpun secara virtual.

Memang ada yang marah merasa dikungkung atau dibungkam atau banyak hal yang menuntut kebebasan sebebas bebasnya. Hujat menghujat dengan kalimat tidak sepatutnya pun seakan menjadi pameran ketololan dan sikap pengecut.

Netizen +62 dilabel paling buruk tatakramanya. Entah itu refleksi budaya atau oknum yang tak lagi bisa menghargai orang lain. Sikap budaya bangsa yang adiluhung seakan luntur akibat evoria dunia maya.

Tatkala diminta pertanggungjawaban kembali air mata maaf bahkan sikap minta dikasihani memelas yg ditampilkan. Ujaran kebencian menghakimi luar biasa memalukan kata katanya.

Seakan memang otak dan hatinya lupa segala edukasinya. Kritik disamakan dengan hujatan. Tabiat buruk seakan menjadi moralitas. Provokasi pembodohan menjadi sesuatu yang membanggakan.

Kalau menampilkan hujatan seakan juara jagoan dan merasa pahlawan. Menyedihkan. Dalam kehidupan sosial di era digital maka keteraturan sosial di dunia virtual memang diperlukan tatanan dan pertanggungjawaban.

Mau tidak mau tatkala segala sesuatu yang berdampak pada konflik dan berbagai hal yang kontrta produktif menjadi tanggung jawab kita semua mengatasinya.

Konteks demokrasi menjadi acuan bebas bertwnggungjawab, jaminan perlindungan HAM, supremasi hukum, transparan dan akuntabilitas orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menjaga kedaulatan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan ketahanan dan daya tangkal bahkan daya saing. Kritis atas penyimpangan atau ketidak benaran merupakan suatu kecerdasan keberanian bahkan juga wujud tanggung jawab moral.

Keras dalam prinsip dan penyampaian secara elegan akan mengundang simpatik dan solidaritas.

Kekerasan simbolik ujaran kebencian pembodohan hingga pengadilan sosial bukan sesuatu yang spontan melainkan by design.

Era Post Truth antara fakta dan kebobongan diolah sedemikian lupa pembenaran seolah menjadi kebenaran. Dan dilakukan orang orang cerdik pandai yang terus menerus diviralkan hingga seolah menjadi kebenaran.

Bumbu bumbu hoaks dengan primordialisme menjadi penyedap. Keteraturan sosial dalam dunia virtual belum sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang kontra produktif.

Namun sebenarnya tanpa sadar taburan taburannya sudah dapat merasuki bahkan mencandui pikiran hingga emosi publik.

Dunia virtual jembatan harapan dalam era digital. Hal yang positif tentu banyak sekali dan mendukung pencerdasan dan pembangunan karakter bangsa yang mampu menembus sekat ruang dan waktu. Namun hal hal yang kontra produktif dan menjadi potensi rusaknya

karakter bahkan kedaulatan bangsa apakah dimaklumi dan dianggap biasa biasa saja?

Manajemen media menjadi jembatan dan ruang terbuka atau menjadi arena apa saja untuk menjadi wadah berbagai kepentingan. Manajemen media dapat menjadi :

1. Media informasi.
2. Media komunikasi.
3. Media sosialisasi.
4. Media edukasi.
5. Media kepentingan politik.
6. Media untuk labeling.
7. Media bisnis.
8. Media penggalangan solidaritas.
9. Media penghakiman sosial.
10. Media membangun jejaring sosial.
11. Media laboratorium sosial. Dan masih banyak fungsi lainnya.

Melalui manajemen media pemetaan wilayah, masalah dan potensi dari berbagai kepentingan :

1. Primordial dapat menjadi kekuatan kebhinekaan yang mempersatukan.
2. Menggunakan soft power dan smart power dalam berbagai profesi menjadi jembatan komunikasi dan solidaritas.
3. Membuka peluang bisnis dan pelayanan publik secara virtual.
4. Mendapatkan dukungan viewer maupun follower dari warganet.
5. Mengetahui dan memetakan opini publik melalui intelejen media.
6. Memberikan inspirasi, motivasi atas fungsionalisasi media sosial secara luas tentu akan berdampak pada perilaku netizen dengan kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Intelejen media akan menjadi bagian penting untuk menata atau menjaga keteraturan sosial pada warga net. Prinsip kinerja intelejen dari : pemgumpulan data, analisa, produk dan networking ini dapat dilakukan dengan memberdayakan media sosial sebagai bagian dari laboratorium sosial.

Dalam kehidupan masyarakat boleh dikatakan ada juga dalam media sosial. Dari pemetaan pembuatan pola polanya dan pengumpulan data maka akan dapat dihubung hubungkan. Dapat dianalisa untuk menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma tadi dapat digunakan sebahai model untuk memprediksi mengantisipasi dan memberi solusi.

Intelijen media akan membantu menjembatani untuk terus berkembangnya fungsi media sosial secara positif dan mencerdaskan para warga net agar tidak hanyut dlm berita hoaks, Selain itu juga bagi penegakkan hukum warga net yang dengan sengaja memperkeruh atau pemengganggu keteraturan sosial.

Manajemen media dapat mendukung :

1. Implementasi E Policing yang mencakup adanya : Back office, Application yang berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya sebaga prediksi antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, on time dan any time.
2. Dapat menjadi Pusat K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengenadalian serta Informasi) dalam memberikan pelayanan prima di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan secara prima.
3. Diimplementasikan dalam Smart Management dan Smart Operation. Diawaki petugas polisi siber (cyber cops ).
4. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas terutama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya.

5. Mendukung Sistem Pengamanan Kota ( Sispam Kota ).
6. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem.

# PEMIMPIN: GURU SANG PENCERAH [35]

Pemimpin itu guru sang pencerah. Menjadi pemimpin setidaknya memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi menjalankan komitmennya untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Pemimpin itu guru, yang dalam analoginya dapat dikatakan "digugu lan ditiru". Guru sebagai sang pencerah bagi masa kini dan masa depan.

Pemimpin sebagai guru menjadi penerang dalam kegelapan menuntun para anak buahnya untuk mampu melihat kebenaran, keadilan dalam keutamaannya. Menjadi pemimpin bukan sekedar menjalankan profesinya melainkan ada panggilan jiwa untuk menapaki jalan hidup sebagai : 1. Sang pencerah, 2. Influencer, 3. Motivator, 4. Problem solver, 4. Dirigen yang mengharmonikan, 5. Pembaharu, 6. Ikon profesionalisme, 7. Ikon kecerdasan, 8. Ikon moralitas, 9. Ikon modernitas, 10. Membawa kemajuan dan kesejahteraan.

Dari point point di atas kebahagiaan dan kebanggaan pemimpin sebagai guru tatkala para anak buahnya mampu menemukan jati dirinya untuk bekerja secara : profesional, cerdas, bermoral dan modern. Pemimpin yang guru akan terus mencari dan menemukan telur telur rajawali dan menetaskannya , menyadarkan agar jati diri rajawali muncul yang mampu terbang mengangkasa dan mendunia.

Pemimpin yang guru dalam mendidik bukan sebatas memerintah dan marah namun juga memberi pengetahuan untuk mencerdaskan, mencerahkan dan menyadarkan akan jatidirinya. Selain itu juga berani untuk berpikir kritis bahkan mengembangkan imajinasinya secara out of the box atau di luar mind streem. Pencerahan sang pemimpin sebagai guru pencerah adalah menemukan dan menjalankan keutamaan profesinya.

Semua itu dimulai dari lembaga pendidikan yang sejatinya dapat dikatakan " litle dari sebuah institusi atau birokrasi. Pendidikan merupakan cara menemukan keutamaan dan cara mengimplementasikan. Bukan sebatas

35 https://transindonesia.co/2024/03/11/pemimpin-guru-sang-pencerah/

persyaratan, maka cara cara instan akan menyesatkan dan menjerumuskan dan merusak peradaban. Guru selain sebagai pengajar ia juga memiliki status sosial. Tatkala status sosialnya rendah maka kualitas pendidikan akan jauh dari memuaskan. Guru adalah pemimpin demikian sebaliknya pemimpin adalah guru yang merupakan kunci dari baik buruknya suatu institusi. Hasil didik merupakan cermin dari kualitas lembaga pendidikan. Pendidikan mengajarkan dan menanamkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin untuk menemukan keutamaan kepada para siswanya. Pendidikan bagian kodrat manusia untuk menjadi pembelajar, melalui pendidikan dapat mengetahui segala sesuatu. Pendidikan menjadi ruang transformasi pengetahuan ketrampilan moralitas agar semakin manusiawinya manusia

Pemimpin guru menjadi energi transformasi yang mencerahkan hidup dan kehidupan. Hidup dalam suatu peradaban diperlukan adanya pendidikan yang mencerahkan, mentransformasi sehingga mampu untuk : memahami, membatasi, empati, peduli, saling menghormati, dan mampu saling menghidupi. Pendidikan refleksi suatau peradaban? Kalau iya mengapa? Karena hidup dan kehidupan manusia memerlukan peradaban untuk bisa bertahan hidup dan menumbuh kembangkannya. Peradaban menjadi tanda bahwa ada manusia sebagai mahkluk berakal budi. Manusia memiliki akal budi untuk berimajinasi. Dari imajinasi itulah mampu mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan.

Seni dan budaya pilar peradaban? Tatkala dikataka iya dapat ditunjukan bahwa manusia mampu untuk bertahan hidup dan mengatasi kendala hidup dan kehidupannya diperlukan harmoni sbeagai solusi. Di situlah seni dan kebudayaan menjadi ruang dan sekaligus pilarnya. Manusia adalah mahkluk paling lemah sekaligus paling kuat. Namun untuk mengatasi kelemahannya dan mencapai kekuatanya, ia harus belajar dalam segalanya

Manusia sebagai mahkluk pembelajar karena dituntut memiliki kepercayaan diri dan bekerja keras untuk hidup dan kehidupannya. Pemimpin guru sang pencerah selain mentransformasi pengetahuan juga menanamkan kecintaan akan seni sebagaj panggilan hati sekaligus kesadaran moral menjaga budaya dan peradaban bangsa. Menjadi guru dalam mencerahkan sebenarnya telah mengimplementasikan seni dalam pengajarannya yang menyambung rasa jiwa, bagi hidup dan kehidupan dalam semua lini kehidupan sepanjang masa.

# PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DEMI KEMANUSIAAN DAN PERADABAN [36]

Hukum adalah ikon peradaban dan keadilan. Penegakan hukum dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk keadilan dan membangun peradaban. Menegakan hukum bukan ajang balas dendam. Bukan semata mata mencari kesalahan dan mengalahkan, namun juga untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan.

Polisi menegakan hukum sejatinya juga menegakan keadilan, karena demi semakin manusiawinya manusia. Hukum dan keadilan adalah demi kemanusiaan.

Di situlah penegak hukum menunjukan pembelaannya dan keberpihakannya bagi kemanusian. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa.

Polisi menegakan hukum juga menegakan keadilan dan demi kemanusiaan, terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial, yang menjadi simbol peradaban. Hal tersebut tentu saja untuk mendukung pembangunan peradaban. Hukum ditegakkan berbasis:

1. Supremasi hukum, karena hukum menjadi panglimanya.
2. Di dalam menegakan hukum keadilan menjadi yang utama dan pertama. Tatkala menegakan hukum tidak ditemukan keadilan,maka polisi dapat mengambil tindakan : diskresi, alternatif dispute resolution maupun restorative justice.
3. Penegakan hukum dilakukan sejatinya untuk menyelesaikan

36 https://transindonesia.co/2024/03/12/penegakan-hukum-dan-keadilan-demi-kemanusiaan-dan-peradaban-2/
https://polisiindonesia.id/2024/03/12/cdl-penegakan-hukum-dan-keadilan-demi-kemanusiaan-juga-peradaban/

konflik secara beradab, dan memiliki dampak pencegahan, agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.

4. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah untuk membuktikan bukan untuk pengakuan tersangka ataupun mengadili. Sehingga diperlukan bukti secara makro dan makro yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Polisi menegakan hukum merupakan bentuk perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada korban dan pencari keadilan.
6. Polisi menegakan hukum agar ada kepastian di dalam membangun budaya tertib dan patuh hukum. Yang juga untuk edukasi.
7. Polisi menegakan hukum secara :transparan dan akuntabel secara: moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional dan secara sosial.

Penegak hukum di dalam menegakan hukum ada etikanya sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan jelas apa yang tidak boleh dilakukan. Di samping itu juga jelas sanksinya bila melakukan pelanggaran. Polisi di dalam menegakan hukum dan keadilan menunjukan sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Tatkala sebaliknya yang terjadi adalah perusakan peradaban.

# APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH POLISI DALAM MENANGANI LALU LINTAS [37]

Polisi dalam pemolisiannya untuk menangani lalu lintas (road safety policing) melakukan tindakan : preemtif, preventif dan represif serta rehabilitasi untuk : mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan serta membangun budaya tertib berlalu lintas maupun memberikan pelayanan prima di bidang lalu lintas, dan angkutan jalan.

Masalah lalu lintas social costnya amat mahal salah satunya adalah "Kecelakaan lalu lintas", apalagi dengan korban fatal yang terus terjadi di mana mana. Kecelakaan menyedihkan, menyengsarakan bahkan memiskinkan. Faktor utama penyebab kecelakaan adalah pelanggaran.

Sikap permisive atau pembiaran terhadap pelanggaran sekecil apapun berdampak lemahnya budaya tertib berlalu lintas.

Tindakan pencegahan dan upaya membangun budaya tertib berlalu lintas maupun penanganan saat terjadi masalah emergency dapat dilakukan dengan berbagai langkah manajemen.

Management lalu lintas setidaknya mencakup : manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas dan manajemen kecepatan serta manajemen emerjensi.

1. Manajemen kebutuhan perlu ditonjolkan dan ditunjukkan apa yang ideal atau semestinya walau faktanya masih banyak hal yang kurang ideal. Kebutuhan lahan sarana dan prasarana termasuk jalan, standar

37 https://transindonesia.co/2024/04/11/apa-yang-harus-dilakukan-oleh-polisi-dalam-menangani-lalu-lintas/
https://www.merdekanews.co/read/28356/Apa-yang-Harus-Dilakukan-Polisi-dalam-Menangani-Lalu-Lintas
https://polisiindonesia.id/2024/04/11/cdl-apa-yang-harus-dilakukan-polisi-dalam-menangani-lalu-lintas

bagi jalan, kendaraan manusia maupun lingkungannya. Penataan secara sosial maupun secara infrastruktur dapat dibuat model dan polanya yang dapat dilakukan secara bertahap atau berjangka yang berkesinambungan. Manajemen kebutuhan ini dapat dibuat antara yang ideal dan yang aktual. Dari manajemen kebutuhan maka dari standar standar yang ada akan diketahui kapasitasnya yang perlu di manage.

2. Manajemen kapasitas untuk menata dan mengelola standar standar yang ada agar dapat diketahui tingkat kapasitasnya.Tatkala kapasitas melampaui maka perlu memata mengelola skala prioritas seperti apa yang semestinya dilakukan

3. Manajemen prioritas ini untuk memanage agar jangan terjadi perlambatan apalagi kecelakaan. Dengan prioritas yang didukung rekayasa lalu lintas maka akan dapat dioperasionalkan lalu lintas setidaknya mampu mengatasi maslah kapasitas yang tidak sesuai. Dalam manajemen prioritas maka kecepatan dan waktu ini dapat diatur kita harus ingat lalu lintas ditentukan juga antara jarak tempuh waktu tempuh dan kecepatannya.

4. Manajemen kecepatan dan ketepatan serta waktu tempuh. Manajemen kecepatan ini seringkali diabaikan. Di dalam pelayanan publik salah satu standar pelayanan prima adalah kecepatan. Kecepatan maksimal maupun minimal perlu diatur. Karena kecepatan maksimal dilanggar dampaknya pada fatalitas kecelakaan. Sebaliknya kecepatan minimal dilanggar ini menimbulkan perlambatan bahkan kemacetan yang bisa berdampak pada keamanan dan keselamatan serta rusaknya keteraturan sosial lainnya.

5. Manajemen emergency merupakan upaya dan sebagai solusi untuk penanganan cepat atau quick response time. Karena masalah emerjensi maupun kontijensi yang terjadi pada lalu lintas akan berdampak ke mana mana baik keamanan keselamatan kelancaran dsb

Memanage lalu lintas di era digital diperlukan sistem terpadu dari back office aplication dan net work yang mampu untuk :

1. Monitoring dan inputing data

2. Melakukan analisa data yang akan menghasilkan algoritma sebagai prediksi antisipasi dan model solusi
3. Melakukan komunikasi seperti call centre
4. Ada sistem informasi manual maupun virtual
5. Komando dan pengendalian dalam mengatasi berbagai maslah lalu lintas
6. Koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan untuk mampu mendukung apa yang menjadi tujuan lalu lintas baik untuk pencegahan, perbaikkan, peningkatan kualitas pelayanan, maupun pembangunan.

Pelanggaran yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah masalah :

1. helm,
2. melawan arus,
3. ngebut,
4. knalpot suara melampaui batas ambang kebisingan,
5. over load, over dimention,
6. menerobos lampu pengatur lalu lintas,
7. ugal ugalan di jalan raya,
8. kapasitas pengemudi angkutan umum barang dan orang yang tidak kompeten
9. seat belt
10. anak anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor
11. drink driving
12. penggunaan gadget atau sesuatu yang mengganggu konsentrasi berkendara Dsb.

Lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa. Dan lalu lintas adalah cermin tingkat modernitas yang dinamis. Membangun Budaya Tertib Berlalu lintas setidaknya mencakup :

1. Membangun keteraturan sosial di jalan raya dengan standar keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas serta adanya pelayanan publik yang prima. Hukum dan peraturannya dapat dipatuhi oleh para pengguna jalan dan dapat ditegakkan setegak tegaknya.
2. Kesadaran berlalu lintas dibangun dengan sistem yang membuat tidak ada peluang atau kecil sekali kemungkinan bagi para pengguna jalan melakukan pelanggaran. Di samping itu denda ada sanksi tegas bahkan keras bagi yang melanggar.
3. Kepatuhan terhadap aturan idealnya karena kesadaran ini merupakan refleksi budaya tinggi bagi suatu peradaban.
4. Membangun Literasi untuk Berlalu lintas melalui pendidikan berhasil mentrasformasi pemahaman akan road safety atau lalu lintas yg aman selamat tertib lancar dan mampu diimplementasikan pada saat berlalu lintas.
5. Membangun infrastruktur dengan sistem sistemnya yang mampu mengontrol atau bahkan memaksa pengguna jalan dalam berlalu lintas untuk mentaati aturan.
6. Efek deteren dari penegakkan hukum yang mampu memberi edukasi dan efek jera yang dapat membuat pengguna lalu lintas peka peduli bahkan mau bertanggungjawab atas terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar.
7. Sistem edukasi sepanjang hayat dan terus menerus di semua lini. Program program edukasi bisa dilakukan secara formal maupun non formal. Langsung maupun dengan media. Di era digital maka management dan intelejen media menjadi kekuatan dasar road safety policing.
8. Sistem pendidikan keselamatan berlalulintas yang dikaitkan dengan sistem uji SIM dan sistem penerbitan SIM di dukung sistem TAR ( traffic attitude record) dan merit system untuk perpanjangan SIM. Hal tersebut untuk mendukung program safer people. Pengguna jalam dalam berlalu lintas yang berkeselamatan. Dalam IT for road safety dibangun melalui program SDC ( safety driving/ riding centre ).
9. Membangun model smart city dengan pendekatan road safety policing

melalui IT for road safety. Mengoperasionalkan dalam sistem : smart management dan smart operation

10. Membangun Media Manajemen dan Intelejen road safety serta Road Safety Expo

11. Mengoperasionalkan dengan baik dan benar Call and Comand Centre, Algoritma Road Safety, Quick Response Time,Big Data System dan Pelayanan dalam One Stop Service, adanya Index Road Safety sebagai akuntabilitasnya

Mengapa TAA, TARC Penting dan Mendasar dalam Menangani Kecelakaan Lalu lintas ?

TAA : traffic accident analysis, merupakan wadah untuk mendukung proses penyidikan kecelakaan lalu lintas pada konteks pro justitia. Adapun TARC : traffic accident research centre, untuk meneliti atau menangani kecelakaan secara ilmiah untuk pencegahan, perbaikan, pembangunan konteks mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar.

Penanganan kecelakaan lalu lintas memerlukan sistem yang holistik atau sistemik yang dapat dilakukan secara antar bidang keilmuan. Dapat menggunakan berbagai teori atau konsep yang relevan untuk menemukan akar masalah dan menemukan solusi untuk pencegahan, prediksi, antisipasi sebagai solusinya.

Kecelakaan merupakan salah satu masalah lalu lintas yang social costnya tinggi. Kecelakaan yang dikatakan menonjol dapat dikategorikan dengan melihat dan mempertimbangkan dari :

1. Korban kecelakaan lalu lintas :
    a. Melibatkan VVIP dan VIP
    b. Melibatkan orang asing
    c. Melibatkan anggota TNI / Polri
    d. Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, public figure dsb
    e. Jumlah korban fatal yang dikatakan cukup banyak dalam kategori yang disepakati bersama antar pemangku kepentingan misalnya melebihi 5 orang dsb

2. Kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan
3. Kendaraan angkutan umum dan berdampak luas pada keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
4. Kecelakaan yang berulang dalam rentang waktu tertentu karena faktor jalan, alam atau kendaraan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Kecelakaan karena faktor manusia kaitan dengan konteks perilaku berlalu lintas yang tidak kompeten atau tidak memiliki kesadaran, tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab.
6. Kecelakaan yang melibatkan antar moda transportasi angkutan umum.

Dan masih dapat dikategorikan dalam konteks lainnya yang dapat menimbulkan perhatian publik atau menjadi isu penting dalam masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan adanya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan para pengemudi yang berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas : melawan arus, menerobos lampu merah, melanggar rambu-rambu lalu lintas/ marka jalan/ parkir tidak pada tempatnya/ bukan peruntukannya, melebihi batas muatan, mengabaikan standar keselamatan (pengemudi/ pengendara, kendaraan bermotor)

Tatkala melakukan pelanggaran ada pertanyaan kembali, mengapa melakukan pelanggaran? karena tidak tahu, lalai, maupun sengaja melakukan. Perilaku pengemudi melakukan pelanggaran-pelanggaran ini merupakan behaviour (perilaku dalam berkendara) yang perlu dianalisa dan dipelajari mengapa mereka melakukan pelanggaran: a. apakah tidak tahu?, b. banyak kesempatan untuk melanggar?, c. kurangnya pengawasan?, dan d. sistem penegakkan hukum yang lemah?

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dari faktor kecepatan dalam berkendara. Kecelakaan yang diakibatkan kecepatan/ laju kendaraan yang begitu tinggi sehingga pengemudi/ pengendara tidak dapat mengendalikan pada saat ada permasalahan (jalan, kendaraan, pengguna jalan lainya).

2. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor pengemudi

   a. Kecelakaan yang disebabkan karena pengemudi tidak berkonsentrasi : lelah, bosan, ngantuk, mengemudi sambil menggunakan HP/ mengutak atik audio /video, sambil ngobrol/ makan makanan sehingga mengganggu konsentrasi.
   b. Kecelakaan yang disebabkan karena pengemudi tidak/kurang memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor.
   c. Kecelakaan yang disebabkan karena pengambilan keputusan/ reaksi pengemudi yang berdampak terjadinya laka.

3. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor jalan

   Jalan dan lingkungannya dengan kondisi jalan yang : a. rusak, b. bergelombang, c. Geografis :kemiringan, tikungan, tanjakan maupun turunan jalan yang membahayakan, d. Kondisi jalan lingkungan yang ada di sekitar jalan pun bisa mempengaruhi baik dari badan jalan, e. Lampu penerangan jalan dan sebagainya.

4. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor kendaraan bermotor : a. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, b. kondisi body kendaraan bermotor, c. transmisi kendaraan bermotor, d. Ban dari kendaraan bermotor, e. Peruntukan, f. Standar-standar safety lainya.

5. Kecelakaan lalu lintas akibat dari faktor pengguna jalan lainya : a. Pejalan kaki, b. Pedagang kaki lima, asongan, c. Pengendara sepeda, d. Penggunaan jalan bukan untuk lalu lintas (parkir, berjualan, pasar tumpah dan sebagainya). Ada kalanya masyarakat membakar sisa panenan yang berdampak asap tebal atau juga karena kebakaran hutan ataupun lahan.

6. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor alam : a. aktor bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan dan sebagainya), b. Cuaca buruk (hujan lebat), c. Berkabut tebal

Masih banyak hal lain yang dapat dijabarkan pada masing masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.

Korban kecelakaan yang fatal dari luka berat, cacat hingga meninggal dunia berdampak pada pemiskinan. Dari data yang ada korban kecelakaan lalu lintas pada umumnya adalah pada usia produktif. Pada usia produktif

maka akan berdampak pada kualitas hidup. Dan menurunnya kualitas hidup dapat dikategorikan sebagai bentuk pemiskinan. Perjuangan bagi terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar maka dibangun sistem sistem yang harmoni antara para pemangku kepentingan dalam suatu sistem sinergitas yang di susun dalam RUNK (rencana umum nasional keselamatan).

Road safety dengan pendekatan pemolisian dapat dikatakan sbg road safety policing. Sistem sistem pendukung implementasi road safety policing secara konvensional maupun elektronik dapat diimplementasikan melalui electronic policing (E policing). Pada fungsi lalu lintas E policing dibangun berbasis pada back office sebagai operation room pusat k3i (komunikasi koordinasi komando pengendalian dan informasi); application yang berbasis pada artificial intellegent dan network yang berbasis pada internet of things. E policing pada fungsi lalu lintas dibangun IT for road safety yang diimplementasikan pada program TMC ( traffic management centre) sebagai pendukung road safety management. Tmc didukung pada divisi SSC ( safety and security centre) untuk mendukung safer road, ERI ( electronic registration and identification ) untuk mendukung safer vehicle. SDC ( safety driving centre) untuk mendukung safer people dan Intan (intellegent traffic analisys) untuk mendukung post crash care. Dari ke semua program IT for Road safety dikembangkan adanya TAR ( traffic attitude record) atau catatan perilaku berlalu lintas dan program de merit point system untuk mendukung sistem perpanjangan SIM dll. IT for road safety juga mendukung pada road safety policing dimanage dan dioperasionalkan dalam model smart city. Model smart city dalam pendekatan road safety policing dapat mendukung program pemerintah untuk membangun :

1. ERP ( electronic road pricing)
2. ETC (electronic toll collect)
3. E Parking
4. E Banking
5. E Samsat
6. ETLE (electronic traffic law enforcemet)

7. Smart city khususnya pada smart living and smart mobility.

Dari semua sistem on line dikembangkan pada algoritma yang berupa infografis, info virtual, info statistik yang real time, dpt diakses on time dan any time. Algoritma yang merupakan prediksi antisipasi dan solusi dapat dikembangkan menjadi index Road safety.

Di dalam meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan road safety policing didukung dengan mengembangkan program program sbb :

1. Literasi bagi road safety
2. Road safety coaching
3. TAA ( traffic accident analisys) untuk mendukung projustitia atau proses penyidikan
4. TARC ( traffic accident research centre)
5. Road safety researach and development)
6. Road ssfety expo
7. Jurnal road safety
8. Komunitas korban kecelakaan
9. Diseminasi guru dalam transformasi road safety sejak usia dini
10. Polisi sahabat anak
11. Patroli keamanan sekolah
12. Cara aman ke sekolah
13. Taman lalu lintas
14. Kajian-kajian road safety : road safety boarder, road safety for tourism, kajian jalan toll, kajian kawasan industri, kajian kawasan Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan, kajian rawan kecelakaan dan kemacetan, kajian smart city, kajian antar moda transportasi angkutan umum dsb
15. Membangun SDC ( safety driving centre) yang mencakup sekolah mengemudi, sistem uji sim dan sistem penerbitan sim

16. RSPA ( road safety partnership action )
17. Intellegent road safety
18. Management media
19. Pengembangan PJR sebagai Polisi Jalan Raya
20. Menyiapkan master trainer dan trainer serta training untuk peningkatan kompetensi pada road safety
21. Pembinaan komunitas komunitas hobi dan profesi yang berkaitan dengan road safety

Kajian TAA dan TARC melibatkan pakar, akademisi, para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kajian penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penanganan masalah kecelakaan. TAA kaitan dengan pembuktian dan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan. Sedangkan TARC dilakukan secara holistik dan sistemik melalui program-program dekade aksi keselamatan yang tertuang dalam RUNK sbb :

1. Road safety management :

   Manajemen keselamatan berlalu lintas dimulai dari :

   a. Pemahaman dan penjelasan konsep-konsep safety ( standar-standar safety : bagi jalan, kendaraan bermotor, pengemudi);
   b. Sistem-sistem infrastruktur pendukung pada back office untuk monitoring, kodal, informasi, quick response time, informasi, pelaporan, dan koordinasi;
   c. Pemetaan wilayah, masalah, dan potensi-potensi;
   d. Memanage untuk memberikan pelayanan prima (pelayanan : informasi, administrasi, keamanan, keselamatan, hukum, kemanusiaan) dalam: 1) sistem transportasi publik, 2) sistem penanganan masalah kontijensi (faktor manusia, faktor manusia, faktor kerusakan infrastruktur), 3) memanage untuk penanganan secara bersinergi antar pemangku kepentingan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya);
   e. Memanage untuk kapasitas, prioritas, pembatasan, dan penegakkan hukum.

2. Safer road (jalan yang berkeselamatan)

   Standar-standar jalan berkeselamatan :

   a. Secara teknis;
   b. Secara informatif;
   c. Secara emergency;
   d. Standar untuk kecepatan penanganan masalah;
   e. Standar untuk monitoring;
   f. Sistem-sistem pendukung untuk : kapasitas, prioritas, pembatasan, dan penegakkan hukum;
   g. Sistem-sistem penghubung antar moda transportasi ( stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, bandar udara).
   h. Karakter jalan
   i. Hazard jalan
   l. Jalur penyelamat

3. Safer vehicle :

   a. Sistem pendataan kendaraan bermotor dari dokumen maupun fisik kendaraan bermotor;
   b. Sistem uji tipe, kelaikan jalan, emisi gas buang;
   c. Standar keselamatan untuk pengoperasionalan dan peruntukan;
   d. Standar transportasi angkutan umum;
   e. Sistem-sistem interchange dan inter koneksi antar moda transportasi angkutan umum;
   f. Standar-standar pada sistem-sistem pendukung lainya
   g. Manajemen operasional kendaraan bermotor

4. Safer people

   Faktor manusia memang kompleks untuk mendukung keselamatan akan dilihat dari kompetensi, perilaku pengemudi (pelanggaran), pengambilan keputusan saat berkendara (konsentrasi, reaksi). Untuk itu pada faktor manusia yang berkeselamatan dilakukan adanya : 1) standar edukasi secara formal maupun non formal, 2) standar uji untuk para pengemudi/ calon pengemudi yang mencakup : a) uji

administrasi, b) uji kesehatan, c) uji kesadaran d) uji teori (pengetahuan : aturan/peraturan perundang-undangan, teknis kendaraan bermotor, keselamatan, dan sebagainya), e) uji simulasi (konsentrasi, reaksi, kompetensi teknis), f. Uji praktek untuk menggabungkan kesadaran, kompetensi, pengetahuan, konsentrasi dan reaksi. 3) penegakkan hukum secara manual maupun elektronik (ELE) 4) TAR / traffic attitude record, 5) de merit point system untuk perpanjangan SIM, 6) RSPA / road safety partnership action 7) SDC / safety driving centre 8) road safety research and development 9) literasi road safety 10) road safety coaching dan 10) algoritma road safety

5. Post crasch care

   Penanganan pasca kecelakaan lalu lintas yang ditangani untuk peradilan dan secara terpadu antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah TAA untuk menghasilkan langkah tindak pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan/ modernisasi. Standar-standar yang dilakukan adalah : 1) sistem pendataan laka lantas, 2) sistem penanganan laka cepat dan terpadu, 3) sistem penanganan korban laka terutama korban fatalitas, 4) Sistem analisa data, 5) back up tim TAA, 6) Produk-produk : pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan/modernisasi 7) PSC / public safety centre 8) emergency dan contijency system.

TARC sbg kajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk :

1. Memodernisasikan melalui membangun konsep TMC dengan divisi-divisinya. Jangan lagi memahami TMC hanya CCTV melainkan berisi SSC, ERI, SDC, intan, Smart Management, dan diawaki cyber cops.
2. Membangun Traffic Attitude Record.
3. Menerapkan Demerit Point System.
4. Membangun TAA di setiap sat lantas sampai dengan ditlantas maupun korlantas.

5. Membangun Safety Driving Centre
6. Mengembangkan tilang online menjadi ELE
7. Membangun jabatan-jabatan fungsional di setiap direktorat maupun bag pada korlantas
8. Menerapkan SOP
9. Membuat PP, Perpres, Perkap dan Perkakor
10. Mengembangkan TARC ( Traffic Accidemt Research Centre) dan membangun Laboratorium road safety
11. Mengimplementasikan point-point amanat PBB yang berkaitan dengan helmet, speed, drink driving, seat belt, child restrain dan bisa menambahkan untuk penggunaan HP saat berkendara maupun melawan arah.
12. Menjadi anggota asosiasi atau forum-forum tingkat nasional dan internasional
13. Membangun Road Safety research and development.
14. Mengembangkan road safety expo
15. Pengembangan kajian kendaraan bermotor maupun test drive.
16. Memberikan standar standar bagi road safety policing
17. Menyajikan road safety index
18. Menyiapkan standar bagi master trainer trainer maupun training
19. Pengembangan forensic policing bagi polisi lalu lintas
20. Pengembangan PJR sbg polisi jalan raya
21. Mengembangkan kajian dan implementasi road safety pada kawasan (perbatasan, perkotaan, industri, toll, lintasan, pariwisata, antar moda transportasi, ASDP, dsb)
22. Mendukung pembangunan dan pengembangan smart city.

Masih banyak lagi yang dapat dikembangkan dari TARC.

Semua program dan sistem sistem yang dibangun adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Meningkatnya kualitas keselamatan berlalu lintas. Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Membangun budaya tertib berlalu lintas dan pelayanan prima di bidang road safety. Keselamatan adalah yang pertama dan utama. Sumber daya manusia adalah aset utama bangsa jangan menjadi korban sia sia di jalan raya.

**Stop pelanggaran**

**Stop kecelakaan**

**Keselamatan untuk kemanusiaan.**

# MODEL PEMIKIRAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN [38]

Polisi dalam pemolisiannya, secara preemtif preventif, represif hingga rehabilitasi memerlukan dukungan teknologi. Di era digital E Policing menjadi tumpuan.

Selain itu pengembangan Forensic Policing merupakan pendukung untuk mengatasi masalah keteraturan sosial yang di desain dengan nuklir, kimia, fisika, biologi maupun secara sosial. Teknologi kepolisian tentu saja dikembangkan berbasis pada riset atau penelitian.

Teknologi yang mendukung pola pemolisian dapat berfungsi secara proaktif dan problem solving.

Teknologi kepolisian untuk mendukung program preemtif, preventif, represif maupun rehabilitasi dibangun berbasis pada sistem pelayanan satu pintu yang berdasar pada sistem data komprehensif, dengan membangun : back office, aplication yang berbasis AI dan network yang berbasis IoT.

Pola pengamanan komuniti atau wilayah dengan model Harmoni ( pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi) dan pola pengamanan lalu lintas melalui model smart city. Implementasi teknis harmoni dan smart city setidaknya mencakup :

1. Cara pemetaan wilayah dan pengumpulan data sensus atau data dari stake holder road safety maupun data di lapangan yang dapat dikategorikan rawan kecelakaan/ black spot, rawan kemacetan / trouble spot.
2. Penggunaan infrastruktur dan teknologi pemetaan manual maupun elektronik

38 https://polisiindonesia.id/2024/04/12/cdl-model-pemikiran-teknologi-kepolisian/
https://transindonesia.co/2024/04/13/model-pemikiran-teknologi-kepolisian/
https://benuanews.com/model-pemikiran-teknologi-kepolisian/

3. Peta data dan cara menganalisa dengan mempertimbangkan yang berbasis pada : Kebutuhan,Kapasitas, Prioritas, Kecepatan dan Emergensi
4. Hasil analisa berupa prediksi antisipasi dan solusi bagi lalu lintas pada saat rutin atau ada hal hal khusus maupun kontijensi
5. Konsep dasar andalalin adalah smart city. Unsur unsur smart city dijadikan landasan pengkajiannya.
6. Laporan atau produk dapat dijadikan bahan masukan maupun untuk jurnal
7. Panduan penegakkan hukum atas pelanggaran.
8. Andalalin merupakan suatu model landasan berpikir ilmiah dasar pengambilan keputusan dalam penanganan road safety pada : a.Kawasan : industri, bisnis perbatasan, perkebunan, hutan, pariwisata, lintasan, kota, sungai, danau, daerah rawan bencana dll. b. Jalur jalur black spot dan trouble spot. c. Jaringan lalu lintas antar moda transportasi angkutan umum. d. ASDP angkutan sungai danau dan penyeberangan. Dsb

Keamanan yang ada rasa aman berbasis integrated system pada smart management dan smart operation :

1. Tersedianya back office. Dalam era digital para aparatur penyelenggara negara sudah saatnya membangun sistem back office, aplikasi dan network untuk dapat memberikan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Dalam back office ada sistem situpak :a. Situasi (peta/ pemetaan), b. Tugas-tugas pokok (job description dan job analysis), c. Pelaksanaan tugas (sistem pengoperasionalan : rutin, khusus dan kontijensi), d. Sistem administrasi (SDM, perencanaan, sarparas, anggaran), e. Pelaporan, f. Komando dan pengendalian. Model Back office adalah sebagai pusat K3i (kodal, koordinasi, komunikasi dan informasi): 1) Kodal (komando dan pengendalian) berisi sistem aplikasi untuk : mengawasi, memantau; 2). Struktur komando/perintah; 3). Analisa pengoperasionalan sehingga akan cepat dan memudahkan di dalam memberikan response.

2. Koordinasi : berisi sistem aplikasi jejaring/ network baik dalam internal maupun eksternal sebagai soft power.
3. Komunikasi : berisi sistem aplikasi komunikasi secara langsung/ melalui media baik dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal.
4. Informasi : berisi sistem aplikasi: a. filling and recording (sistem pencatatan dan pendataan), b. searching (cari dan temu), c. filtering (pengkategorian/ pengelompokan), d. ratting (peringkat), e. timming (waktu), f. Emergency (darurat), g. early warning (peringatan dini), h. Kontijensi (faktor alam, faktor kerusakan infrastuktur dan faktor manusia yang berdampak luas), i. rayonisasi.
5. Online sistem antar stake holder. Sistem-sistem online (terhubung) menjadi dunia baru di era digital yang penuh harapan, tantangan bahkan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia. Harapan di dunia terhubung akan banyak hal yang dalam kebutuhan kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat seakan menembuas ruang dan waktu. Di semua ujung, penjuru dan belahan dunia dapat diketahui dalam waktu yang sama (on time). Sebagai contoh mesin dan aplikasi pencarian, penjawaban berbagai informasi semakin cepat, semakin mudah, semakin akurat. Apa saja ada dalam dunia maya dan bisa menjadi nyata. Segala yang virtual telah menjadi aktual. Harapan hidup menjadi lebih baik akan terhubung dalam komunikasi, informasi dan transformasi.

Standar pelayanan harmoni adalah kecepatan, kedekatan dan menjadi ikon persahabatan.

Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan dalam Harmoni adalah pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum dan pelayanan kemanusiaan.

a. Pelayanan administrasi adalah berkaitan dengan pemberian surat keterangan kepolisian sebagai jaminan legitimasi atas keabsahan dan kebenaran atas apa yang disampaikan/ dijelaskan dalam surat tersebut.

b. Pelayanan keamanan adalah Pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan/ tanpa upaya paksa baik secara langsung/ melalui media untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman masyarakat.

c. Pelayanan keselamatan adalah pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan/ tanpa upaya paksa baik secara langsung/ melalui media untuk mewujudkan dan memelihara keselamatan, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.

d. Pelayanan hukum adalah tindakan kepolisian baik dengan/ tanpa upaya paksa baik secara langsung/ melalui media untuk membangun peradaban. Dalam menegakkan hukum polisi juga sebagai penegak keadilan, aturan dan sistem-sistem yang dibuat untuk mengawasi bukan untuk menakut nakuti.

e. Pelayanan kemanusiaan adalah tindakan-tindakan kepolisian yang dapat dikategorikan sebagai upaya-upaya mengangkat harkat dan martabat manusia/ dapat dikategorikan sebagai pejuang kemanusiaan.

f. Pelayanan informasi adalah pelayanan kepolisian untuk memberikan pencerahan, memotivasi, memberitahu hal baru dan mendorong orang lain berbuat baik.

Pelayanan kepolisian wajib dilakukan dengan prima sehingga secara signifikan dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses

Pengamanan lalu lintas untuk mencapai tujuan road safety dan mengimplementasikan UULLAJ melalui model smart city standar keberhasilannya dapat diukur melalui algoritma road safety yg mampu menunjukkan :

1. Tingkat kualitas keamanan lalu lintas
2. Tingkat keselamatan lalu lintas
3. Tingkat ketertiban

4. Tingkat kelancaran
5. Tingkat kualitas keselamatan berlalu lintas
6. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan
7. Terbangunnya budaya tertib
8. Pelayanan yang prima di bidang LLAJ
    a. Pelayanan keamanan
    b. Pelayanan keselamatan
    c. Pelayanan hukum
    d. Pelayananadministrasi
    e. Pelayanan informasi
    f. Pelayanan kemanusiaan

Semua itu pengukuranya ditunjukkan melalui algoritma yang berbasis info grafis info statistik info virtual yang on time real time dan any time. Adapun landasan dasar pemolisiannya dalam memanage road safety adalah melalui :

1. Manajemen kebutuhan
2, Manajemen kapasitas
3. Manajemen prioritas
4. Manajemen kecepatan
5. Manajemen emergensi

Manajemen di atas diimplementasikan dalam teknologi kepolisian dalam menangani lalu lintas melalui bidang :

1. Edukasi yang dikembangkan pada literasi road safety
2. Engineering yang berbasis pada penanganan black spot trouble spot, road safety kawasan ( perbatasan, hutan perkebunan pertanian, industri, lintasan, perkotaan, rawan bencana dll ). Selain itu juga untuk membuat model bagi antar moda transportasi

angkutan umum, angkutan sungai danau dan penyeberangan, kajian jalan toll, dan beebagai lokasi yang dapat dikembangkan menjadi sistem rekayasa jalan.

3. Penegakkan hukum proses penegakkan hukum berbasis pada big data dan sistem etle, e sidik
4. Regident registrasi dan identifikasi kendaraan maupun pengemudi untuk : a. memberikan jaminan legitimasi keabsaan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor, b. Legitimasi pengoperasionalanya, c. Forensik kepolisian, d. Mendukung penegakkan hukum, traffic attitude record dan de merit point system, e. Memberikan pelayanan di bidang lla dg standar prima.
5. K3i ( komunikasi komando pemgendaliaan koordinasi dan informasi ) yang mampu memantau dan memberikan pelayanan yang cepat dalam berbagai situasi baik rutin khusus maupun kontijensi.
6. Analisa dampak lalu lintas ( andalalin)
7. Model pengembangan It for road safety : a. ( tmc ( traffic management centre), b. ssc ( safety and security centre) , c. eri ( electronic registration and identificatiob) , d. sdc ( safety driving centre) , e. intan ( intellegent traffaic analysis) , f. etle ( electronic traffic law enforcement) g.. tar ( traffic attitude record) h. dmps ( de merit point system), i. smart management j. IRSMS ( integrated road safety management system) / sistem data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
8. Literacy road safety
9. Road safety coaching
10. Intellegent road safety media management ( IRSMM)
11. Algoritma road safety
12. Road safety for tourism
13. Road safety border

14. Road safety high way police
15. Big data
16. One gate service system
17. Cyber cops
18. Road safety research and development.
19. Safety driving/ riding centre)
20. Sistem pengamanan kota

Teknologi untuk Emergency/ contigency policing setidaknya mencakup mendukung :

1. Model Pemolisian Transplantasi sebagai penjaga, pengamat, jembatan penghubung, pelatih, back up system dsb, hingga yang diback up dapat berfungsi kembali.
2. Pola-pola pemolisian secara managerial setidaknya mencakup: 4 unsur: a. Kepemimpinan, b. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarana, prasarana dan anggaran), c. Operasional, d. Capacity building.
3. Implementasinya dapat mengacu pada community policing/ polmas
4. Back up personil yang bersifat ad hoc, gabungan dari berbagai fungsi maupun antar wilayah.
6. Perkantoran dengan membangun tenda-tenda lapangan, kontainer atau memanfaatkan tempat-tempat/ lokasi yang biasa diberdayagunakan.
7. Membangun posko-posko sebagai pusat K3i yang berisi peta-peta dan jaringan-jaringan elektronik maupun kontak- kontak person. Dapat dibuat pengkategorian : Merah : Rawan dua, Kuning : Rawan satu, hijau : kondisi normal. Model pergeseran pasukan untuk back up kontijensi dengan peta rute dari dan ke lokasi sasaran dengan berbagai alternatifnya. Pemberdayaan teknologi indormasi dan komunikasi.

8. Kesiapan Logistik, transportasi darat, laut maupun udara, ambulans, untuk evakuasi dan bantuan kemanusiaan.
9. Rumah sakit lapangan dan perlengkapan, obat obatan dan tenaga medisnya.
10. Operasionalnya dapat menerapkan model Asta Siap. Siap : Posko, Piranti Lunak, model penanganan lapangan, siap mitra, jejaring, personil, logistik, anggaran

Implementasi Emergency/ Contigency Policing dalam kondisi infrastruktur rusak dapat dibangun dari :

1. Tingkat Polda, Polres dan Polsek (yang bisa dibangun dengan tenda-tenda lapangan, bekas-bekas kontainer atau memanfaatkan tempat-tempat/ lokasi yang biasa diberdayagunakan. Selain itu juga dilengkapi pejabat (sebagai pemimpin, staf dan petugas-petugas lapangan). Membangun posko-posko sebagai pusat K3i yang berisi peta-peta dan jaringan-jaringan elektronik maupun kontak- kontak person sebagai jejaring. Situasi dan kondisi riil lapangan (bisa dibuat kategori (merah : Rawan 2, kuning : Rawan 1, hijau : kondisi normal), sistem-sistem pergeseran pasukan/ petugas-petugas untuk back up kontijensi (brimob, sabahara / pasukan gabungan), peta-peta rute dari dan ke lokasi sasaran ( dan berbagai alternatifnya).
2. Peralatan-peralatan komunikasi, HT, telepon, sistem-sistem komunikasi melalui media sosial, sebagai arana komunikasi, komando dan pengendalian serta koordinasi secara cepat dan real time.
3. Kendaraan bermotor (Sepeda motor, mobil double cabin, truck, bus, ambulan, alat berat) siap operator dan BBM-nya. Kesiapan bengkel lapangan, dan untuk penggantian suku cadang bila terjadi sesuatu kerusakan/ kecelakaan.
4. Helikopter, sebagai sarana evakuasi udara, pendistribusian bantuan, maupun untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

5. Gudang-gudang bantuan kemanusiaan dan pola-pola pendistribusian.Rumah sakit lapangan dan perlengkapan medisnya.
6. Posko-posko untuk pengendalian relawan dan pendistribusian bantuan dan sistem pendataan dan sebagainya.

Model teknologi pemolisian emergency/ contigency secara garis besar teknologi untuk menjabarkan dan mengimplementasikan :

1. Pola pemolisiannya secara makro sampai dengan mikro dibuat model dalam panduan aman nusa satu, aman nusa dua dan aman nusa tiga.
2. Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat diprioritaskan untuk mengembalikan dan menjaga keteraturan sosial
3. Menjaga dan mendukung proses recovery dan produktifitas. Segera mengatasi tatkala ada permasalahan maupun potensi konflik sekecil apapun dengan segera dan sampai tuntas agar tidak meluas
4. Mengamankan sumber daya yang ada
5. Menjaga dan mengamankan segala sesuatu yang kontra produktif
6. Strategi mitigasi mengatasi gejolak ekonomi dalam negeri
7. Pengamanan bantuan termasuk anggaran dan pendistribusiannya
8. Menjaga dan mengamankan Investasi yang ada
9. Penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial
10. Sistem informasi untuk deteksi dini atas perubahan Iklim dan bencana alam
11. Siap dalam menangani hal hal ekstrim dan kondisi terburuk sekalipun dari evakuasi, penyelamatan sampai rehabilitasi
12. Model pemolisian penanganan berbagai ivent nasional maupun internasional
13. Pola Pengamanan Pemilu serentam

14. Pola Penanganan KKB dan KKP
15. Pola penanganan Cyber Security
16. Manajemen media
17. Pola pelayanan publik
18. Pola sinergitas TNI Polri maupun dengan para stake holder lainnya sampai tingkat bawah

# MENGAPA KEAMANAN ITU PENTING DAN MENDASAR? [39]

Rumah rumah tatkala dilihat dari atas semakin tinggi semakin tidak nampak bentuknya. Semakin hilang bentuknya semakin seperti tumpukan tumpukan sampah. Rumah dan sampah saling berhubungan. Di mana ada kehidupan di situ sampah dihasilkan. Di dalam sesuatu yang nampaknya sampah ada kehidupan yang perlu makan.

Betapa besar kebutuhan primer bagi manusia sebagai mahkluk sosial, tatkala tidak tertata akan berdampak pada hidup dan kehidupan manusia. Semakin tidak tertata maka masalah akan merajalela dan tidak terkendali dan membuat masalah baru.

Aspek keamanan bagi hidup dan kehidupan dapat dilihat dari aspek lingkungan hidup : air udara, kenyamanan, kesehatan, keasrian dan kebersihan.

Aspek sosial budaya menjaga keteraturan sosial atas kerusakannya yang berdampak pada kontraproduktif bagi hidup dan kehidupan

Aspek ekonomis merawat potensi terjadinya masalah yang social cost nya tinggi yang kontra produktif

Menjaga peradaban agar tidak ada kerusakan yang berdampak pada keringnya atas kemampuan menata merawat dan menumbuhkembangkan keutamaan hidup. Kemanan sumber daya dan energi berdampak agar tidak semakin rusak dan menguapnya energi bagi hidup dan kehidupan.

Masih banyak aspek yang harus diamankan dan dikaji dalam gatra kehidupan. Keamanan juga bagi terciptanya bagi energi baru yang terbarukan. Tata kelola dan rekayasa dapat dilakukan dengan baik benar dan kreatif serta produktif.

Keamanan yang mendukung hidup dan kehidupan :

39 https://transindonesia.co/2024/04/13/mengapa-keamanan-itu-penting-dan-mendasar/

1. Adanya Keamanan dan Rasa Aman warga masyarakat
2. Harmoni dalam Kebhinekaan
3. Tegak dan adanya Budaya Patuh Hukum
4. Pemberdayaan Sumber Daya bagi Keadilan Sosial
5. Penanganan Konflik Secara Beradab
6. Semakin Manusiawinya Manusia
7. Terwujud dan Terpelihara Keteraturan Sosial
8. Transparan dan Akuntabel
9. Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
10. Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada publik berstandar Prima

Suatu bangsa yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mengurus bangsanya sendiri dangan adanya daya tahan, daya tangkal atas berbagai gerusan dari dalam negeri maupun dari luar negeri maupun daya saing.

Selain itu juga memiliki kemampuan memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya.

Keamanan dalam negeri adanya keteraturan sosial secara: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya secara pribadi, di ruang publik, profesi dan berbagai pekerjaan, lingkungan hidup, dan mayantara yang dapat mendukung produktifitas maupun upaya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Keamanan dalam negeri yang diwujudkan dalam keteraturan sosial ditunjukan hukum dapat ditegakkan, para penegak hukum mampu menjadi ikon kepercayaan publik sehingga terjaminnya keamanan segala sumberdaya negara dari manusianya, kekayaan alamnya, ideologi, politik ekonomi dan sosial budayanya untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang.

# PENCEGAHAN KEJAHATAN [40]

Pencegahan Kejahatan merefleksikan pola pemolisian yang proaktif dan memecahkan masalah.

Dimana Pencegahan kejahatan merupakan model Pemolisian yang kontemporer atau kekinian

Mencegah kejahatan juga merupakan tindakan yang holistik atau sistemik yang mencakup :

1. Kebijakan dari para pemimpin dibsemua level.
2. Pemimpin yang transformasional.
3. Membangun tim transformasi (back up system).
4. Membangun kemitraan bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
5. Mencegah kejahatan dengan membangun literasi.
6. Mencegah kejahatan dimulai dari kurikulum pendidikan.
7. Menerapkan Community Policing dalam pemolisiannya.
8. Membangun dan menerapkan Electronic Policing.
9. Membuat SOP yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman yang dijabarkan pada:
    a. Job description dan job analysis.
    b. Standar keberhasilan kerja.
    c. Sistem penilaian kinerja.
    d. Sistem reward and punishment.
    e. Etika kerja.

40 https://polisiindonesia.id/2024/04/28/cdl-pencegahan-kejahatan-2/
https://www.merdekanews.co/read/28689/Pencegahan-Kejahatan

10. Membangun pilot project.
11. Menyiapkan SDM yang profesional cerdas bermoral dan modern.
12. Melakukan analisa evaluasi.
13. Melakukan pola pola pengembangan.

# LITERASI POLISI DAN PEMOLISIANNYA MEMBANGUN PERADABAN [41]

Memaknai peradaban yang begitu kompleks namun setidaknya dapat dipahami dengan memahami aturan dan menerapkannya dalam kehidupan untuk adanya keteraturan sosial bagi semakin manusiawinya manusia.

Hubungan Polisi dengan peradaban melalui pemolisiannya dapat dipahami dari penegakan hukum dan keadilan bagi keteraturan sosial dan bagi semakin manusiawinya manusia.

Polisi dan pemolisiannya menegakan hukum sejatinya bagi pembangunan, menjaga dan merawat peradaban.

Hukum digunakan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang kontra produktif.

Semakin patuh hukum, keteraturan sosial terjaga dan kemanusiaan semakin meningkat kualitas hidupnya, dapat dikatakan semakin beradab.

Bagaimana membangun peradaban dalam pemolisian? Dengan membangun literasi. Literasi pilar peradaban. Literasi yang cukup atau memadai maka akan ada pencerahan, pengkayaan, pemberdayaan dan sebagai Polisi pemolisiannya menjadi : profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya.

Membangun literasi dengan berbasis moral pada keutamaannya yaitu bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Pendidikan menjadi dasar membangun literasi, melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab dan disiplin bagi keutamaannya.

41 https://polisiindonesia.id/2024/05/09/cdl-literasi-polisi-dan-pemolisiannya-membangun-peradaban/
https://www.merdekanews.co/read/28925/Literasi-Polisi-dan-Pemolisiannya-Membangun-Peradaban

Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk mengimplementasikan melalui pemolisiannya.

Literasi dapat dimulai dari :

1. Lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni.
2. Referensi yang memadai.
3. Manajemen Media yang menjadi wadah bagi produk produknya.
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan.
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah.
6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang.
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaanya.
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya maupun infrasyruktur dan teknologinya.

# MEDIA PILAR LITERASI? [42]

Media di era digital menjadi arena atau ruang yang dipilih dan digunakan untuk berbagai kepentingan hidup dan kehidupan manusia di semua gatra kehidupan bisa dilakukan di sana. Dari masalah pribadi sampai masalah politik kenegaraan, ekonomi, sosial budaya hingga pelayanan publikpun bisa dilakukan.

Warga pengguna dunia virtualpun memiliki nama (warga net atau netizen). Mereka menjalankan aktivitas dalam dunia virtual. Media terutama media sosial mampu menggeser media konvensional. Informasi dan komunikasi begitu cepat.

Apa saja ada dan apa saja bisa bahkan dimana saja siapa saja pun bisa. Media menjadi pilar literasi yang menjadi arena pencerahan, pencerdasan, pengkayaan, pemberdayaan, transformasi pengetahuan, dan banyak hal positif bagi hidup dan kehidupan lainnya.

Media sebagai pilar literasi juga untuk mengatasi dampak kemajuan teknologi.

Berkembang pesatnya informasi berdampak pada munculnya "post truth".

Post Truth merupakan era penumpulan daya nalar yang dapat berdampak mengobok obok emosi dan persepsi publik yang dapat dikendalikan untuk menimbulkan potensi konflik. Logika tidak lagi diutamakan yang dipentingkan emosional spiritual. Kemasan primordialisme digelorakan agar kebencian semakin membara. Tanpa pikir panjang peradilan sosialpun merebak di semua lini.

Saling menuduh saling menyalahkan saling menghina saling mengobok obok jiwa hingga harga diri. Tanpa sebutir peluru keluar moncong laras senjata perang dapat dimulai.

42 https://transindonesia.co/2024/05/09/media-pilar-literasi/

Post truth kontra produktif, pembodohan menggelora di mana mana. Era post truth menjadi ajang pemutar balikkan fakta. Isi media diacak adul sehingga antara fakta dan kebohongan bahkan kemasan dalam primordialisme akan dapat dikembangkan menjadi pemicu konflik. Dari melempar issue, melabel hingga ujaran ujaran kebencian.

Opini publik dapat diobok obok dan dibingungkan dengan primordialisme untuk menggerus nalar dan ujungnya pada kebencian. Tatkala kebencian sudah merasuk di dalam opini publik tinggal menunggu triger untuk meledakkannya.

Berbagai masalah di era post truth yang berdampak pada gangguan keteraturan sosial antara lain:

1. Premanisme yang tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, dan Kesewenang wenangan
2. Birokrasi yang lebih menekankan pada pendekatan personal yang berdampak buruknya pelayanan kepada publik
3. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika. Berbagai bentuk pelanggaran Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal
4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya
5. Faktor sumber daya manusia tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang redah yang sarat dengan primordialisme
6. Faktor politik dan kebijakan publik, politik yang terlambat atau tidak mampu menghadapi perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi, perubahan begitu cepat.

7. Era post truth, hoax, serangan siber, dsb melalui media
8. Gaya hidup hedonisme yang berdampak tergerusnya nilai nilai budaya luhur
9. Lemahnya penegak hukum dan penegakan hukum dan sistem hukumnya
10. Sistem yang manual, parsial dan konvensional sehingga berdampak potensi penyimpangan yang begitu besar

Manajamen media bagi literasi bagi polisi dan pemolisiannya di era digital menjadi bagian penting bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Berita atau informasi apapun dapat diperoleh dengan cepat dan mampu menembus sekat batas ruang dan waktu.

Berbagai isu yang diputarbalikkan dalam suatu pembenaran dapat dicounter dan menunjukan kebenarannya. Media pilar literasi menjadi jembatan hati, penyambung lidah, corong informasi bahkan sebagai sistem transformasi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun sebaliknya, media yang bukan bagi literasi menjadi kontra produktif sebagai penyerang, perusak bahkan pembunuh karakter. Saling serbu dengan model proksi dari pemberitaan buruk, hoax hingga fitnah bisa ditebarkan dalam berbagai konflik kepentingan.

Post truth bukan kebohongan semata melainkan olahan fakta dan kebohongan yang diviralkan melalui berita hoax untuk mempengaruhi otak hati hingga pada suatu keyakinan pembenaran dijadikan kebenaran, bahkan yang membuatnyapun meyakini sebagai kebenaran. Efek dari era post truth kebenaran dikalahkan dengan pembenaran.

Media bagi literasi menjadi standar fakta kebenaran maka, menafikan pembenaran yang membodohi, menjerumuskan bahkan merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media pilar literasi akan mampu untuk:

1. Menjadi standar informasi atau berita yang benar sesuai fakta dan data

2. Mampu menginspirasi yang artinya kreatif dan inofatif
3. Mendorong orang lain berbuat baik dan benar / membangun budaya atau peradaban
4. Mampu memberitakan hal hal yang up to date
5. Mampu mengcounter issue
6. Mampu membuat sesuatu yang fun indah dan menghibur
7. Penumbuhkembangan literasi

Media literasi menjadi basis keteraturan sosial dunia virtual. Di era digital, dunia virtual menjadi wahana bagi hidup dan kehidupan.

Sebaliknya, juga dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas. Pembunuhan karakter hingga mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Hoax menjadi cara pembodohan penyesatanpun secara virtual.

Media literasi dapat menjadi:

1. Media informasi
2. Media komunikasi
3. Media sosialisasi
4. Media edukasi
5. Media kepentingan politik
6. Media untuk labeling
7. Media bisnis
8. Media penggalangan solidaritas
9. Media penghakiman sosial
10. Media membangun jejaring sosial
11. Media laboratorium sosial

Dan masih banyak fungsi lainnya.

Melalui media literasi pemetaan wilayah, masalah dan potensi dari berbagai kepentingan dapat diberdayakan untuk:

1. Memberdayakan primordial sebagai kekuatan kebhinekaan yang mempersatukan.
2. Menggunakan soft power dan smart power dalam berbagai profesi menjadi jembatan komunikasi dan solidaritas
3. Membuka peluang bisnis dan pelayanan publik secara virtual
4. Mendapatkan dukungan viewer maupun follower dari warganet
5. Mengetahui dan memetakan opini publik melalui intelejen media
6. Memberikan inspirasi, motivasi atas fungsionalisasi media sosial secara luas tentu akan berdampak pada perilaku netizen dengan kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Media literasi akan menjadi bagian penting untuk bagi kinerja intelejen dari : pengumpulan data, analisa, produk dan networking ini dapat dilakukan dengan memberdayakan media sosial sebagai bagian dari laboratorium sosial. Dalam kehidupan masyarakat boleh dikatakan ada juga dalam media sosial. Dari pemetaan pembuatan pola polanya dan pengumpulan data maka akan dapat dihubung hubungkan. Dapat dianalisa untuk menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya.

Algoritma tadi dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi mengantisipasi dan memberi solusi. Intelejen media akan membantu menjembatani untuk terus berkembangnya fungsi media sosial secara positif dan mencerdaskan para warga net agar tidak hanyut dlm berita hoax. Selain itu juga bagi penegakkan hukum warga net yang dengan sengaja memperkeruh atau mengganggu keteraturan sosial.

Media literasi dapat mendukung:

1. Implementasi E Policing yang mencakup adanya : Back office, Application yang berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya sebagai prediksi

antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, on time dan any time.

2. Dapat menjadi Pusat K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi) dalam memberikan pelayanan prima di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan secara prima.
3. Diimplementasikan dalam Smart Management dan Smart Operation. Diawaki petugas polisi siber (cyber cops)
4. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas terutama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya.
5. Mendukung Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota)
6. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem.

# PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN IKON KUALITAS LITERASI DALAM INSTITUSI YANG DIPIMPINNYA [43]

Pemimpin menjadi ikon bahkan pusat dari institusi, karena pemimpin sumber energi. Pemimpin dan kepemimpinannya terefleksi dari kualitas literasi yang dibangunnya. Literasi dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan keutamaan melalui kebaikan perbaikan yang terefleksi perubahan mind set perilaku organisasinya.

Literasi dengan demikian merupakan sistemik untuk merubah mind set yang dapat dikategorikan adanya:

1. Keteladanan
2. Moralitas pemimpinnya dari kebijakannya yang bijaksana
3. Komitmen dan konsisten mengimplementasikan keutamaannya
4. Perilaku organisasinya menunjukan tingkat : profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya dan modernitasnya
5. Sistem administrasinya dibangun berbasis : Hukum, aturan hingga SOP, infrastruktur yang modern dengan sistem saling terhubung (on line) yang berbasis elektronik
6. Terbangun budaya malu jika berbuat cela
7. Birokrasi berbasis riset, kerja, kompetensi dan prestasi yang bekerja secara proaktif dan problem solving
8. Soft Power dan Smart Power
9. Kesiagaan menghadapi masalah emergensi maupun kontijensi

43 https://posbekasi.com/2024/05/10/pemimpin-dan-kepemimpinan-ikon-kualitas-literasi-dalam-institusi-yang-dipimpinnya/

10. Pelayanan Publik yang berstandar Prima

11. Citra dan tingkat kepercayaan publik tinggi, dsb.

Literasi semestinya menjadi standar penilaian tingkat keberhasilan pemimpin dan kepemimpinannya.

Tatkala literasi terbangun dengan baik maka akan ada Pencerahan, Pengkayaan, Pemberdayaan, Profesionalisme, Kreatif dan inovatif yang cerdas, Moralitas dan Modernitas. Keutamaan akan terimplementasi dalam perilaku organisasi.

Demikian juga sebaliknya tatkala literasi terabaikan maka apa yang aktual berbeda bahkan bertentangan dengan yang ideal

# PASSION SANG PEMIMPIN [44]

Pemimpin sejati memiliki passion sebagai Kusuma Bangsa, Patriot, Senopati, Pemimpin dan Teladan dalam Spiritual maupun Keimanan dan Kepanjangan Tangan Tuhan.

Pemimpin itu memahami bukan minta dipahami. Pemimpin itu rendah hati, pemaaf dan guru yang menginspirasi, memotivasi, memberi solusi bahkan menjadi sumber enerji.

Selain itu Pemimpin tidak boleh cengeng. Cengeng dalam konteks ini terefleksi dari pikiran, perkataan dan perbuatan : Mencela, Menyalahkan, Mengeluh, Minta dipahami, Mudah tersinggung, Menyimpan Dendam dan Amarah, Jumawa, Tamak, Menuntut ini itu, Tiada Rasa Syukur dan masih banyak lagi.

771Sang Pemimpin passion menjadi kekuatannya. Passion di sini dipahami atas tekad dan keyakinannya akan keutamaan yang akan dicapai, tahan menderita, dan berani menghadapi segala tantangan maupun pemderitaan dengan bangga, gembira dan penuh rasa cinta.

Passion Sang Pemimpin dapat dilihat dari Pikiran dan Perbuatannya :

1. Membangun dan menumbuhkembangkan Literasi.
2. Kebijakannya Bijaksana.
3. Menginspirasi.
4. Memotivasi.
5. Memberi Solusi.
6. Mengajarkan Kebaikan dan Perbaikan.
7. Berani Menyampaikan akan hal hal yang Baik dan Benar.
8. Memiliki Komitmen, Integritas, Kompetensi dan Keunggulan.

44 https://polisiindonesia.id/2024/05/12/cdl-passion-sang-pemimpin/

9. Berpikir Proaktif dan problem solving.
10. Kreatif dan Inovatif serta Produktif.
11. Belajar dari Kesalahan.
12. Siap di Masa Kini.
13. Mampu menyiapkan Masa Depan yang lebih baik.

Tidak hanya itu, Pemimpin anti untuk cengeng, karena sikap cengeng menunjukan produk hutang budi, karbitan dan akan gampang menjadi jumawa, tamak dan amarah.

# UNDANG UNDANG KEPOLISIAN [45]

Undang Undang Kepolisian merupakan panduan atau landasan dasar polisi menyelenggarakan tugasnya melalui pemolisiannya.

Pemolisian dapat dipahami sebagai segala usaha dan upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Tidak hanya itu saja, Pemolisian dapat dimplementasikan dengan melihat corak masyarakat dan kebudayaannya.

Pemolisiannya dapat dipahami dan dijabarkan dalam pendekatan :

1. Filosofis.
2. Geo politik dan geo strategis.
3. Historis.
4. Sosiologis.
5. Yuridis.
6. Fungsional.
7. Operasional.
8. Pelayanan publik.

Penjabaran 8 pendekatan dibatas dapat dijarkan dalam point point sebagai berikut :

1. Secara Filosofi Polisi dan Pemolisiannya keutamaannya adalah untuk : Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban. Polisi dalam Pemolisiannya dapat menunjukan sebagai Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban dan Pejuang Kemanusiaan.
2. Secara Geopolitik dan Geo Strategis Polisi dan Pemolisiannya diimplementasikan dengan pendekatan Keindonesiaan yang berbasis

45 https://polisiindonesia.id/2024/05/12/cdl-undang-undang-kepolisian/ https://transindonesia.co/2024/06/15/undang-undang-kepolisian-2/

pada : Pancasila, UUD 45, NKRI, Kebhinekaan. Melihat pada kebijakan politik global, nasional, regional maupun lokal. Kedaulatan bangsa dan negara merupakan syarat mutlak bagi suatu bangsa untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Dengan demikian untuk menunjukkan kedaulatan setidaknya dalam pengelolaan Asta Gatra (8 gatra yaitu : geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

Delapan pendekatan tersebut dapat dikembangkan dalam hukum, teknologi,dan media, yang dapat digunakan mencegah, mereduksi dan mengatasi konflik antar sesama anak bangsa dapat menggunakan isu isu dari gatra tersebut dari semua lini.

3. Secara Historis menjadi sangat penting dan mendasar untuk mengimplementasikan dan mengembangkan model dan pola pemolisiannya. Pada konteks ini juga akan berkaitan dengan : Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab.
4. Secara Sosiologis dikaitkan upaya upa mewujudkan keamanan dan rasa aman yang menjadi co producer dan tidak kontra produktif. Hal ini dapat dipahami dalam konteks keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri sebagai wujud keteraturan sosial untuk mendukung produktifitas agar masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang yang anti premanisme dan anti KKN.

   Dalam konteks melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum serta rehabilitasi maka keamanan dan rasa aman wujud harmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Secara Yuridis dapat dipahami polisi dalam pemolisiannya sebagai penegak hukum dan keadilan dalam masyarakat yang modern dan demokratis yang setidaknya mencakup :
   a. Supremasi hukum : hukum menjadi panglima dapat tegak dan dipatuhi oleh masyarakatnya serta para penegak hukumnya dapat dipercaya sebagai ikon kebenaran dan keadilan
   b. Adanya jaminan dan perlindungan HAM. Kemanusiaan menjadi dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara, karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa.
   c. Transparansi dalam berbagai pelaksanaan tugas penyelenggaraan

negara yang terukur

d. Dipertanggung jawabkan atau adanya akuntabilitas secara : moral, hukum, administrasi, fungsional bagi institusi maupun sosial bagi masyarakat.

e. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

f. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian.

6. Secara Fungsional dapat dilihat pada Fungsi utama, Fungsi Pendukung dan Fungsional dalam model pemolisiannya yang berbasis wilayah (in ternasional,nasional,regional maupun lokal), berbasis fungsi maupun berbasis dampak masalah dalam pemolisiannya di bidang :
   a. Preemtif
   b. Preventif
   c. Represif
   d. Rehabilitasi
7. Secara Operasional dapat dilihat dari pola pemolisiannya di era kenormalan baru, era digital melalui Smart Policing atau pemolisian cerdas yang berfungsi mengharmonikan antara model pemolisian yang konvensional, Pemolisian elektronik sebagai model pemolisian di era digital, model pemolisian forensik yang dioperasionalkan :
   a. Rutin
   b. Khusus
   c. Emerjensi dan Kontijensi.
8. Secara Pelayanan Publik di bidang :
   a. Pelayanan Keamanan
   b. Pelayanan Keselamatan.
   c. Pelayanan Hukum
   d. Pelayanan Administrasi
   e. Pelayanan Informasi
   f. Pelayaman Kemanusiaan.

Polisi dapat dilihat sebagai Petugas, Fungsi maupun Institusi yang didirikan sebagai alat negara untuk mewujudkan dan memelihara keamanan

dan rasa aman dalam masyarakat (keamanan dalam negeri).

Keamanan dalam negeri dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberdayakan kekayaan dan keindahan serta kebhinekaan salah satunya melalui masyarakat yang sadar wisata.

Kedaulatan suatu bangsa ada karena kecerdasan masyarakatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu

1. Mampu mengatasi berbagai masalah idiologi bangsa.
2. Political will yang kuat bagi upaya upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mampu menghasilkan produksi dan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.
4. Sosial budaya bangsa mampu ditunjukan sebagai ikon peradaban bangsa.
5. Keamanan dan rasa aman warga masyarakat secara fisik, psikis, siber maupun forensik dapat dirasakan dan mampu mendukung produktifitas.
6. Infrastruktur dan sistem sistem pelayanan publiknya berkualitas prima dalam suatu birokrasi yang rasional.
7. Pendidikan mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.
8. Sistem sistem pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial, melalui sistem monitoring dan evaluasi serta sistem akuntabilitas kepada publik yang transparan dan akuntabel.
9. Sistem sistem yang siap dalam kondisi emerjensi maupun kontijensi.

Makna dari negara berdaulat dapat dilihat kemampuan berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri khususnya bagi hajat hidup dan kehidupan masyarakatnya. Terjaganya keteraturan dan keamanan di dalam negeri serta mampu berkiprah di dalam hubungan antar bangsa yang mendapatkan pengakuan bahkan dukungan secara internasional.

# BAGIMU NEGERI, PASSION SESPIM LEMDIKLAT POLRI [46]

Membahas makna passion akan sangat luas dan mendalam, berbagai unsur bisa menjadi bagian makna dari passion.

Makna passion secara mendasar dan berlaku umum dimaknai dalam spirit kesadaran pengabdian keberanian kepahlawanan pengorbanan tanggung jawab memberikan yang terbaik, mampu bertahan walau dalam penderitaan kesusahan dan tantangan untuk mencapai keutamaan.

Tidak hanya itu. Passion Sespim Lemdiklat Polri bagi bangsa negara masyarakat dan kemanusiaan dan institusi Polri dapat dimanai adanya spirit : " Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami", yang merupakan passion dari pendekatan patriotisme. Jiwa raga merupakan simbol sesuatu yang terbaik dan paling berharga, secara total bagi kejayaan bangsa dan negara.

Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah demi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, agar semakin berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal hingga mampu berdaya saing. Spirit tersebut tanpa sadar menunjukan pada kompetensi, profesionalitas, moralitas, akuntabilitas hingga modernitasnya. Selain itu juga memproteksi bersinerginya dengan para mafia maupun tidak melakukan tindakan yang kontra produktif.

Model pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri

Model pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri merupakan dialog peradaban sebagai ejawantah dan implementasi Polisi dalam pemolisiannya ( kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban).

46 https://polisiindonesia.id/2024/05/17/cdl-bagimu-negeri-passion-sespim-lemdiklat-polri/

Dialog peradaban, diimplementasikan melalui kurikulum yang mencakup olah jiwa, olah rasa, olah raga dan olah pikir yang berbasis pada ilmu kepolisian.

1. Olah jiwa dikaitkan dengan moralitas dan adab pemimpin dalam kepemimpinannya
2. Olah rasa dikaitkan dengan seni budaya dan pariwisata (art policing), seni budaya adalah pilar peradaban.
3. Olah raga dikaitkan dengan kebugaran dan kesehatan jasmani
4. Olah pikir yang berbasis ilmu kepolisian dikaitkan dengan smart policing yang dijabarkan dalam program program unggulan, dikaitkan dalam berbagai kegiatan tri dharma perguruan tinggi (penelitian, akademik dan bhakti masyarakat) diwujudkan dalam program :

   a. Dialog kebangsaan

   b. Leader branding

   c. Manajemen media

   d. Art policing

   e. Bhakti masyarakat dan bhakti sosial dalam KKP, KKDN, KKLN

   (emergency and contigency policing, smart city, manajemen konflik, manajemen resiko, masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata.

   f. Debat publik

   g. Leader expo

   h. Cooling system

   i. Kapita selekta yang dikaitkan dengan isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat : idiologi, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, keamanan, pertahanan, teknologi dan sebagainya.

Dengan passion ” bagimu negeri jiwa raga kami” alumni Sespim Lemdiklat Polri sebagai Pemimpin di masa depan keunggulannya dapat dikategorikan sbb :

1. Memiliki karakter kepemimpinan transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme
3. Memiliki pemahaman dan mampu mengimplementasikan keutamaan polisi dalam pemolisiannya
4. Memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emerjensi maupun kontijensi
6. Memiliki keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu
7. Memiliki kesiapan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini
8. Memiliki kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik
9. Mampu menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern
10. Mampu membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional

# BIROKRASI RENDAH LITERASI [47]

Birokrasi yang rendah literasi akan cenderung pokoknya tugas dan lalai tugas pokoknya. Yang dibangun model patrimonial dengan pendekatan personal. Pelayanan publiknya sarat dengan konflik kepentingan dan menjadi peluang untuk adanya penyimpangan dan penyalahgunaan.

Orientasinya bukan pada orientasi kerja atau melayani masyarakatnya melainkan pada bagaimana menguasai pada posisi posisi yang dianggap strategis. Diskresi birokrasi bagai sabdo pandito ratu yang sarat dengan tekanan dan penekanan yang otoriter.

Semua seakan diambil alih urusan personal dicampur aduk dalam urusan profesi sehingga yang dihasilkan kaum penjilat yang mudah diakali dan kerjanya akal akalan.

Literasi yang rendah menjadi beban birokrasi dan membuat sistem korup pendekatan personal meraja lela. Apa yang dipikirkan ada pada kewenangan, kekuasaan, yang bukan untuk melayani rakyatnya melainkan sebatas menyenang nyenangkan ndoronya.

Hal tersebut terus terbawa sampai ke golongan tinggipun masih hobi menakut nakuti dan gampang ditakuti. Belum mati saja sudah jadi hantu yang kerjanya menakut nakuti, berujung pada extortion maupun bribery.

Senang dengan hal ilegal semua dianggap pasar dan semua yang berkaitan dengan sumber daya akan ditransaksionalkan ” wani piro, oleh piro?”.

Birokrasi literasi rendah kinerjanya pokoknya tugas jauh dari profesional, cenderung menjadi KKN. Pendekatan personal dalam birokrasi patrimonial akan terus dibangun klik (clique).

47 https://polisiindonesia.id/2024/05/24/cdl-birokrasi-rendah-literasi/
https://transindonesia.co/2024/05/24/birokrasi-rendah-literasi/

Reformasi tidak sebatas struktural maupun instrumental melainkan secara kultural. Reformasi birokrasi landasannya literasi. Membangun literasi merubah mind set dari old mind menjadi new mind.

Kaum old mind biasanya mendominasi dan mati matian mempertahankan status quo karena mereka takut kehilangan previlednya. Kaum rendah literasi kerja seakan keras melampaui batas tetapi hasilnya tidak nampak karena tidak menemukan keutamaannya dan sebatas pragmatis. Kaum rendah literasi mengobati ala balsem, sehatnya temporer dan kerja ala fire brigade atau pemadam kebakaran.

Membangun literasi dalam birokrasi bagai putri duyung yang mendamba. Putri duyung ada dua golongan, golongan manusia dan golongan binatang. Ia ingin merubah ekornya menjadi kaki manusia, tetapi bagaimana. Ia sadar manusia mengikuti binatang itu gila. Binatang ikut manusia tidak mungkin. Kalau dipotong mati.

Membangun literasi birokrasi setidaknya dari lembaga pendidikan khususnya bagi calon pemimpin, karena para pemimpin akan menjadi agen perubahan. Mereka bukan ekor melainkan kepala.

Pemimpin itu pemikir bukan manut ala unthul munyuk yang ala kerbau dicocok hidungnya. Kritis dan berani memperjuangan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Kaum rendsh literasi akan sulit diajak berpikir maju karena kemampuannya sebatas menjilat ke atas dan menyepak ke samping, serta menekan ke bawah

# LITERASI DAN PELAYANAN PUBLIK [48]

Institusi yang literasinya memadai profesionalisme dalam pelayanan publiknya prima, sekalipun tidak diawasi, dipaksa atau diancam. Literasi menunjukan core value yang aktual sejalan dengan yang ideal. Tingkat kesadaran, tanggung jawab maupun disiplinnya tinggi. Pola bekerjanya untuk mencapai mewujudkan keutamaannya.

Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Dengan demikian model model pemolisian secara : preemtif, preventif, represif maupun rehabilitasi tingkat keberhasilan dalam pelayanan publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan dilihat dan di ukur dari standar operasional procedure nya ( SOP).

SOP terdiri dari :

1. Job description dan Job Analysis
2. Standar Keberhasilan Pelaksanaan Tugas
3. Sistem Penilaian Kinerja
4. Sistem Reward and Punishment
5. Etika Kerja

Literasi secara umum dipahami adanya perubahan mind set untuk mengerjakan tugas pokoknya dengan kesadaran tanggung jawab dan disiplin dengan kualitas prima.

Merubah mind set memerlukan proses dan perjuangan panjang, langkah langkah membangun literasi yang memadai setidaknya mencakup :

48 https://transindonesia.co/2024/05/24/literasi-dan-pelayanan-publik/

1. Kebijakan yang menjadi political will yang mendukung reformasi birokrasi khususnya secara kultural
2. Pemimpin yang transformatif yang mampu menjadi ikon untuk perubahan
3. Menerapkan Strategi Strategi Membangun Birokrasi yang Rasional
   a. Bidang Administrasi yang mencakup: perencanaan, SDM, Logistik dan Anggaran
   b. Bidang Operasional : Rutin, Khusus, Kontijensi
   c. Capacity Building : Kreatifitas dan Inovasi
4. Membangun Sistem Pelayanan Publik yang Prima
5. Membangun Tim Transformasi sebagai Tim Manajemen ( back up system)
6. Membangun sistem sistem pelayanan secara on line yang berbasis elektronik
7. Menyiapkan Aturan, Hukum sd SOP sebagai acuan dan landasan kerja
8. Membuat Program Program Unggulan
9. Menerapkan pada Pilot Project
10. Monitoring, Evaluasi, penanganan kelemahan atau kesalahan dan Mengembangkan bagi yang berhasil

Point point di atas bisa dikembangkan sesuai fungsi, corak masyarakat dan kebudayaannya.

Literasi tidak sebatas yang benda tetapi juga yang tak benda untuk adanya pelayanan prima di bidang :

1. Pelayanan Keamanan
2. Pelayanan Keselamatan
3. Pelayanan Hukum
4. Pelayanan Administrasi
5. Pelayanan Informasi
6. Pelayanan Kemanusiaan.

# PEMIMPIN WAJIB URUN ANGAN DAN TURUN TANGAN [49]

Pemimpin pemikir sang pemimpi yang memiliki visi untuk melihat jauh ke depan dan memiliki tekad mewujudkan mimpinya. Sang pemimpin memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kebijakannya mampu mewujudkan mimpinya.

Pemimpin wajib urun angan sebagai sang pemikir untuk menyumbangkan ide dan gagasan cerdas yang terkonsepkan dalam perencanaan dan program serta implementasinya.

Makna pemimpin wajib urun angan adalah pemimpin memiliki konsep untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap di masa kini serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Di sini bermakna sang pemimpin sebagai sang pencerah pemberi inspirasi, pemberi motivasi, gudang solusi dan berbagai pemikiran cerdas lainya.

Adapun pemimpin wajib turun tangan ini bisa dimaknai pemimpin melihat dan berperan dalam menangani mengatasi dan menjalan program untuk mewujudkan mimpinya  untuk memahami keluhan dan permasalahan secara riil atau sesuai fenomena yang ada.

Pemimpin yang mau turun tangan akan lebih cepat mewujudkan mimpinya. pemimpin yang lambat dan tindak peka dan peduli akan masalah lapangan akan berdampak kebijakan dan kinerjanya. Bisa jadi ini yang sering dilabel pangkodamar (panglima komando dalam kamar)? tatkala tidak di dalam operation room atau back office dapat dikatakan ya.

Namum tatkaala berada di operation room atau back office ini merupakan bagian dr turun tangan untuk menganalisa mengevaluasi dan mengambil keputusan.

49 https://transindonesia.co/2024/05/24/pemimpin-wajib-urun-angan-dan-turun-tangan/ https://jambiindependent.disway.id/read/684607/pemimpin-wajib-urun-angan-dan-turun-tangan

Bagaimana dengan pemimpin yang tidak urun angan dan enggan turun tangan? ini sebenarnya bukan pemimpin, karena ia tidak tahu apa yang menjadi tugas tanggungjawabnya. Inilah yang sering dikatakan karbitan yang dipaksakan karena demi kepentingan atau sebatas dari surat perintah untuk memimpin.

Dampaknya pasti bukan bagi kemaslahatan malahan sebaliknya dan bisa menuju kehancuran dan beban bagi banyak orang.

Pemimpin yang hanya urusan lapangan dan tidak memiliki angan angan atau mimpi ini juga bukan pemimpin. Mereka digolongkan pelaksana yang memaksakan memimpin jadi ya sama saja hanya lari lari tanpa arah dan tujuan.

Pemimpin itu terpanggil karena bakat atau kompetensinya dan membiarkan dirinya masuk ke dalam lingkaran situasi yang membuatnya tampil beda menonjol diantara banyak orang.

kemampuannya melihat masa depan kemampuan dan kemauannya mewujudkan angannya dilaksanakan dengan kemampuannya dalam turun tangan.

Pemimpin ini tidak di karbit tidak ditandai simbol strukturasi organisasi semata, namun ditunjukkan dari kinerja dan pengakuan atas pikiran dan kinerjanya yang mampu memberi solusi dan senantiasa menginspirasi.

Pemimpin ditandai dengan kecerdasannya dalam urun angan dan kepiawaiannya dalam turun tangan.

# UJI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK DAN KEPERCAYAAN PUBLIK [50]

Uji publik bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Uji publik merupakan implementasi demokrasi dalam birokrasi. Uji publik merupakan suatu akuntabilitas kepada publik merupakan akuntabilitas profesi.

Akuntabilitas suatu profesi setidaknya mencakup secara :

1. Moral (niat baik dan benar)
2. Hukum (secara Hukum benar/tidak melanggar)
3. Adminsitrasi (secara Administrasi benar / tidak melanggar )
4. Fungsional (sesuai SOP)
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat

Uji publik merupakan suatu fungsi kontrol atas berbagai sistem untuk mencapai tujuan.

Sistem bukan tujuan melainkan sarana atau alat mencapai tujuan. Seringkali kita memuja atau mengutamakan alat atau sarana dan mengabaikan tujuan. Sistem merupakan suatu sarana dalam mendukung pencapaian tujuan. Tujuan merupakan hakekat dari sesuatu atas proses yang menjadi puncak pencapaian atas proses tersebut.

Sistem sosial misalnya sistem-sistem yang ada dalam kehidupan sosial baik itu politik ekonomi seni budaya hukum teknologi dan lain-lain merupakan proses atau sarana mencapai keadilan sosial maupun

50 https://www.merdekanews.co/read/29238/Uji-Publik-Pelayanan-Publik-dan-Kepercayaan-Publik
https://benuanews.com/irjen-pol-prof-dr-chryshnanda-dwilaksanauji-publik-pelayanan-publik-dan-kepercayaan-publik/

kesejahteraan sosial atau peradaban yang mampu membuat kehidupan sosial semakin memanusiakan manusia. Manusia menjadi fokus utama. Demi keamanan misalnya maka manusia dan kemanusiaannya bisa saja diabaikan bahkan dikorbankan yang penting aman walaupun tanpa adanya rasa aman.

Cara ala mafia atau premanismepun seakan menjadi suatu kebenaran yang diagung agungkan sebagai suatu kepahlawanan. Sebagai contoh menjadikan tindak pidana korupsi sebagai label untuk menyerang menghakimi secara sosial atau membunuh karakter orang orang yang dianggap berseberangan. Anti korupsi merupakan sistem atau sarana bukan tujuan. Tujuannya adalah mesejahterakan kehidupan sosial yang berbasis keadilan sosial. Di sinilah sistem anti korupsi dapat dinilai dan diukur antara lain dari :

1. Pemimpin dan kepemimpinannya melalui apa kebijakannya dan tindakan tindakannya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir adanya korupsi,
2. Sistem reformasi birokrasi,
3. Sistem sistem on line yang berbasis elektronik yang dibangun menuju big data system dan one stop service,
4. Sistem penegakkan hukum maupun aturan aturannya,
5. Sistem akuntabilitasnya.

Kepercayaan Publik setidaknya mencakup :

1. Profesional (ahli)
2. Cerdas (kreatif atau inovatif)
3. Bermåoral (kesadaran, tanggung jawab dan disiplin)
4. Modern (dinamis)
5. Anti kroupsi
6. Transparan
7. Akuntabel
8. Informatif
9. Mudah diakses
10. Cepat, tepat, akurat

# SESPIM LEMDIKLAT POLRI: BAHAGIA SEHAT JIWA RAGA [51]

Sekolah pemimpin berbasis pada moralitas, tegas dan humanis untuk menyiapkan kader kader pimpinan di masa depan. Pemimpin adalah pemikir yang menginspirasi, memotivasi, memberi solusi, sumber energi sekaligus sebagai guru.

Pola pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri mengacu pada model dialog kebangsaan.

Melalui dialog inilah ada transformasi yang mencerahkan, mengkayakan, memberdayakan, profesionalisme, kecerdasan, kesadaran, tanggung jawab dan disiplin serta modernitas.

Sespim Lemdiklat Polri yang berada di kawasan Lembang merupakan suatu kawasan yang merefleksikan Kebahagiaan yang membuat sehat jiwa dan raga.

Bahagia dalam konteks Sespim Lemdiklat Polri dapat dilihat jiwanya yang senantiasa menumbuhkembangkan pendekatan yang visioner, kebaikan dan perbaikan, proaktif problem solving, kreatif dan inovatif dalam jiwa penolong bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Bahagia di Sespim Lemdiklat Polri adalah jiwa yang kuat untuk menjadi orang yang baik dan benar sebagai orang bajik yang bijaksana. Di dalam mencapai kebahagiaan, pembelajaran melalui: olah jiwa, olah rasa, olah pikir dan olah raga.

Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk membangun literasi dan mengimplementasikan keutamaannya melalui penulisannya.

51 https://transindonesia.co/2024/05/25/sespim-lemdiklat-polri-bahagia-sehat-jiwa-raga/
https://transindonesia.co/2024/05/25/sespim-lemdiklat-polri-bahagia-sehat-jiwa-raga/
https://posbekasi.com/2024/05/25/sespim-lemdiklat-polri-bahagia-sehat-jiwa-raga/

Literasi di Sespim Lemdiklat Polri dibangun dari:

1. Lingkungan hidupnya yang asri, bersih, berbunga, menjadi ikon keindahan, kenyamanan, keamanan dan selalu ngangeni
2. Referensi yang memadai secara aktual maupun virtual
3. Manajemen Media yang menjadi wadah bagi produk produknya, cetak, elektronik, online dan sosial
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan menerapkan dialog peradaban
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah yang mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi
6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaan
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

# LITERASI DAN ANTI KORUPSI [52]

Apa hubungannya literasi dengan anti korupsi? Literasi ada suatu cara pandang positif visioner untuk mengimplementasikan dalam mencapai tujuan keutamaan. Basisnya ada pada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin melaksanakan tugas tanpa adanya tekanan, ancaman atau pamrih sesuatu.

Literasi, mencerahkan, mengkayakan, memberdayakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan disiplin bekerja dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern dalam mencapai keutamaannya. Itu semua refleksi dari spirit memberikan pelayanan publik yang terbaik berstandar atau berkualitas prima.

Tatkala perilaku organisasi menunjukan tingkat kualitas profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya dan modernitasnya ini menunjukan anti korupsi.

Proses membangun literasi merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimulai dari adanya:

1. Keteladanan
2. Kebijakan Politik
3. Kepemimpinan yang transformatif
4. Pembangunan infrastruktur dan sistem sistemnya bagi pelayanan publik yang prima
5. Pembangunan hukum, aturan aturan hingga SOPnya
6. Penyiapan dan Pembinaan SDM yang berkualitas
7. Pembangunan dan Peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan sebagai Center Of Execellence
8. Peningkatan kualitas para guru atau tenaga pendidik

52 https://posbekasi.com/2024/05/27/literasi-dan-anti-korupsi/
https://transindonesia.co/2024/05/27/literasi-dan-anti-korupsi/
https://polisiindonesia.id/2024/05/27/cdl-literasi-dan-anti-korupsi/

9. Transparansi yang dijabarkan dalam : Grand Strategi, Road Map, hingga Program Unggulannya
10. Pembangunan Social Engineering
11. Pembangunan Sistem Sentra Pelayanan Publik Satu Pintu (one stop service) yang saling terhubung dan berbasis elektronik
12. Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat sadar Seni Budaya dan Pariwisata
13. Kesiagaan mengatasi berbagai hal yang kontra produktif
14. Kesiagaan menangani berbagai situasi Emerjensi maupun Contijensi
15. Ketangguhan pengamanan sistem data
16. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban publik secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial
17. Pembangunan dan pengembangan tim transformasi sebagai back up system
18. Pemberdayaan, Pengemasan, Pemaknaan hingga Pemasaran
19. Pembangunan Sistem Jejaring kemitraan maupun Soft Power dan Smart Power
20. Sistem Analisa dan Evaluasi dan upaya : pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas maupun pembangun
21. Pola pola pengembangan yang baru dan terbarukan menyesuaikan dengan perubahan maupun modernisasi

Point point di atas dapat dikembangkan lagi sesuai corak masyarakat dan kebudayaannya untuk adanya pelayanan publik yang berkualitas dan bersandar prima.

# TULUS HATI DAN BEREAKSI DENGAN CEPAT [53]

Apa yang dapat dipetik dari studi banding di Jepang? pelayanan publik di Jepang berupaya terus membangun kepercayaan publik. Kepercayaan dibangun dari kinerja yang profesional, dirasakan membawa manfaat bagi masyarakat. Kepercayaan diperoleh karena dilakukan dengan tulus hati dan bereaksi dengan cepat. Ketulusan hati terefleksi dari cara berkomunikasi pada saat melayani. Tulus hati, memandang orang lain dengan positif dan tidak melecehkan atau memandang rendah orang lain.

Ketulusan hati, bukan munafik atau kepura puraan. Orang munafik kebaikannya penuh kepura puraan. Penuh dengan pamrih, ada udang di balik batu atau supdibilheb (supaya dibilang hebat). Kaum tidak tulus, tabiatnya buruk, gampang ditipu dan senang menipu, dampaknya adalah pelecehan, melukai batin, walaupun dirinya tidak merasakan karena telah menjadi kebiasaan. Hal tersebut berdampak ketidak percayaan.

Baik tatkala harus diawasi, dipaksa atau diancam atau ada keinginan sesuatu, ini bukan ketulusan tetap ada pelecehan yang melukai dan selalu saja mencari keuntungan dalam kesusahan atau pelayanan publiknya dijadikan pasar yang sarat tawar menawar.

Baik yang sejati adalah jiwa bahagia, yang bukan sebatas rasa. Tatkala bahagia itu basisnya jiwa, akan menghidupkan bahkan mampu menumbuhkembangkan. Dalam kondisi apapun akan tetap baik dan memberikan yang terbaik. Apa hebatnya tatkala baik hanya kepada orang yang memberikan kebaikan padanya?

Bagi pemimpin, jiwa bahagia menjadi dasar menjadi orang bajik yang tulus hati, kebijakannya bijaksana. Di dalam pelayanan publik, ketulusan direfleksikan dalam kecepatan bertindak. Kecepatan merespon ini juga didasari kecintaan dan kebanggaan atas pekerjaannya. Semua itu terlihat dalam human relation melalui dialog. Pemimpin yang bajik jiwanya bahagia, pikiran perkataan perbuatan dan belarasanya pada kemanusiaan

53 https://posbekasi.com/2024/05/28/tulus-hati-dan-bereaksi-dengan-cepat/

atau nguwongke, demi semakin manusiawinya manusia, sebagai refleksi atas upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengetahui ketulusan hati dan reaksi cepat saat melayani, terlihat dalam dialog dan cara memberikan pelayanan kepada publik. Analoginya saat pengecekan darah, cukup diambil satu tetes darah tidak perlu satu ember.

Pendidikan bagi para pemimpin masa depan, dialog menjadi penting dan mendasar untuk menjadi tulus dan menjadi orang bajik sehingga kebijakan kebijakannya akan bijaksana. Pemimpin yang tidak tulus, kebijakannya bukan untuk nguwongke atau mengangkat harkat dan martabat manusia. Kecenderungannya akan menjadi jumawa, tamak dan amarah. Pelayanannya kepada masyarakat akan buruk dan melukai yang berdampak hilangnya kepercayaan.

Membangun ketulusan dan bereaksi dengan cepat dalam pelayanan publik dasarnya adalah literasi. Apakah literasi yang rendah dapat merusak peradaban? Ya, karena lalai dan abai akan tugas pokoknya, karena yang dikerjakan pokoknya tugas. Literasi yang rendah adabnyapun akan buruk penuh kepura puraan, bisa saja munafik. Tulus hati dan mampu bereaksi dengan cepat refleksi kualitas literasi dalam jiwa bahagia.

# LITERASI MEDIA DAN KEPEMIMPINAN DI ERA DIGITAL [54]

Era digital era volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (vuca), yang serba cepat tak terduga yang kompleks dan penuh ketidakpastian perlu pemimpin dan kepemimpinan di era digital untuk menanganinya.

Media di era digital menjadi arena atau ruang yang dipilih dan digunakan untuk berbagai kepentingan hidup dan kehidupan manusia di semua gatra kehidupan bisa dilakukan di sana. Dari masalah pribadi sampai masalah politik kenegaraan, ekonomi, sosial budaya hingga pelayanan publikpun bisa dilakukan. Warga pengguna dunia virtualpun memiliki nama ( warga net atau netizen). Mereka menjalankan aktivitas dalam dunia virtual. Media terutama media sosial mampu menggeser media konvensional. Informasi dan komunikasi begitu cepat. Apa saja ada dan apa saja bisa bahkan dimana saja siapa saja pun bisa.

Media menjadi pilar literasi yang menjadi arena pencerahan, pencerdasan, pengkayaan, pemberdayaan, transformasi pengetahuan, dan banyak hal positif bagi hidup dan kehidupan lainnya.

Media sebagai pilar literasi juga untuk mengatasi dampak kemajuan teknologi.

Berkembang pesatnya informasi berdampak pada munculnya "post truth".

Post Truth merupakan era penumpulan daya nalar yang dapat berdampak mengobok obok emosi dan persepsi publik yang dapat dikendalikan untuk menimbulkan potensi konflik. Logika tidak

54 https://transindonesia.co/2024/05/29/literasi-media-dan-kepemimpinan-di-era-digital/ https://polisiindonesia.id/2024/05/29/cdl-literasi-media-dan-kepemimpinan-di-era-digital/ https://benuanews.com/irjen-pol-prof-chryshnanda-dl-literasi-media-dan-kepemimpinan-di-era-digital/

lagi diutamakan yang dipentingkan emosional spiritual. Kemasan primordialisme digelorakan agar kebencian semakin membara. Tanpa pikir panjang peradilan sosialpun merebak di semua lini. Saling menuduh saling menyalahkan saling menghina saling mengobok obok jiwa hingga harga diri. Tanpa sebutir peluru keluar moncong laras senjata perang dapat dimulai.

Post truth kontra produktif, pembodohan menggelora di mana mana. Era post truth menjadi ajang pemutar balikkan fakta. Isi media diacak adul sehingga antara fakta dan kebohongan bahkan kemasan dalam primordialisme akan dapat dikembangkan menjadi pemicu konflik. Dari melempar issue, melabel hingga ujaran ujaran kebencian. Opini publik dapat diobok obok dan dibingungkan dengan primordialisme untuk menggerus nalar dan ujungnya pada kebencian. Tatkala kebencian sudah merasuk di dalam opini publik tinggal menunggu triger untuk meledakkannya.

Berbagai masalah di era post truth yang berdampak pada gangguan keteraturan sosial antara lain :

1. Premanisme yang tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, dan Kesewenang wenangan
2. Birokrasi yang lebih menekankan pada pendekatan personal yang berdampak buruknya pelayanan kepada publik
3. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika

   Berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal
4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya

5. Faktor sumber daya manusia tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang redah yang sarat dengan primordialisme
6. Faktor politik dan kebijakan publik, politik yang terlambat atau tidak mampu menghadapi perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi, perubahan begitu cepat.
7. Era post truth, hoax, serangan siber, dsb melalui media
8. Gaya hidup hedonisme yang berdampak tergerusnya nilai nilai budaya luhur
9. Lemahnya penegak hukum dan penegakan hukum dan sistem hukumnya
10. Sistem yang manual, parsial dan konvensional sehingga berdampak potensi penyimpangan yang begitu besar

Manajamen media bagi literasi bagi polisi dan pemolisiannya di era digital menjadi bagian penting bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban. Berita atau informasi apapun dapat diperoleh dengan cepat dan mampu menembus sekat batas ruang dan waktu.

Berbagai isu yang diputarbalikan dalam suatu pembenaran dapat dicounter dan menunjukan kebenarannya. Media pilar literasi menjadi jembatan hati, penyembuh lidah, corong informasi bahkan sebagai sistem transformasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sebaliknya media yang bukan bagi literasi menjadi kontra produktif sebagai penyerang, perusak bahkan pembunuh karakter. Saling serbu dengan model proksi dari pemberitaan buruk, hoax hingga fitnah bisa ditebarkan dalam berbagai konflik kepentingan.

Post truth bukan kebohongan semata melainkan olahan fakta dan kebohongan yang diviralkan melalui berita hoax untuk mempengaruhi otak hati hingga pada suatu keyakinan pembenaran dijadikan kebenaran, bahkan yang membuatnyapun meyakini sebagai kebenaran. Efek dari era post truth kebenaran dikalahkan dengan pembenaran.

Media bagi literasi menjadi standar fakta kebenaran maka, menafikan pembenaran yang membodohi, menjerumuskan bahkan merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media pilar literasi akan mampu untuk :

1. Menjadi standar informasi atau berita yang benar sesuai fakta dan data
2. Mampu menginspirasi yang artinya kreatif dan inofatif
3. Mendorong orang lain berbuat baik dan benar / membangun budaya atau peradaban
4. Mampu memberitakan hal hal yang up to date
5. Mampu mengcounter issue
6. Mampu membuat sesuatu yang fun indah dan menghibur
7. Penumbuhkembangan literasi

Media literasi menjadi basis keteraturan sosial dunia virtual. Di era digital, dunia virtual menjadi wahana bagi hidup dan kehidupan. Sebaliknya juga dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas. Pembunuhan karakter hingga mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Hoax menjadi cara pembodohan penyesatanpun secara virtual.

Literasi Media dapat menjadi :

1. Media informasi
2. Media komunikasi
3. Media sosialisasi
4. Media edukasil
5. Media kepentingan politik
6. Media untuk labeling
7. Media bisnis
8. Media penggalangan solidaritas
9. Media penghakiman sosial
10. Media membangun jejaring sosial
11. Media laboratorium sosial dan masih banyak fungsi lainnya.

Melalui literasi media pemetaan wilayah, masalah dan potensi dari berbagai kepentingan dapat diberdayakan untuk :

1. Memberdayakan primordial sebagai kekuatan kebhinekaan yang mempersatukan.
2. Menggunakan soft power dan smart power dalam berbagai profesi menjadi jembatan komunikasi dan solidaritas
3. Membuka peluang bisnis dan pelayanan publik secara virtual
4. Mendapatkan dukungan viewer maupun follower dari warganet
5. Mengetahui dan memetakan opini publik melalui intelejen media
6. Memberikan inspirasi, motivasi atas fungsionalisasi media sosial secara luas tentu akan berdampak pada perilaku netizen dengan kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Literasi Media akan menjadi bagian penting untuk bagi kinerja intelejen dari: pemgumpulan data, analisa, produk dan networking ini dapat dilakukan dengan memberdayakan media sosial sebagai bagian dari laboratorium sosial. Dalam kehidupan masyarakat boleh dikatakan ada juga dalam media sosial. Dari pemetaan pembuatan pola polanya dan pengumpulan data maka akan dapat dihubung hubungkan. Dapat dianalisa untuk menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma tadi dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi mengantisipasi dan memberi solusi. Intelijen media akan membantu menjembatani untuk terus berkembangnya fungsi media sosial secara positif dan mencerdaskan para warga net agar tidak hanyut dlm berita hoax. Selain itu juga bagi penegakkan hukum warga net yang dengan sengaja memperkeruh atau pengganggu keteraturan sosial.

Literasi Media dapat mendukung

1. Implementasi E Policing yang mencakup adanya : Back office, Application yang berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya sebagai prediksi antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, on time dan any time.

2. Dapat menjadi Pusat K3i ( Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi) dalam memberikan pelayanan prima di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan secara prima.
3. Diimplementasikan dalam Smart Management dan Smart Operation. Diawaki petugas polisi siber ( cyber cops )
4. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas terutama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya.
5. Mendukung Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota)
6. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem

Pemimpin di era digital memiliki tugas dan tanggung jawab besar membangun pelayanan publik satu pintu (one stop service) dalam sistem on line yang berbasis elektronik. Pemimpin di era digital dituntut untuk : peka, peduli, berempati, dan berbelarasa tidak mematikan tetapi menyadarkan, membangkitkan, menghidupkan, memberi daya gerak dan daya untuk menjadi dinamis tumbuh dan berkembang. Dirinya bukan menjadi matahari tetapi justru menjadi bulan, memberi pencerahan dan penerangan di saat kegelapan. Di saat terjadi kesesatan, di saat terjadi kelesuan, di saat terjadi keputusasaan pemimpin tampil sebagai sang penuntun, pembimbing, bintang pedoman, arah, dan tujuan. Hidupnya siap berkorban dalam membangun dan mencapai sasaran. Tak gentar terhadap hambatan, tantangan, ancaman yang bisa merusak dan mematikan dirinya maupun keluarganya.

Jiwa seorang pemimpin akan melegenda. Pemimpin dikenang bukan dari kekayaannya, kezalimannya, tetapi karena kerendahan hatinya, empatinya, rasa senasib sepenanggungan, kerelaan berkorban, kemampuan membawa kemajuan, menempatkan pada tempat sebagaimana yang seharusnya. Dadi ratu kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane. Ratu iku anane mung winates dadi kawulo tanpo winates.

Pemimpin itu bukan seberapa bernilai dirinya, melainkan seberapa bermanfaat dirinya bagi hidup dan kehidupan serta bagi semakin manusiawinya manusia.

"Saya lebih senang dan bangga berada di tengah-tengah anak buah saya," demikian dikatakan oleh Jend. Sudirman. Walau sakit dan harus ditandu, ia ikut bergerilya untuk merasakan apa yang menjadi penderitaan anak buahnya. Kehebatan seorang pemimpin bukanlah pada dirinya dan tebar pesonanya, tetapi ada suatu transformasi menjadi kebaikan dan selalu ada perbaikan.

Mahatma Gandi sebagai pemimpin berani dan mau memberi teladan dengan menenun sendiri pakaiannya. Ia tidak harus dengan berjas dasi. Martin Luther King Jr, pemimpin pergerakan antirasialis di Amerika, pun memperjuangkan hak-hak kaumnya dan berempati untuk tidak dengan kekerasan. Bahkan, ia pun menjadi korban kekerasan yang menghilangkan nyawanya. Demikian pula Mahatma Gandhi.

Lagi-lagi pemimpin memang yang akan memberi warna menjadi bintang pedoman arah dan tujuan. Menginspirasi, mampu memberdayakan dan mengajak anak buahnya mewujudkan mimpi-mimpinya. Di zaman modern ini pemimpin dituntut untuk berani, cerdas, dan murah hati, bukan dilayani. Dia mau menjembatani dan mau memahami bahkan menjadi role model bagi rekan dan bawahannya.

Ki Hajar Dewantoro tokoh pergerakan nasional pendidikan mengajarkan filosofi kepemimpinan:

1. Ing Ngarso Sung Tulodo
2. Ing Madyo Mangun Karso
3. Tut Wuri Handayani.

Pemimpin memang harus memiliki empati dan mau berbagi rezeki dengan cara meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya.

Keunggulan sang pemimpin

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kratifitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya

4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu,
5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini
6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi
8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan mendapat dukungan secara internal maupun eksternal.

Merubah mind set itu memerlukan pemimpin yang kebijakannya mendukung perubahan. Ada orang orang menjadi ikon atau panutan dan agen agen perubahan sebagai penggerak. Dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

# IDE IDE BAGI REFORMASI POLRI; KKLN DI JEPANG [55]

KKLN (Kuliah Kerja Luar Negeri) bagi Peserta Sespimti di Jepang pada tataran konseptual strategi dan implementasi yang berkaitan dengan :

1. Sistem kepolisian Jepang dari NPA sampai Koban
2. Model Smart city
3. Model Emergency dan contigency policing
4. Model Social engineering
5. Model Pencegahan Kejahatan
6. Model Pelayanan Publik
7. Model Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata
8. Model Active Transportation (jalan kaki, bersepeda, transportasi angkutan umum)

Dari delapan point di atas benang merah yang dapat ditarik kesimpulannya adalah "Negara Jepang Memiliki Tingkat Literasi yang Tinggi" sehingga keutamaan diimplementasikan dalam budaya organisasi yang "Profesional, Cerdas, Bermoral dan Modern".

Demikian halnya dalam kepolisian Jepang spirit pemolisiannya adalah:" untuk menjadi polisi yang berhati nurani sebagai pejuang kemanusiaan". Disiplin dan bekerja keras, ditunjukan juga melalui kesadaran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan tugasnya bagi "meningkatkan kualitas hidup masyarakat ".

55 https://sespim.lemdiklat.polri.go.id/post/173/ide-ide-bagi-reformasi-polri-kkln-di-jepang-oleh-kasespim-lemdiklat-polri-irjen-pol-prof-dr-chryshnanda-dwilaksana-m-si
https://transindonesia.co/2024/05/30/ide-ide-bagi-reformasi-polri-kkln-di-jepang/

Mereka menunjukan sebagai petugas yang profesional cinta dan bangga akan pekerjaannya, serta setia serta loyal pada institusi kepolisian.

Kepolisian Jepang sebagai pembelajar yang terus berjuang untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai polisi yang profesional, bekerja dengan tulus dan mampu bereaksi dengan cepat dalam menjaga keteraturan sosial yang diwujudkan dalam keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Dari keutamaan kepolisian Jepang dapat dijadikan inspirasi bagi reformasi birokrasi Polri khususnya secara kultural.

Reformasi birokrasi secara kultural untuk perubahan mind set menuju sesuatu yang lebih baik atau menjadi lebih baik literasi menjadi dasarnya. Membangun literasi dapat dimulai dari :

1. Penataan lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni
2. Adanya referensi yang memadai
3. Pemberdayaan manajemen media yang menjadi wadah bagi produk produknya
4. Ada guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah

6.Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern

7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaanya
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

Literasi yang memadai akan mencerahkan dan mendorong perilaku organisasinya profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya. Literasi refleksi dari kepemimpinan, administrasi, operasional

dan capacitynya. Pemimpin dengan kepemimpinannya yang peduli pada literasi passionnya pada pencapaian tujuan dengan mengimplementasikan keutamaannya. Kebijakannya akan bijaksana bagi keutamaannya.

Membangun literasi pada suatu institusi dapat dimulai dari keteladanan pemimpinnya, pikiran, perkataan dan perbuatannya bagi keutamaannya yang akan diikuti anak buahnya dan menjadi core value.

Core value menjadi spirit membangun yang aktual sesuai dengan yang ideal. Core value diterapkan melalui model kesadaran, tanggung jawab dan disiplin yang bisa dibuat pada etika kerja yang secara rinci dijabarkan pada Standart operation procedure (SOP).

SOP merupakan jabaran dari :

1. Job description dan Job analysis
2. Standardisasi keberhasilan pelaksanaan tugas
3. Sistem penilaian kinerja
4. Sistem reward and punishment
5. Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksi bila melanggar.

SOP menjadi landasan membangun core value sehingga literasi dapat terbangun. Sebaliknya tatkala SOP diabaikan maka core value antara yang aktual berbeda bahkan bertentangan dengan yang ideal.

Membangun literasi sejatinya membangun sumberdaya manusia sebagai aset institusi agar dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin bekerja dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern. Membangun literasi merupakan passion untuk merubah mind set yang sejatinya juga sebagai landasan reformasi secara kultural. Hal tersebut dapat dimulai dari :

1. Hukum dan aturan aturannya hingga SOP nya
2. Infrastruktur dan sistem sistemnya yang dapat meminimalisir kesempatan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan
3. SDM yang akan mengawakinya

Literasi refleksi perilaku organisasi terlihat dari :

1. Pemimpin dan Kepemimpinannya
2. Kebijakan kebijakannya
3. Core valuenya sebagai basis budaya organisasi
4. Aturan, SOP hingga Etika kerjanya
5. Tingkat kualitas Kinerjanya
6. Tingkat kualitas pelayanan publiknya
7. Tingkat transparansinya
8. Tingkat akuntabilitasnya
9. Tingkat dukungan dari mitranya (Soft power dan Smart power nya)
10. Tingkat kualitas kepercayaan publik

Reformasi birokrasi secara kultural yang berbasis literasi adalah segala usaha atau upaya menjadikan birokrasi berfungsi secara professional mampu memberikan pelayanan yang prima dan menjadi ikon pelayanan, perlindungan pengayoman masyarakat juga sebagai penegak hukum dan keadilan yang tegas berwibawa serta humanis. Selain itu juga diawaki oleh SDM yang berkarakter yang memiliki integritas komitmen kompetensi dan keunggulan. Yang benar benar mencintai dan bangga akan institusinya. Implementasi penyelenggaraan tugas kepolisian dalam ranah birokrasi maupun masyarakat ditunjukkan dengan kualitas prima dalam memberikan pelayan kepada publik.

Pendekatan birokrasi yang profesional ada pada hubungan-hubungan yang sifatnya impersonal atau berbasis kompetensi. Birokrasi yang demikian disebut juga dengan birokrasi yang rasional. Artinya, konsep-konsep dan kebijakan-kebijakan bersifat tertulis berbasis pada Grand strategi, road map, hingga SOP nya. Semua kebijakan diputuskan secara tertulis bagi pencapaian keutamaan dan bukan lisan atau kepentingan pribadi atau kelompok.

Hakikat reformasi secara kultural yang berbasis pada literasi dapat dipahami sebagai wujud perubahan mendasar atas nilai-nilai budaya, pedoman-pedoman, keyakinan-keyakinan, dan teori-teori yang digunakan

secara selektif prioritas dalam mengimplementasikan pelayanan kepada publik sehingga mampu menjadi ikon peradaban melalui pelayanan publik yang prima.

Hal yang menghambat reformasi birokrasi secara kultural salah satunya adalah "diskresi birokrasi" yang cenderung menjadi korupsi. Diskresi birokrasi ini ditunjukkan adanya kepemimpinan yang otoriter dalam birokrasi patrimonial. yaitu kebijakan lisan pimpinan atau kebijakan yang tidak tersurat namun tersirat dan mau tidak mau wajib atau harus dijadikan dijadikan pedoman bagi anak buah atau bawahannya dalam menyelenggarakan tugas. Diskresi birokrasi ini memiliki kencenderungan korup, karena acuanya adalah keputusan yang subyektif dengan pendekatan personal dan bersifat lisan. Sehingga secara administratif, secara hukum, secara fungsional bahkan secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan mind set tidak mungkin dilakukan dengan instan, tidak mungkin juga dengan cara-cara fisik atau kegiatan seremonial ataupun supervisial sesaat. Tidak mungkin juga dilakukan dengan suatu perintah, "siap grak berubah grak …". Perubahan mind set adalah kemauan, keberanian, dan kepedulian bahkan kerelaan berkorban dari segenap unsur pimpinan di semua lini karena pemimpin merupakan panutan dan teladan sebagai agen perubahan yang mempunyai kekuasaan dan legitimasi untuk melakukan perubahan.

Keteladanan, integritas, komitmen moral, dari pimpinan menjadi dasar pijakan perubahan mind set bahkan culture set. Political will pimpinan menjadikan tiang pancang untuk tautan, karena tanpanya sistem akan hancur berantakan. Aspek lain yang perlu dilakukan adalah edukasi bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan bahkan sepanjang hayat untuk menjadikan birokrasi menjadi pembelajar. Pada tahap ini semua level pimpinan wajib mengedukasi bawahannya sehingga mampu menjadi mentor yang mampu menjembatani memotivasi memberdayakan bahkan membantu memberikan berbagai solusi.

Perubahan nilai-nilai budaya yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur dan penegakkan hukum dan disiplin harus dilakukan. Tentu ini tidak dilakukan dengan cara-cara otoriter tetapi bagaimana kesadaran

dapat dibangun dan bagaimana kepekaan dan tanggung jawab diwujudkan. Yang tidak kalah penting adalah membangun karakter institusi yang ditunjukkan dari profesionalisme, keunggulan-keunggulan, maupun sikap moralitas. Kesadaran merupakan tingkatan moral tertinggi yang dapat mendorong pada kepekaan kepedulian bahkan empati serta belarasa yang menjadikan humanis dalam mengangkat harkat dan martabat manusia

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan legitimasi dari berbagai pihak merupakan soft power yang dapat dijadikan landasan dan langkah awalnya atau modal dasar reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi, pemahamannya dapat dimaknai sebagai upaya menuju birokrasi yang rasional, modern, yang berdasarkan kompetensi, profesional, cerdas, modern, inovatif kreatif , transparan, akuntabel dan proaktif serta problem solving.

Reformasi birokrasi kepolisian dapat dipahami sebagai upaya kepolisian menjadi polisi sipil yang profesional, cerdas, kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, modern, proaktif, problem solving, kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di dalam masyarakat yang modern dan demokratis sbg ikon peradaban, kemanusiaan. Reformasi secara struktural, instrumental dan kultural.

Dalam mereformasi kepolisian ada 3 pola dasar yang meliputi upaya untuk :

1. Belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu.

   Yang harus berani ditunjukan apa kesalahan-kesalahan masa lalu dan tentu saja bukan karena subyektifitas serta sifat defense yang berlebihan. Tentu saja bukan untuk menyalahkan atau mencari kesalahan tetapi untuk memperbaiki kesalahan baik di bidang pembinaan maupun bidang operasional. Termasuk konsep-konsep dan peraturan-peraturan maupun pedoman-pedoman yang telah ada. Selain kesalahan tentu ada potensi-potensi yang bisa mendukung yang bisa diberdayakan atau direvitalisasi.

2. Siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan masa kini.

   Reformasi birokrasi kepolisian mewujudkan harapan dan kebutuhan

serta tuntutan masyarakat di masa kini. Yang harus cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah.

Untuk mencapainya tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan tidak mungkin terwujud.

3. Menyiapkan masa depan yang lebih baik.

   Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional. Sebagai contoh dalam pembinaan SDM baik dari rekrutmen sampai pengakhiran dinas berdasarkan standar kompetensi atau produktifitas, yang transparan, akuntabel.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka dalam reformasi birokrasi kepolisian hal hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Political will yang visioner dan mendukung proses reformasi birokrasi,
2. Adanya kepemimpinan yang trannsformatif,
3. Pembangunan infrastruktur yang berbasis IT ,
4. Menyiapkan tim transformasi sebagai tim back up dan tim monitoring serta evaluasi,
5. Menyiapkan SDM yang berkarakter sebagai:" penjaga kehidupan pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan",
6. Memiliki program unggulan mencapai standar dan kualitas tinggi ( world class),
7. Menyiapkan pilot project sebagai model percontohan,
8. Monitoring dan evaluasi dan melakukan evaluasi
9. Mengembangkan apa yang sudah dicanangkan pada wilayah lainnya.

Implementasi reformasi birokrasi kepolisian secara kultural setidaknya dapat dijabarkan dalam 8 program yang mencakup :

1. Birokrasi mampu menjadi institusi yang tepat fungsi, dan tepat ukuran (right size).

2. Tatalaksana (sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance).
3. Peraturan/ UU (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih).
4. SDM (sdm beritegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, dan sejahtera)
5. Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn)
6. Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi).
7. Pelayanan publik (pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).
8. Budaya kerja (birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi).

8 hal tersebut merupakan yang diprioritaskan pada :

a. SDM (kompetensi),
b. Instrument dan metode,
c. Kelembagaan (struktur dan kultur).

Implementasinya dijabarkan oleh masing-masing satker dan sub satker dari tingkat Mabes, Polda dan Polres sebagai KOD, Polsek, Pospon sd Bhabinkamtibmas.

Mereformasi birokrasi kepolisian secara kultural prinsip dapat sama namun implementasinya disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing yang dapat dikembangkan dalam membangun Polri sebagai polisi sipil dalam masyarakat yang modern dan demokratis ( membangun supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan dan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat). Yang ditunjukan dari kinerja Polri yang : profesional, cerdas, transparan dan akuntabel, cepat, tepat, akurat, informatif, mudah di akses, proaktif, problem solving yang mengutamakan pada tindakan pencegahan.

Dengan demikian reformasi birokrasi kepolisian secara kultural yang berbasis literasi dalam membangun sistem pemolisian yang : 1. Berbasis pada supremasi hukum 2. Pemolisiannya dapat dipertanggungjawabkan secara: administrasi, hukum, fungsional dan kemanfaatannya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta secara moral, karena tugas-tugasnya adalah untuk memanusiakan manusia dalam arti mengangkat harkat, martabat manusia, yang dibangun di atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Walaupun sebagai polisi yang modern dan handal dalam mengimplementasikan electronic policing polisi atau dikenal sebagai e-policing maupun forensic policing namun hati nurani tetap menunjukan polisi yang humanis tetap diutamakan.

Penjabaran konsep-konsep di atas sebagai reformasi secara kultural yang dilakukan pada tataran kepemimpinan, administrasi, operasional, dan peningkatan kapasitas; mulai dari tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek dan Sub-sektor, Pos Pol bahkan sampai Babinkamtibmas.

Model pemolisian yang sekarang ini banyak diadopsi dalam kepolisian-kepolisian yang modern dan demokratis adalah community policing. Dalam penyelenggaraan tugas Polri dikenal sebagai Polisi Masyarakat (Polmas). Pemolisian tersebut dikembangkan dalam " Smart Policing" yang menjadi model harmoni antara "conventional, e-policing maupun forensic policing". Hal tersebut dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian baik pada tingkat manajemen dan operasional, dengan atau tanpa upaya paksa, dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (kamtibmas). Pada era digital reformasi birokrasi ini, kepolisian sudah membangun sistem-sistem dan infrastruktur modern pemolisian secara online (e-policing) di era kenormalan baru polisi mengambangkan forensic policing untuk mengatasi berbagai hal kontra produktif yang by design dengan nuklir, biologi, kimia, fisika maupun sosial.

Reformasi birokrasi kepolisian secara kultural membangun ikon atau simbol-simbol bagi para petugasnya: simbol keahlian (profesionalisme), kemanusiaan, aparat yang berkarakter, dan simbol perubahan. Melaksanakan simbol-simbol itu merupakan wujud dari keunggulan dan keunikan Polri yang membawa manfaat signifikan bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Perwujudan ikon atau simbol itu akan menjadi kebanggaan yang sekaligus memecahkan beberapa masalah yang internal maupun eksternal. Jika para petugasnya mampu menjadi ikon, maka masalah yang dihadapi secara internal dapat diminimalisir atau bahkan nyaris tidak ada lagi.

E Policing maupun forensic policing mendukung program E Goverment atau Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui model smart city.

Smart city saat ini memang sedang menjadi trend di Indonesia sebagai upaya dan strategi dalam memajukan kota di suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Smart city dapat diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efisien dan efektif.

Sedangkan aspek utama pembangun smart city menurut Frost dan Sullivan pada tahun 2014 yaitu :

1. Smart governance,
2. Smart technology,
3. Smart infrastructure,
4. Smart healthcare,
5. Smart mobility,
5. Smart building,
6. Smart energy dan
7. Smart citizen.

Tujuan dari smart city itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Perbankan Elekronik / E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank7 yang dilengkapi sistem keamanan.

Adapun persyaratan pelayanan prima antara lain: a). aplikasi mudah digunakan; b). layanan dapat dijangkau dari mana saja; c). murah; d). dapat dipercaya; dan e). dapat diandalkan (reliable).

E Policing adalah pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi.

Bisa juga dipahami e-policing sebagai model pemolisian yang membawa community policing pada sistem online. Dengan demikian E-Policing ini merupakan model pemolisian di era digital yang berupaya menerobos sekat-sekat ruang dan waktu sehingga pelayanan-pelayanan kepolisian dapat terselenggara dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel informatf dan mudah diakses.

Sistem ini bisa menjadi strategi inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan creative break through. Dikatakan sebagai inisiatif antikorupsi karena dengan sistem-sistem online dapat meminimalisir bertemunya person to person. Dalam pelayanan-pelayanan kepolisian di bidang administrasi contohnya sudah dapat digantikan secara online melalui e-banking, atau melalui ERI (Electronic Registration and Identification)

E-Policing bukan dimaksudkan untuk menghapus cara-cara manual yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekatan dan persahabatan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Sebaliknya, sistem ini justru untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas kinerja sehingga

polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.

E-Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbasis elektronik yang berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar fungsi/ bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

Pemolisian tersebut dapat dikatakan memenuhi standar pelayanan prima yang berarti: Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Akuntabel, Informatif dan mudah diakses. Pelayanan prima dapat diwujudkan melalui dukungan SDM yang berkarakter, pemimpin-pemimpin yang transformatif, sistem-sistem yang berbasis IT, dan melalui program-program yang unggul dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman bahkan sampai dengan penegakkan hukumnya.

Pembahasan E-Policing dapat dikategorikan dalam konteks : 1. Kepemimpinan, 2. Administrasi, 3. Operasional, 4. Capacity Building (pembangunan kapasitas bagi institusi).

Smart city bukanlah sebagai tujuan utama melainkan meningkatnya kualitas hidup masyarakatlah tujuannya. Kota yang humanis aman nyaman asri termasuk lalu lintasnya yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sejalan dengan hal tersebut program IT for road safety merupakan langkah mendasar untuk memetakan, membuat model, penanganan secara holistik atau sistemik, pendekatan berbasis pada scientific dan teknologi, terbangunnya big data dalam back office. yang diinput melalui berbagai aplikasi dan juga akan dikaji melalui riset secara ilmiah. Hal-hal yang dilakukan inputing data adalah membuat kategori mengidentifikasi akar masalah penyebab dari setiap permasalahan

Mengimplementasikan e policing berbasis smart management yaitu membangun kinerja profesional yang berbasis SOP yang mencakup:

a) Job Description dan Job Analysis masing-masing bagian

b) Standardisasi keberhasilan tugas

c) Sistem penilaian kinerja
d) Sistem reward and punishment
e) Etika kerja ( apa yang harus di lakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan/ do dan don't)

Point a sampai dengan e inilah yang tercakup pada smart management.

Implementasi e policing akan diawaki petugas-petugas cyber cops yang siap 1×24 jam dan 7 hari seminggu tanpa putus memberikan pelayanan virtual dan aktual. Petugas-petugas cyber cops akan bertugas pada back office untuk inputing data, menganalisa dan menghasilkan produk-produk untuk prediksi, antisipasi dan solusi yang dinamis bahkan sell on time dan real time.

Menjadi Polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern merupakan proses panjang yang setidaknya dimulai dari pemikiran-pemikiran visioner yang luar biasa atau berbeda dengan pemikiran-pemikiran pada umumnya dalam birokrasi yang rasional (berdasar pada kompetensi), kepemimpinan yang visioner, transformasional dan problem solving dalam membangun model pemolisian di era digital dengan berbasis pada sistem online (Electronic Policing). Selain itu juga diawaki SDM yang profesional yang memiliki attitude yang baik dan sebagai pekerja keras dan pembelajar serta mind set sebagai polisi ideal (penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus). Hal ini ditunjukkan pada birokrasi yang mempunyai Tata Kelola Lembaga Prima ( National Class Institution) yang memiliki program-program unggulan yang inspiratif, inovatif, kreatif serta dinamis untuk senantiasa mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, kebutuhan tantangan, ancaman serta harapan masa kini, mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dukungan infrastuktur dengan teknologi yang modern masih dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Yang perlu menjadi perhatian juga dalam penganggaran yang terus diperbaiki nilai sejak perencanaan, monitor dan evaluasi untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian.

Polisi sebagai institusi sebagai fungsi maupun petugas adalah simbol peradaban pelindung pengayom dengan pelayan mayarakat. Yang mampu

memberikan pelayanan pelayanan prima dan menjadi ikon penjaga kehidupan Pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

# MEDIA POLICING [56]

Era digital era volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (vuca), yang serba cepat tak terduga yang kompleks dan penuh ketidakpastian perlu pemimpin dan kepemimpinan di era digital untuk menanganinya.

Media di era digital menjadi arena atau ruang yang dipilih dan digunakan untuk berbagai kepentingan hidup dan kehidupan manusia di semua gatra kehidupan bisa dilakukan di sana. Dari masalah pribadi sampai masalah politik kenegaraan, ekonomi, sosial budaya hingga pelayanan publikpun bisa dilakukan. Warga pengguna dunia virtualpun memiliki nama ( warga net atau netizen). Mereka menjalankan aktivitas dalam dunia virtual. Media terutama media sosial mampu menggeser media konvensional. Informasi dan komunikasi begitu cepat. Apa saja ada dan apa saja bisa bahkan dimana saja siapa saja pun bisa.

Media menjadi pilar literasi yang menjadi arena pencerahan, pencerdasan, pengkayaan, pemberdayaan, transformasi pengetahuan, dan banyak hal positif bagi hidup dan kehidupan lainnya.

Media sebagai pilar literasi juga untuk mengatasi dampak kemajuan teknologi.

Berkembang pesatnya informasi berdampak pada munculnya "post truth".

Post Truth merupakan era penumpulan daya nalar yang dapat berdampak mengobok obok emosi dan persepsi publik yang dapat dikendalikan untuk menimbulkan potensi konflik. Logika tidak lagi diutamakan yang dipentingkan emosional spiritual. Kemasan

56 https://transindonesia.co/2024/06/10/media-policing/
https://polisiindonesia.id/2024/06/10/cdl-media-policing/

primordialisme digelorakan agar kebencian semakin membara. Tanpa pikir panjang peradilan sosialpun merebak di semua lini. Saling menuduh saling menyalahkan saling menghina saling mengobok obok jiwa hingga harga diri. Tanpa sebutir peluru keluar moncong laras senjata perang dapat dimulai.

Post truth kontra produktif, pembodohan menggelora di mana mana. Era post truth menjadi ajang pemutar balikkan fakta. Isi media diacak adul sehingga antara fakta dan kebohongan bahkan kemasan dalam primordialisme akan dapat dikembangkan menjadi pemicu konflik. Dari melempar issue, melabel hingga ujaran ujaran kebencian. Opini publik dapat diobok obok dan dibingungkan dengan primordialisme untuk menggerus nalar dan ujungnya pada kebencian. Tatkala kebencian sudah merasuk di dalam opini publik tinggal menunggu triger untuk meledakkannya.

Berbagai masalah di era post truth yang berdampak pada gangguan keteraturan sosial antara lain :

1. Premanisme yang tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, dan Kesewenang wenangan
2. Birokrasi yang lebih menekankan pada pendekatan personal yang berdampak buruknya pelayanan kepada publik
3. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika

   Berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal
4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya

5. Faktor sumber daya manusia tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang redah yang sarat dengan primordialisme
6. Faktor politik dan kebijakan publik, politik yang terlambat atau tidak mampu menghadapi perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi, perubahan begitu cepat.
7. Era post truth, hoax, serangan siber, dsb melalui media
8. Gaya hidup hedonisme yang berdampak tergerusnya nilai nilai budaya luhur
9. Lemahnya penegak hukum dan penegakan hukum dan sistem hukumnya
10. Sistem yang manual, parsial dan konvensional sehingga berdampak potensi penyimpangan yang begitu besar

Sejalan dengan pemikiran mengatasi era Vuca polisi dan pemolisiannya di era digital menjadi bagian penting memanage media melalui " Media Policing" bagi keteraturan sosial di dunia virtual.

Media Policing membangun literasi media yang menjadi standar fakta kebenaran maka, menafikan pembenaran yang membodohi, menjerumuskan bahkan merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media policing dengan literasinya diharapkan mampu untuk :

1. Menjadi standar informasi atau berita yang benar sesuai fakta dan data
2. Mampu menginspirasi yang artinya kreatif dan inofatif
3. Mendorong orang lain berbuat baik dan benar / membangun budaya atau peradaban
4. Mampu memberitakan hal hal yang up to date
5. Mampu mengcounter issue
6. Mampu membuat sesuatu yang fun indah dan menghibur
7. Penumbuhkembangan literasi

Media policing menjadi basis keteraturan sosial dunia virtual. Di era digital, dunia virtual menjadi wahana bagi hidup dan kehidupan. Sebaliknya juga dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas. Pembunuhan karakter hingga mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Hoax menjadi cara pembodohan penyesatanpun secara virtual.

Media policing dapat menjadi standar bagi :

1. Media informasi
2. Media komunikasi
3. Media sosialisasi
4. Media edukasil
5. Media kepentingan politik
6. Media untuk labeling
7. Media bisnis
8. Media penggalangan solidaritas
9. Media penghakiman sosial
10. Media membangun jejaring sosial
11. Media laboratorium sosial dan masih banyak fungsi lainnya.

Melalui "media policing" pemetaan wilayah, masalah dan potensi dari berbagai kepentingan dapat diberdayakan untuk :

1. Memberdayakan primordial sebagai kekuatan kebhinekaan yang mempersatukan.
2. Menggunakan soft power dan smart power dalam berbagai profesi menjadi jembatan komunikasi dan solidaritas
3. Membuka peluang bisnis dan pelayanan publik secara virtual
4. Mendapatkan dukungan viewer maupun follower dari warganet
5. Mengetahui dan memetakan opini publik melalui intelejen media
6. Memberikan inspirasi, motivasi atas fungsionalisasi media sosial

secara luas tentu akan berdampak pada perilaku netizen dengan kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Literasi Media akan menjadi bagian penting untuk bagi kinerja intelejen dari: pemgumpulan data, analisa, produk dan networking ini dapat dilakukan dengan memberdayakan media sosial sebagai bagian dari laboratorium sosial. Dalam kehidupan masyarakat boleh dikatakan ada juga dalam media sosial. Dari pemetaan pembuatan pola polanya dan pengumpulan data maka akan dapat dihubung hubungkan. Dapat dianalisa untuk menghasilkan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma tadi dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi mengantisipasi dan memberi solusi. Intelijen media akan membantu menjembatani untuk terus berkembangnya fungsi media sosial secara positif dan mencerdaskan para warga net agar tidak hanyut dlm berita hoax. Selain itu juga bagi penegakkan hukum warga net yang dengan sengaja memperkeruh atau pengganggu keteraturan sosial.

Literasi Media dapat mendukung

1. Implementasi E Policing yang mencakup adanya : Back office, Application yang berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya sebagai prediksi antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, on time dan any time.
2. Dapat menjadi Pusat K3i ( Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengendalian serta Informasi) dalam memberikan pelayanan prima di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan secara prima.
3. Diimplementasikan dalam Smart Management dan Smart Operation. Diawaki petugas polisi siber ( cyber cops )
4. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas terutama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya.

5. Mendukung Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota)
6. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem

# MENGAPA DIGITAL LEADERSHIP HARUS DISIAPKAN? [57]

Di era digital dunia virtual memiliki jagad mayantara,mereka memiliki warga net (netizen) yang memberdayakan media untuk mendukung atas hidup dan kehidupannya. Selain hal positif ada dampak yang dapat menghambat, merusak hingga mematikan produktivitas.

Di dalam jagad mayantara pembunuhan karakter hingga yang mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Berita hoax, pembodohan penyesatanpun secara masif dan brutal bisa dilakukan di era post truth.

Plintiran dengan memanipulasi sesuatu dengan menambahkan, mengurangi, merubah,dsb sebagai pembenaran yang berdampak:

1. Salah persepsi
2. Mengadu domba
3. Menghakimi
4. Munculnya solidaritas sosial
5. Merusak citra
6. Menghilangkan kepercayaan
7. Konflik sosial
8. Penipuan, pencurian hingga perampokan
9. Kejahatan siber
10. Proxy war

dan banyak lagi lainnya.

57 https://transindonesia.co/2024/06/14/mengapa-digital-leadership-harus-disiapkan/
https://polisiindonesia.id/2024/06/14/cdl-mengapa-digital-leadership-harus-disiapkan/

Tatkala dibuat aturan atau tatanan, ada yang merasa dikungkung atau dibungkam atau kebebasan sebebas bebasnya tidak terwujud. Hujat menghujat dengan kalimat tidak sepatutnyapun seakan menjadi refleksi hipokrit. Netizen +62 dilabel paling buruk tatakramanya. Entah itu refleksi budaya atau oknum yang tak lagi bisa menghargai orang lain. Sikap budaya bangsa yang adiluhung seakan luntur akibat evoria dunia maya.

Kritik disamakan dengan hujatan. Tabiat buruk seakan menjadi moralitas. Provokasi pembodohan menjadi sesuatu yang membanggakan. Dalam kehidupan sosial di era digital maka keteraturan sosial di dunia virtual diperlukan aturan untuk menata dan pertanggungjawaban.

Mau tidak mau tatkala segala sesuatu yang berdampak pada konflik dan berbagai hal yang kontra produktif menjadi tanggung jawab kita semua mengatasinya.

Konteks demokrasi menjadi acuan bebas bertanggungjawab, jaminan perlindungan HAM, supremasi hukum, transparan dan akuntabilitas orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menjaga kedaulatan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan ketahanan dan daya tangkal bahkan daya saing. Kritis atas penyimpangan atau ketidakbenaran merupakan suatu kecerdasan keberanian bahkan juga wujud tanggung jawab moral. Di sinilah digital leadership juga menjadi sesuatu keniscayaan.

Digital leadership/ pemimpin di era digital dalam pembelajarannya di Sespim Lemdiklat Polri didukung program program antara lain:

1. Leadership literation
2. Leader branding
3. Dialog kebangsaan
4. Media management
5. Forum :
    a. Babhinkamtibmas,
    b. International policing,

c. Boarder policing,
d. Art policing,
e. Cooling system,
f. Maritime policing,
g. Road safety policing,
h. Safety and Security,
i. Emergency and Contigency policing,
j. Smart policing,
k. Smart city,

6. Pengabdian masyarakat dalam konteks social engineering atau rekayasa sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban
7. Leader Expo sebagai puncak proses pembelajaran yang ditunjukan oleh para pembimbing, mentor dan peserta didik sebagai pertanggungjawaban moral selama mengikuti pendidikan.

**Digital Leadership dan implementasinya dalam Media Policing**

Media policing merupakan pemolisian dengan pendekatan media untuk : Komunikasi, Koordinasi, Informasi yang mendukung cooling system. Media policing dapat digunakan untuk : menyadarkan, memberdayakan dan mengcounter atas hal hal yang kontra produktif di atas dengan daya nalar/ logika yang waras agar kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban tetap terjaga.

Media policing menjadi jembatan hati yang merupakan dialog peradaban dalam implementasinya antara lain :

1. Membangun portal atau website atau bekerja sama dengan media main stream atau dengan apa saja yang dapat menjadi rujukan atas kebenaran atau sesuai fakta dalam pemberitaan.
2. Memberdayakan media sosial dengan berbagai informasi yang mencerdaskan dan menyadarkan agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan tindakan yang kontra produktif.

Di Sespim Lemdiklat Polri untuk pembelajaran dalam konteks Digital Leadership dikaitkan untuk cooling dengan dialog melalui:

1. Model pod cast
   a. Peserta didik menampilkan keutamaan sebagai polisi.
   b. Menceritakan pengalaman dan keahliannya dalam sharing pengetahuan.
   c. Mendiskusikan pelajaran pelajaran di Sespim secara proaktif dan problem solving.
   d. Mendiskusikan isue isue penting yang terjadi dalam masyarakat.
2. Model coaching
   a. Dialog dengan para petugas di lapangan secara daring sd lini terdepan di wilayah masing masing peserta didik sebelum masuk Sespim.
   b. Menyampaikan hal hal yang informatif edukatif serta inputing data dan ada dialog untuk solusinya.
3. Model forum diskusi dan informasi
   a. Forum Bhabinkamtibmas
   b. Forum Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata
   c. Forum Ikatan Sakura Indonesia
   d. Forum Hukum dan Keadilan
   e. Forum Ilmu Kepolisian
   f. Forum Safety and Security Dan Sebagainya.
4. Model membranding
   a. Kampung tertib, kampung tangguh Dan Sebagainya.
   b. Local heroes.
   c. Lomba dan pemberian penghargaan.
   d. Kampung Iklim.
   e. Desa Wisata Dan Sebagainya.
5. Model expo atau pameran , FGD dan seminar.
   a. Leaders Expo

b. FGD, Seminar tentang kebhinekaan, toleransi, narkoba, korupsi Dan Sebagainya.
c. Pameran dan festival seni budaya.

6. Model Kemitraan
   a. PKB Juang.
   b. Kampus Kebangsaan.
   c. Kemitraan dengan para stake holders untuk membangun soft power dan smart power.
   d. Bakti masyarakat dan Sebagainya.
7. Model debat publik

   Mengemas model dialog peradaban untuk menunjukan kebaruan dan pembaharuan hasil pemikiran para peserta didik.

Pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri merupakan suatu dialog peradaban untuk menyiapkan pemimpin di masa depan yang profesional cerdas bermoral dan modern.

Program Leader Branding dinamis danbterus ditumbuhkembangkan dengan membuat produk tertulis maupun virtual yang berkaitan dengan :

1. Company profile Sespim :

   Apa bagaimana mengapa sespim.
2. Siapa dan apa karyanya:

   Menampilkan para serdik yang berprestasi.
3. Literasi kepemimpinan:

   Materi pelajaran

   Kontens yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengetahuan

   Quotes

   Referensi

   E jurnal

   E book

   E library.
4. Leadership dialog:

   Podcast tentang kepemimpinan.

5. Emergency policing dan Contigency policing:

   Pola pola pemolisian dalam berbagai situasi dan kondisi serta pengambilan keputusannya.

6. Masdarwis dan cooling system:

   Seni budaya dan pariwisata bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

7. Kreatifitas dan inovasi:

   Hal hal baru dan kebaruan.

8. Studi kasus :

   Belajar dari berbagai kejadian atau isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.

9. Bench marking:

   Studi banding dalam dan luar negeri.

10. Leadership coaching:

    Dialog Sespim bagi Indonesia.

    a. Sispam kota
    b. Perbatasan
    c. Konflik sosial
    d. Bhabinkamtibmas
    e. Model model pemolisian
    f. Pemimpin dan kepemimpinannya
    g. Pengamanan pemilu serentak
    h. Penanganan bencana
    i. Modernisasi Polri
    j. Social engineering Dan Sebagainya.

Produk produk tersebut menjadi salah satu akuntabilitas proses belajar mengajar dan mengimplementasikan keutamaan dalam pemolisian di lembaga pendidikan.

# POLISI DALAM NEGARA YANG DEMOKRATIS: PENJAGA KEHIDUPAN PEMBANGUN PERADABAN DAN PEJUANG KEMANUSIAAN? [58]

Polisi merupakan lembaga yang didirikan sebagai lembaga negara yg memiliki tugas mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, memberikan jaminan keamanan dan rasa aman menangani kejahatan dan hal hal yang kontra produktif dlm kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial agar ada keamanan dan rasa aman warga yang melaksanakan aktifitas untuk dapat berproduksi agar dapat hidup tumbuh dan berkembang inilah tugas polisi sebagai penjaga kehidupan. Di dalam menjaga kehidupan polisi diberi kewenangan melakukan upaya paksa namun koridornya pada hukum. Dalam konteks ini hukum sebagai refleksi peradaban maka polisi sebagai penegak hukum dan keadilan dapat dimaknai sebagai pembangun peradaban.

Penegakan hukum, sadar atau tidak polisi sebetulnya sudah menggunakan pendekatan kekuasaan, penguasaan, atau power, authority.

Agar penegakkan hukum yang dilakukan polisi dapat berfungsi sebagai pembangun peradaban maka spirit penegakkan hukum setidaknya mencakup: 1. Dilakukan untuk menyelesaikan konflik

58 https://transindonesia.co/2024/06/15/polisi-dalam-negara-yang-demokratis-penjaga-kehidupan-pembangun-peradaban-dan-pejuang-kemanusiaan/
https://polisiindonesia.id/2024/06/15/cdl-polisi-penjaga-kehidupan-pembangun-peradaban-dan-pejuang-kemanusiaan/

secara beradab 2. Memiliki dampak pencegahan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada korban dan pencari keadilan 4. Membangun budaya patuh hukum 5. Agar ada kepastian 6. Sebagai bagian dari edukasi.

Kerja polisi ada di ranah birokrasi maupun masyarakat yang benang merahnya adalah pemolisian ( policing). Pemolisian merupakan segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Keteraturan sosial dalam konteks pemolisian adalah keamanan dan rasa aman. Tindakan tegas kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan rasa aman dalam konteks demokrasi yaitu : 1. supremasi hukum 2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM 3. Transparan 4. Akuntabel 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat 6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan.

Polisi dan pemolisiannya bukan untuk penguasaan, kekuasaan, atau alat penguasa yang menindas rakyatnya, melainkan untuk produktifitas agar meningkatnya kualitas hidup manusia dan semakin manusiawinya manusia.

Konteks humanisme inilah yang dimaknai polisi penjaga kehidupan yang menjaga harkat dan martabat manusia yang produktif tidak terganggu oleh hal hal yang kontra produktif. Oleh karena itu, etika kepolisian menunjukkan bahwa polisi dalam pemolisianya tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya.

Polisi tidak boleh menerima suap apalagi menjadi pemeras dan tidak boleh melindungi sesuatu yang ilegal. Polisi harus mampu menjadi ikon yang memecahkan masalah dan menemukan solusi yang diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

Hukum merupakan simbol peradaban dan polisi merupakan penegak hukum dan keadilan. Penegakkan hukum yang dilakukan polisi bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara beradab, pencegahan, perlindungan, pelayanan dan edukasi. Dengan demikian, polisi sadar dan bertanggung jawab bahwa menegakkan hukum adalah membangun peradaban.

Peradaban merupakan suatu kemampuan berdaulat berdaya tahan berdaya tangkal berdaya saing yang mampu untuk senantiasa bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Kreativitas inovasi kemampuan melampaui dan mengadaptasi perubahan merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Peradaban menjadi refleksi kedaulatan dan ketahanan suatu bangsa dalam semua aspek dan dampak pada semua lini kehidupan (gatra).

Salah satu fungsi polisi adalah menjaga atau melakukan penjagaan. Apa yang dijaga? Bagaimana menjaganya dan mengapa harus dijaga?pertanyaan-pertanyaan tersebut seolah sepele atau dianggap remeh, namun untuk menjawabnya atau melaksanakannya tentu bukan hal yang mudah. Polisi bertugas untuk menjaga manusia termasuk jiwa, aktifitasnya atau kegiatannya dan barang-barang atau harta benda yang keberadaanya untuk mendorong meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Polisi dalam melaksanakan tugas penjagaan atau dalam menjaga berbagai kegiatan sering dikaitkan dengan tulisan Kami Siap Melayani. Menjaga memang berkaitan dengan tugas pelayanan. Layanan apa yang diberikan polisi? Pelayanan yang diberikan polisi adalah pelayanan keamanan dan memberikan rasa aman warga masyarakat sehingga dapat beraktifitas serta menghasilkan produksi yang terus tumbuh dan berkembang dan dapat mensejahterakan kehidupan mereka.

Mewujudkan keamanan dan rasa aman berarti juga memberi kehidupan, karena dapat terus hidup, tumbuh dan berkembang. Suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang kalau ada produktfitas.

Pada kenyataanya dalam proses produktifitas ada hambatan yang mengancam, bahkan dapat merusak atau mematikan produktifitas tersebut. Maka keberadaan, peran dan fungsi polisi adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang menghasilkan produsi yang dibutuhkan untuk hidup tumbuh dan berkembang. Polisi diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mewujudkan dan memelihara kemanan dan rasa aman warga masyarakat yaitu untuk menegakkan hukum dan tindakan upaya paksa. Penggunaan upaya paksa dan

penegakkan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan tentu dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak dan ada unsur edukasi serta perlindungan dan bukan untuk balas dendam.

Untuk menjadi penjaga yang baik tentu diperlukan kemampuan dan pengetahuan yang cukup, karena menjaga tidak hanya siap fisik saja tetapi juga hati nurani dan pemahaman an etika, nilai-nilai dan moral. Karena legitimasi polisi dalam melaksanakan tugas bukan hanya legitimasi hukum saja tetapi juga legitimasi moral. Dan menjadi polisi selain sebagai aparat penegak hukum juga sebagai pendidik yang arus peka dan peduli terhadap berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat juga menjadi salah satu pekerjaan polisi dalam menjaga kehidupan.

Penjaga kehidupan dapat diartikan memberikan jasa, menyadarkan, memberi air kehidupan, mendorong orang lain berbuat baik, menginspirasi dan tentu sebagai teman yang setia dalam penderitaan. Tidak gampang dikerjakan tugas itu. Setidaknya menjadi polisi harus sat langkah lebih maju dari masyarakat yang dilayaninya, dan tentukeberadaanya dapat dipercaya karena fungsional serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan sebagai penjaga kehidupan selain dituntut profesional, cerdas dan patuh hukum juga dituntut bermoral. Berbagai upaya yang dilakukan oleh polisi dalam penyelenggaraan tugasnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tugas polisi pada ranah kemanusiaan yang berarti polisi juga harus peka dan peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan sehingga dapat menunjukan bahwa polisi keberadaanya aman bagi masyarakat, menyenangkan masyarakat dan tentu bermanfaat bagi masyarakat. Keutamaan Polisi adalah kemanusiaan, memanusiakan manusia (meningkatkan harkat dan martabat manusia). “Wong Jowo ojo ilang Jawane”, Pepatah Jawa yang diungkapkan bagi orang-orang jawa yang telah lupa/ menghilangkan nilai-nilai budaya jawa atau juga yang sudah tidak lagi peduli terhadap nilai-nilai luhur budaya jawa.

Bagaimana dengan “polisi ilang kamanungsane” (Polisi yang hilang kemanusiaanya)? Hakekat polisi adalah untuk “nguwongke”

(memanusiakan manusia). Keberadaan polisi adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan segala fungsi, kewenangan dan berbagai model pemolisiannya intinya adalah agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Tatkala polisi hilang akan kemanusiaannya maka dapat dikatakan telah terjadi abuse (penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang). Walaupun itu masih dalam pikiran, karena itu sudah menjadi niat. Niat ini akan menjadi kejahatan apabila ada kesempatan.

Polisi yang ideal adalah polisi yang mampu memanusiakan manusia. Keberadaannya diterima dan di dukung oleh masyarakat yang dilayaninya. Polisi juga dapat dijadikan ikon kemanusiaan, ikon kota, ikon perubahan, ikon hukum dan yang terpenting adalah ikon keamanan dan keselamatan. Itu semua bukan tiba-tiba melainkan harus dibangun dan dimulai dari pimpinannya.

"Kebiasaan yg baik akan menjadi hati nurani yang baik". Polisi yang humanis dapat dilihat dari:

1. Bangunan/perkantorannya dan lingkungannya. Bangunan/ perkantoran dan lingkungan kerja polisi merupakan cerminan dari kebudayaan dari institusi. Kantor polisi/ lingkungan kerja polisi yang humanis memang ada sentuhan-sentuhan seni yang membuat orang nyaman, welcome sehingga orang yang datang ke kantor polisi merasa aman dan nyaman. Tentu saja didukung dengan kebersihan, kerapihan dan keasrian alam sekitar juga menjadi pendukung kehangatan dan kedekatan polisi dengan masyarakat. Hiasan, tulisan, warna dan sebagainya juga mencerminkan nuansa yang menyejukkan hati.
2. Pemimpin dan kepemimpinannya. Pemimpin dengan kepemimpinannya akan sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Kebijakan-Kebijakan yang diambil. Oleh pemimpin akan menjadi acuan/ pedoman bagi anak buahnya. Dan pada level pelaksana akan menjabarkannya lagi dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan diantara mereka untuk mengimplementasikannya.
3. Pola-pola pemolisiannya. Pola-pola pemolisian ini merupakan model implementasi dari kebijakan-kebijakan pimpinannya atau bisa juga

dikatakan sebagai budaya yang aktual. Pada Institusi kepolisian yang humanis yang aktual ini bisa sama/ tidak terjadi gap yang dalam dengan yang ideal. Pikiran, perkataan dan perbuatan menjadi frame bagi polisi yang humanis.

Kewenangan-kewenangan polisi dalam menegakkan hukum dan upaya paksa sekalipun juga demi manusia/ perlindungan pada manusia-manusia yang produktif. Tindakan-tindakan tegas dan upaya paksa dikenakan pada tindakan-tindakan yang kontra produktif.

Polisi yang humanis ditunjukan dari pemolisianya yang mengupayakan pada: supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, tansparan, akuntabel, berorientasi pada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan adanya pengawasan serta pembatasan kewenangan kepolisiannya.

Polisi ikon keamanan dan rasa aman yang semuanya bagi memanusiakan manusia. Polisi tidak boleh kehilangan kemanusiaanya.

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, akan menghadapi berbagai tantangan, hambatan, tekanan bahkan ancaman baik yang bersifat global, regional, nasional bahkan tingkat lokal sekalipun.

Siapa yang bertanggungjawab mengatasi dan menangani bahkan mengkader dan menyiapkan semua ini dari generasi ke generasi?. Sering kita melihat dan mendengar saling salah menyalah, saling lempar tanggungjawab bahkan saling hujat dan serang. Penguasaan sumber daya dengan gaya dan cara mafia memang merusak dan meremukan bangsa ini.

Kesadaran untuk membangun anti korupsi memang harus ditanamkan dan menjadi suatu nilai kebanggaan. Gaya dan pola hidup sederhana dan take home pay yang jelas serta rasional bagi pegawai-pegawai lepas, buruh harian dan ASN, pegawai-pegawai golongan rendah.

Pembangunan infrastruktur mengerem terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang semestinya menjadi acuan dan standar keberhasilan. Penghayatan kecintaan kebanggaan atas bangsa ini mestinya ditunjukan dari perjuangan untuk membersihkan bangsa ini

dari korupsi, narkotika, preman-preman birokrasi dan mafia-mafia di semua lini dengan kinerja yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Merdeka bukanlah sebatas teriakan kata-kata, namun dibuktikan dengan nyali dalam mewujudkan mimpi atau cita-cita dalam karya nyata yang patut dibanggakan, diunggulkan sebagai bangsa yang merdeka.

Kebanggaan dan keunggulan dari suatu bangsa yang merdeka adalah kecerdasan sumber daya manusianya yang memiliki berbagai kompetensi, komitmen, integritas dan kesadaran cinta akan bangsa dan negara.

Hal itu bisa ditunjukkan dalam nyalinya dalam mengisi kemerdekaan untuk:

1. Memberdayakan kekayaan dan sumber daya negara dan tidak ngemplang kekayaan Negara (tidak mengambil keuntungan entah dari mark up, menipu, menggelapkan, menyalahgunakan, mencuri uang negara).
2. Memberikan pelayanan prima, yang dengan tidak memalaki rakyat yang semestinya dilindungi atau dilayani dan dimanusiakan.
3. Mendukung produktifitas masyarakat, yaitu memberikan. Jaminan keamanan, rasa aman dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif :
   a. Memeras,
   b. Menerima suap,
   c. Menjadi backing hal-hal yang ilegal.
4. Mencerdaskan kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak membodoh-bodohi atau memprovokasi dengan hembusan kebencian untuk saling menyerang atau saling merusak. Dan tidak menggunakan hal-hal primordial untuk melakukan tindakan-tindakan diskriminasi.
5. Menumbuhkembangkan dan memelihara rasa kecintaan, kebanggaan, kesatuan serta persatuan bangsa dengan tidak merusak bangsanya dengan tindakan-tindakan Korupsi, kolusi,nepotisme, gratifikasi.

6. Mampu menjadi tuan dirumahnya sendiri yang berarti cerdas, penuh kesadaran, disiplin sebagai anak bangsa. Yang tidak menggadaikan kekayaan bangsanya kepda pihak-pihak asing. Tidak menjadi kacung kepentingan asing.
7. Mampu menjadi bangsa yang disegani dan dihormati di dunia internasional, karena anak-anak bangsanya mampu menjadi pelopor, ikon, dan orang-orang yang menginspirasi, memberikan sumbangan pada kehidupan dunia.

Bangsa yang merdeka merupakan refleksi jiwa-jiwa orang yang bernyali untuk selalu menjadi dan memberikan yang terbaik bagi bangsanya dan dunia.

**Makna Merdeka Pasca Kemerdekaan**

Merdeka bagi suatu bangsa merupakan suatu kebebasan, bebas berdaulat, terlepas dari penjajahan dan bebas menentukan nasib bangsa itu sendiri.

Tatkala bebas dari penjajahan, bebas berdaulat menjadi suatu negara tentu tidak saja bisa bebas begitu saja, karena akan banyak tantangan yang dihadapi terutama menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa sendiri.

Bung Karno mengingatkan, bahwa perjuangan generasi penerus akan lebih berat dibanding perjuangan- perjuangan pendahulunya, karena akan menghadapi tantangan dari bangsanya sendiri.

Kita semua sekarang melihat apa yang telah, sedang dan yang akan terjadi, begitu besar, begitu kompleks masalah yang dihadapi bangsa sendiri seperti rong-roangan dari dalam sendiri, antara lain kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan, kebodohan, korupsi, dan banyak hal yang menghambat bangsa ini maju dan menjadi besar.

Rong-rongan dari dalam begitu besar dan kompleks, penguasaan sumber daya oleh mafia-mafia dan kroni-kroni sehingga aset yang ada kandas, kering kerontang dinikmati segilintir orang/kelompok saja. Ketertinggalan akibat konflik yang berkepanjangan dan sistem-sistem feodal yang masih dilestarikan oleh kaum mapan dan kaum nyaman. Permasalahan-permaslahan internal setelah merdeka? Memang berat

bagi kita tatkala tanpa kesadaran dan kepedulian membangun bangsa menjadi bangsa yang paripurna.

Apakah kemampuan mengatasi masalah-masalah internal bangsa merupakan salah satu tolok ukur merdeka pasca proklamasi?. Apakah keberhasilan mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi sebuah kemerdekaan dalam peradaban yang modern dan demokratis?. Adakah pemimpin, ataupun dari segenap aparaturnya sudah dapat dikatakan mampu menjadi pionir untuk memerdekakan rakyatnya dari candu dan belenggu korupsi?. Adakah sistem-sistem yang dibangun untuk menjadikan bangsanya unggul, cerdas dan sejahtera?.

Selain itu semua masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan untuk dimaknai dan diperjuangkan bagi pemerdekaan bagi bangsa dan negara ini pasca kemerdekaan. Namun setidaknya membangun kualitas bangsa ini sebagai salah satu solusinya.

**Karakter Bangsa**

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas, mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Diknas adalah:

1. Religius

   Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur

   Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi

   Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin

   Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras

   Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

6. Kreatif

   Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

7. Mandiri

   Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Demokratis

   Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Rasa Ingin Tahu

   Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat Kebangsaan

    Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air

    Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

12. Menghargai Prestasi

    Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/Komunikatif

    Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

14. Cinta Damai

    Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

15. Gemar Membaca

    Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan

    Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial

    ikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18. Tanggung Jawab

    Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Patriotisme Sang Pahlawan‚ Mengamalkan Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa

Pahlawan sebagai orang yang berjasa, berani berkorban dan mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadinya bagi hidup dan kehidupan banyak orang atau kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Sang pahlawan berani untuk memperjuangkan cita-citanya demi/ bagi bangsa, negara atau setidaknya bagi sesamanya yang teraniaya, terbelakang, termarginalkan / terabaikan.

Pengakuan sebagai pahlawan bukan karena kemauanya bukan karena rekayasa, bukan karena cita-citanya atau harapanya sekalipun untuk mendapatkan tepuk tangan, sanjungan, tentu juga bukan demi harta kekayaan atau kejayaanya. Semua itu jauh dari angan dan pikiranya.

Pengakuan-pengakuan hingga penghargaan diberikan karena jasa dan perjuanganya yang dirasakan banyak orang atau bagi hidup dan kehidupan orang lain.

Bisa saja sang pahlawan justru sama sekali tidak menikmati atau mendapat sesuatu yang duniawi. Segala usaha, upaya-upaya, ketekunan, keberanian, ketulushatian, ide-ide pemikiran, semuanya demi memanusiakan manusia seutuhnya itulah patriotismenya.

Patriotisme, sang pahlawan di era digital setelah revolusi kemerdekaan adalah mengatasi untuk melawan : kebodohan, egoisme, anarkisme, korupsi, kolusi, nepotisme, kesewenang-wenangan, narkoba, premanisme, terorisme, penyesatan, penghasutan dan berbagai kejahatan kemanusiaan.

Patriotisme sang pahlawan adalah memberi kontribusi bagi hidup dan kehidupan, sebesar apapun bentuknya untuk:

1. Menginspirasi,
2. Memotivasi,
3. Menjembatani,
4. Membangkitkan,
5. Memberdayakan,
6. Menghidupkan,
7. Menyadarkan,
8. Mencerdaskan,
9. Menyelamatkan,
10. Menguatkan dan
11. Meningkatkan kualitas hidup.

Dan masih banyak lagi point yang bisa diuraikan tentang Patriotisme sang pahlawan.

Patriot merupakan produk dari : kinerja, ketulusan hati, keberanian dan kerelaan berkorban, buah dari perjuangan, kebahagiaan banyak orang yang merupakan perjuangan bagi semakin manusiawinya manusia.

Patriot bukanlah karbitan atau produk instan melainkan suatu proses pembelajaran perjuangan pengorbanan tidak hanya harta benda bahkan bisa darah dan air mata. Para patriot berjuang sebagai panggilan jiwa dan hati nuraninya bagi sesama bangsa dan negaranya.

Patriot memberi pencerahan penyadaran untuk selalu dapat hidup dan menghidupi serta untuk semakin manusiawinya manusia.

Sikap dan semangat patriotisme dalam mengamalkan Pancasila sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

   Beriman kepada tuhan yang maha esa, ini sesuai dengan agama dan keyakinan sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur ini telah melandasi kerukunan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. Di negara kita tepatnya di Indonesia, terdapat banyak sekali macam-macam agama yang berbeda. Masing-masing telah mempercayai agama yang telah dianutnya sehingga kerukunan diantara penganut agama tetap terpelihara. Iman dan takwa kepada tuhan yang maha Esa telah terpatri dalam hati penganut agama, Nilai yang Terkandung Dalam Setiap Sila Pancasila Baca juga – Pengertian Pancasila menurut para Ahli.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

   Mungkin setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan yang dinamis dan selalu mengarah pada kemantapan yang telah disempurnakan.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan. Sikap tersebut melahirkan kesanggupan dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap positif ini telah dilandasi oleh rasa cinta dan sayang kepada tanah air (Patriotis) dan juga rasa cinta kepada bangsa dan negara (nasionalis).

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

   Setiap warga negara pasti memiliki kedudukan yang baik. Kedudukan yang sama tersebut digunakan dengan kesadaran dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama.

5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan juga menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan.

Disaat terjadinya krisis nasional terjadi ancaman berat terhadap kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, dan tindakan dari sekolompok orang-orang yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Tapi, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama dan juga ideologi negara tak tergoyahkan sedikit pun.

# POLISI DAN PEMOLISIANNYA MENUJU INDONESIA EMAS 2045 [59]

Di era digital semua serba berbasis aplikasi yang ada di dalam gadget atau smart phone. informasi komunikasi koordinasi bahkan komando pengendalian pun bisa dilakukan. Perkembangan AI yang begitu masif dapat mengatasi berbagai pekerjaan konvensional dengan kuantitas dan kualitas prima. Sejalan dengan erva vuca yang voltality, unpredictable, complexicty, ambiguity maka pola pemolisian konvensional manual parsial akan dianggap tidak profesional dan besar potensi penyimpangannya.

Di era kenormalan baru mau tidak mau polisi dalam pemolisiannya harus berubah. Tatkala bertahan pada status quo maka akan tergerus jaman. Belum lagi polisi akan terdadak dadak dengan berbagai kejadian yang memerlukan sistem pelayanan yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses. Pelayanan kepolisian melalui pemolisiannya di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan tentu dituntut adanya perubahan.

Perubahan pemolisian tersebut tentu aja memerlukan grand design yang dapat dikatakan mengharmonikan antara model " conventional policing, electronic policing atau e policing atau pemolisian elektronik di era digital dengan forensic policing"

Model e policing dibangun dengan adanya pilar sbb: back office, aplication dan network yang berbasis internet of things (IOT) dan artificial intellegence (AI) agar mampu mewujudkan big data dan one stop service system dengan standar pelayanan prima. Tatkala membangun berbagai sistem aplikasi standar AI adalah mampu merecognize atau menginput data menganalisa sehingga mampu menunjukkan produk kecanggihannya dalam algoritma yang berwujud

59 https://transindonesia.co/2024/06/15/polisi-dan-pemolisiannya-menuju-indonesia-emas-2045/

info grafis info statistik dan info virtual lainya yang real time and any time bahkan on time.

Grand design e policing secara garis besar dapat dibagi dua yaitu pada komunitas dan lalu lintas. E policing pada komunitas dapat dibangun dengan meodel "comnunity policing secara virtual". Konsep geographical community dan community of interest maupun pemolisian yang berbasis dampak masalah dapat dikembangkan sesuai pengkategorian corak masyarakat dan kebudayaannya. Sentra sentra pelayanan publik dapat dibangun dengan sistem K3i yang dikendalikan melalui back office, dengan adanya Call centre dan comand centre berbasis pada peta digital dengan iot dan AI semua laporan informasi terekam dalam jejak digital (digital record).

E-Policing adalah pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi. Bisa juga dipahami e-policing sebagai model pemolisian yang membawa community policing pada sistem online. Dengan demikian E-Policing ini merupakan model pemolisian di era digital yang berupaya menerobos sekat-sekat ruang dan waktu sehingga pelayanan-pelayanan kepolisian dapat terselenggara dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel informatf dan mudah diakses. E-Policing bisa menjadi strategi inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan creative break through. Dikatakan sebagai inisiatif antikorupsi karena dengan sistem-sistem online dapat meminimalisir bertemunya person to person.

Dalam pelayanan-pelayanan kepolisian di bidang administrasi contohnya sudah dapat digantikan secara online melalui e-banking, atau melalui ERI (Electronic Registration and Identification). E-policing juga dikatakan sebagai reformasi birokrasi, karena dapat menerobos sekat-sekat birokrasi yang rumit yang mampu menembus ruang dan waktu misalnya tentang pelayanan informasi dan komunikasi melalui internet. Dalam hubungan tata cara kerja dalam birokrasi dapat diselenggarakan secara langsung dengan SMK (Standar Manajemen

Kinerja) yang dibuat melalui intranet/ internet juga misalnya pada sistem-sistem pelayanan SIM, Samsat, atau juga dalam Traffic Management Centre (TMC) baik melalui media elektronik, cetak maupun media sosial bahkan secara langsung sekaligus.

Adapun pada lalu lintas dpt dilakukan melalui IT for Road safety melalui ERI, SDC, SSC, TMC dan INTAN

Pada era digital ini, e-policing sebagai pemikiran tentang model pemolisian sangat penting bagi pengembangan fungsi lalu lintas dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sesuai manat UU ini, pengembangan lalu lintas bertujuan: (1) mewujudkan dan memelihara keamanan dan keselamatan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); (2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan; (3) membangun budaya tertib berlalu lintas; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang LLAJ.

Kita sadari bersama, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan tingkat modernitas pada transportasi, yang menjadi satu kesatuan dari kegiatan atau aktifitas manusia. Dengan demikian, pada bidang lalu lintas perlu dibangun model pemolisian yang merupakan penjabaran dari e-policing sebagai strategi pembangunan pemolisian di era digital.

Implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas dijabarkan sebagai berikut:

1. Electronic Regident (ERI): suatu sistem pendataan regident secara elektronik yang dikerjakan pada bagian BPKB sebagai landasan keabsahan kepemilikan dan asal usul kendaraan bermotor. Legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan bermotor memang bukan hanya ditangani pihak kepolisian saja, tetapi terkait dengan Bea Cukai, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, dan dealer kendaraan bermotor. Sekalipun demikian, dibutuhkan catatan kepolisian dengan verifikasi dokumen dan cek fisik kendaraan bermotor. Cek fisik mencakup cek fisik kendaraan secara umum, transmisi, dan emisi gas buang. Verifikasi dokumen

dilakukan untuk pelayanan keamanan; dan cek fisik untuk pelayanan keselamatan.

Kemudian dilanjutkan pada bagian STNK dan TNKB sebagai legitimasi pengoperasionalannya. TNKB dapat dibangun melalui Automatic Number Plate Recognation (ANPR). Database kendaraan secara elektronik ini saling berkaitan dengan fungsi kontrol dan forensik kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan prima. Dari ERI dapat dikembangkan menjadi program-program pembatasan, pengoperasionalan Electronic Road Pricing (ERP), Electronic Toll Collect (ETC), e-parking, e-banking. Hal ini akan menerobos serta memangkas birokrasi Samsat karena hukum diterapkan secara elektronik melalui Electronic Law Enforcement (ELE).

2. Safety Driving Centre (SDC): suatu sistem yang dibangun untuk menangani pengemudi atau calon pengemudi yang membutuhkan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui sistem elektronik. Sistem SDC berkaitan dengan ERI (yang dapat dikembangkan dalam Regident Centre (RIC). Sistem ini dapat digunakan sebagai bagian dari fungsi dasar regident yakni memberi jaminan legitimasi (kompetensi untuk SIM), fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan prima kepolisian.
3. Safety Security Centre (SSC): suatu sistem elektronik yang mengatur pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Sistem ini dijalankan oleh Subdit Penegakan Hukum (Gakkum) dan Dikyasa dan Subdit Keamanan Keselamatan (Kamsel). Sistem data dan jaringan informasi akan dikerjakan oleh Traffic Management Centre (TMC).
4. Traffic Management Centre (TMC): sistem ini merupakan Pusat Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi (K3I) untuk memberikan pelayanan cepat (quick response time) yang dapat mengedepankan Satuan PJR, Pamwal, Gatur, dan juga para petugas Satlantas di tingkat Polres maupun Polsek.
5. INTAN sebagai Implementasi Back Office-aplikasi-network untuk Pelayanan Prima

Dalam era digital sistem back office, aplikasi dan network merupakan model untuk mengimplementasikan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Dalam back office ada : 1. sistem filling and recording (database) yang dapat dikategorikan sebagai situpak : a. Situasi (peta/ pemetaan), b. Tugas-tugas pokok (job description dan job analysis), c. Pelaksanaan tugas (sistem pengoperasionalan : rutin, khusus dan kontijensi), d. Sistem administrasi (SDM, perencanaan, sarpras, anggaran), e. Pelaporan, f. Pusat K3i (kodal, koordinasi, komunikasi dan informasi) : 1) Kodal (komando dan pengendalian) berisi sistem aplikasi untuk : a) Mengawasi, memantau, b) Struktur komando/perintah, c) Analisa pengoperasionalan sehingga akan cepat dan memudahkan di dalam memberikan response. 2) Koordinasi : berisi sistem aplikasi jejaring/ network baik dalam internal maupun eksternal sebagai soft power, 3) Komunikasi : berisi sistem aplikasi komunikasi secara langsung/ melalui media baik dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal, 4) Informasi : berisi sistem aplikasi : a) filling and recording (sistem pencatatan dan pendataan), b) searching (cari dan temu), c) filtering (pengkategorian/pengelompokan), d) ratting (peringkat), e) timming (waktu), emergency (darurat), f) early warning (peringatan dini), g) kontijensi (faktor alam, faktor kerusakan infrastuktur dan faktor manusia yang berdampak luas), h) rayonisasi.

**Forensic Policing**

Pemolisian dalam era kenormalan baru pendekatan forensik menjadi suatu kebutuhan dengan membangun “forensic policing”. Forensic Policing merupakan model pemolisian untuk menghadapi berbagai permasalahan keteraturan sosial atas serangan atau gangguan yang di desain sedemikian rupa dari berbagai cara yang berbasis nubika ( nuklir, biologi, kimia, fisika) maupun dari berbagai masalah sosial (idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, dsb). Di samping hal tersebut juga sebagai membangun polisi super/ super cops yaitu polisi dengan pemolisiannya memiliki kompetensinya berkualitas tinggi yang mampu mengatasi berbagai masalah keteraturan sosial dengan dampak luas dan bereskalasi tinggi yang mampu memberikan pelayanan kepada publik secara prima dalam situasi emerjensi.

Di era digital polisi super ini mampu bekerja dalam smart policing yang ada harmoni antara aktual, virtual maupun secara forensik. Secara aktual dapat dikategorikan dalam hal pemolisian yang manual atau bisa dikategorikan konvensional dan masih bertemu face to face atau less technology. Pemolisian secara virtual dapat dikategorikan model E Policing atau pemolisian secara elektronik yang berbasis pada back office, aplication (dengan artificial intellegence) dan net work ( berbasis internet of thing) untuk mendukung terbangunnya big data system dan one stop service system.

Pemolisian forensik dalam konteks kenormalan baru dapat dikembangkan dalam berbagai model pola pemolisiannya maupun penyiapan petugas kepolisian yang berbasis replika genetika.

Polisi super dalam konteks aktual, virtual dan forensik merupakan basis bagi polisi dan pemolisiannya karena dalam era digital sekalipun cara aktual masih diperlukan dan kemampuan dasar pada penanganan kejahatan konvensional diperlukan polisi yang tangguh secara fisik atau otot prima. Pemolisian virtual maupun forensik diperlukan otak atau kemampuan secara intelejensia tinggi untuk mampu menghadapi kejahatan siber maupun kejahatan biologi, kimia nuklir maupun kejahatan di era kenormalan baru. Pelemahan atas pertahanan suatu bangsa dapat dimulai menggerus dari sumber dayanya, keamanan dan rasa aman. Masalah nuklir biologi kimia dan fisika ( nubika) maupun sosial pun menjadi trend kejahatan baru yang dapat menlumpuhkan produktifitas masyarakat dan memicu terjadinya konflik sosial yang besar.

Pandemi covid 19 yang melanda hampir di seluruh dunia mampu melemahkan bahkan mematikan secara fisik maupun psikis. Kekuatan polisi super ini tentu juga dituntut memiliki spirit sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Membangun polisi super tentu memerlukan energi besar dari proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, merupakan pemikiran prof satjipto rahardjo yang memikirkan bagaimana seorang petugas polisi memiliki otak otot dan hati nurani sebagai bhayangkara sejati (penjaga kehidupan, pembangun

peradaban dan sbg pejuang kemanusiaan). proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, proses pemeliharaan dan perawatan hingga proses pengakhiran diprososes pemeliharaan dan perawatan hingga pengakhiran dinas. Polisi super dikembangkan dan dibangun secara O2H (otak otot dan hati nuraninya).

Pemolisian di era digital kita dapat mengenal dan memahami E policing atau pemolisian yang on line dan berbasis elektronik. Sistem big data menjadi bagian one stop service. Di samping E policing kita perlu memahami dan mengembangkan forensic policing.

Forensic policing dibangun dan dikembangkan berbasis pada ilmu pengetahuan secara makro maupun mikro sebagai model pemolisian yang berkaitan dengan nuklir, biologi, kimia, fisika (nubika), ilmu sosial maupun ilmu ilmu lainnya.

Masalah keteraturan sosial yang terganggu atau terhambat bahkan rusak akibat nubika atau dampak masalah sosial perlu penanganan secara profesional tidak sebatas kulitnya melainkan sampai dengan tingkat yang paling mendasar. Dampak dari nubika dan sosial sangat luas yang berdampak pada hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Petugas kepolisian forensik ditumbuhkembangkan secara komprehensif mulai dari rekrutmen pendidikan penggunaan hingga pengakhiran dinasnya. Satuan tugas identifikasi, satuan tugas nubika, laboratorium forensik maupun penelitian dan pengembangan dapat menjadi pendukung forensic policing.

Di masa kenormalan baru seperti pandemi covid 19 sekarang ini bisa dikatakan kegiatan sosial kemasyarakatan terdampak bahkan ada yang mati sama sekali tidak lagi bisa bertahan. Covid 19 mematikan manusia sebagai mahkluk sosial karena tingkat penularannya yang tinggi dan untuk menghambat penularannya diperlukan physical distancing bahkan social distancing. Tatkala kita teliti lebih mendalam covid 19 merupakan virus yang menyebar begitu cepat dan dapat menimbulkan kematian. Covid 19 mungkinkah masalah lain di era kenormalan baru muncul? Ada banyak kemungkinan dari masalah listrik, masalah internet, masalah udara, air dsb bisa menjadi ini suatu pandemi baru atau produk rekayasa untuk meneror dunia.

Forensic policing (FP) dapat dibangun melalui:

1. Political will ( dukungan keputusan politik)
2. Kepemimpinan yg kebijakkannya berpihak pada pengembangan FP
3. Penyiapan konsep dasar hingga pengembangannya
4. Penyiapan SDM yg akan mengawaki ( dari rekrutmen pendidikan dan latihan penggunaan perawatan hingga pengakhiran atau purna tugas)
5. Peralatan pendukung ( laboratorium forensik dsb)
6. Program program riset atau penelitian bagi pencegahan penanganan hingga rehabilitasi dampak rekayasa nubika
7. Tim transformasi sbg support team yg mendukung scr konseptual maupun manajerial
8. Membuat model model implementasi dalam suatu pilot project
9. Penyelenggaraannya perlu di monitor dan trs dievaluasi
10. Pola pengembangannya disesuaikan dengan model-model untuk prediksi antisipasi serta solusinya

Menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern merupakan proses panjang yang setidaknya dimulai dari pemikiran-pemikiran visioner yang luar biasa atau berbeda dengan pemikiran-pemikiran pada umumnya dalam birokrasi yang rasional (berdasar pada kompetensi), kepemimpinan yang visioner, transformasional dan problem solving dalam membangun model pemolisian di era digital dengan berbasis pada sistem online (Electronic Policing).

Selain itu juga diawaki SDM yang profesional yang memiliki attitude yang baik dan sebagai pekerja keras dan pembelajar serta mind set sebagai polisi ideal (penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus). Hal ini ditunjukkan pada birokrasi yang mempunyai Tata Kelola Lembaga Prima (National Class Institution) yang memiliki program-program unggulan yang inspiratif, inovatif, kreatif serta dinamis untuk senantiasa mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi

tuntutan, kebutuhan tantangan, ancaman serta harapan masa kini, mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Dukungan infrastuktur dengan teknologi yang modern masih dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Yang perlu menjadi perhatian juga dalam penganggaran yang terus diperbaiki nilai sejak perencanaan, monitor dan evaluasi untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian. Dengan demikian dapat mendukung terwujud dan terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.

Keberhasilan mengubah pola pikir dan budaya polisi terletak pada edukasi yang berkualitas, kepemimpinan yang tegas, penegakkan hukum yang konsisten, serta sikap yang transparan dan akuntabel.

Smart policing yang mengharmonikan antara conventional policing, E policing dan Forensic pokicing, bukan dimaksudkan untuk menghapus cara-cara manual yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekatan dan persahabatan antara polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Smart Policing justru untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas kinerja sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus. Smart Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbasis elektronik dan forensik yang berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar fungsi/ bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

Pemolisian tersebut dapat dikatakan memenuhi standar pelayanan prima yang berarti: Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Akuntabel, Informatif dan mudah diakses. Pelayanan prima dapat diwujudkan melalui dukungan SDM yang berkarakter, pemimpin-pemimpin yang transformatif, sistem-sistem yang berbasis IT, dan melalui program-program yang unggul dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman bahkan sampai dengan penegakkan hukumnya.

Pembahasan Smart Policing dapat dikategorikan dalam konteks: 1. Kepemimpinan, 2. Administrasi, 3. Operasional, 4. Capacity Building (pembangunan kapasitas bagi institusi).

Unsur-unsur pendukung dalam membangun E-Policing : a) Komitmen moral; b) Political Will; c) Kepemimpinan yang transformatif; d) Infrastruktur (hardware dan software) sebagai Pusat data, informasi, komunikasi, kontrol, koordinasi, komando dan pengendalian; e) Jaringan untuk komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi (K3i) melalui IT dan untuk kontrol situasi; f) Petugas-petugas polisi yang berkarakter (yang mempunyai kompetensi, komitmen dan unggulan) untuk mengawaki untuk yang berbasis wilayah, menangani kepentingan dan dampak masalah; g) Program-program unggulan untuk dioperasionalkan baik yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi, (tingkat manajemen maupun operasionalnya); h) Tim transformasi sebagai tim kendali mutu, tim backup yang menampung ide-ide dari bawah (bottom up) untuk dijadikan kebijakan maupun penjabaran kebijakan-kebijakan dari atas (top down). Tim ini sebagai dirigen untuk terwujudnya harmonisasi dalam dan di luar birokrasi. Dan melakukan monitoring dan evaluasi atas program-program yang diimplementasikan maupun menghasilkan program-program baru; i) Selalu ada produk-produk kreatif sebagai wujud dari pengembangan untuk update, upgrade dan mengantisipasi dinamika disrupsi, era vuca dengan perubahan yang begitu cepat, maka polisi dalam pemolisiannya setidaknya satu langkah lebih maju dari perubahan perubahan itu.

# POLISI DAN PEMOLISIANNYA DALAM MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA [60]

Harmoni (pemeliharaan keamanan secara modern dan manusiawi) yang merupakan model pemolisian dalam masyarakat majemuk Indonesia yang dapat ditunjukan adanya:

1. Adanya Keamanan dan Rasa Aman warga masyarakat
2. Harmoni dalam Kebhinekaan
3. Tegak dan adanya Budaya Patuh Hukum
4. Pemberdayaan Sumber Daya bagi Keadilan Sosial
5. Penanganan Konflik Secara Beradab
6. Semakin Manusiawinya Manusia
7. Terwujud dan Terpelihara Keteraturan Sosial
8. Transparan dan Akuntabel
9. Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
10. Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada publik berstandar Prima.

Acuan Harmoni dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas dalam Menyelesaikan Konflik mencakup:

1. Harmoni atau keseimbangan menata keteraturan dan menyelesaikan konflik
2. Rukun atau spirit akur saling memahami satu sama lain
3. Keadilan sosial memperoleh hak dan wajib memenuhi kewajiban atas sumber daya

60 https://transindonesia.co/2024/06/15/polisi-dan-pemolisiannya-dalam-masyarakat-majemuk-indonesia/

4. Kemanusiaan mengedepankan kemanusiaan yg disadari sbg aset utama
5. Gotong royong saling tolong menolong dalam menyelesaikan sesuatu
6. Loyalitas dan kepatuhan kepada pemimpin atau yang dituakan
7. Religi, seni, tradisi, hobi, komuniti, teknologi sbg bagian dari habitus
8. Nilai nilai yang diyakini untuk menata sesuatu yang tangible maupun yang untangible
9. Menjadi Penengah yang Fair dan dipercaya
10. Mencari Akar Masalah dan Solisi yang dapat diterima semua pihak

Polisi dan Pemolisian yang Harmoni, Dinamis dan Berbagi Kebahagiaan. "Nglaras" dapat dimaknai adanya yang selaras ( harmoni) di sela sela kehidupan. Nglaras itu sederhana yaitu ada rasa bahagia walau serba sederhana dan apa adanya. Kita dapat menganalogikan tubuh kita yang harmoni dalam sistem sistemnya. Ada yang tidak beres sedikit saja rasanya tidak nyaman. Ada sesuatu yang nyelip di gigi rasa tidak nyaman bisa ke mana mana gangguannya.

Polisi dalam pemolisiannya salah satunya adalah mampu melihat potensi potensi kebahagiaan di dalam institusi maupun dalam masyarakat yang dilayaninya. Sekalipun dalam kondisi serba terbatas dan sederhana namun tatkala hati dan jiwa bahagia di situ ada energi positif. Pola pola pemolisian untuk mampu menemukan kebahagiaan sejatinya dapat melalui : religi, seni, tradisi, hobi, komuniti bahkan teknologi, dsb.

Pola pemolisian dalam masyarakat majemuk Indonesia dalam konsep Harmoni ada kepekaan, kepedulian dan bela rasa bagi kemanusiaan, semakin manusiawinya manusia. Ketulusan, kecintaan dan kebanggan diajarkan dilatihkan secara berkesinambungan.

Bukan karena kepentingan yang sarat tipu daya topeng rekayasa. Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik pula. Di situlah seni dalam hidup, walau kadang dianggap biasa biasa dan

seakan semua orang bisa. Seni itu salah satu cara membuat orang bisa bahagia.

Polisi dan pemolisiannya dalam konteks melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum maka keamanan dan rasa aman wujud harmoni dalam kebahagiaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang merupakan ikon peradaban.

Hakekat Keamanan Dalam Negeri:

1. Adanya Keamanan dan Rasa Aman warga masyarakat
2. Harmoni dalam Kebhinekaan
3. Tegak dan adanya Budaya Patuh Hukum
4. Pemberdayaan Sumber Daya bagi Keadilan Sosial
5. Penanganan Konflik Secara Beradab
6. Semakin Manusiawinya Manusia
7. Terwujud dan Terpelihara Keteraturan Sosial
8. Transparan dan Akuntabel
9. Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
10. Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada publik berstandar Prima.

Passion Polisi dalam Pemolisiannya menunjukan :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan
2. Polisi sebagai pembangun peradaban
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan
5. Pemolisiannya menunjukkan tingkat dan kualitas: profesional, cerdas bermoral dan modern yang dilandasi : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing
7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum
8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM

9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial
10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Polisi dan pemolisiannya dalam masyarakat majemuk Indonesia dalam perspektif perilaku organisasi sejatinya membuat harmoni dan berbagi kebahagiaan dengan terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman.

Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial. Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktifitas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan, hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

Ancaman, hambatan dan gangguan harmoni dan kebahagiaan dalam sosial kemasyarakatan yang berpak pada terganggunya aktivitas produksi masyarakat karena adanya:

1. Premanisme

   Premanisme tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, pendekatan personal, lemahnya penegakkan hukum
2. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans national, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika
3. Berbagai bentuk pelanggaran

   Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal

4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya

5. Faktor sumber daya manusia

   Tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia sangat mendasar bagi terwujudnya keteraturan sosial.

6. Faktor politik dan kebijakan publik

   Politik yang tanpa hati nurani kebijakan publiknya kontra produktif. Lebih pada kepentingan diri dan kroninya.

7. Perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi

   Perubahan begitu cepat menembus batas ruang dan waktu. Media dan sistem komunikasi transportasi saling adu kekuatan. Muncul era post truth, hoax, serangan siber, dsb.

8. Corak masyarakat dan kebudayaannya

   Masyarakat yang majemuk akan mengagungkan primordial. Dari situlah legitimasi dan solidaritas dibangun dsn mudah diikuti walau kontraproduktif, tidak rasional dan sarat emosional. Tatkala primordial dijadikan alat maka kebencian akan menjadi penyulut konflik sosial bagaikan perang saudara.

9. Sistem pelayanan publik

   Pelayanan kepada publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan tatkala dalam birokrasi yang sarat dengan KKN maka akan kontra produktif dan terjadi palak memalak. Kekuatan dan kekuasaan untuk mendominasi sumberdaya dengan cara personal in group out group.

10. Sistem ekonomi, industri dan perdagangan.

    Point 1 sd 9 semua bermuara pada point 10.

Polisi dan pemolisiannya setidaknya pada tingkat manajemen dan operasionalnya ditujukan untuk mengatasi 10 point di atas. Pola pola pemolisian dapat secara filosofis dan strategis mengacu model "community policing".

Secara operasionalnya dapat dikategorikan berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah.

Di era digital dan era kenormalan baru model pemolisian dapat dikembangan melalui ” smart policing” agar ada harmoni antara : conventional policing, electronic policing dan forensic policing.

Sistem sistem mendasar pada pemolisian dapat dilihat dari:

1. Ranah Birokrasi yang dikategorikan :
   a. Kepemimpinan
   b. Administrasi
   c. Opersional
   d. Capacity
2. Ranah Masyarakat yang dapat dilihat dari :
   a. Kemitraan
   b. Pelayanan publik
   c. Pemecahan masalah
   d. Jejaring atau net working

Perilaku organisasi kepolisian dibangun secara profesional, cerdas, bermoral dan modern. Dengan pendekatan yang impersonal berbasis kompetensi

Walau penuh : keterbatasan, tekanan dan tantangan bahkan ancaman sekalipun, tatkala suasana kerja harmoni dan bahagia maka akan nyaman, jiwa tenteram serta penuh harapan maka :

1. Kinerja akan terus meningkat kualitasnya.
2. Menurunnya tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Manusia bukan robot. Robot bisa saja lebih canggih dalam bekerja namun tak memiliki hati, tidak ada kebijaksanaan yang memberi harapan sebagai motivasi akan meningkatkan kualitas kinerja.

Perubahan merupakan suatu keniscayaan. Tertinggal dari perubahan akan ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan jaman. Mengimbangi perubahan akan lelah terengah engah. Mampu

melampaui perubahan baru mampu mengatasi dan mengendalikan perubahan dan dampak dampaknya.

Perubahan begitu cepat. Tatkala terlambat atau tidak tepat maka cepat atau lambat pasti sekarat. Dalam membangun institusi yang profesional cerdas bermoral dan modern diperlukan adanya budaya organisasi yang dilandasi nilai nilai inti yang berbasis democratic policing yaitu :

1. Supremasi hukum
2. Jaminan dan perlindungan HAM
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Pembatasan dan pengawasan kewenangan

Democrtic policing dalam implementasinya menunjukan polisi dan pemolisiannya demi kemanusiaan, membangun dan memelihara keteraturan sosial dan peradaban. Hal tersebut dapat ditunjukkan adanya :

1. Kepemimpinan yang transformatif
2. SDM dengan kompetensi yang ahli kreatifitas dan visioner,
3. Dinamis dengan penuh kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya.
4. Didukung dengan modernisasi infrastruktur dan sistem sistemnya
5. Tim transformasi sebagai tim back up
6. Program program unggulan yang menjadi fokus dalam operasional yang bersifat rutin, khusus, maupun kontijensi
7. Penerapan pada pilot project
8. Sistem monitoring dan evaluasi
9. Pola pola pengembangan

Polisi dan pemolisiannya yang harmoni, dinamis dan membagikan kebahagiaan dalam perspektif perilaku organisasi dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif gaya atau model pemolisiannya. Dari berbasis wilayah, berbasis fungsi maupun berbasis dampak masalah.

Model pragmatis dapat dibangun melalui sistem pengamanan kota (sispam kota) melalui model smart city yang dapat ditunjukan melalui :

1. Peta dan pemetaan wilayah dengan berbagai potensi dan permasalahanya yang dapat ditunjukkan dalam sistem back office yang didukung dengan berbagai aplikasi berbasis Artificial Intelligence maupun Internet of Things untuk recognation maupun inputing data wilayah manusia dan kendaraan yang mampu menunjukkan sistem-sistem data untuk menjawab : kebutuhan, kapasitas, prioritas, kecepatan hingga emergensi. Peta dalam back office sebagai pusat K3i (Komando pengendalian, koordinasi, komunikasi dan informasi) saling terhubung dan saling mengisi untuk mampu menunjukkan kualitas road safety secara real time bahkan dengan cepat menjawab secara on time dalam bentuk info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya.
2. Sistem pengorganisasian merupakan sistem pengkategorian dari sistem pemetaan yang mampu mengoperasionalkan sistem-sistem yang menunjukkan tingkat keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran. Sistem ini dapat di bangun sistem coding atau penandaan dengan warna atau signal-signal tertentu yang memberi peringatan bagi petugas back office untuk melakukan tindakan sebagai solusinya.
3. Sistem K3i yang digerakkan dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan informatif. Dalam sistem K3i ini membangun sistem meminimalisir sekecil mungkin terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang berdampak pada masalah road safety yang berupa IT for Road Safety untuk menangani : pelanggaran, kemacetan, kecelakaan atau masalah-masalah lainnya yang berdampak pada terganggu atau rusaknya produktifitas. Pada sistem K3i ini merupakan sistem untuk membangun, memelihara road safety agar mampu berfungsi sebagaimana mestinya yang bersifat rutin atau ada hal-hal khusus yang menjadi prioritas maupun pada kondisi emergensi.
4. Call centre merupakan sistem pendukung K3i untuk komunikasi dan informasi secara mudah dan cepat untuk membangun sistem big data. Misalnya kode panggilan bagi pilar-pilar road safety

(110, 119, 108 dan sebagainya). Call centre ini dikoneksikan satu dengan lainnya sehingga saling terhubung dan saling mengisi satu sama lainnya dalam sistem yang terintegrasi.

5. Big data ini bukan semata-mata data yang terkumpul melainkan data yang dianalisa sehingga dapat dijadikan landasan untuk menjawab berbagai kebutuhan road safety secara real time dan on time melalui sistem AI maupun IoT untuk menunjukkan situasi dan kondisi jalan, pengguna jalan, kendaraan bermotor pada sistem-sistem info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya. Keunggulan big data ini ada pada analisa yang mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi.
6. One gate service system atau sistem pelayanan kepada publik dalam satu pintu. Sistem ini akan menjembatani, memudahkan, mempercepat bahkan mereformasi birokrasi yang parsial, konvensional dan manual. Sistem ini merupakan pelayanan prima sekaligus merupakan inisiatif anti korupsi dalam pelayanan kepada publik yang berupa pelayanan di bidang : keamanan , keselamatan, hukum, administrasi, informasi hingga kemanusiaan.
7. Cyber security sebagai sistem pengamanan data atau sistem penjaminan atas data agar validitas dan keakurasiannya terjaga maupun sistem-sistem pelayanannya mampu mengatasi serangan-serangan dari para hacker. Sistem ini juga bagian dari akuntabilitas kepada publik atas kepercayaan kepada aparatur pemerintah untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM walaupun tetap transparan dan akuntabel.
8. Pola asta siap:
    a. Siap piranti lunak sebagai pendukung dari payung hukum, pedoman-pedoman, SOP dan sistem-sistem lainnya.
    b. Siap posko sebagai back office yang berbasis AI dan IoT untuk menggerakkan berbagai aplikasi sehingga mampu menjadi pusat K3i.
    c. Siap untuk menganalisa berbagai situasi dan kondisi road safety untuk prediksi, antisipasi dan solusinya.
    d. Siap SDM yang mengawaki sebagai cyber cops yang mampu

inputing data, analisa data, menghasilkan produk dan networking.

e. Siap jaringan sampai dengan ke bagian-bagian terkecil yang berbasis wilayah, berbasis kepentingan hingga yang berbasis dampak masalah.
f. Siap mitra sebagai soft power untuk menggerakkan berbagai tindakan preemtif, preventif, represif hingga rehabilitasi.
g. Siap logistik sebagai sarana prasarana yang berbasis IT untuk perorangan, kelompok maupun kesatuan.
h. Siap anggaran secara budgeter maupun non budgeter.

9. Pembangan model pemolisian sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai landasan pengembangan atas penanganan masalah bencana, konflik maupun kerusakan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan secara prima ( cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).
10. Strategi pemolisiannya:
    a. Filosofis
    b. Sosiologis
    c. Yuridis
    d. Politis : geo politik dan geo strategis
    e. Global
    f. Modern dan dinamis
    g. Operasional pelayanan publik

Smart policing dalam pendekatan pemolisian bisa dikatakan Sistem Pengamanan Kota. Kota merupakan suatu wilayah yg menjadi ikon pusat dari berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengembangan kehidupan sosial dilakukan di kota seperti politik ekonomi sosial budaya hukum teknologi pendidikan industri bahkan keamanan dan pertahanan pun ada di kota. Konflik pun yang berdampak luas juga ada di kota. Gesekan gesekan sosial dan perebutan pendominasian

dan pemberdayaan berbagai sumber daya pun ada di kota. Sering kali kita tidak menyadari bahwa kota menjadi inti dari berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan.

Di era digital ini kota dikembangkan menjadi kota yang cerdas atau populer dengan kata smart city. Kota yang cerdas adalah kota yang dapat fungsional dan terjaminnya keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk beraktifitas dan menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Smart city ditunjukkan dalam berbagai gatra kehidupan yamg smart juga termasuk smart keamanan dan rasa aman.

Dalam smart city ditunjukkan adanya smart mobility dan smart activity yang semuanya menumbuhkembangkan produktifitas dan menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Teknologi bukan tujuan melainkan alat atau sarana pendukung mencapai tujuan untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan semakin manusiawinya manusia.

Pola smart policing dapat menggunakan pola "asta siap":

1. Siap piranti lunak sebagai pendukung payung hukum, pedoman sop dan sistem lainnya
2. Siap posko sebagai back offoce yang berbasis AI dan IoT untuk menggerakkan berbagai aplikasi sehingga mampu menjd pusat k3i.
3. Siap untuk menganalisa berbagai situasi dan kondisi road safety untuk prediksi antisipasi dan solusinya.
4. Siap SDM yang mengawaki sebagai cyber cops yang mampu inputing data , analisa data menghasilkan produk dan networking.
5. Siap jaringan samapai ke bagian terkecil yang berbasis wilayah, berbasis kepentingan hingga yang berbasis dampak masalah.
6. Siap mitra sebagai soft power untuk menggerakkan berbagai tindakan preemtif preventif, represif hingga rehabilitasi
7. Siap logistik sebagai sarana prasarana yang berbasis IT untuk perorangan kelompok maupun kesatuan.
8. Siap anggaran secara budgeter maupun non budgeter.

Pola smart policing ini dapat dijadikan model yang dapat dikembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya. Dan bisa digunakan sebagai landasan pengembangan atas penanganan masalah bencana, konflik maupun kerusakan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan secara prima (cepat, tepat, akurat transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).

# POLISI: PENEGAK HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN [61]

Hukum adalah ikon peradaban dan keadilan yang merupakan produk politik yang menjadi kesepakatan untuk menata keteraturan sosial. Penegakan hukum dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk keadilan dan membangun peradaban. Menegakan hukum bukan ajang balas dendam.

Bukan semata mata mencari kesalahan dan menghalahkan, namun juga untuk "memperbaiki dan belajar dari kesalahan". Polisi menegakan hukum sejatinya juga menegakan keadilan, karena demi semakin manusiawinya manusia. Hukum dan keadilan adalah demi kemanusiaan. Di situlah penegak hukum menunjukan pembelaannya dan keberpihakannya bagi kemanusian. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa.

Polisi menegakan hukum juga menegakan keadilan dan demi kemanusiaan, terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial, yang menjadi simbol peradaban.

Hal tersebut tentu saja untuk mendukung pembangunan peradaban. Hukum ditegakkan berbasis:

1. Supremasi hukum, karena hukum menjadi panglimanya.
2. Di dalam menegakan hukum keadilan menjadi yang utama dan pertama. Tatkala menegakan hukum tidak ditemukan keadilan,maka polisi dapat mengambil tindakan : diskresi, alternatif dispute resolution maupun restorative justice.

61 https://transindonesia.co/2024/06/15/polisi-penegak-hukum-penegakan-hukum-dan-keadilan/

3. Penegakan hukum dilakukan sejatinya untuk menyelesaikan konflik secara beradab, dan memiliki dampak pencegahan, agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.
4. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah untuk membuktikan bukan untuk pengakuan tersangka ataupun mengadili. Sehingga diperlukan bukti secara makro dan makro yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Polisi menegakan hukum merupakan bentuk perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada korban dan pencari keadilan.
6. Polisi menegakan hukum agar ada kepastian di dalam membangun budaya tertib dan patuh hukum. Yang juga untuk edukasi.
7. Polisi menegakan hukum secara :transparan dan akuntabel secara: moral, secara hukum, secara administratif, secara fungsional dan secara sosial.

Penegak hukum di dalam menegakan hukum ada etikanya sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan jelas apa yang tidak boleh dilakukan. Di samping itu juga jelas sanksinya bila melakukan pelanggaran. Polisi di dalam menegakan hukum dan keadilan menunjukan sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Tatkala sebaliknya yang terjadi adalah perusakan peradaban. Hukum merupakan panglima bagi suatu kehidupan sosial yang demokratis dan modern yang dpat ditunjukan dari :

1. Para aparatur negara, sektor bisnis maupun akademisinya bekerja dan mempertanggungjawabkan dalam koridor hukum
2. Menata keteraturan sosial dan menyelesaikan konflik secara beradab
3. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
4. Proses penyelidikan dan penyidikan adalah membuktikan berbasis fakta atau fenomena yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Dalam implementasi penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial
6. Tindakan diskresi, alternative dispute resolution dilakukan berbasis nilai nilai, etika, norma dan moral yang berlaku untuk : keadilan, kepentingan yang lebih luas, kemanusiaan maupun edukasi
7. Restorative justice dilakukan untuk perlindugan dan rehabilitasi atas kerusakan sosial yang terjadi karena pelanggaran hukum

Hukum berfungsi dan menjadi ikon peradaban tatkala mendapat dukungan dari :

1. Undang undang hingga peraturan perundang undangnya jelas dan menjadi representasi peradaban yang akan dibangunnya
2. Kebijakan politik berpihak pada keadilan, kemanusiaan, keteraturan sosial dan upaya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Kualitas profesionalisme para aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan keadilan
5. Para pakar akademisi maupun praktisi hukum solid berpikir dan memperdebatkan tercapainya tujuan hukum
6. Sistem sistem perangkat hukum dan pendukungnya mampu meminimalisir potensi penyimpangan hukum dan menjerat secara luas para pelanggarnya
7. Masyarakat secara sosial dan budaya siap dan mendukung untuk membangun budaya patuh hukum
8. Adanya literasi hukum dan penegakan hukum
9. Berfungsinya restorative justice

Hukum akan layu, kering bahkan mati hilang rasa keadilannya tatkala :

a. Proses penegakan hukum menjadi pasar jual beli pasal yang mengatasnamakan keadilan,
b. Banyak kepentingan dan banyak yang meminta diberi hak istimewa

c. Penegak hukumnya bermain mata atau berselingkuh dengan penjahat

d. Tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah

e. Tak mampu tebang habis dan terus kucing kucingan tebang pilih.

# PANDAWA DADHU: PERJUDIAN, SUPATA DAN KARMA DARI JUDI KONVENSIONAL SAMPAI JUDI ONLINE [62]

Kisah Pandawa Dadhu mengakibatkan pelecehan terhadap Drupadi dan kesengsaraan para Pandawa selama 12 tahun terasing yang menstimuli perang Bharatayuda.

Permainan yang berbau perjudian ada di semua lini kehidupan. Rakyat kebanyakan kelas menengah ke bawah akan menjadi korban. Kecanduan dan merindukan permainan ini. Seperti Nalo, Togel, SDSB, Rolet, Klothuq, Cap Jie Kie, Cap Sa, Remi, Domino, Ganjil Genap, Thik Pol, Kiyu Kiyu, Jemek, Tomprang, dan masih banyak lagi. Permainan permainan itu mungkin sudah tidak ada lagi, namun perjudian berkembang dalam wujud on line. Apakah permainan ini bagian dari kehidupan denhan berbagai karmanya? Secara sosial iya karena manusia sebagai mahkluk sosial memerlukan olah raga, olah rasa dan olah jiwa. Apa yang dilakukan orang orang kebanyakan nampaknya asyik asyik saja dan membuat jiwa bahagia, walau faktanya ada yang gila karenanya.

Tidak ada penjudi yang sukses walau pepatah mengatakan bandar pasti menang. Dalam perjudian ada kelicikan, karena semua dimainkan dan dijadikan permainan bagaimana menang. Cara cara tidak rasionalpun akan dilakukan dari bertapa, sungkem dengan orang pinter atau dukun sampai tidur di kuburan. Dalam perjudian kalah menang hal biasa, sesal ada namun apa guna. Perjudian menjadi penyakit masyarakat, mencandui, merusak pikiran, bahkan merusak kehidupan. Orang orang kebanyakan yang sudah kecanduan biasanya menjadi malas bekerja, lelah berpikir, berharap yang tak jelas bahkan bisa terjerumus pada tindakan kriminal. Dalam perjudian kawannya mabuk minuman keras, obat obatan

62 https://transindonesia.co/2024/06/16/pandawa-dadhu-perjudian-supata-dan-karma-dari-judi-konvensional-sampai-judi-online/

bahkan narkotika. Belum lagi prostitusi. Uang gampang dicari maka menghamburkan uang bagai kesenangan. Banyak lupa diri lupa masa depan, lupa keluarga anak istri di biarkan. Permainan perjudian menjurus pada kerusakan moral.

Para bandar tentu mencari keuntungan dan menjadikan bisnis haram ini sebagai jalan pintas menjadi kaya. Tentu kalau fair bisa kebat kebit jantungan. Penuh kekhawatiran bahkan bisa saja gulung tikar, bangkrut. Para pengelola perjudian dengan berbagai cara seakan akan mengeluarkan bocoran denhan nomor nomor kunci dan syair syair sandi yang serba samar membingungkan sebagai panduan ramalan. Namanya juga permainan kode bocoran dan sandi sandi jitu anti blong semakin menggoda.

Syair syair sandi dan berbagai rumusan rumusan jitu tahun 1970 an sd 1990 an menjadi inspirasi karya seni rupa, kritik sosial atas candu yang menyesakan dan menyesatkan kehidupan. Apa yang ditampilkan mengingatkan kalau kecanduan permainan perjudiaan bisa kehilangan kewarasan. Lupa apa saja. Perjudian menjadi penyakit masyarakat yang korbannya rakyat biasa. Seperti lagu Rhoma Irama ” yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin “. Permainan memang ada masanya dan setiap masa ada permainannya. Memang menyedihkan tatkala semua menutup mata dan permisif terharapnya. Duka lara dampak akibatnya sangat panjang dan sesal tiada guna.

Perjudian dalam kisah pewayangan menjadi pengingat betapa sengsaranya akibatnya. Tak hanya itu sumpah supata dan karma bisa saja menerpa.

Mengatasi perjudian akan sia sia tatkala para aparatnya kualitas literasinya rendah. Mereka akan terbeli bahkan rela dan bangga membackingi walau mengkhianati rakyatnya.

Seni sebagai pelipur lara dan refleksi kritis atas judi dan perjudian dapat direfleksikan melalui karya rupa ” Ekspresi syair sandi”, dalam topik judul karya:

1. Permainan atau perjudian yang memggambarkan permainan yang berbeda dan bertentangan dengan keutamaannya akan menjadi perjudian.

2. Kisah kisah di balik syair sandi refleksi di luar logika yang mencandui para pecandunya untuk merumuskan dengan othak athik gathuk.
3. Nembus dan blong sama saja hanya rasa
   Merefleksikan kalah menang hal biasa dan terus berusaha bahagia walau sia sia.
4. Candu sosial
   Perjudian mencandui dan merusak moral namun terus saja dipuja puja dan dilakoninya.
5. Setiap masa ada permainannya, setiap permainan ada masanya
   Perjudian beragam dari manual konvensional sampai di era digital ada permainananya yang menjurus pada judi.
6. Cekokan instan
   Perjudian menjerumuskan dalam cara instan dalam memenuhi kebutuhan yang membuat malas bekerja dan berpikir.
7. Apa mau dikata kalau sudah terlena
   Kepasrahan karena merasa sia sia melawannya karena semua sudah kecanduan gila.
8. Siapa saja bisa kena
   Judi bagai pandemi siapa saja bisa tertular termasuk para aparatur dan para tokohnya, dan akan berulang dan berulang sekalipun mengatakan sudah sembuh total
9. Salim sungkem sebelum bermain
   Saking kepingin cepat kaya maka siapapun yang dianghap sebagai suhu atau memberikan kemenangan akan dicium tangannya bahkan kakinya untuk kemenangannya sekalipun jauh dari logika.
10. Permainan, yang memainkan atas hidup dan kehidupan namun dipuja puji.

Macam macam judi yang ada dalam kehidupan sosial kemasyarakatan antara lain:

1. Rolet kampung
2. Klothuq
3. Jemek
4. Qiu qiu

5. Joker
6. Domino
7. Thek pol
8. Tomprang
9. Taksio
10. Nalo
11. Togel
12. Adu ayam
13. Berbagai jenis judi online, dsb.

Logika menguap mengolah angka angka dalam matematik mistik .Dari kata menjadi angka atau peristiwa yang diangkakan. Menebak mimpi dalam angka.Yang penting hepi apapun yang terjadi. Spirit menembus mimpi bejo bejan, mengadu nasib untung untungan.Othak athik gathuk asal mathuk, walau harap harap cemas menunggu yang tak tentu, apa saja yang penting jitu. Kalah menang hanya permainan. Perhitungan untung untungan. Walau tahu ada tipu tipu sang bandar.

Sengkuni disimbolkan sebagai tokoh licik dengan dadhu sebagai senjatanya melucuti lawannya. Bisa dibayangkan betapa judi bagai pandemi yang mencanduai siapa saja, termasuk tokoh yang dianggap mulia seperti Yudistira bisa mempertaruhkan kerajaannya, adik adiknya bahkan istrinya. Sekarang ini judi on line marasuk pula di kalangan ibu ibu, anak anak sekolah, para aparat yang tidak lagi menonton sinetron atau belajar atau bekerja dengan baik melainkan main judi on line.

Judi menurut saya bukan seni, karena berefek tergerusnya nilai nilai kemanusiaan. Kisah Pandawa Dadhu bagaimana saktinya para Pandawa dan para Punggawa Hastina Pura tidak bisa berbuat apa apa tatkala ada pelecehan terhadap Drupadi. Bagaimana bila Basudewa Krisna tidak menolong sahabatnya, tentu Drupadi menjadi ajang pelecehan kehormatan keluarga Bharata. Bisma, Begawan Durna, Raja Angga Karna hingga Raja Drestarata tidak bisa menghentikan perilaku buruk Kurawa. Di era digital sistem on line yang dibanggakan sebagai solusi di masa new normal ternyata ada sisi gelapnya salah satunya judi on line. Itukah supata dan karma dalam kehidupan tatkala literasi aparaturnya rendah?

# DIGITAL LEADERSHIP: JAGO SOSIAL? [63]

Digital leadership formal maupun non formal di era digital memiliki followers yang selalu mengidolakan dan mengikutinya. Apa yang dikatakan, dilakukan mempengaruhi bagi banyak orang. Para pemimpin itu memiliki hubungan sosial dengan warga net maupun warga masyarakat secara umum dalam berbagai dialognya di media. Ia dianggap memiliki manfaat, mencerahkan, memotivasi, memberdayakan, memberi solusi bahkan menghibur.

Pemimpin di era digital bukan lagi bisa memerintah atau marah atau menakut nakuti. Jago bukan lagi jagoan sakti mandraguna anti peluru, anti bacok dsb melainkan membawa manfaat. "Pemimpin kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane". Kemanfaatan inilah yang ditunjukan sebagai pelopor, dan mampu memberdayakan media mulai dari membranding hingga memarketingkan. Pemimpin di era digital mau tidak mau literasinya menunjukan kualitas yang tinggi.

Digital leadership konteks polisi dan pemolisiannya merefleksikan keutamaan bagi Kemanusiaan, Keteraturan Sosial untuk membangun Peradaban. Rabindranath Tagore mengatakan: Adab adalah Perilaku yang Indah. Maknanya peradaban itu diciptakan dan dibangun dari kaum yang memiliki literasi tinggi yang terungkap dari: Pikiran, Perkataan, Perbuatannya. Konteks digital leadership moralitas para pemimpin juga menjadi taruhannya. Digital leadership yang menjadi panutan Pantas dan Benar, Layak dan Menyelamatkan.

Hubungan sosial ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi ruang bagi banyak orang dalam konteks meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jagonya para Digital Leadership muncul bagaimana bisa menjadi kiblat kebaikan dan kebenaran adanya kemanfaatan. Digital Leadership jago dalam bidang Media Intelejen sehingga mampu memberdayakan pemolisiannya dalam Elektronic Policing sebagai model pemolisian di era digital.

63 https://transindonesia.co/2024/06/17/digital-leadership-jago-sosial/
https://polisiindonesia.id/2024/06/17/cdl-digital-leadership-jago-sosial/

Electronic Policing merupakan model pemolisian yang menjembatani antara dunia virtual maupun aktual agar adanya pelayanan prima kepolisian yang mencakup pelayanan : Keamanan, Keselamatan, Hukum, Administrasi, Informasi, dan Kemanusiaan. Membangun Electronic Policing dalam sistem saling terhubung ( on line ) yang berbasis elektronik dengan adanya:

1. Back office sebagai operation room yang berbasis pada big data system yang dapat dikembangkan sebagai sentra pelayanan publik dalam One Stop Service
2. Application yang berbasis AI sehingga dapat menginput data, menganalisa dan menghasilkan produk dalam algoritma yang berwujud pad ingo grafis, info statistik maupun info virtual lainnya yang merupakan Prediksi, Antisipasi

Electronic Policing dapat dikembangkan dalam model Smart City yang dalam pendekatan pemolisian dapat diimplementasikan pada:

1. Smart Living

   Model pemeliharaan Keamanan pada Komuniti atau yang didasari pemolisian yang berbasis :

   a. Wilayah
   b. Fungsi
   c. Dampak Masalah

2. Smart Mobiliti

   Dapat dibangun dalam model It for Road Safety (Road safety policing) yang mendukung : road safety management, safer road, safer vehicle, safer people maupun posr crash.

Dari algoritma yang dihasilkan dapat diwujudkan dalam Index Safety and Security. Digital Leadership kebijakannya mendukung pada pengembangan cyber cops yang akan mengawaki dan ini sebagai reformasi birokrasi, inisiatif anti korupsi maupun creative break through maupun anti premanisme.

Yang dapat dipertanggungjawabkan secara: Moral, Hukum, Administrasi, Fungsional maupun Sosial. Di sinilah Digital Leadership passionnya membangun polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.

# DEBAT AKADEMIK DAN DEBAT PUBLIK DIMULAI DARI LEMBAGA PENDIDIKAN? [64]

Sespim sebagai sekolah bagi pemimpin masa depan yang profesional cerdas bermoral dan modern yang kualitas literasinya tinggi. Harapannya kelak tatkala menjadi pemimpin dalam mengambil kebijakan dan menggunakan kekuasaannya bijaksana sebagai orang yang bajik. Sejalan dengan itu maka para peserta didik bukan lagi sebatas ujian yang membuat para peserta didik terbelenggu dan dalam posisi rendah.

Ujian ini menunjukan tidak ada posisi yang egaliter. Penguji akan menduduki strata lebih tinggi. Sharing power tidak seimbang. Dampak dari sistem ujian ini tidak tepat bagi sekolah pemimpin. Ujian dslam konteks ini subyektifitasnya tinggi. Tentu saja lebih banyak model tanya jawab ala klompen capir ala orba di dalam bernagai acara yang otoriternya begitu kental.

Tentu saja pseudo atau sarat dengan kepura puraan. Hal ini tidak membuat cerdas dan berani, padahal kelak tatkala menjadi pemimpin segala kebijakan yang diambil siap untuk diperdebatkan dan dimintakan pertanggung jawabannya. Debat publik dan debat akademik ini bukanlah debat kusir yang asal njeplak atau ada tanya ada jawab.

Lembaga pendidikan semestinya menjadi pusat unggulan, tempat yang mencerahkan, mencerdaskan dan membahagiakan. Faktanya tidak selalu sama antara yang ideal dan aktual. Hal itu setidaknya dikarenakan:

1. Lembaga pendidikan sebatas formalitas mendapatkan ijasah

64 https://transindonesia.co/2024/06/17/debat-akademik-dan-debat-publik-dimulai-dari-lembaga-pendidikan/

2. Proses pembelajaran dan kurikulum membebani dan membelenggu kebebasan dan keberanian berpikir
3. Para guru seakan menjadi dewa pengetahuan yang kastanya paling tinggi yang mengutamakan kegiatan menilai, mengoreksi yang sibuk pada menyalahkan bahkan mematikan karakter
4. Nilai dan ranking menjadi keutamaan, walaupun sarat pembenaran yang jauh dari kebenaran
5. Model feodalisme, otoritarianisme yang berdampak pada kekerasan simbolik hingga fisik, berdampak pada kejahatan dalam pendidikan
6. Model hafalan dan copy paste sehingga sulit untuk berubah atau diajak melakukan perubahan akibat kemapanan dan kenyamanan
7. Peserta didik lelah, malas dan lemah dalam berpikir dan mengandalkan pemikiran orang lain, dampaknya sebatas menjadi ekor, penuh ketakutan, berorientasi pada cara cara instan
8. Tidak adanya nuansa kebahagiaan yang mencerahkan dan mencerdaskan, berdampak pada sistem doktrin, mandatori yang membuat dialog yang topdon, sikap apatis dan berupaya menyenangkan para guru maupun bagian penilaian
9. Perdebatannya sebatas pada hal hal yang membuat kontra produktif
10. Penuh dengan kepura puraan yang berdampak pada trik dan intrik yang menghalalkan segala cara

Tatkala lembaga pendidikan malas, enggan bahkan takut merefleksi diri maka reformasi sebatas pada kepentingan supervisial yang diutamakan. Buruknya pendidikan akan menjadi bom waktu di masa depan. Kebanggaan akan kecurangan, keculasan dan kemunafikan berdampak menyubur KKN.

Pendidikan yang di luar bagi semakin manusiawinya manusia sejatinya bukan pendidikan. Pendidikan yang ada unsur balas dendam atau unsur kebrutalan itupun merusak peradaban karena akan menghasilkan kaum luka batin yang berdampak pada berbagai penyimpangan atas kemanusiaan. Pendidikan dimulai dari gurunya atau pengajarnya. Peran

guru berpengaruh besar atas hasil didik dari pendidikan. Kualitas guru bukan sebatas pada intelektualnya namun juga moralitasnya. Guru menjadi kunci bagi keberhasilan suatu pendidikan.

Pendidikan yang mendidik setidaknya dapat dilihat dari :

1. Lembaga atau wadah yang merupakan institusi pendidikan
2. Implementasi atas visi dan misi pendidikan yang dilaksanakan berbasis pembangunan karakter secara konsisten dan konsekuen
3. Kualitas guru sebagai tenaga pengajar adalah orang orang yang mampu menjadi ikon dan layak dijadikan panutan atau pikiran perkataan dan perbuatannya
4. Sistem pengajaran pelatihan dan pengasuhannya yang berbasis pada standar standar pendidikan yang universal dan global walaupun juga menggunakan kearifan lokal
5. Kurikulum pelajarannya berbasis pada pencerdasan intelektual, emosional dan sosial
6. Pola pengajarannya dibangun dengan landasan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
7. Infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya atau sarana prasarananya untuk mendukung proses belajar berlatih dengan pendekatan holistik dan sistemik yang dinamis sesuai dengan kebutuhan kekinian
8. Tradisi dan nuansa akademis yang membudaya dlm lingkungan lembaga pendidikan
9. Ada wadah bagi penampungan pemikiran dan ide ide kreatif seperti jurnal maupun penerbitan
10. Kualitas rekrutmen peserta didik berbasis pada kejujuran transparan akuntabilitas secara : moral, secara administrasi, secara hukum yang berbasis pada standar nasional maupun internasional
11. Para peserta didik dapat merasakan dirinya tercerahkan
12. Prestasi peserta didik sebagai hasil didik yang fungsional dan mampu mjd ikon yg berkarakter

13. Pengakuan dan apresiasi dari masyarakat luas atas prestasi dan kinerjanya yang profesional cerdas bermoral dan modern

Proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan melalui cara apa saja. Di era digital labirin ruang dan waktu terbuka lebar tidak lagi tersekat sekat. Mind set pendidikan harus mulai dirubah dan bukan semata mata pada ruang ruang kelas dan menghafal atau mendengar apa yang dikatakan para gurunya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di era digital dan kehadiran artificial intellegent akan menggeser pola pembelajaran. Lembaga pendidikan untuk tetap dapat menjamin kualitas atau hasil didik yang cerdas dan tercerahkan maka proses belajar dibangun atas dasar spiritualitas, moralitas, kesadaran, tanggung jawab, disiplin dan budaya. Baik dari penyelenggara atau lembaga pendidikan maupun para guru sampai kepada sistem pengajarannya. Kunci. Bagaimana mampu merubah mind set program belajar mengajar dari cara konvensional ke arah kekinian yang boleh dikatakan aktual maupun virtual.

Reformasi pendidikan dapat dilakukan dengan menyiapkan atau membangun:

1. Lembaga pendidikan mampu berwibawa dan menunjukkan kualitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan atau proses belajar dengan baik dan benar
2. Para dosen atau Guru guru sebagai pilar lembaga pendidikan berkualitas dan memikiki kompetensi akademik serta mampu memotivasi mahasiswa berani kreatif dan mengajarkan cara berpikir yang proaktif problem solving untuk menemukan sesuatu kebaruan dan melakukan pembaruan
3. Dosen atau guru menjadi teladan dan didudukkan porsinya sebagai ikon pembangun peradaban, yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Fasilitas pendidikan membuat sistem back office, application dan net work yang mampu memberikan dukungan pendidikan secara virtual ada literasi ada sistem coach sistem diskusi dan belajar

secara virtual serta ada sistem pengawasan atau kontrol yang mampu menghandle semua kegiatan belajar mengajar secara aktual maupun virtual

5. Para mahasiswa belajar dengan cara berpikir kreatif, inovatif, problem solving dan visioner
6. Proses belajar mengajar yang berbasis pada : keilmuan, pemahamanan dan pengembangan teoritikal dan konseptual, studi kasus , problem solving, pemikiran yang berkaitan kebaruan dan pembaruan
7. Ada forum diskusi sebagai basis dialog peradaban danlam mengembangan ilmu pengetahuan yang kekinian
8. Ada penerbitan untuk menampung karya para dosen atau guru dan mahasiswa secara elektronik atau cara konvensional
9. Ada jurnal ilmiah on line dan penerbitan e book yang mendukung pembangunan literasi
10. Ada kerjasama dalam maupun luar negeri untuk kegiatan akademik seperti Penelitian ilmiah, debat publik, bedah buku, simposium, workshop dll
11. Ada ikatan alumni sebagai wadah dialog dalam membangun jejaring sosial maupun pengembangan ikmu pengetahuan juga penguatan lembaga pendidikan
12. Aktif dalam kegiatan forum akademis nasional maupun internasional bench mark seminar work shop dan studi / kajian nasional maupun internasional
13. Ada publikasi proses pengajarannya ke media yang dapat dijadikan referensi dan literasi secara on line
14. Menjadi anggota forum atau asosiasi akademik nasional maupun internasional

Pendidikan di era digital tetap mampu mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, pencerahan maupun transformasi

ilmu pengetahuan, kaderisasi dan pembangunan peradaban. Kesemuanya itu siap untuk diperdebatkan secara akademik sebagai basis dari debat publik

# BAMBANG EKALAYA DAN MODEL BELAJAR VIRTUAL [65]

Bambang Ekalaya seorang ksatria yang amat mengagumi Begawan Durna. Ia ingin belajar memanah pada Begawan Durna, namun Bambang Ekalaya ditolak oleh sang Begawan, karena sudah terikat janji untuk mengajar para ksatria Hastina Pura, khususnya Para Pandawa dan Para Kurawa. Saking cinta dan bangganya kepada Begawan Durna diam diam Bambang Ekalaya membuat patung Begawan Durna yang di dudukan seolah sebagai guru spiritualnya yang mengajar dan melatih dan mengawasinya. Bambang Ekalaya berlatih memanah dengan penuh semangat dan bersungguh sungguh hingga kepiawaiannya tak kalah dengan murid kesayangan sang Begawan yaitu Arjuna.

Arjuna memiliki rasa khawatir yang tinggi, jangan-jangan Bambang Ekalaya akan mengalahkan dirinya. Arjuna komplain kepada sang Begawan. Demi murid kesayangannya hingga sang Begawan tega meminta Bambang Ekalaya memotong kedua ibu jarinya hingga Bambang Ekalaya menemui ajalnya. Sukma Bambang Ekalaya akan menjemput Sukma Begawan Durna pada saat perang Baratayudha yang ditakdirkan mati di tangan Drestajumna putra prabu Drupada.

Ala belajar Bambang Ekalaya belajar di era digital bisa dikatakan belajar virtual.

Di era digital dengan kehadiran AI dalam pendidikan bisa membantu mentransformasi pengetahuan dan ketrampilan. Hakekat pendidikan untuk mentransformasi, mencerahkan menjadikan siapa bukan sebatas apa dan bagaimana. Manusia adalah aset utama bangsa ini. Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Proses belajar bukan lagi sebatas di kelas atau cara cara konvensional yang membelenggu melainkan ada di mana saja, dengan cara apa saja, kapan saja dan dengan siapa saja bisa.

65 https://transindonesia.co/2024/06/18/bambang-ekalaya-dan-model-belajar-virtual/

Pendidikan virtual pada prinsipnya sama dengan pendidikan aktual yang merupakan suatu cara untuk:

1. Menyadarkan
2. Mencerahkan
3. Memanusiakan bagi semakin manusiawinya manusia
4. Regenarasi dan kaderisasi
5. Membangun dan menumbuhkembangkan peradaban
6. Mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial
8. Menjaga kedaulatan, daya tahan, daya tangkal bahkan daya saing suatu bangsa.
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Ke sembilan point di atas saling terkait satu sama lainnya dan bukan seperti urutan abjad kegunaannya, melainkan menjadi satu kesatuan bagi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan virtual dengan adanya media dan aplikasi yang berbasis aplikasi maka cara berpikir secara logika, etika dan estetika untuk menyelesaikan berbagai masalah. Atau bisa saja secara kreatif imajinatif seperti berpikir model helicopter view atau secara konseptual, teoritikal, aplikasi pada studi kasus.

"Belajar dan menjadi pembelajar merupakan moralitas untuk membangun hidup dan kehidupan yang lebih baik demi semakin manusiawinya manusia".

Belajar bisa dari mana saja, dari apa saja dan dari siapa saja bahkan di mana saja. Belajar tidak sebatas di ruang kelas yang berisi tembok tembok pembelenggu kemerdekaan berpikir atau guru guru yang menakut nakuti yang melemahkan sehingga tidak lagi menjadi pemberani. Tatkala belajar didoktrin dan dijejali berbagai hal tanpa memahami kemanfaatannya maka sebenarnya itu sekedar menghabiskan jam belajar.

**" non scolae set vitae discismus" belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup"**

Belajar model konseptual maupun teoritikal merupakan kampuan

mengabstraksikan dalam menemukan hakekat atau inti akan sesuatu dengan menghubung hubungkan antara konsep konsep yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan sesuatu fenomena. Teori tatkala memiliki kekuatan dan kesahihan, memiliki power dan menjadi ikon. Namun bukan disakralkal atau didewakan sehingga para orang hanya menghafal bahkan membanggakan menggunakan teori ini itu seakan sebagai pemgecer teori dan lupa bahwa sejatinya tepri sebagai acuan atau kerangka berpikir akademisnya.

Teori merupakan suatu karya cipta penemunya bisa berdasar pengalamannya bisa juga dari hasil risetnya atau hasil dari konstruksi berpikirnya dengan menggunakan atau mengkritisi teori teori yang terdahulu. Teori dapat dipahami sebagai hakekat hubungan antara konsep konsep yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan atau menerangkan suatu fenomena. Berpikir teoritis merupakan berpikir yang abstrak atau imajinatif yang mampu menemukan prinsip mendasar yang berlaku umum bukan pragmatis.

Teori bukan dihafal bukan sebatas dijejer jejer atau dipajang namun digunakan untuk menjelaskan apa makna di balik suatu gejala atau fakta. Tatkala tanpa kemampuan imajinasi maka teori sebatas dihafal dan tidak akan dapat mengurai dalam konstruksi/ kerangkanya atau dekonstruksinya. Tatkala teori dihafalkan atau tidak dijadikan kerangka berpikir atau mengkonstruksi maka teori itu akan tumpul atau flat atau datar saja. Tidak akan mampu menjadi sarana menyelami kedalaman atau membongkar labirin atas suatu fenomena. Bahkan kadang malah membelenggu akibat dihafal atau semacam kewajiban saja. Tatkala menulis atau membuat kajian atas sesuatu apabila sudah menempel teori ini itu di mana mana seolah olah sudah benar.

Pola pembelajarannya berubah dari aktual ke virtual dan membranding para siswa sehingga bukan sebatas apa bagaimana dan mengapa melainkan mampu membangun menjadi siapa.

Beberapa hal yang dapat dibangun atau setidaknya dapat diterapkan di masa transisi menghadapi perubahan besar kehadiran AI dapa lembaga pendidikan setidaknya melalui:

1. Membangun sistem literasi

2. Melakukan pembelajaran melalui dialog secara proaktif dan problem solving
3. Keutamaan ilmu yang dipelajari dijadikan core value dan standar keberhasilannya
4. Lembaga pendidikan mampu berwibawa dan menunjukkan kualitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan atau proses belajar dengan baik dan benar
5. Para dosen atau Guru guru mampu mengikuti perubahan yang begitu cepat, memposisikan sebagai pilar lembaga pendidikan yang berkualitas dan memiliki kompetensi akademik serta mampu memotivasi mahasiswa berani kreatif serta menjadi ikon kecerdasan atau keahlian
6. Fasilitas pendidikan membuat sistem back office, application berbasis AI dan net work berbasis IoT yang mampu memberikan dukungan pendidikan secara virtual dalam model literasi ada sistem dialog peradaban dan branding memanfaatkan media dan jejaringnya.
7. Para siswa atau peserta didik dimotivasi dan dilatih belajar dengan cara berpikir kreatif inovatif problem solving dan visioner
8. Proses belajar mengajar yang berbasis pada :
   a. keilmuan,
   b. pemahaman dan pengembangan teori dan konsep,
   c. studi kasus ,
   d. problem solving, yang dikembangkan dalam pemikiran kebaruan sebagai pembaruan
9. Forum diskusi sebagai basis dialog peradaban bagi pengembangan ilmu pengetahuan
10. Penerbitan untuk menampung karya para dosen atau guru dan siswa/ peserta secara elektronik atau cara konvensional
11. Jurnal ilmiah
12. Kerjasama dalam maupun luar negeri untuk kegiatan akademik : penelitian ilmiah, debat publik, bedah buku, bhakti masyarakat dll
13. Ada ikatan alumni

14. Aktif dlm kegiatan forum akademis nasional maupun internasional bench mark seminar work shop dan studi nasional dan internasional
15. Ada publikasi pengajarannya ke media sehingga dapat dijadikan referensi dan literasi
16. Menjadi anggota forum atau asosiasi akademik nasional maupun internasional

Model belajar Bambang Ekalaya menginspirasi model belajar secara virtual dengan spirit dan cara berpikir dalam mind set kekinian yang berani melepaskan ala old mind.

# MENGAPA DIGITAL LEADERSHIP DAN E POLICING HARUS DISIAPKAN? [66]

Di era digital dengan kehadiran Artificial Intellegence (AI) begitu pesat perkembangannya. AI bisa digunakan untuk berbagai aktifitas dan kegiatan manusia bahkan pekerjaan manusiapun bisa digantikan dengan AI. Kalau AI bisa digunakan untuk hal baik bagaimana dengan sebaliknya? Mungkinkah AI ditangan orang orang jahat bisa digunakan sebagai kejahatan baru atau sesuatu yang sama sekali belum terpikirkan penanganannya. Kita semua sadar tidak ada suatu kejahatan kalau belum ada aturannya. Hukum tertinggal dari perubahan yang begitu cepat.

Electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dengan diawaki oleh petugas polisi siber (cyber cops) untuk melayani publik maupun mengatasi hal hal yang kontra produktif akibat dampak dari era vuca (volatility, unpredictable, complexity, ambiguity). Tatkala polisi dan pemolisiannya tertinggal daei perubahan maka tidak akan mampu mengatasi permasalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini akan sangat berdampak luas terutama hilang atau turunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

E Policing yang pilarnya pada back office sebagai operation room, dan sentra pelayanan publik ini perlu dibangun dengan dukungan application yang berbasis pada AI untuk inputing data, analisa data dan bisa menghasilkan produk dalam algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya yang bisa digunakan untuk : memprediksi, mengantisipasi, memecahkan masalah atau membongkar kerja AI yang kontra produktif. Yang dapat diakses real time, on time dan any time. Algoritma ini yang menjadi acuan pada kualitas kinerja pemolisian.

Untuk mampu mengimplementasikan E policing perlu adanya digital leadership (DL) atau pemimpin di era digital. Pemimpin di era digital

66 https://transindonesia.co/2024/06/20/mengapa-digital-leadership-dan-e-policing-harus-disiapkan/ https://polisiindonesia.id/2024/06/20/cdl-mengapa-digital-leadership-dan-e-policing-harus-disiapkan/

memiliki model kepemimpinan yang kebijakannya mendukung untuk mewujudkan E policing yang mampu memberikan pelayanan prima kepolisian dan mendukung SPBE.

DL mau tidak mau harus memikirkan bagaimana mampu membangun aplikasi aplikasi yang berbasis AI untuk :

1. Recognize
2. Maping
3. Analyse
4. Produk dalam bentuk algoritma
5. Networking
6. Counter issue
7. Media policing
8. Pengembangan intelejen
9. Emergency maupun Contigency policing
10. Quick response
11. Index Safety and Security
12. Mengembangkan model model pemolisian yang berbasis wilayah, fungsi maupun dampak masalah
13. Menyiapkan SDM yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
14. Menangani hoax yang menjadi senjata di era post truth ataupun serangan buzer
15. Menata keteraturan sosial di dunia virtual
16. Menangani cyber crime yang berkaitan dengan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb
17. Menghadapi proxy war
18. Melindungi aset aset bangsa
19. Menjamin keamanan harta benda, jiwa raga dari citizen maupun netizen
20. Memikirkan model policing untuk mengatasi point 1 sd 19

Masih banyak hal yang menjadi tugas tanggung jawab dan fungsi dari para pemimpin di era digital.

# PEMIMPIN DIGITAL [67]

Pemimpin digital apakah sama dengan AI atau mesin atau robot yang memimpin? Tentu saja bukan, karena AI, robot atau mesin tidak memiliki jiwa, rasa, hati dan imajinasi. Manusia sebagai aset utama bangsa. Bisa saja AI, robot atau mesin jauh lebih cerdas dari manusia namun kebijaksanaan dalam kebijakannya bisa dipertanyakan atau diperdebatkan.

Apakah manusia tidak sarat dengan kepentingan? Misalnya sarat dengan penyimpangan, sarat dengan penyalah gunaan kewenangan, sarat dengan kekejaman (homo homini lupus), sarat dengan ketidak adilan dsb, sedangkan AI, robot atau mesin tidak. Manusia memiliki akal budi, kebebasan, kemerdekaan memilih yang ” pantas dan benar, layak dan menyelamatkan”. Sedang AI, robot, mesin itu tidak ada. Sesuai programnya sesuai apa yang dikembangkannya itulah kebijakannya, yang bisa saja pukul rata atau digeneralisir. Banyak pekerjaan yang hilang tergantikan AI, robot atau mesin dengan kualitas dan kuantitas yang jauh dari karya manusia yang bisa dikaitkan hand made.

Seni (art) dengan kerajinan (craft) apa bedanya? Secara umum art limited edition, lebih mengedepankan hati, rasa bahkan jiwa. Adakalanya hanya satu kali dikerjakan walaupun bisa diolah dalam banyak hal. Di dalam kerajinan atau craft bisa dikerjakan banyak orang untuk mengulang atau memproduksi lebih banyak lagi. Bisa dipahami bahwa yang dikerjakan manusia yang tentu saja ada rasa, hati bahkan jiwa bisa dikatakan jauh dari seni apalagi yang dikerjakan oleh mesin.

Pemimpin digital (digital leadership) prinsipnya sama dengan pemimpin yang bajik agar kebijakannya tetap bijaksana sekalipun menghadapi berbagai permasalah yang tidak terprediksi, kompleks, tidak menentu dan berdampak luas yang berubah dengan begitu cepat. Di sinilah pentingnya pemimpin memiliki spirit : ” pantas dan benar, layak dan menyelamatkan” yang memiliki kepekaan, kepedulian dan bela rasa bagi semakin manusiawinya manusia.

67 https://transindonesia.co/2024/06/24/pemimpin-digital/

Dunia virtual atau dunia digital semakin menguasai atau menjamah di semua lini kehidupan manusia. Kalau kita melihat AI, robot, mesin bisa untuk berbagai hal positif maka pertanyaannya bisakah untuk sesuatu yang negatif dan kontraproduktif yang berdampak luas ? Jawabannya tentu bisa. Pemimpin yang transformatif di era digital akan mampu : belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Siap di masa kini dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian Digital leadership bukan pemimpin dari AI, robot atau mesin, melainkan pemimpin di era digital sebagai orang bajik yang kebijakannya bijaksana.

Pemimpin di era digital tetap menjadi sumber energi, sumber inspirasi, memotivasi, memberi solusi, berpandangan luas visioner proactive and problem solving.

Revolusi industri 4.0 diikuti dengan society 5.0, agar manusia tidak dijajah atau dipimpin AI, robot atau mesin. Manusia tetap menjadi aset utama banga. Bagaimana SDM yang menjadi aset utama bangsa? Tentu SDM yang tangguh, memiliki karakter, berjiwa patriot, orientasinya bagi meningkatnya kualitas hidup masyarakat, keteraturan sosial dan peradaban. Karakter pemimpin dan kepemimpinan dibangun berbasis literasi.

Literasi dipahami adanya perubahan mind set atau setidaknya cara pandang atau pendekatan akan pemimpin dan kepemimpinannya sebagai pilar kedaulatan dan peradaban bangsa. Di dalam literasi ada pencerahan, pengkayaan, pemberdayaan dan segala sesuatu untuk mendukung profesionalisme, kecerdasan, moralitas bahkan modernitas yang dengan sadar, bertanggung jawab untuk mencapai keutamaannya. Keutamaan pada pemimpin dan kepemimpinannya ada pada pada kebijakannya setidaknya untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Membangun sumber daya manusia yang menjadi aset utama bangsa,
3. Produkarya yang kreatif inovatif dan berkualitas,
4. Membangun dan terus meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima
5. Membangun budaya patuh hukum

6. Memberdayakan semua sumberdaya semaksimal mungkin secara efektif dan efisien
7. Sistem Edukasi, training dikembangkan dalam berbagai coaching
8. Memberdayakan Media, IT dalam sistem on line yang berbasis elektronik
9. Membangun dan menata keteraturan sosial
10. Membangun sistem reward and punishment yang fair dan sesuai standar
11. Membangun birokrasi yang rasional
12. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
13. Transparan dan akuntabel
14. Membangun sistem pelayanan satu pintu one stop service
15. Mendukung clean and good governance dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
16. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
17. Membangun dan mengimplementasikan supremasi hukum
18. Mengembangkan olah jiwa, olah rasa, olah pikir dan olah raga di semua lini

Pendidikan menjadi dasar membangun literasi, melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab dan disiplin bagi keutamaannya.

Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk mengimplementasikan melalui pemolisiannya.

Literasi dapat dimulai dari :

1. Lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni
2. Referensi yang memadai
3. Manajemen Media yang menjadi wadah bagi produk produknya
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah

6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaanya
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi bagi pemimpin dan kepemimpinannya di era digital. Bisa melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya maupun infrastruktur dan teknologinya, dari yang tangible maupun yang untangible.

# "HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN": ERA POSTRUTH PROXY WAR LEADERSHIP DIGITAL DAN E POLICING [68]

Hukum, Issue, Opini dan Politik Hukum adalah produk bersama, sebagai bagian sebuah peradaban dalam menata kehidupan social.

Hukum esensinya adalah, sejumlah aturan-aturan untuk memanusiakan manusia, sehingga dalam menangani berbagai konflik secara beradab maupun untuk menata, melindungi dan melayani di masa kini maupun masa yang akan datang. Aturan-aturan yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan-peraturan tidaklah bisa mencakup lini.

Selalu ada celah hukum. Celah-celah inilah yang sering dimanfaatkan dalam politik, maupun kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok melalui opini dan issue. Tatkala hukum dicemari dengan opini dan issue, hukum sudah terkontaminasi menjadi ajang adu power dan menjadi budak kekuasaan, kepentingan yang tentu saja mengabaikan manusia dan kemanusiaan. Semua itu, akibat dari adanya kesempatan-kesempatan melakukan kejahatan, maupun pelanggaran sehingga munculah niat sebagai produk keserakahan atau sebagai upaya mempertahankan hidup. Dikatakan keserakahan karena bukan demi mempertahankan hidup.

Dalam memahami hal-hal yang bukan menjadi bagian dari kemanusiaan. Adapun untuk dapat mempertahankan hidup dan

68 https://transindonesia.co/2024/09/01/hukum-penegakan-hukum-dan-keadilan-era-postruth-proxy-war-leadership-digital-dan-e-policing/

kehidupan diperlukan spirit menumbuh kembangkan dan meningkatkan kualitas hidup bagi banyak orang.

Dapat juga dimaknai apa yang dilakukannya berkaitan dengan upaya-upaya memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Opini dan issue muncul dalam penegakan hukum sering dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Menegakan hukum bukan sebagai ajang balas dendam, bukan untuk kepentingan-kepentingan politik atau mencari jabatan, juga bukan demi mendapatkan sesuatu bagi kepentingan pribadi atau kelompok.

Opini public dan issue yang dihembuskan bisa juga menjadi pembunuhan karakter dalam pengadilan social dan pengadilan oleh media. Terlebih apabila opini dan issue tidak benar dikaitkan dengan hal-hal yang primordial maka akan cepat sekali menyulut kebencian. Penegakan hukum hilang keadilannya, akan mudah dijadikan alat atau lahan bagi kaum-kaum oportunis dalam mencapai keinginan dan memenuhi kepentingan-kepentingannya.

Opini public dan issue diwadahi melalui media sebagai sarana penghakiman dan sebagai alat pembunuhan karakter "trial by the press" akan jadi model yang dikembangkan.

Selama penegakan hukum digunakan semata-mata memberikan efek jera, maka hukum akan digunakan sebagai pembunuhan karakter dan ajang balas dendam. Maka celah-celah inilah yang akan dimanfaatkan bagi banyak kepentingan dengan mengatasnamakan hukum.

Hukum semestinya menjadi bagian dari peradaban yang dipahami dalam prinsip-prinsip untuk : 1. Menyelesaikan konflik secara beradab, 2. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, 3. Memberikan pelayanan kepada korban dan pencari keadilan, 4. Adanya kepastian hukum, dan 5. Edukasi. Itu semua diharapkan produk penegakan hukum juga bermanfaat untuk : a. Pencegahan, b. Perbaikan, c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada public, dan d. Pembangunan.

Para penegak hukum wajib menyadari dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin bahwa tugas dan tanggung jawab selain menegakan hukum juga untuk menegakan keadilan. Maknanya adalah penegakan hukum dalam menegakan hukum wajib memberikan jaminan dan perlindungan HAM, dilakukan secara professional dan fair. Tidak melakukan gerakan-gerakan membangun opini public maupun menyebarkan hasil penyelidikan atau penyidikannya kepada public sebelum ada putusan hakim yang menyatakan bersalah.

Penegak hukum dalam menegakan hukum boleh saja mencari atau mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Namun bukan untuk pribadi atau kelompok-kelompoknya, melainkan institusi dan perjuangan dalam menegakan hukum dan keadilan. Bukan pula untuk memaksakan dan membangun opini public atau menebar issue-issue kebencian. Saat ini semakin terlihat, siapa yang rajin menggalang dukungan, melakukan pencitraan-pencitraan dan sering tampil bak selebritis ? apakah inilah sang DALANG ??? atau sekedar aktor ciptaan sang DALANG ?

**Belajar dan Menjadi Pembelajar di Era Digital**

” Belajar dan menjadi pembelajar merupakan moralitas untuk membangun hidup dan kehidupan yang lebih baik demi semakin manusiawinya manusia”

Belajar bisa dari mana saja, dari apa saja dan dari siapa saja bahkan di mana saja. Belajar tidak sebatas di ruang kelas yang berisi tembok tembok pembelenggu kemerdekaan berpikir atau guru guru yang menakut nakuti yang melemahkan sehingga tidak lagi menjadi pemberani. Tatkala belajar didoktrin dan dijejali berbagai hal tanpa memahami kemanfaatannya maka sebenarnya itu sekedar menghabiskan jam belar.

” non scolae set vitae discismus” belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup”

Tori merupakan kampuan mengabstraksikan dalam menemukan hakekat atau inti akan sesuatu dengan menghubung hubungkan antara

konsep konsep yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan sesuatu fenomena. Teori tatkala memiliki kekuatan dan kesahihan, memiliki power dan menjadi ikon. Namun bukan disakralkal atau didewakan sehingga para orang hanya memghafal bahkan membanggakan menggunakan teori ini itu seakan sebagai pengecer teori dan lupa bahwa sejatinya tepri sebagai acuan atau kerangka berpikir akademisnya. Teori merupakan suatu karya cipta penemunya bisa berdasar pengalamannya bisa juga dari hasil risetnya atau hasil dari konstruksi berpikirnya dengan menggunakan atau mengkritisi teori teori yang terdahulu. Teori dapat dipahami sebagai hakekat hubungan antara konsep konsep yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan atau menerangkan suatu fenomena. Berpikir teoritis merupakan berpikir yang abstrak atau imajinatif yang mampu menemukan prinsip mendasar yang berlaku umum bukan pragmatis.

Teori bukan dihafal bukan sebatas dijejer jejer atau dipajang namun digunakan untuk menjelaskan apa makna di balik suatu gejala atau fakta. Tatkala tanpa kemampuan imajinasi maka teori sebatas dihafal dan tidak akan dapat mengurai dalam konstruksi/ kerangkanya atau dekonstruksinya. Tatkala teori dihafalkan atau tidak dijadikan kerangka berpikir atau mengkonstruksi maka teori itu akan tumpul atau flat atau datar saja. Tidak akan mampu menjadi sarana menyelami kedalaman atau membongkar labirin atas suatu fenomena. Bahkan kadang malah membelenggu akibat dihafal atau semacam kewajiban saja. Tatkala menulis atau membuat kajian atas sesuatu apabila sudah menempel teori ini itu di mana mana seolah olah sudah benar.

Teori merupakan produk berpikir abstrak yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum semestinya digunakan sebagai pisau analisis atas fenomena atau sesuatu yang sedang dikaji. Dengan teori diharapkan mampu memahami makna di balik fenomena dengan sudut pandang atau pendekatan yang bervariasi untuk menemukan kebaruan. Berpikir teoritis ini selain mengabstraksikan juga memerlukan imajinasi dalam membuat konstruksi baru atas kajiannya. Tatkala teori mampu diurai dan digunakan sebagai

konstruksi baru atau dimanfaatkan untuk mengurai dan membangun maka teori akan memerdekakan dan tidak membelenggu.

Era digital dan dampaknya pada pendidikan dan pengajaran secara virtual akan berdampak luas bagi pendidikan dan lembaga lembaganya. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di era digital seakan digeser dengan cara cara virtual atau bisa belajar di mana saja. Apakah kehadiran AI (artifivial intilligence) dapat menjamin kualitas atau hasil didik seperti yang diharapkan? Tentu bisa, tatkala pola pendidikan dibangun atas dasar keutamaannya. Tatkala keutamaan tidak ditemukan dan dilakukan tambal sulam atau sebatas memenuhi target jam pelajaran sejatinya merusak peradaban.

Penyelenggaraan belajar mengajar pada lembaga pendidikan, guru sebagai pilarnya namun bukan pemegang ilmu satu satunya. Sistem pengajaran melalui model dan konteks literasi sehingga secara virtual maupun aktual tetap mampu menstimuli para siswa atau siapa saja yang mengikutinya akan tercerahkan dan mampu merubah mind set nya. Pola pembelajarannya berubah dari aktual ke virtual dan membranding para siswa sehingga bukan sebatas apa bagaimana dan mengapa melainkan mampu membangun menjadi siapa. Beberapa hal yang dapat dibangun atau setidaknya dapat diterapkan di masa transisi menghadapi perubahan besar kehadiran AI dapa lembaga pendidikan setidaknya melalui

1. Membangun sistem literasi
2. Melakukan pembelajaran melalui dialog secara proaktif dan problem solving
3. Keutamaan ilmu yang dipelajari dijadikan core value dan standar keberhasilannya
4. Lembaga pendidikan mampu berwibawa dan menunjukkan kualitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan atau proses belajar dengan baik dan benar
5. Para dosen atau Guru guru mampu mengikuti perubahan yang begitu cepat, memposisikan sebagai pilar lembaga pendidikan

yang berkualitas dan memiliki kompetensi akademik serta mampu memotivasi mahasiswa berani kreatif serta menjadi ikon kecerdasan atau keahlian

6. Fasilitas pendidikan membuat sistem back office, application berbasis AI dan net work berbasis IoT yang mampu memberikan dukungan pendidikan secara virtual dalam model literasi ada sistem dialog peradaban dan branding memanfaatkan media dan jejaringnya.
7. Para siswa atau peserta didik dimotivasi dan dilati belajar dengan cara berpikir kreatif inovatif problem solving dan visioner
8. Proses belajar mengajar yang berbasis pada :
    a. keilmuan,
    b. pemahamanan dan pengembangan teori dan konsep,
    c. studi kasus ,
    d. problem solving, yang dikembangkan dalam pemikiran kebaruan sebagai pembaruan
9. Forum diskusi sebagai basis dialog peradaban bagi pengembangan ilmu pengetahuan
10. Penerbitan untuk menampung karya para dosen atau guru dan siswa/peserta secara elektronik atau cara konvensional
11. Jurnal ilmiah
12. Kerjasama dalam maupun luar negeri untuk kegiatan akademik : penelitian ilmiah, debat publik, bedah buku, bhakti masyarakat dll
13. Ada ikatan alumni
14. Aktif dlm kegiatan-kegiatan forum akademis nasional maupun internasional bench mark seminar work shop dan studi nasional dan internasional
15. Ada publikasi pengajarannya ke media sehingga dapat dijadikan referensi dan literasi

16. Menjadi anggota forum atau asosiasi akademik nasional maupun internasional

Era digital, era media. Media seakan menguasai jalur jalur komunikasi dan informasi walau sarat distorsi, entah besar atau kecil. Distorsi ini yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, pada umumnya yang berkaitan dengan sumber daya. Apalagi budaya dalam birokrasi masih kental model primordial dan pendekatan personal. Distorsi ini juga terjadi pada pembelajaran di lembaga pendidikan. Apalagi "broker" merambah dan memanfaatkan "era post truth" untuk menggoreng, membully bahkan membranding yang keliru. Pembenaran pembenaran akan semakin kental bahkan mampu menggerus kebenaran. Masalah kekuasaan dan penguasaan sumberdaya akan semakin marak dan proxy war menjadi pilihan. Siapa berbuat apa hingga punya apa menjadi ajang saling serang.

Dunia virtual kini menjadi ruang yang memiliki warganet ( netizen). Mereka hidup dalam sistem sistem virtual dalam pendukung aktivitas aktual sehari harinya. Dalam sistem sistem pendukung menggantungkan applikasi yang berbasis pada AI dan Iot. Warga net sibuk atau disibukan berbagai aktifitas dalam dunia virtual. Smart phone / gadget seakan tidak boleh lepas dari kehidupannya dari bangun tidur hingga saat akan tidur. Era digital menggeser banyak kebiasaan lama memasuki tataran baru.

Di dalam pendidikanpun dunia virtual mulai merambah. Lagi lagi isu primordialisme masih kuat dan rasionalisme dikalahkan. Pendekatan personal dijembatani makelar broker atau vendor yang mampu membahagiakan ndoro ndoro. Mereka memanfaatkan peluang mediasi. Di era digital para broker akan memanfaatkan melalui netizen membangun buzer, membangun jejaring dan memanfaatkan data maupun fakta untuk pembenaran. Siapa yang dianggap menjadi penghalang atau duri dalam daging akan dilumat.

Isu yang ditabur memang menarik bahkan seakan penuh pencerahan walau faktanya penyesatan.

Keutamaan bagi lembaga pendidikan ini menjadi penting dan untuk apa hasil didiknya digunakan dalam hidup dan kehidupan yang

sejatinya juga bagi pembangunan dan pemeliharaan peradaban.

Peradaban di era digital akan ditandai dengan sistem yang berbasis teknologi. Seni budaya merupakan suatu tanda olah rasa bagi persemaian tumbuh berkembangnya suatu peradaban, muncul digital art yang mampu menembus ruang waktu seolah melibas segala sesuatu yang tersekat ruang dan waktu. Apa saja bisa diperoleh dengan cepat dan berada di genggaman tangan. Kekuatan iinternet of thing dengan artificial intellegence seolah meruntuhkan gaya lama yang tradisional manual dan parsial.

Tatkala lembaga pendidikan masih ala feodal dan dilakukan pola parsial konvensional tentu akan dilibas. Proses pembelajaran dan hasil didik tidak akan mampu mendobrak atau menghasilkan sesuatu yang bisa dikatakan kontemporer atau kekinian. Timbul pertanyaan bagaimana pembelajaran dan memfungsikan lembaga pendidikan agar terus mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang di era digital? Lembaga pendidikan dengan pembelajarsnnya mau tidak mau dibongkar dari zona nyamannya sebagai suatu solusi sosial agar mampu menjadi ikon peradaban dsn mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial. Tatkala kehidupan sosial sebagian beralih ke balik layar dan kebersamaan beralih dalam tata kehidupan virtual maka segala sesuatu yang hard diganti yang soft, tidak sebatas yang tangible tetapi juga yang untangible.

Dalam tata kelola politik sosial budaya kemasyarakatan yang waras maka lembaga pendidikan akan mendapat ruang yang layak untuk menjadi persemaiannya agar terus hidup tumbuh dan berkembang. Tatkala lembaga pendidikan dan proses pembelajarannya terabaikan atau dalam tekanan atau pendiskriminasian apalagi dikerjakan sebatas tambal sulam yamg administratif saja, maka dapat dikatakan rontoknya suatu peradaban dan hancurnya suatu kedaulatan bangsa. Segala sesuatu yang kintra produktif meraja lela, keutamaan tidak ditemukan kebendaan menjadi yang utama jiwa dan kemanusiaan akan dinomorsekiankan atau malah dibelenggu diperdaya bagai robot semata.

## Era Post Truth, Solidaritas dan Potensi Konflik

Konflik sosial pada umumnya karena perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Bisa juga dikarenakan masalah harga diri. Suatu konflik terjadi sebenarnya merupakan puncak gunung es. Permasalahan permasalahan yang sudah menumpuk dan tinggal menunggu ada triger untuk meledaknannya. Permasalahan yang tidak terselesaikan akan menimbulkan kekecewaan hingga kemarahan walaupun masih dapat dipendam. Namun itu di omongkan terus ke mana mana dan bagi orang yang tidak pernah mengalamipun bisa ikut menceriterakan. Dari mulut ke mulut ditambah tambahi dan saling memiliki penafsir berbeda dari faktanya. Ini gosip. Semakin digosok semakin sip. Gosip ini tatkala berlapis lapis dan terus menerus dilakukan ini akan menjadi labeling. Pemberian label ini bisa untuk perorangan bisa untuk kelompok. Tatkala labeling ini terus dihembuskan seolah olah mjd kebenaran maka akan menjadi kebencian.

Apa yang dilakukan di atas ini sangat mudah memicu konflik sosial tatkala dikaitkan atau dihubung hubungkan dengan primordial. Primordial merupakan hal yang utama dan pertama bisa sara bisa juga komunitas atau kelompok kelompok kategorial. Di dalam primordial emosional, spiritual diutamakan dan kadang mengabaikan rasionalitas. Pokok e atau dengan semangat siap membantu mengeroyok atau balas dendam dan menyerbu. Kelompok primordial tatkala sudah saling melabel saling membenci dari konflik perorangan pun bisa terjadi. Primordial dipilih atau digunakan karena untuk mendapatkan legitimasi walau hanya pada pembenaran bukan kebenaran. Apalagi kebenaran yang tidak berbasis hal hal yang hakiki hanya berdasarkan populasi. Kambing tatkala diteriaki orang banyak sebagai anjing bisa saja semua meyakini itu anjing.

Di dalam masyarakat yang majemuk primordialisme sangat mudah untuk memecah belah atau mengadu domba satu sama lain. Antar suku antar ras antar agama antar kelompok menjadi basis solidaritas pokok e yaang sebenarnya pekok e. Rasionalitasnya koprol dibuang. Yang ada dikepalanya hanyalah hajar serbu hancurkan mereka musuh menghina kita. Spirit premanisme muncul walau kembali dengan keroyokkan dan pengkambinghitaman. Siapa yang lemah disalahkan dan ditumbalkan.

Tatkala kelompok primordial ini sudah menjadi crowd maka akan muncul gerakkan anarkisme ealaupun hanya dengan bullshit dikeroyok si a dan si b atau mengarang kejadian seolah teraniaya. Sifat orang orang yang cengeng mudah di berdayakan untuk membakar amarah. Sikap ksatria rela digantung diganti nalar koprol, mereka saat itu seakan penuh jiwa yang heroik walaupun melakukan hal hal yang di luar nalar. Otaknya seakan dibekukan dicocok hidungnya diseret untuk mengamini anarkisme. Kesadaran kolektif sudah tidak mampu lagi dikendalikan. Seakan orang mabuk ia lupa dengan dirinya dan sadar menyesal dibelakang hari.

Era post truth ini sebenarnya sudah dilakukan sejak jaman dahulu walaupun tidak separah di era digital dengan media sosialnya. Menghasut memecah belah untuk saling membenci. Kita bisa belajar dari pemberontakan mulai dari ken arok, hingga penyerbuan tentara China ke Kediri, pengusiran pasukkan Kubilaikan, pemberontakkan jaman Majapahit, masa kolonialisme, masa pra kemerdekaan hingga masa kini terus saja ada. Primordialisme menjadi pilihan apalagi kalau sudah mengatasnamakan apa saja apalagi yang berkaitan dengan harga diri ini mudah memicu konflik. Kadang kala pelakunya bisa dari orang gila. Tatkala diperiksa dinyatakan gila. Ini putus mata rantainya. Konflik sosial ini by design walaupun kadang tanpa kesengajaan. Bullshit di era postruth seolah kebenaran walaupun sarat trik intrik pembenaran. Memang ujung ujungnya juga kekuasaan penguasaan pendominasian sumber daya.

Masyarakat majemuk memerlukan adanya suatu pencerdasan hingga nalar atau logikanya tidak mudah dikoprolkan. Paradigma multikulturalisme ini mungkin mampu merasukkan kebanggaan akan kebhinekaan. Patriotisme cinta bangga akan bangsa dan negara tatkala bukan pd solidaritas semu apalagi dg berbagai hal yang menjurus kepada premanisme. Kekuatan massa khususnya bagi masyarakat suatu bangsa dan negara layak untuk dijaga atau ditumbuh kembangkan kekayaan seni budayanya dalam konteks karakter bangsa bagi hidup tumbuh dan berkembangnya. Multikulturalisme ini menjadi kekuatan bagi pelestarian kebhinekaan dan mencerdaskan untuk memberdayakan melestarikan salah satunya melalui masyarakat

sadar wisata. Kesadaran akan wilayahnya orang orangnya suku bangsa bahasa dan seni budayanya menjadi aumber daya baru. Penanaman cinta bangsa bukan lagi doktrin namun penumbuhkembangam nalar dan daya logika waras. Lagi lagi ujung nya memang politik sehat waras lah yang mampu menjaga dan membawa suatu bangsa maju dan sejahtera

Di era digital seakan media menjadi arena baru pada dunia virtual yang menjadi disrupsi. Tatkala tidak siap bermedia maka dslam memanfaatkan media berdampak pada COI ( conflick of interest ). Memberdayakan media yang semestunya mendukung produktifitas dan meningkatkan kualitas hidup bisa bisa menjadi sesuatu yang kontra produktif. Apalagi ini di era post truth, media seakan menjadi market place yang dapat digunakan sebagai ajang untuk mempengaruhi bahkan membangun opini publik melalui berita hoax yang memviralkan pembenaran agar dianggap sebagai kebenaran. Saling hujat saling serang seakan dunia virtual tidak membutuhkan keteraturan. Netizen pun semestinya dibangun bagi kemajuan suatu peradaban.

Rekayasa sosial dalam ranah virtual secara by design dapat digunakan dslam kepentingan apa saja. Boleh dikatakan kaum milenial paham dan menggunakan media sosial. Apa yang di sampaikan bisa langsung di share ke berbagai penjuru dunia atau secara global dalam hitungan detik. Dunia tanpa batas ruang dan waktu. Apa saja kapan saja dsn siapa saja bisa. Media menjadi power on hand yang dapat membantu atau sebaliknya dalam berbagai aktivitas manusia dalam berbagai gatra kehidupan. Idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, hukum, pertahanan. Berbagai isu mudah dan cepat dihembuskan. Media sosial banyak menggeser tatanan kehidupan dari cara konvensional bergeser ke arah yang kekinian. Tatkala konten yang didesign untuk kepentingan tertentu atau kelompok tertentu maka akan menjadi potensi konflik dan kontra produktif.

Pilar dengan berbagai sendi kehidupansebagai simbol kedaulatan dan peradaban bangsa dapat digerus . Sehingga, sumber daya utama dan penting bagi kedaulatan dan daya tahan bangsa dapat diganggu hingga diambil alih. Oleh sebab itu di dalam memanage media

setidaknya dilakukan untuk:

1. Memberitakan yang baik dan benar
2. Sesuai dengan fakta tidak mengada ada dan tidak direkayasa
3. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
4. Berpihak pada kemanusiaan supremasi hukum transparan akuntabel, informatif komunikatif dan mudah diakses
5. Menginspirasi, memotivasi dan memberi solusi serta mengedukasi
6. Membuat counter issue secara akademis dan yuridis atas sesuatu yang menjadi dampak era post truth terutama yang berkaitan dengan hoax
7. Menghibur, fun dan tetap pada norma norma etika dan moralitas dan sebagainya.

Era post truth era yang memberdayakan data dan informasi sebagai sarana yang membuat opini publik, emosi massa terombang ambing dengan berbagai hoaxnya. Data dan informasi saling diaduk aduk antara fakta dengan pembenaran dan kebohongan diolah sedemikian rupa seolah olah merupakan kebenaran yang terus diviralkan sehingga membuat orang lainbterpengaruh emosibatau opininya bahkan yang membuat dan yang menyebarkannyapun meyakini sebagai kebenaran. Hal itu terjadi karena terus menerus disampaikan seolah olah sesuatu yg salahpun menjadi benar. Apa yang terjadi bukanlah tiba tiba melainkan ada maksud dan tujuan tertentu. Paling tidak ada kepentingan kepentingan terutama politik atau untuk penguasaan sumber daya.

Data dan informasi mudah menjadi sasaran para designer jahat apabila tidak ada standar pengamanan. Di era digital data dan informasi menjadi kekuatan siapa lengkap siapa cepat dialah yang menguasai. Pembenaran yang terus diulang ulang dengan berbagai kemasan kebohongannya akan menjadi inspirasi yang negatif dalam otak bahkan hati nurani. Bagi siapa saja yang membacanya hingga rela memviralkannya ke jejaringnya mempercepat laju penyebaran issue yang dibuat. Tanpa berpikir panjang apalagi sudah ada unsur labeling dan kebencian ini akan semakin cepat penyebarannya.

Era post truth merupakan, penumpulan daya nalar yang memancing emosi dan memperuncing kebencian. Logika tidak lagi diutamakan yang diutamakan dan dikedepankan masalah emosional spiritual. Kemasan primordial akan menjadi gelora membara. Tanpa pikir panjang peradilan sosial sudah dilakukan. Saling menuduh saling menyalahkan saling menghina saling mengobok obok jiwa hingga harga diri. Tanpa sebutir peluru keluar dari moncong laras senjata perang dapat dimulai. Hal hal yang kontra produktif dan berbagai pembodohan menggelora di mana mana. Sesal tiada guna. Biasanya sadar setelah hancur berantakkan. Hal ini tanpa sadar setiap saat trs melanda.

Literasi dan berbagai upaya melalui coaching menjadi pilihan untuk menanamkan spirit kemanusiaan pencerdasan kehidupan bangsa dan tetap menjaga kewarasan daya nalar dengan lebih mudah dan lebih murah. Standar data dan informasi dibangun untuk adanya data centre yang dapat dijadikan acuan masyarakat, sehingga setiap informasi dan data yang diperoleh tidak asal telan atau asal share. Harapannya masyarakat mau membaca mau mencari standar media yg mjd rujukkan. Informasi yang ditabur biasanya bertahap bahkan dikemas seakan ilmiah bahkan mengatasnamakan tokoh tokoh yang menjadi ikon atau role model. Dari literasi dan standar media data dan informasi akan mjd salah satu pilar bagi acuan data dan informasi hoax. Selain itu counter issue juga dilakukan. Gerakan intelejen membuat cerdas dan memotivasi publik di semua lini dengan berbagai kemasannya untuk mencerdaskan dan menjaga keteraturan sosial ubtuk tetap waras dalam berbagai gerusan dan gempuran nalar.

Era digital, era media. Media menguasai jalur jalur komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi melalui media ada distorsi entah besar atau kecil. Distorsi ini yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, pada umumnya yang berkaitan dengan sumber daya. Apalagi budaya dalam birokrasi masih kental model primordial dan pemdekatan personal. Apa yang terjadi ? Lagi lagi broker dan pemanfaatan era post truth untuk memggoreng, membully bahkan membranding. Isu dan kabar burung dalam pergosipan akan marak terjadi. Pembenaran pembenaran akan semakin kental bahkan mampu

menggerus kebenaran. Masalah kekuasaan dan penguasaan sumberdaya akan semakin marak dan proxy war menjadi pilihan. Siapa berbuat apa hingga punya apa menjadi ajang saling serang.

Dunia virtual kini menjadi ruang yang memiliki warganet (netizen). Mereka hidup dalam sistem sistem virtual dalam pendukung aktivitas aktual sehari harinya. Dalam sistem sistem pendukung menggantungkan applikasi yang berbasis pada AI (artificial intelligence) dan Iot (internet of thing). Warga net sibuk atau disibukan berbagai aktifitas dalam dunia virtual. Smart phone / gadget seakan tidak boleh lepas dari kehidupannya dari bangun tidur hingga saat akan tidur. Era digital menggeser banyak kebiasaan lama memasuki tataran baru.

Di dalam birokrasi kehadiran AI melalui dunia virtual mulai merambah dan merubah banyak bidang pekerjaan. Secara aktual isu primordialisme masih kuat dan rasionalisme dikalahkan. Pendekatan personal dijembatani makelar broker atau vendor yang mampu membahagiakan ndoro ndoro. Mereka memanfaatkan peluang mediasi. Di era digital para broker akan memanfaatkan melalui netizen membangun buzer, membangun jejaring dan memanfaatkan data maupun fakta untuk pembenaran. Siapa yang dianggap menjadi penghalang atau duri dalam daging akan dilumat. Isu yang ditabur memang menarik bahkan seakan penuh pencerahan walau faktanya penyesatan.

**Mengapa Digital Leadership dan E Policing harus disiapkan ?**

Di era digital dengan kehadiran Artificial Intellegence (AI) begitu pesat perkembangannya. AI bisa digunakan untuk berbagai aktifitas dan kegiatan manusia bahkan pekerjaan manusiapun bisa digantikan dengan AI. Kalau AI bisa digunakan untuk hal baik bagaimana dengan sebaliknya? Mungkinkah AI ditangan orang orang jahat bisa digunakan sebagai kejahatan baru atau sesuatu yang sama sekali belum terpikirkan penanganannya. Kita semua sadar tidak ada suatu kejahatan kalau belum ada aturannya. Hukum tertinggal dari perubahan yang begitu cepat.

Electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dengan diawaki oleh petugas polisi siber (cyber cops) untuk melayani publik

maupun mengatasi hal hal yang kontra produktif akibat dampak dari era vuca (volatility, unpredictable, complexity, ambiguity). Tatkala polisi dan pemolisiannya tertinggal daei perubahan maka tidak akan mampu mengatasi permasalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini akan sangat berdampak luas terutama hilang atau turunnya gingkat kepercayaan masyarakat.

E Policing yang pilarnya pada back office sebagai operation room, dan sentra pelayanan publik ini perlu dibangun dengan dukungan application yang berbasis pada AI untuk inputing data, analaisa data dan bisa menghasilkan produk dalam algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya yang bisa digunakan untuk : memprediksi, mengantisipasi, memecahkan masalah atau membongkar kerja AI yang kontra produktif. Yang dapat diakses real time, on time dan any time. Algoritma ini yang menjadi acuan pada kualitas kinerja pemolisian.

Untuk mampu mengimplementasikan E policing perlu adanya digital leadership (DL) atau pemimpin di era digital. Pemimpin di era digital memiliki model kepemimpinan yang kebijakannya mendukung untuk mewujudkan E policing yang mampu memberikan pelayanan prima kepolisian dan mendukung SPBE.

DL mau tidak mau harus memikirkan bagaimana mampu membangun aplikasi aplikasi yang berbasis AI untuk :

1. Recognize
2. Maping
3. Analyse
4. Produk dalam bentuk algoritma
5. Networking
6. Counter issue
7. Media policing
8. Pengembangan intelejen
9. Emergency maupun Contigency policing

10. Quick response
11. Index Safety and Security
12. Mengembangkan model model pemolisian yang berbasis wilayah, fungsi maupun dampak masalah
13. Menyiapkan SDM yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
14. Menangani hoax yang menjadi senjata di era post truth ataupun serangan buzer
15. Menata keteraturan sosial di dunia virtual
16. Menangani cyber crime yang berkaitan dengan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb
17. Menghadapi proxy war
18. Melindungi aset aset bangsa
19. Menjamin keamanan harta benda, jiwa raga dari citizen maupun netizen
20. Memikirkan model policing untuk mengatasi point 1 sd 19

Masih banyak hal yang menjadi tugas tanggung jawab dan fungsi dari para pemimpin di era digital.

# SESPIM LEMDIKLAT POLRI, BERMORALITAS TEGAS HUMANIS [69]

Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan) Lemdiklat Polri Sespim) merupakan sekolah pengkaderan atau untuk menyiapkan calon pimpinan tingkat lokal, regional, nasional dalam tugas kepolisian.

Polisi menyelenggarakan tugasnya pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat, itu yang dikenal dengan Pemolisian. Maka hakekat dari Sespim adalah : Pendidikan bagi calon Pemimpin dalam Pemolisian dalam level Pertama, level Menengah maupun Level Tinggi yang paradigmanya ” Keamanan Dalam Negeri yaang mendukung Proses Pembangunan Nasional.

Pemolisian dapat dipahami sebagai segala usaha dan upaya kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya pada tingkat manajemen maupun operasional dalam ranah birokrasi, maupun ranah masyarakat, demgan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial keamanan, ketertiban masyarakat kamtibmas.

Sespim sejatinya lembaga pendidikan yang berbasis pada moral, yang maknanya adalah pada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Selain itu juga menegakan kejujuran, kebenaran dan keadilan.

Sespim Polri secara konseptual dapat dilihat dalam konstruksi : Pendidikan, Pemimpin, Polisi. Dengan demikian Sespim merupakan Lembaga Pendidikan yang Membangun dan Merawat Peradaban bagi Semakin Manusiawinya Manusia, dalam konteks Keamanan Dalam Negeri yang Mendukung Pembangunan Dalam Negeri.

69 https://polisiindonesia.id/2024/09/03/cdl-sespim-lemdiklat-polri-bermoralitas-tegas-humanis/

Hakekat Polisi dalam pemolisiannya adalah : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Keteraturan sosial dalam konteks Polisi dan Pemolisiannya terefleksi dari sistem keamanan dan pengamanan hingga terjaminnya keamanan dan rasa aman secara pribadi, di ranah publik, ranah lingkungan hidup dan kehidupan, ranah ekonomi dan industri, ranah mayantara hingga ranah forensik.

Keamanan dalam negeri dalam pendekatan pemolisian di era kenormalan baru dijabarkan pada pemolisian yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah secara konvensional, elektronik dan forensik.

Konteks pemolisian yang fungsional ditunjukan adanya sinergitas dan harmoninya model konvensional dan kontemporer yang mampu diimplementasikan secara proaktif dan adanya penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keamanan dalam negeri menjadi simbol peradaban kedaulatan ketahanan dan daya saing suatu bangsa.

Keamanan dalam negeri konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun derlandaskan demokrasi yang mencakup :

1. Supremasi hukum
2. Adanya jaminan dan perlindungan HAM
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan.

Keamanan dalam negeri dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberdayakan kekayaan dan keindahan serta kebhinekaan salah satunya melalui masyarakat yang sadar wisata.

Sistem pengamanan untuk keamanan dalam negeri dibangun melalui :

1. Tegak dan kokohnya ideologi bangsa
2. Political will yang kuat
3. Keamanan secara ekonomi
4. Keamanan secara sosial budaya
5. Keamanan secara siber maupun forensik
6. Keamanan infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya
7. Sumberdaya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
8. Sistem sistem pelayanan publik yang prima
9. Sistem monitoring dan evaluasi serta sistem akuntabilitas kepada publik yang transparan dan akuntabel
10. Sistem sistem yang siap dalam kondisi emergensi maupun kontijensi.

Keamanan dalam negeri merupakan dasar bagi suatu bangsa untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Menjaga dan merawat kedaulatan bangsa agar dapat berdaya tahan, berdaya tangkal bahkan berdaya saing. Di samping hal itu juga untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa bangsa lain di dunia.

Keamanan di dalam negeri secara astagatra dapat dilihat dari sisi : geografi, sumberdaya alam,demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Delapan pendekatan tersebut dapat dikembangkan dalam hukum, teknologi,dan media.

Konflik antar sesama anak bangsa dapat menggunakan isu isu dari gatra dari semua lini. Konteks konflik sosial dari isu akan menjadi labeling hingga kebencian. Penggunaan media di era post truth dengan hoax akan sangat berdampak tatkala masyarakatnya mudah terprovokasi atau mudah percaya atas sesuatu informasi. Model berita hoax didesain orang yang memiliki kompetensi mengaduk aduk fakta dengan kebohongan mengubah kebenaran menjadi pembenaran, yang terus di viralkan hingga diyakini sebagai kebenaran.

Keamanan dalam negeri merupakan keteraturan sosial untuk mendukung produktifitas agar masyarakat dapat bertahan hidup

tumbuh dan berkembang. Dalam konteks melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum maka keamanan dan rasa aman wujud harmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bisnis keamanan biasanya dikuasai atau dilakukan dengan gaya premanisme.

Premanisme merupakan benalu bagi kehidupan sosial yang kontra produktif anarkis dan merusak peradaban. Apa yang dilakukan para preman memaksa, mengancam, bahkan melakukan anarkisme sehingga aman namun tidak ada rasa aman.

Terjaminnya keamanan dan rasa aman masyarakat merupakan refleksi peradaban suatu bangsa. Dalam konteks ini tentu saja berbasis pada demokrasi di mana supremasi hukum dapat diimplementasikan sebagai mana hukum menjadi panglima. Supremasi hukum ditunjukan tegaknya hukum secara beradab, terkontrolnya keteraturan sosial dan adanya jaminan dan perlindungan HAM. Pembangunan dan pemberdayaan infrastruktur dan sistem sistem teknologi untuk adanya keteraturan sosial merupakan bentuk perlindungan dan pengayoman

Tingkat kualitas keteraturan sosial dapat ditunjukan pada indeks keamanan yang meliputi :

1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Keamanan dan rasa aman.

Di era digital indeks keamanan dilihat secara virtual maupun secara aktual.

Mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial di era digital model smart policing dapat menjadi model yang mengharmonikan dan mensinergikan antara conventional policing, electronic policing dan forensic policing. Basis implementasinya di dukung back office, application yang berbasis artificial intelegent, internet of things yang menampilkan indeks keamanan dalam wujud info grafis, info statistik

maupun info virtual secara real time.

Keamanan dalam negeri dalam memberikan pelayanan kepada publik pada konteks negara demokrasi. Pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan dilakukan oleh aparat yang profesional cerdas bermoral dan modern. Yang mengikis bahkan menghilangkan model premanisme dan anarkisme. Keamanan dan rasa aman menjadi standar bagi warga masyarakat untuk beraktifitas menghasilkan produksi untuk dapat hidup dan meningkat kualitas hidupnya.

**"Non scholae, sed vitae discismus"**

**Kita belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup.**

Pendidikan apapun latar belakangnya, tujuannya adalah mendidik. Mendidik dalam konteks pendidikan adalah untuk memanusiawikan manusia atau semakin manusiawinya manusia. Pendidikan landasan utamanya moralitas yang dibangun dengan pendekatan kesadaran. Pendidikan yang keras dan tegas untuk menanamkan disiplin agar kelak mampu menghadapi berbagai masalah atau tantangan atas hidup dan kehidupan, namun tetap humanis yang penuh welas asih. Tujuannya tetap bagi kemanusiaan, agar kelak para pemimpin dengan kekuatan dan kewenangannya mampu mengambil keputusan untuk memanusiakan manusia demi semakin manusiawinya manusia dalam lingkup maupun konteks level apapun.

Pendidikan yang di luar bagi semakin manusiawinya manusia sejatinya bukan pendidikan karena bisa menjadi anti bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban. Pendidikan yang ada bisa menjadi semacam balas dendam, mengeksploitasi para murid atau peserta didik. Bisa saja dirasuki unsur kebrutalan yang merusak peradaban, karena dihasilkannya adalah kaum luka batin yang berdampak pada berbagai penyimpangan atas kemanusiaan.

Pendidikan dimulai dari gurunya atau pengajarnya. Peran dan fungsi guru berpengaruh besar atas hasil didik dari pendidikan. Kualitas

guru bukan sebatas pada intelektualnya namun juga moralitasnya. Guru menjadi kunci bagi keberhasilan suatu pendidikan.

Pendidikan yang mendidik dan mencerahkan setidaknya dapat dilihat dari :

1. Lembaga atau wadah yang merupakan institusi pendidikan menjadi ikon pencerahan dan pencerdasan bagi Otak, Otot dan Hati nuraninya.
2. Implementasi atas visi dan misi pendidikan dilaksanakan berbasis pembangunan karakter secara konsisten dan konsekuen
3. Kualitas guru sebagai tenaga pengajar/ pendidik adalah orang orang yang mampu menjadi ikon dan layak dijadikan panutan atas pikiran perkataan dan perbuatannya
4. Sistem pengajaran pelatihan dan pengasuhannya berbasis pada standar standar pendidikan yang universal dan global walaupun dapat menggunakan kearifan lokal
5. Kurikulum pelajarannya berbasis pada pencerdasan intelektual, emosional dan sosial
6. Pola pengajarannya dibangun dengan landasan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
7. Infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya atau sarana prasarananya untuk mendukung proses belajar berlatih dengan pendekatan holistik dan sistemik yang dinamis sesuai dengan perubahan maupun kebutuhan kekinian
8. Tradisi dan nuansa akademis yang membudaya dalam lingkungan lembaga pendidikan
9. Ada wadah bagi penampungan pemikiran dan ide ide kreatif seperti jurnal maupun penerbitan
10. Kualitas rekrutmen peserta didik berbasis pada kejujuran transparan akuntabilitas secara moral, secara administrasi, secara hukum yang berbasis pada standar nasional maupun internasional
11. Para peserta didik dapat merasakan dirinya tercerahkan
12. Prestasi hasil didik yang mampu menjadi ikon kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban

13. Pengakuan dan apresiasi dari masyarakat luas atas prestasi dan kinerja hasil didik yang profesional cerdas bermoral dan modern

Masih banyak yang dapat dikembangkan untuk membangun lembaga pendidikan. Namun ke 13 point tsb setidaknya dpt menjadi acuan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendidikan bukanlah sebatas persyaratan untuk karier melainkan untuk membangun suatu kesadaran, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam suatu peradaban. Moralitas menjadi salah satu kunci penting atas hasil pendidikan. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang secara akademik maupun ketrampilannya tinggi namun moralnya rendah, ia bisa menjadi orang jahat yang membahayakan bagi hidup dan kehidupan. Kepandaiannya tidak lagi bagi kemaslahatan banyak orang. Bisa juga dengan kepandaiannya menipu bahkan menjajah rakyatnya.

Bagian lain dari pendidikan adalah:

"patuh, taat pada hukum bukan karena keterpaksaan atau ketakutan melainkan adanya kesadaran untuk memahami bahwa hidupnya tidak hanya sendiri yang juga memikirkan bagi orang lain yang hidup bersama dengan dirinya". Membangun hukum yang menjadi kesempatan atau hidup bersama dalam keteraturan sosial dan dapat ditegakkan dengan berbasis moralitas yang ditunjukan dari kejujuran, kebenaran dan keadilan.

"Sivis pacem parabelum", kalau ingin berdamai harus siap untuk berperang. Kemampuan memerangi kebodohan, kemiskinan, sikap moralitas yang buruk, korupsi, kolusi, nepotisme dan banyak hal lain yang kontraproduktif inilah musuh biang keladi kehancuran suatu peradaban. Membangun dan menyelenggarakan pendidikan bukan sebatas mencerdaskan melainkan juga mencerahkan dan mampu menemukan bahkan pengembangan imajinasi.

Pencerahan pada suatu pendidikan adalah untuk menemukan keutamaan. Tatkala pendidikan sebatas persyaratan maka cara cara instan hingga yang melanggar etika pun akan dihalalkan.Tatkala

guru status sosialnya rendah maka kualitas pendidikan akan jauh dari memuaskan.

Hasil didik merupakan cermin dari kualitas lembaga pendidikan. Maka pendidikan wajib mengajarkan dan menanamkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin untuk menemukan keutamaan kepada para siswanya. Pendidikan memang bukan segala galanya namun melalui pendidikan dapat mengetahui segala sesuatu. Pendidikan menjadi ruang transformasi pengetahuan ketrampilan moralitas agar semakin manusiawinya manusia. Guru sebagai kunci pendidikan menjadi energi transformasi yang mencerahkan hidup dan kehidupan para muridnya. Kualitas guru dalam hidup dan kehidupannya harus dirawat dan diperhatikan kesejahteraanya.tatkala para guru sulit dalam hidup dan kehidupannya dan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam stratifikasi sosial maka pendidikan akan redup bahkan padam.

Tatkala para guru kehilangan semangatnya maka tinggal menunggu waktu bencana suatu bangsa akan tiba. Bukan diserang dari luar melainkan saling serang sesama anak bangsa.

Karena tidak mampu hidup dalam suatu peradaban dan mudah diadu domba. Hidup dalam suatu peradaban diperlukan kemampuan untuk memahami, membatasi, empati, peduli, saling menghormati, dan mampu saling menghidupi.

Peserta didik di era digital kadang merasa sudah lebih tahu dari guru gurunya. Maka para guru bukan sekedar memberitahu apa dan bagaimana namun menjadikan siapa melalui pengajaran akan :moralitas, nilai nilai kemanusiaan, soliditas, merawat kebhinekaan, patriotisme.

Kecerdasan intelektual saja tidaklah cukup dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Romo Mangun mengatakan : ” Pada Pendidikan lah Tergantung Masa Depan Bangsa”. Jangan berharap masa depan lebih maju kalau pendidikannya amburadul. Di sinilah Guru kadang dituntut menjadi superman yang bisa segala hal, namun energi menjadi super terabaikan. Mungkin kalau dikritik tajam ada yang membantah dan membela diri

dengan memamerkan segala seremonial nya. Puja puji dan pengakuan serta penghargaan di sana sini.

Namun dalam fakta lagi lagi guru dijadikan ganjel pelengkap penderita. Cerita duka lara ada di mana mana. Namun sejatinya karya guru guru yang mencintai pekerjaannya tidaklah sia sia. Setiap jaman ada orangnya setiap orang ada jamannya. Guru tetaplah menjadi pilar bangsa. Muridmu yang bengal sekalipun mengakui siapa guru yang mulia. Entah ia kelak menjadi apa saja, akan tetap ingat keteladanan mu.

Walau sikap dan perilakunya nyebelin itu tanda sayang dan cinta kepada guru. Memandaikan manusia memang bukan hal mudah. Tidak mungkin dengan teriakan : siap gerak, pinter gerak. Semua membutuhkan proses panjang dan perjuangan.

Lembaga pendidikan kepolisian merupakan pengejawantahan atas ” Pengembangan Ilmu Kepolisian”. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang:

1. Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial
2. Hukum dan keadilan
3. Kejahatan dan penanganannya
4. Pemolisian
5. Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
6. Teknik dan teknis dasar umum dan khusus kepolisian.

Paradigma ilmu kepolisian dapat dilihat secara :

1. Filosofis :

   Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.

2. Geo politik dan geo strategis

   Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial

3. Yuridis

   Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

4. Globalisasi dan modernisasi

   Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

5. Akademis,

   Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan ( S1, S2 dan S3), pengembangan kepemimpinan dan majerial, kompetensi khusus dan fungsional ( cyber, forensik, untuk hal hal yang bersifat ekstra ordinary )

6. Pragmatis, ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi : keselamatan ( safety) contoh ( safety driving centre), keamanan ( private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security).

Pengembangan ilmu kepolisian sejalan dengan yang ilmu yang dipelajari (Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial, Hukum dan keadilan, Kejahatan dan penanganannya, Pemolisian,Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat) setidaknya dapat dikembangkan pada Fakultas :

1. Polisi dan pemolisian
2. Keamanan
3. Keselamatan
4. Intelejen
5. Hukum dan penegakan hukum
6. Penyelidikan dan penyidikan
7. Forensik
8. Siber dan teknologi kepolisian
9. Kajian konflik sosial

10. Kajian Terorisme
11. Kajian kejahatan luar biasa
12. Manajemen sekuriti dan sebagainya.

Kurikulum dan pengajarannya dapat dikategorikan sbb :

1. Pengajaran dasar fi Sespim :
    a. Keindonesiaan
    b. Kebhayangkaraan
    c. Kepemimpinan dalam berbagai model manajerialnya
    d. Etika Publik sebagai pembelajaran anti korupsi.
2. Pengajaran pokok ilmu kepolisian
    a. Ilmu ilmu sosial
    b. Ilmu hukum, penegakan hukum dan keadilan
    c. Ilmu kriminologi
    d. Ilmu administrasi dan operasionalnya
    e. Ilmu teknologi informasi
    f. Hubungan antar suku bangsa ( konteks masyarakat Indonesia yang multikultural)
    g. Ilmu humaniora dan sebagainya.
3. Kapita Selekta yang berkaitan dengan isu isu penting dan aktual yang terjadi dalam masyarakat antara lain :
    a. Ideologi
    b. Politik
    c. Ekonomi
    d. Sosial budaya
    e. Keamanan
    f. Pertahanan dan sebagainya.

Pendukung pembelajaran di Sespim Polri dengan adanya

1. Pusat penelitian dan pengkajian.
2. Lembaga lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian.
3. Forum atau asosiasi dosen pengajar, alumni maupun pemerhati ilmu kepolisian.
4. Penerbitan buku.
5. Jurnal ilmiah.
6. Laboratorium sosial.

Pengembangan pendidikan untuk kompetensi khusus dan pragmatis yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Safety driving centre
2. Security training centre
3. Sekolah penyidik
4. Kursus kursus singkat
5. Pelatihan pelatihan bagi master trainer dan trainer dan sebagainya.

Sespim Polri yang Presisi merupakan lembaga pendidikan yang mendidik dan menyiapkan kader pemimpin Polri masa depan sebagai polisi yang profesional Cerdas Bermoral dan Modern ( PCBM) berbasis pada literasi.

Literasi Polisi dan Pemolisian nya Landasan Pendidikan Kepolisian. Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah bagi :

1. Kemanusiaan
2. Keteraturan Sosial
3. Peradaban

Memaknai peradaban yang begitu kompleks namun setidaknya dapat dipahami dengan : memahami aturan dan menerapkannya dalam kehidupan untuk adanya keteraturan sosial bagi semakin manusiawinya manusia.

Hubungan Polisi dengan peradaban melalui pemolisiannya dapat dipahami dari penegakan hukum dan keadilan bagi keteraturan sosial dan bagi semakin manusiawinya manusia.

Polisi dan pemolisiannya menegakan hukum sejatinya bagi pembangunan, menjaga dan merawat peradaban.

Hukum digunakan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang kontra produktif.

Semakin patuh hukum, keteraturan sosial terjaga dan kemanusiaan semakin meningkat kualitas hidupnya, dapat dikatakan semakin beradab.

Bagaimana membangun peradaban dalam pemolisian? Dengan membangun literasi. Literasi pilar peradaban. Literasi yang cukup atau memadai maka akan ada pencerahan, pendayaan, pemberdayaan dan sebagai polisi pemolisiannya menjadi : profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya.

Membangun literasi dengan berbasis moral pada keutamaannya yaitu bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Pendidikan menjadi dasar membangun literasi, melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab dan disiplin bagi keutamaannya.

Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk mengimplementasikan melalui pemolisiannya.

Literasi dapat dimulai dari :

1. Lingkungan hidupnya yang asri dan ngangenin
2. Referensi yang memadai
3. Manajemen Media yang menjadi wadah bagi produk produknya
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan

5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah
6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaan nya
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya maupun infrastruktur dan teknologinya.

**Dialog Peradaban dalam Pembelajaran Membangun Literasi**

Dialog peradaban merupakan model transformasi dalam membimbing maupun mencerahkan kepada para calon pemimpin di masa depan menemukan keutamaannya sebagai polisi dalam pemolisiannya.

Polisi dalam pemolisiannya dituntut sehat, semangat dan smart dengan jiwa bahagia yang merdeka. Semua itu dapat dicapai dengan membuka ruang dialog peradaban bagi semakin manusiawinya manusia.

Menyiapkan polisi di masa depan maka Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian dalam proses pembelajarannya melalui suatu "Dialog Peradaban".

Keutamaan pembelajaran bagi polisi di masa depan dengan mentransformasi dan mencerahkan atas keutamaan kepolisian ( Kemanusiaan, Keteraturan sosial dan Peradaban ) dalam dialog

kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi ekstrim, fakta brutal ( emergensi/ kontijensi ).

Bagi calon pemimpin kepolisian mengacu pada keutamaan pemimpin yaitu pantas dan benar, layak dan menyelamatkan dengan keberanian dan kemampuannya mengambil keputusan bagi menjaga kehidupan, membangun peradaban dan perjuangan kemanusiaan. Yang dapat dijabarkan dalam keutamaan pemimpin dalam kepemimpinannya.

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kreativitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu,
5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini
6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi
8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrubsi dengan kreatif dan inovatif
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan mendapat dukungan secara internal maupun eksternal

Ekspresi dialog peradaban untuk membangun karakter yang berbasis pada moralitas dalam kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.

Kesadaran merupakan landasan moralitas bagi manusia sebagai apa saja, apalagi sebagai pemimpin kepolisian. Dengan adanya kesadaran, meyakini dan menjalankan pilihan hidup dan panggilan hidup dengan baik dan benar tanpa ada tekanan atau paksaan.

Kesadaran sebagai anak bangsa menunjukan moralitas bangsa, sehingga menunjukan sikap dan perilaku yang menjaga nama baik bangsanya dan bekerja semaksimal demi kebesaran dan kejayaan bangsa.

Demikian halnya menjadi apa saja sebagai profesi apa saja tatkala kesadaran menjadi landasan moralnya makan profesionalisme akan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kesadaran maka akan muncul tanggung jawab dan buahnya adalah disiplin.

Tanpa kesadaran maka yang dilakukan adalah semu, kepura-puraan tidak tulus, hanya kucing-kucingan, dan berbuat baik karena dipaksa atau pamrih untuk sesuatu.

Tanpa kesadaran sebenarnya ambang kehancuran, tanpa harga diri berbuat munafik, tidak ada ketulusan dalam menjaga kebaikan dan kebenaran yang dipikirkan hanya kesenangan, kepentingan sesaat dan tanpa hati nurani peduli setan orang lain susah karenanya.

Membangun kesadaran adalah pendidikan sepanjang hayat, menanamkan kecintaan dan kebanggaan akan kebenaran, hal-hal yang produktif, peka dan peduli akan kemanusiaan, keberanian, patriotisme, nilai-nilai luhur dan sebagainya.

Membangun kesadaran sama dengan membudayakan yang baik dan benar sehingga seluruh komponen bangsa ikut bertanggung jawab dan ikut menjaga, bahkan menumbuh kembangkan sehingga sikap disiplin menjadi cermin karakternya.

Membangun kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin bagi petugas polisi dilakukan dalam pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri berbasis: Moralitas, Tegas dan Humanis :

1. Dimulai dari hal hal kecil dalam kehidupan sehari hari di asrama pengecekan dimulai setelah bagun pagi, kegiatan olah raga pagi, makan pagi, mengikuti perkuliahan dan pelatihan, makan siang, kegiatan pengasuhan sore hari, makan malam, belajar apel malam sampai istirahat malam semua diatur secara ketat dalam etika peserta didik yang berisi: apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya.

2. Pola pendidikan dengan model Mentorship/ pengasuhan oleh wali kelas dan asisten yang secara terus menerus mendampingi para peserta dididik untuk menemukan karakternya.
3. Pendidikan sepanjang hayat saling asah asih dan asuh walaupun telah selesai pendidikan.
4. Pengajaran tentang dasar sebagai patriot di era milenial
5. Pengajaran yang berkaitan dengan profesionalisme berbasis kepolisian ilmu kepolisian
6. Kapita selekta untuk studi kasus, problem solving dan menemukan kebaruan dalam menghadapi issue issue penting yang terjadi dalam masyarakat
7. Olah jiwa dikaitkan dengan pembinaan spiritual keagamaan
8. Olah raga dapat dikembangkan sesuai hobi dan kompetensinya di samping itu juga bela diri kendo dan judo dsb , penanaman kejujuran kebenaran ketangguhan dan rasa percaya diri.
9. Olah Rasa dikaitkan dengan pembinaan seni budaya dan penataan lingkungan yang bersih asri dan ngangeni
10. Acara tradisi yang menjadi ikon kebhinekaan, penghayatan akan nilai nilai luhur bangsa

Keutamaan bagi petugas polisi yang humanis peka peduli dan berani berbela rasa akan kemanusiaan merupakan produk dari kecintaan, perhatian, empati, pemberian kepercayaan, dan keteladanan.

Para alumninya kelak saat menjadi pemimpin mampu mewujudkan Polri dalam Pemolisiannya sebagai :

1. Penjaga Kehidupan,
2. Pembangun Peradaban
3. Pejuang Kemanusiaan.

Kepolisian dapat dimaknai sebagai institusi, sebagai fungsi dan sebagai petugas yang PCBM sebagai penjaga kehidupan pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan dapat dijabarkan sbb :

1. Polisi yang profesional menunjukkan pada kompetensi atau keahliannya yang berbasis pada ilmu kepolisian dalam mengimplementasikan smart policing. Petugas yang ahli memiliki mental dan fisik yang siap menjadi pelayan pelindung dan pengayom masyarakat. Di samping itu juga sebagai aparat penegak hukum dan keadilan bangsa dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Yang mampu diimplementasikan pada operasi yang bersifat rutin, khusus atau kontijensi yaitu kondisi ekstrim sekalipun, agar tetap terwujud dan terjaga keteraturan sosial

2. Cerdas bermoral mampu ditunjukkan bahwa polisi merupakan jalan hidup atau panggilan hidup sbg patriot bangsa. Yang dibangun atas dasar kesadaran tanggung jawab dan disiplin serta mampu menunjukkan kreatifitas maupun inovasinya. Untuk mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan. Yang memiliki spirit kebangsaan nasionalisme yang tinggi sebagai anak bangsa dalam membangun dan membuat bangsa menjadi berdaulat bertahan dalam kondisi aman damai dan sejahtera. Spirit patriotisme merupakan spirit rela berkorban dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan disiplin karena kecintaan dan kebanggaan dalam profesi dan sebagai anak bangsa.

3. Modern konteks pemolisian yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mendukung pd sistem smart policing yang tergelar dalam model conventional policing, electronic policing dan forensic policing. Sehingga mampu memberikan pelayan prima ( cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses) di bidang pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan.

4. Penjaga Kehidupan

   Polisi dengan pemolisiannya sebagai penjaga kehidupan yaitu : keberadaan polisi adalah mampu menjamin keamanan dan rasa aman sehingga warga masyarakat dapat beraktifitas untuk berproduksi.

Produktifitas tersebut membuat masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Polisi sebagai "co producer" tidak bermain main dengan hal hal yang ilegal dan tidak membiarkan penyimpangan yang contra produktif ( tidak terima suap dan tidak melakukan pemerasan).

5. Polisi sebagai pembangun peradaban di mana keberadaan Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan mampu menunjukkan bahwa hukum sebagai simbol peradaban. Di dalam proses penegakkan nya adalah untuk : menyelesaikan konflik secara beradab. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Membangun budaya tertib. Agar ada kepastian. Bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan

   Walaupun dengan upaya paksa sekalipun konteks humanisme ini yang menjadi dasar yaitu pada produktifitas dan peradaban serta keteraturan sosial, sehingga segala usaha dan upaya yang dilakukan pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa adalah tetap bagi semakin manusiawinya manusia.

Ketiga kredo tadi dibangun dengan kesadaran. Kesadaran konteks ini adalah mampu memahami peran dan fungsinya sebagai polisi penjaga kehidupan, polisi sebagai pembangun peradaban dan polisi sebagai pejuang kemanusiaan.

Birokrasi kepolisian menjadi ikon peradaban. Ikon kecepatan kedekatan dan persahabatan. Keberadaan polisi mampu mengurangi rasa takut warga masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas.

Polisi dengan pemolisiannya bekerja secara proaktif problem solving. Membangun kemitraan, mengutamakan pencegahan dan keberadaan nya diterima dan didukung warga masyarakat yang dilayaninya.

Pada era digital dan era kenormalan baru maka konteks pemolisian dikembangkan dalam model "smart policing" yang merupakan contemporary policing yang berbasis community policing sehingga

adanya harmoni antara conventional policing, E policing dan Forensic policing yang mampu memberikan pelayanan prima ( cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses) kepada masyarakat.

"Polisi kehebatannya bukan pada pangkat jabatan, kepandaian atau kewenangannya, melainkan pada perilakunya, manakala mampu menhadi role model / ikon dan panutan yang dipercaya masyarakat. Sejalan dengan spirit polisi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan yang PCBM.

Maka semangat atau spirit sespim sebagai lembaga pendidikan bagi calon calon pemimpin di masa depan di level first line supervisior, midle manager maupu top manager dalam menyelenggarakan pendidikannya menunjukkan lembaga pendidikan kepolisian yang dinamis dan modern yang memiliki visi membangun kader-kader pimpinan kepolisian bahkan sebagai pimpinan bangsa di berbagai lini kehidupan yang mampu membawa bangsa yang memiliki daya tahan, berdaulat, rakyatnya aman, sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan proses pengkaderan bagi penyiapan calon polisi yang PCBM dan kader pimpinan Polri di masa depan maka beberapa point-point penting yang dibutuhkan antara lain sbb :

1. Kebijakkan pimpinan sebagai political will mendukung perwujudan visi misi dan tujuan Sespim
2. Pemimpin yang Transformatif
3. Menyiapkan dan membangun infrastruktur dan sistem-sistem pendidikan dan latihan yang visioner modern dengan model-model :
    a. Implementasi conventional policing, E policing dan Forensic policing
    b. Penanganan operasi yg bersifat rutin, khusus maupun kontijensi
    c. Studi kasus atas issue issue penting yang terjadi dalam masyarakat

d. Manajemen media untuk mengatasi dan menghadapi era post truth,

e. Forensik Policing untuk menghadapi :" gangguan keteraturan sosial atas serangan teror dari nuklir, mikro biologi dan kimia dsb"

f. Pemolisian yang berbasis wilayah, berbasis fungsional dan dampak masalah spt: ideologi politik ekonomi, sosial budaya hingga penanganan konflik-konflik sosial skala besar dalam negeri termasuk terorisme hingga bencana alam,

g. Model-model intelejen dan fungsi teknis kepolisian lainnya

h. Model kajian dan rekayasa sosial dalam masyarakat yang modern dan demokratis dan sebagainya

i. Model infrastruktur dan sistem-sistem ini bisa dibangun dalam model laboratorium, simulator dan paktek lapangan yang sesuai konteksnya.

4. Membangun dan menyiapkan SDM yang profesional sebagai tenaga staf pengajar dan pelatih yang memiliki kualitas sebagai guru mentor dan panutan. Karena guru merupakan Ikon Pendidikan. Guru menjadi kunci dalam pendidikan dan merupakan tokoh sentral dalam pendidikan untuk mengajarkan, mentransformasi, memotivasi, menginsprasi, mendampingi, menjadi konsultan bagi para taruna untuk memiliki karakter sebagai prajurit patriot yang profesional. Spiritualitas guru inilah yang hendaknya menjadi acuan dalam pendidikan berkarakter untuk menyadarkan dan menanamkan rasa tanggung jawab, jiwa korsa dan semangat kemanusiaan.

   Pendidikan menjadi ikon kejujuran, kebenaran dan keadilan dimana guru- guru adalah para pejuang kemanusiaan.

5. Program-program pendidikan dan pengasuhan dapat dibangun dalam berbagai model dinamis

   a. Pola pendidikan yang mencakup akademik secara konsep teoritikal, training untuk skill problem solving (dengan

model-model yang tercakup pada point 2 dan skenario-skenario melalui sistem-sistem simulasi modern maupun laboratorium serta praktek lapangan) dan penanganan berbagai isu aktual yang terjadi agar para taruna juga memahami dunia luar apa yang menjadi isu aktual. Semua itu dalam pengaturan silabus yang mencakup teoritikal dan model proaktif prediksi, antisipasi dan solusi.

b. Pengasuhan ini sebagai sistem transformasi olah raga dan olah rasa ( religi, seni, tradisi, hobby, komuniti hingga teknologi) model-modelnya dapat disesuaikan secara dinamis. Penerapan art policing pada pembinaan mental fisik dan spiritual.

c. Di samping itu pola mentorship pola coach dibangun pola-pola penanaman budaya kepolisian sehat, edukatif dan visioner dalam membangkitkan jiwa polisi yang PCBM dengan berbasis kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.

d. Pola tanggap tanggon trengginas dikembangkan dengan pola-pola visioner modern sebagai pengkaderan pimpinan masa depan.

6. Sistem belajar mengajar dengan nuansa akademis, nuansa kepolisian yang modern dan nuansa kehidupan yang menjadi ikon peradaban untuk menumbuhkan jiwa-jiwa pemimpin Polri yang PCBM bahkan pemimpin bangsa di masa depan.

7. Sistem monitoring dan evaluasi prestasi dan berbagai kendala pendidikan atas para anggota tetap, dosen, instruktur, pelatih hingga para peserta didik secara online dan dalam sistem big data sehingga sistem pendidikan ini fair dan mampu menunjukkan pola pendidikan yang mampu menjadi icon world class education.

8. Sistem reward and punishment yang berbasis pada sistem-sistem penilaian kinerja atau SOP atau etika taruna yang termaktub dalam peratutan-peraturan Kalemdiklat maupun kode etik peserta didik sespim atau berbagai peraturan lainnya secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dan ditegakkan.

9. Sistem pendidikan lanjutan secara nasional maupun internasional pada jenjang akademik, training dan benchmark serta untuk seminar atau berbagai kegiatan simposium nasional maupun internasional.

10. Pemeliharaan dan perawatan semua aset-aset pendukung pendidikan :

    a. lingkungan kampus dan perkantoran, lingkungan latihan, lingkungan pembinaan-pembinaan olah raga dan olah rasa ( religi, seni, tradisi, hobby, komunitas dan teknologi) dan sebagainya.

    b. Pembinaan karier personil Akpol dalam promosi, mutasi dan demosi.

    c. Kesejahteraan personil pada asrama dan lain-lain.

    d. Infrastruktur sarpras/ logistic.

    e. Rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

    f. Tempat ibadah dan sebagainya.

Lembaga pendidikan menjadi ikon peradaban kekuatan kedaulatan dan kemajuan hingga modernitas suatu bangsa. Sespim dengan spirit-spirit di atas menjadi lembaga pendidikan acuan kebanggaan yang berstandar World Class Executif Studies.

Polisi dan Pemolisiaannya yang Presisi diwujudkan dan polisi yang PCBM. Polisi bekerja dalam ranah birokrasi dan ranah masyarakat, benang merahnya itulah yang dikatakan pemolisian. Policing ( pemolisian ) merupakan segala upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Dengan demikian spirit polisi dalam pemolisiannya secara manajerial maupun operasional adalah untuk kemanusiaan dengan PCBM ( profesional, cerdas, bermoral dan modern) dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepolisian kepada publik mencakup :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan

Standar pelayanan kepolisian kepada publik adalah : cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.

Polisi dalam menegakan hukum adalah demi semakin manusiawinya manusia, yang merupakan upaya membangun peradaban agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial.

Konteks inilah yang dikatakan tujuan pemolisian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman serta terwujudnya keteraturan sosial. Pola pola pemolisian bisa dikembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Model pemolisian dapat dibuat sebagai acuan pengembangan kualitas kepemimpinan, infrastruktur dan model modelnya sbb :

1. Model pemolisian yang berbasis wilayah :
    a. Border policing ( pemolisian di kawasan perbatasan )
    b. Maritime policing ( pemolisian di kawasan maritim atau kepulauan atau kawasan pantai)
    c. Industrial policing ( pemolisian di kawasan industri)
    d. Disaster policing ( pemolisian di kawasan rawan bencana )
    e. Bisa dikembangkan dari model orientasi kegiatan masyarakatnya ( community oriented policing) pada masyarakat perkotaan, pertanian, nelayan, perkebunan, buruh dan sebagainya.

2. Model pemolisian yang berbasis pada fungsinya : fungsi utama, fungsional maupun fungsi pendukung sbb:
    a. Road safety policing ( pemolisian berbasis pada road safety atau lalu lintas
    b. Paramilitary policing, model pemolisian ala paramiliter
    c. Cyber policing, pemolisian dalam memberikan pelayanan secara virtual
    d. International policing, pemolisian internasional seperti : pasukan misi perdamaian PBB, laision officer, hubungan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan, studi banding dan pertukaran kemampuan polisi, dan sebagainya.
    e. Emergency policing, model pemolisian menghadapi situasi kegawat daruratan dan sebagainya.
3. Model Pemolisian yang berbasis dampak masalah :
    a. Democratic policing
    b. Electronic policing, pemolisian secara elektronik yang merupakan model pemolisian di era digital atau era revolusi industri 4.0
    c. Forensic policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru dan sebagainya.

Memahami polisi dan pemolisiannya dari model di atas adalah secara holistik atau sistemik yang tidak dipahami secara parsial.

Polisi dalam pemolisiannya dalam bertindak tegas sekalipun spiritnya tetap untuk: 1. melindungi, 2. mengayomi dan 3. melayani agar ada keteraturan sosial. Hal ini menunjukan bahwa manusia adalah aset utama bangsa maka di situlah hakekat pemolisian untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Polisi dengan pemolisiannya dalam menegakan hukum untuk :

1. Menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab
2. Mencegah agar konflik meluas atau semakin besar

3. Melindungi mengayomi melayani korban dan pencari keadilan
4. Membangun budaya tertib
5. Adanya kepastian
6. Edukasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas polisi dengan pemolisiannya bukan semata mata pada pengungkapan perkara namun juga dilihat dari keteraturan sosial dan tingkat kepercayaan publik serta kualitas pelayanannya. Polisi dalam pelayanannya kepada publik merupakan ikon atau simbol : kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial.

Polisi dalam pemolisiannya dilihat dari tingkat : profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya dan modernitasnya. Membangun kepolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern dapat dibangun melalui :

1. Pembangunan pendidikan yang berlandaskan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
2. Kepemimpinan yang tranformasional
3. Keteladanan
4. Penanaman nilai nilai kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial
5. Membangun infrastruktur dan sistem sistemnya yang berefek pada budaya malu dan kualitas pelayanan publik yang prima. Polisi melalui pemolisiannya merupakan bagian bahkan refleksi dari masyarakat yang dilayaninya. Soft Power dari Kebiasaan yang baik akan membawa kepada hati nurani yang baik

Kalau kita melihat siaran NHK ( TV Nasional Jepang ) yang disiarkan suasana teduh damai dengan berbagai pendekatan seni budaya. Hal tersebut dilakukan dan dipertontonkan serta diajarkan bagaimana mempertahankan hidup dengan tetap menghargai kehidupan.

Ada film tentang sikap pemain dan suporter sepak bola yang kalah bertanding tetap menunjukan sikap yang hormat ada rasa terimakasih dan juga menunjukan sesuatu yang humanis beradab.

Sebelum meninggalkan stadion mereka membersihkan sisa sisa kotoran dan menunjukan stadion bisa lebih bersih dari sebelum pertandingan.

Ada sebuah analogi just kiding/ joke antara polisi Jepang dengan polisi Indonesia. Pada saat polisi Indonesia berkunjung ke Jepang dan melihat polisi Jepang melakukan tindakan yang humanis, dialogis, polisi Indonesia memuji mujinya. Polisi Jepang itu heran, mengapa harus dipuji. Dan mengatakan ini hal yang biasa karena merupakan pekerjaan kami.

Pada suatu kesempatan polisi Jepang ke Indonesia dan melihat polisi Indonesia melakukan tindakan kekerasan, melakukan hal hal yang berbeda dengan sebagaimana keutamaan polisi, polisi Jepang komplain : mengapa anda melakukan penyimpangan? Polisi Indonesia terheran heran, saya tidak menyimpang, Ini pekerjaan saya. Kita bisa melihat tata cara adat orang Jepang meminum teh " cha no yu" betapa mereka sangat lembut dan menghormati dan menikmati atas nikmat rasa meminum teh.

Saya bukan memuja muja Jepang lebih hebat, namun yang ingin saya tunjukan adalah kebiasaan yang baik akan membawa kepada hati nurani yang baik. Kebiasaan ini diajarkan dilatihkan terus menerus sehingga menjadi habitus dan semua dijalankan secara reflek.

Bangsa berbudaya akan menghargai seni budaya dan mampu menata keteraturan sosial dan mengemas menjadi pariwisata. Sumberdaya yang ada akan dibangun dalam kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Kebiasaan pun akan menjadikan suatu keahlian . "Kebiasaan yang baik membawa kita pada hati nurani yang baik". Kebiasaan sebagai sesuatu yang telah terpola, berulang dari waktu ke waktu untuk mengerjakan sesuatu yang terstruktur. Kebiasaan hampir-hampir mendekati insting (reflek), kalau dilatih terus menerus akan menjadi suatu kepekaan dan keahlian.

Sering kali kita melihat pemain-pemain acrobat, mereka sangat mahir melakukan berbagai atraksi yang tidak semua orang bisa/berani

melakukan. Kebiasaan melakukan sesuatu yang baik memang harus dilatih dengan penuh ketekunan, apalagi kebiasaan yang} memerlukan kompetensi.

Tanpa pendidikan dan latihan sulit bagi seseorang mempunyai kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menjadikan seseorang memiliki hati nurani yang baik.

Keahlian yang berguna/ bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia dimulai dari pendidikan dan latihan untuk membiasakan yang baik.Dasar dari pendidikan dan latihan yang baik dimulai dari kesadaran dan tanggung jawab.

Membangun kesadaran dan tanggung jawab melalui sistem/ mekanisme untuk merubah mind set seseorang.

Membangun mind set, dalam masyarakat diperlukan rekayasa sosial yang didukung dengan sistem, program dan teknologi. Kebiasaan yang baik perlu dijabarkan indikator-indikatornya, sehingga kebiasaan yang baik dapat dinilai kompetensinya.

Dalam suatu organisasi maupun institusi, kebiasaan yang baik dapat dikategorikan sebagai perilaku organisasi.

Perilaku organisasi dapat dibuat acuan pada etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika kerja menjadi bagian dari SOP (standard operational procedure) yang terdiri dari, job description dan job analysis, standar keberhasilan tugas, sistem penilaian kinerja, dan sistem reward dan punishment.

Kebiasaan baik tidak akan muncul tatkala banyak peluang untuk menyimpang, kesadaran tanggung jawab pun akan ikut menghilang tatkala tidak ada sistem yang unggul. Tatkala kebiasaan yang baik tidak ada maka keahlian pun tidak didapatkan. Menjadi ahli karena terbiasa dan mempunyai kompetensi.

Tatkala disatukan pada komitmen dan keunggulan yang akan menjadi karakter. Karakter dapat dipahami dari komitmen, integritas dan keunggulan. Itu semua dimulai dari sang pemimpin dan kepemimpinannya.

Tatkala pemimpin mampu menunjukan sesuatu dengan penuh dengan cinta dan kasih sayang untuk melindungi, mendidik dan mampu menjadi ikon maka ini juga akan mampu bagi pembangunan karakter dan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Prof Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa polisi adalah kumpulan orang baik. Polisi bekerja melalui O2H (otak otot dan hati nurani). Maka pemimpin dalam kepemimpinannya perlu empati, kepekaan kepedulian dan bela rasa.

**Empati Seorang Pemimpin**

Sebuah cerita klasik dari relief candi Mendut, tentang burung berkepala dua bisa kita jadikan analogi untuk melihat pemimpin dan kepemimpinannya. Kepala bagian atas memakan buah-buahan dan makanan-makanan yang segar, enak, dan manis. Kepala yang satunya (kepala bawah) memakan sisa-sisa dari apa yang dimakan oleh kepala atas.

Suatu ketika kepala bawah protes kepada kepala atas agar sesekali diberinya makanan yang enak seperti yang dimakannya.

Tak disangka kepala atas mengatakan: "Wahai kepala bawah, terimalah dan syukurillah apa yang kau nikmati. Kita toh satu tembolok. Jadi, makanlah apa yang menjadi makananmu." Mendengar jawaban seperti itu, kepala bawah merasa dilecehkan. Dalam hati ia berkata:

"Kalau begitu aku akan makan sembarangan, toh satu tembolok juga". Pada suatu hari kepala bawah nekat makan jamur beracun. Matilah burung berkepala dua tadi.

Cerita di atas dapat dikaitkan kepada pemimpin dan gaya kepemimpinannya yang kelihatan anggun dan berwibawa. Ia menempatkan posisi pada menara gading dikelilingi kemewahan puja puji dan berbagai kenikmatan duniawi. Di lain pihak, anak buah yang menjadi bawahannya seakan budak yang dijadikan ganjalan penyangga kemegahannya itu.

Ia tak mempedulikan kesedihan dan kesusahan bawahannya. Ia juga tidak mempedulikan kesengsaraan masyarakat luas akibat kebijakan yang diambilnya.

Cepat atau lambat bawahan, anak buah ini bisa saja nekad, melakukan harakiri, melakukan tindakan fatal yang muaranya memang pimpinan tadi akan rontok di singgasananya. Mereka bisa saja nekad karena pemimpin sudah lupa Pemimpin tidak jarang malahan menyakiti mereka.

Anak buah sudah biasa sengsara, tidak usah dimanja nanti malah ngelunjak dan repot mengatasinya, demikian pikir sang pemimpin. Bayangkan saja, betapa tega seorang pemimpin menjadikan bawahannya sebagai ganjel kesuksesan dan keberhasilannya.

Empati seorang pemimpin terhadap anak buah seharusnya merupakan kesegaran roh dan jiwa mereka dalam bekerja.

Pemimpin yang berempati tidak mematikan tetapi menyadarkan, membangkitkan, menghidupkan, memberi daya gerak dan daya untuk menjadi dinamis tumbuh dan berkembang.

Dirinya bukan menjadi matahari tetapi justru menjadi bulan, memberi pencerahan dan penerangan di saat kegelapan. Di saat terjadi kesesatan, di saat terjadi kelesuan, di saat terjadi keputusasaan pemimpin tampil sebagai sang penuntun, pembimbing, bintang pedoman, arah, dan tujuan.

Hidupnya siap berkorban dalam membangun dan mencapai sasaran. Tak gentar terhadap hambatan, tantangan, ancaman yang bisa merusak dan mematikan dirinya maupun keluarganya.

Jiwa solidaritas seorang pemimpin akan melegenda. Pemimpin dikenang bukan dari kekayaannya, kezalimannya, tetapi karena kerendahhatiannya, empatinya, rasa senasib sepenanggungan, kerelaan berkorban, kemampuan membawa kemajuan, menempatkan pada tempat sebagaimana yang seharusnya. Dadi ratu kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane. Ratu iku anane mung winates dadi kawulo tanpo winates.

“Saya lebih senang dan bangga berada di tengah-tengah anak buah saya,” demikian dikatakan oleh Jend. Sudirman. Walau sakit dan harus ditandu, ia ikut bergerilya untuk merasakan apa yang menjadi penderitaan anak buahnya. Kehebatan seorang pemimpin bukanlah

pada dirinya dan tebar pesonanya, tetapi ada suatu transformasi menjadi kebaikan dan selalu ada perbaikan.

Mahatma Gandi sebagai pemimpin berani dan mau memberi teladan dengan menenun sendiri pakaiannya. Ia tidak harus dengan berjas dasi.

Martin Luther King Jr, pemimpin pergerakan antirasialis di Amerika, pun memperjuangkan hak-hak kaumnya dan berempati untuk tidak dengan kekerasan. Bahkan, ia pun menjadi korban kekerasan yang menghilangkan nyawanya. Demikian pula Mahatma Gandhi.

Lagi-lagi pemimpin memang yang akan memberi warna menjadi bintang pedoman arah dan tujuan. Menginspirasi, mampu memberdayakan dan mengajak anak buahnya mewujudkan mimpi-mimpinya. Di zaman modern ini pemimpin dituntut untuk berani, cerdas, dan murah hati, yang melayani.

Dia mau menjembatani dan mau memahami bahkan menjadi role model bagi rekan dan bawahannya. Ki Hajar Dewantoro tokoh pergerakan nasional pendidikan mengajarkan filosofi :

1. Ing Ngarso Sung Tulodo
2. Ing Madyo Mangun Karso
3. Tut Wuri Handayani.

Keutamaan Pemimpin dalam Kepemimpinannya setidaknya mencakup :

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kratifitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu,

5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini
6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi
8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan mendapat dukungan secara internal maupun eksternal

Pemimpin simbol dan sumber energi. Pemimpin itu memberi warna, cerah kusam hingga gelap yang merupakan refleksi kinerjanya.

Pemimpin mewakili dari banyak orang dan mengemban amanah atas kekuasaan dan kekuatan untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada. Pemimpin sang pemimpi. Pemimpin yang tidak memiliki mimpi bukan pemimpin.

Mimpi dalam konteks ini bukanlah khayalan atau bualan pepesan kosong melainkan memiliki pemikiran yang visioner.

Agar mampu memperbaiki kesalahan di masa lalu, menjaga marwah dan nilai nilai luhur yang telah dirintis para pendahulunya. Mampu dan siap di era kekinian dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Pemimpin dengan kepemimpinan nya merupakan legacy.

Pemimpin memiliki gaya kepemimpinan dari otoriter hingga demokratis yang gaya gaya tersebut dapat diterapkan sesuai dengan konteksnya. Pemimpin ini bagai dirigen yang memainkan orkestra dangan harmoni menyanyikan lagu lagu indah. Pemimpin merupakan kekuatan untuk menggerakkan dan memainkan kinerja sesuai standar standar yang dibuatnya untuk dapat mencapai tujuan.

Pemimpin sebagai simbol dan sumber energi. Kemampuan menjadi simbol dan sumber energi akan muncul dari upaya mewujudkan

mimpinya agar dapat menjadi kenyataan. Pemimpin sebagai simbol energi, keberadaannya mampu menjadi kekuatan baru penyegaran dan harapan.

Pemimpin sumber energi kekuatan dan kekuasaannya mampu menghasilkan kinerja yang berguna bagi terwujud dan terpeliharanya kehidupan serta meningkatnya kualitas hidup banyak orang.

Pemimpin yang mampu menjadi simbol dan sumber energi ini akan mampu membawa apa saja yg dipimpinnya mendapatkan kepercayaan banyak orang. Dan mengangkat harkat dan martabat secara lingkup kecil terbatas hingga lingkup yang luas bahkan menggelobal.

Kekuatan seorang pemimpin pada energi yang dihasilkan dapat dilihat dari kebijakan kebijakannya. Kita dapat belajar dari gelar Sultan Agung hanyokro kusumo senopati ing ngalogo sayidin panoto gomo khalifatuloh.

Secara bebas dapat dimaknai sbb : Raja sang pemimpin besar, kusuma bangsa panglima perang pemimpin agama dan utusan Tuhan. Kekuatan dan kekuasaan pemimpin menjadi sangat penting dan mendasar untuk memiliki ketahanan, daya tangkal bahkan daya saing. Karena dalam hubungan apapun senantiasa ada hubungan kekuatan.

Sespim: lembaga pendidikan yang mendidik calon calon pimpinan di masa depan didasarkan pada moralitas, kesadaran, tanggung jawab untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mewujudkan dan dan memelihara keamanan dalam negeri dan mendukung pembangunan nasional.

Suatu bangsa yang berdaulat memiliki ketahanan atas berbagai gerusan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu juga memiliki kemampuan memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya.

Keamanan dalam negeri adalah keteraturan sosial secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya secara pribadi, di ruang publik, profesi dan berbagai pekerjaan, lingkungan hidup, dan mayantara yang dapat

mendukung produktifitas maupun upaya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Keamanan dalam negeri diwujudkan dalam keteraturan sosial sehingga terjaminnya keamanan segala sumberdaya negara dari manusianya, kekayaan alamnya, ideologi, politik ekonomi dan sosial budayanya untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang sehingga berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal bahkan berdaya saing.

# JANGAN LELAH MENABUR WALAU KITA TIDAK MENUAI APA APA [70]

Pengalaman Rohani Kunjungan Apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus ke Indonesia ( 03 - 06 September 2024)

Bulan April atau Mei 2024 ada informasi bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia. Penuh harap saya bisa mengikuti misa agung yang dipimpin Bapa Suci. Pada saat Paus Yohanes Paulus ke Indonesia pada bulan Oktober 1989 saya masih sebagai Perwira Siswa di Akademi Kepolisian.

Bapak ibu dan adik adik saya mengikuti misa agung di Yogyakarta waktu itu. Saya tentu merasa sedih karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saya mengikuti misa agung itu. Selain itu saya punya harapan dan berdoa semoga pada saat ada kunjungan Bapa Suci ke Indonesia lagi saya bisa mengikuti misa agung.

Tiga puluh lima tahun kemudian seakan doa saya bisa dikabulkan. Saya orang berdosa tetapi saya selalu berdoa agar dijauhkan dari yang jahat. Setiap misa ada doa untuk perjalanan Bapa Suci ke Indonesia saya merasa kasih dan kuasaTuhan ada walau Bapa Suci sudah berusia 87 tahun.

Irjen Pol Purn Heri Dahana yang ditunjuk sebagai ketua pengamanan kunjungan Bapa Suci menelpon saya menginformasikan adanya rencana kunjungan Bapa Suci ke Indonesia. Saya setelah itu menelpon Kakor Sabhara Irjen Pol Hari Sudwijanto untuk dapat mendukung pengamanan yang dipercayakan kepada Irjen Pol Purnawirawan Heri Dahana.

70 https://transindonesia.co/2024/09/06/jangan-lelah-menabur-walau-kita-tidak-menuai-apa-apa/

Singkat ceritera pada saat di Sespim Irjen Pol MH Ritonga berkata kepada saya: “Bang bagaimana caranya kita bisa ikut misa agung yang dipimpin Bapa Suci”.

Saya terdiam sesaat dan terhentak hati saya, spontan saya menjawab: “Iya harus itu”.

Seakan doa panjang saya sudah dekat, namun dalam hati bagaimana caranya, saya tidak tahu. Saya sebagai Kasespim yang berada di Lembang tentu jauh dari kemungkinan aktif dalam kepanitiaan. Saya sore harinya meminta peserta didik yang beragama Katholik: Robert Dedeo dan Ucok yang kebetulan anggota OCI (Ordonantie Certencis Indonesia) untuk aktif dan memonitor perkembangan.

Di dalam pembinaan umat Katholik TNI Polri di wilayah Keuskupan Bandung yang dipelopori Romo Aloysius Wahyu Endro Suseno mengadakan perayaan Paskah di Sespim dengan pimpinan Bapak Uskup Keuskupan Bandung MGR Antonius Subianto Bunjamin, 07 April 2024.

Kami semua merasa berkat Bapak Uskup semakin menguatkan iman. Pada saat seminar sekolah Sespima angkatan ke 71 mengundang Bapak Kardinal Ignatius Suharyo sebagai salah satu pembicara. Seminar Sespima angkatan ke 71 TA 2024, mengangkat tema etika pemimpin dan kepemimpinannya. Dengan nara sumber: Sesmenko PMK bpk Andi Megantara PhD, Ignatius Kardinal Suharyo, Bhikku Sri Panavaro Mahatera, Sestama Lemhanas Komjen pol RZ Panca Putra, Msi.

**Apa yang menjadi topik seminar**

“Pemimpin berbasis Moral : tahu yang baik dan benar, Etika bisa memilih dan menerapkan yang baik dan benar” yang bisa simpulkan bahwa spirit pemimpin antara lain :

1. Pantas dan Benar, Layak dan Menyelamatkan
2. Kesadaran dan Tanggung Jawab dan Disiplin
3. Menginspirasi, Memotivasi, Memberi Solusi, Melindungi, Mengayomi dan Melayani

4. Sepi Ing Pamrih Rame ing Gawe (tulus hati dan tidak banyak kepentingan)
5. Beintegritas, Komitmen dan Konsisten
6. Mampu menjadi siapa dan mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan
7. Transformatif yang passionnya: berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, Siap di masa kini, Mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik
8. Meneng, Wening, Dunung (Neng, Ning, Nung), memiliki ketenangan, keheningan dan memutuskan dengan bjjak
9. Rendah Hati
10. Memiliki Iman yang Benar

Bapa Kardinal memberi buku kepada saya : " Humiality Leadership" Paus Fransiskus. Beliau juga berdoa bagi Sespim untuk dibangun taman doa Gua Maria dan menandatangi prasasti peletakan batu pertama pembangunan " Balai Kebhinekaan".

Saya sejak bulan juni 2024 terus menerus banyak kegiatan hingga penutupan pendidikan Sespimen dan Sespimti seakan tirai kabut menutupi akan kunjungan Apostolik Bapa Suci Fransiskus. Irjen Pol Hari Sudwijanto menjadi Kapolda Kaltara digantikan Irjen pol MH Ritonga.

Sekira 2 minggu sebelum kunjungan Bapa Suci, Irjen Ritonga bertanya: "Bang mau tidak kalau di sprinkan Asops Irjen Pol Verdianto Iskandar Biticaca sebagai tim asistensi pengamanan?".

Dengan spontan saya menjawab: "siap". Saya juga bertanya tanya saya bisa apa, tetapi saya percaya seperti apa yang dikatakan romo Wihong " GMPD" Gusti mesti paring dalan "(Tuhan pasti memberi jalan).

Pada suatu malam saya mendapat kiriman aplikasi undangan dari AKBP Purn yang anggota OCI juga dan dibantu Robert Dedeo kami bisa mendapat undangan.

Pada tanggal 03 September 2024 Irjen Ritonga mengajak saya untuk berkumpul di Pos Monas untuk mendapat arahan bapak Asops Ijen pol Verdianto. Saya hari itu ada ujian terbuka promosi doktor : Irjen Pol Rudi Darmoko, membimbing tesis anak S2 STIK dan mengajar Hubungan Antar Suku Bangsa, setelah selesai membahas tentang Crisis Centre yang akan di bangun di Sespim. Hari itu rasanya tidak mungkin bergabung dengan tim pengamanan.

Pada tanggal 04 September 2024 barulah kami bisa bergabung dengan tim pengamanan di Monas. Di sana saya bertemu Dan Kor Brimob : Komisaris Jenderal Imam Widodo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan tim TNI Polri lainnya. Di sela sela perbincangan Dan Kor Brimob menyampaikan kepada saya sambil menunjukan ada foto pengawal Bapa Suci Pays Fransiskus dengan berkata:" Kon kudu iso foto ngene iki "(kamu harus bisa berfoto seperti ini). Beliau juga mengatakan: "duik iso entek tapi, foto karo Paus iku dadi crito tekan anak putu" (uang bisa habis tetapi kalau foto dengan Paus akan menjadi kisah sampai anak cucu. Apa yang dikatakan Dan Kor Brimob menyemangati doa saya yang lama timbul tenggelam bangkit lagi.

Kemudian saya bicara kepada Irjen Pol Ritonga: "kamu masih punya semangat dan nyali bersalaman dengan Bapa Suci?". Irjen Ritonga menjawab: "iya bang tapi caranya bagaimana? Saya sudah tanya ke sana sini tidak ada yang bisa memastikan bisa bersalaman dengan Bapa Suci".

Saya spontan menjawab: "masih ingat kisah wanita yang mengalami pendarahan, dengan imannya asal memegang Jubah Yesus maka akan sembuh". Lalu Irjen Ritonga bertanya lagi: "terus kita harus bagaimana?".

Saya jawab:" ayo kita ke Katedral saja, aku tidak tahu caranya bagaimana, kita melihat Bapa Suci dengan mata kepala kita saja ini sudah menjadi berkat".

Kamipun nekat ke Katedral dengan restu Dan Kor Brimob, Kapolda Metro dan As Ops Kapolri. Benar saja kami ditanya tanya macam-macam dari Pas Pam Pres, namun kami sebagai orang Katholik diijinkan berada di sekitar halaman gereja Katedral. Kami berbincang

bincang dengan tim Paspampres bagaimana bisa bersalaman dengan Bapa Suci, hampir tidak ada kesempatan karena tim pengawal Bapa Suci begitu ketat dan badan mereka juga besar besar. Saat Bapa Suci memasuki halaman Katedral, tim pengamanan Bapa Suci meminta kami untuk menjauh dari mobil Bapa Suci.

Berkat Tuhan, Bapa Suci turun dari mobil dan duduk di kursi roda tidak langsung memasuki gereja namun berkeliling menyalami anak anak yang bermain angklung dn yang menyambutnya, dan Bapa Suci sampai di mana kami berjajar. May Jend Gabriel Lema As Ops Panglima TNI bersalaman dan mencium tangan Bapa Suci, selanjutnya Irjen Ritonga dan sampailah giliran saya. Saya bersalaman dan mencium tangan Bapa Suci dan lengan saya dipuk puk. Lega rasanya dan ternyata ada dokumentasinya. Air mata meleleh rasa lega plong jiwa bahagia terkabul bisa bertemu dan bersalaman dengan Bapa Suci. Terimakasih kepada Tuhan yang melalui tangan tangan orang orang yang menyemangati saya walau sisi logika dan kesempatan hampir hampir tidak ada. Terimakasih saya ucapkan kepada Dan Kor Brimob yang menstimuli saya dengan tulus hati, sekalipun beliau orang muslim.

Pada tanggal 05 September 2024 saya bersama AKBP Albertus Eko ke GBK dan berkeliling melihat tempat misa. Pada pukul 13.00 menjelang misa kami ke Posko Senayan. Saya bertemu dengan Kombes Pol Iroth, dan Kombespol Ananta yang gelangnya diberikan istrinya. Kombes Ananta nampak ingin mengikuti misa walau sebagai tim pengamanan. Kami kemudian bersama sama berjalan menuju gate misa. Saya merasa tidak layak duduk manis, namun sebagai rasa syukur saya bersama Kombes Iroth dan Irjen Ritonga, kembali berkeliling. Pada saat Bapa Suci berkeliling menyapa umat, saya mengeluarkan rosario dan kalung salib St Benedictus yang selalu saya pakai. Saya acungkan dan saya merasa mendapat berkat Bapa Suci.

Pada saat misa agung yang dipimpin Bapa Suci. Seakan ada kelegaan dan obat kehausan. Hidup awal iman kita adalah dengan rendah hati menerima Yesus. “Jangan takut”. Ia memanggil dan menantang kita untuk berani menabur jala. Seperti Petrus yang dengan berat kecewa lelah semalaman tidak mendapatkan ikan, namun karena perintah

Guru maka taat melaksanakannya. Dengan iman dan kerendahan hati seperti Petrus berani berbuat apa yang menjadi sabda. Santa Theresia dari Calcuta menyampaikan tanpa lelah dan terus berbuat, dialog, perdamaian bagi yang lemah miskin dan termarjinalkan.

Ini saya kutip dari Fb ibu Puspita menanggapi kotbah Bapa Suci :

"Dalam homilinya, Paus menyentuh beberapa aspek yang sederhana tetapi tidak mudah. Katanya, kita harus tahu menempatkan diri dan menyediakan ruang untuk kehadiranNya dengan mau mendengarkan dengan telinga hati.

Dikatakannya pula agar jangan pernah lelah menabur meski tidak menuai apa-apa. Meski melewati berbagai kekecewaan, kita tetap harus berjuang memajukan perdamaian dan dialog.

Kita didorong untuk berani mengambil risiko utk mau bertolak ke tempat-tempat untuk menebar jala.

Perlihatkan kebaikan budi dan hati. Tebarkan aroma harapan"

Banyak kisah pengalaman rohani yang bisa kita ambil menjadi pedoman hidup kita. Selesai misa rasanya hati saya lega plong apa yang menjadi cita cita dan harapan bisa terlaksana, tentu karena berkat Tuhan. Saya anak kampung Ndekil Kedungsari yang bukan siapa siapa hampir hampir tidak pernah diperhitungkan sering dibully namun atas kuasa Tuhan memberi dan membukakan jalan dan memberikan kemuliaan.

Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada Saya tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Amin

# HARMONI MODEL POLISI DAN PEMOLISIAN BAHAGIA DAN DINAMIS [71]

Nglaras dapat dimaknai adanya yang selaras ( harmoni ) di sela sela kehidupan. Nglaras itu sederhana yaitu ada rasa bahagia walau serba sederhana dan apa adanya. Kita dapat menganalogikan tubuh kita yang harmoni dslam sistem sistemnya. Ada yang tidak beres sedikit saja rasanya tidak nyaman. Ada sesuatu yang nyelip di gigi rasa tidak nyaman bisa ke mana mana gangguannya.

Keseimbangan dan harmoni merupakan suatu hidup melalui dialog dan penghormatan kepada Tuhan kepada sesama dan kepada alam lingkungan.

"Tatkala ada kuasa seringkali lupa dan jumawa sehingga kata dan perilaku semena mena. Tuhan, sesama manusia dan alam dieksploitasinya dimanipulasinya.

Lupa tatkala menabur akan menuai. Apa yang ditabur itulah yang dituai. Karma kualat akan meminta pertanggungjawabannya. Manusia jumawa yang lupa dibuatakan kuasa, akan termakan karma. Ditunggu saatnya tiba meraung raung meminta belas kasihan namun tiada yang lagi suka terus saja akan dibiarkan merana sepanjang masa"

Sespim Lemdiklat Polri dalam membimbing dan menyiapkan para calon pemimpin di masa depan yang mampu menjalankan pemolisian yang harmoni dan dinamis. Proses transformasinya dalam pembelajaran di Sespim melalui dialog peradaban.

71 https://transindonesia.co/2024/09/07/harmoni-model-polisi-dan-pemolisian-bahagia-dan-dinamis/ https://polisiindonesia.id/2024/09/07/cdl-harmoni-model-polisi-dan-pemolisian-bahagia-dan-dinamis/

Pemimpin dapat dianalogikan sebagai dirigen dalam suatu orkestra yang mampu mengharmonikan para pemain musik yang berbeda untuk memainkan alunan lagu dengan nada yang indah.

Pemimpin bukan segala galanya, namun dari kebijakan pemimpin bisa melakukan segala galanya, maka moralitas, pengendalian diri sebagai

keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban menjadi penting bagi pendidikan calon pemimpin.

Sekolah pemimpin sejatinya merupakan sharing of happiness. Pendidikan dengan pendekatan dari hati ke hati sejatinya untuk berbagi dalam kebahagiaan.

Anthony de Mello spiritualis dari India mengatakan : kebahagian adalah buah sesuatu, bukan sesuatu.

Rabindranath Tagore mengatakan : di dalam mimpi aku mendapatkan bahwa hidup adalah kebahagian. Tatkala aku bangun ak mendapatkan bahwa hidup itu ternyata kewajiban. Dan tatkala aku memenuhi kewajiban aku menemukan kebahagiaan.

Ki Ageng Suryomentaram spiritualis atau bisa dikatakan filsuf yangi mencari dan menemukan " begja" atau hidup bahagia. Bahagia menurut Ki Ageng Suryomentaram sejatinya adalah hal yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Bahagia itu sederhana dan dalam kesederhanaan ada kebahagiaan.

Pemimpin dalam kepemimpinannya salah satunya mampu melihat potensi potensi kebahagiaan di dalam institusi yang dipimpinnya maupun dalam masyarakat yang dilayaninya.

Sekalipun dalam kondisi serba terbatas dan sederhana namun tatkala hati dan jiwa bahagia di situ ada energi positif.

Sekolah bagi para calon pemimpin merupakan sekolah moralitas, pengendalian diri untuk mampu menemukan kebahagiaan sejatinya. Mulai dari religi, seni, tradisi, hobi, komuniti bahkan teknologi dsb.

Bahagia dimulai dari diri sendiri yang mampu melihat sisi kebaikan dan mensyukurinya.

Hakekat pemimpin dengan kepemimpinannya adalah berbagi kebahagiaan, karena dengan hidup bahagia akan ada kepekaan, kepedulian dan bela rasa bagi kemanusiaan, semakin manusiawinya manusia.

Ketulusan, kecintaan dan kebanggan diajarkan dilatihkan secara berkesinambungan. Bukan karena kepentingan yang sarat tipu daya topeng rekayasa. Hidup yang bahagia tatkala dalam hidupnya mampu memahami, mensyukuri walaupun dalam berbagai tantangan bahkan kesulitan kehidupan. Kebahagiaan itu apa adanya dan menikmati serta mampu memberdayakan apa yang bisa serta dari apa yang ada.

Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik pula. Di situlah seni dalam hidup, walau kadang dianggap biasa biasa dan seakan semua orang bisa. Seni itu salah satu cara membuat orang bisa bahagia.

Pemimpin dengan kebahagiaannya berbagi kebahagiaan menuju hidup bahagia sesungguhnya menuju pada jati dirinya. Sederhana dan mudah dilakukan dengan kesadaran yang penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Bahagia sejati tidak menyusahkan apalagi mengeksploitasi dari kesusahan orang lain. Kebahagiaan yang tercipta di atas penderitaan orang lain bukanlah kebahagiaan melainkan penindasan. Kebahagiaan akan sirna tatkala hidup diisi dengan sikap cengeng yang terus mengeluh dan selalu minta dikasihani. Seni yang membahagiakan tatkala hidupnya mampu memberi ruang berbagi bagi orang lain bisa ikut menikmati. Tentu saja itu semua penuh dengan ketulusan yang apa adanya tanpa mengada ada.

Keteraturan sosial yang dikaitkan dalam keamanan dalam negeri untuk mendukung produktifitas agar masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang. Dalam konteks melindungi mengayomi melayani dan menegakkan hukum maka keamanan dan rasa aman wujud harmoni dalam kebahagiaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang merupakan ikon peradaban.

Hakekat Keamanan Dalam Negeri :

1. Adanya Keamanan dan Rasa Aman warga masyarakat
2. Harmoni dalam Kebhinekaan

3. Tegak dan adanya Budaya Patuh Hukum
4. Pemberdayaan Sumber Daya bagi Keadilan Sosial
5. Penanganan Konflik Secara Beradab
6. Semakin Manusiawinya Manusia
7. Terwujud dan Terpelihara Keteraturan Sosial
8. Transparan dan Akuntabel
9. Berorientasi pada Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
10. Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada publik berstandar Prima

Passion Polisi dalam Pemolisiannya menunjukan :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan
2. Polisi sebagai pembangun peradaban
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan
5. Pemolisiannya menunjukkan tingkat dan kualitas : profesional, cerdas bermoral dan modern yang dilandasi : kesadaran, tangagungjawab dan disiplin
6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing
7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum
8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM
9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial
10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Polisi dan pemolisiannya dalam perspektif perilaku organisasi sejatinya membuat harmoni dan berbagi kebahagiaan dengan terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman.

Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya

keteraturan sosial. Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktivitas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan, hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

Ancaman hambatan dan gangguan harmoni dan kebahagiaan dalam sosial kemasyarakatan yang berpak pada terganggunya aktivitas produksi masyarakat karena adanya:

1. Premanisme

   Premanisme tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, pendekatan personal, lemahnya penegakkan hukum

2. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans national, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika

3. Berbagai bentuk pelanggaran

   Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal

4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya

5. Faktor sumber daya manusia

   Tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia sangat mendasar bagi terwujudnya keteraturan sosial.

6. Faktor politik dan kebijakan publik

   Politik yang tanpa hati nurani kebijakan publiknya kontra produktif. Lebih pada kepentingan diri dan kroninya.

7. Perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi.

   Perubahan begitu cepat menembus batas ruang dan waktu. Media dan sistem komunikasi transportasi saling adu kekuatan. Muncul era post truth, hoax, serangan siber, dsb.

8. Corak masyarakat dan kebudayaannya

   Masyarakat yang majemuk akan mengagungkan primordial. Dari situlah legitimasi dan solidaritas dibangun dsn mudah diikuti walau kontraproduktif, tidak rasional dan sarat emosional. Tatkala primordial dijadikan alat maka kebencian akan menjadi penyulut konflik sosial bagkan perang saudara.

9. Sistem pelayanan publik

   Pelayanan kepada publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan tatkala dalam birokrasi yang sarat dengan KKN maka akan kontra produktif dan terjadi palak memalak. Kekuatan dan kekuasaan untuk mendominasi sumberdaya dengan cara personal in group out group.

10. Sistem ekonomi, industri dan perdagangan.

    Point 1 sd 9 semua bermuara pada point 10.

Polisi dan pemolisiannya setidaknya pada tingkat manajemen dan operasionalnya ditujukan untuk mengatasi 10 point di atas. Pola pola pemolisian dapat secara filosofis dan strategis mengacu model community policing.

Secara operasionalnya dapat dikategorikan berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah.

Di era digital dan era pandemi covid 19 model pemolisian dapat dikembangan melalui smart policing agar ada harmoni antara : conventional policing, electronic policing dan forensic policing.

Sistem sistem mendasar pada pemolisian dapat dilihat dari :

1. Ranah Birokrasi yang dikategorikan :
   a. Kepemimpinan
   b. Administrasi

c. Opersional

d. Capacity

2. Ranah Masyarakat yang dapat dilihat dari :

a. Kemitraan

b. Pelayanan publik

c. Pemecahan masalah

d. Jejaring atau net working

Perilaku organisasi kepolisian dibangun secara profesional, cerdas, bermoral dan modern. Dengan pendekatan yang impersonal berbasis kompetensi

Walau penuh : keterbatasan, tekanan dan tantangan bahkan ancaman sekalipun, tatkala suasana kerja harmoni dan bahagia maka akan nyaman, jiwa tenteram serta penuh harapan maka : 1.Kinerja akan terus meningkat kualitasnya.

2. Menurunnya tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Manusia bukan robot. Robot bisa saja lebih canggih dalam bekerja namun tak memiliki hati, tidak ada kebijaksanaan yang memberi harapan sebagai motivasi akan meningkatkan kualitas kinerja.

Perubahan suatu keniscayaan. Tertinggal dari perubahan akan ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan jaman. Mengimbangi perubahan akan lelah terengah engah. Mampu melampaui perubahan baru mampu mengatasi dan mengendalikan perubahan dan dampak dampaknya.

Perubahan begitu cepat. Tatkala terlambat atau tidak tepat maka cepat atau lambat pasti sekarat. Dalam membangun institusi yang profesional cerdas bermoral dan modern diperlukan adanya budaya organisasi yang dilandasi nilai nilai inti yang berbasis democratic policing yaitu :

1. Supremasi hukum

2. Jaminan dan perlindungan HAM

3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Pembatasan dan pengawasan kewenangan

Democratic policing dalam implementasinya menunjukan polisi dan pemolisiannya demi kemanusiaan, membangun dan memelihara keteraturan sosial dan peradaban. Hal tersebut dapat ditunjukkan adanya :

1. Kepemimpinan yang transformatif
2. SDM dengan kompetensi yang ahli kreatifitas dan visioner,
3. Dinamis dengan penuh kesadaran akan tugas dan tanggungjawabnya.
4. Didukung dengan modernisasi infrastruktur dan sistem sistemnya
5. Tim transformasi sebagai tim back up
6. Program program unggulan yang menjadi fokus dalam operasional yang bersifat rutin, khusus, maupun kontijensi
7. Penerapan pada pilot project
8. Sistem monitoring dan evaluasi
9. Pola pola pengembangan

Polisi dan pemolisiannya yang harmoni, dinamis dan membagikan kebahagiaan dalam perspektif perilaku organisasi dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif gaya atau model pemolisiannya. Dari berbasis wilayah, berbasis fungsi maupun berbasis dampak masalah.

# MENGAPA HARUS BELAJAR BERLALU LINTAS? [72]

Kita sering melihat pengguna jalan saat berlalu lintas yang sengaja atau karena ketidaktahuannya atau mungkin karena kelalaiannya, membahayakan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain.

Berlalu lintas, bisa berkendara berjalan kaki atau menggunakan moda transportasi lainnya, di situ ada perilaku berlalu lintas. Dampak dari perilaku berlalu lintas yang menonjol adalah: kecelakaan, perlambatan hingga kemacetan. Sebenarnya banyak masalah lainnya yang menjadi masalah sosial dan kontra produktif. Masalah kejahatan, pelanggaran hingga kerusakan fasilitas publik. Semua itu harga sosial yang harus dibayar sangatlah mahal. Dari kematian, cacat, terganggu produktifitasnya, kerugian materi, terganggunya produktifitas masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pergerakannya, akan semakin tinggi potensi yang berdampak kontra produktif. Belajar berlalu lintas sejatinya belajar akan kemanusiaan yang membangun kesadaran, tanggungjawab, disiplin yang peka, peduli dan berbelarasa bagi keselamatan dirinya maupun orang lain. Di dalam belajar berlalu lintas dilakukan sejak usia dini dan sepanjang hayat. Keselamatan berlalu lintas dimulai dari rumah kita. Masuk area publik yang digunakan lalu lintas di situlah kita wajib untuk peka dan peduli serta berempati untuk keselamatan.

**Keselamatan Berlalu Lintas Terabaikan?**

Banyak pandangan yang semata mata melihat tilang sebagai bentuk pembayaran denda. Banyak media yang menonjolkan previlege dibandingkan keselamatan. Gugatan atas Undang Undang Lalu Lintas pun sebatas hal hal yang pragmatis dan kewenangan. Keselamatan berlalu

72 https://transindonesia.co/2024/09/08/mengapa-harus-belajar-berlalu-lintas/
https://polisiindonesia.id/2024/09/08/cdl-mengapa-harus-belajar-berlalu-lintas/

lintas seakan terabaikan. Lupa bahwa masalah masalah lalu lintas sosial costnya tinggi dan kontra produktif. Di situlah lalu lintas menjadi refleksi budaya bangsa. Peradaban suatu masyarakat salah satunya tercermin dari perilaku berlalu lintas.

Tingkat kesadaran berlalu lintas begitu meresahkan bahkan menakutkan. Apakah lupa jika sumberdaya manusia sebagai aset utama bangsa? Apakah juga tidak peduli setiap hari antara 60 hingga 90 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Belum lagi yang cacat, luka berat, luka ringan, kerugian materi bahkan waktu dsb.

Road safety seringkali dianggap slogan seremonial dan pemahaman yang sebatas pragmatis. Apakah juga lupa jika lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan yang bisa memaknai road safety sebagai lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar?

Polisi dalam menangani lalu lintas secara komprehensif atau holistik atau sistemik dan dapat dimaknai dalam " Road Safety Policing ". Delapan fungsi polisi dalam menangani lalu lintas:

1. Edukasi
2. Rekayasa Lalu Lintas
3. Penegakan hukum
4. Registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
5. Pusat K3i ( komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi )
6. Analisa dampak lalu lintas
7. Traffic board ( wadah kemitraan para pemangku kepentingan lalu lintas )
8. Koordinatir pengawas penyidik pegawai negeri sipil ( Korwas PPNS )

Delapan fungsi polisi menangani lalu lintas ditujukan untuk:

1. Mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar

2. Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas
3. Membangun budaya tertib berlalu lintad
4. Memberikan pelayanan prima yang mencakup :
    a. Pelayanan keamanan
    b. Pelayanan keselamatan
    c. Pelayanan hukum
    d. Pelayanan administrasi
    e. Pelayanan informasi
    f. Pelayanan kemanusiaan

Itulah yang menjadi acuan atau standar bagaimana terwujud dan tercapai dalam mendukung keamanan dalam negeri yang mampu membangun secara nasional bagi berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal dan berdaya saingnya suatu negara.

Perubahan mind set dalam berlalu lintas memang tidak mudah bahkan pada tataran political will pun bisa berbeda bahkan bertentangan. Oleh sebab itu dalam membangun lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar setidaknya dapat dimulai dari:

1. Road Safety Literation
2. IT for Road Safety
3. Model Smart City dengan pendekatan smart living dan smart mobility
4. Penegakan hukum secara elektronik
5. Catatan perilaku berlalu lintas
6. Merit system pada perpanjangan SIM
7. Road Safety Research and Development
8. Intellegent Road Safety
9. Media Management

10. Safety Driving and Riding Centre

Tatkala 10 point ini tidak dibahas atau dibangun maka perdebatan dalam berlalu lintas sebatas saling menyalahkan, saling mencari kesalahan, perebutan kewenangan yang ujung ujungnya kembali KKN dan mengabaikan Road Safety (keselamatan berlalu lintas)

Pendidikan berlalu lintas dapat dilakukan dengan membangun literasi. Pemahaman akan literasi lalu lintas bertujuan adanya pemahaman, pembelajaran yang mendalam dan perubahan mind set. Literasi membangun perilaku dengan menanamkan kesadaran yang diikuti dengan : infrastruktur dan sistem pendukungnya, sistem pengajaran, sistem uji dan penerbitan SIM maupun penegakan hukum. Kesemua itu saling terkait. Di dalam belajar berlalu lintas perlu adanya orang orang yang dapat menjadi ikon atau pejuang maupun pelopornya. Guru dan lembaga pendidikan serta media menjadi penting dalam belajar berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas memerlukan seni yang membuat suasana belajar menjadi fun, menyenangkan, mengasyikan dan menjadi kekuatan yang tertanam dalam mind set sepanjang hayat.

Belajar berlalu lintas setidaknya dapat dilakukan dengan:

1. Guru, pelatih, instruktur, maupun kaum influencer, tokoh masyarakat/agama/pemuda atau siapa saja yang dapat menjadi atau dijadikan ikon pembelajaran
2. Wadah untuk belajar secara formal maupun informal
3. Secara langsung maupun melalui media
4. Kurikulum maupun konten yang dibuat secara kreatif, inspiratif, sistematis yang solutif, dan menghibur.
5. Sistem pengajaran dari edukasi, training hingga coaching

Peran media begitu penting untuk mensosialisasikan kepada publik secara luas. Tim kreatif ini sangat mendasar untuk membuat konten bagi anak anak, remaja, dewasa, profesi, maupun bagi publik. Belajar lalu lintas ini disampaikan terus menerus dapat dibuat secara tematik. Misalnya pada saat hari pendidikan nasional, hari anak anak, hari kebangkitan nasional, hari kartini, hari kemerdekaan, hari ibu, hari pramuka dsb. Momentum

momentum seperti itu akan menjadi daya sebar dan daya ingat masyarakat secara luas dan mendalam.

Belajar berlalu lintas menjadi penting dan mendasar bagi terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan bagi pelayanan publik di bidang lalu lintas yang berkualitas prima. Belajar berlalu lintas ini mendukung program program pemerintah dalam membangun bangsa agar berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal dan berdaya saing. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Jangan menjadi korban sia sia di jalan raya.

**Tertib Berlalu Lintas**

Kita seringkali melihat perilaku berlalu lintas dari yang tertib hingga ugal ugalan. Berlalu lintas bukan sebatas mampu membeli dan mengendarai kendaraan bermotor, tetapi juga mampu untuk mentaati aturan, menghormati pengguna lalu lintas lainnya, bahkan mampu peka dan peduli akan keselamatan kita maupun orang lain. Ugal ugalan di jalan raya selain membahayakan diri kita juga membahayakan bagi orang lain. Kita sering melihat anak anak sekolah, mahasiswa, pekerja profesional pengemudi angkutan umum viral di media sosial akibat perilaku berlalu lintas yang tidak terpuji. Dampak atas perilakunya harga sosialnya sangat mahal. Dari kerugian waktu sampai kehilangan jiwa manusia. Ini semua merefleksikan tingkat kesadaran berlalu lintas yang rendah. Ada anak sekolah yang menyepak petugas polisi, mempermainkan orang tua di pinggir jalan, melakukan balap liar, atau dengan sengaja memamerkan ketololannya dengan ugal ugalan di jalan raya. Jalan raya sebagai sarana utama berlalu lintas, sebagai urat nadi kehidupan dijadikan ajang permainan. Apalagi kalau bergerombol atau dari keluarga aparat, seakan memiliki kekebalan fisik maupun hukum dan bisa semaunya.

Kualitas berlalu lintas yang rendah berpotensi menyebabkan masalah lalu lintas yang berdampak luas, dari perlambatan, kemacetan, kecelakaan atau masalah lalu lintas lainnya. Membangun kesadaran berlalu lintas merupakan tanggung jawab kita semua. Pembiaran atau sikap permisif atas terjadinya pelanggaran lalu lintas sekecil apapun adalah tindakan

yang kontra produktif. Membangun kesadaran berlalu lintas yang peka dan peduli akan keselamatan memerlukan political will yang kuat dan gerakan moral yang masif. Semua itu dapat dilakukan melalui edukasi. Belajar berlalu lintas merupakan inspirasi bagi anak anak, dan siapa saja, untuk menstimuli imajinasinya dalam memahami tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Belajar berlalu lintas dilakukan sepanjang hayat dan dimulai sejak usia dini untuk menyelamatkan anak bangsa dari korban sia sia di jalan raya. Tertib berlalu lintas merupakan wujud suatu peradaban yang sadar peka, dan peduli serta berbelarasa bagi keselamatan bagi dirinya maupun orang lain.

Tertib berlalu lintas dibangun sejak dari rumah dan sejak usia dini. Keluar dari rumah wajib tertib dalam melakukan aktivitas terutama yang berkaitan dengan berlalu lintas. Karena sebenarnya sejak kita memasuki area publik dituntut peka peduli dan berbelarasa akan keselamatan bagi diri kita maupun orang lain. Karena diri kita dapat menjadi korban atau penyebab gangguan atau merusak bahkan mengakibatkan matinya produktifitas kita maupun orang lain. Kesadaran dan tanggung jawab serta disiplin dibangun dan dibiasakan sejak usia dini. Mendidik tertib berlalu lintas sejak usia dini menyelamatkan anak bangsa. Membangun lingkungan yang tertib berlalu lintas merupakan bagian dari rekayasa sosial dan transformasi sosial. Yang dapat mendidik dan menginspirasi warga untuk bangga tatkala berlalu lintas dengan tertib, disiplin atau mematuhi aturan berlalu lintas.

Membangun lingkungan tertib berlalu lintas dapat dimulai dengan membangun" Kampung Tertib Lalu lintas". Kampung tertib lalu lintas bukan sebatas membangun infrastruktur tetapi juga membangun literasi berlalu lintas untuk dapat merubah mind set, membangun mental dan sebagai gerakkan moral bagi kemanusiaan dan keteraturan sosial. Sebagai gerakkan moral tentu saja secara konseptual dan kontekstual secara pragmatis dapat dikaitkan dengan norma maupun berbagai hal yang berkaitan dengan lalu lintas seperti:

Safer People atau pengguna jalan yang berkeselamatan dalam belajar berlalu lintas perlu adanya:

1. Standar edukasi secara formal maupun non formal,
2. Standar uji untuk para pengemudi/ calon pengemudi yang mencakup :
    a. Uji administrasi,
    b. Uji kesehatan,
    c. Uji kesadaran
    d. Uji teori (pengetahuan : aturan/peraturan perundang-undangan, teknis kendaraan bermotor, keselamatan, dan sebagainya)
    e. Uji simulasi (konsentrasi, reaksi, kompetensi teknis),
    f. Uji praktek untuk menggabungkan kesadaran, kompetensi, pengetahuan, konsentrasi dan reaksi.
3. Penegakkan hukum secara manual maupun ekaktronik (ELE)
4. TAR / traffic attitude record,
5. De merit point system untuk perpanjangan SIM,
6. RSPA / road safety partnership action
7. SDC / safety driving centre
8. Road safety research and development
9. Literasi road safety
10. Road safety coaching dan
11. Algoritma road safety
12. Peraturan dan tata tertib berlalu lintas
13. Rambu marka dsb
14. Jalur pejalan kaki / pesepeda
15. Ruang berdialog atau bermain
16. Pengetahuan dan ketrampilan tenntang kendaraan berkeselamatan
17. Tentang jalan yang berkeselamatan

18. Tentang manusia dan perilakunya
19. Tentang masalah masalah lalu lintas spt kecelakaan, kemacetan, pelanggaran lalu lintas dsb
20. Membranded tokoh tokoh panutan sebagai role model
21. Gerakkan bersama dari sosialisasi dialog sampai dengan kampanye tertib berlalu lintas
22. Gerakkan moral dan sosial warga tertib berlalu lintas

Masih banyak lagi yang dapat dilakukan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Kekuatan pengaruh positif edukatif, pembangunan infrastruktur dan sistem sistemnya, penegakan hukum lalu lintas, TAR (traffic attitude record ) dan de merit system memerlukan political will yang kuat dan komitmen para pemangku kepentingan lainnya serta komitmen warganya dan konsistensi secara berkesinambungan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Stop pelanggaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan.

# PENDIDIKAN: "REFLEKSI INSTITUSI DAN PUSAT UNGGULAN?" [73]

Lembaga pendidikan semestinya menjadi pusat unggulan, tempat yang mencerahkan, mencerdaskan dan membahagiakan. Faktanya tidak selalu sama antara yang ideal dan aktual.

Hal itu setidaknya dikarenakan:

1. Lembaga pendidikan sebatas formalitas mendapatkan ijasah
2. Proses pembelajaran dan kurikulum membebani dan membelenggu kebebasan dan keberanian berpikir
3. Para guru seakan menjadi dewa pengetahuan yang kastanya paling tinggi yang mengutamakan kegiatan menilai, mengoreksi yang sibuk pada menyalahkan bahkan mematikan karakter
4. Nilai dan ranking menjadi keutamaan, walaupun sarat pembenaran yang jauh dari kebenaran
5. Model feodalisme, otoritarianisme yang berdampak pada kekerasan simbolik hingga fisik, berdampak pada kejahatan dalam pendidikan
6. Model hafalan dan copy paste sehingga sulit untuk berubah atau diajak melakukan perubahan akibat kemapanan dan kenyamanan
7. Peserta didik lelah, malas dan lemah dalam berpikir dan mengandalkan pemikiran orang lain, dampaknya sebatas menjadi ekor, penuh ketakutan, berorientasi pada cara cara instan.

73 https://transindonesia.co/2024/09/09/pendidikan-refleksi-institusi-dan-pusat-unggulan/ https://polisiindonesia.id/2024/09/09/cdl-pendidikan-refleksi-institusi-dan-pusat-unggulan/

8. Tidak adanya nuansa kebahagiaan yang mencerahkan dan mencerdaskan, berdampak pada sistem doktrin, mandatori yang membuat dialog yang topdown, sikap apatis dan berupaya menyenangkan para guru maupun bagian penilaian
9. Perdebatannya sebatas pada hal hal yang membuat kontra produktif
10. Penuh dengan kepura puraan yang berdampak pada trik dan intrik yang menghalalkan segala cara

Sejatinya masih banyak lagi yang dapat dikategorikan dalam berbagai kelemahan dan pelemahan lembaga pendidikan.

Tatkala hal di atas tidak dianggap sebagai masalah yang mendasar maka hasil didik tidak berkembang dan bisa jadi mereka mengembangkan hal hal jahat yang kontra produktif tatkala memiliki kekuatan dan kekuasan.

Kebanggaan akan lembaga pendidikan bagi para guru maupun alumninya akan membuat mereka ikut menjaga keutamaannya. Demikian juga sebaliknya tatkala mereka tidak memiliki kebanggaan lagi maka akan muncul plesetan plesetan sebagai parodi kekecewaan terhadap lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan wajib terus menumbuhkembangkan sikap kritis untuk merefleksi diri. Reformasi benar benar sampai tingkat kultural yang berbasis pada moral. Tatkala lembaga pendidikan berbasis pada moralitas maka akan mampu meminimalisir conflict of interest yang menjadi biang ruwetnya lembaga pendidikan. Tatkala lembaga pendidikan menjadi pasar ranking, atau di kait kaitkan dengan jabatan maka apa yang dilakukan sebatas pada kepentingan supervisial dan seremonial yang diutamakan.

Pendidikan menjadi pusat unggulan regenerasi karena tatkala lembaga pendidikan buruk akan menjadi bom waktu di masa depan. Kebanggaan akan kecurangan, keculasan dan kemunafikan berdampak menyubur KKN.

Mereformasi pendidikan menjadi hal yang pertama dan utama tatkala ingin suatu bangsa ingin berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal dan

berdaya saing. Mereformasi pendidikan setidaknya ditunjukan dan dilakukan melalui :

1. Political will yang kuat untuk menjadikan lembaga pendidikan sebgai pusat unggulan dengan menerapkan keutamaannya
2. Memperbaiki proses pembelajaran yang kekinian
3. Meminimalisir sekecil mungkin potensi potensi terjadinya penyimpangan
4. Membangun literasi
5. Menyiapkan guru guru yang berkualitas prima
6. Menerapkan sistem pembelajaran dalam dialog peradaban
7. Mereformasi sistem penugasan dan ujian
8. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan produktifitas
9. Dalam berbagai kegiatan pembelajaran ada sharing of happines
10. Para guru menjadi ikon sebagai : inspirator, motivator, mentor, stimulator, problem solver
11. Ada grand strategy, road map, program unggulan, yang mampu menjadi brand kualitas pendidikan
12. Menerapkan merit system dan akuntabilitas secara : moral, hukum, administrasi, fungsional maupun sosi
13. Senantiasa berjuang menempatkan marwah dan keutamaan lembaga pendidikan sebagaimana yang semestinya
14. Menerapkan kurikulum dan proses pembelajaran kekinian
15. Manajemen media untuk mendukung literasi, branding, debat publik, expo dalam berbagai program dialog
16. Bakti masyarakat dalam berbagai aktivitas tidak sebatas karitas namun juga social engineering yang menunjukan keberadaanya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan
17. Modernisañsi proses belajar mengajar
18. Membangun, membina dan mengembangkan komunitas yang sesuai dengan keutamaan lembaga pendidikan.

**Lembaga Pendidikan = Litle Institution ?**

Kata litle di sini dimaknai sebagai model atau refleksi suatu institusi. Tatkala berbicara atau membahas lemdik (lembaga pendidikan) ini sejatinya membicarakan dan membahas suatu institusi. Pada lembaga pendidikan di dalamnya banyak hal yang menjadi refleksi institusi, kita dapat melihat dari:

1. Struktur organisasinya
2. Infrastruktur pendukungnya
3. Budayanya
4. Perilaku organisasinya
5. Sistem pembelajarannya
6. Pola pola pengajarannya
7. Guru gurunya
8. Staf pendukung
9. Lingkungannya
10. Pemimpin dan kepemimpinannya
11. Kebijakan kebijakannya
12. Perilaku para siswanya
13. Core value sebagai keutamaannya
14. Program program unggulannya
15. Kompetensi kekhususan atau kekhasannya
16. Standar keberhasilan pelaksanaan tugas
17. Sistem penilaian kinerja
18. Sistem reward and punishment nya
19. Kompetensi para alumninya
20. Citra atau image nya

Masih banyak unsur lain yang bisa dijadikan variabel memotret institusi dari lembaga pendidikannya. Setidaknya 20 point di atas bisa dijabarkan dalam membangun institusi yang profesional cerdas bermoral dan modern.

# "RUKUN" MEMBANGUN DAN MENATA SOLIDARITAS SOSIAL DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN [74]

Persahabatan bagi kemanusiaan merupakan bentuk solidaritas sosial. Dalam kehidupan manusia sebagai mahkluk sosial sering kali dicabik cabik adanya konflik sosial, pertikaian bersenjata hingga peperangan dengan berbagai dalih atau atas nama apa saja semua merusak sendi sendi kemanusiaan.

Martabat manusia menjadi terkoyak bahkan dicampakkan dan terus dikorbankan atau yang menjadi korban kepentingan segelintir orang atau sekelompok orang. Anak anak kaum perempuan kaum lanjut usia paling rentan menjadi korban. Mereka harus terpisah dari keluarganya, cacat, menderita kemiskinan, berpenyakit hingga kematian akan dihadapi dan menjadi pemandangan di mana mana. Kerukunan persahabatan solidaritas sosial menjadi kekuatan bagi manusia dan kemanusiaan. Manusia untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktifitas.

Konflik sosial dan berbagai hal yang tidak rukun berdampak pada sesuatu yang kontraproduktif.

Pepatah jawa mengatakan : " rukun agawe santosa crah agawe bubrah". rukun akan menjadikan sejahtera dan konflik berdampak pada kehancuran.

Konteks rukun ini juga dapat dikaitkan dalam kesatuan dan persatuan yang merupakan soft power bagi pembangunan masyarakat bangsa dan negara.

74 https://transindonesia.co/2024/09/09/rukun-membangun-dan-menata-solidaritas-sosial-dalam-bingkai-kebhinekaan/

**Rukun : Soliditas Merawat Kebhibekaan**

Rukun merupakan konsep penting di dalam merawat dan menumbuhkembangkan kebhinekaan di indonesia. RT sebagai wadah kerukunan antar tetangga. Yang dimulai dari keluarga. Komunitas antar keluarga yang menjadi tetangga hidup bersama dalam suatu lingkup yang kecil. RW ( rukun warga ) wadah yang lebih luas bagi komunitas RT.

Ketidakrukunan membuat kehancuran atau bubrah, dan tatkala terjadi rukun akan sejahtera atau santosa. Konsep rukun dicederai adanya konflik perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Konflik komunal maupun konflik sosial memerlukan solidaritas dan legitimasi atas tindakannya. Untk mendapatkan legitimasi dan solidaritas yang cepat dan mudah adalah memanfaatkan isu isu yang berkaitan dengan primordial. Rukun akan terabaikan sebagai passion hidup bersama.

Sekarang ini banyak orang menyebutkan RT / RW sebatas petunjuk alamat tempat tinggal atau tempat tertentu, namun tanpa sengaja melupakan atau konteks rukun tidak lagi menjadi keutamaan sebagai basis hidup bermasyarakat. Rukun sering kali dianggap kuno, angin lalu dan tidak lagi populer.

Rukun merupakan passion kebhinekaan yang menjadi suatu upaya merekatkan perbedaan, mengerem potensi konflik . Rukun juga merupakan filosofi merupakan kesadaran tanggung jawab dan disiplin atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Rukun mejadi implementasi penerimaan pengakuan dan penghargaan antar sesama dalam keberagaman.

Kerukunan bisa saja karena kebagian. Diam tenang tatkala ada kepastian dalam pembagian sumber daya. Mendukung karena memperoleh bagian. Itu merupakan konteks preman yang bukan patriot. Ala pak ogah ” cepek dulu “. Atau gaya si lumba lumba : ” makan dulu”. Proses mendapatkan bagian ini semestinya dilihat dari produktifitas atau prestasi kerja. Tatkala ala premanisme memang sering di gebyah uyah/ pukul rata ala atau model karitas atau sedekah. Model preman menjadi parah lagi dengan pemaksaan/ pemerasan sebagai wujud ” buluh bekti glondong pangareng areng”/ memberi japrem ( jatah preman). Asu gede menang kerahe/ siapa yang kuat dia yang terbanyak bagiannya. Keadilan

dilecehkan diganti dengan ketidakadilan. Pelecehan tas keadilan seringkali dijadikan issu untuk merusak kerukunan.

"Asu gedhe menang kerahe". Akal dikalahkan okol/ otak dikalahkan dengkul. Siapa saja yang teriak paling keras dan diikuti kelompoknya dianggap sebagai kebenaran dan dianggap punya hak sebagai pemenang dalam perebutan sumber daya. Keroyokan akan menjadi pilihan untuk mengoyak kerukunan. Siapa saja yang mengingatkan atau mencegah niatnya akan berpikir dua kali setidaknya. Apakah berbuat atau memilih diam.

Kekerasan berdampak kejahatan? Pelaku kekerasan adalah penjahat ? orang baik lbh banyak dari orang jahat. Hanya saja para penjahat ini dominan dan mendominasi, kekuatan, berani "nggasruh" dari mengatasnamakan sampai menggeser kebenaran dengan pembenaran. Mayoritas orang baik seringkali memilih diam ini bukanlah kalah, bisa saja karena banyak pertimbangan atau enggan berurusan dengan kaum dengkul. Logika tidak akan dipakai sikap dan sifat nggasruh ini yang membuat silent majority. Namun tatkala ada solidaritas maka kaum orang baik yang dikatakan diam, bisa bangkit melawan melalui cara yang bisa dikategorikan sebagai civil disobidience atau pembangkangan sipil.

Rukun passion untuk merawat kebhinekaan yang semestinya menjadi acuan para aparatur penyelenggara negara yang diberi amanah rakyatnya. Sehingga para para aparat memberikan pelayanan perlindungan dan pengayoman bukan sebaliknya menjadi pemalak atau malah rebutan palakan dan saling gepuk gepukan sendiri diantara mereka. Perebutan sumber daya dan perebutan pendistribusian sumberdaya ala preman memang tidak fair, paling banyak dilakukan tak peduli merobek robek peradaban. Ini isu yang menstimuli konflik. Bagi yang berkonflik masa bodoh dengan hukum atau aturan, yang penting menang hati senang peduli setan semua rusak berantakan. Seakan king kong yang menepuk nepuk dadanya sambil teriak teriak mengamuk di sana sini.

Kita bisa belajar dari kisah Mahabarata dan perang Bharata Yuda, perang saudara yang saling hajar sesama anak bangsa karena ketamakan dan tidak rukun. Kisah Mahabarata sarat dengan keutamaan walaupun juga dikisahkan atas ketamakan dan keangkaramurkaan. Ketamakan

Dewi Setyawati yang terus menginginkan garis keturunannya menguasai Hastina pura. Hingga tidak mempedulikan Dewabrata atau Bisma yang lebih memiliki hak atas Hastinapura. Namun Bisma dengan penuh

Kesadaran mampu menunjukkan kualitas terbaik dan tertinggi atas jiwa dan raganya sebagai manusia untuk berkorban merelakan haknya sebagai penguasa Hastinapura. Bisma mampu mengendalikan pikiran dan jiwanya sebagai orang yang memiliki keutamaan hidup.

Kisah Duryudana yang selalu ingin menang sendiri dengan berbagai dalih merasa paling benar dan terus mengumbar angkaramurkanya. Dampak keserakahannya menjadikan dirinya terus merasa ketakutan dan kekurangan segala cara ia lakukan demi memenuhi hasrat duniawinya yang tak terkendali. Berbeda dengan Yudistira dan adik adiknya ( Pandawa) yang selalu berupaya untuk menahan ketamakan, amarah dan angkara murka. Pamdawa berupaya menjadikan hidupnya sebagai implementasi atas suatu tanggungjawab bagi hidup dan kehidupan sosial.

Cinta buta dan kelekatan dunia menjerumuskan jiwa kedalam duka baka. Guru Durna yang begitu mencintai anak semata wayangnya ingin memberinya kemewahan, kehormatan, kekuasaan hingga lupa memberikan ajaran kebenaran. Aswatama mampu dalam banyak hal namun ia selalu saja melakukan ketidakbenaran dan menyalahgunakan kemampuan dan kesempatan yang ada. Hingga ia dikutuk Basudewa Krisna merana hidupnya dalam waktu yang sangat lama. Keinginan manusia untuk selalu dipahami sebenarnya merupakan akhir kehancuran dan awal penderitaan.

Kekuasaan dan kekuatan menjadi impian setiap insan, yang merupakan prasyarat untuk memenangkan pendominasian pemberdayaan maupun pendistribusian sumber daya. Apa yang juga dialami Karna sang Surya putra karena harus hidup sebagai anak kusir ia berjuang dan belajar demi menaikkan derajatnya dan agar tidak terhina. Hati manusia kadang sebesar butiran gandum, lemah dan mudah patah menghadapi kenyataan yang tak sesuai dengan harapan. Kadang hati yang lemah tadi berubah menjadi dendam yang tak berkesudahan.

Manusia selalu penuh dengan kekhawatiran akan masa depan melupakan masa kini. Kisah Sangkuni yang begitu mencintai adiknya

Gandari yang menikah dengan Destrarata yang bua, ia ingin memberikan kebahagiaan dunia di masa depan yang sering kali di impi impikannya. Cara apa saja ia lakukan kepandaiannya dijadikan alat sebagai pemuas dendamnya. Kepuasan dendam sebenarnya hanyalah ilusi yang membutakan sehingga tiada rasa puas terus saja kekurangan dan hidupnya penuh ketakutan dan kekhawatiran

Ketamakan dari para tokoh dalam kisah Mahabarata merupakan gambaran sifat manusia yang ingin selalu menang sendiri dalam mendominasi dan dominannya dalam perebutan sumberdaya. Demikian halnya kisah kisah dari para tokoh yang berbudi luhur telah memberikan inspirasi atas keutamaan. Dalam hidup dan kehidupan sosial keutamaan merupakan suatu nyali berkorban sebagai manusia untuk menjalankan hidup dengan rasa syukur dan mengendalikan jiwa sehingga mampu untuk : memahami orang lain, .memberikan bantuan, keberadaanya membawa manfaat, membuat suasana aman nyaman damai dan tenteram, agar semakin manusiawinya manusia.

Kelekatan dan keterikatan akan duniawi membuat hidup jauh dari rasa bahagia. Dua membuat manusia jumawa. Merasa paling segalanya. Harga diri seringkali di tonjol tonjolkan dan diutamakan dan digunakan untuk memaksa sampai meminta belaskasihan.Tatkala tanpa keutamaan hidup maka pikiran perkataan perbuatan dan jiwanya akan dikuasai dan mudah dikalahkan. Nyalinya terbelenggu dengan hal hal yang duniawi. Keyakinan maupun nilai nilai yang dipujanya pun hal hal dunia saja. Sama sekali akan jauh dari yang Ilahi. Itulah yang membuatnya hidup selalu lepas kendali. Tuhan Maha Kuasa, ia hanya meminta kita percaya kepadaNya. Tatkala manusia ingat akan yang ilahi jiwanya memilki nyali mengobarkan keutamaan walaupun hati panas pikiran tetap dingin. Mampu mengalah dan mengendalikan amarah dan angkaramurkanya dalam sikap berdoa atau laku tapa. Mampu memilih jalan tengah yang bijaksana daripada berdebat atau melakukan hal hal yang memperuncing masalah. Terus melatih hati tetap tenang dan waras dalam menghadapi tantangan hidup dan kehidupan.

Akar masalah dari perang Baratayudha secara garis besar dapat dikategorikan sbb :

1. Keserakahan yang terus turun temurun. Dari dewi Setyawati, Destrarata, Gandari, Sangkuni hingga Duryudana dan para Kurawa.
2. Sikap iri hati terhadap prestasi Pandawa dan ingin merampas hak Pandawa sehingga ingin mencelakakan sampai ingin membunuhnya.
3. Kejumawaan Duryudana yang menimbulkan rasa dendam mendalam sejak usia kanak kanak.
4. Cinta buta dari Raja Destrarata dan Dewi Gandari serta Sangkuni yang memanjakan dan menghasut para Kurawa
5. Bisma yang Agung yang bersumpah membela dan menjaga tahta Hastinapura namun terbelenggu ketamakan Duryudana.
6. Guru Durna yang mengejar materi dan keduniawian bagi membahagiakan Aswatama anaknya sehingga terjebak pada hasutan Sangkuni dan Duryudana
7. Dendam Karna kepada para Pandawa terutama kepada Arjuna. Yang dimanfaatkan Duryudana sehingga terjebak pada sumpah dan janji persahabatan nya.
8. Pembakaran Pandawa dan ibu Kunti di istana Warnabrata hanya demi tahta Hastinapura
9. Kekalahan Pandawa dalam permainan dadu dengan kelicikan Sangkuni yang berdampak pelecehan terhadap Drupadi maupun para Pandawa yang berdampak pada pengasingan Pandawa selama 12 tahun dan penyamaran selama 1 tahun.
10. Sumpah Drupadi yang mengutuk dan dendam terhadap Kurawa menjadi amarah yang menyulut perang Bharata Yudha
11. Sumpah Bima untuk membalas dendam dan menumpas seluruh Kurawa
12. Penghinaan terhadap Basudewa Krisna yang menjadi duta perdamaian yang ditolak Kurawa

13. Karma atas kutukan dari para tokoh tokoh Kurawa dari Bisma yang Agung, Guru Dorna, Raja Angga Karna, Raja Salya, Jayadrata, Duryudana, Dursasana, para Kurawa

Masih banyak kisah yang menjadi pembelajaran untuk rukun dalam menjaga, merawat dan menumbuhkembangkan kebhinekaan. Tatkala peradaban diabaikan dan ala preman diunggulkan dan dibangga banggakan maka tinggal menunggu waktu bubrah. Karena tidak mampu lagi melakukan dialog, akal berganti okol, tindakan nggasruh dengan pokok e yang mendorong kerah atau crah atau saling gepuk gepukan sendiri.

**Komunikasi Sosial bagi Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban**

Manusia sebagai mahkluk sosial, di dalam hidup dan kehidupannya ma memerlukan adanya sesuatu sebagai penyelaras atau harmoni melalui komunikasi. Penyelaras atau harmoni melalui komunikasi merupakan suatu jalan tengah atau jembatan untuk berkomunikasi atau mencari solusi untuk mereduksi maupun menyelesaikan suatu konflik sosial. Atau setidaknya sebagai pelepasan kepenatan atau mencegah terjadinya penyimpangan atas kesepakatan yang telah dibuat. Penyimpangan sosial yang terjadi tentu saja kontraproduktif, sehingga perlu adanya pencegahan atau menyelesaikan keteraturan sosial dalam rel kemanusiaan atau peradaban.

Pemahaman maupun kesadaran akan komunikasi sosial menjadi dasar terbangunnya kesepakatan sosial.

Komunikasi sosial menjadi jembatan mencerdaskan kehidupan sosial, dapat dilakukan melalui berbagai media. Mentransformasi melalui komunikasi sosial adalah seni. Seni bukan sesuatu hafalan, melainkan kemampuan untuk menyalurkan imajinasi dlm pemikiran hati atau jiwa dalam karya suara, nada, cerita, kata, gerak, rupa yan bervariasi. Seni merupakan refleksi peradaban. Semakin tinggi peradaban manusia nilai akan hidup dan kehidupan manusia ditransformasikan dengan berbagai cara yang bercita rasa seni.

Hidup tidak sebatas menjalani kehidupan dan menunggu kematian, melainkan ada sesuatu yang diperjuangkan, ditransformasikan bahkan diwariskan atau untuk ditradisikan sehingga lestari dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sosial proses transformasi melalui komunikasi sosial dapat dilakukan dari perorangan maupun kolektif yang menjadi budaya. Kebudayaan dengan seni saling kait mengkait berkaitan satu sama lain dalam mengeksploitasi sumber daya maupun pendistribusiannya yang dilakukan secara selektif prioritas. Melalui komunikasi sosial seni dapat menjadi ikon peradaban.

Implementasi atas pemenuhan kebutuhan hidup untuk bertahan bahkan tumbuh dan berkembang melalui komunikasi, seni dan budaya yang dibangun suatu rekayasa sosial. Di dalam rekayasa sosial inilah seni dalam komunikasi sosial menjadi suatu kebudayaan untuk ditumbuh kembangkan. Komunikasi sosial merupakan jembatan peradaban untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial, sehingga aman, juga ada rasa aman, nyaman, asri bahkan ngangeni. Mewujudkan komunikasi sosial yang mencerdaskan dan mampu menjadi jembatan peradaban memerlukan adanya leadership yang kuat, yang mampu belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap di masa kini dan mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik.

Mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial melalui komunikasi sosial membangkitkan solidaritas sosial secara kolektif bersama sama membangun atas dasar kesadaran tanggung jawab dan disiplin untuk ditaati ditransformasikan dan ditradisikan. Seni dalam komunikasi sosial berbasis rasa dalam jiwa sarat imajinasi yang diimplementasikan dalam berbagai bagi hidup dan kehidupan. Dari pemenuhan kebutuhan jasmani kebutuhan rohani kebutuhan biologis dan kebutuhan adab semua diolah dan diekspresikan dengan cita rasa kemanusiaan yang menjadi tradisi bahkan kebudayaan.

Seni dalam komunikasi sosial menjadi refleksi peradaban menjadi harmonisasi kehidupan sosial. Dan ada jembatan indra dengan hati bagi semakin manusiawinya manusia. Hidup menjadi semakin hidup dalam keselarasan keteraturan sosial. Penyelesaian atas penyimpangan sosial maupun konflik sosial yang kontra produktif dapat diselesaikan secara beradab.

# IN VANUM LINGUA LABORAT SI COR NON ORAT [75]

Sia sia raga belajar jiga hati tidak berdoa demikianlah kira kira makna dari In vanum lingua laborat si cor non orat. Di dalam pendidikan moralitas menjadi sangat penting dan mendasar dengan berbasis Literasi. Apa guna pendidikan jika tidak tercerahkan. Pendidikan menjadi harapan masa depan bangsa.

Tatkala pendidikan hanya sibuk dengan angka angka atau rangking dan kaitan dengan karier maka pendidikan akan sia sia.

Kita ingat bahwa " non scholae set vitae discismus" belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup. Pendidikan untuk membuat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Urip iku urup, hidup itu menyala. Kata kata menyala sekarang ini menjadi terkenal dalam komunikasi. Makna menyala ini akan membawa terang, mencerahkan dsn memberi hidup dan kehidupan.

Kejujuran, kebenaran dan keadilan ini semestinya juga menjadi landasan pendidikan. Maka dalam pendidikan tidak sebatas olah pikir namun diimbangi dengan olah jiwa, olah rasa, dan olah raga.

Lembaga pendidikan tidak boleh putus atau menjadi eksklusif melainkan terbuka. Agar pemikiran akan kebaruan terus muncul dan hidup di dalam lembaga pendidikan. Di era digital yang serba saling terhubung maka konteks smart atau yang fungsional dapat dibangun.

Setidaknya dalam konteks smart campus mencakup :

1. Lingkungan yang asri dan ngangeni, beraih dan bercita rasa seni
2. Nuansa akademik ada di semua sudut lingkungan sekolah
3. Ada Literation centre sebagai pusat literasi untuk menampung produk produk virtual maupun aktual dan juga untuk komunikasi

75 https://transindonesia.co/2024/09/14/in-vanum-lingua-laborat-si-cor-non-orat/

koordinasi komando pengendalian dan informasi.

4. Guru guru atau pengajar atau sebagai nara sumber adalah orang orang yang berkualitas sebagai sang pencerah yang mampu menjadi role model atau ikon kecerdasan bagi anak didiknya.
5. Didukung smart class dan sistem sistem untuk pembelajaran dalam dialog peradaban.
6. Nilai nilai keutamaan menjadi dasar bagi kemanusiaan, keturan sosial dan peradaban.
7. Proses pembelajarannya profesional, cerdas, bermoral dan modern.
8. Kurikulum yang dinamis berbasis pada:
    a. Keilmuan/ ilmu pengetahuan
    b. Penelitian atau pengkajian
    c. Studi kasus secara proactive dan problem solving
    d. Kebaruan atau novelti
    e. Social engineering
    f. Bhakti masyarakat/ bhakti sosial
    g. Olah rasa/ bidang seni budaya
    h. Olah raga
    i. Olah rasa/ mental spiritual dan penanaman budaya
9. Memiliki Jurnal dan Penerbitan
10. Ikatan alumni

Masih banyak hal yang bis dikembangkan dalam membangun smart campus.

# MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN [76]

Keamanan dan keselamatan dibangun dari ketertiban sehingga dapat mendukung kelancaran dalam berlalu lintas.

Keamanan dan keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dibangun setidaknya ada dalam:

1. Kondisi lalu lintas yang terkendali dari segi, keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertibannya
2. Sistem Manajemen lalulintas untuk Kebutuhan, Kapasitas, Prioritas, Kecepatan, Emerjensi
3. Sistem Pelayanan Publik secara Virtual yang berbasis IT for Road Safety yang mampu menjadi pusat K3i dan Reaksi Cepat
4. Sistem Pelayanan Aktual Petugas di Lapangan untuk : Penjagaan, Pengaturan, Pengawalan, Patroli, TPTKP dsb
5. Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan dalam mewujudkan Smart City
6. Sinergitas Sistem Pelayanan saat Emergency : PSC (public service centre), sinergitas dengan Ambulan dan Rumah Sakit,
7. Sistem Pengendalian Arus Lalu Lintas dengan Rekayasa Lalu Lintas Terbatas : Green Wafe,Pengalihan Arus, Contra Flow, Kanalisasi, Ganjil Genap, ERP ( electronic road pricing ), One Way/ Satu Arah, dsb.
8. Sistem Monitoring dan tindakan Cepat saat terjadi situasi Emerjensi atau Kontijensi
9. Pengkajian Kawasan Perkotaan sehingga dapat ditemukan Pola Pola tindakan per waktu

76 https://transindonesia.co/2024/09/14/manajemen-keamanan-dan-keselamatan/

10. Active Transportation : Transportasi Sehat Merakyat : Jalan Kaki, Bersepeda, Angkutan Umum
11. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis Elektronik (ETLE) yang didukung dengan TAR ( traffic attitude record) dan DMPS (de merit point system).

Kurikulum pembelajaran manajemen keamanan dan keselamatan yang merupakan Security Centre (SSC) dalam Mendukung program program road safety mencakup:

1. Pemetaan, Pengkajian, Pendataan wilayah, masalah, potensi
2. Pemetaan dan Kajian black spot dan Trauble spot :
    a. Kajian Perkotaan
    b. Kajian Lintasan
    c. Kajian Antar Moda Transportasi Angkutan Umum
    d. Kajian Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
    e. Kajian Jalan Toll
    f. Kajian Perbatasan
    g. Kajian Kawasan Pariwisata
    h. Kajian Kawasan Perbatasan
    i. Kajian Kawasan Industri dsb
3. Sistem Data dan Informasi Kecelakaan Lalu Lintas (IRSMS) integrated Road Safett Management System
4. Sistem Data Pelanggaran Lalu Lintas yang berbasis ETLE, TAR dan DMPS
5. Sistem TAEW (traffic accident early warning)
6. Sistem Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
7. Sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
8. Manjement Road Safety :
    a. Manajemen Kebutuhan

b. Manajemen Kapasitas

c. Manajemen Prioritas

d. Manajemen Kecepatan

e. Manajemen Emerjensi/ Kontijensi

9. Rekayasa Lalu Lintas sebagai diskresi kepolisian :

a. Pengalihan Arus

b. Buka Tutup

c. Contra Flow

d. One Way dan sebagainya.

10. Sistem Reaksi Cepat (Quick Response Time).

# SMART POLICING: MODEL GRAND STRATEGY POLRI MENUJU INDONESIA EMAS [77]

1. Pendahuluan

   Di era digital, semua serba online berbasis elektronik. Informasi komunikasi koordinasi bahkan komando pengendalian (K3i) dilakukan secara online. Namun, model pemolisian konvensional tetap masih dibutuhkan. Pelayanan kepolisian dalam pemolisian di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan perlu membangun model pemolisian yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Kepolisian perlu beradaptasi dengan transformasi ini dengan merintis ide- ide kreatif, beradaptasi, dan mengembangkan wawasan dan inovasi yang membentuk masa depan penegakan hukum dimulai dengan teknologi-teknologi yang mendukung konsep operasi baru, memungkinkan intervensi dan hubungan yang menjaga keamanan masyarakat (Deloitte, 2021).

2. Visi besar abadi bangsa Indonesia adalah menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur.

   Visi besar abadi bangsa Indonesia adalah menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan visi besar ini, pemerintah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya menyusun perencanaan Indonesia Emas 2045 yang memiliki empat pilar utama yaitu:

   a. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

   b. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

77 https://transindonesia.co/2024/09/14/smart-policing-model-grand-strategy-polri-menuju-indonesia-emas/

c. Pemerataan pembangunan

d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

3. Dalam mewujudkan visi Indonesia maju, Polri diharapkan mampu menjadi tempat bersandar bagi masyarakat dalam menghadapi kesulitan, mendapatkan kepastian hukum, maupun dalam mendapatkan pelayanan kepolisian. Sehingga perumusan Grand Strategy harus mampu

   Polri juga harus mampu untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya.

4. Permasalahan yang terjadi pada saat ini, bersifat kompleks dan harus dilihat dari berbagai pendekatan. Pendekatan yang mendasar di bawah ini dapat dijadikan acuan bagi petugas polisi di berbagai level untuk membangun dan menjaga citra positif maupun kepercayaan kepada publik antara lain:

   menyempurnakan, meningkatkan kualitas kinerja sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan

5. Polri dapat berperan secara maksimal dalam mendukung negara

   ini untuk mencapai visi besar tersebut dengan :

   a. Pemahaman dan kesadaran sebagai petugas polisi. Kesalahan dalam pemahaman bisa fatal akibatnya. Rasionalisasi tugas-tugas kepolisian memang perlu dikonsepkan secara akademik, managerial, maupun operasional sehingga dapat dijadikan framework bagi kerja polisi. Framework inilah yang akan menjadi acuan berperilaku, baik secara adminstrasi, managerial, dan/atau moral.

   b. Bagaimana agar apa yang ideal sama dengan yang aktual sehingga apa yang dibuat bisa dihayati dan dijadikan acuan kerja. Pada akhirnya, bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan, namun juga diajarkan dan dilatihkan agar

menjadi habit dan menjadi kesadaran serta tanggung jawab seluruh anggota kepolisian.

c. Membangun sistem kompetensi dan melakukan perubahan yang mendasar baik di bidang pembinaan maupun operasional.

d. Revitalisasi atas pelayanan prima yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan guna penguatan institusi. Implementasinya berbentuk penjabaran visi dan misi, program, peningkatan kualitas kinerja, birokrasi yang dipraktikkan melalui berbagai kreatifitas yang inovasi-inovatif.

e. Siap bekerja berdasarkan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu dengan terlebih dilakukan assesment. Penataan ini bertolak dari sistem kinerja berbasis teknologi informasi sehingga bisa cepat, tepat, akurat dan akuntabel dan informatif.

f. Membangun soliditas sebagai bagian dari budaya yang memanfaatkan kearifan lokal.

g. Membangun wadah kemitraan dengan stakeholder terkati untuk bersama- sama mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dan diterima semua pihak.

h. Membuat program-program kemitraan antara polisi dengan masyarakat maupun dengan stakeholder lainnya.

**Pengembangan Ilmu Kepolisian**

Tantangan yang dihadapi polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memang harus dijabarkan dan dilakukan secara bertahap sehingga harapan masyarakat terwujud, adanya polisi dengan pemolisiannya yang sesuai dengan prinsip presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan), profesional, cerdas, bermoral, dan modern berbasis pada Ilmu Kepolisian yang pendekatannya antar bidang atau interdisciplinary approach (Suparlan, 2008)

6. Ilmu kepolisian basis model smart policing untuk membahas:
    a. Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial.
    b. Hukum dan keadilan
    c. Kejahatan dan penanganannya
    d. Pemolisian
    e. Isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
    f. Pengetahuan dan kemampuan dasar,umum,dan khusus dalam menjalankan fungsi kepolisian
7. Mengembangkan Ilmu Kepolisian sebagai suatu disiplin ilmu yang integratif dan interdisiplin di dalam dan di luar kepolisian merupakan cara yang tepat untuk memecahkan masalah demi kepentingan polisi dan masyarakat (Jaschke dan Neidhardt, 2007; Suparlan, 2008). Di dalam pengembangan ilmu kepolisian paradigmanya dapat dilihat secara :
    a. Filosofis:

        Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.

    b. Geo politik dan geostrategis

        Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial

    c. Yuridis

        Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

    d. Globalisasi dan modernisasi

        Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

e. Akademis

Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan (S1, S2 dan S3), pengembangan kepemimpinan dan manajerial, kompetensi khusus dan fungsional (cyber, forensic, extraordinary crime, counter-terrorism)

f. Pragmatis

Ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi :keselamatan (safety, contoh: safety driving centre), keamanan (private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security),

8. Pengembangan ilmu kepolisian, dalam smart policing dapat dikembangkan melalui konsep dan teori dalam konteks:
   a. Polisi dan pemolisian
   b. Manajemen Keamanan
   c. Manajemen Keselamatan
   d. Intelejen
   e. Hukum dan penegakan hukum
   f. Penyelidikan dan penyidikan
   g. Forensik
   h. Siber dan teknologi kepolisian
   i. Kajian konflik sosial
   j. Kajian Terorisme
   k. Kajian kejahatan luar biasa
   l. Teknologi Kepolisian
9. Ilmu kepolisian sebagai ilmu interdisiplin membantu meningkatkan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan legitimasinya. Perkembangan ilmu kepolisian sebagai suatu disiplin ilmu yang mapan memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan strategi kepolisian yang efektif,

sah, dan berdasarkan bukti empiris (Nägel dan Vera, 2020). Hal ini, pada akhirnya, akan meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kepolisian.

10. Model Smart Policing sebagai Penerapan Ilmu Kepolisian dalam Grand Strategy Polri

    Implementasi ilmu kepolisian untuk mendukung dan menuju Indonesia Emas, dilakukan melalui kerangka smart policing, dalam membangun manajemen kepolisian yang menekankan penggunaan data dan analitik secara efektif serta meningkatkan analisis, pengukuran kinerja, dan evaluasi; meningkatkan efisiensi; dan mendorong inovasi (Coldren Jr., Huntoon, dan Medaris, 2013). Konsep Smart Policing sendiri muncul secara formal dan resmi, pada tahun 2009, dengan diluncurkannya program penegakan hukum oleh Bureau for Justice Assistance, US Department of Justice. Model ini bertujuan untuk mendukung lembaga penegak hukum dalam membangun taktik dan strategi penegakan hukum berbasis bukti dan berbasis data yang efektif, efisien, dan ekonomis (Smart Policing Initiatives, 2021). Inisiatif ini merepresentasikan pendekatan strategis yang membantu lembaga kepolisian mengetahui apa yang berhasil dalam inisiatif pencegahan kejahatan dan pengurangan kejahatan. Coldren, Huntoon, dan Medaris (2013) dalam penelitiannya menjabarkan smart policing ini

11. Kemajuan ilmu kepolisian, yang ditunjukkan oleh ciri-ciri berikut:
    a. Digerakkan secara lokal dan mengedepankan pendekatan berbasis wilayah.
    b. Berfokus pada ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mempelajari efektivitas kepolisian.
    c. Bersifat multi dimensi.
    d. Berorientasi padahasil dan efektivitas strategi yang diterapkan.
    e. Berupaya terus menerus untuk berinovasi.

12. Tatkala di era kenormalan baru, kebutuhan untuk menanggapi kriminalitas yang lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak

keterampilan khusus, dengan meningkatnya permintaan kejahatan dunia maya, yang dihadapkan pada tantangan seputar efisiensi, efektivitas, dan pendanaan (National Police Chiefs Council & Association of Police and Crime Commissioners, 2020). Sifat kejahatan yang tidak mengenal batas negara, serta berbagai hal yang berdampak chaos atau kontra produktif, menuntut polisi untuk bertugas dan meningkatkan pelayanannya secara profesional, cerdas, bermoral, modern, dan fungsional.

Menyikapi tantangan yang muncul, model smart policing hadir sebagai pemolisian model orkestra yang mengharmonikan antara pemolisian konvensional, pemolisian elektronik maupun pemolisian forensik. Smart policing mengatasi berbagai masalah yang kontra produktif dan mengganggu keteraturan sosial maupun peradaban dari masalah kejahatan maupun sosial yang konvensional, masalah siber atau virtual di era digital yang memanfaatkan teknologi mutakhir, serta masalah forensik yang berdampak luas.

Sehubungan untuk menjawab tantangan di era baru ini, sistem pemolisian secara manajemen dan operasional dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan perkembangan teknologi, perubahan kondisi, serta berbagai macam risiko yang timbul dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

13. Smart policing dapat dijabarkan antara lain :

    a. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian(policing)

    b. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial

    c. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian

    d. Dapat diimplementasikan ditingkat lokal, nasional bahkan global

    e. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design

f. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia nyata maupun dunia virtual

g. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service

h. Prediktif, proaktif dan problem solving

i. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergency maupun kontijensi

j. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

Smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat, yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

14. Smart policing dalam implementasi conventional policing, e-policing, dan forensic policing secara konseptual ditunjukkan sebagai berikut:

    a. Conventional policing

       Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas sebagai pelindung pengayom yang dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP (tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran secara konvensional diperlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya. Penanganan berbagai masalah dengan reaksi cepat, penangan konflik sosial yang melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik sosial, premanisme jalanan (blue collar crime), perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta

patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb. Penanganan pelayanan kepolisian yang berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan dan kompetensi conventional policing.

b. Electronic Policing (E-policing)

E-policing merupakan program yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan merupakan bagian dari terobosan kreatif untuk menghasilkan inovasi dan kreasi dalam berbagai sistem pelayanan kepolisian baik pelayanan administrasi, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, dan pelayanan hukum, yang saling terhubung atau online yang mampu memberikan pelayanan secara virtual dan mampu mendukung pemolisian yang konvensional (Dwilaksana, 2020). Landasan dasar E-policing adalah melalui back office (sebagai operation room atau pusat K3I: komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi). Penerapan e-policing didukung oleh aplikasi berbasis Artificial intellegence (AI) juga jaringan sistem yang terintegrasi berbasis internet of things (IoT). Aplikasi yang berbasis AI mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda, kendaraan, lingkungan hingga aktifititas. Melalui AI dapat dikonstruksi menjadi model untuk ditemukan algoritma yang berupa infografis, statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma dapat berfungsi sebagai prediksi, antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, any time dan on time. Algoritma dapat menjadi landasan atau acuan indeks atau setidaknya sebagai potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial. Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber (cyber cops) yang mengawaki e-policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untk menghasilkan algoritma.

Memahami prinsip dasar di era digital dan sistem IT dan proses pembangunan big data, dan sistem terintegrasi menuju one gate service system. Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian

early warning dan problem solving yang prediktif, antisipatif, serta solutif. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management agar pemolisian secara aktual maupun virtual ada suatu sistem yang sejalan saling menguatkan atau saling mendukung. Permasalahan perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakkan, bahkan cyber crime akan terus berkembang sehingga memerlukan polisi siber yang profesional, mampu menganalisa dan menemukan potensi kejahatan. Kejahatan white collar crime tentu dilakukan secara teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya kaum yang memiliki kompetensi. Dengan demikian cybersecurity menjadi sangat penting dan memdasar.

c. Forensic Policing

Di era disrupsi perkembangan masalah nuklir, biolgi, maupun kimia, bahkan fisika (nubika). Di sisi lain, hal-hal di bidang sosial dapat menjadi suatu masalah bagi terjaminnya keteraturan sosial. Era post truth dengan senjata hoax juga dapat digunakan untuk menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas. Oleh sebab itu, forensic policing memerlukan kompetensi dan pengetahuan dasar tentang nubika atau pun permasalahan sosial. Dampak atas penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika oleh penjahat yang dapat meneror atau mematikan produktivitas secara masaal dan berdampak luas. Kompetensi para petugas forensic policing secara mendasar yang berkaitan dengan konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun masalah masalah sosial yang akan dijadikan senjatanya. Kemampuan forensik didukung dengan sistem peralatan yang dapat didukung petugas polisi siber maupun pemolisian yang konvensional. Pelayanan di bidang forensik berkaitan pada sistem security yang dapat dikembangkan pada pengamanan pada sektor privat, industrial, publik, ecological, maupun cyber.

Smart policing menjadi model pemolisian yang senantiasa siap memberikan pelayanan kepada publik dalam berbagai situasi, juga dalam situasi emerjensi maupun kontijensi sekalipun. Sebagai wujud

pemolisian yang penelitian terkini pada tingkat global mengenai bagaimana model smart policing dapat diukur dan dinilai kualitas pelayanannya yang dirumuskan pada penelitian Ekaabi et al.

15. Dimensi pengukuran layanan smart policing dapat dilihat dari trasnparansi, integritas, interaksi timbal balik antara polisi dengan masyarakat (interactivity), kecepatan dalam memberi pelayanan mengakomodasi penyelesaian masalah (responsivity), dan kemudahan mengakses pelayanan kepolisian (servicability)

    Smart policing juga mendukung evidence based policing yang berdasarkan riset, penelitian, dan bukti berupa data/fakta sehingga secara konseptual maupun teoritikal dengan berbagai pendekatannya dapat menjadi acuan bagi Grand Strategy Polri. Grand Strategy Polri yang berbasis Smart Policing dapat dibangun secara konseptual, secara fisik, secara scientific, secara infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya, selain itu juga pada kurikulum dan pengajarannya, agar tetap fungsional dalam kondisi emergency/darurat sekalipun.

    Mengacu pada Smart Policing Initiative (Bureau of Justice Assistance, 2012), strategi penerapan inovasi pada pemolisian dapat dilakukan dengan sistem riset dan pengukuran performa yang komprehensif; menetapkan target strategis yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kepolisian; penggunaan informasi intelijen, riset, dan sumber data lainnya sebagai dasar penerapan kebijakan dan tindakan di lapangan; melakukan transformasi dan pembenahan organisasi secara terus menerus dengan menekankan meritokrasi, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan; serta melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak/stakeholder terkait dengan Polri dalam rangka meningkatkan inovasi dan performa kinerja kepolisian.

    Di sisi lain, model smart policing menggambarkan kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepercayaan publik melalui sistem intervensi multidimensi (Afzal dan Panagiotopoulos, 2020). Tujuan utama penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban bersatu untuk membangun kepercayaan publik. Mekanisme inti yang menggerakkan kerangka kerja ini adalah intervensi multidimensi, yang mencakup strategi lingkungan,

tindakan penegakan, dan inisiatif keterlibatan komunitas. Intervensi ini didukung oleh berbagai proses, antara lain: konstruksi kejahatan, pendeteksian kejahatan, pengawasan otomatis, dan pemantauan ketegangan otomatis. Masing-masing proses ini didukung oleh analisis informasi data, yang mengintegrasikan data yang diarahkan, data otomatis, dan data yang bersumber dari keramaian. Analis memainkan peran penting dalam mengelola dan menginterpretasikan data ini, mempengaruhi semua proses utama. Selain itu, framework ini menekankan pentingnya mempertimbangkan isu-isu hak asasi fundamental dalam melaksanakan pemolisian, memastikan bahwa upaya menjaga keamanan publik tidak melanggar hak individu. Bagaimana hubungan informasi dan pengaruh, menunjukkan bagaimana intervensi berbasis data mendukung tujuan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik.

16. Model Smart Policing Sumber: Afzal dan Panagiotopoulos (2020)

    Perubahan pola maupun model pemolisian memerlukan grand design dan grand strategi yang dapat dikatakan smart policing, yaitu harmonisasi antara conventional policing, electronic policing atau e-policing dan forensic policing, untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial bagi kemanusiaan dan pembangunan peradaban.

    Implementasi Smart Policing dalam Grand Strategy Polri

    Polisi dan pemolisiannya dalam perspektif perilaku organisasi sejatinya membuat harmoni dan berbagi kebahagiaan dengan terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman. Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial. Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktiftas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan,

hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

17. Ancaman hambatan dan gangguan harmoni dan kebahagiaan dalam sosial kemasyarakatan yang berdampak pada terganggunya aktivitas produksi masyarakat karena adanya:

    a. Premanisme

       Premanisme tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, pendekatan personal, lemahnya penegakkan hukum

    b. Berbagai bentuk kejahatan

       Kejahatan konvensional, kejahatan transnational, kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan, white collar crime, narkotika .

    c. Berbagai bentuk pelanggaran

       Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal dalam segala lini kehidupan masyarakat.

    d. Faktor alam dan lingkungan\

       Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya.

    e. Faktor sumber daya manusia tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia sangat mendasar bagi terwujudnya keteraturan sosial.

    f. Faktor politik dan kebijakan publik yang bersifat kontra produktif jika dijalankan tanpa hati nurani/nilai-nilai keutamaan, serta dipenuhi dengan KKN.

    g. Perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi

       Perubahan begitu cepat menembus batas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan media, teknologi, dan sistem informasi komunikasi saling beradu kekuatan. Timbul era post truth,

hoax, serangan siber, dan kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan tidak mengenal batasan negara lagi.

h. Corak masyarakat dan kebudayaannya

Masyarakat yang majemuk akan mengagungkan primordial. Dari situlah legitimasi dan solidaritas dibangun dan mudah diikuti walau kontraproduktif, tidak rasional dan sarat emosional. Tatkala primordial dijadikan alat maka kebencian akan menjadi penyulut konflik sosial bagaikan perang saudara.

i. Sistem pelayanan publik

Pelayanan kepada publik di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan tatkala dalam birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka akan bersifat kontraproduktif.

j. Sistem ekonomi, industri dan perdagangan.

Point 1 sampai dengan 9 semua akan bermuara pada point 10.

Menghadapi tantangan tersebut, penerapan smart policing yang telah dibahas sebelumnya dalam Grand Strategy Polri dapat dilaksanakan sejak perencanaan dan set of action. Pola pemolisian dapat secara filosofis dan strategis mengacu kepada model community policing. Secara operasionalnya dapat dikategorikan dengan berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan berbasis dampak masalah.

18. Smart policing dapat diimplementasikan melalui smart management dan smart operation yang dapat dimulai dari adanya :

a. Sistem monitoring pemetaan dan berbagai bentuk pengawasan seperti CCTV, drone, sensor yang termonitor pada back office sebagai operation room. Sistem monitiring ini dapat dilihat secara real time. Dari sistem monitoring yang ada, data diambil untuk menganalisa wilayah sesuai dengan pengkategorianya.

b. Sistem informasi komunikasi dan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang bersifat aduan atas gangguan pelanggaran kejahatan sampai dengan hal kontijensi. Sistem komunikasi ini

dapat dibangun melalui berbagai media sebagai penghubungnya agar mudah diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tatkala yang berkaitan dengan stakeholder lain polisi dapat menjembatani. Untuk permasalahan emergency dan kontijensi polisi dapat memberi solusi cepat.

c. Sistem reaksi cepat yang terintegrasi antara kepolisian, rumah sakit, ambulance, pemadam kebakaran, dan PLN sebagai kesatuan agar dapat bergerak secara terintegrasi dengan skala prioritas dalam menghadapi situasi darurat/emergency.

d. Patroli virtual dan aktual untk memberikan keamanan dan rasa aman bagi warga masyarakat dengan berbagai informasi dan solusinya.

e. Pelayanan publik dikerjakan secara online dan aktual untuk keamanan, keselamatan, hukum, informasi, administrasi maupun untuk kemanusiaan.

f. Melakukan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembenahan organisasi.

   Hal ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Schrage et al. (2024) tentang penggunaan artificial intelligence untuk melakukan penyesuaian terhadap key performance indikator bagi seluruh anggota organisasi, antara lain dengan mendefinisikan ulang sistem penilaian kinerja, menggunakan alat ukur yang dinamis, memperbaiki tata kelola penilaian, dan meningkatkan kualitas sistem penilaian.

g. Pengimplementasian program kepolisian pada birokrasi maupun pada masyarakat. Kegiatan ini akan tertata dan terkoneksi serta terkontrol dalam sistem online.

   Implementasi smart policing dalam bentuk smart management dan smart operation bagi kepolisian menjadi keunggulan bagi organisasi atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada dalam sistem one stop service dan berbagai model quick response time.

19. Smart management dan smart operation melalui algoritma dalam bentuk : infografis, info statistik, info virtual untuk memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi secara prima, yang diimplementasikan untuk:

    a. Mendukung SPBE(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

    b. Implementasi harmoni antara conventional policing, e-policing dan forensic policing

    c. Mendukung back office application yang berbasis AI dan network dalam IoT agar mampu menghasilkan algoritma

    d. Terbangunnya smart livingan dan smart mobility

    e. QuickResponseTime

    f. Membangun big data system

    g. One Stop Service

    h. Pelayanan berstandar prima

    i. Sinergitas dengan para stakeholder terkait

    j. Mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat

    Perkembangan model community policing dalam model smart policing juga mendorong strategi organisasi yang mendukung penggunaan kemitraan dan teknik penyelesaian masalah secara sistematis untuk secara proaktif mengatasi kondisi mendesak yang menimbulkan masalah keselamatan publik seperti kejahatan, kekacauan sosial, dan ketakutan akan kejahatan (Polly, 2022). Sehingga, perlu untuk membangun dan menerapkan aspek keamanan dalam kerangka berpikir smart city pada Grand Strategy Polri, antara lain (McKinsey Global Institute, 2018):

    a. PredictivePolicing

    b. Crime mapping secarareal-time

    c. Smart surveillance

    d. Optimalisasi emergency response

e. Body worn camera

f. Sistem peringatan dini terhadap bencana

g. Manajemen massa

20. Implementasi Smart Policing dalam Grand Strategy setidaknya mampu diharapkan untuk:

a. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian

b. Memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial

c. Berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian

d. Diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global

e. Mengatasi berbagai risiko gangguan keteraturan sosial yang terjadi secara lokal maupun global

f. Mengatasi masalah keteraturan sosial dalam dunia aktual maupu virtual

g. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service

h. Prediktif, proaktifdan problemsolving

i. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emegency maupun contingency

j. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

21. Dari point point di atas pola penangangan masalah dengan model smart policing dapat menggunakan pola asta siap yang terdiri dari:

a. Siap piranti lunak sebagai pendukung, payung hukum, pedoman, SOP, dan sistem lainnya

b. Siap posko sebagai backoffice yang berbasis AI dan IoT untuk

menggerakkan berbagai aplikasi sehingga mampu menjd pusat k3i.

c. Siap untuk menganalisa berbagai situasi dan kondisi dalam melakukan prediksi, mempersiapkan antisipasi dan solusinya.

d. Siap SDM yang mengawaki sebagai yang mampu menghasilkan produk, analisis, dan kebijakan.

e. Siap jaringan sampai ke bagian terkecil yang berbasis wilayah, berbasis kepentingan, fungsi, hingga yang berbasis dampak masalah.

f. Siap mitra sebagai soft power untuk menggerakkan berbagai tindakan preemtif preventif, represif hingga rehabilitasi

g. Siap logistik sebagai sarana prasarana yang berbasis IT untuk perorangan, kelompok, maupun kesatuan.

h. Siap anggaran secara budgeter maupun non-budgeter.

22. Pengembangan model smart policing dalam strategi ini perlu disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, juga dengan situasi dan kondisi wilayahnya. Model ini juga bisa digunakan sebagai landasan pengembangan atas penanganan masalah bencana, konflik maupun kerusakan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan secara prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Calam (2017) menekankan bahwa pemolisian yang efektif sangat vital pada masyarakat yang berfungsi dengan baik, sehingga dalam menghadapi tantangan-tantangan terkini dapat dihadapi sukses, diperlukan upaya transformasi terpadu dalam menerapkan sistem smart policing dan

23. Ilmu kepolisian yang melibatkan seluruh anggota kepolisian, setidaknya dalam 6 prinsip yaitu:

    a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota kepolisian untuk menghadapi tantangan abad ke-21

    b. Menempatkan analisa data dan informasi sebagai unsur utama bagi organisasi dalam menjalankan fungsinya.

c. Mengintegrasikan teknologi untuk memaksimalkan kinerja.

d. Mengoptimalkan seluruh struktur dan proses organisasi.

e. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat

f. Meningkatkan engagement dengan masyarakat (terutama secara digital) dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

24. Dengan melakukan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya, dibutuhkan SDM kepolisian yang memiliki literasi/kesadaran tinggi terhadap hakekat, keutamaan, dan tugas pokoknya sebagai polisi, sehingga mampu memahami dan menjalankan Grand Strategy atau pun model smart policing yang bertujuan meningkatkan kualitas performa dan pelayanan bagi masyarakat dan seluruh stakeholder, sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat bagi Polri ke depan. Pemberdayaan literasi terhadap teknologi, kepolisian, kepemimpinan, dan kapabilitas dapat dijalankan dengan pendidikan, pelatihan, atau mentoring untuk memanfaatkan inovasi, teknologi, dan data sebaik-baiknya untuk pencegahan kejahatan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan keamanan dan keselamatan publik, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan (Potter, 2023). Peran pemimpin menjadi krusial dalam memulai transformasi organisasi, mengarahkan anggotanya untuk mewujudkan visi besar ini serta menjadi contoh bagi seluruh anggotanya (Dwilaksana, 2012). Harapan ke depannya, kepolisian harus mampu diorganisir pada tingkat komunitas, regional dan global, selalu dipimpin oleh prinsip supremasi hukum, semakin mampu membangun kerja sama nasional dan internasional yang efektif, terus membangun organisasi yang kuat dan baik di domain fisik maupun digital (Interpol, 2022), sehingga dapat mewujudkan peningkatan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Polri.

25. Penutup

Menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, terliterasi, kompeten, dan modern merupakan proses panjang yang setidaknya dimulai dari pemikiran-pemikiran visioner yang luar biasa atau berbeda dengan pemikiran-pemikiran pada umumnya. Hal ini

perlu diwujudkan dalam birokrasi yang rasional, kepemimpinan yang visioner, transformasional, dan problem solving dalam membangun model smart policing. Selain itu juga diawaki SDM yang profesional yang memiliki attitude yang baik dan sebagai pekerja keras dan pembelajar serta mindset sebagai polisi ideal, sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan sekaligus. Hal ini ditunjukkan pada birokrasi yang mempunyai tata kelola lembaga prima yang memiliki program-program unggulan yang inspiratif, inovatif, kreatif serta dinamis untuk senantiasa mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, kebutuhan tantangan, ancaman serta harapan masa kini, mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dukungan infrastuktur dengan teknologi yang modern masih dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Yang perlu menjadi perhatian juga adalah penerapan nilai sejak perencanaan, monitoring, hingga evaluasi untuk senantiasa dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, sehingga mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang, atau meningkat kualitas hidupnya. Dengan terwujud dan terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri dan kepastian hukum pada akhirnya menjadi salah satu penentu dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.

# SMART CAMPUS FOR SMART POLICING [78]

Era revolusi Industri 4.0 akan banyak perubahan yang begitu cepat. Era digital era volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (vuca), yang serba cepat tak terduga yang kompleks dan penuh ketidakpastian perlu pemimpin dan kepemimpinan di era digital untuk menanganinya.

Polisi dalam pemolisiannya perlu adanya perubahan model pemolisian. Model pemolisian yang dapat menjadi acuan adalah smart policing.

Media di era digital menjadi arena atau ruang yang dipilih dan digunakan untuk berbagai kepentingan hidup dan kehidupan manusia di semua gatra kehidupan bisa dilakukan di sana. Dari masalah pribadi sampai masalah politik kenegaraan, ekonomi, sosial budaya hingga pelayanan publikpun bisa dilakukan. Warga pengguna dunia virtualpun memiliki nama (warga net atau netizen).

Mereka menjalankan aktivitas dalam dunia virtual. Media terutama media sosial mampu menggeser media konvensional. Informasi dan komunikasi begitu cepat. Apa saja ada dan apa saja bisa bahkan dimana saja siapa saja pun bisa.

Media menjadi pilar literasi yang menjadi arena pencerahan, pencerdasan, pengkayaan, pemberdayaan, transformasi pengetahuan, dan banyak hal positif bagi hidup dan kehidupan lainnya. Media sebagai pilar literasi juga untuk mengatasi dampak kemajuan teknologi.

Berkembang pesatnya informasi berdampak pada munculnya "post truth". Post Truth merupakan era penumpulan daya nalar yang dapat berdampak mengobok obok emosi dan persepsi publik yang dapat dikendalikan untuk menimbulkan potensi konflik. Logika tidak lagi diutamakan yang dipentingkan emosional spiritual. Kemasan primordialisme digelorakan agar kebencian semakin membara. Tanpa pikir panjang peradilan sosialpun merebak di semua lini. Saling menuduh

78 https://transindonesia.co/2024/09/15/smart-campus-for-smart-policing/
https://lovebandung.com/index.php/2024/09/15/smart-campus-for-smart-policing/
https://polisiindonesia.id/2024/09/15/cdl-smart-campus-for-smart-policing/

saling menyalahkan saling menghina saling mengobok obok jiwa hingga harga diri. Tanpa sebutir peluru keluar moncong laras senjata perang dapat dimulai.

Post truth kontra produktif, pembodohan menggelora di mana mana. Era post truth menjadi ajang pemutar balikkan fakta. Isi media diacak adul sehingga antara fakta dan kebohongan bahkan kemasan dalam primordialisme akan dapat dikembangkan menjadi pemicu konflik. Dari melempar issue, melabel hingga ujaran ujaran kebencian. Opini publik dapat diobok obok dan dibingungkan dengan primordialisme untuk menggerus nalar dan ujungnya pada kebencian. Tatkala kebencian sudah merasuk di dalam opini publik tinggal menunggu trigger untuk meledakkannya.

Berbagai masalah di era post truth yang berdampak pada gangguan keteraturan sosial antara lain :

1. Premanisme yang tumbuh subur dalam lingkungan yang sarat dengan KKN, ketidak adilan, dan Kesewenang wenangan
2. Birokrasi yang lebih menekankan pada pendekatan personal yang berdampak buruknya pelayanan kepada publik
3. Berbagai bentuk kejahatan

   Kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, kejahatan siber, kejahatan jalanan dan kejahatan kerah putih, narkotika.

   Berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran operasional dan tata kelola. Munculnya berbagai hal yang ilegal.
4. Faktor alam dan lingkungan

   Alam dan lingkungan dari bencana alam hingga kerusakan alam lingkungan dari udara, air, tanah, gunung, laut, dan berbagai kawasannya
5. Faktor sumber daya manusia tingkat kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang redah yang sarat dengan primordialisme
6. Faktor politik dan kebijakan publik, politik yang terlambat atau tidak mampu menghadapi perubahan sosial, globalisasi dan modernisasi, perubahan begitu cepat.

7. Era post truth, hoax, serangan siber, dsb melalui media
8. Gaya hidup hedonisme yang berdampak tergerusnya nilai nilai budaya luhur
9. Lemahnya penegak hukum dan penegakan hukum dan sistem hukumnya
10. Sistem yang manual, parsial dan konvensional sehingga berdampak potensi penyimpangan yang begitu besar.

Model smart policing diharapkan dapat menjadi model untuk mengatasi era vuca.

Sistem manajemen dan operasional yang cerdas/ fungsional, merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan bagi implementasi smart policing antara lain:

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian ( policing ) : conventional policing, electronic policing, forensic policing
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emerjensi maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan smart policing diperlukan adanya smart campus pada lembaga pendidikan dan pelatihan.

Smart campus setidaknya dibangun mencakup:

1. Lingkungan yang asri dan ngangeni, beraih dan bercita rasa seni
2. Nuansa akademik ada di semua sudut lingkungan sekolah
3. Ada Literation centre sebagai pusat literasi untuk menampung produk produk virtual maupun aktual dan juga untuk komunikasi koordinasi komando pengendalian dan informasi.
4. Guru guru atau pengajar atau sebagai nara sumber adalah orang orang yang berkualitas sebagai sang pencerah yang mampu menjadi role model atau ikon kecerdasan bagi anak didiknya.
5. Didukung smart class dan sistem sistem untuk pembelajaran dalam dialog peradaban.
6. Nilai nilai keutamaan menjadi dasar bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
7. Proses pembelajarannya profesional, cerdas, bermoral dan modern.
8. Kurikulum yang dinamis berbasis pada:
    a. Keilmuan/ ilmu pengetahuan
    b. Penelitian atau pengkajian
    c. Studi kasus secara proactive dan problem solving
    d. Kebaruan atau novelti
    e. Social engineering
    f. Bhakti masyarakat/ bhakti sosial
    g. Olah rasa/ bidang seni budaya
    h. Olah raga
    i. Olah rasa/ mental spiritual dan penanaman budaya
9. Memiliki Jurnal dan Penerbitan.
10. Ikatan alumni
11. Aktif dalam kegiatan forum akademis nasional maupun internasional bench mark seminar work shop dan studi nasional dan internasional
12. Ada publikasi pengajarannya ke media sehingga dapat dijadikan referensi dan literasi
14. Menjadi anggota forum atau asosiasi akademik nasional maupun internasional.

# POLISI DAN PEMOLISIAN PILAR SISTEM NASIONAL BAGI KEDAULATAN DAYA TANGKAL, DAYA TAHAN DAN DAYA SAING BANGSA SERTA NEGARA [79]

Polisi dalam pemolisian nya adalah Merupakan kedaulatan bangsa dan negara yang memiliki daya tahan, daya tangkal dan daya saing. Berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan semakin kompleks. Tatkala tidak tertangani dengan baik dan benar maka akan menggerus bahkan merontokan kedaulatan bangsa dan negara. Daya tahan, daya tangkal maupun daya saing nya pun bisa melemah bahkan menghilang.

Kita semua harus memahami dan sadar bahwa polisi dalam pemolisiannya menjadi bagian dari upaya menjaga sistem sistem nasional agar adanya keamanan dan rasa aman dari tingkat lokal sampai dengan tingkat global. Di sinilah maka polisi dan pemolisian wajib ditumbuhkembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan jaman.

Amanat konstitusi negara kita salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, menjaga kedaulatan NKRI. Indonesia sebagai negara yang berbhineka tentu potensi konflik dan perpecahannya begitu besar.

Para Bapak Bangsa menyadari bahwa hanya bangsa yang cerdas berdaulat adil dan makmur yang mampu merawat dan menjaga NKRI. Yang paling menonjol salah satunya adalah " Primordialisme" menggunakan identitas suku, agama, keyakinan keagamaan, ras dan antar golongan.

Primordialisme dijadikan alat mencari solidaritas dan legitimasi. Dalam prakteknya tak jarang di larutkan dengan hal hal yang provokatif,

79 https://polisiindonesia.id/2024/09/15/cdl-polisi-dan-pemolisian-pilar-sistem-nasional-bagi-kedaulatan-daya-tangkal-daya-tahan-dan-daya-saing-bangsa-serta-negara/

ujaran kebencian terus menerus dihembus hembuskan. Mudahnya diprovokasi atau larut dengan hasutan primordialisme karena lemah dan rendahnya tingkat literasi.

Apa yang dibuat dan disampaikan dengan semangat menggebu gebu langsung ditelan, dianggap sebagai suatu kebenaran. Apa yang dianjurkan untuk merusak memusuhi bahkan membunuh pun bisa dilakukan, walau sesama anak bangsa. Masalah politik identitas misalnya, sebenarnya banyak hal yang secara kasat mata dan logika merusak peradaban, namun faktanya banyak yang tak mampu menolak bahkan di perbudak otak dan hatinya, sehingga percaya dan bangga dijadikan umpan anarkisme.

Sadar atau tidak, apa yang dilakukan apa yang dihembuskan, akan menggerus jiwa nasionalisme. Cara primordialisme merusak peradaban memalukan sebagai bangsa yang beradab.

Jiwa patriotisme dan solidaritas sosialnya dari para akademisi, para kaum terpelajar dapat dijadikan role model. Literasi sosial kemanusiaan atau literasi kebangsaan, literasi seni budaya" yang dibangun untuk :

1. Menyadarkan
2. Mencerdaskaan
3. Memberi pencerahan dan mengajak untuk berpikir secara bijaksana.
4. Mengcounter bahkan memperbaiki gerusan peradaban.
5. Melepaskan belenggu captive mind
6. Mampu menjadi pencerah dan tidak hanyut dalam hasutan anarkisme maupun primordialisme
7. Mampu berpartisipasi sebagai soft power dan smart power dalam menjaga keteraturan sosial.
8. Mampu berdaya saing secara waras dan terhormat sebagai bangsa yang bermartabat.
9. Sadar cerdas bermoral modern cara merawat kebhinekaan dan menjaga kedaulatan bangsa yang berdaulat bermartabat, beradab adil dan makmur.

Konflik sosial pada umumnya karena perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya. Bisa juga dikarenakan masalah harga diri. Suatu konflik terjadi sebenarnya merupakan puncak gunung es. Permasalahan sudah menumpuk dan hanya menunggu ada trigger.

Permasalahan yang tidak terselesaikan akan menimbulkan kekecewaan hingga kemarahan walaupun masih dapat dipendam. Namun itu di omongkan terus menerus ke mana mana dan bagi orang yang tidak pernah mengalaminya bisa ikut menceriterakan. Dari mulut ke mulut ditambah tambahi dan saling memiliki penafsir berbeda dari faktanya. Ini gosip. Semakin digosok semakin sip. Gosip ini tatkala berlapis lapis dan terus menerus dilakukan ini akan menjadi la beling. Pemberian label ini bisa untuk perorangan bisa untuk kelompok. Tatkala labeling ini terus dihembuskan seolah olah menjadi kebenaran maka akan menjadi kebencian.

Apa yang dilakukan di atas ini sangat mudah memicu konflik sosial tatkala dikaitkan atau dihubung hubungkan dengan primordial. Primordial merupakan hal yang utama dan pertama bisa sara bisa juga komunitas atau kelompok kelompok kategorial. Di dalam primordial emosional, spiritual diutamakan dan kadang mengabaikan rasionalitas. Pokok e atau dengan semangat siap membantu mengeroyok atau balas dendam dan menyerbu.

Kelompok primordial tatkala sudah saling melabel saling membenci dari konflik perorangan pun bisa terjadi. Primordial dipilih atau digunakan karena untuk mendapatkan legitimasi walau hanya pada pembenaran bukan kebenaran. Apalagi kebenaran yang tidak berbasis hal hal yang hakiki hanya berdasarkan populasi.

Di dalam masyarakat yang majemuk primordialisme sangat mudah untuk memecah belah atau mengadu domba satu sama lain. Antar suku antar ras antar agama antar kelompok menjadi basis solidaritas pokok e yang sebenarnya pekok e. Rasionalitasnya dibuang. Yang ada dikepalanya hanyalah hajar, serbu, hancurkan mereka musuh menghina kita.

Spirit premanisme muncul walau kembali dengan keroyokkan dan pengkambinghitaman. Siapa yang lemah disalahkan dan ditumbalkan. Tatkala kelompok kelompok primordial ini sudah menjadi crowd maka akan muncul gerakkan anarkisme ealaupun hanya dg bullshit dikeroyok si A dan si B atau mengarang kejadian seolah teraniaya.

Sifat orang orang yang cengeng mudah di berdayakan untuk membakar amarah. Sikap ksatria rela digantung diganti nalar koprol, mereka saat itu seakan penuh jiwa yang heroik walaupun melakukan hal hal yang di luar nalar. Otaknya seakan dibekukan dicocok hidungnya diseret untuk mengamini anarkisme. Kesadaran kolektif sudah tidak mampu lagi dikendalikan. Seakan orang mabuk ia lupa dengan dirinya dan sadar menyesal dibelakang hari.

Masyarakat majemuk memerlukan adanya suatu pencerdasan hingga nalar atau logikanya tidak mudah dikoprolkan. Paradigma multikulturalisme ini mungkin mampu memasukkan kebanggaan akan kebhinekaan. Patriotisme cinta bangga akan bangsa dan negara tatkala bukan pd solidsritas semu apalagi dengan berbagai hal yang menjurus kepada premanisme.

Kekuatan massa khususnya bagi masyarakat suatu bangsa dan negara layak untuk dijaga atau ditumbuh kembangkan kekayaan seni budayanya dalam konteks karakter bangsa bagi hidup tumbuh dan berkembangnya. Multikulturalisme ini menjadi kekuatan bagi pelestarian kebhinekaan dan mencerdaskan untuk memberdayakan melestarikan salah satunya melalui masyarakat sadar wisata. Kesadaran akan wilayahnya orang orangnya suku bangsa bahasa dan seni budayanya menjadi sumber daya baru.

Penanaman cinta bangsa bukan lagi doktrin namun menumbuhkembangkan nalar dan daya logika waras. Lagi-lagi ujung nya memang politik sehat waras lah yang mampu menjaga dan membawa suatu bangsa maju dan sejahtera.

Keamanan dalam negeri : kedaulatan, daya tahan, daya tangkal dan daya saing bangsa Suatu bangsa yang berdaulat memiliki ketahanan atas berbagai gerusan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu juga memiliki kemampuan memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya.

Keamanan dalam negeri adalah keteraturan sosial secara idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya secara pribadi, di ruang publik, profesi dan berbagai pekerjaan, lingkungan hidup, dan mayantara yang dapat mendukung produktifitas maupun upaya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Keamanan dalam negeri diwujudkan dalam keteraturan sosial sehingga terjaminnya keamanan segala sumberdaya negara dari manusianya, kekayaan alamnya, idiologi, politik ekonomi dan sosial budayanya untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang sehingga berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal bahkan berdaya saing

Keteraturan sosial dalam konteks polisi dan pemolisiannya terefleksi dari sistem keamanan dan pengamanan hingga terjaminnya keamanan dan rasa aman secara pribadi, di ranah publik, ranah lingkungan hidup dan kehidupan, ranah ekonomi dan industri, ranah mayantara hingga ranah forensik. Keamanan dalam negeri dalam pendekatan pemolisian di era kenormalan baru dijabarkan pada pemolisian yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah secara konvensional, elektronik dan forensik.

Konteks pemolisian yang fungsional ditunjukan adanya sinergitas dan harmoninya model konvensional dan kontemporer yang mampu diimplementasikan secara proaktif dan adanya penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Keamanan dalam negeri menjadi simbol peradaban kedaulatan ketahanan dan daya saing suatu bangsa. Keamanan dalam negeri konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berlandaskan demokrasi yang mencakup :

1. Supremasi hukum
2. Adanya jaminan dan perlindungan HAM
3. Transparansi
4. Akuntabilitas
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan

Keamanan dalam negeri dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberdayakan kekayaan dan keindahan serta kebhinekaan salah satunya melalui masyarakat yang sadar seni budaya dan pariwisata. Kekuatan Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata (Masdarwis) antara lain :

1. Menanamkan: kecintaan dan kebanggaan akan lingkungannya, seni budayanya bahkan bangsa dan negaranya.

2. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Membangun kesadaran untuk mengemas, memberdayakan, memaknai hingga memarketing kan sumber daya yang ada semua dapat dari alam, heritage, seni budaya, kuliner, tradisi, religi, komuniti hingga teknologinya
4. Kepekaan, kepedulian, pemikiran visioner yang holistik dan sistemik yang proaktif dan problem solving
5. Membangun karakter bangsa, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun patriotisme, menata keteraturan sosial, perawatan akan kebhinekaan dan tentu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Anti premanisme dan anti anarkisme.
7. Keteraturan sosial dapat dilakukan dalam suatu harmoni atas hidup dan kehidupan. Dari alam saja dapat menata dan merawat lingkungan ini tentu hingga ke sistem sistem ekologinya. Dari seni budayanya dari sastra rupa tari pertunjukan musik dll dapat menjadi kekuatan sosial untuk menjembatani atas kebuntuan atau kepenatan atas hidup dan kehidupan. Heritage dari para leluhur sangat beragam yg menunjukkan peradaban tinggi bangsa.
8. Membangun pola hidup dan kehidupan masyarakat dalam keberagaman yang multikultural.
9. Suatu kekuatan politik, sosial ekonomi maupun budaya.
10. Kekuatan manajerial dan operasional sehingga mampu menjadi ikon atau simbol keunggulan

Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata Mencerdaskan dan Menyelamatkan Anak Bangsa untuk :

1. Mampu untuk hidup dan menghidupi
2. Menjadi sumber daya bagi kehidupan
3. Menerima, menghormati dan bangga adanya kebhinekaan
4. Menyadarkan bahwa seni budaya dan pariwisata merupakan ikon peradaban bangsa

5. Menjadi martabat bangsa yang ramah membuat suasana aman nyaman asri dan ngangeni
6. Menjaga alam lingkungan dengan segala warisannya yang sangat berharga
7. Menjadi karakter bangsa yang sarat nilai luhur bagi kemanusiaan dalam hidup dan kehidupannya
8. Mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial
9. Membangun bangsa yang multikultural
10. Kedaulatan bangsa yang berdaya tahan, berdaya tangkal bahkan berdaya saing sebagai negara super power seni budaya dan pariwisata

Masyarakat Sadar Seni budaya dan pariwisata merupakan bagian dari sistem pengamanan untuk keamanan dalam negeri yang dpat dibangun melalui :

1. Tegak dan kokohnya ideologi bangsa
2. Political will yang kuat
3. Keamanan secara ekonomi
4. Keamanan secara sosial budaya
5. Keamanan secara siber maupun forensik
6. Keamanan infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya
7. Sumberdaya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
8. Sistem sistem pelayanan publik yang prima
9. Sistem monitoring dan evaluasi serta sistem akuntabilitas kepada publik yang transparan dan akuntabel
10. Sistem sistem yang siap dalam kondisi emergensi maupun kontijensi

**Amalkan Pancasila :**

**Negara Berdaulat Bangsa Bermartabat**

Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tak sebatas dihafal melainkan diamalkan dalam kehidupan.

Makna yang terkandung dalam sila sila Pancasila begitu dalam luas dan mampu melingkupi berbagai gatra kehidupan. Dari kehidupan perorangan hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari urusan pribadi hingga urusan dunia. Memahami dan mengamalkan Pancasila memerlukan kesadaran kepekaan kepedulian bahkan kecintaan dan kebanggaan sebagai anak bangsa. Yang ditunjukkan dalam pikiran perkataan dan perbuatan serta bela rasa bagi kemanusiaan, pembangunan keteraturan sosial maupun pembangunan peradaban.

Dalam kehidupan pribadi sebagai anak bangsa kesadaran dan kecintaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari hari dapat ditunjukkan dalam sikap dan perilaku sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Keimanan dan ketakwaannya ditunjukkan dlm perilaku yang patuh menjalankan ajaran agama yang diyakininya, patuh hukum, empati dan belarasa kepada sesama, terutama yang termarjinalkan dan menderita. Mampu menjaga lingkungannya dan solidaritas sosial untuk membangun peradaban. Mampu menunjukkan sikap integritasnya akan kemanusiaan dan berbagai hal yg berkaitan dengan produktifitas. Tentu tidak hanyut atau mudah dihasut dibodohi untuk menyelesaikan konflik dengan cara anarkis. Premanisme, radikalisme dengan primordialisme merupakan perusakan peradaban.

Di sinilah peran kaum akademisi dan kalangan kampus perguruan tinggi tampil berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan para kaum akademisi dapat menjadi tokoh yang dipercaya untuk menjaga keteraturan sosial. Tokoh dialog dalam menyelesaikan konflik secara beradab yang saling menghormati, bahkan saling melayani dalam mewujudkan keteraturan sosial. Kaum Akademisi mampu menunjukan kepiawaiannya dalam :

1. Mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat.
2. Mendukung proses produktifitas dan membangun sistem keadilan sosial terutama dalam pemberdayaan dan pendistribusian sumber daya.
3. Membangun local heroes maupun menerapkan local genius untuk menjaga keteraturan sosial.

4. Dialog dalam komunikasi sosial dan solidaritas sosial dlm wadah yg merupakan basis civil society.
5. Merawat dan melestarikan seni budaya tradisi dan berbagai kegiatan olah rasa maupun olah raga.

Dalam tata politik dan penyelenggaraan negara perguruan tinggi dan kaum akademisi mampu mendukung sistem yang mampu mengimplementasikan amanat kontitusi negara. Berbasis pada supremasi hukum, Memberikan jaminan dan perlindungan HAM, Transparan dan akuntabel yang ditunjukkan dalam political willnya berpihak atau memperjuangkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima, Berorientasi pada upaya upaya peningkatan kualitas hidup rakyat. Penerapan sistem politik yang peduli akan kepentingan rakyat dan upaya upaya mensejahterakan rakyat. Mendorong kebijakan untuk mendukung pengembangan dan menuju teknologi dan sistem yang mandiri.

Nilai nilai luhur pancasila tatkala dipahami dan diamalkan dengan sungguh sungguh maka dapat merefleksikan integritas bangsa, jati diri bangsa, daya tahan daya tangkal bahkan daya saing. Pada pendidikan lah tergantung masa depan bangsa. Maka Kampus perguruan tinggi juga menjadi dasar pendidikan yang merupakan sistem transformasi, dibangun atas dasar kesadaran dan penyadaran. Tentu juga kepemimpinan di semua lini bangga dan mencintai bangsanya sehingga mampu dan berani memperbaiki kesalahan di masa lalu.

Siap menghadapi tuntutan harapan bahkan ancaman di masa kini. Mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Negara berdaulat dalam berbagai pendekatan dapat di lihat adanya :

1. Kuatnya ideologi
2. Kuatnya pertahanan
3. Kuatnya keamanan dalam negeri
4. Kuatnya SDM sebagai aset utama bangsa
5. Kuatnya sektor bisnis
6. Kuatnya pengelolaan sumber daya alam
7. Kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi

8. Kuatnya hukum dan penegakan hukum
9. Kuatnya birokrasi yang rasional dan anti korupsi
10. Kuatnya seni budaya

Ke 10 point tersebut saling terkait Konteks pilar secara umum dpt dikatakan pada

1. Kemanusiaan
2. Keteraturan sosial
3. Peradaban

Konteks pemolisian yang dapat dijadikan pendukung adalah pada implementasi community policing sebagai filosofi dan strategi pemolisian. Pola pola yang dibangun dapat berbasis pada smart policing yaitu harmoninya antara

1. Conventional policing
2. Electronic policing
3. Forensic policing

Pemolisian di atas pola pembelajaran nya salah satunya dengan dibangun Crisis Centre pada pemolisian yang dibangun dengn model:

1. Disaster Management
2. National Management System (Sismenas)
3. Emergency and Contigency Policing

Kekuatan Crisis Centre dengan pilar antara lain menjadikan model dalam Pelayanan di Indonesia yang rawan bencana, rawan konflik dalam smart management n smart operation. Crisis Centre menjadi harapan dan tujuan bagi dukungan pembelajaran di Sespim yang fungsional yang pelayanan publiknya berstandar prima.

Pelatihan bagi peserta didik Sespim yang nantinya akan menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Para peserta didik mampu mengimplementasikan smart management dan smart operation dalam kondisi krisis.

Yang tentu dapat mewujudkan dan menjaga keteraturan sosial sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat terjaga dan terpeliharanya keteraturan sosial ( keamanan dan rasa aman bagi warga masyarakat ) adanya anti premanisme dalam pembangunan suatu peradaban.

Publik dapat dipahami sebagai masyarakat atau rakyat atau orang banyak. Apa yang mereka butuhkan secara umum dan mendasar ? Kebutuhan publik ini dapat dikategorikan pada ruang publik bagi perorangan maupun secara bersama sama.

Di dalam Crisis Centre model juga melihat publik sebagai masyarakat di ruang publik yang terganggu atau terhambat produktifitasnya karena ada disaster atau kondisi krisis baik faktor manusia, faktor alam maupun by design yang merusak sistem dan infrastruktur pendukungnya.

Masyarakat membutuhkan adanya keamanan dan rasa aman dan pelayanan kepolisian yang setidaknya mencakup kawasan yang sehat, aman, nyaman, ada saling keterhubungan dengan kawasan kawasan lainnya sehingga mudah dicapai. Dengan demikian menjadi smart living dan smart mobility.

Pelayanan publik untuk mencapai atau setidaknya memenuhi standar apa yang dibutuhkan publik terutama kondisi krisis, dibutuhkan sistem pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang dengan standar prima ( cepat , tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses) adalah sistem pelayan publik yang dibangun secara on line dan berbasis elektronik.

Di era digital maka dasar pembelajaran dan pelatihan dapat dengan membangun Crisis Center System bagi pelatihan para peserta didik yang tetap mampu memberikan pelayanan prima adalah adanya :

1. Back Office yang dapat menjadi operation room pusat k3i ( komunikasi komando pengendalian koordinasi dan informasi).

   Back office berfungsi sebagai pusat data menuju big data system dan one stop service system.

2. Application yang berbasis artificial intelegensi yang mencakup aplikasi :

   a. Call centre

b. Comand centre

c. Monitoring system

d. Digital Map untuk pemetaan wilayah, pemetaan masalah dan pemetaan potensi dsb

e. Smart management untuk inputing data, analisa data dan produk dalam bentuk algoritma ( info grafis, info statistik, info virtual ) yang dinamis sesuai real time yang dpat diakses secara on time dan any time.

f. Sistem penegakan hukum secara elektronik ( electronic traffic law enforcement / etle ) yang didukung ” data jalan, data kendaraan bermotor, data pengemudi, data populasi publik dalam berlalu lintas dsb. Selain itu juga didukung sistem pembayaran elektronik, sistem digital record untuk TAR ( traffic attitude record) dan de merit point system untuk sistem perpanjangan SIM

g. Sistem panggilan darurat emergency / contigency system

h. Sistem pelayanan cepat ( quick response time )

i. Sistem laporan dan sharing data

j. Sistem sinergitas pelayanan publik antar pemangku kepentingan

k. Sistem akuntabilitas algoritma yang dapat menunjukkan index kualitas pelayanan publik

l. Algoritma untuk memprediksi, mengantisipasi dan solusi

m. Management media sebagai wadah untuk : informasi, komunikasi, inspirasi, edukasi, solusi, motivasi, counter issue, fun/ menghibur.

n. Sistem pengamanan data dan sistem sistem lainnya ( cyber security)

dan sebagainya.

3. Net Work atau jejaring yang berbasis IoT, kekuatan jejaring bagi konektifitas sistem sistem on line menjadi dasar pelayanan prima dan hidupnya sistem sistem lainnya.
4. Sistem updating dan up grading untuk sistem yang terus dinamis dan terus bisa ditumbuh kembangkan.
5. Petugas yang mengawaki pada back office dapat memberdayakan dan mengontrol aplikasi maupun jejaring yang ada.

   Mampu inputing data, analisa data dan menghasilkan produk serta mampu membangun jejaring.

Pelayanan publik yang prima pada smart living maupun smart mobility merupakan standar keberhasilan Crisis Centre System. Kemampuan sistem-sistem tersebut adalah untuk mampu memberikan pelayanan prima di bidang :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan

Kesemua itu dapat ditunjukan indexnya pada sistem algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang dapat diakses secara real time, on time dan any time. Analisa algoritma Crisis Centre dapat dilihat dari bagaimana :

1. Tingkat kualitas keamanan
2. Tingkat kualitas keselamatan
3. Tingkat kualitas kelancaran
4. Tingkat kualitas ketertiban
5. Tingkat kualitas pelayan di bidang LLAJ
6. Tingkat kualitas management media

7. Tingkat kecepatan penanganan masalah / quick response time nya

Ke 7 point itu nanti yg dilihat kemampuan sistem Crisis Centre dalam : Management disaster, Sistem manajemen nasional, emergency dan contigency policing :

1. Kompetensi SDM
2. Tingkat penggunaan aplikasi yang ada
3. Tingkat kepuasan masyarakat

Point point di atas menjadi landasan dari membuat standar index keteraturan sosial dalam situasi krisis, dsb. Standardisasi implementasi Crisis Centre sebagai pilar dasar profesionalisme.

Dengan standar road map akan dapat dibuat sebagai pola pola implementasi grand strategi, pengaturan atau dasar hukum hingga panduan operasionalnya maupun penyiapan sumber daya manusia yang akan mengawakinya. Standar dapat dikategorikan dalam :

1. Standardization of work input,
2. Standardization of work process dan
3. Standardization of work out put.

Melalui standardisasi akan dapat ditentukan atau dibuat model dasar, proses dan pencapaian tujuannya. Standar di era digital dibangun dalam smart management yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan dan keharusan di era digital, tentu saja hal ini juga berlaku bagi kepolisian di dalam pemolisiannya.

Pemolisian secara garis besar dapat dilihat dalam ranah kerja birokrasi maupun dalam masyarakat sebagai usaha atau upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Dengan demikian tatkala membahas teknologi kepolisian maka model teknologinya adalah untuk mendukung pekerjaan kepolisian di ranah birokrasi dan ranah masyarakat untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Sistem teknologi kepolisian merupakan suatu rangkaian atau model untuk menyatukan back office, application dan network yang berbasis artificial intellegence dan internet of things. Yang dioperasionalkan pada ranah birokrasi maupun masyarakat untuk :

1. Memetakan atau mengkategorikan apa yang menjadi variabel atas pekerjaan kepolisian
2. Dari sistem pemetaan tsb maka dibangun sistem inputing data atau sistem recognize
3. Point 1 dan 2 dapat dihubungkan secara holistik untuk membuat model model yang dibutuhkan sehingga dapat menjawab model model sistem pelayanan teknologi yang berupa prediksi antisipasi maupun solusi dlm bentuk algoritma.
4. Dari algoritma yang ada dapat menjadi landasan atau acuan pengambilan keputusan untuk sistem pelayanan kepolisian : a. Pelayanan keamanan, b. Pelayanan keselamatan c. Pelayanan hukum d. Pelayanan administrasi e. Pelayanan informasi dan f. Pelayanan kemanusiaan.
5. Pelayanan pada point 4a sd 4f dpt diimplementasikan pada komunitas maupun lalu lintas.
6. Point 1 sampai dengan 5 dapat dibangun big data system dengan one gate service system
7. Sistem teknologi kepolisian jenisnya dapat beragam sesuai dengan fungsi kepolisian atau sesuai dengan wilayahnya juga atas dampak masalah yang mengganggu atau merusak keteraturan sosial.
8. Teknologi kepolisian secara manajerial maupun operasional kesemuanya dikaitkan dengan adanya digital record yang dapat dikaitkan pada program merit system.
9. Implementasi atas teknologi kepolisian ini dilakukan pada sistem E policing.

E policing atau electronic policing merupakan model pemolisian di era digital yang berbasis pada back office aplication dan network. Dengan berbasis pada artificial intelegensi dan internet of things dan sistem yang

ada pada point 1 sd 8 merupakan basis landasannya. E policing model sistem pemolisian secara virtual yang dapat melayani 1x 24 jam dan 7 hari seminggu secara terus menerus tanpa terputus dengan standar pelayanan yang prima. Yaitu pelayanan kepolisian yang berstandar cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.

Model e policing dapat dikategorikan dalam komunitas ( harmoni pemeliharaan keamanan yg modern n manusiawi ) dan lalu lintas ( it for road safety).

Mengimplementasikan Crisis Centre prinsipnya adalah dengan membangun back office, aplication dan network. Back office berfungsi sbg operation room atau ruang kontrol pusat k3i ( komando kendali koordinasi dan informasi) sbg pusat data dan analisis.

Aplication dlm konteks E policing merupakan sistem inputing data analisa data dalam berbagai indikator yang nantinya dapat menghasilkan sistem data secara on time dan real time dalam bentuk info grafis dalam wujud indeks keamanan. Adapun network di sini adalah pada model jejaring yang menghubungkan antar aplikasi dengan back office.

Sistem operasional harmoni maupun intelejen akan di jabarkan melalui sistem pembangunan big data dengan berbasis geografi dlm sistem pemetaan wilayah sistem sistem informasi wilayah masaalah dan berbagai kepentingan maupun daei dampak masalah. Sistem big data merupakan pilar one gate service.

Pada semua sistem on line atau elektronik yang dibangun mampu menyajikan informasi yang akurat dan cepat secara on time dan real time dlm wujud info grafis.

Hasil analisa data yang dihubung hubungkan sesuai indikator masing masing sub bagian akan menghasilkan indeks keamanan dan keselamatan ( road safety) yang mampu memprediksi mengantisipasi dan memberikan solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak yg diyakini sebagai upaya pencegahan melalui langkah proaktif dan problem solving sehingga dapat mengurangi ketakutan masyarakat akan adanya ATHG ( ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) serta dapat terwujudnya keamanan dan rasa aman yang mendukung produktifitas masyarakat.

Keteraturan sosial baik di dalam komunitas maupun lalu lintas merupakan bagian dr ketahanan nasional.

Karena daya tahan suatu bangsa merupakan kemampuan berdaya tahan suatu bangsa terhadap berbagai hal yang kontra produktif pada semua aspek kehidupan dari luar maupun dari dalam dapat menggerus nasionalisme kebangsaan.

Membahas ketahanan nasional dapat dianalogikan sebagai tubuh manusia yang tidak hanya fisik tetapi juga filosofi, pandangan hidup dan berbagai upaya menata keteraturan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (gatra, setidaknya ada 8 gatra ditambah dari hukum, teknologi).

Gerusan terhadap gatra kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital yang mampu menembus ruang dan waktu bukan lagi dengan cara cara fisik semata melainkan dari cara cara virtual dapat memecah belah keamanan dalam negeri, menggerus nasionalisme. Di dalam pemanfaatan teknologi 4.0 inilah manusia bisa menjadi budak teknologi.

Gempuran sistem on line pada berbagai pelayanan publik akan menimbulkan gesekan baru. Dunia virtual akan menguasai dunia aktual. Konflik benturan peradaban pun dapat terjadi yang berdampak luas.

Dalam negara yang modern dan demokratis ketahanan nasional merupakan suatu dasar untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang. Maka diperlukan adanya produktifitas dalam semua aspek dan lini kehidupan.

Namun faktanya di dalam proses produktifitas ada ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat merusak bahkan mematikan produktifitas.

Di sinilah fungsi negara hadir untuk menata keteraturan sosial mendukung produktifitas dan mengatasi ATHG dengan menjamin keamanan dan rasa aman seluruh rakyat sebagai anak bangsa.

Yaitu dengan adanya hukum yang kuat adanya aparatur dan para pemangku kepentingan lainya yang bersinergi sehingga ATHG dari luar maupun dalam dapat diatasi bahkan dapat memberdayakan menjadi kekuatan atau potensi potensi yang mendukung produktifitas.

Crisis Centre merupakan Sentra Pelayanan Publik

1. Sentra Pelayanan Publik merupakan Operation Room, Back office sebagai Pusat K3i

2. Merupakan One Stop Service berbasis Big Data System
3. Mengacu Model Asta Siap
    a. Siap piranti lunak atau standar acuan pedoman atau panduan managerial maupun operasionalnya
    b. Siap posko ( sebagai sentra atau sebagai back office atau sbg operation room yg menjalankan fungsi k3i)
    c. Siap model pelayanan ( keamanan, keselamatan, administrasi, hukum, informasi, dan kemanusiaan)
    d. Siap sistem jejaring
    e. Siap mitra sbg soft power dan smart power
    f. Siap SDM
    g. Siap sarana prasarana
    h. Siap anggaran secara budgeter maupun non budgeter
4. Tugas pokok pada sentra pelayanan secara proaktif dan problem solving
5. Pemetaan Masalah, Pemetaan Wilayah, Pemetaan Potensi
6. Para apetugas di Sentra Pelayanan, memetakan apa yang menjadi
    a. Tugas pokoknya
    b. Memetakan permasalahan berbasis wilayah atau area
    c. Membuat model sistem sistem pelayanan secara langsung atau melalui media
    d. Membuat standar kompetensi petugas pelayanan publik
    e. Memberdayakan IT sebagai pendukungnya
7. Monitoring
    a. Monitoring laporan petugas petugas lapangan
    b. Monitoring media
    c. Monitoring CCTV

8. Komunikasi melalui call centre atau media lainnya.
    a. Menerima laporan
    b. Menerima aduan
    c. Komunikasi secara vertikal, horisontal maupun diagonal.
9. Koordinasi :

    Untuk menjembatani atau menyalurkan kepada fungsi terkait
10. Komando dan pengendalian
    a. Quick response
    b. Penanganan TKP
    c. Sistem laporan
    d. Penanganan pada situasi emergency atau kontijensi
11. Informasi

    Memberikan informasi kepada publik tentang situasi kondisi dan tentang sistem pelayanan kpd publik yg ada melalui media atau keterangan langsung.

Kemanfaatan Crisis Centre merupakan pemolisian emergency dan kontijensi di daerah atau lokasi rawan bencana. Pada saat terjadi bencana biasanya terjadi kebingungan dan banyak korban berjatuhan. Model pemolisian di daerah bencana bisa mengadopsi langkah langkah asta siap sbb :

1. Siap pilun aman nusa Masalah bencana.
2. Siap posko : Posko pusat, posko wilayah, Posko lapangan
3. Siap latihan pra operasi
4. Siap kondisi kamtibmas

    Pada saat bencana sering terjadi banyak issue yang meresahkan masyarakat sehingga perlu suasana rukun soliditas terjaga dan meminimalisir terjadinya konflik sosial.

5. Siap mitra Seluruh pemangku kepentingan siap melakukan tugas yang tergabung dalam satgas lintas stake holder
    a. Satgas penyelamatan korban
    b. Satgas pengungsian
    c. Satgas bantuan
    d. Satgas pencarian dan pendataan
    e. Satgas kesehatan
    f. Satgas bantuan atau cadangan yg selalu siaga
6. Siap SDM

    SDM disiapkan dari kalangan internal jajaran polda maupun bantuan dari berbagai wilayah. Yang akan dikoordinir dan dibagi dlm satgas satgas di atas
7. Siap sarpras/ logistik
8. Siap anggaran

Dari 8 langkah di atas. diimplementasikan dengan menyiapkan jalur jalur evakuasi yang searah dari bawah ke atas jangan sampai buntu akibat ada head to head akibat 2 arah atau lebih.

Pasukan back up dari wilayah yang aman atau tidak terkena bencana sebagai standby force yang siap digunakan setiap saat diminta bantuan. Tatkala terjadi bencana keputusan politik cepat sebagai bagian tanggap darurat dari kepala daerah yang menyatakan dan memimpin dan disiapkan anggaran kontijensi. Para petugas satgas bergerak cepat dalm tanggap darurat dan reaksi cepat di lokasi kejadian maupun di pengungsian yang siap untk melayani.

Dari masing masing satgas dapat dibentuk tim tim kecil yang berada di suatu tempat stasioner maupun mobile dari :

1. Tim kesehatan
2. Tim pangan dan air bersih
3. Tim mck
4. Tim kebersihan

5. Tim perlengkapan tenda dsb
6. Tim relawan
7. Tim rescue untk pencarian dan pendataan!
8. Tim pengamanan dsb.

Tim kecil bergerak secara fleksibel yang bergerak cepat pada semua lini. Posko diawaki petugas posko yang siaga dan siap melayani untuk: komunikasi informasi, koordinasi dan untuk komando serta pengendalian. Yang siap untuk monitoring mengevaluasi dan reaksi cepat dan siap mengoperasionalkan manajemen media.

**Smart Policing : Model Grand Strategy Polri Menuju Indonesia Emas.**

Visi besar abadi bangsa Indonesia adalah menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan visi besar ini, pemerintah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya menyusun perencanaan Indonesia Emas 2045 yang memiliki empat pilar utama yaitu:

1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan
4. pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Polri dapat berperan secara maksimal dalam mendukung negara ini untuk mencapai visi besar tersebut dengan :

1. Pemahaman dan kesadaran sebagai petugas polisi. Kesalahan dalam pemahaman bisa fatal akibatnya. Rasionalisasi tugas-tugas kepolisian memang perlu dikonsepkan secara akademik, managerial, maupun operasional sehingga dapat dijadikan framework bagi kerja polisi. Framework inilah yang akan menjadi acuan berperilaku, baik secara adminstrasi, managerial, dan/atau moral.

2. Bagaimana agar apa yang ideal sama dengan yang aktual sehingga apa yang dibuat bisa dihayati dan dijadikan acuan kerja. Pada akhirnya, bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan, namun juga diajarkan dan dilatihkan agar menjadi habit dan menjadi kesadaran serta tanggung jawab seluruh anggota kepolisian.
3. Membangun sistem kompetensi dan melakukan perubahan yang mendasar baik di bidang pembinaan maupun operasional.
4. Revitalisasi atas pelayanan prima yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan guna penguatan institusi. Implementasinya berbentuk penjabaran visi dan misi, program, peningkatan kualitas kinerja, birokrasi yang dipraktikkan melalui berbagai kreatifitas yang inovasi-inovatif.
5. Siap bekerja berdasarkan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu dengan terlebih dilakukan assesment. Penataan ini bertolak dari sistem kinerja berbasis teknologi informasi sehingga bisa cepat, tepat, akurat dan akuntabel dan informatif.
6. Membangun soliditas sebagai bagian dari budaya yang memanfaatkan kearifan lokal.
7. Membangun wadah kemitraan dengan stakeholder terkati untuk bersama- sama mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dan diterima semua pihak.
8. Membuat program-program kemitraan antara polisi dengan masyarakat maupun dengan stakeholder lainnya.

**Pengembangan Ilmu Kepolisian.**

Tantangan yang dihadapi polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memang harus dijabarkan dan dilakukan secara bertahap sehingga harapan masyarakat terwujud, adanya polisi dengan pemolisiannya yang sesuai dengan prinsip presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan), profesional, cerdas, bermoral, dan modern berbasis pada Ilmu Kepolisian yang pendekatannya antar bidang atau interdisciplinary approach (Suparlan, 2008).

Model Smart Policing sebagai Penerapan Ilmu Kepolisian dalam Grand Strategy Polri Implementasi ilmu kepolisian untuk mendukung dan menuju Indonesia Emas, dilakukan melalui kerangka smart policing, dalam membangun manajemen kepolisian yang menekankan penggunaan data dan analitik secara efektif serta meningkatkan analisis, pengukuran kinerja, dan evaluasi; meningkatkan efisiensi; dan mendorong inovasi (Coldren Jr., Huntoon, dan Medaris, 2013).

Konsep Smart Policing sendiri muncul secara formal dan resmi, pada tahun 2009, dengan diluncurkannya program penegakan hukum oleh Bureau for Justice Assistance, US Department of Justice. Model ini bertujuan untuk mendukung lembaga penegak hukum dalam membangun taktik dan strategi penegakan hukum berbasis bukti dan berbasis data yang efektif, efisien, dan ekonomis (Smart Policing Initiatives, 2021).

Inisiatif ini merepresentasikan pendekatan strategis yang membantu lembaga kepolisian mengetahui apa yang berhasil dalam inisiatif pencegahan kejahatan dan pengurangan kejahatan. Coldren, Huntoon, dan Medaris (2013) dalam penelitiannya menjabarkan smart policing ini.

Tatkala di era kenormalan baru, kebutuhan untuk menanggapi kriminalitas yang lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak keterampilan khusus, dengan meningkatnya permintaan kejahatan dunia maya, yang dihadapkan pada tantangan seputar efisiensi, efektivitas, dan pendanaan (National Police Chiefs Council & Association of Police and Crime Commissioners, 2020).

Sifat kejahatan yang tidak mengenal batas negara, serta berbagai hal yang berdampak chaos atau kontra produktif, menuntut polisi untuk bertugas dan meningkatkan pelayanannya secara profesional, cerdas, bermoral, modern, dan fungsional.

Menyikapi tantangan yang muncul, model smart policing hadir sebagai pemolisian model orkestra yang mengharmonikan antara pemolisian konvensional, pemolisian elektronik maupun pemolisian forensik.

Smart policing mengatasi berbagai masalah yang kontra produktif dan mengganggu keteraturan sosial maupun peradaban dari masalah kejahatan maupun sosial yang konvensional, masalah siber atau virtual di era digital yang memanfaatkan teknologi mutakhir, serta masalah forensik yang berdampak luas.

Sehubungan untuk menjawab tantangan di era baru ini, sistem pemolisian secara manajemen dan operasional dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan perkembangan teknologi, perubahan kondisi, serta berbagai macam risiko yang timbul dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Smart policing dapat dijabarkan antara lain :

1. Mengharmoniskan dan dapat menyatukan antar model pemolisian (policing)
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan ditingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia nyata maupun dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergency maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

Smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat, yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

Smart policing dalam implementasi conventional policing, e- policing, dan forensic policing secara konseptual ditunjukkan sebagai berikut:

1. Conventional policing

   Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas sebagai pelindung pengayom yang dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP (tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran secara konvensional diperlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya.

   Penanganan berbagai masalah dengan reaksi cepat, penangan konflik sosial yang melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik sosial, premanisme jalanan (blue collar crime), perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam.

   Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

   Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb.

   Penanganan pelayanan kepolisianyg berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan dan kompetensi conventional policing.

2. Electronic Policing (E-policing)

   E-policing merupakan program yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan merupakan bagian dari terobosan kreatif untuk menghasilkan inovasi dan kreasi dalam berbagai sistem pelayanan kepolisian baik pelayanan administrasi, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, dan pelayanan hukum, yang saling terhubung atau online yang mampu memberikan pelayanan secara virtual dan

mampu mendukung pemolisian yang konvensional (Dwilaksana, 2020). Landasan dasar E- policing adalah melalui back office (sebagai operation room atau pusat K3I: komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi).

Penerapan e-policing didukung oleh aplikasi berbasis Artificial intellegence (AI) juga jaringan sistem yang terintegrasi berbasis internet of things (IoT).

Aplikasi yang berbasis AI mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda, kendaraan,lingkungan hingga aktifititas. Melalui AI dapat dikonstruksi menjadi model untuk ditemukan algoritma yang berupa infografis, statistik, maupun info virtual lainnya.

Algoritma dapat berfungsi sebagai prediksi, antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, any time dan on time. Algoritma dapat menjadi landasan atau acuan indeks atau setidaknya sebagai potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial.

Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber (cyber cops) yang mengawaki e-policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untuk menghasilkan algoritma.

Memahami prinsip dasar di era digital dan sistem IT dan proses pembangunan big data, dan sistem terintegrasi menuju one gate service system.

Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian early warning dan problem solving yang prediktif, antisipatif, serta solutif. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management agar pemolisian secara aktual maupun virtual ada suatu sistem yang sejalan saling menguatkan atau saling mendukung.

Permasalahan perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakkan, bahkan cyber crime akan terus berkembang sehingga memerlukan polisi siber yang profesional, mampu menganalisa dan menemukan potensi kejahatan.

Kejahatan white collar crime tentu dilakukan secara teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya kaum yang memiliki kompetensi.

Dengan demikian cyber security menjadi sangat penting dan mendasar.

3. Forensic Policing

Di era disrupsi perkembangan masalah nuklir, biolgi, maupun kimia, bahkan fisika (nubika). Di sisi lain, hal-hal di bidang sosial dapat menjadi suatu masalah bagi terjaminnya keteraturan sosial.

Era post truth dengan senjata hoax juga dapat digunakan untuk menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas. Oleh sebab itu, forensic policing memerlukan kompetensi dan pengetahuan dasar tentang nubika atau pun permasalahan sosial.

Dampak atas penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika oleh penjahat yang dapat meneror atau mematikan produktivitas secara massal dan berdampak luas.

Kompetensi para petugas forensic policing secara mendasar yang berkaitan dengan konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun masalah masalah sosial yang akan dijadikan senjatanya.

Kemampuan forensik didukung dengan sistem peralatan yang dapat didukung petugas polisi siber maupun pemolisian yang konvensional.

Pelayanan di bidang forensik berkaitan pada sistem security yang dapat dikembangkan pada pengamanan pada sektor privat, industrial, publik, ecological, maupun cyber.

Smart policing menjadi model pemolisian yang senantiasa siap memberikan pelayanan kepada publik dalam berbagai situasi, juga dalam situasi emergensi maupun kontijensi sekalipun.

Sebagai wujud pemolisian yang penelitian terkini pada tingkat global mengenai bagaimana model smart policing dapat diukur dan dinilai kualitas pelayanannya yang dirumuskan pada penelitian Ekaabi et al.

Dimensi pengukuran layanan smart policing dapat dilihat dari transparansi, integritas, interaksi timbal balik antara polisi dengan masyarakat (inter activity), kecepatan dalam memberi pelayanan mengakomodasi penyelesaian masalah (responsivitas), dan kemudahan

mengakses pelayanan kepolisian (servicability) (Dimensi Kualitas Pelayanan pada Model Smart Policing Sumber: Ekaabi et al. (2020)

Smart policing juga mendukung evidence based policing yang berdasarkan riset, penelitian, dan bukti berupa data/fakta sehingga secara konseptual maupun teoritikal dengan berbagai pendekatannya dapat menjadi acuan bagi Grand Strategy Polri.

Grand Strategy Polri yang berbasis Smart Policing dapat dibangun secara konseptual, secara fisik, secara scientific, secara infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya, selain itu juga pada kurikulum dan pengajarannya, agar tetap fungsional dalam kondisi emergency/darurat sekalipun.

Mengacu pada Smart Policing Initiative (Bureau of Justice Assistance, 2012), strategi penerapan inovasi pada pemolisian dapat dilakukan dengan sistem riset dan pengukuran performa yang komprehensif; menetapkan target strategis yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kepolisian; penggunaan informasi intelijen, riset, dan sumber data lainnya sebagai dasar penerapan kebijakan dan tindakan di lapangan; melakukan transformasi dan pembenahan organisasi secara terus menerus dengan menekankan meritokrasi, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan; serta melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak/ stakeholder terkait dengan Polri dalam rangka meningkatkan inovasi dan performa kinerja kepolisian.

Di sisi lain, model smart policing menggambarkan kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepercayaan publik melalui sistem intervensi multidimensi (Afzal dan Panagiotopoulos, 2020).

Tujuan utama penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban bersatu untuk membangun kepercayaan publik.

Mekanisme inti yang menggerakkan kerangka kerja ini adalah intervensi multidimensi, yang mencakup strategi lingkungan, tindakan penegakan, dan inisiatif keterlibatan komunitas.

Intervensi ini didukung oleh berbagai proses, antara lain: konstruksi kejahatan, pendeteksian kejahatan, pengawasan otomatis, dan pemantauan ketegangan otomatis.

Masing-masing proses ini didukung oleh analisis informasi data, yang mengintegrasikan data yang diarahkan, data otomatis, dan data yang bersumber dari keramaian.

Analis memainkan peran penting dalam mengelola dan menginterpretasikan data ini, mempengaruhi semua proses utama.

Selain itu, framework ini menekankan pentingnya mempertimbangkan isu-isu hak asasi fundamental dalam melaksanakan pemolisian, memastikan bahwa upaya menjaga keamanan publik tidak melanggar hak individu.

Bagaimana hubungan informasi dan pengaruh, menunjukkan bagaimana intervensi berbasis data mendukung tujuan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik.

**Model Smart Policing Sumber: Afzal dan Panagiotopoulos (2020)**

Perubahan pola maupun model pemolisian memerlukan grand design dan grand strategi yang dapat dikatakan smart policing, yaitu harmonisasi antara conventional policing, electronic policing atau e-policing dan forensic policing, untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial bagi kemanusiaan dan pembangunan peradaban.

Implementasi Smart Policing dalam Grand Strategy Polri. Polisi dan pemolisian nya dalam perspektif perilaku organisasi sejatinya membuat harmoni dan berbagi kebahagiaan dengan terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman.

Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial.

Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktifitas.

Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan, hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

Smart policing dapat diimplementasikan melalui smart management dan smart operation yang dapat dimulai dari adanya :

1. Sistem monitoring pemetaan dan berbagai bentuk pengawasan seperti CCTV, drone, sensor yang termonitor pada back office sebagai operation room. Sistem monitoring ini dapat dilihat secara real time.

   Dari sistem monitoring yang ada, data diambil untuk menganalisa wilayah sesuai dengan pengkategorian.

2. Sistem informasi komunikasi dan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang bersifat aduan atas gangguan pelanggaran kejahatan sampai dengan hal kontijensi.

   Sistem komunikasi ini dapat dibangun melalui berbagai media sebagai penghubungnya agar mudah diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tatkala yang berkaitan dengan stakeholder lain polisi dapat menjembatani. Untuk permasalahan emergency dan kontijensi polisi dapat memberi solusi cepat.

3. Sistem reaksi cepat yang terintegrasi antara kepolisian, rumah sakit, ambulance, pemadam kebakaran, dan PLN sebagai kesatuan agar dapat bergerak secara terintegrasi dengan skala prioritas dalam menghadapi situasi darurat/emergency.

4. Patroli virtual dan aktual untk memberikan keamanan dan rasa aman bagi warga masyarakat dengan berbagai informasi dan solusinya.

5. Pelayanan publik dikerjakan secara online dan aktual untuk keamanan, keselamatan, hukum, informasi, administrasi maupun untuk kemanusiaan.

6. Melakukan pemanfaatan teknologi dalam melakukan pembenahan organisasi.

   Hal ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Schrage et al. (2024) tentang penggunaan artificial intelligence untuk melakukan penyesuaian terhadap key performance indikator bagi seluruh anggota organisasi, antara lain dengan mendefinisikan ulang sistem penilaian kinerja, menggunakan alat ukur yang dinamis,

memperbaiki tata kelola penilaian, dan meningkatkan kualitas sistem penilaian.

7. Pengimplementasian program kepolisian pada birokrasi maupun pada masyarakat. Kegiatan ini akan tertata dan terkoneksi serta terkontrol dalam sistem online.

Implementasi smart policing dalam bentuk smart management dan smart operation bagi kepolisian menjadi keunggulan bagi organisasi atas pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada dalam sistem one stop service dan berbagai model quick response time.

Implementasi Smart Policing dalam Grand Strategy setidaknya mampu diharapkan untuk:

1. Mengharmoniskan dan dapat menyatukan antar model pemolisian
2. Memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai risiko gangguan keteraturan sosial yang terjadi secara lokal maupun global
6. Mengatasi masalah keteraturan sosial dalam dunia aktual maupun virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergency maupun contingency
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

Dari point point di atas pola penangangan masalah dengan model smart policing dapat menggunakan pola asta siap yang terdiri dari:

1. Siap piranti lunak sebagai pendukung, payung hukum, pedoman, SOP, dan sistem lainnya
2. Siap posko sebagai backoffice yang berbasis AI dan IoT untuk menggerakkan berbagai aplikasi sehingga mampu menjadi pusat k3i.
3. Siap untuk menganalisa berbagai situasi dan kondisi dalam melakukan prediksi, mempersiapkan antisipasi dan solusinya.
4. Siap SDM yang mengawaki sebagai yang mampu menghasilkan produk, analisis, dan kebijakan.
5. Siap jaringan sampai ke bagian terkecil yang berbasis wilayah, berbasis kepentingan, fungsi, hingga yang berbasis dampak masalah.
6. Siap mitra sebagaivsoft power untuk menggerakkan berbagai tindakan preemtif preventif, represif hingga rehabilitasi
7. Siap logistik sebagai sarana prasarana yang berbasis IT untuk perorangan, kelompok, maupun kesatuan.
8. Siap anggaran secara budgeter maupun non-budgeter.

# PEMETAAN PERLAMBATAN DAN ANALISA DAMPAK KEMACETAN LALU LINTAS [80]

Perlambatan merupakan situasi/kondisi yang menyebabkan arus lalu lintas tidak lancar, tidak sesuai standar batas kecepatan minimal yang berdampak terjadinya kemacetan. Tatkala terjadi kemacetan maka tingkat kepadatan arus lalu lintas semakin meningkat, dari bergerak merayap hingga berhenti total. Perlambatan-perlambatan yang tidak segera tertangani atau dibiarkan akan terjadi penumpukan,semkin menumpuk dan tidak teratasi terjadilah kemacetan.

Perlambatan yang berdampak kemacetan dapat dipetakan dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Jalan, dikarenakan adanya : a. Kerusakan, b. Perbaikan, c. Pembangunan, d. Penyempitan (bottle neck), e. Persimpangan, f. Tanjakan, g. Kualitas dan kapasitas jalan, h. Fasilitas dan sistem-sistem pendukung jalan, i. Persimpangan, j. U-turn, h. Tidak ada lajur pejalan kaki, j. Pemanfaatan jalan selain untuk lalu lintas (parkir, pasar tumpah, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya).
2. Lingkungan sekitar jalan: a. SPBU, b. Rest area, c. Pemukiman, d. Pasar, e. Mall, f. Kawasan industri, g. Tempat ibadah, h. Sekolah, i. Tempat hiburan, j. Terminal/ pelabuhan, bandara, k. Perkantoran dan sebagainya.
3. Kendaraan bermotor (KBM) : a. Rusak namun dipaksakan beroperasional, b. Tidak dapat dioperasionalkan secara optimal/ tidak sesuai standar (tua, modifikasi,dan sebagainya) , c. Mogok, d. Tidak sesuai peruntukan e. Pecah ban, f. Lebih muatan.

80 https://transindonesia.co/2024/09/17/pemetaan-perlambatan-dan-analisa-dampak-kemacetan-lalu-lintas/

4. Perilaku pengemudi : a. Tidak berkonsentrasi pada kendaraan bermotor yang dikemudikan (menggunakan HP, mengobrol dengan penumpang/pengemudi lainya), b. Berhenti/Parkir sembarangan, c. Menaikan/menurunkan sembarangan, d. Tidak memiliki standar kompetensi, f. Melakukan pelanggaran lalu lintas lainya.
5. Pengguna jalan lainya : a.PK5, b. Pejalan kaki, c. Menyeberang sembarangan, d. Pak ogah, pedagang asongan, gepeng, pengamen, e. Demo, f. Konflik antar warga, g. Pengguna kendaraan tidak bermotor dan sebagainya.
6. Alam : a. Cuaca, (kabut, mendung, hujan dan sebagainya), b. Bencana alam (banjir, longsor, gempa, angin puting beliung, Pohon tumbang, dan sebagainya)
7. Kerusakan infrastruktur : a. Listrik mati, b. Sistem-Sistem pendukung yang rusak sehingga tidak melakukan pengawasan/ kontrol, c. Gedung /bangunan roboh.
8. Kecelakaan lalu lintas : a. Lintasan sebidang, b. Pada jalur yang sama, c. Pindah jalur, d. Merusak infrastruktur dan sebagainya.
9. Sistem pelayanan publik : a.gate pembayaran tol yang manual, b. Gate parkir/ parkir manual, c. Ketidak profesionalan petugas-petugas dalam menangani masalah (konvensional,parsial, manual).

Dalam menangani kemacetan ke 9 point harus diatasi secara terpadu dan sistemik dan dinamis dengan :

1. Pemantauan situasi dari point-point diatas yang terpetakan (peta digital/ setidaknya manual) secara berkala dan terus menerus melalui sistem-sistem yang dikendalikan dari back office, Sehingga terus termonitor faktor-faktor perlambatan yang terjadi.
2. Dari hasil pemantauan tersebut dapat dihitung tingkat kepadatan arus dan kondisi kemacetan, yang dianalisa dan data yang ada dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan untuk memerintahkan petugas-petuga lapangan untuk mengatasi

dengan cara : a. Mengalihkan arus untuk mengurangi tingkat kepadatan (jalur alternatif), b. Turjagwali untk membuka sumbatan-sumbatan karena faktor- faktor pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainya.

3. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainya untuk melakukan percepatan pelayanan.
4. Memberi informasi situasi terkini agar warga tidak terjebak dan dapat mempersiapkan diri atau mengambil pilihan.
5. Melakukan penanganan-penanganan emergency bila terjadi situasi yang ekstrem (contra flow, membuka gerbang tol secara gratis, menutup rest area/SPBU, melakukan pelayanan-pelayanan darurat lainya)

Dampak Kemacetan adalah masalah-masalah sosial yang kontra produktif antara lain :

1. Kehilangan waktu.
2. Timbulnya konflik antar sesama pengguna jalan, dengan petugas.
3. Terjadinya perilaku-perilaku menyimpang (pelanggaran lalu lintas/saling serobot, membuang sampah sembarangan, pengemudi kendaraan bermotor dari tidak konsentrasi sampai dengan tidur di jalan, parkir sembarangan, dan sebagainya.
4. Tindakan pengerusakan.
5. Masalah kesehatan.
6. Pedagang asongan.
7. Kejahatan-Kejahatan di jalan raya.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, tatkala di dalamnya banyak perlambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan tidak tertangani dengan profesional, cepat/lambat akan menjadi kemacetan. Kemacetan merupakan sumbatan urat nadi yang juga berarti menjadi kontra produktif. Apakah ini bias dikatakan gejala stroke pada kehidupan? Mungkin bias demikian.

Maka lalu lintas semestinya aman, selamat, tertib lancar, yang tertuang dalam potret kamseltibcarlantas / dalam indeks keamanan, keselamatan, ketertiban (karena lalu lintas juga sebagai cermin budaya bangsa dan cermin tingkat modernitas ) tingkat kepatuhan dan sistem-sistem rekayasa lalu lintas dalam menangani perlambatan-perlambatan tersebut.

# DATA SECURITY DAN PROTOKOL DATA [81]

Era digital, era revolusi industri 4.0 data menjadi kekuatan basisnya. Sistem yang dibangun melalui big data system yang mencakup : sistem inputing data, sistem analisa data, sistem sharing data.

Data yang dipercayakan kepada kepolisian menjadi tugas tanggung jawab dan kewajiban untuk : aman dari berbagai masalah dan dapat digunakan sebagaimana yang semestinya. Oleh sebab itu sistem cyber security menjadi bagian penting untuk mengamankan, menggunakan, mengontrol, dan mengatasi masalah hingga mempertanggungjawabkan atas data.

Sistem analisa data merupakan bagian penting untuk menghasilkan suatu algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya sebagai prediksi, antisipasi yang merupakan solusi. Sistem analisa data yang berbasis AI akan membantu melihat berbagai masalah dalam suatu model yang dapat digunakan sebagai dasar pola pemolisiannya. Data yang dianalisa merupakan data intellegent sebagai bagian wujud profesionalisme yang mampu memberikan pelayanan prima. Di samping itu juga untuk menunjukkan tugas dan kewajibannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan HAM.

Data menjadi bagian dari sistem keteraturan sosial, perlindungan, pengayoman dan pelayanan maupun penegakan hukum. Yang spiritnya dapat ditunjukan bahwa perjuangan polisi untuk kemanusiaan dalam membangun keteraturan sosial yang menjadi ikon peradaban, yang dapat dikategorikan sebagai upaya untuk :

1. Mencegah mengatasi pelanggaran, ancaman, hambatan, perusakan bahkan pembunuhan produktifitas maupun hal hal lain yang dapat dikatakan kontra produktif.

81 https://transindonesia.co/2024/09/17/data-security-dan-protokol-data/

2. Memberikan perlindungan, pemgayoman, pelayanan kepada masyarakat, komunitas, maupun pribadi yang mempercayakan datanya kepada kepolisian pengguna.
3. Membangun budaya data
4. Adanya kepastian atas terjaminnya data yang berada di kepolisian.
5. Memberikan edukasi melalui big data system.

Wujud pemberdayaan data dibangun suatu protokol data yang merupakan standar data berdasar kategorinya untuk : perlindungan pengayoman dan pelayanan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terwujud dalam suatu keteraturan sosial.

Sistem inputing data dan analisa data distandarkan melalui sistem analisa yang dapat digunakan sebagai alat bukti permukaan yamg cukup. Sebagai contoh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bahwa segala inputing gambar yang masuk ke back office memenuhi standar "etle" sebagai alat bukti bahwa si pelanggar betul betul telah melakukan pelanggaran. Sistem elektronik merupakan sistem on line yang saling terhubung atau tintegrasi. Secara konseptual integrasi sistem digital dapat dikatan sebagai suatu wujud konstruksi imajinatif yang dibantu AI sehingga dapat menghasilkan algoritma yang dapat dikembangkan menjadi suatu indeks.

Sistem sharing data merupakan suatu kewajiban yang pengaksesannya dapat secara berjenjang atau bertingkat. Sebagai contoh pengkategorian :

1. Data rahasia yang hanya diijinkan diakses secara terbatas dengan persyaratan tertentu.
2. Data untuk kepentingan penelitian maupun akademik
3. Data yang dapat diakses publik secara terbatas dengan persyaratan tertentu
4. Data yang dapat publik secara luas

Model bagi protokol data bervariasi sesuai tingkat kerahasiaan dan kebutuhannya. Ada yang dapat diakses secara luas sepanjang waktu

ada yang dalam waktu yang terbatas oleh orang atau kelompok tertentu dengan berbagai persyaratanya. Protokol data merupakan suatu bentuk pelayanan sekaligus pertanggungjawaban.

Point Penting Protokol Data setidaknya mencakup :

1. Data, Keuatan dan Sumber Daya di era digital
2. Data wujud Akuntabilitas Kinerja
3. Data, Refleksi tingkat Profesionalisme
4. Data, landasan untuk Memprediksi, Mengantisipasi dan Memberi Solusi
5. Data, Acuan dan Landasan Sinergitas antar pemangku kepentingan
6. Data, untuk Kontrol dan Auditing
7. Data sebagai dasar Kajian maupun Riset
8. Data, panduan Pelayanan Publik
9. Data sebagai acuan untuk : Pencegahan, Perbaikan, Peningkatan Kualitas Kinerja maupun untuk Pembangunan
10. Data, sebagai dasar Edukasi dan Sosialisasi.

Sistem sistem data yang dimunculkan dalam algoritma merupakan suatu akuntabilitas secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial.

Algoritma secara singkat dapat dipahami sebagai pola yang berulang secara terstruktur dari waktu ke watu untuk menghadapi sesuatu fenomena. Wujud algoritma dapat berupa info grafis, info statistik atau info virtual lainnya. Yang dapat diisi atau dimainkan dalam suatu komunikasi, informasi secara langsung atau media. Di era post truth media menjadi ruang komunikasi dan informasi yang tanpa sekat batas ruang dan waktu. Apa saja, di mana saja, kapan saja bahkan siapa saja bisa. Konten menjadi penting untuk berbagai tujuan. Operasi intelejen pun bisa memanfaatkannya.

Issue yang diusung dapat untuk menstimuli, memotivasi, memberi solusi sampai memprovokasi. Algoritma dapat dimainkan sesuai

kebutuhan atau keinginan si pembuatnya. Permainan algoritma berbasis pola waktu. Baik maupun buruk sesuatu yang menjadi latar belakang yang polanya sama untuk menggiring opini publik. Permainan algoritma media bisa seperti senjata cakra yang terus berputar mencari sasaran. Apa yang di sasar tentu bukan satu bisa dua, tiga atau lebih. Data menjadi pilar algoritma untuk membuat konten. Sistem analisa dan pengolahan menjadi berbagai produk dalam issue yang akan di share. Algoritma di media sosial bagai kilat " clap " singkat padat berulang dan terus dibarukan dari waktu ke waktu.

Kekuatan algoritma dalam mempengaruhi opini publik dilihat daru berapa banyak yang melihat, yang menyukai, yang menshare kembali atau memberi tanda tanda lainnya. Semakin banyak hal di atas dilakukan para netizen maka algoritma akan semakin kuat mempengaruhi dan menggiring opini publik. Algoritma kesahihannya bukan pada benar atau salah, bukan baik atau buruk melainkan berapa banyak yang mempercayai. Era digital data dan sistem sistem pada back office, application dan net work saling terkait. Kekuatan ada karena ada energinya, algoritma kuat karena ada soft power dan smart powernya.

# ALGORITMA PADA SMART CAMPUS [82]

Mengapa algoritma begitu penting dalam smart campus? Karena smart campus akan dilihat dari berbagai standarnya untuk mencapai tujuannya dalam info grafis, info statistik maupun info info virtual lainnya.

Smart campus atau kampus yang menjadi pusat unggulan maka algoritmanya dapat dilihat dari adanya :

1. Standar lingkungan kampus yang terkait dengan kampus sehat, kampus asri yang seni dan nuansa humanisme maupun akademiknya nampak kuat.
2. Standar edukasi secara formal maupun non formal, yang ditunjukan dari kualitas:
    a. Guru gurunya/ Dosen dosennya/ Nara sumbernya
    b. Kurikulumnya
    c. Proses belajar mengajar, pelatihan dan pembinaannya maupun sistem transformasinya
3. Standar literasi yang mencakup :
    a. Produk produk aktual maupun virtual,
    b. Program program unggulan untuk dialog peradaban
    c. Pembinaan dalam olah jiwa, olah rasa maupun olah raga
    d. Uji produk dalam debat akademik maupun debat publik yang meliputi pengetahuan : aturan/peraturan perundang-undangan, keilmuan, model pemolisian, teknis proaktive and problem solving, keteraturan sosial di bidang keamanan keselamatan, dan sebagainya)

82 https://lovebandung.com/index.php/2024/09/17/algoritma-pada-smart-campus/

e. Model simulasi, studi kasus untuk situasi krisis, emergency and contigency, sistem management nasional, sistem pengamanan kota, smart city, disaster management dsb

f. Uji praktek dalam negeri maupun luar negeri untuk menggabungkan profesionalisme, kecerdasan, moralitas kesadaran tanggung jawab, bakti sosial dan bakti masyarakat. kompetensi.

4. Penegakkan hukum dan keadilan atas berbagai kejahatan di era kenormalan baru.
5. Data dan sistem digital record maupun pengamanan data.
6. Merit point system untuk berbagai perpanjangan perijinan maupun auditing.
7. Program program unggulan sebagai sistem pendukungnya.
8. Smart class yang mendukung research and development.
9. Literation award.
10. Expo dari point 1 sd 9

Di era digital, model pemolisiannya pada smart policing yang harmoni antara conventional policing, electrobic policing yang berbasis virtual pilarnya on line ( saling terhubung ) dengan sistem elektronik ( e policing)/ pemolisian di era digital maupun dengan forensic policing. Dengan membangun :

1. Back office sebagai operation room
2. Aplication yang berbasis AI
3. Netvwork yang berbasis IoT
4. Smart management dan smart operation sebagai basis big data system dan one stop service
5. Diawaki polisi siber (cyber cops) dan polisi forensik (Forensic cops)
6. Hasil kinerjanya ditunjukan melalui Algoritma (dalam info grafis, info statistik dan info virtual)

# FILSAFAT ILMU KEPOLISIAN [83]

1. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang yang dapat dikembangkan dalam berbagai pendekatannya
2. Mempelajari dan mengembangkan teori dan konsep yang berkaitan dengan:
    a. Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial
    b. Penegakan Hukum dan keadilan
    c. Kejahatan dan Penanganannya
    d. Polisi dan Pemolisiannya
    e. Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
    f. Teknik dan teknis dasar umum dan khusus kepolisian
3. Paradigma ilmu kepolisian dapat dilihat secara :
    a. Filosofis :

       Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.
    b. Geo politik dan geo strategis

       Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial
    c. Yuridis

       Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
    d. Globalisasi dan modernisasi

       Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

83 https://lovebandung.com/index.php/2024/09/17/filsafat-ilmu-kepolisian/

e. Akademis,

Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan ( S1, S2 dan S3), pengembangan kepemimpinan dan majerial, kompetensi khusus dan fungsional (cyber, forensik, untuk hal hal yang bersifat ekstra ordinary)

f. Pragmatis,

Ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi: keselamatan (safety) contoh ( safety driving centre), keamanan ( private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security)

4. Pengembangan pola pengajarannya melalui Fakultas :
   a. Polisi dan pemolisian
   b. Manajemen Keamanan
   c. Manajemen Keselamatan
   d. Intelejen
   e. Hukum dan penegakan hukum
   f. Penyelidikan dan penyidikan
   g. Forensik
   h. Siber dan teknologi kepolisian
   i. Kajian konflik sosial
   j. Kajian Terorisme
   k. Kajian kejahatan luar biasa
   l. Teknologi Kepolisian
5. Kurikulum dan pengajarannya dapat dikategorikan sbb :
   a. Pengajaran dasar ilmu kepolisian
      1) Filsafat ilmu pengetahuan
      2) Etika Publik
      3) Metodologi Penelitian
   b. Pengajaran pokok ilmu kepolisian
      1) Ilmu ilmu sosial

2) Ilmu hukum, penegakan hukum dan keadilan
3) Ilmu kriminologi
4) Ilmu administrasi dan operasionalnya
5) Ilmu teknologi informasi
6) Hubungan antar suku bangsa (konteks masyarakat Indonesia yang multikultural)
7) Ilmu humaniora dan sebagainya.

c. Kapita Selekta yang berkaitan dengan isu isu penting dan aktual yang terjadi dalam masyarakat antara lain :

1) Idiologi
2) Politik
3) Ekonomi
4) Sosial budaya
5) Keamanan
6) Pertahanan dan sebagainya.

6. Membangun pendukung pengembangan ilmu kepolisian melalui :

a. Pusat penelitian dan pengkajian
b. Lembaga lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian
c. Forum atau asosiasi dosen pengajar, alumni maupun pemerhati ilmu kepolisian
d. Penerbitan buku
e. Jurnal ilmiah
f. Laboratorium sosial

7. Pengembangan pendidikan untuk kompetensi khusus dan pragmatis yang dapat dikembangkan antara lain :

a. Safety driving centre
b. Security training centre
c. Sekolah penyidik
d. Pendidikan ilmu kepolisian level D1 dan D3

e. Kursus kursus singkat

f. Pelatihan pelatihan bagi master trainer dan trainer dan sebagainya.

8. Dosen yang memiliki integritas dan kualitas sebagai : peneliti, penulis, guru, dan ikon akademik dsb

9. Pengembangan Smart Policing yang mencakup : conventional policing, electronic policing dan forensic policing

10. Pemberdayaan media melalui manajemen media maupun intelejen media.

Ilmu kepolisian dalam mendukung polisi dalam pemolisiannya profesional, cerdas, bermoral dan modern melalui :

1. Pemahaman dan kesadaran akan polisi sebagai petugas, sebagai fungsi maupun sebagai institusi. Kesalahan dalam pemahaman bisa fatal akibatnya. Rasionalisasi tugas-tugas kepolisian memang perlu dikonsepkan secara akademik, managerial, maupun operasional sehingga dapat dijadikan framework bagi kerja polisi. Framework inilah yang akan menjadi acuan berperilaku, baik secara adminstrasi, managerial, dan/atau moral.
2. Bagaimana agar apa yang ideal sama dengan yang aktual sehingga apa yang dibuat bisa dihayati dan dijadikan acuan kerja. Pada akhirnya, bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan, namun juga diajarkan dan dilatihkan agar menjadi habit dan menjadi kesadaran serta tanggung jawab seluruh anggota kepolisian.
3. Membangun sistem kompetensi dan melakukan perubahan yang mendasar baik di bidang pembinaan maupun operasional.
4. Revitalisasi atas pelayanan prima yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan guna penguatan institusi. Implementasinya berbentuk penjabaran visi dan misi, program, peningkatan kualitas kinerja, birokrasi yang dipraktikkan melalui berbagai kreatifitas yang inovasi-inovatif.
5. Siap bekerja berdasarkan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu dengan terlebih dilakukan assesment. Penataan ini bertolak dari sistem kinerja berbasis teknologi informasi sehingga bisa cepat,

tepat, akurat dan akuntabel dan informatif.

6. Membangun soliditas sebagai bagian dari budaya yang memanfaatkan kearifan lokal.
7. Membangun wadah kemitraan dengan stakeholder terkati untuk bersama- sama mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dan diterima semua pihak.
8. Membuat program-program kemitraan antara polisi dengan masyarakat maupun dengan stakeholder lainnya.

**Pengembangan Ilmu Kepolisian**

Tantangan yang dihadapi polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memang harus dijabarkan dan dilakukan secara bertahap sehingga harapan masyarakat terwujud, adanya polisi dengan pemolisiannya yang sesuai dengan prinsip presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan), profesional, cerdas, bermoral, dan modern berbasis pada Ilmu Kepolisian yang pendekatannya antar bidang atau interdisciplinary approach (Suparlan, 2008). Pengembangan ilmu kepolisian paradigmanya dapat dilihat secara :

1. Filosofis:

   Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.

2. Geo politik dan geostrategis

   Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial

3. Yuridis

   Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

4. Globalisasi dan modernisasi

   Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

5. Akademis

   Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan (S1, S2 dan S3), pengembangan kepemimpinan

dan manajerial, kompetensi khusus dan fungsional (cyber, forensic, extraordinary crime, counter-terrorism)

6. Pragmatis

   Ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi :keselamatan (safety, contoh: safety driving centre), keamanan (private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security),

7. Pengembangan ilmu kepolisian, pola dan pengajarannya dapat dikembangkan melalui Fakultas :
   a. Polisi dan pemolisian
   b. Manajemen Keamanan
   c. Manajemen Keselamatan
   d. Intelejen
   e. Hukum dan penegakan hukum
   f. Penyelidikan dan penyidikan
   g. Forensik
   h. Siber dan teknologi kepolisian
   i. Kajian konflik sosial
   j. Kajian Terorisme
   k. Kajian kejahatan luar biasa
   l. Teknologi Kepolisian dan sebagainya.

Ilmu kepolisian sebagai ilmu interdisiplin membantu meningkatkan profesionalisme kepolisian dan meningkatkan legitimasinya. Perkembangan ilmu kepolisian sebagai suatu disiplin ilmu yang mapan memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan strategi kepolisian yang efektif, sah, dan berdasarkan bukti empiris (Nägel dan Vera, 2020). Hal ini, pada akhirnya, akan meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kepolisian.

**Model Smart Policing sebagai Penerapan Ilmu Kepolisian dalam Grand Strategy Polri**

Implementasi ilmu kepolisian untuk mendukung dan menuju Indonesia Emas, dilakukan melalui kerangka smart policing, dalam

membangun manajemen kepolisian yang menekankan penggunaan data dan analitik secara efektif serta meningkatkan analisis, pengukuran kinerja, dan evaluasi; meningkatkan efisiensi; dan mendorong inovasi (Coldren Jr., Huntoon, dan Medaris, 2013). Konsep Smart Policing sendiri muncul secara formal dan resmi, pada tahun 2009, dengan diluncurkannya program penegakan hukum oleh Bureau for Justice Assistance, US Department of Justice. Model ini bertujuan untuk mendukung lembaga penegak hukum dalam membangun taktik dan strategi penegakan hukum berbasis bukti dan berbasis data yang efektif, efisien, dan ekonomis (Smart Policing Initiatives, 2021). Inisiatif ini merepresentasikan pendekatan strategis yang membantu lembaga kepolisian mengetahui apa yang berhasil dalam inisiatif pencegahan kejahatan dan pengurangan kejahatan. Coldren, Huntoon, dan Medaris (2013) dalam penelitiannya menjabarkan smart policing ini. Kemajuan ilmu kepolisian, yang ditunjukkan oleh ciri-ciri berikut:

1. Digerakkan secara lokal dan mengedepankan pendekatan berbasis wilayah.
2. Berfokus pada ilmu pengetahuan dan penelitian dalam mempelajari efektivitas kepolisian.
3. Bersifat multi dimensi.
4. Berorientasi padahasil dan efektivitas strategi yang diterapkan.
5. Berupaya terus menerus untuk berinovasi.

Di era kenormalan baru, kebutuhan untuk menanggapi kriminalitas yang lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak keterampilan khusus, dengan meningkatnya permintaan kejahatan dunia maya, yang dihadapkan pada tantangan seputar efisiensi, efektivitas, dan pendanaan (National Police Chiefs Council & Association of Police and Crime Commissioners, 2020). Sifat kejahatan yang tidak mengenal batas negara, serta berbagai hal yang berdampak chaos atau kontra produktif, menuntut polisi untuk bertugas dan meningkatkan pelayanannya secara profesional, cerdas, bermoral, modern, dan fungsional.

Menyikapi tantangan yang muncul, model smart policing hadir sebagai pemolisian model orkestra yang mengharmonikan antara pemolisian konvensional, pemolisian elektronik maupun pemolisian forensik.

Smart policing mengatasi berbagai masalah yang kontra produktif dan mengganggu keteraturan sosial maupun peradaban dari masalah kejahatan maupun sosial yang konvensional, masalah siber atau virtual di era digital yang memanfaatkan teknologi mutakhir, serta masalah forensik yang berdampak luas.

Sehubungan untuk menjawab tantangan di era baru ini, sistem pemolisian secara manajemen dan operasional dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan perkembangan teknologi, perubahan kondisi, serta berbagai macam risiko yang timbul dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Smart policing dapat dijabarkan antara lain:

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian(policing)
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yangbmengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan ditingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia nyata maupun dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergency maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern.

Smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat, yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

# SMART CAMPUS DAN REFORMASI PENDIDIKAN [84]

Pendidikan apapun latar belakangnya tujuannya adalah mendidik. Mendidik dalam konteks pendidikan adalah untuk memanusiawikan manusia atau semakin manusiawinya manusia. Pendidikan landasan utamanya moralitas yang dibangun dengan pendekatan kesadaran. Pendidikan yang keras dan tegas untuk mampu menghadapi berbagai masalah atau tantangan atas hidup atau kehidupan sekalipun ditujukan bagi kemanusiaan. Pendidikan yang di luar bagi semakin manusiawinya manusia sejatinya bukan pendidikan. Pendidikan yang ada unsur balas dendam atau unsur kebrutalan itupun merusak peradaban karena akan menghasilkan kaum luka batin yang berdampak pada berbagai penyimpangan atas kemanusiaan. Pendidikan dimulai dari gurunya atau pengajarnya. Peran guru berpengaruh besar atas hasil didik dari pendidikan. Kualitas guru bukan sebatas pada intelektualnya namun juga moralitasnya.

Guru menjadi kunci bagi keberhasilan suatu pendidikan. Pendidikan yang mendidik setidaknya dapat dilihat dari :

1. Lembaga atau wadah yang merupakan institusi pendidikan
2. Implementasi atas visi dan misi pendidikan yang dilaksanakan berbasis pembangunan karakter secara konsisten dan konsekuen
3. Kualitas guru sebagai tenaga pengajar adalah orang orang yang mampu menjadi ikon dan layak dijadikan panutan atau pikiran perkataan dan perbuatannya
4. Sistem pengajaran pelatihan dan pengasuhannya yang berbasis pada standar standar pendidikan yang universal dan global walaupun juga menggunakan kearifan lokal

84 https://lovebandung.com/index.php/2024/09/18/smart-campus-dan-reformasi-pendidikan/
https://transindonesia.co/2024/09/21/smart-campus-dan-reformasi-pendidikan-2/
https://lovebandung.com/index.php/2024/09/21/smart-campus-dan-reformasi-pendidikan-2/

5. Kurikulum pelajarannya berbasis pada pencerdasan intelektual, emosional dan sosial
6. Pola pengajarannya dibangun dengan landasan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
7. Infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya atau sarana prasarananya untuk mendukung proses belajar berlatih dengan pendekatan holistik dan sistemik yang dinamis sesuai dengan kebutuhan kekinian
8. Tradisi dan nuansa akademis yang membudaya dlm lingkungan lembaga pendidikan
9. Ada wadah bagi penampungan pemikiran dan ide ide kreatif seperti jurnal maupun penerbitan
10. Kualitas rekrutmen peserta didik berbasis pada kejujuran transparan akuntabilitas secara : moral, secara administrasi, secara hukum yang berbasis pada standar nasional maupun internasional
11. Para peserta didik dapat merasakan dirinya tercerahkan
12. Prestasi peserta didik sebagai hasil didik yang fungsional dan mampu menjadi ikon yang berkarakter
13. Pengakuan dan apresiasi dari masyarakat luas atas prestasi dan kinerjanya yang profesional cerdas bermoral dan modern

Proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan melalui cara apa saja. Di era digital labirin ruang dan waktu terbuka lebar tidak lagi tersekat sekat. Mind set pendidikan harus mulai dirubah dan bukan semata mata pada ruang ruang kelas dan menghafal atau mendengar apa yang dikatakan para guru nya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di era digital dan kehadiran artificial intellegent akan menggeser pola pembelajaran. Lembaga pendidikan untuk tetap dapat menjamin kualitas atau hasil didik yang cerdas dan tercerahkan maka proses belajar dibangun atas dasar spiritualitas, moralitas, kesadaran, tanggung jawab, disiplin dan budaya. Baik dari penyelenggara atau lembaga pendidikan maupun para guru sampai kepada sistem pengajarannya. Kunci. Bagaimana mampu

merubah mind set program belajar mengajar dari cara konvensional ke arah kekinian yang boleh dikatakan aktual maupun virtual. Reformasi pendidikan dapat dilakukan dengan menyiapkan atau membangun :

1. Lembaga pendidikan mampu berwibawa dan menunjukkan kualitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan atau proses belajar dengan baik dan benar
2. Para dosen atau Guru guru sebagai pilar lembaga pendidikan berkualitas dan memiliki kompetensi akademik serta mampu memotivasi mahasiswa berani kreatif dan mengajarkan cara berpikir yang proaktif problem solving untuk menemukan sesuatu kebaruan dan melakukan pembaruan
3. Dosen atau guru menjadi teladan dan didudukkan porsinya sebagai ikon pembangun peradaban, yang mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Fasilitas pendidikan membuat sistem back office, application dan net work yang mampu memberikan dukungan pendidikan secara virtual ada literasi ada sistem coach sistem diskusi dan belajar secara virtual serta ada sistem pengawasan atau kontrol yang mampu menghandle semua kegiatan belajar mengajar secara aktual maupun virtual
5. Para mahasiswa belajar dengan cara berpikir kreatif, inovatif, problem solving dan visioner
6. Proses belajar mengajar yang berbasis pada : keilmuan, pemahaman dan pengembangan teoritikal dan konseptual, studi kasus , problem solving, pemikiran yang berkaitan kebaruan dan pembaruan
7. Ada forum diskusi sebagai basis dialog peradaban dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang kekinian
8. Ada penerbitan untuk menampung karya para dosen atau guru dan mahasiswa secara elektronik atau cara konvensional
9. Ada jurnal ilmiah on line dan penerbitan e book yang mendukung pembangunan literasi

10. Ada kerjasama dalam maupun luar negeri untuk kegiatan akademik seperti Penelitian ilmiah, debat publik, bedah buku, simposium, workshop dll
11. Ada ikatan alumni sebagai wadah dialog dalam membangun jejaring sosial maupun pengembangan ilmu pengetahuan juga penguatan lembaga pendidikan
12. Aktif dalam kegiatan forum akademis nasional maupun internasional bench mark seminar work shop dan studi / kajian nasional maupun internasional
13. Ada publikasi proses pengajarannya ke media yang dapat dijadikan referensi dan literasi secara on line
14. Menjadi anggota forum atau asosiasi akademik nasional maupun internasional

Pendidikan di era digital tetap mampu mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, pencerahan maupun transformasi ilmu pengetahuan, kaderisasi dan pembangunan peradaban.

Smart campus mendukung adanya kepercayaan kepada publik. Untuk mendapatkan kepercayaan publik, lembaga pendidikan diharapkan melalui penerapan smart campus setidaknya hasil didiknya mampu :

1. Sebagai petugas polisi yang profesional (ahli)
2. Pikiran, perkataan dan perbuatan serta kebijakannya cerdas (kreatif atau inovatif)
3. Apa yang dilakukan sebagai pemimpin moralitas ditunjukan dalam upaya membangun : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
4. Visioner dan modern yang ditunjukan mau dan mampu melakukan perubahan yang dinamis
5. Kebijakan yang dilakukan menunjukan sebagai langkah langkah anti korupsi
6. Dalam menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab

transparan yaitu terukur dan jelas pentahapannya

7. Pelaksanaan tugasnya akuntabel dapat dipertanggungjawabkan secara: moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial
8. Kebijakannya berbasis data dan informatif yang menuju pada one stop service berbasis pada sistem big data
9. Apa yang menjadi pelayanan publik mudah diakses, kapan saja di mana saja
10. Standar pelayanan publik setidaknya memenuhi unsur: cepat, tepat, akurat.

proses belajar mengajar dalam Smart Campus melalui dialog peradaban untuk mentransformasi dalam suatu komunikasi, untuk:

1. Membangun kemitraan,
2. Memahami,
3. Membimbing maupun mencerahkan,
4. Mencari akar masalah maupun menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Semua itu kembali pada keutamaan polisi dalam pemolisiannya bagi : Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

Smart Campus dalam mereformasi Lembaga Pendidikan kepolisian melihat polisi sebagai : Petugas, Fungsi dan Institusi. Yang menunjukan passionnya dalam pemolisiannya :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan
2. Polisi sebagai pembangun peradaban
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan
5. Pemolisiannya menunjukkan tingkat dan kualitas : profesional, cerdas bermoral dan modern yabg dilandasi : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing
7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum

8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM
9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial
10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Harapannya para alumni Lemdiklat Polri di masa depan memiliki keunggulan sbb:

1. Memiliki karakter kepemimpinan transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme
3. Memiliki pemahaman keutamaan polisi dalam pemolisiannya
4. Memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emerjensi maupun kontijensi
6. Memiliki keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu
7 .Memiliki kesiapan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini
8. Memiliki kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik
9. Mampu menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern
10. Mampu membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional.

# UNTUK APA ILMU KEPOLISIAN BAGI POLRI? [85]

Polisi dapat di lihat sebagai : Petugas, Fungsi dan Institusi. Polisi bekerja dalam pemolisian pada ranah birokrasi dan masyarakat.

Manusia sebagai mahkluk sosial dalam hidup dan kehidupannya untuk bertahan dan tumbuh berkembang memerlukan adanya produktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Maslow kebutuhan manusia mencakup:

1. Kebutuhan Fisiologis
2. Kebutuhan Keamanan dan Rasa Aman
3. Kebutuhan Sosial
4. Kebutuhan Penghargaan
5. Kebutuhan Aktualisasi

Hidup dan kehidupan penuh dengan tantangan, hambatan dan ancaman yang bisa menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas

Ancaman bagi hidup dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara setidaknya :

1. Faktor Alam
2. Faktor manusia

85 https://anakmedanbung.com/2024/10/06/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://transindonesia.co/2024/10/06/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://dailykepri.com/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://abnnews.id/2024/10/06/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://www.merdekanews.co/read/32400/Untuk-Apa-Ilmu-Kepolisian-bagi-Polri
https://asiapelago.com/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://iknone.com/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://polisiindonesia.id/2024/10/06/cdl-untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri/
https://news.detik.com/kolom/d-7574865/untuk-apa-ilmu-kepolisian-bagi-polri

3. Faktor Infrastuktur, sistem dan teknologi dsb

Polisi dalam pemolisiannya di Indonesia menjaga sistem nasional agar keamanan dalam negeri agar negara mampu berdaulat, berdaya tahan dan berdaya tangkal serta berdaya saing.

Polisi dalam pemolisiannya diharapkan mampu sebagai: Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban dan Pejuang Kemanusiaan. Polisi dalam pemolisiannya menunjukkan kinerjanya yang profesional, cerdas, bermoral dan modern

Sejalan dengan pemikiran di atas maka diperlukan education, training and coaching yang berbasis pada suatu ilmu pengetahuan yaitu " Ilmu Kepolisian" Yang mengacu pemikiran Prof. Parsudi Suparlan maupun Baylei :

1. Sebagai ilmu antar bidang yang dapat dikembangkan dalam berbagai pendekatannya
2. Mempelajari dan mengembangkan teori dan konsep yang berkaitan dengan :
    a. Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial
    b. Penegakan Hukum dan keadilan
    c. Kejahatan dan Penanganannya
    d. Polisi dan Pemolisiannya
    e. Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
    f. Teknik dan teknis dasar umum dan khusus kepolisian
3. Paradigma ilmu kepolisian dapat dilihat secara :
    a. Filosofis :

        Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.
    b. Geo politik dan geo strategis

        Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial

c. Yuridis

Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

d. Globalisasi dan modernisasi

Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

e. Akademis,

Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan ( S1, S2 dan S3), pengembangan kepemeimpinan dan majerial, kompetensi khusus dan fungsional ( cyber, forensik, untuk hal hal yang bersifat ekstra ordinary )

f. Pragmatis,

Ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi : keselamatan (safety) contoh (safety driving centre), keamanan (private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security)

4. Pengembangan pola pengajarannya melalui Fakultas :

a. Polisi dan pemolisian
b. Manajemen Keamanan
c. Manajemen Keselamatan
d. Intelejen
e. Hukum dan penegakan hukum
f. Penyelidikan dan penyidikan
g. Forensik
h. Siber dan teknologi kepolisian
i. Kajian konflik sosial
j. Kajian Terorisme
k. Kajian kejahatan luar biasa
l. Teknologi Kepolisian

5. Kurikulum dan pengajarannya dapat dikategorikan sbb :
   a. Pengajaran dasar ilmu kepolisian
      1) Filsafat ilmu pengetahuan
      2) Etika Publik
      3) Metodologi Penelitian
   b. Pengajaran pokok ilmu kepolisian
      1) Ilmu ilmu sosial
      2) Ilmu hukum, penegakan hukum dan keadilan
      3) Ilmu kriminologi
      4) Ilmu administrasi dan operasionalnya
      5) Ilmu teknologi informasi
      6) Hubungan antar suku bangsa (konteks masyarakat Indonesia yang multikultural)
      7) Ilmu humaniora dan sebagainya
   c. Kapita Selekta yang berkaitan dengan isu isu penting dan aktual yang terjadi dalam masyarakat antara lain :
      1) Idiologi
      2) Politik
      3) Ekonomi
      4) Sosial budaya
      5) Keamanan
      6) Pertahanan dan sebagainya.
6. Membangun pendukung pengembangan ilmu kepolisian melalui :
   a. Pusat penelitian dan pengkajian
   b. Lembaga lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian
   c. Forum atau asosiasi dosen pengajar, alumni maupun pemerhati ilmu kepolisian

d. Penerbitan buku
e. Jurnal ilmiah
f. Laboratorium sosial

7. Pengembangan pendidikan untuk kompetensi khusus dan pragmatis yang dapat dikembangkan antara lain :
   a. Safety driving centre
   b. Security training centre
   c. Sekolah penyidik
   d. Pendidikan ilmu kepolisian level D1 dan D3
   e. Kursus kursus singkat
   f. Pelatihan pelatihan bagi master trainer dan trainer dan sebagainya.
8. Dosen yang memiliki integritas dan kualitas sebagai : peneliti, penulis, guru, dan ikon akademik dsb
9. Pengembangan Smart Policing yang mencakup : conventional policing, electronic policing dan forensic policing
10. Pemberdayaan media melalui manajemen media maupun intelejen media

Point point di atas bisa terus dikembangkan secara dinamis dan terbuka yang diperlukan adanya ” Critical Thinking”

Ilmu kepolisian di era digital (revolusi Industri 4.0) menuju pada Society 5.0 berupaya mengatasi pemenuhan kebutuhan bagi bangsa beradab yang terus meningkat kualitas hidupnya.

Model pemolisian yang mungkin dikembangkan adalah model ” Smart Policing”

Point Point Smart Policing

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian (policing)
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial

3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emerjensi maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

Pembelajaran ilmu kepolisian berbasis pada literasi Polisi dan Pemolisiannya untuk : Menjaga Kehidupan, Membangun Peradaban, dan Perjuangan bagi Kemanusiaan

Memaknai peradaban yang begitu kompleks namun setidaknya dapat dipahami dengan : memahami aturan dan menerapkannya dalam kehidupan untuk adanya keteraturan sosial bagi semakin manusiawinya manusia.

Hubungan Polisi dengan peradaban melalui pemolisiannya dapat dipahami dari penegakan hukum dan keadilan bagi keteraturan sosial dan bagi semakin manusiawinya manusia.

Polisi dan pemolisiannya menegakan hukum sejatinya bagi pembangunan, menjaga dan merawat peradaban.

Hukum digunakan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang kontra produktif.

Semakin patuh hukum, keteraturan sosial terjaga dan kemanusiaan semakin meningkat kualitas hidupnya, dapat dikatakan semakin beradab.

Bagaimana membangun peradaban dalam pemolisian? Dengan membangun literasi. Literasi pilar peradaban. Literasi yang cukup atau memadai maka akan ada pencerahan, pengkayaan, pemberdayaan dan sebagai polisi pemolisiannya menjadi : profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya.

Membangun literasi dengan berbasis moral pada keutamaannya yaitu bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Pendidikan menjadi dasar membangun literasi, melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab dan disiplin bagi keutamaannya.

Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk mengimplementasikan melalui pemolisiannya.

Literasi dapat dimulai dari :

1. Lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni
2. Referensi yang memadai
3. Manajemen Media yang menjadi wadah bagi produk produknya
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah
6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaannya

10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya maupun infrastruktur dan teknologinya.

STIK selain mengembangkan ilmu kepolisian juga menyiapkan bagi pemimpin dan kepemimpinan di masa depan.

Keutamaan pada pemimpin dan kepemimpinannya ada pada pada kebijakannya untuk :

1. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Membangun sumber daya manusia yang menjadi aset utama bangsa,
3. Produkarya yang kreatif inovatif dan berkualitas,
4. Membangun dan terus meningkatkan stem pelayanan publik yang prima
5. Membangun budaya patuh hukum
6. Memberdayakan semua sumberdaya semaksimal mungkin secara efektif dan efisien
7. Sistem Edukasi, training dikembangkan dalam berbagai coaching
8. Memberdayakan Media, IT dalam sistem on line yang berbasis elektronik
9. Membangun dan menata keteraturan sosial
10. Membangun sistem reward and punishment yang fair dan sesuai standar
11. Membangun birokrasi yang rasional
12. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
13. Transparan dan akuntabel
14. Membangun sistem pelayanan satu pintu one stop service

15. Mendukung clean and good governance dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
16. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
17. Membangun dan mengimplementasikan supremasi hukum
18. Mengembangkan olah jiwa, olah rasa dan olah raga di semua lini

10 Point Akuntabilitas Profesi

1. Moral (niat baik dan benar)
2. Hukum (secara Hukum benar / tidak melanggar)
3. Adminsitrasi (secara Administrasi benar / tidak melanggar)
4. Fungsional (sesuai SOP)
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat dan sebagainya.

Akuntabilitas Polisi dalam Pemolisiannya sebagai Profesi secara :

1. Moral (niat baik dan benar)
2. Hukum (secara Hukum benar / tidak melanggar)
3. Adminsitrasi (secara Administrasi benar / tidak melanggar)
4. Fungsional (sesuai SOP)
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving

9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat

Ilmu kepolisian yang berbasis literasi dalam pembelajarannya diharapkan mampu menyiapkan Polisi dalam pemolisiannya sebagai petugas, sebagai fungsi, maupun institusi yang keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, mampu menunjukan kualitas : profesionalismenya, kecerdasannya, kesadarannya, dan modernitasnya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan dalam keteraturan sosial yang ditunjukan dalam pelayanannya yang berkaitan dengan: keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan yang berkualitas prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses) pada:

1. Private Security
2. Industrial Security
3. Public security
4. Ecological Security
5. Cyber Security
6. Forensic security

# KEJAHATAN AI PERSPEKTIF PEMOLISIAN[86]

Artificial Intelegensi (AI) saat ini semakin marak, selain membawa dampak positif tentu bisa juga membawa dampak negatif bagi hidup dan kehidupan.

AI merubah paradigma kehidupan secara signifikan. Sebagai contoh di dalam media infomasi dan komunikasi bahkan teknologi yang semakin tinggi tingkat kecepatannya, ketepatannya, akurasinya, akuntabilitasnya maupun pengaksesannya.

Dimana Data semakin penting bagi berbagai sistem pelayanan publik untuk adanya pelayanan yang berstandar prima. Namun di balik semua itu tatkala AI berada di tangan orang yang salah maka akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif.

Kejahatan dampak perkembangan AI yang dalam kajian ilmu kepolisian antara lain dapat dilihat dari efek dimensi maupun Frekwensi :

1. Kejahatan politik terutama dalam politik elektoral maupun pada pengambilan keputusan atau kebijakan publik yang berkaitan dengan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya.
2. Kejahatan Ekonomi yang berkaitan dengan sistem: keuangan, bisnis, fiskal, industri maupun perdagangan dan sebagainya, dalam berbagai bentuk yang mematikan hajat hidup bagi banyak orang antara lain masalah pengendalian harga, pengendalian/ pendokumentasian pemenuhan sembako dalam sistem sistem yang tidak terjangkau masyarakat.

86 https://dailykepri.com/kejahatan-ai-perspektif-pemolisian/
https://transindonesia.co/2024/10/13/kejahatan-ai-perspektif-pemolisian/
https://polisiindonesia.id/2024/10/12/cdl-kejahatan-ai-perspektif-pemolisian/

3. Kejahatan yang menggerus Idiologi bangsa dan negara melalui candu candu teknologi maupun informasi, seperti pinjaman on line, judi on line, game on line yang berefek pada character Assassination.
4. Kejahatan yang menghancurkan sendi sendi kehidupan sosial dengan model post truth yang mengobok obok opini publik maupun memprovokasi adanya konflik internal saling mengadu domba dalam bingkai primordial.
5. Kejahatan yang berkaitan dengan perusakan seni dan budaya, hembusan dan serangan budaya asing yang menggerus kekuatan budaya lokal maupun nasional dalam berbagai gatra kehidupan melalui sistem sistem online dan sebaginya.
6. Kejahatan yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup, serangan terhadap opini publik yang bukan sebatas menggerus tetapi merusak sistem otak maupun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta masih banyak lagi kejahatan kejahatan efek hadirnya AI lainnya

Kejahatan AI dalam berbagai dimensi maupun frekwensi akan berkaitan dengan pembunuhan karakter.

Kejahatan ini lebih mematikan dan menghancurkan dari dalam walaupun design dari luar.

Oleh karena itu, Polisi akan berbuat apa dalam pemolisian nya? Polisi saatnya menyiapkan model "Smart Policing" untuk mengharmoniskan dan dapat menyatukan antar model pemolisian (Policing) agar :

1. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial.
2. Sebagai model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian.
3. Pemolisian di era digital dan era kenormalan baru yang dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global.

4. Mampu mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design.
5. Mampu mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual maupun forensik.
6. Mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service.
7. Mampu memprediksi secara proaktif dan problem solving.
8. Mampu menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergensi maupun kontijensi.
9. Diawaki petugas Polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern sebagai cyber cops maupun forensic cops.

**Cyber cops dan forensic cops sebagai Super Cops?**

Super cops jangan dimaknai sebagai polisi super hero yang bisa bertindak dan melakukan sesukanya, dengan alasan membela kebenaran lalu bisa melanggar aturan atau merasa super sehingga bisa melakukan apa saja meskipun melanggar hukum.

Super cops yang kita harapkan adalah sosok Polisi yang memiliki kompetensi dan hati nurani yang super dan taat hukum serta mampu memberikan pelayanan prima dan juga mampu mengangkat harkat dan martabat manusia dengan terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial dan bagi pembangunan peradaban.

Polisi bekerja bukan hanya di bidang hukum semata. Karena tidak semua masalah yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Banyak pendekatan yang dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat.

Di era digital dan era kenormalan baru untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman, tertib, nyaman serta adanya keteraturan sosial atau masyarakat taat hukum, sangat dibutuhkan Polisi yang tangguh seperti super cops.

Dalam Membangun supercops diperlukan sistim-sistim pendukung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar O2H(otak

otot dan hati nuraninya) nya juga super. Sejalan dengan pemikiran tersebut model pemolisian secara elektronik dan forensik (e policing) dan forensic policing) akan sangat mendukung dalam memberikan pelayanan prima kepolisian menghadapi era vuca maupun kejahatan AI.

Membangun sistem-sistim menuju supercops menjadikan Polisi memberdayakan sumber daya manusia (Sdm) nya secara efektif dan efisien. Namun hasil yang dicapai dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara garis besar dapat dikategorikan:

1. Petugas Polisi yang Profesional Cerdas Bermoral dan Modern.
2. Memahami Keutamaan Polisi dalam Pemolisian nya untuk: Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.
3. Pelayanan Keamanan
4. Pelayanan Keselamatan
5. Pelayanan Hukum
6. Pelayanan Administrasi
7. Pelayanan Informasi
8. Pelayanan Kemanusiaan
9. Sistem Pelayanan atas laporan atau aduan masyarakat yang berstandar Prima (Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Akuntabel, Informatif dan Mudah diakses).

Sistem pelayanan publik yang dibangun pada Sentra Pelayanan Publik :

1. Sentra Pelayanan Publik dapat berfungsi sebagai: Operation Room, Back office sebagai Pusat K3i.
2. Merupakan One Stop Service berbasis Big Data System yang mampu menjembatani memberikan pelayanan cepat sekalipun dalam kondisi emergensi maupun kontijensi.

3. Dapat diimplementasikan melalui model "Asta Siap"
    a. Siap piranti lunak atau standar acuan pedoman atau panduan managerial maupun operasionalnya
    b. Siap posko (Sebagai Sentra atau Sebagai Back Office atau Sebagai Operation Room yang menjalankan fungsi k3i)
    c. Siap model-model pelayanan (Keamanan, Keselamatan, Administrasi, Hukum, Informasi, dan Kemanusiaan)
    d. Siap sistem jejaring
    e. Siap mitra sebagai soft power dan smart power
    f. Siap SDM
    g. Siap sarana prasarana
    h. Siap anggaran secara budgetnya maupun non budgetnya.
4. Mampu memberikan pelayanan kepolisian secara proaktif dan problem solving.
5. Mampu memetakan Masalah, memetakan Wilayah, memetakan Potensi dan ada pola pola penanganan serta pemberdayaannya.
6. Para petugas di Sentra Pelayanan, mampu memahami apa yang menjadi:
    a. Tugas pokoknya
    b. Memetakan permasalahan berbasis wilayah atau area
    c. Membuat model sistem sistem pelayanan secara langsung atau melalui media
    d. Membuat standar kompetensi petugas pelayanan publik
    e. Memberdayakan IT sebagai pendukungnya.
7. Para petugasnya mampu memonitoring situasi selama 1×24 jam yang mencakup:
    a. Monitoring laporan petugas petugas lapangan
    b. Monitoring media
    c. Monitoring CCTV

8. Mampu melakukan komunikasi melalui call centre atau media lainnya.
    a. Menerima laporan
    b. Menerima aduan
    c. Komunikasi secara vertikal, horisontal maupun diagonal.
9. Mampu melakukan koordinasi secara cepat dan tepat untuk menjembatani, memberdayakan atau menyalurkan kepada fungsi terkait.
10. Mampu berfungsi untuk memberikan komando dan pengendalian.
    a. Quick response
    b. Penanganan TKP
    c. Sistem laporan
    d. Penanganan pada situasi emergency atau kontijensi.
11. Mampu melakukan inputing data dan memberikan informasi kepada publik tentang situasi kondisi dan tentang sistem pelayanan publik yang ada melalui media atau secara langsung.

# FORENSIC POLICING [87]

Pemolisian dalam pendekatan forensik (forensic policing) merupakan model pemolisian untuk menghadapi berbagai permasalahan keteraturan sosial atas serangan, gangguan maupun kejahatan yang di desain sedemikian rupa dari berbagai cara yang berbasis nubika (nuklir, biologi, kimia, fisika) maupun dari berbagai masalah sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, dsb).

Forensic cops untuk mengimplementasikan forensic policing dbangun berbasis polisi super/ super cops yaitu polisi dengan pemolisiannya memiliki kompetensi berkualitas tinggi yang mampu mengatasi berbagai masalah keteraturan sosial dengan dampak luas dan bereskalasi tinggi. Juga mampu memberikan pelayanan kepada publik secara prima dalam situasi emerjensi maupun kontijensi.

Di era digital polisi super ini diharapkan mampu bekerja dalam smart policing yang mengharmonikan antara conventional policing, electronic policing maupun forensic policing untuk menghadapi berbagai gangguan kejahatan: aktual, virtual maupun secara forensik.

Secara aktual dapat dikategorikan dalam hal pemolisian yang manual atau bisa dikategorikan konvensional dan masih bertemu face to face atau less technology. Pemolisian secara virtual dapat dikategorikan model E Policing atau pemolisian secara elektronik yang berbasis pada back office, aplication ( dengan artificial intellegence) dan net work ( berbasis internet of thing) untuk mendukung terbangunnya big data system dan one stop service system.

Pemolisian forensik dalam konteks kenormalan baru dapat dikembangkan dalam berbagaimodel pola pemolisiannya maupun penyiapan petugas kepolisian yang berbasis replika genetika.

Polisi super dalam konteks aktual, virtual dan forensik merupakan basis bagi polisi dan pemolisiannya karena dalam era digital sekalipun

87 https://transindonesia.co/2024/10/13/forensic-policing-2/

cara aktual masih diperlukan dan kemampuan dasar pada penanganan kejahatan konvensional diperlukan polisi yang tangguh secara fisik atau otot prima. Pemolisian virtual mapun forensik diperlukan otak atau kemampuan secara intelejensia tinggi untuk mampu menghadapi kejahatan siber maupun kejahatan biologi, kimia nuklir maupun kejahatan di era kenormalan baru. Pelemahan atas pertahanan suatu bangsa dapat dimulai menggerus dari sumber dayanya, keamanan dan rasa aman. Masalah nuklir biologi kimia dan fisika ( nubika) maupun sosial pun menjadi trend kejahatan baru yang dapat menlumpuhkan produktifitas masyarakat dan memicu terjadinya konflik sosial yang besar.

Sebagai contoh masa pandemi covid 19 yang melanda hampir dibseluruh dunia mampu melemahkan bahkan mematikan secara fisik maupun psikis. Kekuatan polisi super ini tentu juga dituntut memiliki spirit sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Membangun polisi super tentu memerlukan energi besar dari proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, prmerupakan pemikiran prof satjipto rahardjo yang memikirkan bagaimana seorang petugas polisi memiliki otak otat dan hati nurani sebagai bhayangkara sejati ( penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan sbg pejuang kemanusiaan).

proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, proses pemeliharaan dan perawatan hingga proses pengakhiran dinasoses pemeliharaan dan perawatan hingga pengakhiran dinas. Polisi super dikembangkan dan dibangun secara O2H (otak otot dan hati nuraninya).

Pemolisian di era digital kita dapat mengenal dan memahami E policing atau pemolisian yang on line dan berbasis elektronik. Sistem big data menjadi bagian one stop service. Di samping E policing kita perlu memahami dan mengembangkan forensic policing.

Forensic policing dibangun dan dikembangkan berbasis pada ilmu pengetahuan secara makro maupun mikro sebagai model pemolisian

yang berkaitan dengan nuklir, biologi, kimia, fisika (nubika), ilmu sosial maupun ilmu ilmu lainnya.

Masalah keteraturan sosial yang terganggu atau terhambat bahkan rusak akibat nubika atau dampak masalah sosial perlu penanganan secara profesional tidak sebatas kulitnya melainkan sampai dengan tingkat yang paling mendasar. Dampak dari nubika dan sosial sangat luas yang berdampak pada hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Petugas kepolisian forensik ditumbuhkembangkan secara komprehensif mulai dari rekrutmen pendidikkan penggunaan hingga pengakhiran dinasnya. Satuan tugas identifikasi, satuan tugas nubika, laboratorium forensik maupun penelitian dan pengembangan dapat menjadi pendukung forensic policing.

Di masa kenormalan baru paska pandemi covid 19 sekarang ini bisa dikatakan kegiatan sosial kemasyarakatan terdampak bahkan ada yang mati sama sekali tidak lagi bisa bertahan. Berbagai model pandemi atau kejahatan forensik yang mematikan manusia sebagai mahkluk sosial.

Ada banyak kemungkinan dari masalah listrik, masalah internet, masalah udara, air dsb bisa menjadi ini suatu pandemi baru atau produk rekayasa untuk meneror dunia

Forensic policing ( FP ) dapat dibangun melalui:

1. Political will ( dukungan keputusan politik) yang kuat untuk membangun dan mengembangkan forensic policing
2. Kepemimpinan yang kuat dan transformatif sehingga kepemimpinannya dan kebijakkannya berpihak pada pembangunan pengembangan Forensic Policing
3. Penyiapan konsep dasar hingga pengembangannya
4. Penyiapan SDM yang akan mengawaki ( dari rekrutmen pendidikan dan latihan penggunaan perawatan hingga pengakhiran atau purna tugas)
5. Peralatan pendukung ( laboratorium forensik dsb)

6. Program riset atau penelitian bagi pencegahan penanganan hingga rehabilitasi dampak rekayasa nubika
7. Tim transformasi sebagai support team yg mendukung secara konseptual maupun manajerial
8. Membuat model simulasi implementasi dalam suatu pilot project
9. Penyelenggaraannya perlu di monitor dan terus dievaluasi
10. Pola pengembangannya disesuaikan dengan model model simulasi untuk prediksi antisipasi serta solusinya.

# PEMOLISIAN DI ERA VUCA [88]

Di era Vuca (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) Polisi dalam Pemolisian nya dituntut mampu memberikan pelayanan kepada publik yang berstandar prima yang maknanya adalah : tepat atau akurat dapat juga dikaitkan dengan prima yang unsurnya adalah cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.

Di era revolusi industri 4.0. Dan society 5.0 pemolisian dijabarkan dalam implementasi yang prediktif atau futuristik, visioner proaktif antisipatif dan solutif (Problem Solving).

Pemolisian nya peka peduli dan berbela rasa bagi keutamaannya : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral, secara hukum, secara administratif dan secara fungsional dan secara sosial.

Polisi dalam pemolisian nya tetap menunjukan. Sebagai : penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Di era digital, semua serba online berbasis elektronik. Informasi komunikasi koordinasi bahkan komando pengendalian (K3i) dilakukan secara online. Namun, model pemolisian konvensional tetap masih dibutuhkan.

Pelayanan kepolisian dalam pemolisian nya di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan perlu membangun model pemolisian yang dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Kepolisian perlu beradaptasi dengan transformasi ini dengan merintis ide- ide kreatif, beradaptasi, dan mengembangkan wawasan dan inovasi yang membentuk masa depan penegakan hukum dimulai dengan teknologi-teknologi yang mendukung konsep operasi baru, memungkinkan intervensi dan hubungan yang menjaga keamanan masyarakat

Visi besar abadi bangsa Indonesia adalah menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur.

88 https://polisiindonesia.id/2024/10/13/cdl-pemolisian-di-era-vuca/

Dalam mewujudkan visi besar ini, pemerintah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya menyusun perencanaan Indonesia Emas 2045 yang memiliki empat pilar utama yaitu:

1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan
4. pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mewujudkan visi Indonesia maju, Polri diharapkan mampu menjadi tempat bersandar bagi masyarakat dalam menghadapi kesulitan, mendapatkan kepastian hukum, maupun dalam mendapatkan pelayanan kepolisian. Sehingga perumusan Grand Strategy harus mampu

Polri juga harus mampu untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi warganya untuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini, bersifat kompleks dan harus dilihat dari berbagai pendekatan. Pendekatan yang mendasar di bawah ini dapat dijadikan acuan bagi petugas polisi di berbagai level untuk membangun dan menjaga citra positif maupun kepercayaan kepada publik antara lain:

menyempurnakan, meningkatkan kualitas kinerja. sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan

Polri dapat berperan secara maksimal dalam mendukung negara ini untuk mencapai visi besar tersebut dengan :

1. Pemahaman dan kesadaran sebagai petugas polisi. Kesalahan dalam pemahaman bisa fatal akibatnya. Rasionalisasi tugas-tugas kepolisian memang perlu dikonsepkan secara akademik, managerial, maupun operasional sehingga dapat dijadikan framework bagi kerja polisi.

   Framework inilah yang akan menjadi acuan berperilaku, baik secara adminstrasi, managerial, dan/atau moral.

2. Bagaimana agar apa yang ideal sama dengan yang aktual sehingga apa yang dibuat bisa dihayati dan dijadikan acuan kerja. Pada akhirnya, bukan hanya menjadi pajangan perpustakaan, namun juga diajarkan dan dilatihkan agar menjadi habit dan menjadi kesadaran serta tanggung jawab seluruh anggota kepolisian.
3. Membangun sistem kompetensi dan melakukan perubahan yang mendasar baik di bidang pembinaan maupun operasional.
4. Revitalisasi atas pelayanan prima yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini dilakukan guna penguatan institusi. Implementasinya berbentuk penjabaran visi dan misi, program, peningkatan kualitas kinerja, birokrasi yang dipraktikkan melalui berbagai kreatifitas yang inovasi-inovatif.
5. Siap bekerja berdasarkan kompetensi untuk jabatan-jabatan tertentu dengan terlebih dilakukan assessment. Penataan ini bertolak dari sistem kinerja berbasis teknologi informasi sehingga bisa cepat, tepat, akurat dan akuntabel dan informatif.
6. Membangun soliditas sebagai bagian dari budaya yang memanfaatkan kearifan lokal.
7. Membangun wadah kemitraan dengan stakeholder terkati untuk bersama- sama mencari akar permasalahan dan menemukan solusi yang tepat dan diterima semua pihak.
8. Membuat program-program kemitraan antara polisi dengan masyarakat maupun dengan stakeholder lainnya.

**Pengembangan Ilmu Kepolisian**

Tantangan yang dihadapi polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memang harus dijabarkan dan dilakukan secara bertahap sehingga harapan masyarakat terwujud, adanya polisi dengan pemolisian nya yang sesuai dengan prinsip presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), profesional, cerdas, bermoral, dan modern berbasis pada Ilmu Kepolisian yang pendekatannya antar bidang atau interdisciplinary approach.

Di era digital dan era kenormalan baru polisi dapat mengembangkan model pemolisian nya dalam ” smart policing” yang dapat dijabarkan antara lain :

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian (Policing)
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian.
4. Dapat diimplementasikan ditingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia nyata maupun dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emergency maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern. Smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat, yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

Smart policing dalam implementasi conventional policing, e- policing, dan forensic policing secara konseptual ditunjukkan sebagai berikut:

1. Conventional policing Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas sebagai pelindung pengayom yang dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP (tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran secara konvensional diperlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya. Penanganan berbagai masalah dengan reaksi cepat, penangan konflik sosial yang melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik sosial, premanisme jalanan (blue collar crime), perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan

lalu lintas hingga bencana alam. Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb. Penanganan pelayanan kepolisianyg berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan dan kompetensi conventional policing.

2. Electronic Policing (E-policing)

E-policing merupakan program yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan merupakan bagian dari terobosan kreatif untuk menghasilkan inovasi dan kreasi dalam berbagai sistem pelayanan kepolisian baik pelayanan administrasi, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, dan pelayanan hukum, yang saling terhubung atau online yang mampu memberikan pelayanan secara virtual dan mampu mendukung pemolisian yang konvensional (Dwilaksana, 2020). Landasan dasar E- policing adalah melalui back office (sebagai operation room atau pusat K3I: komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi). Penerapan e-policing didukung oleh aplikasi berbasis Artificial intelegensi (AI) juga jaringan sistem yang terintegrasi berbasis internet of things (IoT). Aplikasi yang berbasis AI mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda,kendaraan,lingkungan hingga aktivitas. Melalui AI dapat dikonstruksi menjadi model untuk ditemukan algoritma yang berupa infografis, statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma dapat berfungsi sebagai prediksi, antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, any time dan on time. Algoritma dapat menjadi landasan atau acuan indeks atau setidaknya sebagai potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial. Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber (cyber cops) yang mengawaki e-policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untuk menghasilkan algoritma.

Memahami prinsip dasar di era digital dan sistem IT dan proses

pembangunan big data, dan sistem terintegrasi menuju one gate service system. Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian early warning dan problem solving yang prediktif, antisipatif, serta solutif. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management agar pemolisian secara aktual maupun virtual ada suatu sistem yang sejalan saling menguatkan atau saling mendukung. Permasalahan perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakan, bahkan cyber crime akan terus berkembang sehingga memerlukan polisi siber yang profesional, mampu menganalisa dan menemukan potensi kejahatan. Kejahatan white collar crime tentu dilakukan secara teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya kaum yang memiliki kompetensi. Dengan demikian cyber security menjadi sangat penting dan mendasar.

3. Forensic Policing. Di era diskripsi perkembangan masalah nuklir, biologi, maupun kimia, bahkan fisika (nubika). Di sisi lain, hal-hal di bidang sosial dapat menjadi suatu masalah bagi terjaminnya keteraturan sosial. Era post truth dengan senjata hoax juga dapat digunakan untuk menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas. Oleh sebab itu, forensic policing memerlukan kompetensi dan pengetahuan dasar tentang nubika atau pun permasalahan sosial. Dampak atas penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika oleh penjahat yang dapat meneror atau mematikan produktivitas secara massal dan berdampak luas. Kompetensi para petugas forensic policing secara mendasar yang berkaitan dengan konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun masalah masalah sosial yang akan dijadikan senjatanya.

   Kemampuan forensik didukung dengan sistem peralatan yang dapat didukung petugas polisi siber maupun pemolisian yang konvensional. Pelayanan di bidang forensik berkaitan pada sistem security yang dapat dikembangkan pada pengamanan pada sektor privat, industrial, publik, ecological, maupun cyber.

Smart policing menjadi model pemolisian yang senantiasa siap memberikan pelayanan kepada publik dalam berbagai situasi, juga dalam situasi emergensi maupun kontijensi sekalipun. Sebagai wujud pemolisian yang penelitian terkini pada tingkat global mengenai bagaimana model

smart policing dapat diukur dan dinilai kualitas pelayanannya yang dirumuskan pada penelitian Eka abi et al.

Dimensi pengukuran layanan smart policing dapat dilihat dari transparansi, integritas, interaksi timbal balik antara polisi dengan masyarakat (inter activity), kecepatan dalam memberi pelayanan mengakomodasi penyelesaian masalah (responsivitas), dan kemudahan mengakses pelayanan kepolisian (service ability)

Smart policing juga mendukung evidence based policing yang berdasarkan riset, penelitian, dan bukti berupa data/fakta sehingga secara konseptual maupun teoritis dengan berbagai pendekatannya dapat menjadi acuan bagi Grand Strategy Polri. Grand Strategy Polri yang berbasis Smart Policing dapat dibangun secara konseptual, secara fisik, secara scientific, secara infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya, selain itu juga pada kurikulum dan pengajarannya, agar tetap fungsional dalam kondisi emergency/darurat sekalipun.

Mengacu pada Smart Policing Initiative (Bureau of Justice Assistance, 2012), strategi penerapan inovasi pada pemolisian dapat dilakukan dengan sistem riset dan pengukuran performa yang komprehensif; menetapkan target strategis yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kepolisian; penggunaan informasi intelijen, riset, dan sumber data lainnya sebagai dasar penerapan kebijakan dan tindakan di lapangan; melakukan transformasi dan pembenahan organisasi secara terus menerus dengan menekankan meritokrasi, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan; serta melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak/ stakeholder terkait dengan Polri dalam rangka meningkatkan inovasi dan performa kinerja kepolisian.

Di sisi lain, model smart policing menggambarkan kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepercayaan publik melalui sistem intervensi multidimensi (Afzal dan Panagiotopoulos, 2020). Tujuan utama penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban bersatu untuk membangun

kepercayaan publik. Mekanisme inti yang menggerakkan kerangka kerja ini adalah intervensi multidimensi, yang mencakup strategi lingkungan, tindakan penegakan, dan inisiatif keterlibatan komunitas.

Intervensi ini didukung oleh berbagai proses, antara lain: konstruksi kejahatan, pendeteksian kejahatan, pengawasan otomatis, dan pemantauan ketegangan otomatis.

Masing-masing proses ini didukung oleh analisis informasi data, yang mengintegrasikan data yang diarahkan, data otomatis, dan data yang bersumber dari keramaian. Analis memainkan peran penting dalam mengelola dan menginterpretasikan data ini, mempengaruhi semua proses utama. Selain itu, framework ini menekankan pentingnya mempertimbangkan isu-isu hak asasi fundamental dalam melaksanakan pemolisian, memastikan bahwa upaya menjaga keamanan publik tidak melanggar hak individu. Bagaimana hubungan informasi dan pengaruh, menunjukkan bagaimana intervensi berbasis data mendukung tujuan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik.

Perubahan pola maupun model pemolisian memerlukan grand design dan grand strategi yang dapat dikatakan smart policing, yaitu harmonisasi antara conventional policing, electronic policing atau e-policing dan forensic policing, untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial bagi kemanusiaan dan pembangunan peradaban.

Implementasi Smart Policing dalam Grand Strategy Polri Polisi dan pemolisian nya dalam perspektif perilaku organisasi sejatinya membuat harmoni dan berbagi kebahagiaan dengan terwujud dan terpeliharanya keamanan dan rasa aman. Institusi merupakan wadah atau badan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibangunnya kepolisian adalah agar terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial.

Mengapa keteraturan sosial menjadi sangat penting dan mendasar? Peradaban suatu bangsa dan negara agar rakyatnya mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang atau meningkat kualitas hidupnya diperlukan adanya produktivitas. Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas untuk menghasilkan produksi. Di dalam aktivitas tersebut ada ancaman, gangguan, hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas tersebut.

Di sinilah polisi dalam pemolisian nya setidaknya satu langkah lebih maju dari masyarakat yang dilayaninya.

# KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM KONTEKS PEMOLISIAN DI ERA DIGITAL [89]

Negara yang berdaulat di era digital tatkala negara mampu berdaya tahan, berdaya tangkal dan mampu berdaya saing yang mendapat pengakuan dan disegani negara negara lain.

"Si vis pacem para belum" kalau ingin damai harus siap berperang.

Dalam berbagai pendekatan kesiapan berperang dapat di lihat adanya kekuatan antara lain :

1. Kuatnya ideologi
2. Kuatnya pertahanan
3. Kuatnya keamanan dalam negeri
4. Kuatnya SDM sebagai aset utama bangsa
5. Kuatnya sektor bisnis
6. Kuatnya pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya alam
7. Kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Kuatnya hukum dan penegakan hukum
9. Kuatnya birokrasi yang rasional dan anti korupsi
10. Kuatnya seni budaya dan olah raga

Ke 10 point tsb saling terkait

89 https://transindonesia.co/2024/10/14/keamanan-dalam-negeri-dalam-konteks-pemolisian-di-era-digital/

Konteks pilar kedaulatan bangsa secara umum dapat dikatakan pada

1. Kemanusiaan
2. Keteraturan sosial
3. Peradaban

Konteks keamanan dalam negeri dalam pendekatan pemolisian yang dapat dijadikan pendukung secara filosofis, strategis dan pragmatis dengan model "community policing" atau Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri. Pola polanya dapat dikembangkan berbasis pada smart policing dengan adanya harmoni antara :

1. Conventional policing
2. Electronic policing
3. Forensic policing

Secara pragmatis model pemolisian dapat dibangun pada tingkat polres sebagai kesatuan operasional dasar / KOD dengan membangun model smart city dalam memberikan pelayanan publik, sebagai penjabaran community policing dalam konteks smart living dan smart mobility.

Smart city menjadi harapan dan tujuan bagi masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam kawasan yang fungsional yang pelayanan publiknya berstandar prima. Kualitas hidup yang meningkat terjaga dan terpeliharanya keteraturan sosial ( keamanan dan rasa aman bagi warga masyarakat ) adanya anti premanisme dalam pembangunan suatu peradaban.

Publik dapat dipahami sebagai masyarakat atau rakyat atau orang banyak. Apa yang mereka butuhkan secara umum dan mendasar ? Kebutuhan publik ini dapat dikategorikan pada ruang publik bagi perorangan maupun secara sosial.

Ruang publik menjadi ruang yang masyarakat butuhkan untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang, setidaknya mencakup kawasan yang sehat, aman, nyaman, ada saling keterhubungan dengan kawasan kawasan lainnya sehingga mudah dicapai. Dengan demikian menjadi smart living dan smart mobility.

Pelayanan publik untuk mencapai atau setidaknya memenuhi standar apa yang dibutuhkan publik maka dibutuhkan sistem pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang dengan standar prima ( cepat , tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses) adalah sistem pelayan publik yang dibangun secara on line dan berbasis elektronik. Di era digital maka dasar membangun sistem pelayanan prima adalah adanya :

1. Back Office yang dapat menjadi operation room pusat k3i ( komunikasi komando pengendalian koordinasi dan informasi). Back office berfungsi sebagai pusat data menuju big data system dan one stop service system.
2. Application yang berbasis artificial intellegence yang mencakup aplikasi :
    a. Call centre
    b. Comand centre
    c. Monitoring system
    d. Digital Map untuk pemetaan wilayah, pemetaan masalah dan pemetaan potensi dsb
    e. Smart management untuk inputing data, analisa data dan produk dalam bentuk algoritma ( info grafis, info statistik, info virtual ) yang dinamis sesuai real time yang dpat diakses secara on time dan any time.
    f. Sistem penegakan hukum secara elektronik ( electronic traffic law enforcement / etle ) yang didukung ” data jalan, data kendaraan bermotor, data pengemudi, data populasi publik dalam berlalu lintas dsb. Selain itu juga didukung sistem pembayaran elektronik, sistem digital record untuk TAR (traffic attitude record) dan de merit point system untuk sistem perpanjangan SIM
    g. Sistem panggilan darurat emergency / contigency system
    h. Sistem pelayanan cepat ( quick response time )
    i. Sistem laporan dan sharing data

j. Sistem sinergitas pelayanan publik antar pemangku kepentingan

k. Sistem akuntabilitas algoritma yang dapat menunjukkan index kualitas pelayanan publik

l. Algoritma untuk memprediksi, mengantisipasi dan solusi

m. Management media sebagai wadah untuk : informasi, komunikasi, inspirasi, edukasi, solusi, motivasi, counter issue, fun/ menghibur.

n. Sistem pengamanan data dan sistem sistem lainnya (cyber security) dan sebagainya..

3. Network atau jejaring yang berbasis IoT,

   kekuatan jejaring bagi konektifitas sistem sistem on line menjadi dasar pelayanan prima dan hidupnya sistem sistem lainnya.

4. Sistem updating dan up grading untuk sistem yang terus dinamis dan terus bisa ditumbuh kembangkan.

5. Petugas yang mengawaki pada back office dapat memberdayakan dan mengontrol aplikasi maupun jejaring yang ada. Mampu inputing data, analisa data dan menghasilkan produk serta mampu membangun jejaring.

Pelayanan publik yang prima pada smart living maupun smart mobility merupakan standar keberhasilan smart city. Kemampuan sistem sistem tersebut adalah untuk mampu memberikan pelayanan prima di bidang :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan

Kesemua itu dapat ditunjukan indexnya pada sistem algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang dapat diakses secara real time, on time dan any time.

Analisa algoritma smart city dapat dilihat dari :

1. Tingkat kualitas keamanan
2. Tingkat kualitas keselamatan
3. Tingkat kualitas kelancaran
4. Tingkat kualitas ketertiban
5. Tingkat kualitas pelayan di bidang LLAJ
6. Tingkat kualitas management media
7. Tingkat kecepatan penanganan masalah / quick response time nya

Ke 7 point itu nanti yang dilihat kemampuan sistem management maupun operasionalnya dari :

1. Kompetensi sdm
2. Tingkat penggunaan aplikasi yang ada
3. Tingkat kepuasan masyarakat

Point point di atas menjadi landasan dari index keteraturan sosial di suatu kota, kawasan, dsb.

# POLISI MASA DEPAN: FUTURISTIC AND TRANSFORMATIVE POLICING [90]

Polisi sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas berbeda tetapi keutamaannya sama, yaitu bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Prinsip yang mendasar dan berlaku umum bagi polisi dalam pemolisianya yaitu:

1. Sebagai ikon hukum penegakkan hukum dan keadilan yang bermakna juga simbol peradaban
2. Berfungsi untuk melindungi mengayomi melayani yang bermakna menjaga keteraturan sosial agar hidup dan kehidupan dan berdaya tahan dan dapat tumbuh dan berkembang.
3. Tugas tanggungjawabnya memanusiakan yang bermakna mencerdaskan dan mengangkat harkat dan martabat manusia dan untuk semakin manusiawinya manusia.
4. Upaya upaya yang dilakukan hakekatnya mendukung meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang maknanya menjamin keamanan dan rasa aman sehingga warga masyarakat mampu menghasilkan produksi ubtuk bertahan hidup tumbuh dan berkembang.

Dari prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum ini tertuang dalam Tri Brata maupun Catur Prasetya yang menjadi etika bagi polisi dan pemolisiannya secara pragmatis dalam konteks pemolisian yang futuristik (futuristic policing) dan pemolisian transformatif (transformative policing).

90 https://transindonesia.co/2024/10/14/polisi-masa-depan-futuristic-and-transformative-policing/ https://transindonesia.co/2024/10/15/polisi-masa-depan-futuristic-and-transformative-policing-2/ https://warganetsia.com/polisi-masa-depan-futuristic-and-transformative-policing/10/ https://benuanews.com/polisi-masa-depan-futuristic-and-transformative-policing

Polisi pada dasarnya yang dicapai dihargai dan dibanggakan adalah pada: 1.Profesionalismenya, 2.Kecerdasannya, 3.Moralitasnya dan 4.Modernitasnya.

Dari point di atas dapat ditunjukan pada kualitas :

1. Pelayanan keamanan

   Diuraikan bagaimana keamanan dan rasa aman diwujudkan secara manajerial maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa yang dibuat standardisasinya.

2. Pelayanan Keselamatan

   Diuraikan bagaimana meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan bagaimana membangun budaya tertib berlalu lintas.

3. Pelayanan Hukum

   Diuraikan bagaimana hukum sebagai simbol peradaban dapat ditegakkan secara yuridis dan non yuridis secara profesional dan mampu menunjukkan atau memberikan rasa keadilan yang spiritnya mencakup :

   a. Mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas,
   b. Memberikan perlindungan pengayoman kpd korban dan pencari keadilan
   c. Membangun budaya patuh hukum dan mewujudkan supremasi hukum
   d. Memberikan kepastian
   e. Menjadi bagian dari edukasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pelayanan Administrasi

   Diuraikan dalam pelayanan kepada publik yang berkaitan dengan perijinan kontrol dan pemberdayaan sumberdaya yang memerlukan tanda sertifikasi maupun bukti rekomendasi kepolisian dilakukan berbasis kajian atau penelitian baik dokumen fisik maupun dampaknya.

5. Pelayanan Informasi

   Diuraikan dalam berbagai sistem informasi yang menjadi standar acuan kebenaran dan mampu menangkal atau counter atas berita hoax.

**Masa depan dan Di depan massa**

Sistem pelayanan di masa depan dituntut adanya pelayanan yang prima yang memenuhi standar : 1. Cepat 2. Tepat. 3. Akuran 4. Transparan 5. Akuntabel 6. Informatif dan 7. Mudah diakses.

Sistem pelayanan kepolisian berstandar prima berbasis pada big data dan sistem pelayanan one stop service.

Ini yang memerlukan sistem dalam penyelenggaraan pemolisian secara virtual atau Electronic Policing ( E policing). Basis dari E policing adalah adanya back office, application, net work yang berbasis pada artificial intellegence ( AI) dan IOT ( internet of things). Apa yang dikembangkan dalam E policing adalah pengamanan pada komunitas maupun lalu lintas dengan berdasar sistem: 1.Pemetaan wilayah, 2.Pemetaan masalah, 3.Pemetaan potensi. Yang implementasi pengoperasionalannya berbasi pada peta digital dan sistem inputing data atau recognize, analisa dan produk dalam bentuk algoritma. Sistem penyelenggaraan E Policing dalam komunitas maupun lalu lintas setidaknya dpat diuraikan sbb :

**A. Pola pengamanan komunitas dalam program pengamanan yg modern dan manusiawi ( harmoni) diuraikan dalam:**

1. Berbasis wilayah

   Mabes, polda, polres, polsek, pospol, bhabinkamtibmas yg dijabarkan dalam konteks : a. Kota, b desa, c. Kawasan (pertanian perkebunan hutan industri pantai lintasan pariwisata perbatasan rawan bencana dsb).

2. Berbasis pada gatra kehidupan yang mencakup : a. Idiologi b. Politik c. Ekonomi d. Sosial e. Budaya f. Keamanan g. Keselamatan dsb dapat disesuaikan dengan konteks potensi dan masalah.

3. Berbasis kontijensi

   Yang dijabarkan dari faktor penyebabnya : a. Faktor manusia sebagai penyebab (konflik sosial dengan masa besar, demo yang by design untuk melawan pemerintah yang berdampak chaos, dsb) b. Faktor alam (bencana alam : banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung dsb) c. Faktor kerusakan infra struktur (jembatan putus listrik mati air minum tercemar dsb).

Dari pemetaan di atas maka sistem pengamanannya dapat dibuat model sispamkota atau sistem pengamanan kota yang mencakup :

1. Sistem pemetaan digital maupun manual untuk mengamankan dan mengendalikan arus lalu lintas secara virtual dan aktual yang dikendalikan dari pusat komando pengendalian komunikasi dan koordinasi serta informasi ( K3i), atau back office atau operation room
2. Sistem pengendalian secara virtual untuk face recognation,vehicle recignation atau model model recognation lainnya
3. Pengamanan untuk monitoring dengan kamera cctv pada lokasi lokasi yang ditentukan sebagai COG ( centre of gravity ) atau yang dapat dikatakan sebagai wilayah strategis yang menjadi simbol kekuasaan peradaban dan pelayanan publik dsb. Tempat tempat ini akan menjadi sasaran atas ketidakpuasan atau sebagai wujud perusakan peradaban. Berbasis pada COG dapat dibuat model atau pola pengamanan baik yang menjadi sasaran maupun dari COG perusuh atau pelaku kriminal maupun dari massa yang mengganggu sistem keteraturan sosial.
4. Sistem pengamanan massa secara virtual maupun aktual dapat diamankan melalui sistem pengendalian massa maupun pengamanan sistem drone
5. Sistem pengamanan bagi civil disobidience maupun sistem civil disorder dalam pola pola preemtif preventif represif hingga rehabilitasi.

6. Penggerakkan penanganan situasi atau kondisi emergency dan kontijensi dapat mengacu pada pola pola contigency policing maupun emergency policing. Melalui sistem satgas yang berbasis antar fungsi, berbasis antar wilayah dan berbasis antar stake holder.

7. Sistem penegakkan hukum yang didukung bukti virtual maupun rekam jejak digital akan menjadikan suatu bentuk akuntabilitas dan membongkar aktor intelektual.

8. Sistem operasi intelejen yang mencakup pengumpulan data, analisa data untuk menghasilkan algoritma yang berisi info grafis info statistik dan info virtual yang dapat digunakan on time real time any time sebagai bentuk prediksi antisipasi dan memberi solusi.sistem pemberdayaan soft power dan untuk counter issue atas pelabelan dan mengungkap para dalang atau aktor intelektual.

9. Sistem operasional cyber cops dan forensic cops melalui cyber security dan forensic security yang berupaya pada counter hoax dan mengatasi berbagai pemutarbalikan fakta provokasi dan penanganan berbagai hal atau tindakkan yang inkonsistusional maupun yang kontra produktif dsb

10. Sistem pada point 1 sd 9 digunakan pra saat maupun pasca yang secara berkesinambungan dan terus menerus dilakukan mengacu pola implementasi E policing.

**B. Pola pengamanan lalu lintas**

Dijabarkan melalui road safety policing. Road safety policing merupakan pemolisian pd upaya upaya mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dsn lancar. Hakekat dari road safety policing adalah pada meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Terbangun budaya tertib berlalu lintas dan adanya pelayanan prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Pergerakan, traveling yang menjadi pilar produktivitas tidak boleh lumpuh.

Kebijakan yang mengatur pembatasan atau pelarangan pergerakkan agar produktifitas dan aktivitas masyarakat dpt bertahan dan bangkit kembali untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang. Disiplin warga masyarakat akan sangat menentukan keberhasilannya.Polisi di dalam menangani lalu lintas secara manajerial maupun operasional melakukan upaya upaya mendukung pendisiplinan masyarakat melakukan kontrol sosial dan memberikan pelayanan yang prima di era new normal adalah membangun sistem yang berkaitan dengan :

1. Edukasi yang dikembangkan menjadi sistem literasi road safety
2. Penegakkan hukum yang dikembangkan dalam sistem data kecelakaan , data pelanggaran secara on line atau berbasis AI dan IoT, penegakkan hukum secara elektronik dan membangun sistem patroli pada polisi jalan raya
3. Rekayasa lalu lintas dengan membangun sistem algoritma road safety melalui sistem pemetaan wilayah dan masalah secara digital yang berbasis pada : a. data jalan, b. data kendaraan, data pergerakkan, c. data kecelakaan, d. data pelanggaran, e. data trouble spot dan black spot f. data dr kajian antar moda transportasi angkutan umum, g. data yg berkaitan angkutan sungai danau pan penyeberangan, data perbatasan, h. data road safety yang berkaitan dengan pariwisata,i. kajian smart city dsb

   Yang disajikan dalam sistem info grafis, info statistik dan info virtual yang on time real time dan any time. Apa yang tersaji juga dapat sebagai produk untuk memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi.
4. Registrasi dan identifikasi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dibangun Eri : electronic registration and identification yang merupakan sistem data kendaraan bermotor yang berbasis pada ANPR ( autimatic number plates recognation) berasis aplikasi on board unit RFID, QR dan sistem online pada BPKB, STNK dan TNKB. Dengan sistem sistem tersebut registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat berfungsi sebagai penjamin legitimasi keabsahan asal usul kepemilikan dan sebagai fungsi kontrol yang dikaitkan penegakkan hukum

dan mendukung forensik kepolisian maupun pelayanan prima kepolisian.

Registrasi dan identifikasi pengemudi atau SIM berkaitan dengan sistem safety driving dan safety riding dari sekolah mengemudi, sistem uji sim, sistem penerbitan sim. Yang juga akan dikaitkan pada fungsi kontrol maupun penegakkan hukum dan pelayanan prima yang dikembangkan pada sistem traffic attitude record ( TAR) dan program de merit point system ( DMPS) dalam sistem perpanjangan sim.

Dengan adanya ERI akan mendukung program pemerintah yangg berkaitan dengan : ERP, E PARKING, ETC, E BANKING, E SAMSAT bahkan ETLE.

5. Membangun pusat K3i : komunikasi koordinasi komando pengendalian dan informasi yang dapat mengintegrasikan antar fungsi dan stakeholder. Yang dapat memonitor mengendalikan melakukan komunikasi dan solusi dalam sistem call centre dan quick response. Pusat k3i juga berfungsi sebagai comand centre bahkan crissis centre yang mampu menggerakkan emergency policing maupun disaster policing. Pusat k3i ini sbg back office dan sbg big data system dan one gate service system.

   Pusat K3i ini didukung dlm sistem2 IT for road safety ( tmc, eri, ssc, sdc, intan, tar dan dmps). Pada pusat k3i dikelola dalam smart manajemen yang diawaki oleh cyber cops yang mampu memberikan sistem pelayanan virtual maupun aktual.

6. Membangun sinergitas antar pemangku kepentingan di dlm membangun smart city ( smart living dan smart mobility) dalam program yang diimplementasikan dalam RSPA (road safety partnership action). Implementasi RSPA pada tingkat polres polda maupun mabes. Sinergitas ini didukung sistem yang dapat mensinergikan sistem data masing masing stakeholder dala sistem protokol data.

7. Membangun road safety research and development yang akan menjadi pusat dlm melakukan kajian analisa dampak lalu lintas dan penelitian yang berkaitan dengan road safety. TARC (traffic

accident research centre), laboratorium road safety) serta penerbitan jurnal ilmiah tentang road safety atau sebagai road safety brief.

8. Koordinasi dan pengembangan sistem penegakkan hukum lalu lintas yang tidak sebatas pada pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, melainkan dapat terus dikembangkan pada upaya E sidik dan pengungkapan kejahatan yang berkaitan dengan road safety baik administrasi, penyimpangan perilaku maupun hal hal illegal atas dokumen maupun kegiatan yang merusak maupun membahayakan lalu lintas, dsb.

Program pendukung pada road safety policing dibangun pada pilar :

1. Literacy road safety,
2. Road safety coaching,
3. Intellegent road safety media management dan
4. Algoritma road safety.

Tata kenormalan baru akan mampu memberikan pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum,administrasi dan kemanusiaan secara prima. Terkendalinya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Meningkatnya kualitas keselamatan, menurunnya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas. Terbangun budaya tertib berlalu lintas dan adanya pelayanan prima di bidang road safety yang memenuhi standar : kecepatan, ketepatan, tingkat akurasi yang tinggi, transparansi, akuntabilitas (secara: moral, hukum, administrasi dan fungsional), informatif dan mudah diakses.

Implementasi pada pengamanan komunitas maupun lalu lintas dapat mengacu langkah langkah asta siap. Polisi dan pemolisiannya ditunjukkan pada semakin manusiawinya manusia dalam keteraturan sosial yang meningkat kualitas hidupnya. Di dalam konteks democratic policing polisi dalam pemolisiannya menunjukkan adanya : 1. supremasi hukum, 2. mampu memberikan jaminan dan perlindungan ham, 3. transpan dan akuntable, 4. berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta 5. adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Pemolisian sbg segala usaha dan upaya kepolisian dalam tingkat manajemen

maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Pemolisian dpt dikategorikan : 1. Berbasis wilayah 2. Berbasis fungsi dan 3. Berbasis dampak masalah. Brimob dalam pemolisiannya untuk mampu memberikan pelayanan publik di bidang keamanan, keselamatan, administrasi, informasi, hukum dan kemanusiaan yang prima dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial diperlukan adanya pengembangan kapasitas kompetensi infrastruktur struktur dan sistem sistemnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.000 pulau lebih dan dengan perbatasan yang variatif. Sebagai negara yang masyarakatnya majemuk lebih dari 300 suku bangsa dan bahasa yang sarat dengan primordialisme serta potensi konflik yang tinggi. Di samping itu juga tergolong dalam kawasan ring of fire dan rawan bencana.

Melihat menimbang situasi asta gatra serta mempertahankan kedaulatan NKRI, ketahanan bangsa, daya tangkal dan daya saing diperlukan satuan yg mampu mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial dan menghadapi permasalahan dengan intensitas tinggi secara demokratis profesional cerdas bermoral dan modern yang mampu memberikan pelayanan kepolisian dengan prima. Implementasi pemolisiannya dapat dikategorikan sebagai:

1. Fungsi utama,
2. Fungsi pendukung operasional,
3. Fungsional
4. Fungsi khusus untuk menangani pola pemolisian yg berbasis dampak masalah.

Pemolisian di era digital pelayanan secara virtual mendukung pelayanan aktual yang mampu digerakkan cyber cops dan forensic cops yang memiliki kompetensi polisi siber melalui E policing maupun forensic policing.

Polisi sebagai fungsi utama untuk mengatasi hal hal yang bersifat rutin maupun emergency ( emergency policing) maupun hal hal yang bersifat kontijensi yang dapat dikategorikan dalam disaster policing maupun border policing termasuk penjagaan aset aset utama negara dan pulau

pulau terluar. Perlu adanya satuan fungsi pendukung operasional yang berkaitan dengan penanganan kejahatan intensitas tinggi ( extra ordinary crime bahkan pada trans national crime) maupun masalah cyber crime dan forensic crime yang ditangani dengan forensic policing maupun cyber policing. Polisi dalam pemolisiannya juga untuk menangani pemolisian yang berbasis dampak masalah yang dibangun lintas wilayah lintas fungsi maupun lintas stakeholder melalui satgas. Implementasinya dapat mengacu pada langkah langkah asta siap :

1. Siap pilun (grand strategy, model atau panduan dengan standar dan aturannya)
2. Siap pusat K3i (komunikasi, koordinasi komando pengendalian dan informasi) sebagai back office atau operation room dengan berbagai sistem untuk call centre, quick response, back up system dan sistem transformasi, big data system, one gate service system, sistem analysis data dan menghasilkan algoritma melalui info grafis, info statistik dan info virtual yang real time on time dan any time.

   Semua itu di dukung dengan aplikasi yang berbasis artificial intellegence dan jejaring dengan berbasis internet of things.
3. Siap model model simulasi dan implementasi di lapangan secara virtual maupun aktual
4. Siap cipkon dengan sistem pemetaan wilayah, potensi dan masalah serta jejaring key informan sampai dengan lini terdepan.
5. Siap mitra yang mampu diberdayakan soft power maupun smart power.
6. Siap sdm yang mengawaki
7. Siap sarpas untuk perorangan, unit atau kelompok dan kesatuan
8. Siap anggaran secara budgeter maupun non bugeter.

Sejalan pemikiran di atas diperlukan petugas polisi yang profesional ( ahli), cerdas ( kreatif dan inovatif), bermoral ( dibangun dalam koridor kesadaran tanggung jawab dan disiplin) serta modern ( e policing maupun forensic policing).

# O2H : HUMANISME POLICING [91]

Polisi bekerja melalui pemolisian, keutamaannya ada pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Polisi bertanggungjawab akan adanya keamanan dan rasa aman warga masyarakat yang merupakan dasar bagi suatu masyarakat untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang.

Bisa dibayangkan apabila di dalam hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan sarat dengan ketakutan, kekhawatiran bahkan gangguan yang kontra produktif, tentu sulit untuk bisa menghasilkan produksi yang digunakan untuk bertahan hidup, apalagi untuk tumbuh dan berkembang. Keamanan dan rasa aman merupakan refleksi dan standar bagi suatu peradaban.

Banyak pihak dapat mengklaim mampu mengamankan, namun apakah mampu memberikan rasa aman yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat? Menurut Profesor Satjipto Rahardjo polisi dalam pemolisiannya bekerja O2H (otak otot dan hati nurani) bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan pembangunan peradaban. Dalam konteks inilah polosi tidak bisa serta merta digantikan robot atau sebatas mengandalkan AI.

Polisi dalam pemolisiannya menyatukan pekerjaannya pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat. Di sinilah pemolisian akan terus berkembang seiring dengan kemajuan dan perubahan jaman serta corak masyarakat dan kebudayaannya maupun bentuk kejahatan atau gangguannya.

Dengan harapan keberadaan polisi di dalam masyarakat yang modern dan demokratis terus dinamis dan mampu tumbuh berkembang, setidaknya satu langkah lebih maju dari masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, polisi dalam pemolisiannya akan terus mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman bagi masyarakat untuk menghasilkan produksi bagi peningkatan kualitas hidupnya.

91 https://transindonesia.co/2024/10/15/o2h-humanisme-policing/

Polisi yang pemolisiannya berbasis O2H selain tidak tergantikan robot juga menunjukan polisi tidak melakukan tindakan tindakan yang kontra produktif.

Keutamaan polisi dalam pemolisiannya akan menjadi dasar bagi polisi bekerja dengan tulus dan bereaksi dengan cepat. Adanya keamanan dengan rasa aman bisa dianalogikan: "orang yang ketakutan dan merasa terancam di dalam suatu tempat, tatkala mendengar sirine mobil patroli, dengan mendengar suara sirine, ia yakin ada polisi yang melindungi dan memberikan rasa aman bagi dirinya atau setidaknya ada yang siap menjaga dan melindunginya.

Di situlah keberadaan polisi mampu menjadi ikon keamanan yang keberadaannya aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan polisi setidaknya dapat mengurangi rasa ketakukan warga masyarakat akan adanya gangguan ataupun ancaman kriminalitas.

Polisi dan pemolisianya di dalam masyarakat yang modern dan demokratis dapat dikatakan democratic policing yang mengimplementasikan dalam:

1. Supremasi hukum
2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM.
3. Transparan
4. Akuntabel
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.

Implementasi democratic policing basisnya polisi yang pemolisiannya merefleksikan O2H.

Memang tidak semudah mengatakannya, semua itu perlu adanya perubahan mind set dan culture set secara berkesinambungan dengan berbasis literasi.

Permasalahan yang dihadapi kepolisanpun semakin kompleks dan terus meningkat. Di era digital sekarang ini cara parsial konvensional dan manual boleh dikatakan menjadi sarang terjadinya berbagai penyimpangan

atau dalam pelayanannya tidak prima. Pemolisian di era digital diperlukan adanya sistem pemolisian yang berbasis it atau yang dikenal dengan electronic policing (e policing).

E policing merupakan model pemolisian berbasis it yang diimplementasikan melalui : back office sebagai operation room, yang didukung aplication dan network.

Sistem sistem tersebut merupakan sistem terpadu dan terintegrasi yang berbasis data dan mampu memberikan pelayan prima dlm model one stop service. Dengan demikian pelayanan kepada publik di bidang: keamanan, keselamatan, administrasi, hukum, informasi dan keamanan dapat diimplementasikan secara tepat, akurat, transparan, aluntabel dan mudah diakses.

Pelayanan publik yang diberikan oleh kepolisian dengan sistem elektronik diharapkan mampu meminimalisir atau menghilangkan potensi penyimpangan yang berujung pada pemerasan, penerimaan suap maupun penyalahgunaan kewenangan.

Sistem pelayanan publik secara virtual maupun aktual yang berbasis IT dan berbasis on line pada big data akan mampu memenuhi standar pelayanan yang prima.

Polisi dan pemolisian di era digital sdh saatnya diimplementasikan di berbagai lini, tetap memerlukan sikap dan spirit O2H.

Berbagai masalah yang dihadapi polisi akan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya, dan kepercayaan publik serta tuntutan profesionalosme merupakan harapan dan kebutuhan di masa kini yang dipenuhi.

Polisi sebagai institusi besar di dalam mereformasi birokrasi yang paling mendasar dan paling sulit adalah reformasi secara kultural. Memberikan jaminan keamanan dan rasa aman merupakan pekerjaan utama polisi di dalam pemolisiannya yang diharapkan mampu mengangkat harkat martabat manusia dan untuk semakin manusiawinya manusia. Dr sinilah tugas polisi yang menggunakan basis O2H dapat dikategorikan sbg : penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Kesemuanya itu benang merahnya adalah terjaminnya

keamanan dan rasa aman sehingga terus meningkatnya kualitas hidup.

Seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan dan antara yang ideal seringkali tidak nyambung bahkan bisa bertentangan.

Namun melalui program pemolisian yang berbasis O2H diharapkan akan mampu menjembatani, menjadikan antara yang ideal dengan yang aktual ini semakin signifikan yang dapat ditunjukkan adanya keamanan dan rasa aman, semakin manusiawinya manusia dan meningkatnya kualitas hidup.

# SMART POLICING: IMPLEMENTASI SITUASI EMERJENSI DAN KONTIJENSI [92]

Disrupsi selain cepat juga berdampak pada berbagai produktifitas dalam kehidupan juga pada keteraturan sosial. Tatkala pengendalian atau penanganan atas disrupsi tidak mampu mengimbangi atau tertinggal maka berbagai hal yang kontra produktif dan terganggunya keteraturan sosial akan bermunculan. Tatkala bermunculan isu di era digital akan ada serangan yang berdampak gawat darurat atau emerjensi misalnya situasi menjadi "no electric dan no internet" tentu akan banyak masalah keteraturan sosial, yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sinilah perlu ada pemikiran bagaimana polisi dan pemolisiannya mampu menangani atau mengatasi disrupsi dengan berbagai dampaknya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, secara proaktif dan problem solving.

Pada era digital atau revolusi industri 4.0 tata kehidupan sosial banyak bergantung dari listrik maupun internet dan sistem sistem aplikasi on line yang berbasis elektronik. Tatkala kenormalan baru serangan forensik muncul dalam berbagai hal yang berdampak chaos. Polisi dalam pemolisiannya tetap dituntut untuk bertugas secara: profesional, cerdas, bermoral dan modern dan fungsional atau smart. Model smart policing merupakan model pemolisian yang mampu model orkestra yang mengharmonikan antara pemolisian konvensional, pemolisian elektronik maupun pemolisian forensik. Smart policing model pemolisian untuk mengatasi berbagai masalah kontra produktif yang konvensional, masalah masalah siber atau virtual di era digital juga masalah masalah forensik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas model smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi,

92 https://transindonesia.co/2024/10/16/smart-policing-implementasi-situasi-emerjensi-dan-kontijensi/

model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

Smart policing dalam implementasi conventional policing, e policing dan forensic policing secara konseptual ditunjukkan sbb :

1. Conventional policing

   Pendekatan ala polisi konvensional yang manual tradisional, kompetensi petugas sebagai pelindung pengayom yang dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, patroli, penanganan TKP ( tempat kejadian perkara), penanganan kejahatan dari pemeriksaan penggeledahan penangkapan penyitaan hingga pengejaran secara konvensional diperlukan kompetensi dasar untuk pengetahuan maupun ketrampilannya. Penanganan berbagai masalah dengan reaksi cepat, penangan konflik sosial yang melibatkan massa besar, demonstrasi dan konflik sosial, premanisme jalanan (blue collar crime), perkelahian antar warga/ perang kampung, kecelakaan lalu lintas hingga bencana alam. Penanganan secara reaktif dan cara cara fisik masih diperlukan dan dibutuhkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Kemampuan pemetaan masalah, pemetaan wilayah, pemetaan potensi, bela diri, menembak, kemampuan dasar kepolisian untuk menjaga mengatur serta patroli. Mendatangi dan menangani TKP, menerima laporan dan pengaduan dsb. Penanganan pelayanan kepolisianyg berkaitan pelayanan administrasi, pelayanan hukum, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan tetap memerlukan pengetahuan dan kompetensi conventional policing.

2. Electronic Policing ( E policing )

   Pemolisian secara elektronik meruoakan pemolisian yang saling terhubung atau on line yang mampu memberikan pelayanan secara virtual dan mampu mendukung pemolisian yang konvensional. Landasan dasar E policing adalah melalui back office ( sebagai operation room atau pusat k3i ( komunikasi, koordinasi, komando pemgendalian dan informasi)). Yang di

dukung aplication yg berbasis Artificial intellegence ( AI) juga networking yg berbasis internet of things (IoT). Aplikasi yang berbasis AI mampu berfungsi untuk merecognize atau inputing data baik orang, benda, kendaraan, lingkungan hingga aktifititas. Melalui AI dapat dikonstruksi menjadi model untuk ditemukan algoritma yang berupa info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Algoritma dapat berfungsi sebagai prediksi, antisipasi maupun solusi yang dapat diakses secara real time, any time dan on time. Algoritma dapat menjadi landasan atau acuan indeks atau setidaknya sebagai potret visual atas situasi dan kondisi keteraturan sosial. Kompetensi dan pengetahuan bagi petugas siber ( cyber cops) yang mengawaki e policing adalah kemampuan memahami data digital inputing dan analisanya untk menghasilkan algoritma. Memahami prinsip prinsip dasar di era digital dan sistem IT dan proses pembangunan big data. Maupun sistem sistem terintegrasi menuju one gate service system. Sistem analisa dan algoritma merupakan bagian early warning dan problem solving yang prediktive antisipative serta solutive. Petugas cyber cops akan mengimplementasikan smart management agar pemolisian secara aktual maupun virtual ada suatu sistem yang sejalan saling menguatkan atau saling mendukung. Permasalahan2 perbankan, permasalahan keuangan, korupsi, terorisme, penyelundupan, pembajakkan, bahkan cyber crime akan terus berkembang sehingga memerlukan polisi siber yang profesional, mampu menganalisa dan menemukan potensi kejahatan. Kejahatan white collar crime tentu dilakukan secara teroganisir dan dilakukan para ahli atau setidaknya kaum yang memiliki kompetensi. Dengan demikian cyber security menjadi sangat penting dan memdasar.

3. Forensic Policing

Di era disrupsi perkembangan masalah nuklir biolgi maupun kimia bahkan fisika ( nubika) hal hal sosial dapat menjadi suatu masalah bagi terjaminnya keteraturan sosial. Era post truth dengan senjata hoaxpun dapat digunakan untuk menghambat merusak bahkan mematikan produktifitas. Forensik policing memerlukan

kompetensi dan pengetahuan dasar tentang nubika (nuklir biologi kimia fisika maupun masalah sosial). Dampak atas penyalahgunaan nubika atau pemanfaatan nubika oleh penjahat yang dapat menteror atau mematikan produktivitas secara masaal dan berdampak luas. Kompetensi para petugas forensic policing secara memdasar yang berkaitan dengan konseptual dan teknik forensik bahkan mampu mengetahui pemanfaatan nubika maupun masalah masalah sosial yang akan dijadikan senjatanya. Kemampuan forensik didukung dengan sistem peralatan yang dapat didukung petugas polisi siber maupun pemolisian yang konvensional. Pelayanan di bidang forensik berkaitan pada sistem security yang dapat dikembangkan pada pemgamanan pada sector : private, industrial, public, ecological maupun cyber.

Smart policing sebagai model pemolisian yang senantiasa siap memberikan pelayanan kepada publik dalam berbagai situasi, juga dalam situasi emerjensi maupun kontijensi sekalipun.

Masa pandemi manusia sebagai mahkluk sosial diputus rantai sosialnya. Sistem online yang berbasis elektronik masih memungkinkan menjembatani. Tatkala listrik dan internet terganggu atau bahkan sampai hilang sama sekali tentu diperlukan era kenormalan baru untuk menjadi solusinnya.

10 Point Smart Policing setidaknya mencakup :

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian ( policing )
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual

7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emerjensi maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern

dukungan penelitian dan pengembangan serta pembangunan laboratorium mjd sangat penting dan mendasar.

Penelitian merupakan bagian penting mendukung smart policing secara konseptual maupun teoritikal dengan berbagai pendekatan. Model smart policing dapat dibangun secara konseptual, secara fisik, secara scientific, secara infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya, selain itu juga pada kurikulum dan pengajarannya, agar tetap fungsional dalam kondisi emerjensi sekalipun.

10 Point model smart policing untuk menangani masalah emergency ( Emergency Policing)

1. Model Pemolisian Transplantasi sebagai penjaga, pengamat, jembatan penghubung, pelatih, back up system dsb, hingga yang diback up dapat berfungsi kembali.
2. Pola-pola pemolisian secara managerial setidaknya mencakup: 4 unsur:
    a. Kepemimpinan,
    b. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarana, prasarana dan anggaran),
    c. Operasional,
    d. Capacity building.
3. Implementasinya dapat mengacu pada community policing/ polmas
4. Di back up dengan sistem-sistem online yang berbasis elektronik

5. Personilnya bersifat ad hoc meruoakan gabungan dari berbagai fungsi maupun antar wilayah
6. Perkantoran dengan membangun tenda-tenda lapangan, kontainer atau memanfaatkan tempat-tempat/ lokasi yang biasa diberdayagunakan.
7. Membangun posko-posko sebagai pusat K3i yang berisi peta-peta dan jaringan-jaringan elektronik maupun kontak- kontak person. Dapat dibuat pengkategorian : Merah : Rawan dua, Kuning : Rawan satu, hijau : kondisi normal. Model pergeseran pasukan untuk back up kontijensi dengan peta rute dari dan ke lokasi sasaran dengan berbagai alternatifnya juga pemberdayaan teknologi indormasi dan komunikasi.
8. Kesiapan Logistik, transportasi darat, laut maupun udara, ambulans, untuk evakuasi dan bantuan kemanusiaan.
9. Rumah sakit lapangan dan perlengkapan, obat obatan dan tenaga medisnya.
10. Operasionalnya dapat menerapkan model Asta Siap. Siap : Posko, Piranti Lunak, model penanganan lapangan, siap mitra, jejaring, personil, logistik, anggaran.

# KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SESPIM LEMDIKLAT POLRI [93]

Kajian dan pengembangan Sespim Lemdiklat Polri dikaji dari :

A. Keutamaan dari : Dosen, widya iswara, tenaga pendidik (gadik) atau dari petugas di bidang kependidikan (gadikan) di Sespim Lemdiklat Polri yang dilihat dari peran dan fungsinya sbb :

   1. Tingkat atau kualitas menginspirasi dan menjadi role model atau memberikan pencerahan dalam pikiran perkataan dan perbuatannya yang dapat dilihat dari :

      a. Kualitas literasinya
      b. Produk produk tertulisnya
      c. Produk produk virtualnya
      d. Kompetensi mengajar dan memberikan transformasi pengetahuan kepada para peserta didik
      e. Kualitas memberikan bimbingan atau pengasuhan kepada para peserta didik dan sebagainya

   2. Kemampuan menginspirasi dan untuk adanya :

      a. Kebaruan,
      b. Pencegahan,
      c. Peningkatan kualitas,
      d. Perbaikan
      e. Pembangunan

   3. Kemampuan Memotivasi, menstimuli semangat dalam proses pembelajaran mencapai keutamaan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban secara :

93 https://benuanews.com/irjen-pol-prof-dr-chryshnanda-dwilaksanakajian-dan-pengembangan-sespim-lemdiklat-polri/
https://lovebandung.com/index.php/2024/10/19/kajian-dan-pengembangan-sespim-lemdiklat-polri/

a. Moralitas
b. Profesionalitas
c. Kreatifitas
d. Modernitas dan sebagainya

4. Kualitas menanamkan keutamaan sebagai pemimpin
5. Kemampuan mentransformasi melalui dialog peradaban
6. Ketegasannya dalam konteks ajrih asih atau penuh welas asih
7. Kualitas moralitasnya dalam membangun kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
8. Kemampuan mendidik dan melatih menghadapi situasi krisis ( emerjensi maupun kontijensi )
9. Kemampuan mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif dan inovatif
10. Kemmpuan membranding untuk menyiapkan menjadi siapa sebagai" Pemimpin yang transformatif "

B. Pola pembelajaran bagi calon Pemimpin di masa depan setidaknya mencakup:

1. Bidang akademik
   a. Kurikulum Dasar berkaitan dengan moralitas kepemimpinan
      1) Kebijakan nasional
      2) Kebijakan Polri
      3) Pancasila, UUD 45, NKRI, Kebhinekaam
      4) Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Polri
      5) Etika Publik
   b. Kurikulum pokok atau Inti
      1) Masalah sosial yang berkaitan deengan keteraturan sosial

2) Hukum, Penegakan Hukum dan Keadilan

3) Kejahatan, Penanganan dan Pencegahan serta Penanggulangannya

4) Model dan Pola Pola Pemolisian

c. Kapita Selekta ( berkaitan dengan isue isue penting yang terjadi dalam masyarakat

1) Idiologi

2) Politik

3) Ekonomi

4) Sosial Budaya

5) Pertahanan

6) Keamanan

7) Pembangunan Nasional

8 ) IT

9) Media

10) Kejadian Kejadian up to date dan sebagainya

2. Pembangunan Karakter Pemimpin

a. Integritas

Pikiran perkataan dan perbuatan yang direfleksikan dalam keseharian pada proses pembelajaran

b. Komitmen

1) Etika Mengajar

2) Etika Belajar

3) Pedoman dan Panduan dalam Pembelajaran

c. Kompetensi

1) Penulisan dengan model berpikir dan pengembangan imajinasi yang ditunjukan pada suatu: kebaruan, proaktif, problem solving

2) FGD

3) Debat Publik

4) Seminar

5) Produk produk :

a) Model Polda, Polres, Polsek, Pos Pol dan Bhabimkantibmas

b) Bunga Rampai dari NKP

c) Tulisan akhir perorangan

d) Model Penyusunan Indeks Keamanan

e) Bunga Rampai Pemikiran satu hari satu ide dari para peserta didik

6) Kompetisi yang Fair

d. Keunggulan

Mampu membangun siapa yang tidak sebatas apa dan bagaimana dengan standar : Sangat memuaskan dan memuaskan. Semua ini dibangun atas Kesadaran tanggung jawab dan disiplin.

3. Pengasuhan

a. Olah Jiwa/ Kerohanian

b. Olah Rasa / kesenian dan budaya

c. Olah Raga

4 Pembulatan

Model simulasi studi kasus dalam situasi dan kondisi krisis, emerjensi ataupun kontijensi

5. Pengabdian Masyarakat

a. PKB Juang

b. Penelitian/ Pengkajian,6 Bench Mark dapat dikaitkan dalam KKDN dan KKLN

c. Literasi
d. Bakti sosial

6. Inovasi dan Kreatifitas

C. Pola pembelajaran bagi para peserta didik mencakup :

1. Pemahaman teori dan konsep konsep yang relevan
2. Studi kasus
3. Pemecahan masalah
4. Capacity building ( inovasi dan kreatifitas )

Peserta didik diajar dan dilatih merasakan sebagai pemimpin yang mampu mengambil kebijakan dalam berbagai situasi yang ekstrim sekalipun secara konseptual teoritikal dan secara pragmatis yang dituangkan melalui diskusi, penulisan dan debat publik.

Para peserta didik akan distimuli melalui olah pikir dalam satu hari satu ide yang dibuat secara online: bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban yang bebas dalam menjabarkan dalam pemikiran yang merdeka, visioner dan akuntabel. Karya-karya peserta didik akan diedit menjadi suatu bunga rampai dalam mendukung pembangunan literasi kepolisian.

D. Keunggulan Alumni Sespim Lemdiklat Polri

Keunggulan alumni Sespim Lemdiklat Polri, sebagai Pemimpin di masa depan dapat dikategorikan sbb :

1. Kualitas karakter kepemimpinan transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Kualitas wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme
3. Kualitas pemahaman dan mampu mengimplementasikan keutamaan polisi dalam pemolisiannya
4. Kualitas wawasan dan pengetahuan serta kampuan menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru

5. Kualitas pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emerjensi maupun kontijensi
6. Kualitas keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu
7. Kualitas kesiapan dan kemampuan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini
8. Kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik
9. Kemampuan menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern
10. Kemampuan membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional

# POLISI DAN PEMOLISIAANNYA YANG PCBM [94]

Polisi bekerja dalam ranah birokrasi dan ranah masyarakat, benang merahnya dapat dikatakan sebagai pemolisian. Policing (pemolisian) merupakan segala upaya kepolisian pada tingkat manajemen maupun operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Dengan demikian spirit polisi dalam pemolisiannya secara manajerial maupun operasional adalah untuk kemanusiaan dengan PCBM ( profesional, cerdas, bermoral dan modern) dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepolisian kepada publik mencakup :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan

Standar pelayanan kepolisian kepada publik adalah : cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.

Polisi dalam menegakan hukum adalah demi semakin manusiawinya manusia, yang merupakan upaya membangun peradaban agar terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial. Konteks inilah yang dikatakan tujuan pemolisian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman serta terwujudnya keteraturan sosial.

94 https://transindonesia.co/2024/10/19/polisi-dan-pemolisiaannya-yang-pcbm/

Pola pola pemolisian bisa dikembangkan sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Model pemolisian dapat dibuat sebagai acuan pengembangan kualitas kepemimpinan, infrastruktur dan model modelnya sbb :

1. Model pemolisian yang berbasis wilayah :
    a. Border policing ( pemolisian di kawasan perbatasan )
    b. Maritime policing ( pemolisian di kawasan maritim atau kepulauan atau kawasan pantai)
    c. Industrial policing ( pemolisian di kawasan industri)
    d. Disaster policing ( pemolisian di kawasan rawan bencana )
    e. Bisa dikembangkan dari model orientasi kegiatan masyarakatnya (community oriented policing) pada masayarakat perkotaan, pertanian, nelayan, perkebunan, buruh dsb
2. Model pemolisian yang berbasis pada fungsinya : fungsi utama, fungsional maupun fungsi pendukung sbb:
    a. Road safety policing ( pemolisian berbasis pada road safety atau lalu lintas
    b. Paramilitary policing, model pemolisian ala paramiliter
    c. Cyber policing, pemolisian dalam memberikan pelayanan secara virtual
    d. International policing, pemolisian internasional seperti : pasukan misi perdamaian PBB, laision officer, hubungan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan, studi banding dan pertukaran kemampuan polisi, dsb
    e. Emergency policing, model pemolisian menghadapi situasi kegawat daruratan dan sebagainya.
3. Model Pemolisian yang berbasis dampak masalah :
    a. Democratic policing

b. Electronic policing, pemolisian secara elektronik yang merupakan model pemolisian di era digital atau era revolusi industri 4.0

c. Forensic policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru dan sebagainya.

Memahami polisi dan pemolisiannya dari model di atas adalah secara holistik atau sistemik yang tidak dipahami secara parsial.

Polisi dalam pemolisiannya dalam bertindak tegas sekalipun spiritnya tetap untuk:

1. Melindungi,
2. Mengayomi dan
3. Melayani agar ada keteraturan sosial. Hal ini menunjukan bahwa manusia adalah aset utama bangsa maka di situlah hakekat pemolisian untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa

Polisi dengan pemolisiannya dalam menegakan hukum untuk :

1. Menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab
2. Mencegah agar konflik meluas atau semakin besar
3. Melindungi mengayomi melayani korban dan pencari keadilan
4. Membangun budaya tertib
5. Adanya kepastian
6. Edukasi

Keberhasilan pelakasanaan tugas polisi dengab pemolisiannya bukan semata mata pada pengungkapan perkara namun juga dilihat dari keteraturan sosial dan tingkat kepercayaan publik serta kualitas pelayanannya. Polisi dalam pelayanannya kepada publik merupakan ikon atau simbol : kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial. Polisi dalam pemolisiannya dilihat dari tingkat : profesionalismenya, kecerdasannya, moralitasnya dan modernitasnya

Membangun kepolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern dapat dibangun melalui :

1. Pembangunan pendidikan yang berlandaskan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
2. Kepemimpinan yang tranformasional
3. Keteladanan
4. Penanaman nilai nilai kemanusiaan, peradaban dan keteraturan sosial
5. Membangun infrastruktur dan sistem sistemnya yang berefek pada budaya malu dan kualitas pelayanan publik yang prima

Polisi melalui pemolisiannya merupakan bagian bahkan refleksi dari masyarakat yang dilayaninya.

Point Point Polisi dalam Pemolisiannya yang Profesional Cerdas Bermoral dan Modern

1. Polisi dan Pemolisiannya berbasis pada Ilmu Kepolisian
2. Membangun danengembangkan model pemolisiannya berbasis pada corak masayarakat dan kebudayaannya
3. Inisiatif anti korupsi dengan membangun sistem distem on line yang bernasis elektronik ( back office, application yangvsetidaknya berbasis Ai dan network yang berbasis IoT)
4. Membangun birokrasi yang profesional

   Berbasis kinerja atau kompetensi dan pendekatan impersonal
5. Profesionalismenya berbasis SOP yang mencakup :
   a. Bekerja sesuai dengan Job description dan job analysis
   b. Ada standardisasi keberhasilan sebagai ukuran standar keberhasilam pelaksanaan tugas
   c. Ada sistem penilaian kinerja
   d. Ada sistem reward and punishment yang fair
   e. Ada etika kerja ( apa yg hrs dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan)
6. Membangun budaya anti korupsi dalam birokrasi
   a. Ada core value yang menunjukan keutamaannya

b. Keteladanan dari pimpinan, senior dll
c. Pendekatan impersonal / berbasis kompetensi
d. Sistem managerial yang berbasis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berbasis pada profesionalisme
e. Penerapan SOP secara baik dan benar
f. Kepemimpinan yang transformatif

7. Sistem pengawasan dan akuntabilitas
   a. Dari sistem on line yang berbasis elektronik
   b. Penerapan SOP
   c. Mentoring
   d. Sistem laporan
   e. Waskat
   f. Sistem audit dan akuntabilitas kinerja
8. Penegakan hukum
   a. Penyelidikan
   b. Penyidikan
   c. Pertanggungjawaban dan rehabilitasi sosial
9. Keutamaan polisi dalam pemolisiannya untuk :
   a. Kemanusiaan
   b. Keteraturan sosial
   c. Peradaban
10. Strategi strategi pemolisiannya mencakup :
    a. Akademis
    b. Yuridis
    c. Sosiologis
    d. Operasional

e. Soft power dan smart power

f. Politis

11. Menerapkan Smart Policing yang mengharmonikan antara : Conventional policing, Electronic policing dan Forensic Policing.

# PANTAS, BENAR, LAYAK DAN MENYELAMATKAN BAGI POLISI DALAM PEMOLISIANNYA [95]

Polisi dalam pemolisiannya yang hakiki dilihat dari moralitasnya, kepantasannya atau kepatutannya, kelayakannya atau kompetensinya dan upaya upaya menyelamatkan atau jiwa penolong dalam memberikan pelayanan kepada publik bagi keutamaannya yaitu : kemanusiaan, ketwraturan sosial dan peradaban. Semua itu bagi mengangkat harkat martabat banyak orang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Polisi dihormati karena pikiran, perkataan dan perbuatanya pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Dadi polisi kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane ( menjadi polisi harus ada manfaatnya, kalau tidak ada manfaatnya maka tidak ada gunanya). Dengan demikian polisi dihormati, dipercaya dan dibanggakan bukan dari : pangkat, jabatan, kekuasaan, kepandaian atau kekayaannya. Tentu bukan pula karena memiliki kewenangan, kekuasaan dan kekuatannya. Polisi dalam pemolisiannya juga memberikan pengajaran yang mencerahkan, pengharapan bagi hidup dan kehidupan serta menyelamatkan. Polisi sejatinya juga sebagai guru yang patut diteladani yang menjadi sumber energi. Polisi dalam pemolisiannya dituntut dan diwajibkan melalukan hal yang pantas untuk mewakili banyak orang sebagai penegak hukum dan keadilan.

Polisi dalam pemolisiannya juga dituntut untuk transformatif yaitu berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, mampu mengatasi masalah, harapan di masa kini dan menyiapkan masa drpan yang lebih baik.

Selain pantas polisi dalam pemolisiannya juga dituntut untuk benar, tindakannya secara hukum dengan atau tanpa upaya paksa bijaksana

95 https://transindonesia.co/2024/10/19/pantas-benar-layak-dan-menyelamatkan-bagi-polisi-dalam-pemolisiannya/

yang bermanfaat bagi hajat hidup banyak orang. Polisi yang benar akan menjauhkan diri dari ketamakan, kejumawaan maupun amarah dalam pemolisiannya. Dalam peribahasa Jawa dikatakan : " Melik Nggendong Lali ", hasrat atau keinginan bisa berdampak lupa diri, apalagi ketamakan menguasai. Ki Ageng Suryo Mentaram mengajarkan untuk menasehati keinginan. Keinginan tatkala tercapai akan muncul keinginan keinginan baru yang menjurus kepada ketamakan. Pemimpin tatkala kerasukan kejumawaan akan lupa, merasa di zona nyaman lupa akan keutamaan. Polisi dalam pemolosiannya juga dituntut memiliki kompetensi yang kinerjanya berkualitas layak untuk mencapai keutamaannya melalui pemolisiannya.

Polisi dalam pemolosoannya tabu menghalalkan cara cara yang kontraproduktif, menyimpang apalagi mengorbankan banyak orang.

Kelayakan seorang polisi dalam pemolisiannya ada pada moralitasnya dalam menjalankan keutamaannya. Layak dikatakan sebagai polisi yang transformatif.

Polisi yang cengeng pemolisiannya menciderai kepercayaan publik dan kontra produktif. Polisi yang cengeng akan mengandalkan atau bergantung orang lain, mengeluh, menyalah nyalahkan, iri dengki, menabur kebencian dan permusuhan, tidak peka, tidak peduli dan tanpa bela rasa.

Polisi yang memiliki kelayakan akan menyelamatkan, membawa pada kebaikan dan perbaikan. Mampu mencegah yang jahat berkuasa, memberi ruang bagi orang baik dan benar dan senantiasa mencerahkan. Menjadi role model, berani melakukan perbaikan dan perubahan atas berbagai hal yang keliru dan kontra produktif. Berpikir visioner, proaktif dan problem solving.

Polisi dalam pemolisiannya " Pantas dan Benar, Layak dan Menyelamatkan" kebijakannya bijaksana bagi meningkatnya kualitas hajat hidup banyak orang

Moralitas dan Mentalitas Polisi dalam Pemolisiannya dapat dikaitkan dengan etika yaitu di jalur atau di jalan yang baik dan benar. Mental polisi dalam pemolisiannya yang pantas dan benar, layak dan menyelamatkan

pemolisianya dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial. Yang dapat ditunjukan dari niatnya mentalnya dapat dilihat dari perilaku yang baik dan benar. Moralitas maupun mentalitas polisi dalam pemolisiannya dapat dilihat dari tingkat kesadarannya, tanggungjawabnya, tingkat disiplinnya.

Polisi dalam mengimplementasikan keutamaan pemolisiannya. Landasannya bekerja dengan tulus bereaksi dengan cepat.

Pemolisian merupakan cara utuk mencapai tujuan yang menunjukan inisiatif anti korupsi dan reformasi birokrasi.

Kesemuanya itu dapat dipertanggungjawabkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional maupun sosial yang menunjukan inisiatif anti korupsi dan reformasi birokrasi.

Akuntabilitas polisi dalam pemolisiannya mencakup :

1. Moral ( niat baik dan benar )
2. Hukum ( secara Hukum benar / tidak melanggar )
3. Adminsitrasi ( secara Administrasi benar / tidak melanggar )
4. Fungsional ( sesuai SOP )
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Passion polisi dalam pemolisiannya menunjukan :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan
2. Polisi sebagai pembangun peradaban
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan

4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan
5. Lemolisiannya menunjukkan tingkat dan kuakitas : profesional, cerdas bermoral dan modern yabg dilandasi : kesadaran, tangagung jawab dan disiplin
6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing
7 Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum
8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM
9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial
10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

# TEKNOLOGI KEPOLISIAN BAGI POLISI DALAM PEMOLISIANNYA [96]

Teknologi informasi dan ilmu pengetahuan di era kenormalan baru merupakan suatu kebutuhan dan keharusan bagi polisi dan pemolisiannya.

Di era digital, polisi dan dalam pemolisiannya dituntut pemolisiannya berkualitas prima dalam ranah kerja birokrasi maupun dalam masyarakat dalam usaha atau upaya kepolisian tingkat manajemen maupun operasional, dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Dengan demikian tatkala membahas polisi dan pemolisian di era digital atau kenormalan baru, teknologi kepolisian menjadi model untuk mendukung pekerjaan kepolisian di ranah birokrasi dan ranah masyarakat untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Sistem teknologi kepolisian merupakan suatu rangkaian atau model untuk menyatukan back office, application dan network yg berbasis artificial intellegence dan internet of things maupun model model teknologi lainnya.

Teknologi kepolisian setidaknya dapat dioperasionalkan pada ranah birokrasi maupun masyarakat untuk :

1. Memetakan atau mengkategorikan apa yg menjadi variabel atas pekerjaan kepolisian
2. Dari sistem pemetaan tsb maka dapat dibangun sistem inputing data atau sistem recognize yang mendukung sistem pelayanan publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan

96 https://lovebandung.com/index.php/2024/10/19/teknologi-kepolisian-bagi-polisi-dalam-pemolisiannya/

3. Teknologi pada point 1 dan 2 dapat dihubungkan secara holistik untuk membuat model yang dibutuhkan secara pragmatis dapat diimplementasikan pada sistem pelayanan kepolisian yang didukung teknologi sehingga dapat menghasilkan algoritma yang berupa infografis, info statistik maupun info virtual lainnya yang dapat untuk memprediksi, mengantisipasi maupun memberikan solusi.

4. Dari algoritma tsb dapat menjadi landasan atau acuan pengambilan keputusan untuk sistem pelayanan kepolisian :

   a. Pelayanan keamanan contohnya :

      1) Pengamanan komunitas maupun lalu lintas

      2) Quick response pada saat ada masalah emerjensi maupun kontijensi

      3) Sistem patroli virtual maulun aktual

      4) Intelejen media

      5) Manajemen media dan tindakan tindakan atas gangguan keteraturan sosial di dunia virtual

   b. Pelayanan keselamatan antara lain :

      1) IT for road safety yang terangkum pada model smart city dalam pemdekatan road safety road safety policing

      2) Safety And Security Centre untuk mendukung safer road

      3) Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle

      4) Safety Driving Centre untuk mendukung safer people

      5) Intellegent Traffic Analysis untuk mendukung program post crash

      6) Electronic Traffic Law Enforcement

      7) Traffic Attitude Record

      8) De Merit Point System dan sebagainya

c. Pelayanan hukum antara lain
   1) E sidik
   2) Sistem olah TKP
   3) Scientific investigation
   4) Pusat data kriminalitas
   5) Lie detector dan sebagainya

d. Pelayanan administrasi dapat dibangun dalam sistem. Sistem on line (smart management model)

e. Pelayanan informasi dapat dibangun protocol data system

f. Pelayanan kemanusiaan dalam standar pelayanan yang prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses)

5. Pelayanan pada point 4a s.d 4f dapat diimplementasikan pada komunitas maupun lalu lintas.

6. Point 1 s.d 5 dapat dibangun big data system dengan one service service system yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

7. Sistem teknologi kepolisian jenisnya dapat beragam sesuai dengan fungsi kepolisian atau sesuai corak wilayah dan kebudayaannya juga atas dampak masalah yang dapat mengganggu atau merusak keteraturan sosial.

8. Teknologi kepolisian secara manajerial maupun operasional kesemuanya dikaitkan dengan adanya digital record yang dapat dikaitkan pada program merit system.

9. Implementasi atas teknologi kepolisian ini dilakukan pada sistem E policing.

   E policing atau electronic policing merupakan model pemolisian di era digital yang berbasis pada back office aplication dan network. Dengan berbasis pada artificial intellegence dan internet of things dan sistem yang ada pada point 1 sampai dengan 8 merupakan basis landasannya. E policing model sistem pemolisian secara virtual

yang dapat melayani 1x 24 jam dan 7 hari seminggu tanpa terputus dengan standar pelayanan yang prima. Yaitu pelayanan kepolisian yang berstandar cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses. Model e policing dapat dikategorikan dalam komunitas (model harmoni: pemeliharaan keamanan yang modern n manusiawi) dan lalu lintas (model it for road safety).

Mengimplementasikan Harmoni maupun it for road safety prinsipnya adalah dengan membangun back office, aplication dan network. Back office berfungsi sebagai operation room atau ruang kontrol pusat k3i (komando kendali koordinasi dan informasi) sebagai pusat data dan analisis. Aplication dlm konteks E policing merupakan sistem-sistem inputing data analisa data dlm berbagai indikator yang nantinya dapat menghasilkan sistem data yang on time dan real time dalam bentuk info grafis, info statistik, maupun info virtual lainnya. Yang dapat dikembangkan dalam wujud indeks keamanan maupun indexs keselamatan maupun indexs lainnya. Adapun network dalam pengembangan teknologi kepolisian adalah model jejaring yang menghubungkan antar aplikasi dengan back office. Sistem operasional harmoni maupun intan akan di jabarkan melalui sistem pembangunan big data yang berbasis geografi dalam sistem pemetaan wilayah sistem sistem informasi wilayah masaalah dan berbagai kepentingan maupun dari dampak masalah. Sistem big data merupakan pilar one stop service.

Pada semua sistem on line atau elektronik yang dibangun diharapkan mampu menyajikan informasi yang akurat dan cepat secara on time dan real time dalam wujud info grafis. Hasil analisa data yang dihubung hubungkan sesuai indikator masing masing sub bagian akan menghasilkan indeks keamanan dan keselamatan (road safety) yang mampu memprediksi mengantisipasi dan memberikan solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak yang diyakini sebagai upaya pencegahan, langkah langkah proaktif dan problem solving sehingga dapat mengurangi ketakutan masy akan adanya ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) serta dapat terwujudnya keamanan dan rasa aman yang mendukung produktifitas masyarkat.

Keteraturan sosial baik di dalam komunitas maupun lalu lintas merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena daya tahan suatu

bangsa merupakan kemampuan berdaya tahan suatu bangsa terhadap berbagai hal yang kontra produktif pada semua aspek kehidupan dari luar maupun dari dalam yang dapat menggerus nasionalisme kebangsaan.

Membahas ketahanan nasional dapat dianalogikan sebagai tubuh manusia yang tidak hanya fisik tetapi juga filosofi, pandangan hidup dan berbagai upaya menata keteraturan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (gatra, setidaknya ada 8 gatra ditambah dari hukum, teknologi).

Gerusan terhadap gatra kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital yang mampu menembus ruang dan waktu bukan lagi dengan cara fisik semata melainkan dari cara virtual dapat memecah belah menggerus nasionalisme.

Di dalam pemanfaatan teknologi 4.0 inilah manusia bisa tergerus teknologi. Gempuran sistem on line pada berbagai pelayanan publik akan menimbulkan gesekan baru. Dunia virtual akan menguasai dunia aktual. Konflik benturan peradabanpun dapat terjadi yang berdampak luas.

Dalam negara yang modern dan demokratis ketahanan nasional merupakan suatu dasar untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang. Maka diperlukan adanya produktifitas dalam semua aspek dan lini kehidupan.

Namun faktanya di dalam proses produktifitas ada ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat merusak bahkan mematikan produktifitas.

Di sinilah fungsi negara hadir untuk menata keteraturan sosial mendukung produktifitas dan mengatasi ATHG dengan menjamin keamanan dan rasa aman seluruh rakyat sebagai anak bangsa. Yaitu dengan adanya hukum yang kuat adanya aparatur dan para pemangku kepentingan lainya yang bersinergi sehingga ATHG dari luar maupun dalam dpt diatasi bahkan dapat memberdayakan mjd kekuatan atau potensi yang mendukung produktifitas.

ATHG dari dalam maupun luar yang berdampak tergerusnya nasionalisme dan ketahanan nasional antara lain :

1. pembodohan melalui sistem pendidikan yang menanamkan nilai nilai anti Pancasila anti kebhinekaan dalam berbagai doktrin yang merusak ideologi dan nasionalisme bangsa,

2. Teknologi yang mencandui warga dalam memangkas sistem sistem sosial yang ada
3. Adu dombaan antar anak bangsa dengan pemanfaatan primordialisme
4. Perdagangan narkotika
5. Perusakan sistem birokrasi melalui korupsi
6. Sistem monopoli sistem bisnis dan perdagangan dsb.

Tatkala hal tersebut tidak mampu diatasi atau cara cara penanganannya masih sebatas cara manual parsial konvensional maka kemampuan berdaya tahan akan lemah tentu saja tidak mampu berdaya saing dengan bangsa lain.

Dalam membangun ketahanan suatu bangsa dari sisi gatra keamanan dapat menjadi pilar penyangga bagi gatra lainnya. Keamanan yang berdaya tahan terhadap gerusan secara internal maupun eksternal adalah membangun sistem good and clean government dengan harapan premanisme atau mafia birokrasi atau peluang peluang terjadinya penyimpangan penyalahgunaan kewenangan dapat di atasi dengan membangun E government.

Dukungan bagi terbangunnya E government adalah dengan membangun sistem E policing dan E banking. Konteks membangun keamanan dengan teknologi 4.0 yaitu melalui adanya back office, aplication dan network untuk adanya sistem big data.

Dukungan bagi terwujudnya E government dengan pendekatan keamanan adalah melalui pemolisian yang proaktif dan problem solving. Kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, model pemolisian yang dapat dikembangkan melalui model smart policing yaitu harmoninya antara coventional policing, electronic policing, dan forensic policing.

# OJEK ON LINE ANTARA KEPENTINGAN DAN KEWAJIBAN [97]

Munculnya ojek on line (Ojol) menjadi fenomena hangat hingga perdebatan antara solusi dan pemenuhan kebutuhan layanan sistem transportasi angkutan umum. Angkutan umum kendaraan bermotor roda dua/ sepeda motor sering dianggap paling praktis ekonomis dan seolah mampu menjadi salah satu solusi menghadapi rumit dan tidak menentunya waktu tempuh dengan jarak tempuh. Semua alasan pembenar mungkin bisa dikatakan baik namun belum tentu benar apalagi tepat.

Tatkala di lihat dari sudut keselamatan maka kendaraan bermotor roda dua paling rentan dan tingkat fatalitas korban kecelakaan nya paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainya.

Berbagai pembenar seringkali digelorakan mulai dari kepentingan kehidupan sampai pemilihan alternatif transportasi angkutan umum. Berbagai demonstrasi muncul seakan dukungan demi periuk nasi sampai pencarian simpati dan kepentingan perolehan suara pun juga ada di dalamnya.

Tatkala akan diatur, demonstrasi tersebut seolah menginginkan semua aturan mandul tumpul dan ajaibnya ada upaya di legalkan dlm undang undang. Demi kehidupan pribadi dan sekelompok orang bolehkan menggunakan lalu lintas atau jalan seenaknya atau semaunya, mengabaikan korban atau dampak social cost yang begitu mahal.

Analoginya apakah berkebun ubi di sekitar monas atau menanam ketela di trotoar dsb dibenarkan karena alasan kebutuhan pangan? Analogi ini mungkin nampak ekstrim namun mungkin ini untuk membuka mata kaum pembenar yang ingin menguasai dan mematikan ojek yang eksisting. Cara mematikan dengan cara mencari pembenar meminta dukungan kaum

97 https://transindonesia.co/2024/10/20/ojek-on-line-antara-kepentingan-dan-kewajiban/

yang dspat menguasai sampai dengan sampai banting harga. Tatkala itu semua dilakukan maka lalu lintas bukan lagi sbg urat nadi kehidupan.

Jalan raya yang digunakan sebagai lalu lintas yang merupakan urat nadi kehidupan, karena suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang jika ada produktifitas. Produktifitas dihasilkan dari aktifitas yang dilakukan melalui atau dengan berlalu lintas. Sejalan dengan hal tersebut maka lalu lintas dituntut aman selamat tertib dan lancar.

Lalu lintas untuk aman selamat, tertib dan lancar tentu tidak dapat dibiarkan segala sesuatu yang kontraproduktif. Tidak lagi boleh yang kuat mendominasi dan memonopoli. Azas kebersamaan, azas persamaan hak, azas keterbukaan, azas keadilan hingga kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

Tatkala sistem angkutan umum belum dapat dikatakan representatif dan memenuhi kebutuhan pergerakan warga maka ojek boleh dikatakan sebagai diskresi atau kebijaksanaan atau cara mudahnya boleh tetapi memenuhi kewajiban. Pemenuhan kewajiban ini bukan beban melainkan suatu bentuk akuntabilitas baik kepada bangsa negara warga masyarakat kepada institusi yang menaungi maupun sebagai pribadi.

Pemenuhan kewajiban bagai ojol ini sebenarnya dapat dijadikan ikon peradaban atau ikon era digital yang sadar bahwa lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan di mana ojol mampu menjadi ikon pelopor road safety.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ojol dalam mendukung lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar sbb :

1. Sistem data yang baik dari ojol di sharingkan dengan pihak kementrian terkait maupun kepolisian untuk adanya sistem pelayanan ojol yang prima.
2. Sistem tarif yang tidak main banting harga atau ada standar kepastian harga yang bisa digunakan ojek yang eksisting.
3. Sistem manajemen yang ada dapat mendukung sistem transportasi angkutan umum antar moda yang telah sedang dan akan dibangun pemerintah.

4. Membantu pemerintah dalam melaksanakan program ETLE, TAR, ERP E-Parking, E-Banking dan sebagainya.
5. Memenuhi ketentuan yang menjadi standar road safety

Online atau terhubung secara elektronik semestinya mampu mendukung upaya terwujudnya lalu lintas yg aman selamat tertib dan lancar. Mendukung upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Mendukung terbangunnya budaya tertib berlalu lintas. Dan mendukung adanya pelayanan prima di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses.

Point penting ojol dalam mendukung Lalu Lintas yang aman selamat tertib dan lancar :

1. Ojol mendukung paradigma lalu lintas secara: filosofis, geo politik dan geo strategis, sosial, yuridis, globalisasi, perubahan sosial dan modernisasasi, operasional, pelayanan publik
2. Ojol mendukung pola pemolisian yang kembangkan pada Road Safety Policing
3. Ojol mendukung model Kota Cerdas ( smart city) yang merupakan lintasan karena kota menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, industri, bisnis, dll
4. Ojol mendukung program kawasan : antar moda transportasi angkutan umum (terminal, pelabuhan, stasiun, bandara), ASDP (angkutan sungai danau dan penyeberangan), industri, pariwisata, perbatasan, perkebunan dll
5. Ojol mendukung program feeder angkutan umum dalam trayek yang melintasi jalan : Nasional, Propinsi, toll, arteri, jalur black spot dan trouble spot, inter change
6. Ojol mendukung sistem angkutan umum orang maupun angkutan barang
7. Ojol sebagai kendaraan bermotor atau speda motor yang mematuhi dan mendukung program program road safety

8. Ojol mendukung pengguna lalu lintas : pengendara, pejalan kaki, masyarakat lainnya yang menggunakan lalu lintas
9. Ojol mendukung program Smart city dalam pendekatan road safety policing
10. Ojol mendukung pemangku kepentingan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang tercakup dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan)

Di era digital hampir semua kebutuhan publik dan pelayanan publik bisa di onlinekan (menjadi terhubung) secara elektronik. Dari pasar, perpustakaan, pengajaran sampai berbagai pemesanan pun bisa secara online. Akhir-akhir ini yang mulai marak adalah angkutan umum online.

Di era digital yang menjadi landasan penyelenggaraan online tersebut ada 3 hal yang sangat mendasar :

1. Adanya back office sebagai otaknya yang menampung semua data informasi, menganalisanya dan menghasilkan produk. Termasuk menjadi pusat K3i (komunikasi, komando, pengendalian, koordinasi dan informasi). Pada back office inilah yang menjadi pusat data untuk seperti dianalisa dan menghasilkan produk dan mampu melaksanakan fungsi K3i.
2. Application yang merupakan suatu alat atau sistem-sistem sebagai inputing data maupun sebagai sarana K3i dari warga masyarakat atau petugas atau siapa saja ke back office. Aplikasi ini dapat di install ke dalam smart phone sebagai wadah dr aplikasi-aplikasi tersebut. Bentuk aplikasi ini merupakan kaki tangan bahkan bisa sampai dengan ke sara-sarafnya yang bentuk dan model serta fungsinya ribuan bahkan mungkin sampai dengan puluhan bahkan ratusan ribu. Tergantung kebutuhan-kebutuhannya.
3. Network atau jejaring yang menghubungkan data atau informasi dri aplikasi-aplikasi ke back office melalui internet, fiber optic, dan sebagainya untuk diolah atau dianalisa sehingga mampu menghasilkan suatu produk pelayanan yang prima.

Ke 3 point tersebut dalam sistem pelayanan publik di era digital akan bersaing untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang prima.

Standar pelayanan prima ini ada beberapa hal yang menjadi keunggulannya yaitu :

1. Kecepatannya
2. Ketepatannya
3. Keakurasiannya
4. Transparansinya
5. Akuntabilitasnya
6. Informatif nya
7. Kemudahan diakses

Akhir-akhir ini marak dan bahkan menjadi polemik atas angkutan umum yang dimanage secara online. Benturan antara yang eksisting dengan yang online yang berkaitan dengan :

1. Administrasi dan perijinan
2. Ketentuan-ketentuan dasar menyelenggarakan usaha angkutan umum
3. Ketentuan-ketentuan pengoperasionalan angkutan umum
4. Asuransi dan sebagainya

Sedangkan angkutan umum online boleh dibilang pengusaha aplikator cukup menyediakan back office, application dan network. Kebutuhan-kebutuhan lain diserahkan kepada para pengemudi atau pemilik kendaraan masing-masing.

Tatkala awal-awal muncul semua memang happy/ senang bahkan membangga-banggakan. Namun tatkala mulai ada yang terusik sumber dayanya seperti kuota dan tarif saja akan menjadi pemicu konflik sosial.

Di dalam menyelenggarakan usaha angkutan umum baik eksisting maupun online wajib mematuhi dan menjalankan amanat UULLAJ yaitu :

1. Mendukung terwujud dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ( kamseltibcar lantas)

2. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan.
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas
4. Memberikan pelayanan prima di bidang LLAJ

Dalam sistem angkutan umum online, pertanggung jawaban atas terwujudnya amanat UULLAJ inipun semestinya menjadi landasan. Online ini sebenarnya cara memanage karena pengoperasionalannya sama.

Orang yang akan berpindah tempat masih melewati rute dan jalur sama, hanya sistem pemesanannya yang online. Tatkala kita memesan tiket pesawat secara online apakah langsung bisa terbang sendiri ?

Standar-standar operasionalnya masih sama. Memang ketika di darat semua dapat datang di depan mata kita tanpa harus beranjak kemana-mana.

Namun dari A ke B ke C dan seterusnya masih melewati jalur sama. Bisa saja di era ke depan perpindahannya bisa melalui time tunnel atau bahkan menjelajah ruang dan waktu di antar masa.

Oleh sebab itu pengaturan-pengaturan secara administrasi, pengoperasionalannya sampai dengan sistem pertanggungjawabannya ini sama seperti yang eksisting.

Di samping itu sistem data ini perlu dan wajib dibangun untuk memanage pengemudi, kendaraan bermotor, penumpang hingga perjalananya bahkan sampai dengan siapa, dimana memesan apa harganya sampai dengan penerimanya pun jelas.

Data-data ini pun juga dikendalikan atau di manage dalam back office yang mampu mewujudkan pelayanan-pelayanan yang prima. Dan juga mampu mendukung amanat UULLAJ. Karena angkutan umum online ini bisa menjadi kurir teroris, kurir bandar narkoba, pelaku kejahatan dan berbagai hal yang kontraproduktif dan memicu konflik sosial.

Tatkala angkutan umum yang disiapkan pemerintah belum memadai, sepeda motor menjadi salah satu pilihan yang dianggap paling praktis,

ekonomis, fleksibel dan sebagainya. Namun dari sisi keselamatannya ini paling rentan.

Beberapa orang yang pro sepeda motor sebagai angkutan umum dengan lantang mengatakan kendaraan lainpun bisa celaka. Nampaknya memang seperti pahlawan sayang ia lupa bahwa di dalam road safety yang ideal adalah zero accident.

Karena satu nyawa bagi orang-orang tercintanya adalah masalah besar. Dan jangan dilupakan bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Kondisi yang memaksakan sepeda motor sebagai angkutan umum ini jelas merusak atau merongrong atau setidaknya menjadikan program pemerintah di dalam membangun angkutan umum terhambat. Yang pasti semakin mundur dan tidak lagi berjuang untuk keselamatan dan menumbuhkembangkan kemanusiaan. Jangan lagi mengatakan korban sebatas angka.

Bagaimana kalau itu menimpa kita dan keluarga kita. Ini empati yang dilupakan. Sistem kapitalis bisnis dan main adu kekuatan politispun sudah menjadikan angkutan umum ini sebagai ladang yang seolah-olah tepat dan dijadikan pembenar-pembenar sehingga semua carapun bisa dihalalkan untuk dominan dan mendominasi angkutan umum ini. Yang menyedihkan lagi tatkala semu dihitung pada sisi bisnis semata sehingga menuntut berbagai previllage atau hak-hak istimewa yang sebenarnya ini kemunduran atau penjajahan baru di era digital yang mengabaikan keselamatan bahkan kemanusiaan yang mana SDM adalah aset utama dari bangsa ini.

Program-program active transportation/ transportasi sehat merakyat (TSM) melalui angkutan umum, bersepeda dan jalan kaki inilah yang semestinya dibangun dan ditumbuhkembangkan. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran di atas maka beberapa hal yang semestinya dibangun adalah :

1. Political will yang kuat untuk memanage angkutan umum
2. Dibangun infrastruktur termasuk sistem-sistem back office dan berbagai aplikasinya serta networknya
3. Dibangun tim transformasi yang merupakan representasi dari

berbagai stakeholder untuk backup system.

4. Menyiapkan dan membangun big data.
5. Membangun sistem-sistem pendukung IT for road safety
6. Membangun pendididikan-pendidikan untuk sekolah mengemudi (safety driving/ riding centre)
7. Menerapkan traffic attitude record/ catatan perilaku berlalu lintas dan demerit point system ( sistem demerit untuk perpanjangan SIM maupun STNK)
8. Menerapkan ELE / Electronic Law Enforcement / E-tilang.
9. Membangun sistem-sistem kontrol yang melibatkan pemilik atau pengusaha atau corporate untuk ikut bertanggung jawab atas operasionalnya kendaraan-kendaranya sebagai angkutan umum.
10. Membangun edukasi yang terus menerus kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan active transportation/ transportasi sehat merakyat.

# PERLUKAH ILMUWAN KEPOLISIAN? [98]

Ilmu kepolisian telah dirintis para pakar dan pemikir pemikir bagi bangsa yang modern dan demokratis. Ilmu kepolisian dimulai sejak awal NKRI, tahun 1946 dengan dibukanya Perguruan tinggi ilmu kepolisian (PTIK). Pemikiran pemikiran membangun Polisi yang ideal di dalam masyarakat yang modern dan demokratis dan profesional dibangun berbasis ilmu kepolisian.

Beberapa tokoh yang mewakili jamannya dalam menumbuh kembangkan ilmu kepolisian setidaknya dapat kita sebut :

1. Profesor Djoko Suntono
2. Profesor Harsya Bahtiar
3. Profesor Awaludin Djamin
4. Profesor Parsudi Suparlan
5. Profesor Mardjono Rekso Diputro
6. Profesor Satjipto Rahardjo
7. Profesor Sarlito Wirawan
8. Profesor Adrianus Meliala
9. Profesor Rony Niti Baskara
10. Profesor Hermawan Sulistyo

Masih banyak nama lain profesor doktor master maupun para sarjana yang berjuang bagi tumbuh berkembangnya ilmu kepolisian.

98 https://lovebandung.com/index.php/2024/10/20/perlukah-ilmuwan-kepolisian/

Perdebatan panjang ilmu kepolisian dari masa ke masa masa terus terjadi, bahkan pada saat Polri bergabung ABRI, oleh Laksamana Sudomo pernah diusulkan akan dibubarkan.

Konsep ilmu kepolisian dari multi bidang, antar bidang sampai dengan berbagai pendekatan lainnya terus menjadi perdebatan. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dikembangkan menjadi sekolah tinggi ilmu kepolisian dan akan dikembangkan menuju universitas kepolisian pada tingkat S1, namun sudah ada S2 dan S3.

Perjuangan panjang dalam membangun ilmu kepolisian selain dari internal juga ada dukungan dari eksternal antara lain dari Universitas Indonesia juga ada kajian kepolisian dari Universitas Diponegoro, dan beberapa universitas lainnya. Membahas polisi dan pemolisiannya ini sama dengan membahas perkembangan masyarakatnya.

Pendidikan bagi para calon polisi, maupun pengembangan bagi calon pemimpin diselenggarakan dalam berbagai sekolah kepolisian salah satunya di sekolah staf dan pimpinan Lemdiklat Polri (Sespimma, Sespimen dan Sespimti).

Semua itu merupakan bagian pengembangan dan penjabaran ilmu kepolisian yang berbeda pada fokus dan kedalaman serta pengembangannya.

Standar bagi polisi yang pemolisiannya profesional, cerdas, bermoral dan modern dilandasi ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian di Indonesia sangat beragam dan kompleks yang dapat dikembangkan dalm banyak model variasinya.

Profesor Satjipto Rahardjo mengatakan polisi sejatinya ahli ilmu sosial, ahli kriminologi, ahli hukum, ahli forensik, karena sepanjang masa dinasnya menangani atau praktek langsung yang berkaitan dengan keilmuan tersebut.

Kecintaan dan kebanggaan pada ilmu kepolisian bagi para petugas polisi memang masih malu malu dan setengah hati walaupun sudah ribuan sarjana ilmu kepolisian dihasilkan.

Perdebatan muncul lagi tatkala alumni pendidikan tinggi S2 dan S3 STIK PTIK untuk masuk Sespimen dan sespimti terjadi ego sektoral yang semestinya tidak perlu lagi dibahas panjang lebar karena tidak menghasilkan kebaruan.

Kesemua lembaga pendidikan itu di bawah naungan lembaga pendidikan dan latihan (lemdiklat) di dalam menjembatani perdebatan ini setidaknya menunjukan sikap yang Adil dan bijaksana untuk:

1. Kaderisasi
2. Mencerdaskan
3. Menunjukkan bahwa penghargaan pada ilmu kepolisian yang sebenarnya menjadi basis pada pendidikan pendidikan lainnya
5. Memberi ruang untuk tumbuh berkembangnya ilmu kepolisian
6. Pendidikan semestinya sebagai penjabaran point 1 sd 5 bukan untuk ranking dan bukan untuk jabatan atau penempatan melainkan sebagai transformasi ilmu pengetahuan dan menyiapkan SDM sebagai aset utama organisasi
7. Matrikulasi S2 dan S3 pada Sespimen dan sespimti sekarang ini setidaknya menjadi jembatan point 1 – 6 bukan tujuan (S1 disamakan dengan Sespima)

Membangun mind set birokrasi pembelajaran yang rasional sebagai birokrasi yang berbasis riset untuk adanya polisi dan pemolisiannya yang profesional cerdas bermoral dan modern diperlukan ilmuwan kepolisian.Apalagi di era kenormalan baru.

ilmu kepolisian berkembang pada teknologi maupun forensik. Tatkala ilmuwan kepolisian tidak disiapkan maka akan menjadi bumerang di masa depan.

Harapan ke depan adalah terbangunnya polisi dalam pemolisiannya yang profesional, cerdas, bermoral dan modern mampu menjadi “super cops” yang super kompetensinya bukan kesewenang wenangannya.

Di era kenormalan baru model smart policing dapat dikembangkan dengan mengharmonikan antara conventional policing, electronic

policing maupun forensic policing, yang mampu menjadi penjaga kehidupan pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

# FUTURISTIK POLICING : REFORMASI BIROKRASI, INISIATIF ANTI KORUPSI DAN TEROBOSAN KREATIF [99]

Futuristik policing dapat dimaknai sebagai polisi yang pemolisiannya kekinian yang mampu memperbaiki kesalahan di masa lalu, dan menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik. Spirit polisi dalam pemolisian yang berhati nurani menunjukan sebagai: "penjaga kehidupan, pembangunan peradaban dan pejuang kemanusiaan".

Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah pada:

1. Kemanusiaan
2. Keteraturan sosial
3. Peradaban

Kesadaran, tanggung jawab dan disiplin serta bekerja keras dalam menyelenggarakan tugasnya adalah untk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan cinta dan bangga akan pekerjaannya, setia serta loyal kepada institusi kepolisian, terus berjuang meningkatkan kualitas kinerja, sehingga profesional, cerdas, bermoral dan modern yang bekerja dengan tulus serta bereaksi dengan cepat secara proaktif dan problem solving dalam menjaga keamanan dan rasa aman warga masyarakat.

Dari keutamaan kepolisian tersebut di atas dapat dikembangkan menjadi inspirasi reformasi birokrasi secara struktural, instrumental maupun kultural yang menunjukan inisiatif anti korupsi melalui:

1. Melalui pendekatan dan pengembangan seni budaya disertai apresiasi atas prestasi dan kreatifitas.
2. Membangun budaya organisasi sebagai birokrasi yang rasional yaitu berbasis kompetensi berorientasi pada kerja dan gaji.

99 https://transindonesia.co/2024/10/20/futuristik-policing-reformasi-birokrasi-inisiatif-anti-korupsi-dan-terobosan-kreatif/

3. Membangun sistem on line yang berbasis elektronik sehingga ada digital record untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi
4. Memberi ruang bagi orang orang yang baik dan benar dalam mewaraskan birokrasi
5. Mengembangkan etika publik dalam pengajaran pada sekolah sekolah maupun dalam partai politik
6. Membangun forum dialog sebagai transformasi edukasi dalam berbagai lini kehidupan
7. Mengembangkan sistem reward and punishment
8. Penegakan hukum yang tebang habis walau ada skala prioritas
9. Membangun dan mengembangkan literasi anti korupsi
10. Membangun role model anti korupsi dari local heroes sd tingkat nasional

Polisi dalam mengimplementasikan keutamaan pemolisiannya. Landasannya bekerja dengan tulus bereaksi dengan cepat.

Pemolisian merupakan cara utuk mencapai tujuan yang menunjukan inisiatif anti korupsi dan reformasi birokrasi.

Kesemuanya itu dapat dipertanggungjawabkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional maupun sosial.

Akuntabilitas suatu profesi setidaknya mencakup:

1. Moral (niat baik dan benar)
2. Hukum (secara Hukum benar / tidak melanggar)
3. Adminsitrasi (secara Administrasi benar / tidak melanggar)
4. Fungsional (sesuai SOP)
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat

Akuntabilitas merupakan suatu fungsi kontrol atas berbagai sistem untuk mencapai tujuan. Sistem bukan tujuan melainkan sarana atau alat mencapai tujuan. Seringkali kita memuja atau mengutamakan alat atau sarana dan mengabaikan tujuan. Sistem merupakan suatu sarana dalam

mendukung pencapaian tujuan. Tujuan merupakan hakekat dari sesuatu atas proses yang menjadi puncak pencapaian atas proses tersebut. Sistem sosial misalnya sistem sistem yang ada dalam kehidupan sosial baik itu politik ekonomi seni budaya hukum teknologi dll merupakan proses atau sarana mencapai keadilan sosial maupun kesejahteraan sosial atau peradaban yang mampu membuat kehidupan sosial semakin memanusiakan manusia. Manusia menjadi fokus utama.

Demi keamanan misalnya maka manusia dan kemanusiaannya bisa saja diabaikan bahkan dikorbankan yang penting aman walaupun tanpa adanya rasa aman.

Cara ala mafia atau premanismepun seakan menjadi suatu kebenaran yang diagung agungkan sebagai suatu kepahlawanan. Sebagai contoh menjadikan tindak pidana korupsi sebagai label untuk menyerang menghakimi secara sosial atau membunuh karakter orang orang yang dianggap berseberangan. Anti korupsi merupakan sistem atau sarana bukan tujuan.

Tujuannya adalah mensejahterakan kehidupan sosial yang berbasis keadilan sosial. Di sinilah sistem anti korupsi dapat dinilai dan diukur antara lain dari:

1. Pemimpin dan kepemimpinannya melalui apa kebijakannya dan tindakan tindakannya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir adanya korupsi,
2. Sistem reformasi birokrasi,
3. Sistem sistem on line yang berbasis elektronik yang dibangun menuju big data system dan one stop service
4. Sistem penegakkan hukum maupun aturan aturannya
5. Sistem akuntabilitasnya.

Sistem reformasi birokrasi yang "bukan sebatas lip service" dimulai dari niatnya atau moralitasnya untuk benar benar merubah "core value yang berbeda atau bertentangan dengan yang ideal" untuk mendasari perubahan mind set bahkan culture setnya dengan memulai mengimplementasikan keutamaannya.

Reformasi birokrasi sebagai inisiatif anti korupsi salah satunya adalah meminimalisir terjadinya peluang menyimpang inilah yang semestinya menjadi ukuran dari keberhasilan reformasi birokrasi.

Sistem apapun termasuk elektronik sejatinya merupakan sarana pendukung point di atas. Membangun sistem elektronik berbasis ipo yang ada pada back office aplication dan net work yang semuanya itu merupakan iot dan ai yang menjadi sistem recognize yang ditunjukan adanya algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang berbasis sistem big data dan adanya one stop service.

Sistem online yang berbasis elektronik yang meminimalisir kesempatan terjadinya KKN semestinya produknya mampu merecognize menganalisa dan menghasilkan produk yg berupa algoritma dalam bentuk info statistik info grafis dan info virtual yang on time any time dan real time. Yang dapat digunakan sebagai prediksi antisipasi dan solusi.

Sistem penegakkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik maupun institusi secara profesional maupun personal. Akuntabilitas secara moral yang menunjukkan bahwa semua dimulai dari niatan yang baik dan benar. Di sini ditunjukkan dari grand strategi aturan dan penyiapan sdmnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Etika kerja yang berkaitan dengan do dan dont benar benar menjadi acuannya.

Akuntabilitas secara hukum ini menunjukkan tidak menyimpang atau melawan hukum dan aturan yang ada yang ada. Akuntabilitas secara administrasi dapat ditunjukkan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya, proses laporan dan dokumen pendukungnya dengan baik dan benar. Akuntabilitas secara fungsional, apa yang dikerjakan menunjukkan suatu upaya pencapaian tujuan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas secara sosial dapat dilihat pada kemanfaatan bagi hajat hidup hidup masyarakat yang ditandainya semakin manusiawinya manusia dan meningkatnya kualitas hidup.

Sistem elektronik atau sistem sistem on line, menjadi tanda adanya reformasi birokrasi dan anti korupsi dan upaya memberikan pelayanan prima kepada publik.

Reformasi birokrasi, pemahamannya dapat dimaknai sebagai upaya menuju birokrasi yang rasional, modern, yang berdasarkan kompetensi, profesional, cerdas, modern, inovatif kreatif , transparan, akuntabel dan proaktif serta problem solving.

Reformasi birokrasi kepolisian dapat dipahami sebagai upaya

kepolisian menjadi polisi sipil yang profesional, cerdas, kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, modern, proaktif, problem solving, kemitraan yang mengutamakan pencegahan serta senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di dalam masyarakat yang modern dan demokratis sebagai ikon peradaban, kemanusiaan. Reformasi secara struktural, instrumental dan kultural.

Sejalan dengan pemikiran di atas maka dalam reformasi birokrasi kepolisian, yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Political will yang visioner dan mendukung proses reformasi birokrasi,
2. Adanya kepemimpinan yang transformatif,
3. Pembangunan infrastruktur yang berbasis IT ,
4. Menyiapkan tim transformasi sebagai tim back up dan tim monitoring serta evaluasi,
5. Menyiapkan SDM yang berkarakter sebagai penjaga kehidupan pembangun peradaban,
7. Memiliki program unggulan mencapai standar dan kualitas tinggi ( world class),
8. Menyiapkan pilot project sebagai model percontohan,
9. Monitoring dan evaluasi dan melakukan evaluasi
10. Mengembangkan apa yang sudah dicanangkan papa wilayah wilayah lainnya.

Implementasi reformasi birokrasi kepolisian dapat dijabarkan dalam 8 program yang mencakup:

1. Birokrasi mampu menjadi institusii yang tepat fungsi, dan tepat ukuran (right size).
2. atalaksana (sistem, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance).
3. Peraturan/ UU (regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih).
4. SDM (sdm beritegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, dan sejahtera)
5. Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn)

6. Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi).
7. Pelayanan publik (pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat).
8. Budaya kerja (birokrasi dengaan integritas dan kinerja tinggi).

8 hal tersebut merupakan yang diprioritaskan pada :

a. SDM (kompetensi),
b. Instrument dan metode,
c. Kelembagaan (struktur dan kultur).

Implementasinya dijabarkan oleh masing-masing satker dan sub satker dari tingkat mabes sampai dengan polres.

Mereformasi birokrasi kepolisian secara prinsip bisa sama namun implementasinya disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing yang dapat dikembangkan dalam membangun kepolisian sebagai polisi sipil dalam masyarakat yang modern dan demokratis ( membangun supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan dan akuntabel, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat). Yang ditunjukan dari kinerja Polri yang : profesional, cerdas, transparan dan akuntabel, cepat, tepat, akurat, informatif, mudah di akses, proaktif, problem solving yang mengutamakan pada tindakan pencegahan.

Dengan demikian reformasi birokrasi kepolisian adalah membangun sistem pemolisian yang:

1. Berbasis pada supremasi hukum
2. Pemolisiannya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, secara hukum, secara fungsional dan kemanfaatannya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat maupun secara moral karena tugas-tugasnya adalah untuk memanusiakan manusia dalam arti mengangkat harkat, martabat manusia, yang dibangun di atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin.

Walaupun sebagai polisi yang modern dan handal perlu dibangun model “Smart Policing” yang mampu mengharmonikan antara conventional policing, electronic policing maupun forensic policing.

# DIGITAL LEADERSHIP DAN PEMOLISIAN YANG FUTURISTIK [100]

Pemimpin di era digital , bukan sebatas pemimpin yang memahami IT atau mahir dalam menggunakan IT, melainkan pemimpin yang futuristik yang mampu :

1. Memetakan berbagai potensi di era digital, yang mendukung produktifitas maupun yang kontra produktif.
2. Mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang ada dan mengatasi segala sesuatu yang kontra produktif.
3. Mampu mengembangkan inovasi dan kreatifitas yang membawa kemajuan bagi institusi yang dipimpinnya menjadi profesional, cerdas, bermoral dan modern.
4. Mampu dipercaya oleh publik dan mempertanggungjawabkannya secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial.
5. Mampu belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu,siap di masa kini dan mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik.

Teknologi dan sistem sistem on line yang berbasis elektronik, merupakan cara bukan tujuan. Pemimpin di era digital mampu memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada publik yang berstandar prima. Konteks pelayanan publik yang dikembangkan dalam futuristic policing mencakup :

1. Pelayanan Keamanan
2. Pelayanan Keselamatan
3. Pelayanan Hukum

100_https://transindonesia.co/2024/10/21/digital-leadership-dan-pemolisian-yang-futuristik/

4. Pelayanan Administrasi
5. Pelayanan Informasi
6. Pelayanan Kemanusiaan.

Masalah keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan di era digital akan semakin kompleks. Para pelaku kejahatan akan terus mencari kesempatan atau peluang untuk mencari keuntungan atau mengeksploitasi yang kontra produktif bagi individu, kelompok, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara.

Pemimpin di era digital adalah pemikir yang bernyali dan bernalar. Nyali memghadapi dan memgatasi berbagai tekanan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam.

Kejahatan di era digital yang berdampak luas akan memggerus tata kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

1. Kejahatan siber yang dapat menghancurkan sistem data dan tata kelola kenegaraan
2. Kejahatan yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang.
3. Kejahatan media yang mampu mengobok obok opini publik
4. Kejahatan keuangan dan sistem sistemnya
5. Kejahatan korupsi dan pencucian uang
6. Kejahatan yang berkaitan dengan hukum dan penegakan hukum
7. Kejahatan politik
8. Kejahatan idiologi
9. Kejahatan ekonomi, industri, bisnis maupun perdagangan
10. Kejahatan forensik yang mengkacaukan tata kehidupan sosial dan sebagainya.

Digital leadership selain futuristik juga diharapkan mampu menjadi pemimpin bagi citizen maupun netizen dengan mengimplementasikan smart policing.

# SENI KONTEMPORER DALAM MASYARAKAT URBAN [101]

Ada pepatah Jawa yang mengatakan : “Pasar ilang kumandange. Kali ilang kedunge” Pasar kehilangan gaungnya, Sungai kehilangan kedalamannya. Masih banyak pepatah yang bis menjadi refleksi atas hidup dan kehidupannya terutama yang berkaitan dengan seni budaya. Hal tersebut bisa dikaitkan kehidupan sosial akan kehilangan peradabannya atau hilang kemanusiaannya, tatkala seni budaya diabaikan. Bisa juga hilang patriotismenya. Seni tanpa politik layu bahkan kering demikian juga politik tanpa seni tandus kemanusiaannya. Politik dan seni saling terkait, saling mendukung bahkan saling menghidupi. Seni maupun politik adalah bagian dari kehidupan sosial dari kemasyarakatan sampai berbangsa dan bernegara. Seni pilar dari peradaban yang membutuhkan dukungan politik (political will). Demikian halnya politik bertujuan membangun peradaban demi semakin manusiawinya manusia.

Seni kontemporer perkembangannya bukan semata mata tanggung jawab para seniman atau kritikusnya melainkan juga dari para politikusnya. Mereka memiliki tanggung jawab besae untuk memikirkan, mendorong, memberi ruang bagi seni dan kebudayaan, agar bertahan hidup, tumbuh dan berkembang sehingga bangsanya dapat berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal dan mampu berdaya saing. Kita semua tahu bagaimana Bung Karno yang sangat peduli akan seni budaya. Beliau menyadari bahwa sebagai bangsa merdeka kedaulatannya ditunjukan dari seni budaya dari bangsanya dalam membangun suatu peradaban.

101 https://transindonesia.co/2024/10/24/seni-kontemporer-dalam-masyarakat-urban/
https://lovebandung.com/index.php/2024/10/24/seni-kontemporer-dalam-masyarakat-urban/

Para politikus selain pemikir juga menjadi ikon perawat seni maupun budaya, yang juga berupaya seni budaya terus berkembang dan menyiapkan regenerasinya.

Sejalan dengan pemikiran di atas apa yang semestinya dibangun bersama dalam menumbuh kembangkan seni budaya setidaknya mencakup :

1. Membangun Literasi seni dan budaya
2. Menyiapkan ruang publik, khusus maupun private untuk menjadi ruang dialog seni budaya
3. Membangun ruang bagi heritage atau legacy seni budaya di setiap daerah
4. Memberi subsidi atau dukungan penuh kegiatan kegiatan seni budaya yang dilakukan perorangan, kelompok atau kimunitas civil society maupun pemerintah
5. Memberdayakan media untuk menjadi ruang pembrandingan atau penyemaian kaderisasi hingga marketing
6. Membangun lokal heroes bagi seni budaya sebagai pejuang kemanusiaan dan peradaban
7. Pemerintah, sektor bisnis maupun akademisi membantu membangun net working, branding, marketing secara nasional maupun internasional
8. Membangun art and culture centre sbg pusat studi, pengkajian, penelitian, education, training maupun coaching
9. Menyelenggarakan workshop maupun symphosium dan exhibition nasional maupun internasional
10. Melakukan festival seni budaya lokal, regional, nasional dan internasional
11. Memberikan award secara reguler maupun event event khusus
12. Menyusun kalender seni budaya selama satu tahun untuk lokal, regional, nasional dan internasional

13. Penerbitan buku, jurnal, majalah dsb
14. Membangun industri seni budaya
15. Kolaborasi seni budaya dan pariwisata
16. Laboratorium seni dan budaya
17. Membuat program program unggulan seni kemasyarakatan spt
    a. Seni anak anak jalanan
    b. Seni para nara pidana
    c. Mural
    d. Social engineering penataan lingkungan
    e. Art therapy
    f. Seni daur ulang
    g. Seni dalam komunitas nada, suara, gerak, rupa dsb
18. Kurikulum pendidikan secara formal maupun non formal
19. Diseminasi guru, kelompok kelompok komunitas seni budaya dsb
20. Menyiapkan master trainer dan trainer untuk transformasi pengetahuan dan kesiapan menghadapi disrupsi

Masih banyak lagi cara menumbuhkembangkan seni budaya, namun political will wajib menempatkan seni budaya sebagai bagian dari kebijakannya dan tidak lagi menempatkan sebagai ganjel pelengkap penderita.

**Seni Kontemporer Art as Therapy yang Happy**

Seni dari masa ke masa hingga era digital salah satu yang kritikal adalah yang mampu menjadi jembatan hati, memberi ruang bagi pikiran dan jiwa dalam kesesakkan, yang seakan mengungkungnya. Seni, menjadi obat dan terapi.

Berbicara terapi seakan berbicara pengobatan yang berbasis keilmuan atau kekuatan. Yang berbasis keilmuan tentu saja pada kedokteran dan berbagai turunannya. Yang berbasis kekuatan biasanya

para normal dan berbagai bunga bunganya. Seni untuk terapi berbasis pada siapa? Bisa keduanya bisa juga ke diri sendiri. Mengapa bisa keduanya, seni untuk menemukan kebahagiaan.

Bahagia ada karena ada proses sesuatu yang membuat bisa untuk menikmati dan mensyukuri. Di mana seni ditautkan? Pada diri sendiri ini yang sebenarnya paling dianjurkan. Mengapa? Karena hemat, mudah, cepat dan tepat yang bisa kapan saja di mana saja dengan apa saja bisa. Seni sebagai terapi itu yang penting hepi. Jadi teringat lagu yang pernah populer di radio daerah tahun 70 atau 80 an yang berjudul " ayo ngguyu".

Pepatah mengatakan :" hati yang gembira adalah obat". Menggembirakan hati dengan seni adalah obat? Bisa jadi iya. Asal seninya menggembirakan dapat menjadi katarsis dan kemerdekaan walau yang digambar tentang duka lara, namun ada kelegaan hati.

Menjebol sumbatan rasa dan melayani hati yang menggembirakan. Semua itu bisa dengan membuka jalan dan peluang bahkan harapan hidup yang lebih panjang. Seni ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Seni menjadi jembatan hati pemecah kejenuhan dan kebuntuan hidup. Seni bisa apa saja tergantung kepekaan dan kepedulian dan nyali melakukan. Seni seringkali menakutkan. Takut salah takut jelek takut dihina takut menjadi bumerang dsb. Ketakutan ini membuat seni dying bahkan setengah mati diakui dalam hidup dan kehidupan sehari hari.

Seni biasa saja dan bisa dilakukan siapa saja untuk membuka cakrawala jiwa dan membuat hati gembira. Bernyanyi misalnya walau kelas kamarmandi bisa dilakukan. Menata rumah agar asri dan ngangeni tidak perlu mewah apa saja bisa dilakukan. Menanam pohon di pekarangan atau teras rumah. Dari tanaman buah sampai bonsai semua bisa dilakukan. Membuat kolam, memajang peralatan rumah tangga, memberi nama rumah kita, bermain main kata dalam rumah bahasa( meminjam kata kata Rm Banar). Seni pokok e hepi. Lepaskan belenggu mutu yang penting metu dulu. Bakat bisa dikalahkan dg nekat. Dari rumah kita kalaupun berat dari kamar kita, kalaupun masih berat dapat dari diri kita. Tunjukkan pikiran perkataan perbuatan dan

bela rasa yang membagikan kegembiraan kepada siapa saja yang kita temui secara virtual maupun aktual. Nashar mengajarkan 3 non dalam berkarya. Non teknis, non estetis, non konsep. Tentu Nashar akan dihantam kanan kiri depan belakang atas bawah. Nashar menyampaikan 3 non sebagai cara melepaskan belenggu seni yang memandulkan daya kreasi. Seni yang penting hepi dan berbagi kegembiraan. Apapun pendapatnya biasa saja. Nyali berseni menjadikan hati merdeka dan bergembira. Apapun situasinya apapun kondisinya senantiasa ada alternatif dan jalan keluar dengan pikiran yang positif. Seni menjadi jembatan hati untuk adanya rasa syukur dan mampu melihat sisi kebaikan yang menstimuli untuk terus berkreasi, bahagia yang terus menerus berbagi hepi.

**Area Publik as Art Galeri**

Seni ada dalam semua lini kehidupan. Seni sebagai jalan untuk menyeimbangkan atas hidup dan kehidupan terutama di kota kota besar yang padat sebagai kawasan urban, seni menjadi solusi atas kepenatan yang terjadi. Area publik area seni? Mengapa tidak, ya semestinya begitu. Area publik adalah refleksi kualitas dari para pengelola sumber daya yang dipercaya masyarakat. Kebijakan para pejabat yang menjalankan amanah rakyat semestinya menampilkan area publik yang humanis dan asri. Di tempat publik warga secara mudah dan gratis dapat menikmati keasrian hidup. Atau setidaknya sebagai ruang solusi menghadapi penatnya hidup.

Area publik sebagai destinasi wisata. Di sini perlu ada penataan bagi keteraturan sosial. Arra publik ada pelayanan publik. Pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan admistrasi, pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan. Pelayanan publik tersebut berkualitas prima. Dan ditata dengan cita rasa seni. Misalnya di negara nega maju : di dalam kotanya ada informasi karya karya para maestronya. Ada ruang untuk panggung terbuka, ada ruang pamer atas karya karya maestro dunia dsb. Area publik, area inspirasi, area edukasi dan transformasi. Keteraturan di area publik ini menjadi ikon peradaban.

Area publik area seni bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban? Di mana bisa ditunjukkan? Tatkala area publik merupakan suatu galeri seni dan budaya dapat menjadi ikon pariwisata. Seni di area publik menjadi ruang dialog yang mengedukasi, menginspirasi dan tentu saja menjadi bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Komunikasi menjadi kunci untuk mengimplementasikan edukasi deni. Area publik dapat menjadi pilot project implementasinya dapat di mulai saat car free day atau berbagai acara festival lainnya. Bisa dibayangkan tatkala area publik menjadi galeri seni maka kualitas masyarakat dalam mengenal dan memahami serta mengapresiasi seni budaya akan meningkat kelasnya.

Seni bagi masyarakat kontemporer bisa mwnjadi bagian dari gaya hidup. Komunikasi dalam cita rasa seni dari nada, suara, sastra, rupa, gerak tarian,

pertunjukan dapat diimplementasikan di area publik. Namun tetap mengingat bahwa area publik merupakan area di mana semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian, keteraturan sosial tetap diutamakan dan seni pada area publik tidak kontra produktif. Area publik yang sarat cita rasa nuansa seni sejatinya memberikan pelayanan seni budaya dan pariwisata yang menginspirasi, memotivasi dan memberi solusi demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan semakin manusiawinya manusia.

# FUTURISTIC POLICING: PREDIKSI, ANTISIPASI DAN SOLUSI [102]

"Dunia virtual akan mendukung atau sebaliknya menjadi petaka di dunia aktual?"

Di era digital orang mulai hidup di balik layar, alam virtual menjadi aktual, yang maya kini sudah menjadi nyata. Kemudahan, kecepatan membawa kenikmatan yang didukung system-sistem jejaring elektronik menjadi penguat sistem online atau terhubung.

Dalam kehidupan di balik layar sekarang ini, boleh dikatakan hampir semua bagian data, kebijakan, informasi dan lainnya semua ada dibalik layar. Bahkah kejahatan kejahatanpun bisa dilakukan dari balik layar.

Orang-orang yang bekerja dalam dunia nyata, kini semakin terpojok dan tersisih seakan mereka menjadi tenaga-tenaga kasar yang menjadi pesuruh untuk mengaktualkan apa yang ada dalam dunia virtual.

Mereka yang ada di lapangan seakan seperti dalam kontrol dan pengendalian mereka seperti pion-pion catur saja. Penghargaan atas keringat dan kerja keras mereka akan semakin punah mungkin bahkan akan luntur. Dunia nyata akan menjadi fakta seperti apa yang diimpikan atau diprogramkan dalam dunia virtual.

Prediksi sisi positif dan negatif akan menjadi potensi konflik antara yang aktual dan virtual. Model pemolisian futuristik semestinya sudah mulai disiapkan atau setidaknya adaya upaya mereduksi kemungkinan-kemunginan hancurnya peradaban konvensional yang akan diubah dengan peradaban digital.

Benturan-benturan peradaban ini akan terus terjadi sampai suatu ketika tatkala sudah tidak mampu diatasi akan terjadilah konflik fisik sebagai suatu keniscayaan yang tak terelakan.

102 https://transindonesia.co/2024/11/03/futuristic-policing-prediksi-antisipasi-dan-solusi/

Anti kemajuan atau anti teknologipun akan bisa terjadi dan benturan kepentingan akan terus terjadi disemua lini.

Banyak film atau cerita fiksi yang menggambarkan dan menunjukan akhir dari peradaban atau benturan teknologi dengan dunia nyata.

Sinergitas antara virtual dengan aktual sejak awal mula sudah diprogramkan menjadi suatu sistem yang saling mendukung dan menguatkan.

Kepentingan pengkastaan dan pendiskriminasian antar golongan tidak boleh terjadi, karena akan menjadi isu pembenaran untuk perebutan sumber daya dan pendominasian atau penguasaan atas segala sumber daya dan potensi-potensinya.

Pemahaman atas virtual dan aktual semestinya sejak awal menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bagai dua sisi mata uang yang menjadi satu.

Ruang dan waktu seakan secara virtual melalui jejaring Internet of Things sudah merambah kesemua lini dan sisi kehidupan yang menghubungkan, memudahkan, mempercepat menggantikan cara-cara manual, konvensional dan parsial. Sistem-sistem dalam administrasi dan operasional semakin berkembang dengan didukung dengan internet dan teknologi lainya. Kaum status quo akan mati matian mempertahankan cara-cara kuno, yang lamban, boros dan berpotensi korup.

Mereka ketakutan kehilangan previlegenya. Cara-cara manual, konvensional dan parsial menjadi ladang subur bagi tumbuh dan berkembangnya KKN.

Lahan bagi preman birokrasi meluaskan sayap, menanam orang-orang sebagai mata telinga dan babu-babu penjaga tentakel-tetankelnya. Orang-orang ini akan mengkultuskan sang preman sebagai god fathernya atau patron pengaritan (aktor dibalik layar KKN yang dibangga-banggakan). Para preman ini lihai dan jaga memanfaatkan dan memutarbalikan fakta dengan segala daya upaya dan kehebatanya untuk terus menguasai dan berkuasa. Dunia mayapun dikuasai, teknologi digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, mengancam, membuli bahkan menyakiti bagi siapa saja yang melawan atau tidak patuh padanya.

Mediapun dijadikan alat untuk membuli dengan meng-upload yang nantinya ditanggapi sendiri dan didown loadnya sendiri, untuk dilaporkan atau ditindak dengan caranya sendiri. Model-model fitnah media dunia mayapun menjadi kebanggaannya dan nilai keberhasilanya. Memang sangat luar biasa siapa saja dihujatnya. Di era digital tak sesederhana untuk menjatuhkan atau melanggengkan cara kerja jahatnya menjadikan premanisme di dunia maya.

**Aturan, dan keteraturan dalam dunia virtual**

Di era digital dunia virtual semakin marak bahkan dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas. Pembunuhan karakter hingga yang mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Berita hoax, pembodohan penyesatanpun secara masif dan brutal bisa dilakukandi era post truth. Plintiran dengan memanipulasi sesuatu dengan menambahkan, mengurangi, merubah,dsb sebagai pembenaran yang berdampak :

1. Salah persepsi
2. Mengadu domba
3. Menghakimi
4. Munculnya solidaritas sosial
5. Merusak citra
6. Menghilangkan kepercayaan
7. Konflik sosial

Memang ada yang marah, tatkala diberi aturan atau tatanan, ada yang merasa dikungkung atau dibungkam atau kebebasan sebebas bebasnya tidak terwujud. Hujat menghujat dengan kalimat tidak sepatutnyapun seakan menjadi refleksi hipokrit, pameran ketololan dan sikap pengecut. Netizen +62 dilabel paling buruk tatakramanya. Entah itu refleksi budaya atau oknum yang tak lagi bisa menghargai orang lain. Sikap budaya bangsa yang adiluhung seakan luntur akibat evoria dunia maya.

Ujaran kebencian menghakimi yang luar biasa memalukan kata katanya. Seakan memang otak dan hatinya lupa segala edukasinya.

Kritik disamakan dengan hujatan. Tabiat buruk seakan menjadi moralitas. Provokasi pembodohan menjadi sesuatu yang membanggakan. Kalau menampilkan hujatan seakan juara jagoan dan merasa pahlawan. Menyedihkan. Dalam kehidupan sosial di era digital maka keteraturan sosial di dunia virtual memang diperlukan aturan untuk menata dan pertanggungjawaban. Mau tidak mau tatkala segala sesuatu yang berdampak pada konflik dan berbagai hal yang kontrta produktif menjadi tanggung jawab kita semua mengatasinya. Konteks demokrasi menjadi acuan bebas bertanggungjawab, jaminan perlindungan HAM, supremasi hukum, transparan dan akuntabilitas orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menjaga kedaulatan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan ketahanan dan daya tangkal bahkan daya saing. Kritis atas penyimpangan atau ketidak benaran merupakan suatu kecerdasan keberanian bahkan juga wujud tanggung jawab moral. Keras dalam prinsip dan penyampaian secara elegan akan mengundang simpatik dan solidaritas.

Kekerasan simbolik ujaran kebencian pembodohan hingga pengadilan sosial bukan sesuatu yang spontan melainkan by design. Era post truth antara fakta dan kebobongan diolah sedemikian lupa pembenaran seolah menjadi kebenaran. Dan dilakukan orang orang cerdik pandai yang terus menerus diviralkan hingga seolah menjadi kebenaran. Bumbu bumbu hoax dengan primordialisme menjadi penyedap. Keteraturan sosial dalam dunia virtual belum sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang kontra produktif. Namun sebenarnya tanpa sadar taburan taburannya sudah dapat merasuki bahkan mencandui pikiran hingga emosi publik. Dunia virtual jembatan harapan dalam era digital. Hal yang positif tentu banyak sekali dan mendukung pencerdasan dan pembangunan karakter bangsa yang mampu menembus sekat ruang dan waktu. Namun hal hal yang kontra produktif dan menjadi potensi rusaknya karakter bahkan kedaulatan bangsa apakah dimaklumi dan dianggap biasa biasa saja?

di era digital, polisi dalam pemolisiannya berbasis virtual melalui pilarnya on line ( saling terhubung ) dengan sistem elektronik ( e policing)/ pemolisian di era digital. Dengan membangun :

1. Back office sebagai operation room
2. Aplication yang berbasis AI

3. Netvwork yang berbasis IoT
4. Smart management dan smart operation sebagai basis big data system dan one stop service
5. Diawaki polisi siber ( cyber cops)
6. Hasil kinerjanya ditunjukan melalui Algoritma ( dalam info grafis, info statistik dan info virtual ) Sebagai prediksi, antisipasi dan solusi

Akuntabilitas dalam menegakan aturan dalam menata dunia virtual tetap wajib dilakukan secara profesional yang setidaknya mencakup :

1. Moral ( niat baik dan benar )
2. Hukum ( secara Hukum benar / tidak melanggar )
3. Adminsitrasi ( secara Administrasi benar / tidak melanggar )
4. Fungsional ( sesuai SOP )
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat

Akuntabilitas merupakan suatu fungsi kontrol atas berbagai sistem untuk mencapai tujuan.

Sistem bukan tujuan melainkan sarana atau alat mencapai tujuan. Seringkali kita memuja atau mengutamakan alat atau sarana dan mengabaikan tujuan. Sistem merupakan suatu sarana dalam mendukung pencapaian tujuan. Tujuan merupakan hakekat dari sesuatu atas proses yang menjadi puncak pencapaian atas proses tersebut. Sistem sosial misalnya sistem sistem yang ada dalam kehidupan sosial baik itu politik ekonomi seni budaya hukum teknologi dll merupakan proses atau sarana mencapai keadilan sosial maupun kesejahteraan sosial atau peradaban yang mampu membuat kehidupan sosial semakin memanusiakan manusia. Manusia menjadi fokus utama. Demi keamanan misalnya maka manusia dan kemanusiaannya bisa saja diabaikan bahkan dikorbankan yang penting aman walaupun tanpa adanya rasa aman. Cara ala mafia

atau premanisme di dunia virtual seakan menjadi suatu kebenaran yang diagung agungkan sebagai suatu kepahlawanan.

Sistem apapun termasuk elektronik sejatinya hanya sebatas sarana pendukung point di atas. Seringkali pembangunan sistem elektronik yang semestinya menjadi jerat dan jebakan tikus. Namun sayangnya seringkali menjadi sarang tikus. Lagi lagi proyek elektronik sarat kepentingan dan premanisme yang mengagungkan KKN, menjadi keunggulan dan kebijakan. Membangun sistem elektronik berbasis ipo yang ada pada back office aplication dan net work yang semuanya itu merupakan iot dan ai yang menjadi sistem recognize yang ditunjukan adanya algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang berbasis sistem big data dan adanya one stop service.

Sistem online yang berbasis elektronik yang meminimalisir kesempatan terjadinya KKN semestinya produknya mampu merecognize menganalisa dan menghasilkan produk yg berupa algoritma dalam bentuk info statistik info grafis dan info virtual yang on time any time dan real time. Yang dapat digunakan sebagai prediksi antisipasi dan solusi.

Sistem penegakkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik maupun institusi secara profesional maupun personal. Akuntabilitas secara moral yang menunjukkan bahwa semua dimulai dari niatan yang baik dan benar. Di sini ditunjukkan dari grand strategi aturan dan penyiapan sdmnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Etika kerja yang berkaitan dengan berbasis pada do dan dont yang benar benar dijadikan acuannya penilaian kinerja. Akuntabilitas secara hukum ini menunjukkan tidak menyimpang atau melawan hukum dan aturan yang ada yang ada. Akuntabilitas secara administrasi dapat ditunjukkan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya, proses laporan dan dokumen pendukungnya dengan baik dan benar. Akuntabilitas secara fungsional, apa yang dikerjakan menunjukkan suatu upaya pencapaian tujuan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas secara sosial dapat dilihat pada kemanfaatan bagi hajat hidup hidup masyarakat yang ditandainya semakin manusiawinya manusia dan meningkatnya kualitas hidup.

Sistem elektronik atau sistem sistem on line, menjadi tanda adanya reformasi birokrasi dan anti korupsi dan upaya memberikan pelayanan

prima kepada publik. Namun sayangnya yang menggiurkan bukan keutamaannya melainkan pada angka besaran proyeknya. Gilanya lagi dijadikan bancakan sumber daya. Hal tersebut yang semestinya diluruskan melalui upaya upaya untuk kembali melihat pada keutamaannya dalam pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi dan secara fungsional.

**Mengapa Digital Leadership dan E Policing harus disiapkan ?**

Di era digital dengan kehadiran Artificial Intellegence (AI) begitu pesat perkembangannya. AI bisa digunakan untuk berbagai aktifitas dan mendukung kegiatan manusia bahkan pekerjaan manusiapun bisa digantikan dengan AI. Kalau AI bisa digunakan untuk hal baik bagaimana dengan sebaliknya? Mungkinkah AI ditangan orang orang jahat bisa digunakan sebagai kejahatan baru atau sesuatu yang sama sekali belum terpikirkan penanganannya. Kita semua sadar tidak ada suatu kejahatan kalau belum ada aturannya. Hukum tertinggal dari perubahan yang begitu cepat.

Futuristic policing salah satu basisnya adalah lectronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dengan diawaki oleh petugas polisi siber (cyber cops) untuk melayani publik maupun mengatasi hal hal yang kontra produktif akibat dampak dari era vuca (volatility, unpredictable, complexity, ambiguity). Tatkala polisi dan pemolisiannya tertinggal dari perubahan maka tidak akan mampu mengatasi permasalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini akan sangat berdampak luas terutama hilang atau turunnya gingkat kepercayaan masyarakat.

E Policing yang pilarnya pada back office sebagai operation room, dan sentra pelayanan publik ini perlu dibangun dengan dukungan application yang berbasis pada AI untuk inputing data, analaisa data dan bisa menghasilkan produk dalam algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya yang bisa digunakan untuk : memprediksi, mengantisipasi, memecahkan masalah atau membongkar kerja AI yang kontra produktif. Yang dapat diakses real time, on time dan any time. Algoritma ini yang menjadi acuan pada kualitas kinerja pemolisian.

Untuk mampu mengimplementasikan E policing perlu adanya digital leadership (DL) atau pemimpin di era digital. Pemimpin di era digital

memiliki model kepemimpinan yang kebijakannya mendukung untuk mewujudkan E policing yang mampu memberikan pelayanan prima kepolisian dan mendukung SPBE.

DL mau tidak mau harus memikirkan bagaimana mampu membangun aplikasi aplikasi yang berbasis AI untuk :

1. Recognize
2. Maping
3. Analyse
4. Produk dalam bentuk algoritma
5. Networking
6. Counter issue
7. Media policing
8. Pengembangan intelejen
9. Emergency maupun Contigency policing
10. Quick response
11. Index Safety and Security
12. Mengembangkan model model pemolisian yang berbasis wilayah, fungsi maupun dampak masalah
13. Menyiapkan SDM yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
14. Menangani hoax yang menjadi senjata di era post truth ataupun serangan buzer
15. Menata keteraturan sosial di dunia virtual
16. Menangani cyber crime yang berkaitan dengan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb
17. Menghadapi proxy war
18. Melindungi aset aset bangsa
19. Menjamin keamanan harta benda, jiwa raga dari citizen maupun netizen
20. Memikirkan model policing untuk mengatasi point 1 sd 19

Masih banyak hal yang menjadi tugas tanggung jawab kita menghadapi era vuca dan polisi dengan pemolisiannya mau tidak mau berubah dslam konsep dan implementasi futuristic policing yangbterus tumbuh berkembang dan berkesinambungan.

# DUNIA VIRTUAL AKAN MENDUKUNG ATAU SEBALIKNYA MENJADI PETAKA DI DUNIA AKTUAL [103]

Pada era digital, orang mulai hidup di balik layar, alam virtual menjadi aktual, yang maya kini sudah menjadi nyata. Kemudahan, kecepatan membawa kenikmatan yang didukung system-sistem jejaring elektronik menjadi penguat sistem online atau terhubung.

Dalam kehidupan di balik layar sekarang ini, boleh dikatakan hampir semua bagian data, kebijakan, informasi dan lainnya semua ada dibalik layar. Bahkan kejahatan kejahatan pun bisa dilakukan dari balik layar.

Orang-orang yang bekerja dalam dunia nyata, kini semakin terpojok dan tersisih seakan mereka menjadi tenaga-tenaga kasar yang menjadi pesuruh untuk mengaktualkan apa yang ada dalam dunia virtual.

Selain itu mereka yang ada di lapangan seakan seperti dalam kontrol dan pengendalian, dan mereka seperti pion-pion catur saja.

Penghargaan atas keringat dan kerja keras mereka akan semakin punah mungkin bahkan akan luntur. Dunia nyata akan menjadi fakta seperti apa yang diimpikan atau diprogramkan dalam dunia virtual.

Prediksi sisi positif dan negatif akan menjadi potensi konflik antara yang aktual dan virtual. Model pemolisian futuristik semestinya sudah mulai disiapkan atau setidaknya adaya upaya mereduksi kemungkinan-kemunginan hancurnya peradaban konvensional yang akan diubah dengan peradaban digital.

103 https://polisiindonesia.id/2024/11/03/cdl-dunia-virtual-akan-mendukung-atau-sebaliknya-menja-di-petaka-di-dunia-aktual/

Benturan-benturan peradaban ini akan terus terjadi sampai suatu ketika tatkala sudah tidak mampu diatasi akan terjadilah konflik fisik sebagai suatu keniscayaan yang tak terelakan.

Anti kemajuan atau anti teknologi pun akan bisa terjadi dan benturan kepentingan akan terus terjadi di semua lini.

Banyak film atau cerita fiksi yang menggambarkan dan menunjukan akhir dari peradaban atau benturan teknologi dengan dunia nyata.

Sinergitas antara virtual dengan aktual sejak awal mula sudah diprogramkan menjadi suatu sistem yang saling mendukung dan menguatkan.

Kepentingan pengkastaan dan pendiskriminasian antar golongan tidak boleh terjadi, karena akan menjadi isu pembenaran untuk perebutan sumber daya dan pendominasian atau penguasaan atas segala sumber daya dan potensi-potensinya.

Pemahaman atas virtual dan aktual semestinya sejak awal menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bagai dua sisi mata uang yang menjadi satu.

Ruang dan waktu seakan secara virtual melalui jejaring Internet of Things sudah merambah kesemua lini dan sisi kehidupan yang menghubungkan, memudahkan, mempercepat menggantikan cara-cara manual, konvensional dan parsial.

Sistem-sistem dalam administrasi dan operasional semakin berkembang dengan didukung dengan internet dan teknologi lainya. Kaum status quo akan mati matian mempertahankan cara-cara kuno, yang lamban, boros dan berpotensi korup.

Mereka ketakutan kehilangan previlegenya. Cara-cara manual, konvensional dan parsial menjadi ladang subur bagi tumbuh dan berkembangnya KKN.

Lahan bagi preman birokrasi meluaskan sayap, menanam orang-orang sebagai mata telinga dan babu-babu penjaga tentakel-tetankelnya.

Orang-orang ini akan mengkultuskan sang preman sebagai good

father nya atau patron pengaritan (aktor dibalik layar KKN yang dibangga-banggakan).

Tidak itu saja, Para preman ini lihai dan jago memanfaatkan dan memutar balikan fakta dengan segala daya upaya dan kehebatan nya untuk terus menguasai dan berkuasa.

Dunia maya pun dikuasai, teknologi digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, mengancam, membuli bahkan menyakiti bagi siapa saja yang melawan atau tidak patuh padanya.

Media pun dijadikan alat untuk membuli dengan meng-upload yang nantinya ditanggapi sendiri dan di down load nya sendiri, untuk dilaporkan atau ditindak dengan caranya sendiri.

Model-model fitnah media dunia maya pun menjadi kebanggaannya dan nilai keberhasilannya. Memang sangat luar biasa siapa saja dihujatnya. Di era digital tak sesederhana untuk menjatuhkan atau melanggengkan cara kerja jahatnya menjadikan premanisme di dunia maya.

**Aturan, dan Keteraturan Dalam Dunia Virtual**

Di era digital dunia virtual semakin marak bahkan dapat menghambat merusak hingga mematikan produktivitas. Pembunuhan karakter hingga yang mengganggu hidup kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dilakukan. Berita hoaks, pembodohan penyesatan pun secara masif dan brutal bisa dilakukan di era post truth.

Pelintiran dengan memanipulasi sesuatu dengan menambahkan, mengurangi, merubah, dsb sebagai pembenaran yang berdampak :

1. Salah persepsi
2. Mengadu domba
3. Menghakimi
4. Munculnya solidaritas sosial
5. Merusak citra
6. Menghilangkan kepercayaan

7. Konflik sosial

Memang ada yang marah, tatkala diberi aturan atau tatanan, ada yang merasa dikungkung atau dibungkam atau kebebasan sebebas bebasnya tidak terwujud. Hujat menghujat dengan kalimat tidak sepatutnya pun seakan menjadi refleksi hipokrit, pameran ketololan dan sikap pengecut.

Netizen +62 dilabel paling buruk tata kramanya. Entah itu refleksi budaya atau oknum yang tak lagi bisa menghargai orang lain. Sikap budaya bangsa yang adiluhung seakan luntur akibat evoria dunia maya.

Ujaran kebencian menghakimi yang luar biasa memalukan kata katanya. Seakan memang otak dan hatinya lupa segala edukasinya.

Kritik disamakan dengan hujatan. Tabiat buruk seakan menjadi moralitas. Provokasi pembodohan menjadi sesuatu yang membanggakan.

Kalau menampilkan hujatan seakan juara jagoan dan merasa pahlawan. Menyedihkan. Dalam kehidupan sosial di era digital maka keteraturan sosial di dunia virtual memang diperlukan aturan untuk menata dan pertanggungjawaban.

Mau tidak mau tatkala segala sesuatu yang berdampak pada konflik dan berbagai hal yang kontra produktif menjadi tanggung jawab kita semua mengatasinya.

Konteks demokrasi menjadi acuan bebas bertanggung jawab, jaminan perlindungan HAM, supremasi hukum, transparan dan akuntabilitas orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menjaga kedaulatan bangsa dengan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan ketahanan dan daya tangkal bahkan daya saing.

Kritis atas penyimpangan atau ketidak beneran merupakan suatu kecerdasan keberanian bahkan juga wujud tanggung jawab moral.

Keras dalam prinsip dan penyampaian secara elegan akan mengundang simpatik dan solidaritas.

Kekerasan simbolik ujaran kebencian pembodohan hingga pengadilan sosial bukan sesuatu yang spontan melainkan by design. Era post truth antara fakta dan kebohongan diolah sedemikian lupa pembenaran seolah menjadi kebenaran.

Dan dilakukan orang orang cerdik pandai yang terus menerus di viral kan hingga seolah menjadi kebenaran. Bumbu bumbu hoax dengan primordialisme menjadi penyedap.

Keteraturan sosial dalam dunia virtual belum sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang kontra produktif. Namun sebenarnya tanpa sadar taburan taburannya sudah dapat merasuki bahkan mencandui pikiran hingga emosi publik. Dunia virtual jembatan harapan dalam era digital.

Hal yang positif tentu banyak sekali dan mendukung pencerdasan dan pembangunan karakter bangsa yang mampu menembus sekat ruang dan waktu. Namun hal hal yang kontra produktif dan menjadi potensi rusaknya karakter bahkan kedaulatan bangsa apakah dimaklumi dan dianggap biasa biasa saja?

Di era digital, Polisi dalam pemolisian nya berbasis virtual melalui pilarnya on line (Saling Terhubung) dengan sistem elektronik (e policing) pemolisian di era digital. Dengan membangun :

1. Back office sebagai operation room
2. Aplication yang berbasis AI
3. Netvwork yang berbasis IoT
4. Smart management dan smart operation sebagai basis big data system dan one stop service
5. Diawaki polisi siber (Cyber Cops)
6. Hasil kinerjanya ditunjukan melalui Algoritma (Dalam Info Grafis, Info Statistik dan Info Virtual) Sebagai prediksi, antisipasi dan solusi

Akuntabilitas dalam menegakan aturan dalam menata dunia virtual tetap wajib dilakukan secara profesional yang setidaknya mencakup :

1. Moral (Niat Baik dan Benar)

2. Hukum (Secara Hukum Benar Atau Tidak Melanggar)
3. Adminsitrasi (Secara Administrasi Benar dan Tidak Melanggar)
4. Fungsional (Sesuai SOP)
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis
10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan suatu fungsi kontrol atas berbagai sistem untuk mencapai tujuan.

Sistem bukan tujuan melainkan sarana atau alat mencapai tujuan. Seringkali kita memuja atau mengutamakan alat atau sarana dan mengabaikan tujuan. Sistem merupakan suatu sarana dalam mendukung pencapaian tujuan.

Tujuan merupakan hakekat dari sesuatu atas proses yang menjadi puncak pencapaian atas proses tersebut. Sistem sosial misalnya sistem sistem yang ada dalam kehidupan sosial baik itu politik ekonomi seni budaya hukum teknologi dll merupakan proses atau sarana mencapai keadilan sosial maupun kesejahteraan sosial atau peradaban yang mampu membuat kehidupan sosial semakin memanusiakan manusia.

Manusia menjadi fokus utama. Demi keamanan misalnya maka manusia dan kemanusiaannya bisa saja diabaikan bahkan dikorbankan yang penting aman walaupun tanpa adanya rasa aman.

Cara ala mafia atau premanisme di dunia virtual seakan menjadi suatu kebenaran yang diagung agungkan sebagai suatu kepahlawanan.

Sistem apapun termasuk elektronik sejatinya hanya sebatas sarana pendukung point di atas. Seringkali pembangunan sistem elektronik yang semestinya menjadi jerat dan jebakan tikus.

Namun sayangnya seringkali menjadi sarang tikus. Lagi lagi proyek elektronik sarat kepentingan dan premanisme yang mengagungkan KKN, menjadi keunggulan dan kebijakan.

Membangun sistem elektronik berbasis ipo yang ada pada back office aplikasi dan net work yang semuanya itu merupakan iot dan ai yang menjadi sistem recognize yang ditunjukan adanya algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual yang berbasis sistem big data dan adanya one stop service.

Sistem online yang berbasis elektronik yang meminimalisir kesempatan terjadinya KKN semestinya produknya mampu merecognize menganalisa dan menghasilkan produk yg berupa algoritma dalam bentuk info statistik info grafis dan info virtual yang on time any time dan real time. Yang dapat digunakan sebagai prediksi antisipasi dan solusi.

Sistem penegakkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik maupun institusi secara profesional maupun personal.

Akuntabilitas secara moral yang menunjukan bahwa semua dimulai dari niatan yang baik dan benar.

Di sini ditunjukkan dari grand strategi aturan dan penyiapan sdmnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Etika kerja yang berkaitan dengan berbasis pada do dan don't yang benar benar dijadikan acuannya penilaian kinerja.

Akuntabilitas secara hukum ini menunjukkan tidak menyimpang atau melawan hukum dan aturan yang ada yang ada. Akuntabilitas secara administrasi dapat ditunjukkan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaannya, proses laporan dan dokumen pendukungnya dengan baik dan benar.

Akuntabilitas secara fungsional, apa yang dikerjakan menunjukkan suatu upaya pencapaian tujuan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas secara sosial dapat dilihat pada kemanfaatan bagi hajat hidup hidup masyarakat yang ditandai nya semakin manusiawinya manusia dan meningkatnya kualitas hidup.

Sistem elektronik atau sistem sistem on line, menjadi tanda adanya reformasi birokrasi dan anti korupsi dan upaya memberikan pelayanan prima kepada publik.

Namun sayangnya yang menggiurkan bukan keutamaannya melainkan pada angka besaran proyeknya. Gilanya lagi dijadikan bancakan sumber daya. Hal tersebut yang semestinya diluruskan melalui upaya upaya untuk kembali melihat pada keutamaannya dalam pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi dan secara fungsional.

**Mengapa Digital Leadership dan E Policing Harus Disiapkan ?**

Di era digital dengan kehadiran Artificial Intelegensi (AI) begitu pesat perkembangannya.

AI bisa digunakan untuk berbagai aktifitas dan mendukung kegiatan manusia bahkan pekerjaan manusia pun bisa digantikan dengan AI. Kalau AI bisa digunakan untuk hal baik bagaimana dengan sebaliknya? Mungkinkah AI ditangan orang orang jahat bisa digunakan sebagai kejahatan baru atau sesuatu yang sama sekali belum terpikirkan penanganannya.

Kita semua sadar tidak ada suatu kejahatan kalau belum ada aturannya. Hukum tertinggal dari perubahan yang begitu cepat.

Futuristic policing salah satu basisnya adalah lectronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dengan diawaki oleh petugas polisi siber (Cyber Cops) untuk melayani publik maupun mengatasi hal hal yang kontra produktif akibat dampak dari era vuca (Volatility, Unpredictable, Complexity, Ambiguity).

Tatkala polisi dan pemolisian nya tertinggal dari perubahan maka tidak akan mampu mengatasi permasalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini akan sangat berdampak luas terutama hilang atau turunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

E Policing yang pilarnya pada back office sebagai operation room, dan sentra pelayanan publik ini perlu dibangun dengan dukungan application yang berbasis pada AI untuk inputing data, analisa data

dan bisa menghasilkan produk dalam algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual lainnya yang bisa digunakan untuk : memprediksi, mengantisipasi, memecahkan masalah atau membongkar kerja AI yang kontra produktif. Yang dapat diakses real time, on time dan any time. Algoritma ini yang menjadi acuan pada kualitas kinerja pemolisian.

Untuk mampu mengimplementasikan E policing perlu adanya digital leadership (DL) atau pemimpin di era digital.

Pemimpin di era digital memiliki model kepemimpinan yang kebijakannya mendukung untuk mewujudkan E policing yang mampu memberikan pelayanan prima kepolisian dan mendukung SPBE.

Mau tidak mau harus memikirkan bagaimana mampu membangun aplikasi aplikasi yang berbasis AI untuk :

1. Recognize
2. Maping
3. Analyse
4. Produk dalam bentuk algoritma
5. Networking
6. Counter issue
7. Media policing
8. Pengembangan intelejen
9. Emergency maupun Contigency policing
10. Quick response
11. Index Safety and Security
12. Mengembangkan model model pemolisian yang berbasis wilayah, fungsi maupun dampak masalah
13. Menyiapkan SDM yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
14. Menangani hoaks yang menjadi senjata di era post truth ataupun serangan buzer

15. Menata keteraturan sosial di dunia virtual
16. Menangani cyber crime yang berkaitan dengan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb
17. Menghadapi proxy war
18. Melindungi aset aset bangsa
19. Menjamin keamanan harta benda, jiwa raga dari citizen maupun netizen
20. Memikirkan model policing untuk mengatasi point 1 sd 19

Masih banyak hal yang menjadi tugas tanggung jawab kita menghadapi era vuca dan polisi dengan pemolisian nya mau tidak mau berubah dalam konsep dan implementasi futuristic policing yang terus tumbuh berkembang dan berkesinambungan.

# DUNIA VIRTUAL DAN KETERATURANNYA [104]

Di era digital orang memulai hidup dibalik layar, alam virtual seakan menggantikan yang aktual, yang maya kini sudah menjadi nyata.

Kemudahan, kecepatan, ketepatan, membawa kenikmatan yang didukung system-sistem jejaring elektronik menjadi penguat sistem online atau terhubung.

Dalam kehidupan di balik layar sekarang ini, boleh dikatakan hampir semua bagian data, kebijakan, informasi dan lainnya semua ada dibalik layar. Dimana Kejahatan diera digital bisa dikendalikan dan dilakukan dari balik layar.

Orang-orang yang bekerja dalam dunia nyata, kini semakin terpojok dan tersisih seakan mereka menjadi tenaga-tenaga kasar yang menjadi pesuruh untuk mengaktualkan apa yang ada dalam dunia virtual.

Mereka yang ada dilapangan seakan seperti dalam kontrol dan pengendalian mesin atau robot. Manusia seperti pion-pion catur saja.

Penghargaan atas keringat dan kerja keras mereka akan semakin mudah mungkin bahkan akan luntur. Dunia nyata akan menjadi fakta bagi yang impikan atau diprogramkan dalam dunia virtual.

Prediksi akan konflik antara yang aktual dan virtual semestinya sudah mulai disiapkan atau setidaknya mereduksi kemungkinan-kemungkinan hancurnya peradaban konvensional yang akan diubah dengan peradaban digital.

Benturan-benturan peradaban ini akan terus terjadi sampai suatu ketika tatkala sudah tidak mampu diatasi akan terjadilah konflik fisik sebagai suatu keniscayaan yang tak terelakan.

104 https://polisiindonesia.id/2024/11/11/cdl-dunia-virtual-dan-keteraturannya/
https://transindonesia.co/2024/11/11/dunia-virtual-dan-keteraturannya/

Anti kemajuan atau anti teknologi pun akan bisa terjadi dan benturan kepentingan akan terus terjadi disemua lini.

Banyak film atau cerita fiksi (Scientific Fiction) yang menggambarkan dan menunjukan akhir dari peradaban atau benturan teknologi dengan dunia nyata.

Sinergitas antara virtual dengan aktual sejak awal mula sudah diprogramkan menjadi suatu sistem yang saling mendukung dan menguatkan.

Kepentingan pengkastaan dan pendiskriminasian antar golongan tidak boleh terjadi, karena akan menjadi isu pembenaran untuk perebutan sumber daya dan pendominasian atau penguasaan atas segala sumber daya dan potensi-potensinya.

Pemahaman atas virtual dan aktual semestinya sejak awal menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan bagai dua sisi mata uang yang menjadi satu.

**Dunia Konvensional Versus Dunia Virtual**

Dunia maya semakin merajai dalam era digital, hidup ini seolah dalam kesendirian walau hadir dalam kebersamaan.

Hidup di depan layar dan melakukan kehidupan tanpa menghadirkan tubuh secara nyata.

Virtual (Maya) adalah nyata dalam dunia digital. Dari komunikasi, informasi terhubung (online) menjadi sesuatu yang penuh dengan hiruk pikuk dalam ketenangan (Silent).

Kehadiran tanpa menumbuh ada sisi keuntungan nya tatkala menembus batas dan sekat ruang maupun waktu.

Namun ia akan kehilangan suatu rasa atau sense hubungan suasana hati dan jiwa. Dalam dunia yang tidak menuduh akan banyak masalah yang bisa menjadi ancaman dan bahkan penghancuran.

Kekejaman dunia virtual pun bisa menjangkiti generasi muda akan hal-hal yang kontra produktif.

Perjalanan panjang perubahan yang begitu cepat dalam alam virtual dunia tidak menuduh akan menjadi harapan sekaligus ancaman.

Pemikiran dan upaya perbaikan pada era digital memang tidak bisa lagi dipikirkan secara sederhana namun pemikiran secara holistik atau sistemik akan menjadi suatu landasan yang bisa melampaui perubahan dan mampu mengatasinya.

Era digital dan dampaknya pada pendidikan dan pengajaran secara virtual akan berdampak luas bagi pendidikan dan lembaga lembaganya. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di era digital seakan digeser dengan cara cara virtual atau bisa belajar di mana saja.

Apakah kehadiran AI (Artifivial Intelegensi) dapat menjamin kualitas atau hasil didik sperti yang diharapkan. Tentu bisa, tatkala pola pendidikan dibangun atas dasar keutamaannya.

Tatkala keutamaan tidak ditemukan dan dilakukan tambal sulam atau sebatas memenuhi target jam pelajaran sejatinya merusak peradaban.

Era digital, era media. Media seakan menguasai jalur jalur komunikasi dan informasi walau sarat distorsi, entah besar atau kecil.

Distorsi ini yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, pada umumnya yang berkaitan dengan sumber daya.

Apalagi budaya dalam birokrasi masih kental model primordial dan pendekatan personal. Distorsi ini juga terjadi pada pembelajaran di lembaga pendidikan.

Apalagi "Broker" merambah dan memanfaatkan "era Post Truth" untuk menggoreng, membully bahkan membranding yang keliru.

Pembenaran pembenaran akan semakin kental bahkan mampu menggerus kebenaran. Masalah kekuasaan dan penguasaan sumberdaya akan semakin marak dan Proxy War menjadi pilihan.Siapa berbuat apa hingga punya apa menjadi ajang saling serang.

Dunia virtual kini menjadi ruang yang memiliki warganet (Netizen). Mereka hidup dalam sistem sistem virtual dalam pendukung

aktivitas aktual sehari harinya. Dalam sistem sistem pendukung menggantungkan aplikasi yang berbasis pada AI dan Iot.

Warga net sibuk atau disibukan berbagai aktifitas dalam dunia virtual. Smart phone / gadget seakan tidak boleh lepas dari kehidupannya dari bangun tidur hingga saat akan tidur. Era digital menggeser banyak kebiasaan lama memasuki tataran baru.

Di dalam pendidikan pun dunia virtual mulai merambah. Lagi lagi isu primordialisme masih kuat dan rasionalisme dikalahkan. Pendekatan personal dijembatani makelar broker atau vendor yang mampu membahagiakan ndoro ndoro.

Mereka memanfaatkan peluang mediasi. Di era digital para broker akan memanfaatkan melalui netizen membangun buzer, membangun jejaring dan memanfaatkan data maupun fakta untuk pembenaran.

Siapa yang dianggap menjadi penghalang atau duri dalam daging akan dilumat.

Isu yang ditabur memang menarik bahkan seakan penuh pencerahan walau faktanya penyesatan.

Keutamaan bagi lembaga pendidikan ini menjadi penting dan untuk apa hasil didiknya digunakan dalam hidup dan kehidupan yang sejatinya juga bagi pembangunan dan pemeliharaan peradaban.

Peradaban di era digital akan ditandai dengan sistem yang berbasis teknologi. Seni budaya merupakan suatu tanda olah rasa bagi persemaian tumbuh berkembangnya suatu peradaban, muncul digital art yang mampu menembus ruang waktu seolah melibas segala sesuatu yang tersekat ruang dan waktu.

Apa saja bisa diperoleh dengan cepat dan berada di genggaman tangan. Kekuatan Internet of thing dengan Artificial Intelegensi seolah meruntuhkan gaya lama yang tradisional manual dan parsial.

Di era digital seakan media menjadi arena baru pada dunia virtual yang menjadi disrupsi. Tatkala tidak siap bermedia maka dalam memanfaatkan media berdampak pada COI (Conflick Of Interest).

Memberdayakan media yang semestinya mendukung produktifitas dan meningkatkan kualitas hidup bisa bisa menjadi sesuatu yang kontra produktif.

Apalagi ini di era Post Truth, media seakan menjadi market place yang dapat digunakan sebagai ajang untuk mempengaruhi bahkan membangun opini publik melalui berita hoaks yang memviralkan pembenaran agar dianggap sebagai kebenaran.

Saling hujat saling serang seakan dunia virtual tidak membutuhkan keteraturan. Netizen pun semestinya dibangun bagi kemajuan suatu peradaban.

Rekayasa sosial dalam ranah virtual secara by design dapat digunakan dalam kepentingan apa saja. Boleh dikatakan kaum milenial paham dan menggunakan media sosial.

Apa yang di sampaikan bisa langsung di share ke berbagai penjuru dunia atau secara global dalam hitungan detik.

Dunia tanpa batas ruang dan waktu. Apa saja kapan saja dsn siapa saja bisa. Media menjadi power on hand yang dapat membantu atau sebaliknya dalam berbagai aktivitas manusia dalam berbagai gatra kehidupan.

Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, hukum, pertahanan. Berbagai isu mudah dan cepat dihembuskan.

Media sosial banyak menggeser tatanan kehidupan dari cara konvensional bergeser ke arah yang kekinian. Tatkala konten yang didesign untuk kepentingan tertentu atau kelompok tertentu maka akan menjadi potensi konflik dan kontra produktif.

Pilar dengan berbagai sendi kehidupan sebagai simbol kedaulatan dan peradaban bangsa dapat digerus. Sehingga, sumber daya utama dan penting bagi kedaulatan dan daya tahan bangsa dapat diganggu hingga diambil alih.

Oleh sebab itu di dalam memanage media setidaknya dilakukan untuk:

1. Memberitakan yang baik dan benar

2. Sesuai dengan fakta tidak mengada ada dan tidak direkayasa
3. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
4. Berpihak pada kemanusiaan supremasi hukum transparan akuntabel, informatif komunikatif dan mudah diakses
5. Menginspirasi, memotivasi dan memberi solusi serta mengedukasi
6. Membuat counter issue secara akademis dan yuridis atas sesuatu yang menjadi dampak era post truth terutama yang berkaitan dengan hoax
7. Menghibur, fun dan tetap pada norma norma etika dan moralitas dan sebagainya.

Hukum, penegakan hukum dan keadilan mau tidak mau harus memikirkan bagaimana Criminal Justice System mampu menjadi pilar peradaban dan membangun sistem sistem aplikasi aplikasi yang berbasis AI untuk :

1. Recognize
2. Maping
3. Analyse
4. Produk dalam bentuk algoritma
5. Networking
6. Counter issue
7. Media management
8. Pengembangan intelejen
9. Emergency maupun Contigency
10. Quick response
11. Index Safety and Security
12. Mengembangkan model model pemolisian yang mampu mendukung sistem pelayanan publik bidang hukum yang berstandar prima.

13. Menyiapkan SDM yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
14. Menangani hoaks yang menjadi senjata di era post truth ataupun serangan buzer
15. Menata keteraturan sosial di dunia virtual
16. Menangani cyber crime yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.
17. Menghadapi proxy war
18. Melindungi aset aset bangsa
19. Menjamin keamanan harta benda, jiwa raga dari citizen maupun netizen
20. Memikirkan model policing untuk mengatasi point 1 sd 19.

Tatkala era digital awal diterapkan maka akan terjadi banyak konflik terutama konflik kepentingan.

Namun tatkala era digital telah mampu menggeser cara lama atas pola hidup dan kehidupan maka pola baru akan muncul yang dijembatani dan diberi ruang oleh media Sistem sistem elektronik yang saling terhubung di era digital akan di landasi artificial intelegensi dan internet of things.

Kekuatan artificial intelegensi pada aplikasi aplikasi digital adalah pada algoritma yang mampu memprediksi, memberikan solusi sebagai bentuk antisipasi yang disajikan secara real time

Era digital merubah budaya dan perilaku birokrasi dari sebatas pragmatis menjadi analisis yang diwujudkan dalam algoritma.

Era digital yang diterima oleh publik dan sebagai bagian dari keteraturan sosial, sistem sistem pelayanan publiknya menjadi prima dan mampu meminimalisir potensi potensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sistem algoritma yang diterapkan akan menjadi bagian dari akuntabilitas kepada publik

Sistem sistem pelayanan publik di era digital di bidang: keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan akan menembus sekat ruang dan waktu dan membantu pada tingkat manajemen maupun operasional.

Sistem sistem on line yang ada akan dapat mensinergikan satu sama lainnya bahkan akan menguasai pasar dalam berbagai lini kehidupan.

Tatkala terjadi disrupsi maka akan ada sesuatu yang kontraproduktif. Keteraturan di dunia siber dan pada sistem pelayanan virtual diperlukan adanya sistem pengaman dan pengawasan serta perta pertanggungjawaban secara siber.

# COOLING SYSTEM UNTUK MENJAGA KETERATURAN SOSIAL DI MASA SUHU POLITIK YANG MEMANAS [105]

"Hati yang gembira adalah obat", pepatah di atas benar adanya, ketegangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bisa membuat keruh suasana. Di masa menjelang pemilihan umum suhu politik memanas. Saling serang, saling dukung dengan cara cara yang kadang kontra produktif. Platob ribuan tahun yang lalu menulis rakyat dianalogikan sebagai "big animal and beast".

Kaum sofis tahu cara menuruti, menyenang nyenangkan sampai memaksa dan memberdayakan sesuai keinginannya. Di era post truth, fenomena yang ada diolah dengan sedemikian rupa diviralkan terus menerus pembenaran mengalahkan kebenaran.

Opini publik diobok obok seolah olah sudah gempar, geger genjik udan kirik. Heboh dengan berbagai issue yang dikemas dengan primordialisme ( sara ) dengan mengadu domba satu sama lainnya. Ketegangan dan memanasnya suhu politik akan semakin membuat antar saudara sesama anak bansa bisa saling serang dan sling bunuh satu sama lain. Manuver manuver politik membuat baper dan hilangnya hati gembira. Sudah saling intip saling balas satu sama lain, saling membunuh karakter. Rakyat diberi tontonan yang menjerumuskan diprovokasi sebagai jaran keplakan.

Hati yang gembira adalah obat bagi kehidupan sosial yang sedang memanas. Membuat event event dengan berbagai program yang membuat happy dan mencerahkan menjadi solusi cooling system. Acara acara yang menggembirakan bisa dengan model menjelang hari kemerdekaan di bulan Agustus, antara lain :

105 https://transindonesia.co/2023/11/20/cooling-system-untuk-menjaga-keteraturan-sosial-di-masa-suhu-politik-yang-memanas/

1. Lomba lomba di kampung seperti : balap karung, panjat pinang, lomba kebersihan, gerak jalan dsb
2. Syukuran dan makan bersama
3. Kongkow kongkow ngobrol seni budaya
4. Hiburan dari orgen tunggal, folk song, paduan suara dsb
5. Kerja bakti gotong royong
6. Memasak bersama bapak bapak
7. Wayangan, ludruk, keroncongan, ketoprakan dsb
8. Doa bersama, sesuai agama dan keyakinan
9. Pameran pembangunan atau pameran seni budaya
10. Karnaval atau pawai sesuai konteks deklarasi pemilu damai dsb.

Acara di atas dapat dikemas dengan berbagai model kreatif yang dibuat dan memberdayakan area publik maupun media menjadi area atau tempat tempat nongkrong untuk interaksi sosial. Model dialog langsung atau melalui media untuk menggerakkan komunitas komunitas yang ada.

Kesepakatan untuk tetap rasional dan penyelesaian masalah dengan mengedepankan jalur hukum maupun dialog.

Kegiatan di atas dapat memberdayakan soft power dan smart power sebagai ikon yang inspiratif dan meng counter issue, yang mendamaikan, mendinginkan dan mencerdaskan.

# STUDY AND LEARNING MENJADI PEMBELAJAR DI ERA DIGITAL [106]

Pagi hari ini saya melihat tiktok dari Profesor Reinald Kasali yang membahas tentang study dan learning. Topik tersebut menginspirasi bagaimana lembaga pendidikan dan latihan (Lemdiklat) Polri untuk menjadi lembaga pembelajar yang mengembangkan study, training coaching and learning.

”study bisa dipahami belajar secara formal dan Learning bisa dipahami belajar sepanjang hayat secara formal maupun non formal. Study maupun learning keduanya dituntut untuk menjadi pembelajar merupakan moralitas untuk membangun hidup dan kehidupan yang lebih baik demi semakin manusiawinya manusia”.

Lemdiklat Polri mengembangkan study, Learning, coaching and training yang prosesnya bisa dari mana saja, dari apa saja dan dari siapa saja bahkan di mana saja. Menjadi pembelajar tentu tidak sebatas di ruang kelas yang berisi tembok tembok yang bisa menjadi belenggu kemerdekaan berpikir atau mungkin guru guru yang menakut nakuti yang melemahkan bahkan mengajarkan kekerasan, sehingga menghasilkan trauma maupun kejahatan.

Tatkala proses study, learning, coaching dan training penuh dengan didoktrin dan dijejali berbagai hal tanpa memahami kemanfaatannya maka sebenarnya itu kesia-siaaan. Belajar tidak membangkitkan kesadaran tidak mencerahkan, sekedar menghabiskan jam pada mata pelajaran.

” non scolae set vitae discismus” belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup”

106 https://transindonesia.co/2024/11/20/study-and-learning-menjadi-pembelajar-di-era-digital/

Belajar untuk hidup, membawa manfaat bagi hidup dan kehidupan. Lemdiklat Polri semestinya menjadi lembaga pencerah yang mencerdaskan berbasis moralitas. Lemdiklat Polri menjadi refleksi institusi Polri yang profesional, cerdas bermoral dan modern.

Mengembangkan Lemdiklat Polri sebagai centre of exellent tentu saja membutuhkan kemampuan berpikir secara teoritikal maupun konseptual. Teori merupakan kampuan mengabstraksikan dalam menemukan hakekat atau inti akan sesuatu dengan menghubung hubungkan antara konsep konsep yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan sesuatu fenomena. Teori tatkala memiliki kekuatan dan kesahihan, memiliki power dan menjadi ikon. Namun bukan disakralkal atau didewakan sehingga para orang hanya menghafal bahkan membanggakan menggunakan teori ini itu seakan sebagai pengecer teori dan lupa bahwa sejatinya teori sebagai acuan atau kerangka berpikir akademisnya. Teori merupakan suatu karya cipta penemunya bisa berdasar pengalamannya bisa juga dari hasil risetnya atau hasil dari konstruksi berpikirnya dengan menggunakan atau mengkritisi teori teori yang terdahulu. Teori dapat dipahami sebagai hakekat hubungan antara konsep konsep yang merupakan prinsip prinsip yang mendasar dan berlaku umum untuk menjelaskan atau menerangkan suatu fenomena. Berpikir teoritis merupakan berpikir yang abstrak atau imajinatif yang mampu menemukan prinsip mendasar yang berlaku umum bukan pragmatis.

Teori bukan dihafal bukan sebatas dijejer jejer atau dipajang namun digunakan untuk menjelaskan apa makna di balik suatu gejala atau fakta. Tatkala tanpa kemampuan imajinasi maka teori sebatas dihafal dan tidak akan dapat mengurai dalam konstruksi/ kerangkanya atau dekonstruksinya. Tatkala teori dihafalkan atau tidak dijadikan kerangka berpikir atau mengkonstruksi maka teori itu akan tumpul atau flat atau datar saja. Tidak akan mampu menjadi sarana menyelami kedalaman atau membongkar labirin atas suatu fenomena. Bahkan kadang malah membelenggu akibat dihafal atau semacam kewajiban saja. Tatkala menulis atau membuat kajian atas sesuatu apabila sudah menempel teori ini itu di mana mana seolah olah sudah benar.

Dengan teori diharapkan mampu memahami makna di balik fenomena dengan sudut pandang atau pendekatan yang bervariasi untuk menemukan kebaruan. Berpikir teoritis ini selain mengabstraksikan juga memerlukan imajinasi dalam membuat konstruksi baru atas kajiannya. Tatkala teori mampu diurai dan digunakan sebagai konstruksi baru atau dimanfaatkan untuk mengurai dan membangun maka teori akan memerdekakan dan tidak membelenggu.

Era digital dan dampaknya pada pendidikan dan pengajaran secara virtual akan berdampak luas bagi pendidikan dan lembaga lembaganya. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di era digital seakan digeser dengan cara cara virtual atau bisa belajar di mana saja. Apakah kehadiran AI (artifivial intilligence) dapat menjamin kualitas atau hasil didik sperti yang diharapkan? Tentu bisa, tatkala pola pendidikan dibangun atas dasar keutamaannya. Tatkala keutamaan tidak ditemukan dan dilakukan tambal sulam atau sebatas memenuhi target jam pelajaran sejatinya merusak peradaban.

Penyelenggaraan belajar mengajar pada lembaga pendidikan, guru sebagai pilarnya namun bukan pemegang ilmu satu satunya. Sistem pengajaran melalui model dan konteks literasi sehingga secara virtual maupun aktual tetap mampu menstimuli para siswa atau siapa saja yang mengikutinya akan tercerahkan dan mampu merubah mind set nya. Pola pembelajarannya berubah dari aktual ke virtual dan membranding para siswa sehingga bukan sebatas apa bagaimana dan mengapa melainkan mampu membangun menjadi siapa. Beberapa hal yang dapat dibangun atau setidaknya dapat diterapkan di masa transisi menghadapi perubahan besar kehadiran AI dapa lembaga pendidikan setidaknya melalui

1. Membangun sistem literasi
2. Melakukan pembelajaran melalui dialog secara proaktif dan problem solving
3. Keutamaan ilmu yang dipelajari dijadikan core value dan standar keberhasilannya

4. Lembaga pendidikan mampu berwibawa dan menunjukkan kualitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan atau proses belajar dengan baik dan benar
5. Para dosen atau Guru guru mampu mengikuti perubahan yang begitu cepat, memposisikan sebagai pilar lembaga pendidikan yang berkualitas dan memiliki kompetensi akademik serta mampu memotivasi mahasiswa berani kreatif serta menjadi ikon kecerdasan atau keahlian
6. Fasilitas pendidikan membuat sistem back office, application berbasis AI dan net work berbasis IoT yang mampu memberikan dukungan pendidikan secara virtual dalam model literasi ada sistem dialog peradaban dan branding memanfaatkan media dan jejaringnya.
7. Para siswa atau peserta didik dimotivasi dan dilati belajar dengan cara berpikir kreatif inovatif problem solving dan visioner
8. Proses belajar mengajar yang berbasis pada :
    a. keilmuan,
    b. pemahaman dan pengembangan teori dan konsep,
    c. studi kasus ,
    d. problem solving, yang dikembangkan dalam pemikiran kebaruan sebagai pembaruan
9. Forum diskusi sebagai basis dialog peradaban bagi pengembangan ilmu pengetahuan
10. Penerbitan untuk menampung karya para dosen atau guru dan siswa /peserta secara elektronik atau cara konvensional
11. Jurnal ilmiah
12. Kerjasama dalam maupun luar negeri untuk kegiatan akademik : penelitian ilmiah, debat publik, bedah buku, bhakti masyarakat dll
13. Ada ikatan alumni

14. Aktif dlm kegiatan-kegiatan forum akademis nasional maupun internasional bench mark seminar work shop dan studi nasional dan internasional
15. Ada publikasi pengajarannya ke media sehingga dapat dijadikan referensi dan literasi
16. Menjadi anggota forum atau asosiasi akademik nasional maupun internasional

Era digital, era media. Media seakan telah menguasai jalur jalur komunikasi dan informasi walau sarat distorsi, entah besar atau kecil. Distorsi ini yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, pada umumnya yang berkaitan dengan sumber daya. Apalagi budaya dalam birokrasi masih kental model primordial dan pendekatan personal. Distorsi ini juga terjadi pada pembelajaran di lembaga pendidikan.

"Broker" menggunakan media akan terus merambah dan memanfaatkannya, yang bisa berefek positif maupun negatif dan kontra produktif.

"Era post truth" untuk menggoreng, membully bahkan membranding yang keliru. Pembenaran pembenaran akan semakin kental bahkan mampu menggerus kebenaran. Masalah kekuasaan dan penguasaan sumberdaya akan semakin marak dan proxy war menjadi pilihan. Siapa berbuat apa hingga punya apa menjadi ajang saling serang.

Dunia virtual kini menjadi ruang yang memiliki warganet ( netizen). Mereka hidup dalam sistem sistem virtual dalam pendukung aktivitas aktual sehari harinya. Dalam sistem sistem pendukung menggantungkan aplikasi yang berbasis pada AI dan Iot. Warga net sibuk atau disibukan berbagai aktifitas dalam dunia virtual. Smart phone / gadget seakan tidak boleh lepas dari kehidupannya dari bangun tidur hingga saat akan tidur. Era digital menggeser banyak kebiasaan lama memasuki tataran baru.

Di dalam proses pendidikan pun dunia virtual mulai merambah bahkan menjadi salah satu pilarnya. Di era post truth isu primordialisme bisa semakin kuat dan rasionalisme dikalahkan dengan pembenaran

pembenaran yang didesign sedemikian rupa untuk mengalahkan kebenaran. Pendekatan personal dijembatani para broker memanfaatkan peluang mediasi. Di era digital para broker akan memanfaatkan netizen membangun buzer, membangun jejaring dan memanfaatkan data maupun fakta untuk pembenaran. Siapa yang dianggap menjadi penghalang atau duri dalam daging akan dilumat.

Isu yang ditabur memang menarik bahkan seakan penuh pencerahan walau faktanya penyesatan.

Keutamaan pembelajaran pada Lemdiklat Polri :

1. Moralitas yang berbasis kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Pengendalian diri dan kedewasaan melalui : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
3. Mengimplementasikan keutamaan Polisi dalam pemolisiannya bagi:
    a. Kemanusiaan
    b. Keteraturan Sosial
    c. Peradaban
4. Menjadikan hasil didik sebagai Polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
5. Menjadi Ikon Kebhinekaan, Ikon Toleransi, Ikon Anti Korupsi dan Ikon Anti Narkoba

Pembelajaran di Lemdiklat Polri merupakan proses tranformasional :

a. Siap dan berani belajar dari kesalahan masa lalu

b. Siap menghadapi tuntutan, tantangan dan harapan masa kinI

c. Mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik

Lemdiklat Polri sebagai centre of excellet akan terus membangun dan mengembangkan model model pemolisian yang sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan maupun kepentingan atau fungsinya dan juga yang berbasis dampak masalah.

Lemdiklat Polri menjadi penting dan mampu menjadi centre of excellent tatkala hasil didiknya mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern yang mampu memberikan jaminan keamanan dan rasa aman, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas prima dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mendukung pembangunan nasional maupun memelihara keteraturan sosial bagi pembangunan peradaban bangsa.

Peradaban di era digital akan ditandai dengan sistem yang berbasis teknologi. Seni budaya merupakan suatu tanda olah rasa bagi persemaian tumbuh berkembangnya suatu peradaban, muncul digital art yang mampu menembus ruang waktu seolah melibas segala sesuatu yang tersekat ruang dan waktu. Apa saja bisa diperoleh dengan cepat dan berada di genggaman tangan. Kekuatan internet of thing dengan artificial intellegence seolah meruntuhkan gaya lama yang tradisional manual dan parsial.

Tatkala lembaga pendidikan masih ala feodal dan dilakukan pola parsial konvensional tentu akan dilibas. Proses pembelajaran dan hasil didik tidak akan mampu mendobrak atau menghasilkan sesuatu yang bisa dikatakan kontemporer atau kekinian. Timbul pertanyaan bagaimana pembelajaran dan memfungsikan lembaga pendidikan agar terus mampu bertahan hidup tumbuh dan berkembang di era digital? Lembaga pendidikan dengan pembelajarannya mau tidak mau dibongkar dari zona nyamannya sebagai suatu solusi sosial agar mampu menjadi ikon peradaban dan mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial. Tatkala kehidupan sosial sebagian beralih ke balik layar dan kebersamaan beralih dalam tata kehidupan virtual maka segala sesuatu yang hard diganti yang soft, tidak sebatas yang tangible tetapi juga yang intangible.

Dalam tata kelola politik sosial budaya kemasyarakatan yang waras maka lembaga pendidikan akan mendapat ruang yang layak untuk menjadi persemaiannya agar terus hidup tumbuh dan berkembang. Tatkala lembaga pendidikan dan proses pembelajarannya terabaikan atau dalam tekanan atau pendiskriminasian apalagi dikerjakan

sebatas tambal sulam yang administratif saja, maka dapat dikatakan rontoknya suatu peradaban dan hancurnya suatu kedaulatan bangsa. Segala sesuatu yang kontra produktif meraja lela, keutamaan tidak ditemukan kebendaan menjadi yang utama jiwa dan kemanusiaan akan dinomorsekiankan atau malah dibelenggu diperdaya bagai robot semata.

# BHABINKAMTIBMAS DAN COOLING SYSTEM [107]

Keamanan dan Rasa Aman merupakan kebutuhan bagi hidup dan kehidupan suatu masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang. Upaya mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (keamanan dan ketertiban dalam masyarakat/ Kamtibmas) melalui strategi Polmas / Community Policing dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas.

Kita mengetahui bahwa Bhabinkamtibmas merupakan petugas pelayanan masyarakat yang terdepan "Strategi Penguatan Bhabinkamtibmas" sebagai cooling system setidaknya mencakup:

1. Ada dukungan kebijakan (political will yang kuat setidaknya dari Kapolres) yang mendukung penuh bagi berhasilnya tugas Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas di wilayah tugasnya.
2. Kepemimpinan Yang Transformatif, yaitu pemimpin yang peduli dengan kebijakannya mendukung para Bhabinkamtibmas mampu berfungsi sebagai cooling system
3. Tim Transformasi sebagai sistem back up secara:
    a. Akademik
    b. Manajerial
    c. Operasional
    d. Teknologi
    e. Sarana Kontak dsb

Agar para Bhabinkamtibmas keberadaannya diterima dan memdapat dukungan serta dipercaya warga masyarakat yang dilayaninya.

107 https://transindonesia.co/2023/11/20/bhabinkamtibmas-dan-cooling-system/

4. Dukungan infrastruktur dan sistem sistem online yang berbasis elektronik, sehingga para Bhabinkamtibmas menjadi bagian dari sistem operasional pada tingkat KOD ( kesatuan operasional dasar / polres ) yang mampu berfungsi sebagai onte stop service
5. Adanya Call and Comand Centre sebagai Operation Room Pusat K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando Pengendalian dan Informasi) yang mendukung Bhabinkamtibmas mampu berkomunikasi atau memberikan inputing data dan melaksanakan quick response time
6. Model model implementasi Bhabinkamtibmas, sesuai Corak Masyarakat dan Kebudayaannya. Dan diajarkan serta dilatihkan kepada para Bhabinkamtibmas melalui edukasi, training dan choaching
7. Memiliku Program Program Unggulan yang mendukung dan menjembatani Bhabinkamtibmas mampu sebagai cooling system, antara lain :
    a. Festival Bhabinkamtibmas
    b. Art Policing (pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata)
    c. Bhabinkamtibmas award
    d. Pembinaan terhadap kaum remaja
    e. Kegiatan olah ragadsb
8. Manajemen Media, yang mendukung sistem informasi dan komunikasi untuk menampung hasil kegiatan para Bhabin dan juga sebagai ajang Inovasi dan Kreatifitas.
9. Pilot Project, menjadi proyek percontohan yang dapat ditumbuhkembangkan secara lebih luas lagi.
10. Monitoring Evaluasi dan membuat pola pola Pengembangannya.

Tugas Bhabinkamtibmas kompleks dan menjadi ajang pertaruhan citra Polri. Maka diperlukan adanya “Sistem Peningkatan Kompetensi dan Penguatan Bhabinkamtibmas sebagai bagian cooking system” yang setidaknya mencakup:

1. Menyiapkan :Master Trainer dan Trainer
2. Sistem Pendidikan dan Latihan secara reguler dan berkesinambungan
3. Sistem coaching secara Virtual agar dapat menjangkau lebih luas
4. Pemerintah, Akademisi, sektor bisnis, para tokoh dalam masyarakat dsb
5. Didukung Big Data System
6. Back Up dari Fungsi Utama, Fungsi Pendukung maupun yang fungsional.
7. SOP yang berisi :
    a. Job description dan Job Analysis
    b. Standarisasi Keberhasilan Pelaksanaan Tugas
    c. Sistem Penilaian Kinerja
    d. Sistem Reward and Punishment
    e. Etika Kerja
8. Membranding Para Petugas Bhabinkamtibmas dalam Program Local Heroes
9. Mengembangkan Implementasi Bhabinkamtibmas dalam corak masyarakat dan kebudayaannya dengan mengkaitkan Kearifan Lokal
10. Memberikan sarana Kontak dalam Kegiatan Patroli dan Sambang Masyarakat.

Keutamaan Bhabinkamtibmas pada Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban, sehingga Bhabinkamtibmas dapat dikatakan sebagai Ikon Polmas. Bhabinkamtibmas sebagai petugas polisi yang terdepan dan terdekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya sistem penguat dan back up system.

Walaupun wilayah tugas Bhabinkamtibmas tidak luas, namun menunjukan tingkat kompleksitas yang tinggi. Pada kawasan yang tidak terlalu luas itulah, diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat berkomunikasi dari hati ke hati, saling mengenal satu sama

lainnya. Keberadaan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat diterima oleh warga komuniti yang dilayaninya. Di samping itu juga diakui keberadaannya dan menjadi bagian dari warga komuniti tersebut. Para Bhabinkamtibmas memiliki tugas berat sehingga kepercayaan warga masyarakat menjadi kekuatannya.

# COLLING SYSTEM DI ERA POST TRUTH [108]

Di era post truth berbagai cara pembenaran yang di design sedemikian rupa dianggap sebagai kebenaran yang dapat berefek pada penyesatan dengan mengobok obok opini publik.

Media menjadi sarana utamanya dengan berbagai hoax yang dibumbui primordialisme untuk mendapatkan legitimasi dan solidaritas. Yang dapat menggerus logika dengan mengutamakan emosional dengan memanfaatkan spiritualisme. Sasarannya adalah untuk mempengaruhi opini publik yang akan dapat mengadu domba hingga terjadinya konflik sosial. Untuk menjaga keteraturan sosial dan perdamaian diperlukan adanya pendinginan atau cooling system, yang setidaknya melakukan langkah langkah:

1. Membuat event event dengan berbagai program yang membuat happy dan mencerahkan.
2. Membuat dan berdayakan area publik atau tempat tempat nongkrong untuk interaksi sosial.
3. Membuat model dialog langsung atau melalui media.
4. Membuat model model komunitas.
5. Membuat kesepakatan melalui berbagai cara untuk tetap rasional dan penyelesaian masalah dengan mengedepankan cara cara damai.
6. Memberdayakan soft power dan smart power.
7. Memberdayakan seni budaya.
8. Membuat model model counter issue yang mendamaikan, mendinginkan dan mencerdaskan.

108 https://transindonesia.co/2023/11/20/colling-system-di-era-post-truth/

9. Membangun role model dari tokoh tokoh formal dan non formal yang inspiratif
10. Memberdayakan sistem edukasi formal maupun non formal.

Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan dalam menjaga keteraturan sosial membangun cooling system.

# LEMDIKLAT POLRI SIAPKAN POLISI MASA DEPAN YANG DIPERCAYA PUBLIK [109]

Ada yang berpendapat bahwa pendidikan penting namun praktek atau kerja langsung di lapangan juga penting.

Tanpa dasar pengetahuan secara teoritis maupun konseptual dapat terjadi kesalahan atau stug jalan di tempat atau dikatakan hanya begitu begitu saja.

Namun sebaliknya ada yang mengatakan praktek kerja lapangan dan lebih penting daripada berteori yang membuat ribet.

Toh ijazah sebatas persyaratan administrasi menunjukan pernah sekolah bukan pernah berpikir. Perbedaan pandangan seringkali membingungkan atau curhat tanpa solusi dan bukan untuk mencari benar salah atau menyalahkan yang satu membenarkan yang lain. Melainkan bagaimana melihat pada peradaban yang konteksnya berkaitan dengan perubahan bagi hidup dan kehidupan.

Non scholar set vitae discismus, belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup.

Fokus pendidikan pada hakekatnya bagi keberlangsungan hdup manusia dalam situasi beradab yang hidup tumbuh dandi berkembang demi semakin manusiawinya manusia. Yang ditandai meningkatnya kualitas hidup manusia.

Lemdiklat menjadi arena atau ruang di mana mereka belajar agar kelak mampu menghasilkan produksi bagi bertahan hidup tumbuh berkembang.

109 https://polisiindonesia.id/2024/12/05/cdl-lemdiklat-polri-siapkan-polisi-masa-depan-yang-dipercaya-publik/

Proses belajar di era digital era AI (Artificial iIntelegensi) banyak menyasar bayak lini kehidupan termasuk pendidikan.

Pendidikan di era digital belajar bisa di mana saja, sekolah bukan satu satunya pemegang kunci kebenaran. Para guru bukan lagi yang paling tahu.

Ruang ruang kelas bisa saja justru membelenggu cara berpikir dan membuat captive mind.

Kembali pada konteks AI kaitan dengan bergesernya pendidikan dan proses belajar mengajarnya.

Menjawab hal tersebut golongan konservatif tentu akan mempertahankan kekunoan nya. Mempertahankan rangking menjadi satu satunya tanda kecerdasan walau sebenarnya juga penuh dengan kepalsuan dan kepura puraan.

Kaum visioner tentu akan merubah dan mau berubah walau tidak mudah.

Tatkala pendidikan mempertahankan status quonya yang mapan dan nyaman dikaitkan konteks peradaban maka pendidikan memang justru akan kontra produktif dan para siswa tidak tercerahkan.

Hasil didik jauh panggang dari api yang moralitas, mental, dan kecerdasannya tak lagi peka peduli dan tiadanya bela rasa bagi memanusiakan manusia.

Kemanusiaan keteraturan sosial dan peradaban bagi meningkatnya kualitas hidup dan harkat dan martabat manusia merupakan keutamaan bagi polisi dalam pemolisian nya. Konteks pendidikan bagi polisi khususnya pada Lemdiklat Polri untuk menyiapkan regenerasi polisi masa depan yang siap menghadapi perubahan dan mau melakukan perubahan.

Basis dari pendidikan Lemdiklat Polri adalah moralitas. AI boleh lebih pandai namun tidak lebih bijaksana.

Kebutuhan adab merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Dalam kehidupan sosial, potensi konflik dan berbagai permasalahan yang kontra produktif sangat kompleks, yang dikategorikan dari manusianya, alamnya dan sistem maupun infrastrukturnya. Mengatasi maslah keteraturan sosial bukan perkara mudah menata manusia ini adu kekuatan dan memerlukan ada figur yang dipercaya atau menjadi ikon bagi hidup dan kehidupannya.

Lemdiklat Polri sebagai lembaga pendidikan bagi para polisi dan calon polisi masa depan yang dapat dipercaya atau mendapatkan kepercayaan kepada publik, di situlah core dari Lemdiklat Polri.Mau tidak mau Lemdiklat Polri memikirkan bagaimana mentransformasi, mencerahkan dan memanusiakan dalam menyiapkan polisi masa depan yang dipercaya publik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka proses belajar mengajar di Lemdiklat Polri, variatif antara konseptual teoritik, studi kasus, pemecahan masalah yang proaktif dalam kondisi kritis atau ekstrim, kreatif dan inovatif mengembangkan pola pola pemolisian nya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan terbangunnya peradaban.

Untuk menghasilkan hasil didik yang mendapat kepercayaan publik setidaknya para alumni Lemdiklat Polri mampu menunjukan :

1. Sebagai petugas polisi yang profesional ( ahli )
2. Pikiran, perkataan dan perbuatan serta kebijakannya cerdas ( kreatif atau inovatif )
3. Moralitasnya dapat ditunjukan dalam upaya membangun : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
4. Visioner dan modern yang ditunjukan mau dan mampu melakukan perubahan yang dinamis
5. Kebijakan yang dilakukan menunjukan sebagai langkah langkah anti korupsi
6. Dalam menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab transparan yaitu terukur dan jelas pentahapan nya
7. Pelaksanaan tugasnya akuntabel dapat dipertanggungjawabkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial

8. Kebijakannya berbasis data dan informatif yang menuju pada one stop service berbasis pada sistem big data
9. Apa yang menjadi pelayanan publik mudah diakses, kapan saja di mana saja
10. Standar pelayanan publik setidaknya memenuhi unsur: cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Membangun legitimasi dan kepercayaan publik kepada polisi salah satunya melalui lembaga pendidikan yang mampu mentransformasi, mencerahkan dan memanusiakan antara lain adanya :

1. Political will
2. Komitmen dan integritas para guru dan staf penyelenggara pendidikan
3. Keteladanan
4. Penanaman dan keyakinan core value sebagai pemimpin masa depan yang dipercaya melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga, akademik, studi kasus, bakti masyarakat yang menunjukan sebagai kumpulan orang baik yang bertugas sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.
5. Melakukan perubahan mind set dan culture set Sespim sebagai pendidikan moral yang berbasis pada keutamaan
6. Membuat konsep yang komprehensif bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar agar mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi masa kini, dan meyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Secara konsisten dan konsekuen menerapkan program yang dibuat dengan sistem proaktif dan problem solving yang terpadu dan berkesinambungan.
8. Menerapkan merit sistem yang transparan, dan akuntabel sebagai pemimpin yang transformatif

9. Membangun dan menerapkan program pembelajaran yang berbasis :
    a. Keutamaan pada moralitas, nilai kebangsaan, nilai kebhayangkaraan, strategi dan karakter kepemimpinan, etika publik sebagai anti korupsi
    b. Profesionalisme, berbasis pada ilmu kepolisian
    c. Kapita selekta untuk studi kasus dan bakti masyarakat.
10. Membangun jejaring dan kemitraan serta membranding melalui berbagai aktifitas kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Maka proses belajar mengajar di Lemdiklat Polri, melalui dialog peradaban untuk mentransformasi dalam suatu komunikasi, untuk membangun kemitraan, memahami, membimbing maupun mencerahkan, mencari akar masalah maupun menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Semua itu kembali pada keutamaan polisi dalam pemolisiannya bagi : yang Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban. Polisi dalam pemolisian nya dapat dilihat sebagai : Petugas. Fungsi dan Institusi.

Polisi dalam pemolisian nya dalam ruang dialog peradaban bagi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditunjukan semakin manusiawinya manusia.

Passion Polisi dalam Pemolisian nya dalam pemolisian nya menunjukan :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan
2. Polisi sebagai pembangun peradaban.
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan.
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan.
5. Pemolisian nya menunjukkan tingkat dan kualitas : profesional, cerdas bermoral dan modern yabg dilandasi : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.
6. Pemolisian nya smart policing, harmoni dan terintegrasi nya conventional policing, electronic policing dan forensic policing.

7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum.
8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM.
9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial.
10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Harapannya para alumni Lemdiklat Polri sebagai Polisi masa depan memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Memiliki karakter kepemimpinan transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan.
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme.
3. Memiliki pemahaman keutamaan polisi dalam pemolisian nya.
4. Memiliki wawasan dan pengetahuan serta kampuan menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru.
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emerjensi maupun kontijensi.
6. Memiliki keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu.
7. Memiliki kesiapan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini.
8. Memiliki kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik.
9. Mampu menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern.
10. Mampu membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional.

# SENJATA API DALAM PEMOLISIAN BAGI KEMANUSIAAN KETERATURAN SOSIAL DAN PERADABAN [110]

1. Untuk kemanusiaan dalam rangka melindungi, mengayomi warga masyarakat yang terancam, terganggu produktifitasnya atau keamanan maupun rasa amannya.
2. Mendukung proses upaya paksa dalam penegakan hukum.
3. Melumpuhkan tersangka atau pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan maupun melarikan diri.
4. Kesiapan dan kesiagaan mengatasi fakta brutal maupun kondisi ekstrim yang membahayakan hajat hidup banyak orang.
5. Operasi Kepolisian yang berskala tinggi.
6. Pengawalan VVIP maupun VIP.
7. Mewujudkan dan Menjaga Keteraturan Sosial.
8. Para Anti Korupsi, Anti Narkoba, Anti Terorisme, Anti Premanisme.
9. Mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
10. Perlindungan dan Bela Diri.

110 https://polisiindonesia.id/2024/12/04/cdl-senjata-api-dalam-pemolisian-bagi-kemanusiaan-keteraturan-sosial-dan-peradaban/

# KOMUNIKASI SOSIAL MODEL PEMBELAJARAN DI LEMDIKLAT POLRI [111]

Ada yang berpendapat bahwa pendidikan penting namun praktek atau kerja langsung di lapangan juga penting. Tanpa dasar pengetahuan secara teoritikal maupun konseptual dapat terjadi kesalahan atau stug jalan di tempat atau dikatakan hanya begitu begitu saja.

Namun sebaliknya ada yang mengatakan praktek kerja lapangan lebih penting daripada berteori yang membuat ribet. Toh ijazah sebatas persyaratan administrasi menunjukan pernah sekolah bukan pernah berpikir. Perbedaan pandangan seringkali membingungkan atau curhat tanpa solusi dan bukan untuk mencari benar salah atau menyalahkan yang satu membenarkan yang lain. Melainkan bagaimana melihat pada peradaban yang konteksnya berkaitan dengan perubahan bagi hidup dan kehidupan.

Non scholae set vitae discismus, belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup.

Fokus pendidikan pada hakekatnya bagi keberlangsungan hdup manusia dalam situasi beradab yang hidup tumbuh dan berkembang demi semakin manusiawinya manusia. Yang ditandai meningkatnya kualitas hidup manusia.

Lemdiklat menjadi arena atau ruang di mana mereka belajar agar kelak mampu menghasilkan produksi bagi bertahan hidup tumbuh berkembang. Proses belajar di era digital era AI (artificial intellegent) banyak menyasar bayak lini kehidupan termasuk pendidikan. Pendidikan di era digital belajar bisa di mana saja, sekolah bukan satu

111 https://transindonesia.co/2024/12/06/komunikasi-sosial-model-pembelajaran-di-lemdiklat-polri/ https://posbekasi.com/2024/12/06/komunikasi-sosial-model-pembelajaran-di-lemdiklat-polri/

satunya pemegang kunci kebenaran. Para guru bukan lagi yang paling tahu. Ruang ruang kelas bisa saja justru membelenggu cara berpikir dan membuat captive mind.

Kembali pada konteks AI kaitan dengan bergesernya pendidikan dan proses belajar mengajarnya. Menjawab hal tersebut golongan konservatif tentu akan mempertahankan kekunoannya. Mempertahankan rangking menjadi satu satunya tanda kecerdasan walau sebenarnya juga penuh dengan kepalsuan dan kepura puraan.

Kaum visioner tentu akan merubah dan mau berubah walau tidak mudah. Tatkala pendidikan mempertahankan status quonya yang mapan dan nyaman dikaitkan konteks peradaban maka pendidikan memang justru akan kontra produktif dan para siswa tidak tercerahkan. Hasil didik jauh panggang dari api yang moralitas, mental, dan kecerdasannya tak lagi peka peduli dan tiadanya belarasa bagi memanusiakan manusia.

Kemanusiaan keteraturan sosial dan peradaban bagi meningkatnya kualitas hidup dan harkat dan martabat manusia merupakan keutamaan bagi polisi dalam pemolisiannya. Konteks pendidikan bagi polisi khususnya pada Lemdiklat Polri untuk menyiapkan regenerasi polisi masa depan yang siap menghadapi perubahan dan mau melakukan perubahan.

Basis dari pendidikan Lemdiklat Polri adalah moralitas. AI boleh lebih pandai namun tidak lebih bijaksana.

Kebutuhan adab merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Dalam kehidupan sosial, potensi konflik dan berbagai permasalahan yang kontra produktif sangat kompleks, yang dikategorikan dari manusianya, alamnya dan sistem maupun infrastrukturnya. Mengatasi maslah keteraturan sosial bukan perkara mudah menata manusia ini adu kekuatan dan memerlukan ada figur yang dipercaya atau menjadi ikon bagi hidup dan kehidupannya.

Lemdiklat Polri sebagai lembaga pendidikan bagi para polisi dan calon polisi masa depan yang dapat dipercaya atau mendapatkan

kepercayaan kepada publik, di situlah core dari Lemdiklat Polri.Mau tidak mau Lemdiklat Polri memikirkan bagaimana mentransformasi, mencerahkan dan memanusiakan dalam menyiapkan polisi masa depan yang dipercaya publik.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka proses belajar mengajar di Lemdiklat Polri, variatif antara konseptual teoritikal, studi kasus, pemecahan masalah yang proaktif dalam kondisi kritis atau ekstrim, kreatif dan inovatif mengembangkan pola pola pemolisiannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan terbangunnya peradaban.

Untuk menghasilkan hasil didik yang mendapat kepercayaan publik setidaknya para alumni Lemdiklat Polri mampu menunjukan :

1. Sebagai petugas polisi yang profesional (ahli)
2. Pikiran, perkataan dan perbuatan serta kebijakannya cerdas (kreatif atau inovatif)
3. Moralitasnya dapat ditunjukan dalam upaya membangun : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
4. Visioner dan modern yang ditunjukan mau dan mampu melakukan perubahan yang dinamis
5. Kebijakan yang dilakukan menunjukan sebagai langkah langkah anti korupsi
6. Dalam menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab transparan yaitu terukur dan jelas pentahapannya
7. Pelaksanaan tugasnya akuntabel dapat dipertanggungjawabkan secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial
8. Kebijakannya berbasis data dan informatif yang menuju pada one stop service berbasis pada sistem big data
9. Apa yang menjadi pelayanan publik mudah diakses, kapan saja di mana saja
10. Standar pelayanan publik setidaknya memenuhi unsur: cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

Membangun legitimasi dan kepercayaan publik kepada polisi salah satunya melalui lembaga pendidikan yang mampu mentransformasi, mencerahkan dan memanusiakan antara lain adanya :

1. Political will
2. Komitmen dan integritas para guru dan staf penyelenggara pendidikan
3. Keteladanan
4. Penanaman dan keyakinan core value sebagai pemimpin masa depan yang dipercaya melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga, akademik, studi kasus, bakti masyarakat yang menunjukan sebagai kumpulan orang baik yang bertugas sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.
5. Melakukan perubahan mind set dan culture set Sespim sebagai pendidikan moral yang berbasis pada keutamaan
6. Membuat konsep yang komprehensif bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar agar mampu belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi masa kini, dan meyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Secara konsisten dan konsekuen menerapkan program yang dibuat dengan sistem proaktif dan problem solving yang terpadu dan berkesinambungan.
8. Menerapkan merit sistem yang transparan, dan akuntabel sebagai pemimpin yang transformatif
9. Membangun dan menerapkan program pembelajaran yang berbasis :
    a. Keutamaan pada moralitas, nilai kebangsaan, nilai Kebhayangkaraan, strategi dan karakter kepemimpinan, etika publik sebagai anti korupsi
    b. Profesionalisme, berbasis pada ilmu kepolisian
    c. Kapita selekta untuk studi kasus dan bakti masyarakat

10. Membangun jejaring dan kemitraan serta membranding melalui berbagai aktifitas kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban

Maka proses belajar mengajar di Lemdiklat Polri, melalui dialog peradaban untuk mentransformasi dalam suatu komunikasi, untuk membangun kemitraan, memahami, membimbing maupun mencerahkan, mencari akar masalah maupun menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Semua itu kembali pada keutamaan polisi dalam pemolisiannya bagi : Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban. Polisi dalam pemolisiannya dapat dilihat sebagai :

- Petugas
- Fungsi
- Institusi

Polisi dalam pemolisiannya dalam ruang dialog peradaban bagi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditunjukan semakin manusiawinya manusia. Passion Polisi dalam Pemolisiannya dalam pemolisiannya menunjukan :

1. Polisi sebagai penjaga kehidupan
2. Polisi sebagai pembangun peradaban
3. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan
4. Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan
5. Pemolisiannya menunjukkan tingkat dan kualitas : profesional, cerdas bermoral dan modern yabg dilandasi : kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
6. Pemolisiannya smart policing, harmoni dan terintegrasinya conventional policing, electronic policing dan forensic policing
7. Pemolisiannya berbasis pada supremasi hukum
8. Pemolisiannya mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM
9. Pemolisiannya transparan dan akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial

10. Pemolisiannya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Harapannya para alumni Lemdiklat Polri sebagai Polisi masa depan memiliki keunggulan sbb:

1. Memiliki karakter kepemimpinan transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Memiliki wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme
3. Memiliki pemahaman keutamaan polisi dalam pemolisiannya
4. Memiliki wawasan dan pengetahuan serta kamampuan menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru
5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emerjensi maupun kontijensi
6. Memiliki keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu
7. Memiliki kesiapan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini
8. Memiliki kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik
9. Mampu menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern
10. Mampu membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional.

# BHABINKAMTIBMAS TALK [112]

"Bhabinkamtibmas" menjadi ikon Polmas ( community policing ). Kepolisian Jepang menerapkan model " Koban dan Chuzaicho" dalam menerapkan community policing.

Community policing merupakan model pemolisian yang contemporer.

Secara filosofis " Community Policing" dapat dikategorikan sbb :

1. Polisi keberadaanya diterima dan didukung oleh warga yang dilayani dan menjadi bagian dari kehidupan mereka
2. Polisi memahami kebutuhan akan keamanan dan rasa aman dari warga yang dilayaninya
3. Polisi menyadari bahwa keberadaannya adalah sejajar dengan warga yang dilayani. Sehingga terbangun kemitraan yang dibentuk melalui wadah yang berupa forum, asosiasi atau dewan. Yang anggotanya representasi dari warga komuniti tsb.
4. Dialog antara polisi dengan warga komuniti dapat saling memahami dan keberadaan polisi dipercaya untuk menjembatani, mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
5. Polisi menjadi ikon kedekatan, kecepatan dan persahabatan
6. Keberadaan polisi dapan meminimalisir atau mengurangi ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas
7. Polisi lebih mengedepankan pencegahan
8. Keberhasilan polisi bukan sebatas pengungkapan kasus atau perkara namun juga adanya harmoni dan keteraturan sosial

112 https://transindonesia.co/2024/12/07/bhabinkamtibmas-talk/

9. Polisi mengimplementasikan pemolisiannya berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah
10. Polisi sebagai penolong melayani masyarakat dengan tulus dan bereaksi dengan cepat

Bhabinkamtimas merupakan petugas polisi yang terdepan dan terdekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wilayah tugas Bhabinkamtibmas memang tidak luas ini menunjukan tingkat kelurahan atau sebatas RW/ RT/ komuniti. Pada kawasan itulah diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat berkomunikasi dari hati ke hati, saling mengenal satu sama lainnya.

Keberadaan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat diterima oleh warga komuniti yang dilayaninya. Di samping itu juga diakui keberadaannya dan menjadi bagian dari warga komuniti tersebut.

Bhabinkamtibmas memiliki tugas berat sehingga kepercayaan warga masyarakat menjadi kekuatannya.

Polmas merupakan implementasi community policing dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Prinsip mendasar Bhabinkamtibmas antara lain:

1. Membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat
2. Berupaya bekerja secara proaktif dan problem solving
3. Mengutamakan tindakan pencegahan
4. Keberadaannya mampu mengurangi rasa ketakutan warga masyarkat akan adanya gangguan kriminalitas maupun gangguan kamtibmas lainnya.
5. Mampu menjembatani dalam berbagai penanganan masalah kamtibmas
6. Mengedepankan patroli, sambang atau kunjungan ke warga masyarakat yang dilayaninya
7. Melakukan pemetaan wilayah, pemetaan masalah dan pemetaan potensi

8. Melakukan inputing data dan informasi yang berkaitan dengan kamtibmas
9. Melakukan dialog dengan warga secara langsung maupun dengan media.
10. Siap membantu masyarakat dalam menghadapi masalah ataupun masalah yamg bersifat emerjensi

Para petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya sebagai penolong, yang bekerja dengan tulus, bereaksi dengan cepat, berupaya dekat dan bersahabat terhadap warga yang dilayaninya. Ketulusan hati menjadi dasar moralitasnya.

Kedekatannya ditunjukan dari jarak komunikasi yang mudah sehingga cepat merespon laporan maupun aduan dari warga masyarakat.

Petugas Bhabinkamtibmas menjadi sahabat warga komuniti yang dilayaninya. Dialog menjadi keutamaan para petugas Bhabinkamtibmas dalam membangun dan memelihara keteraturan sosial.

Bhabinkamtibmas sebagai ikon Polmas setidaknya mencakup:

1. Kekuatan dan fungsinya dapat menjadi simbol keamanan dan rasa aman warga masyarakat yang dilayaninya
2. Menjadi terdepepan sebagai pilar, citra dan kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas
3. Keberadaannya aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat
4. Menjadi simbol kedekatan, kecepatan dan persahabatan dengan warga masyarakat yang dilayaninya
5. Sistem Electronic Policing, menjadi Penguatan Kinerja Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat
6. Mengedepankan dialog, kemitraan secara proaktif dan pemecahan masalah

7. Membangun kemitraan, mencari akar Masalah Kamtibmas dan Menemukan Solusi yang diterima serta di dukung semua pihak.
8. Lini terdepan dalam membangun dan memelihara keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya
9. Pejuang Kemanusiaan bagi semakin manusiawinya manusia
10. Memegang teguh Keutamaannya pada Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

Keamanan dan rasa aman merupakan kebutuhan bagi hidup dan kehidupan suatu masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang. Upaya mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial ( keamanan dan ketertiban dalam masyarakat/ Kamtibmas ) melalui strategi Polmas / Community Policing. Dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai petugas pelayanan masyarakat yang terdepan.

Dalam implementasi tugas Bhabinkamtibmas diperlukan adanya ” Strategi Penguatan Bhabinkamtibmas yang setidaknya mencakup:

1. Kebijakan (political will yang kuat) yang mendukung penuh bagi berhasilnya tugas Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas di wilayah tugasnya.
2. Kepemimpinan Yang Transformatif, yaitu pemimpin yang peduli dengan kebijakannya mendukung para Bhabinkamtibmas mampu berfungsi sebagaimana yang semestinya
3. Tim Transformasi sebagai sistem back up secara :
    a. Akademik
    b. Manajerial
    c. Operasional
    d. Teknologi
    e. Sarana Kontak dsb
4. Dukungan infrastruktur dan sistem sistem online yang berbasis elektronik, sehingga para Bhabinkamtibmas menjadi bagian

dari sistem operasional pada tingkat KOD (kesatuan operasional dasar/ polres)

5. Adanya Call and Comand Centre sebagai Operation Room Pusat K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando Pengendalian dan Informasi)
6. Model model implementasi Bhabinkamtibmas, sesuai Corak Masyarakat dan Kebudayaannya. Dan diajarkan serta dilatihkan kpd para Bhabinkamtibmas
7. Memiliku Program Program Unggulan, antara lain :
    a. Festival/ Forum Bhabinkamtibmas
    b. Art Policing (pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata)
    c. Bhabinkamtibmas award dsb
8. Manajemen Media, yang mendukung sistem informasi dan komunikasi untuk menampung hasil kegiatan para Bhabin dan juga sebagai ajang Inovasi dan Kreatifitas.
9. Pilot Project, menjadi proyek percontohan yang dapat ditumbuhkembangkan secara lebih luas lagi.
10. Monitoring Evaluasi dan membuat pola pola Pengembangannya

Tugas Bhabinkamtibmas kompleks dan menjadi ajang pertaruhan citra Polri. Maka diperlukan adanya " Sistem Peningkatan Kompetensi dan Penguatan Bhabinkamtibmas" yang setidaknya mencakup :

1. Menyiapkan :Master Trainer dan Trainer
2. Sistem Pendidikan dan Latihan secara reguler dan berkesinambungan
3. Sistem coaching secara Virtual agar dapat menjangkau lebih luas
4. Pemerintah, Akademisi, sektor bisnis, para tokoh dalam masyarakat dsb

5. Didukung Big Data System
6. Back Up dari Fungsi Utama, Fungsi Pendukung maupun yang fungsional.
7. SOP yang berisi :
    a. Job description dan Job Analysis
    b. Standarisasi Keberhasilan Pelaksanaan Tugas
    c. Sistem Penilaian Kinerja
    d. Sistem Reward and Punishment
    e. Etika Kerja
8. Membranding Para Petugas Bhabinkamtibmas dalam Program Local Heroes
9. Mengembangkan Implementasi Bhabinkamtibmas dalam corak masyarakat dan kebudayaannya dengan mengkaitkan Kearifan Lokal
10. Memberikan sarana Kontak dalam Kegiatan Patroli dan Sambang Masyarakat

Keutamaan Bhabinkamtibmas pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, sehingga Bhabinkamtibmas dapat dikatakan sebagai Ikon Polmas.

Bhabinkamtibmas sebagai petugas polisi yang terdepan dan terdekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya sistem penguat dan back up system. Walaupun wilayah tugas Bhabinkamtibmas tidak luas, namun menunjukan tingkat kompleksitas yang tinggi. Pada kawasan yang tidak terlalu luas itulah, diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat berkomunikasi dari hati ke hati, saling mengenal satu sama lainnya.

Keberadaan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat diterima oleh warga komuniti yang dilayaninya. Di samping itu juga diakui keberadaannya dan menjadi bagian dari warga komuniti tersebut. Para Bhabinkamtibmas memiliki tugas berat sehingga kepercayaan warga masyarakat menjadi kekuatannya.

Para petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya dengan jiwa penolong, yang cepat, dekat dan bersahabat. Bereaksi dengan tulus dan bertindak dengan cepat. Dekat menunjukan jarak yang hanya tiga digit antara polisi dengan masyarakat, misalnya call centre 110.

Petugas Bhabinkamtibmas menjadi sahabat warga komuniti yang dilayaninya. Dialog menjadi bagian dasar para petugas Bhabinkamtibmas.

Dalam membangun Bhabinkamtibmas sebagai ikon Polmas, Lemdiklat Polri berupaya mendukung melalui: "Bhabinkamtibmas Talk" yang dilakukan melalui dialog virtual maupun aktual dengan harapan para peserta didik diajarkan dan dilatih peka dan peduli kepada petugas Bhabinkamtibmas sehingga kekuatan dan fungsinya dapat menjadi simbol keamanan dan rasa aman warga masyarakat yang dilayaninya. Menjadi terdepan sebagai pilar, citra dan kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas.

Keberadaannya aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi simbol kedekatan, kecepatan dan persahabatan dengan warga masyarakat yang dilayaninya mampu mengembangkan sistem Electronic Policing, sebagai back up system atau penguatan kinerja Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat.

Mampu berdialog untuk membangun dan memelihara kemitraan secara proaktif dan memecahkan masalah yang terjadi dalam kawasan kerjanya.

Mampu mencari akar masalah kamtibmas dan menemukan solusi yang diterima serta di dukung semua pihak. Bhabinkamtibmas mampu menjadi pionir di lini terdepan dalam membangun dan memelihara keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya. Mampu menunjukan sebagai pejuang kemanusiaan bagi semakin manusiawinya manusia.

Dengan dukungan moril dan spiritual dari para peserta didik Sespim, diharapkan para Bhabinkamtibmas mampu memegang teguh keutamaannya pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Bhabinkamtibmas Talk merupakan pembelajaran melalui dialog peradaban. Para peserta didik Lemdiklat Polri khususnya Sespim maupun STIK dan SIP sebagai calon pemimpin di masa depan diharapkan kelak senantiasa peka dan peduli terhadap Bhabinkamtibmas, mentransformasikan pengalamannya untuk berdiskusi, membimbing maupun mencerahkan.

# ALUMNI LEMDIKLAT ADALAH PETUGAS POLISI BAJIK YANG BIJAK [113]

Polisi sebagai Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban, Pejuang Kemanusiaan sebagai orang yang dipercaya dan diberi amanah serta kepercayaan memegang kewenangan, kekuasaan, mewujudkan keamanan dan rasa aman untuk melindungi dan mendukung produktifitas masyarakat.

Dengan demikian polisi dalam pemolisian nya sebagai co producer dan tidak melakukan tindakan kontra produktif.

Tindakan para petugas polisi dalam pemolisian nya merefleksikan dan berefek adanya :

1. Kebaikan dan perbaikan
2. Harmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
3. Memberdayakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien
4. Menyelesaikan masalah
5. Mendukung produktifitas dan mencegah hal hal yang kontra produktif
6. Mendukung perubahan dan kebaruan untuk kebaikan dan perbaikan
7. Menginspirasi
8. Memotivasi
9. Mentransformasi

113 http://www.polisi.my.id/2024/12/alumni-lemdiklat-adalah-petugas-polisi.html
https://polisiindonesia.id/2024/12/08/alumni-lemdiklat-adalah-petugas-polisi-bajik-yang-bijak/

10. Memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman warga masyarakat yang dilayaninya.

Petugas polisi yang bajik mendatangkan kebaikan, berbudi luhur, membawa manfaat setidaknya 10 point di atas.

Polisi yang bajik berefek pada aura atau suasana yang mendatangkan energi positif. Polisi yang bajik akan menjadi sumber enerji yang menguatkan dan berefek luas bagi hidup dan kehidupan.

Petugas polisi yang bajik dapat dipahami sebagai sang pencerah yang transformasional, yang mampu belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap dimasa kini dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Petugas polisi yang bajik, pikiran perkataan dan perbuatannya bijaksana.

Kebijakannya berdampak luas bagi hajat hidup banyak orang, untuk mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan demikian petugas

Polisi dapat dipercaya, dihormati dan dibanggakan, karena berbasis : moralitas, pengendalian diri, untuk menjadi petugas yang pantas dan benar layak dan menyelamatkan.

Petugas polisi yang bajik dalam pemolisian nya akan banyak menghadapi tantangan bahkan kesulitan yang dapat dianalogikan bagai putri duyung yang mendamba ekornya menjadi kaki manusia.

Putri duyung sebagai mahkluk setengah manusia setengah binatang. Berkepala manusia dan berekor ikan.

Putri duyung yang mendambakan ekornya menjadi kaki manusia. Bagian manusia dan bagian binatang menyatu.

Manusia mengikuti binatang dapat dikatakan gila. Binatang mengikuti manusia tidak mungkin.

Kalau dipotong atau dipisahkan akan mati. Di sinilah kebajikan ditunjukan. Bagian mana yang memiliki otak dan hati nurani. Ya tentu, bagian manusia.

Di situlah bagian manusia mampu bijaksana untuk memahami dan memikirkan bagaimana bagian ekor dapat berevolusi menjadi kaki manusia.

Analogi diatas dapat ditunjukkan bahwa menjadi seorang petugas polisi yang bajik dan bijaksana sangat berat.

Namun tatkala memiliki passion yang kuat maka dimulai dari pikiran, perkataan dan perbuatannya untuk bertahan dalam kepantasan dan kebenaran, kelayakan dan penyelamatan sehingga mampu memahami, bukan selalu minta dipahami. Mampu memberikan solusi.

Dalam bahasa Jawa polisi yang bajik berjiwa pemimpin itu :

" Nyontoni ( memberi teladan ), ngancani ( menemani ), ngajari (memberikan pembelajaran dan pencerahan), mbelani ( memberikan pembelaan, perlindungan dan pengayoman ), mbayari (rela berkorban).

Untuk memelihara ikan, yang dirawat air dahulu atau ikan nya dahulu? Tentu saja yang terlebih dahulu adalah airnya. Agar ikan yang akan dipelihara dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang.

Dalam proses pembelajaran bagi calon pemimpin polisi dan calon polisi di masa depan sebagai polisi yang bajik dan bijaksana keutamaannya dapat diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Semua itu dimulai dari kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan membawa kepada hati nurani yang baik.

Keutamaan bagi petugas polisi yang bajik dan bijak setidaknya mencakup :

1. Moralitas yang dapat dijabarkan dalam konteks : kejujuran, kebenaran dan keadilan.
2. Pengendalian diri yang dapat ditunjukan dalam: kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.
3. Peka dan peduli serta ber bela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

4. Profesional, cerdas, bermoral dan modern.
5. Mampu menjadi ikon, pemimpin bukan sebatas apa dan bagaimana dan mengapa melainkan menjadi siapa.

# PENDIDIKAN VIRTUAL BAGI PENDIDIKAN PEMBENTUKAN KEPOLISIAN [114]

Tulisan ini berupaya menunjukkan model pendidikan pembentukan kepolisian secara virtual. Di era revolusi industri 4.0 berdampak disrupsi begitu cepat yang bisa dikatakan era vuca(volatility, unpredictable, complexity. Ambiguity).

Hal tersebut berdampak pula pada pendidikan kepolisian yang mau tidak mau harus melakukan perubahan model dan metode pendidikan yan juga dikembangkan secara proaktif melalui virtual. Pendidikan bagi kepolisian merupakan pendidikan yang berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk membentuk karakter kepolisian sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan sekaligus pejuang kemanusiaan.

Pendidikan pembentukan kepolisian merupakan pendidikan dasar yang menyiapkan calon petugas polisi dalam berbagai tingkatan (tingkatan bhayangkara, tingkatan brigadir, tingkatan inspektur) untuk mampu menjadi petugas polisi yang : profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Pada pendidikan dasar seperti apa yang disebutkan di atas dipersiapkan melalui kurikulum pendidikan yang setidaknya mencakup

A. Konsep teori,

B. Studi kasus dan problem solving,

C. Issue issue penting yg terjadi dalam masyarakat

114 https://anakmedanbung.com/2024/12/13/pendidikan-virtual-bagi-pendidikan-pembentukan-kepolisian/
https://posbekasi.com/2024/12/13/pendidikan-virtual-bagi-pendidikan-pembentukan-kepolisian/

D. Praktek lapangan

E. Pembinaan mental spiritual, olah raga, seni budaya,

F. Pengabdian masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Penjabaran point A sd F sebagai berikut :

A. Pendidikan dasar secara konseptual atau teoritikal yang berlandaskan pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian merupakan hakekat dari pemolisian yang penyelenggaraan merupakan ilmu antar bidang yang mempelajari tentang:

   1. Masalah sosial yang terkait dengan keteraturan sosial
   2. Hukum, penegakkan hukum dan keadilan
   3. Kejahatan dan penanganannya
   4. ssue issue penting yang terjadi dalam masyarakat
   5. Teknis dan teknik penyelidikan dan penyidikan
   6. Teknis dasar tugas kepolisian umum
   7. Etika publik sebagai pengajaran anti korupsi
   8. Pembelajaraan ttg administrasi kepolisian
   9. Pembelajaran ttg operasional kepolisian yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi.

B. Studi kasus dan problem solving,

   Point A 1 s/d 9 dijabarkan dalam model studi kasus dan dikaitkan dengan pola pemolisiannya dan teknis kepolisian secara preemtif, preventif, represif hingga rehabilitasinya.

C. Issue issue penting yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan permasalahan permasalahan aktual yang sedang menjadi perhatian publik, perhatian pimpinan maupun pemberitaan utama dari media main stream maupun media on line, media sosial yang mencakup pada :

   1. Idiologi
   2. Politik

3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Keamanan
6. Pertahanan
7. Hukum
8. Teknologi informasi

Hal inipun dibahas secara manajerial dan operasionalnya. Juga dikaitkan dalam sistem pelayanan publik secara virtual ( pelayanan di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan).

D. Praktek lapangan

Praktek lapangan dibuat model modelnya dapat dijadikan model pada simulator atau aplikasi lainnya seperti:

1. Penerimaan laporan
2. Inputing data dan sistem komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi pada back office atau operation room
3. Penanganan TKP ( tempat kejadian perkara), sket TKP, Berita acara TKP, rekonstruksi baik pra saat maupun pasca.
4. Teknis penyelidikan perkara pidana
5. Teknis penyidikan perkara pidana
6. Teknit sistem penjagaan pengaturan pengawalan dan patroli
7. Komunikasi sosial
8. Teknis penindakkan pelanggaran
9. Teknis penanganan kecelakaan lalu lintas
10. Teknis penanganan gangguan keteraturan sosial
11. Teknis pengamanan kegiatan kemasyarakatan
12. Teknis pengamanan kegiatan protokoler , kegiatan politik

13. Teknis pengendalian massa
14. Bela diri ( bela diri kepolisian, judo, kendo, karate, taekwondo dll)
15. Peraturan baris berbaris (PBB)
16. Kebersihan dan kepedulian lingkungan dan sebagainya dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan

E. Pembinaan mental spiritual, olah raga, seni budaya
   1. Pembinaan mental spiritual
      a. Kegiatan keagamaan
      b. Meditasi dan olah batin
      c. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan
   2. Pembinaan olah raga
      a. Perorangan
      b. Team
      c. Kompetisi
   3. Pembeniaan seni budaya
      a. Seni musik
      b. Seni tari
      c. Seni drama, panggung dan pertunjukan
      d. Seni sastra, dsb

F. Pengabdian masyarakat dan sosial
   1. Bakti sosial pada tempat tempat publik
   2. Latihan integrasi dengan mahasiswa atau lembaga pendidikan lainnya
   3. Pengkajian maupun penelitian
   4. Kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk :

a. Membangun kemitraan dan jejaring

b. Penanganan lokasi yang menjadi police hazard

c. Live in

Apa yang sudah dijabarkan di atas tatkala pandemi covid mau tidak mau dilakukan secara virtual dengan menyiapkan :

1. Petugas IT
2. Petugas administrasi
3. Petugas pengajar ( dosen, insttuktur/ pelatih)
4. Modul pembelajaran secara virtual maupun secara hard copy produk cetak
5. Pola belajar kesadaran mandiri
6. Tim transformasi atau tim back up atau tim manajemen untuk monitoring dan evaluasi
7. Simulator atau model aplikasi sesuai dengan bahan pengajaran
8. Sistem penugasan perorangan dan kelompok
9. Diskusi kelompok
10. Belajar mandiri
11. Sistem pelaporan perorangan melalui blog atau melalui aplikasi
12. Standar pembinaan fisik
13. Standar kesehatan
14. Sistem ujian : akademik, fisik, mental spiritual dan pembinaan serta penilaiannya
15. Membuat hand book atau sbg buku induk (vademikum)
16. Membuat standar yang relevan dan mendasar bagi pengajaran dan pembelajaran
17. Membuat kompetisi dan festival secara virtual, dsb.

Pendidikan virtual memerlukan sistem pengawasan dan penilaian atas produk kinerja dan produk hasil belajar yang lebih ketat secara rutin : harian, mingguan bulanan dan sistem evaluasi per triwulan yang dapat dijadikan bagian dari literasi.

Dalam pendidikan yang berbasis moralitas maka : kejujuran, kebenaran, keadilan, kesadaran, tanggung jawab dan disiplin menjadi etika bagi pengajar dan siswa sehingga jelas code of conduct yang berisi:

1. Apa yang harus dilakukan
2. Apa yang tidak boleh dilakukan
3. Sanksi bila melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

# 10 POINT KAMPUS MODERN LEMDIKLAT POLRI BERBASIS SMART [115]

Kampus Modern Lemdiklat Polri yang didukung teknologi Berbasis Smart Kampus sebagai centre of excellent menunjukan :

1. Kampus yang fungsional untuk belajar mengajar yang aman, nyaman bagi dosen dan peserta didik.
2. Menjadi ruang pembelajaran melalui dialog peradaban.
3. Mampu menstimuli bangkitnya inspirasi untuk lahirnya Polisi dan calon polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern.
4. Mampu mendukung sistem informasi, komunikasi, dokumentasi digital maupun yang eksisting, mendorong pada proses pembelajaran yang prima.
5. Mampu membangun dan mengembangkan sistem jejaring yang terkoneksi dengan berbagai literasi digital maupun manual.
6. Mampu mengajarkan membangun dan mengembangkan model pembelajaran untuk : teoritikal, konseptual, studi kasus yang proaktif dan problem solving.
7. Pola pola pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang berbasis pada keutamaan : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
8. Pengajar dan peserta didik saling menstimuli untuk mampu menghadapi situasi krisis, fakta brutal, emerjensi maupun kontijensi.

115 https://polisiindonesia.id/2024/12/16/komjen-pol-chryshnanda-dwilaksana-10-point-kampus-modern-lemdiklat-polri-berbasis-smart/

9. Mampu menunjukan akuntabilitas pembelajaran secara:
    a. Moral
    b. Hukum
    c. Administrasi
    d. Fungsional
    e. Sosial
10. Proses belajar mengajar menghasilkan produk literasi antara lain :
    a. Bunga rampai
    b. Jurnal
    c. Buku buku yang relevan dengan kurikulum dan tujuan pendidikan.

# 10 POINT KAMPUS INTEGRITAS, UNGGUL, HIJAU BAHAGIA SEHAT JIWA RAGA DAN MODERN BERBASIS SMART CAMPUS LEMDIKLAT POLRI [116]

**10 Point Kampus Integritas Lemdiklat Polri**

Kampus Integritas Mendidik, Melatih agar para Peserta Didik:

1. Mampu mendukung terwujudnya Supremasi Hukum
2. Mampu memberikan jaminan dan perlindungan Ham
3. Mampu menunjukan Transparansi dalam Pemolisiannya
4. Mampu menunjukan Akuntabilitas dalam pemolisiannya secara: moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya
6. Memberikan pelayanan prima kepada publik di bidang: keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan
7. Mampu menunjukan adanya pembatasan dan pengawasan publik.
8. Membangun infrastruktur dan sistem sistem yang modern saling terhubung ( on line ) dan berbasis elektronik

116 https://posbekasi.com/2024/12/16/10-point-kampus-integritas-unggul-hijau-bahagia-sehat-jiwa-raga-dan-modern-berbasis-smart-campus-lemdiklat-polri/
https://transindonesia.co/2024/12/16/10-point-kampus-integritas-unggul-hijau-bahagia-sehat-jiwa-raga-dan-modern-berbasis-smart-campus-lemdiklat-polri/

9. Mampu membangun dan menerapkan stem big data dan one stop service.
10. Mampu membangun strategi kolaborasi multi stakeholder antara pemerintah, sektor bisnis, pakar dan akademisi dan helix lainnya.

**10 Point Kampus Unggul Lemdiklat Polri**

Keunggulan Lemdiklat Polri, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pembelajaran membangun karakter transformasional, yang dibangun berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam kejujuran, kebenaran dan keadilan
2. Pembelajaran wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme
3. Pembelajaran implementasi keutamaan polisi dalam pemolisiannya yang berbasis literasi
4. Pembelajaran menghadapi era global, era digital maupun era kenormalan baru
5. Pembelajaran manajerial maupun operasional dalam menghadapi situasi krisis/ fakta brutal / situasi emerjensi maupun kontijensi
6. Pembelajaran keberanian untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu
7. Pembelajaran kesiapan menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, harapan dan kebutuhan di masa kini
8. Pembelajaran kemampuan untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik
9. Pembelajaran menjadi ikon petugas yang profesional, cerdas bermoral dan modern
10. Pembelajaran membangun kepercayaan publik, dalam mendukung keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional.

**10 Point Kampus Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga Lemdiklat Polri**

Kampus Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga Lemdiklat Polri dibangun dari:

1. Lingkungan hidupnya yang asri, bersih, berbunga, menjadi ikon keindahan, kenyamanan, keamanan dan selalu ngangeni sebagai wisata edukasi
2. Literasi yang memadai secara aktual maupun virtual
3. Manajemen Media Berbasis Literasi yang menjadi wadah bagi produk produknya: cetak, elektronik, online dan sosial
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan menerapkan dialog peradaban
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah yang mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi
6. Membangun sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern secara formal maupun non formal
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban dalam bhakti sosial, bhakti masyarkat, dsb
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaan-nya dalam art policing (pendekatan seni budaya dan pariwisata)
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

**10 Point Kampus Modern Berbasis Smart Campus Lemdiklat Polri**

Kampus Modern Lemdiklat Polri yang didukung teknologi Berbasis Smart Campus sebagai center of excellent menunjukan:

1. Kampus yang fungsional untuk belajar mengajar yang aman, nyaman bagi dosen dan peserta didik
2. Menjadi ruang pembelajaran melalui dialog peradaban

3. Mampu menstimuli bangkitnya inspirasi untuk lahirnya Polisi dan calon polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern
4. Mampu mendukung sistem informasi, komunikasi, dokumentasi digital maupun yang eksisting, mendorong pada proses pembelajaran yang prima
5. Mampu membangun dan mengembangkan sistem jejaring yang terkoneksi dengan berbagai literasi digital maupun manual
6. Mampu mengajarkan membangun dan mengembangkan model pembelajaran untuk: teoritikal, konseptual, studi kasus yang proaktif dan problem solving7.Pola pola pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang berbasis pada keutamaan: kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban
8. Pengajar dan peserta didik saling menstimuli untuk mampu menghadapi situasi krisis, fakta brutal, emerjensi maupun kontijensi
9. Mampu menunjukan akuntabilitas pembelajaran secara: a. Moralb. Hukumc. Administrasid. Fungsionale. Sosial
10. Proses belajar mengajar menghasilkan produk literasi antara lain: a. Bunga rampaib. Jurnalc. Buku buku yang relevan dengan kurikulum dan tujuan pendidikan.

# 10 POINT KAMPUS HIJAU BAHAGIA SEHAT JIWA RAGA LEMDIKLAT POLRI [117]

Kampus Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga Lemdiklat Polri dibangun dari :

1. Lingkungan hidupnya yang asri, bersih, berbunga, menjadi ikon keindahan, kenyamananan, keamanan dan selalu ngangeni sebagai wisata edukasi
2. Literasi yang memadai secara aktual maupun virtual
3. Manajemen Mediaì berbasis literasi yang menjadi wadah bagi produk produknya : cetak, elektonik, online dan sosial
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan menerapkan dialog peradaban
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah yang mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi
6. Membangun sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern secara formal maupun non formal
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban dalam bhakti sosial, bahkti masyarkat dsb
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang

117 https://benuanews.com/10-point-kampus-hijau-bahagia-sehat-jiwa-raga-lemdiklat-polri/

9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaanya dalam art policing (pendekatan seni budaya dan pariwisata)
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

# GERAKAN MORAL DAN GERAKAN SOSIAL DARI RUMAH UNTUK KETAHANAN PANGAN [118]

Manusia sebagai mahkluk sosial membutuhkan kawanan atau kelompok yang dapat menerima, melindungi, membelanya atau sebagai tempat untuk hidup. Dalam kehidupan sosial ada keteraturan sosial yang dibangun melalui kesepakatan kesepakatan.

Di balik kesepakatan tersebut ada kewajiban, tanggungjawab, ada sanksi bila melanggar.

Dalam kehidupan sosial tatanan bagi keteraturan sosial ada rekayasa sosial yang merefleksikan karakter mereka.

Semakin kompleks maka akan semakin ketat kesepakatan kesepakatan yang dibuat dan menjadi hukum.

Hukum dapat dikatakan sebagai produk politik untuk mewujudkan, merawat keteraturan sosial sehingga dapat mendukung untuk tercapainya tujuan bersamanya.

Di dalam hukum ada sistem penegakannya, akuntabilitasnya. Di situlah hukum menjadi refleksi atas suatu peradaban.

Tingkat kepatuhan hukum bagi masyarakatnya menjadi bagian dari budaya bangsa. Kualitas penegak hukum dalam menegakan hukum menjadi refleksi hidupnya hukum dan menjadi kekuatan pilar kedaulatan suatu negara.

118 https://transindonesia.co/2024/12/21/gerakan-moral-dan-gerakan-sosial-dari-rumah-untuk-ketahanan-pangan/

Di setiap kawanan, kelompok, komunitas, masyarakat, bangsa maupun negara ada pemimpinnya. Atau setidaknya orang yang dituakan untuk memimpin. Pemimpin apakah orang yang diberi amanah atau kepercayaan? Jawabnya iya karena pemimpin itu mendapat amanah dan dipercaya untuk : melindungi, mengayomi, melayani, memajukan bahkan mensejahterakan. Secara mendasar dan mendalam acuan dasar pemimpin itu pada moralitas. Kebijakan yang diambil bijaksana bagi kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Ketahanan pangan merupakan salah satu dasar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan pangan menjadi bagian wujud kepedulian dan bela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.

Lemdiklat Polri dalam mendukung ketahanan pangan melalui Program "Kampus Hijau, Bahagia Sehat Jiwa Raga" dengan gerakan moral dan gerakan sosial di mulai dari rumah kita masing masing.

Gerakan moral dan gerakan sosial dalam ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan kehidupan sehari hari yang peduli akan pangan. Kesadaran pangan dalam keluarga ditunjukan dari:

1. Tidak memboroskan hal makanan
2. Tidak membuang makanan
3. Tidak makan berlebihan
4. Peduli dalam menanam tanaman pangan di halaman atau area rumah
5. Memberdayakan lahan yang ada untuk menanam, ternak, memelihara ikan, dsb.

Rumah selain tempat berteduh berlindung juga tempat segala sesuatu dapat dimulai. Proses penyadaran pembangunan keteraturan sosial hingga peradaban semua bisa dimulai dari rumah.

Saat bersosialisasi pun secara virtual maupun aktual akan dapat dilakukan dari rumah. Rumah menjadi kekuatan dasar atau basis berbagai kekuatan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Penanaman nilai nilai kepekaan kepedulian hingga bela rasa bagi yang menderita bagi yang termarjinalkan pun dari rumah. Rumah yang yang nyaman asri aman, nyaman dan ngangeni.

Standarnya bukan pada kemewahan melainkan pada suatu rasa kemanusiaan ada aura pencerahan yang dapat dirasakan. Aura ini adalah sesuatu yang tak benda atau intangible.

Dahulu ada gerakan rumah pintar mobil pintar yang digagas Ibu Ani Yudhoyono diimplementasikan melalui perpustakaan dan kegiatan literasi.

Ini ide yang cerdas sayang rohnya hilang. Tatkala politik lebih dominan maka apapun sarat dengan seremonial dan kepura puraan. Roh jiwa, taksu, chi maupun passion tidak muncul. Komitmen dan konsistensi tergantung perintah atau pamrih dan tidak akan berani nggetih. Dampak luas bagi hidup dan kehidupan seumur jagung.

Melalui gerakkan moral dan sosial yang dibangun bottom up ini akan menjadi fondasi bagi hidup tumbuh dan berkembangnya kesadaran.

Gerakan moral dan gerakan sosial dari rumah tidak harus sama karena konteksnya adalah untuk menanamkan nilai nilai akan kemanusiaan dari rumah.

Keberagaman yang ada dari rumah masing masing akan saling menginspirasi, menjaga keteraturan sosial dari berbagi sisi atau berbagai model kegiatan. Misalnya kegiatan peduli lingkungan melalui gerakan "bersih, peduli lingkungan, peduli air, menanam pohon, berbagai kegiatan budi daya, dimulai dari rumah".

Berbagai kegiatan di atas di kategorikan dari variabel pangan yang ada dlm kegiatan sehari hari dari rumah hingga membuang sampah dimulai dari rumah. Menata rumah menjadi home sweet home.

Menggelorakan rumahku basis enerji pangan. Niat baik dan benar tatkala dapat tertanam dari rumah maka dalam hubungan sosial kemasyarakatan akan semakin mudah ditumbuh kembangkan.

Apa saja kapan saja dimana saja dengan cara apa saja dan siapa saja bisa.

1. Apa saja

   Memulai apa saja dari rumah bisa.

2. Kapan saja

   Kapan saja waktunya bisa kita lakukan

3. Di mana saja

   Rumah kita di mana saja bisa memancarkan aura dan nilai nilai budi luhur untuk peka peduli dan bela rasa kpd manusia maupun lingkungannya

4. Dengan cara apa saja

   Dari cara manual hingga virtual bisa dilakukan

5. Siapa saja bisa.

   Apa saja kapan saja di mana saja dengan cara apa saja dan siapa saja bisa dimulai dari rumah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sentuhan dari rumah menjadi sangat penting bagi munculnya keteraturan sosial bagi kekuatan untuk membangun solidaritas sosial dslam menjaga daya tahan daya tangkal hingga daya saing.

Tatkala dari rumah rumah ini terbangun karakternya dapat di tingkatkan dalam berbagai community of interest.

Contoh, kampung code yang di rintis dan bangun romo mangun wijaya bersama para warga. Kampung tertib yang di bangun stakeholder bidang lalu lintas.

Rumah pintar yang menjadi ikon literasi. Rumahku musiumku sebagai wujud kecintaan membangun rumah sebagai tempat apresiasi bagi seni budaya.

Kampung seniman kampung warna warni, kampung tangguh dan banyak lagi yang telah ada dan dimulai oleh masyarakat. Ini yang perlu dikemas dimaknai dan dimarketingkan.

Dari rumah pun dapat membangun masyarakat sadar wisata. Karena sadar wisata menjadi kekuatan untuk cinta tanah air lingkungan kampung hingga rumah kita masing masing.

Sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal yang utama dan pertama dan tanggung jawab kita bersama.

**Tiada hari tanpa kebaikan dan perbaikan.**

Pembangunan nilai nilai moral dengan kesadaran tanggung jawab dan disiplin.

Rumahku istanaku hidup tumbuh dan berkembang hingga kembali kepada sang khalik menjadi kebanggaan dan kecintaan akan hidup dan kehidupan.

Hidup adalah harapan tantangan perjuangan proses panjang pembelajaran dan nyali berbuat baik untuk kebaikan dan kebenaran agar semakin manusiawinya manusia.

Membangun ketahanan pangan tidak sebatas benda/tangible melainkan juga hal yang tak benda atau intangible. Yang intangible inilah sejatinya esensi yang mendasar dan menjadi pilar bagi ketahanan pangan untuk selalu ada kebaruan yang mencerahkan menyenangkan menentramkan dan membuat sesuatu baru dan ada rasa kerinduan.

Gerakan moral dan gerakan sosial merupakan upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui rekayasa sosial, dsb.

Gerakan moral dan gerakan sosial dapat secara tematik yang diangkat atau dibuat sesuai konteks dan kebutuhannya.

Bisa menggunakan seni budaya sebagai wujud apresiasi kepada leluhur nenek moyang. Bisa juga melibatkan para pakar, ilmuwan, sektor bisnis, seniman budayawan para tokoh dan pejuang seni budaya dan kemanusiaan untuk membangun masyarakat sadar pangan.

Gerakan moral dan sosial ini menyentuh yang benda maupun tak benda. Tentu bukan dalam perhitungan semata mata untung rugi atau bisnis.

Membangun literasi pangan melalui sentuhan yang tak benda dapat dianalogikan mentransformasikan isi buku yang mampu mencerahkan dan mencerdaskan melalui aktivitas kegiatan nyata sehari hari.

Misalnya, dengan menanam pohon, menata lingkungan, menata sampah, peduli air bersih, dsb.

Tatkala warga masyarakat telah memiliki kesadaran dan terbiasa dengan maka habitus baru menjaga dan mengapresiasi kemanusiaan, keteraturan sosial, patuh hukum akan lebih mudah ditumbuh kembangkan.

Wadah bagi gerakan moral dan gerakan sosial kemasyarakatan sejatinya merupakan civil society yang merupakan basis demokrasi.

Dari berbagai wadah civilnsociety literasi pangan yang tangible atau kebendaan dan intangible/ tak benda dapat dikembangkan sebagai apresiasi terhadap pergerakan komunitas komunitas pangan untuk membangun dan menggerakkan spirit membangkitkan nilai nilai kemanusiaan melalui berbagai kegiatan religi, seni, tradisi, komuniti, hobi dan teknologi yang memberi efek luas ke masyarakat dalam menghidupkan mendukung berbagai program kehidupan lainnya.

Lemdiklat Polri dalam proses pembelajarannya dapat dikaitkan dengan upaya mendukung literasi pangan melalui:

1. Buku buku seni budaya, tradisi yang berkaitan dengan ketahanan pangan dsb
2. Film panjang maupun dlm durasi singkat yang menginspirasi, memotivasi, memberi solusi, mengcounter issue hoax dan menghibur.
3. Kemitraan dalam pembelajaran ketahanan pangan dalam berbagai bentuk kemasan kegiatan virtual maupun aktual
4. Sosialisasi atau memviralkan kegiatan di Lemdiklat Polri dalam mendukung ketahanan pangan.
5. Membangun pilot project
6. Pameran

7. Lokakarya, dsb.

Sejalan dengan konteks di atas para peserta didik diajarkan dan dilatih untuk peka, peduli dan berbelarasa akan kemanusiaan, keteraturan sosial, dan membangun peradaban melalui religi, seni, tradisi, budaya, hobi, komuniti, teknologi, dsb.

Gerakan moral dan gerakan sosial para peserta didik Lemdiklat Polri dimulai melalui manajemen media dengan "Leader Branding".

Program Leader Branding dibangun dengan membuat:

1. Company profile Lemdiklat:

   Apa bagaimana mengapa Lemdiklat Polri

2. Siapa dan apa karyanya:

   Menampilkan para serdik yang berprestasi atau yang memiliki keunggulan bidang, olah jiwa (eeligi dan spiritualitas), olah rasa (seni budaya), olah raga.

3. Literasi:

   Materi pelajaran

   Kontens yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengetahuan

   Quotes

   Referensi

   E-jurnal

   E-book

   E-ibrary

4. Dialog:

   Podcast yang dikembangkan dalam berbagai forum;

   a. Forum Bhabinkamtibmas

   b. Forum Masdarwis

c. Forum Hukum dan Keadilan

d. Forum Ilmu Kepolisian

e. Forum forum komunitas dsb

5. Emergency policing dan Contigency policing:

   Pola pola pemolisian dalam berbagai situasi dan kondisi serta pengambilan keputusannya

6. Gerakan cooling system melalui, seni budaya dan pariwisata bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban

7. Kreatifitas dan inovasi: Hal hal baru dan kebaruan

8. Studi kasus:

   Belajar dari berbagai kejadian atau isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat

9. Bench marking: Studi banding dalam dan luar negeri

10. Coaching: Dialog Lemdiklat bagi Indonesia, dsb.

# LITERASI POLISI DAN PEMOLISIAN NYA BASIS PENDIDIKAN DAN LATIHAN LEMDIKLAT POLRI [119]

Keutamaan polisi dalam pemolisian nya adalah bagi:

1. Kemanusiaan.
2. Keteraturan Sosial.
3. Peradaban.

Memaknai peradaban yang begitu kompleks, setidaknya dapat dipahami dengan : memahami aturan dan menerapkannya dalam kehidupan untuk adanya keteraturan sosial bagi semakin manusiawinya manusia.

Hubungan Polisi dengan peradaban melalui pemolisian nya dapat dipahami dari penegakan hukum dan keadilan bagi keteraturan sosial dan bagi semakin manusiawinya manusia.

Polisi dan pemolisian nya menegakan hukum sejatinya bagi pembangunan, menjaga dan merawat peradaban.

Hukum digunakan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang kontra produktif.

119 https://polisiindonesia.id/2024/12/22/cdl-literasi-polisi-dan-pemolisian-nya-basis-pendidikan-dan-latihan-lemdiklat-polri/
https://tagarpolisi.com/2024/12/22/literasi-polisi-dan-pemolisiannya-basis-pendidikan-dan-latihan-lemdiklat-polri/
https://transindonesia.co/2024/12/23/literasi-polisi-dan-pemolisiannya-basis-pendidikan-dan-latihan-lemdiklat-polri/
https://lovebandung.com/index.php/2024/12/23/literasi-polisi-dan-pemolisiannya-basis-pendidikan-dan-latihan-lemdiklat-polri/

Semakin patuh hukum, keteraturan sosial terjaga dan kemanusiaan semakin meningkat kualitas hidupnya, dapat dikatakan semakin beradab.

Bagaimana mendidik dan melatih anggota Polri dan calon anggota Polri yang Profesional, cerdas, bermoral dan modern (PCBM) yang mampu membangun peradaban dalam pemolisian nya? Mau tidak mau basis pendidikan agar mahir terpuji, patuh hukum dan unggul (PCBM) adalah dengan membangun literasi, yang merupakan pilar peradaban.

Literasi yang cukup atau memadai dalam pembelajarannya maka akan ada pencerahan, pengayaan, pemberdayaan sebagai polisi yang pemolisian nya menjadi mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya.

Membangun literasi dengan berbasis moral pada keutamaan polisi dalam pemolisian nya yaitu bagi:

1. Kemanusiaan,
2. Keteraturan sosial
3. Peradaban.

Pendidikan dan latihan yang merupakan pembelajar didasari literasi, melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab dan disiplin bagi keutamaannya.

Keteladanan dan kebijakan di Lemdiklat dan dari para Kepala Kesatuan Pendidikan yang wajib hukumnya untuk memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin dalam mengimplementasikan melalui proses pembelajaran di masing masing satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Membangun literasi di Satuan Pendidikan masing masing dapat dimulai dari:

1. Lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni
2. Referensi yang memadai
3. Manajemen Media yang menjadi wadah bagi produk produknya

4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah
6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaan nya
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya maupun infrastruktur dan teknologinya.

**Dialog Peradaban dalam Pembelajaran Membangun Literasi**

Dialog peradaban merupakan model transformasi dalam membimbing maupun mencerahkan kepada para peserta didik agar di masa depan mampu menemukan dan menjalankan keutamaannya sebagai polisi dalam pemolisian nya.

Polisi dalam pemolisian nya dituntut sehat, semangat dan smart dengan jiwa bahagia yang merdeka. Semua itu dapat dicapai dengan membuka ruang dialog peradaban bagi semakin manusiawinya manusia.

Menyiapkan polisi di masa depan maka Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian dalam proses pembelajarannya melalui suatu "Dialog Peradaban".

Keutamaan pembelajaran bagi polisi di masa depan dengan mentransformasi dan mencerahkan atas keutamaan kepolisian (Kemanusiaan, Keteraturan sosial dan Peradaban) dalam dialog

kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi ekstrim, fakta brutal (Emergensi/ Kontijensi).

Bagi calon polisi dan pemimpin kepolisian pembelajarannya mengacu pada moralitas yang dapat dikatakan pantas dan benar, layak dan menyelamatkan dengan keberanian dan kemampuannya mengambil keputusan bagi menjaga kehidupan,

Membangun peradaban dan perjuangan kemanusiaan. Para polisi alumni Lemdiklat Polri dapat ditunjukan pikiran perkataan perbuatan dan bela rasa nya dalam pemolisian nya sebagai berikut:

1. Menjadi role model. Menjadi suatu ikon/ role yang menginspirasi dan menjadi panutan serta kebanggaan
2. Memotivasi memberi spirit untuk menumbuhkan daya juang dan kreativitas serta nyali untuk melakukan kebaikan dan perbaikan
3. Memahami keutamaan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya
4. Memiliki kesadaran untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu,
5. Siap menghadapi berbagai tantangan, tuntutan dan harapan di masa kini
6. Menyiapkan masa depan yang lebih baik
7. Visioner, proaktif dan problem solving, mampu memprediksi, mengantisipasi dan memberikan solusi
8. Komunikatif dan membangun Soft Power maupun Smart Power
9. Dinamis dan mampu mengatasi disrupsi dengan kreatif dan inovatif
10. Membawa dampak positif, dipercaya dan mendapat dukungan secara internal maupun eksternal

Ekspresi dialog peradaban untuk membangun karakter yang berbasis pada moralitas dalam kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.

Kesadaran merupakan landasan moralitas bagi manusia sebagai apa saja, apalagi sebagai polisi dalam pemolisian nya. Dengan adanya

kesadaran, meyakini dan menjalankan pilihan hidup dan panggilan hidup dengan baik dan benar tanpa ada tekanan atu paksaan.

Kesadaran sebagai polisi yang merupakan patriot bangsa menunjukan moralitas, sikap dan perilakunya dalam menjaga nama baik bangsanya dan bekerja semaksimal demi kebesaran dan kejayaan bangsa.

Demikian halnya menjadi apa saja sebagai profesi apa saja tatkala kesadaran menjadi landasan moralnya makan profesionalisme akan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kesadaran maka akan muncul tanggung jawab dan buahnya adalah disiplin.

Tanpa kesadaran maka yang dilakukan adalah semu, kepura-puraan tidak tulus, hanya kucing-kucingan, dan berbuat baik karena dipaksa atau pamrih untuk sesuatu.

Tanpa kesadaran sebenarnya ambang kehancuran, tanpa harga diri berbuat munafik, tidak ada ketulusan dalam menjaga kebaikan dan kebenaran yang dipikirkan hanya kesenangan, kepentingan sesaat dan tanpa hati nurani peduli setan orang lain susah karenanya.

Membangun kesadaran adalah pembelajaran sepanjang hayat, menanamkan kecintaan dan kebanggaan akan kebenaran, hal-hal yang produktif, peka dan peduli akan kemanusiaan, keberanian, patriotisme, nilai-nilai luhur dan sebagainya.

Membangun kesadaran sama dengan membudayakan yang baik dan benar sehingga seluruh komponen bangsa ikut bertanggung jawab dan ikut menjaga, bahkan menumbuh kembangkan sehingga sikap disiplin menjadi cermin karakternya.

Pembelajaran di Lemdiklat Polri berbasis literasi dan moralitas dalam mentransformasi serra mengembangkan ilmu kepolisian dengan Tegas dan Humanis:

1. Dimulai dari hal hal kecil dalam kehidupan sehari hari di asrama pengecekan dimulai setelah bagun pagi, kegiatan olah raga pagi, makan pagi, mengikuti perkuliahan dan pelatihan, makan siang, kegiatan pengasuhan sore hari, makan malam, belajar apel malam sampai istirahat malam semua diatur secara ketat dalam etika

peserta didik yang berisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya.

2. Pola pendidikan dengan model Mentorship/ pengasuhan oleh wali kelas dan asisten yang secara terus menerus mendampingi para peserta dididik untuk menemukan karakternya.
3. Pendidikan sepanjang hayat saling asah asih dan asuh walaupun telah selesai pendidikan.
4. Pengajaran tentang dasar sebagai patriot di era milenial
5. Pengajaran yang berkaitan dengan profesionalisme berbasis kepolisian ilmu kepolisian
6. Kapita selekta untuk studi kasus, problem solving dan menemukan kebaruan dalam menghadapi issue issue penting yang terjadi dalam masyarakat
7. Olah jiwa dikaitkan dengan pembinaan spiritual keagamaan
8. Olah raga dapat dikembangkan sesuai hobi dan kompetensinya di samping itu juga bela diri kendo dan judo dsb , penanaman kejujuran keberanian ketangguhan dan rasa percaya diri.
9. Olah Rasa dikaitkan dengan pembinaan seni budaya dan penataan lingkungan yang bersih asri dan ngangeni
10. Acara tradisi yang menjadi ikon kebhinekaan, penghayatan akan nilai nilai luhur bangsa

Keutamaan bagi petugas polisi yang humanis peka peduli dan berani ber bela rasa akan kemanusiaan merupakan produk dari kecintaan, perhatian, empati, pemberian kepercayaan, dan keteladanan sehingga mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul

# LEMDIKLAT POLRI MENANAMKAN KEBANGGAAN DAN KECINTAAN SEBAGAI POLISI [120]

"Menjadi Polisi untuk apa? Tatkala memahami dan mendalami serta menghayati sebagai jalan hidup atau panggilan, maka keutamaan sebagai polisi akan dijalankan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. "

Tatkala pemahaman dan penghayatan sebagai polisi bukan pada keutamaannya maka akan mudah menyimpang, menyalahgunakan bahkan hanyut dalam berbagai hal yang berbeda dan bertentangan dengan keutamaannya. Keutamaan polisi dalam pemolisiannya ada pada : 1.Kemanusiaan, 2.Keteraturan sosial 3.Peradaban

Pemahaman dan Penjabaran Keutamaan di atas maka pemolisiannya mampu menunjukan sebagai :

1. Penjaga kehidupan
2. Pembangun peradaban
3. Pejuang kemanusiaan

Pemahaman keutamaan polisi dalam pemolisiannya ditanamkan sejak dirinya masuk dalam Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri bahkan terus ditumbuhkembangkan setelah menjadi anggota polisi yang dilakukan setiap hari dalam pikiran, perkataan dan perbuatan di berbagai implementasinya.

120 https://transindonesia.co/2024/12/23/lemdiklat-polri-menanamkan-kebanggaan-dan-kecintaan-sebagai-polisi/

Kecintaan, kebanggaan dan penghayatan atas hidup sebagai petugas polisi tatkala hanya di mulut tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari maka yang terjadi degradasi moral. Jarkoni, iso ngajari ora iso nglakoni. Keteladanan dan menjadi role model ini yang tertanam dalam jiwa sehingga terbangun integritas, apa yang dipikirkan, diucapkan dan yang dilakukan itu sama, seperti keutamaannya. Dari integritas yang dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan karakter. Keberanian dan keyakinannya melaksanakan keutamaan ini karena kecintaan, kebanggaannya sebagai polisi sehingga ketulusan hati menjadi landasan dan acuannya. Karakter tatkala diuraikan dapat dikategorikan memiliki :

1. Komitmen
2. Integritas
3. Kompetensi
4. Keunggulan

Lemdiklat Polri dalam membangun karakter setidaknya membangun ke 4 hal tersebut dalam Program :

1. Kampus Integritas
2. Kampus Unggul
3. Kampus Modern
4. Kampus Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga

Kurikulum pengajaran, pelatihan, pengasuhan yang merupakan pembelajaran diarahkan pada keutamaan seorang petugas polisi, fungsi kepolisian maupun terefleksi budaya institusi kepolisian yang peka peduli dan berbelarasa bagi adanya keamanan, rasa aman sehingga keteraturan sosial terwujud, semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang normatif sering dikalahkan dengan berbagai kepentingan tanpa mempedulikan bagaimana dampak dan citra buruk yang social costnya amat mahal. Tatkala menanamkan kecintaan dan kebanggaan maka setidaknya

ada beberapa hal yang ada di lingkungan Lemdiklat Polri maupun di Kesatuan Kewilayahan antara lain :

1. Kepemimpinan yang transformasional
2. Kebijakan yang mendukung program program pembangunan karakter
3. Ada role model yang menjadi inspirasi atau setidaknya mentor yang menjadi panutan, dimulai dari pemimpinnya, guru gurunya, instruktur dsb.
4. Penanaman nilai nilai keutamaan
5. Budaya malu
6. Merit system sebagai akuntabilitas :
    a. Secara moral
    b. Secara hukum
    c. Secara administrasi
    d. Secara fungsional
    e. Secara sosial
7. Pengajaran, pelatihan dan pengasuhan / mentoring dilakukan dalam suatu dialog peradaban
8. Ada SOP yang berisi :
    a. Job discription dan job analysis
    b. Standardisasi keberhasilan pelaksanaan tugas
    c. Sistem penilaian kinerja
    d. Sistem reward and punishment
    e. Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya
9. Personal dan institusional branding, bagi petugas maupun kesatuan yang berprestasi diberi penghargaan dan dicatat rekam jejaknya. Bisa saja dijadikan model local heroes dsb.

10. Manajemen media untuk dapat dijadikan ruang atau panggung serta sarana mengkaji dan menganalisa apa yang menjadi ungkapan, pemikiran dsb

Gaya hidup sebagai polisi, penting sekali diajarkan dan diimplementasikan agar dapat menikmati dan menghayati hidupnya sebagai polisi, bagaimana menjalankan fungsi kepolisian dan membangun citra positif bagi institusi kepolisian. Semua ini akan terlihat dalam pemolisiannya di situ akan terasa dan nampak jiwanya Kabhayangkaraan mengalir dalam pelayanannya kepada publik :

1. Pelayanan keamanan
2. Pelayanan keselamatan
3. Pelayanan hukum
4. Pelayanan administrasi
5. Pelayanan informasi
6. Pelayanan kemanusiaan.

Semua itu terlihat dalam pelayanan prima yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang dilayani.

Kecintaan dan kebanggaan yang termanifestasi dalam keutamaan itulah yang semestinya dinilai atau diukur untuk menunjukan tingkat keberhasilannya. Pendekatan dalam institusi kepolisian mengikuti pendekatan pada birokrasi yang rasional dengan pendekatan yang in personal. Tatkala pendekatan personal diagungkan maka kecintaan dan kebanggaan akan bergeser dari yang ideal. Bisa saja berubah dan bertentangan dengan keutamaannya.

Maka kecintaan dan kebanggaan akan terefleksi dalam ungkapan ungkapan, pikiran pikiran sebagai getaran jiwanya. Polisi dalam Pemolisiannya Pantas dan Benar, Layak dan Menyelamatkan sebagai Penjaga Kehidupan, Pembangun Peradaban dan Pejuang Kemanusiaan.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN DAN MENGEMBANGKAN MARITIME POLICING DI PUSDIK POLAIR [121]

Model pemolisian di kawasan maritim (maritime policing) menjadi model pembelajaran di Pusdik Polair Lemdiklat Polri.

Polisi melalui pemolisiannya menyesuaikan corak masyarakat dan kebudayaannya. Pada masyarakat sekitar pantai dan yang memiliki kawasan kepulauan model pemolisianyapun menyesuaikan pada masyarakat dan kebudayaan maritim. Masyarakat nelayan dan kebudayaan sekitar pantai memiliki karakteristik tersendiri untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan rasa aman.

Potensi konflik dan konflik sosialnyapun berkaitan dengan sumber daya yang ada juga issue issue yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Polisi di kawasan kepulauan model pemolisiannya dapat berbasis pada corak masyarakat dan kebudayaan maritim (maritime policing).

Di kawasan maritim profesi pelayanan menjadi tulang punggung masyarakat. Ada juga yang bercocok tanam juga beternak.

Bercocok tanam di pantai atau lahan lahan sekitar pantai atau di lautan menanam rumput laut. Beternak di daratan seperti membuat tambak juga ada beternak mutiara. Ada juga industri dan perdagangan ikan. Harga ikan pada tempat pelelangan ikan akan menjadi sumber daya sekaligus potensi konflik.

121 https://transindonesia.co/2024/12/24/lemdiklat-polri-mengajarkan-dan-mengembangkan-maritime-policing-di-pusdik-polair/
https://polisiindonesia.id/2024/12/24/cdl-lemdiklat-polri-ajar-dan-kembangkan-maritime-policing-di-pusdik-polair/

Konteks kemaritiman memang ada yang khas laut dan kehidupan antar pulau juga ara kehidupan di daratan.

Keduanya memiliki potensi sumber daya yang berbeda namun juga sama dama dapat menjadi penyebab konflik sosial. Bisa saja dengan isu yang sama atau berbeda.

Pola pemolisian pada masyarakat maritim di era modern berkembang adanya perubahan yang begitu cepat.

Perubahan di kawasan maritim akibat adanya: pertambangan, pengelolaan dan pengeksploitasian sumber daya laut dengan cara industri, pengembangan kawasan pariwisata.

Mulai maduknya investor dan kaum pendatang juga berdampak pada kebudayaan lokal. Meningkatnya perdagangan dan perubahan gaya hidup, masuknya budaya kosmopolitan dari luar. Tentu saja dampak positif ada bagi kesejahteraan masyarakat namun di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Kerusakan lingkungan dan eko sistemnya.

Masuknya nilai nilai baru yang mempengaruhi generasi muda dsb. Hal hal demikian akan menjadi residu bagi terganggunya keteraturan sosial.

Model polisi dengan pemolisiannya di kawasan maritim pada prinsipnya sama namun ada spesifikasi yang menjadi karakter manajemen dan operasionalnya. Pelayanan kepolisian kepada publik mencakup pelayanan : 1. Keamanan 2. Keselamatan 3. Hukum 4. Administrasi 5. Informasi 6. Kemanusiaan.

Pelayanan tersebut bukan parsial melainkan saling terkait satu dengan lainnya sebagai bagian dari rekayasa sosial dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosia. Dioperasionalkan secara rutin, khusus maupun kontijensi.

Konteks rutin yang berkaitan dengan keseharian kehidupan sosial. Yang bersifat khusus dikaitkan dengan tugas atau kegiatan: protokoler VVIP dan VIP, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan politik maupun operasi kepolisian. Adapun yang bersifat kontijensi dikaitkan dengan; a. Faktor manusia seperti: konflik sosial berskala besar, demo dengan

masa besar, teror bom dsb, b. Faktor alam: bencana alam, situasi dan kondisi akibat cuaca dan perubahan iklim, c. Faktor kerusakan infrastruktur seperti: jalan putus, listrik mati dalam skala besar dan lama, dsb.

Konteks pemolisian maritim ada beberapa faktor yang menjadi karakternya antara lain:

1. Perubahan iklim dan gelombang laut, yang akan berdampak bagi kehidupan nelayan
2. Pengelolaan pelabuhan dari pengamanan kapal yang bersandar, pembongkaran barang, penyimpanan hingga pengangkutan barang, kelangkaan dan kenaikan harga solar maupun bbm lainnya, isu harga ikan, dsb.
3. Premanisme di pelabuhan
4. Munculnya kawasan jasa hiburan yang dapat mengarah pada penyakit masyarakat dari minuman keras obat obatan hingga narkotika. Hiburan yang menjurus perjudian dan pelacuran.
5. Pemeriksaan maupun perijinan yang dapat menjadi potensi konflik dan adanya penyalahgunaan kewenangan
6. Tata guna lahan termasuk parkir kendaraan
7. Broker dalam bidan jasa apa saja akan bermunculan dsb
8. Hal hal ilegal seperti ilegal fishing, penyelundupan dsb
9. Perompak atau bajak laut
10. Kecelakaan di laut
11. Masalah perbatasan dengan negara luar ataupun laut bebas

Pola pola pemolisian maritim secara manajerial maupun operasional dapat dilihat pada ranah birokrasi dan ranah masyarakat.

Pada ranah birokrasi key performance indicator (KPI) mencakup:

1. Kepemimpinan

   Yang kebijakannya mendukung pada konteks kemaritiman

2. Administrasi yang mencakup :

   a. Prinsip prinsip manajerial : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya sesuai model untuk menghadapi masalah yang berdampak pada sesuatu yang kontra produktif di kawasan maritim.

   b. Pembinaan SDM yang akan mengawaki juga memiliki kompetensi kemaritiman

   c. Sarana prasarana logistik pun sesuai dengan pertelaan tugas polisi dalam konteks kemaritiman juga untuk yang ada di daratan

   d. Anggaran juga khusus dsn dikembangkan sehingga mampu mencakup apa yang dibutuhkan pada kawasan maritim.

3. Operasional bagi kawasan maritim secara rutin khusus maupun kontijensi dapat mengacu model asta siap :

   a. Siap piranti lunak

      Siap SOP hingga pedoman dsn panduan kerja

   b. Siap posko sebagai back office dan operational room jg sebagai pusat K3i (komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi)

   c. Siap model dengan pemetaan wilayah, pemetaan potensi maupun pemetaan masalah untuk penanganan kawasan dan model konfliknya maka dapat dilatihkan atau dengan cara coach dsb

   d. Siap cipta kondisi dalam konteks ini jejaring yang dapat menjadi soft power bahkan smart power sampai lini terdepan (RT/RW)

   e. Siap mitra, sinergitas atar stake holder dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial

   f. Siap sumber daya yangbakan mengawaki pada back office, pada tugas tugas di fungsi kepolisian maupun tugas satgas

(satuan tugas atau team work dengan para pemangku kepentingan lainnya) misalnya: patroli perbatasan, penanganan kawasan rawan bencana, coast guard, tim sar, tim kesehatan, atau public safety centre lainnya bila terjadi hal hal emergensi, dsb.

g. Siap sarana prasarana atau logistik untuk perorangan, unit atau tim juga untuk kesatuan

h. Siap anggaran secara bujeter maupun non bujeter

4. Capacity building atau penguatan institusi dengan inovasi dan kreatifitasnya dalam meningkatkan kualitas pemolisian yang profesional cerdas bermoral dan modern.

Konteks penilaian kinerja sebagai KPI ( key performance indicator) dalam ranah masyarakat mencakup :

1. Kemitraan

   Konteks sinergitas dengan : pemerintah, DPRD, akademisi, sektor bisnis, media, lsm, masyarakat dsb. Bagaimana para mitra ini dapat menjadi soft power dan smart power

2. Pelayanan kepada publik : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan dengan standar prima yaitu: cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

3. Pecegahan atau upaya upaya penyelesaian masalah yang akan berdampak menjadi konflik sosial maupun yang kontraproduktif

4. Membangun jejaring di semua lini dari yang berbasis wilayah, berbasis fungsi ataupun berbasis masalah

Model pemolisian maritim merupakan pengembangan konteks community policing yang disesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya juga alam maupun masalah masalah yang akan dihadapi dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Pusdik Pol Air dalam proses pembelajarannya terus mengajarkan dan mengembangkan model "maritime policing" bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban masyarakat perairan dan kepulauan.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN DAN MENGEMBANGKAN "INTERNATIONAL POLICING" DI SEBASA POLRI [122]

Polisi bekerja pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Benang merah ke dua ranah itu dapat dikatakan sebagai pemolisian atau policing. Yang dapat dimaknai sebagai segala usaha kepolisian pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial.

Polisi selain bekerja di dalam masyarakat dalam negeri juga bertugas dalam masyarakat internasional.

Pekerjaan pekerjaan kepolisian di ranah internasional merupakan suatu bagian dalam menjalankan amanat konstitusi.

Pada tugas kepolisian di ranah internasional (international policing) setidaknya mencakup:

1. Menjadi bagian dalam tugas tugas di badan PBB
2. Berperan aktif sebagai bagian Pasukan Perdamaian PBB. Police adviser (PA) maupun sebagai FPU (formed police unit).
3. Kerja sama kepolisian internasional yang berkaitan dengan
    a. Keamanan

122 https://transindonesia.co/2024/12/25/lemdiklat-polri-mengajarkan-dan-mengembangkan-international-policing-di-sebasa-polri/

b. Keselamatan

c. Hukum

d. Administrasi

e. Informasi

f. Kemanusiaan

4. Menjembatani berbagai permasalahan kepolisian di ranah internasional dalam tugas LO
5. Pelayanan kepolisian yang berkaitan dengan internasional di dalam maupun luar negeri
6. Melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan SDM dan teknologi kepolisian:

   a. Penegakkan hukum

   b. Penyelidikan dan penyidikan

   c. Pendidikan untuk S1 S2 dan S3

   d. Pelatihan yang berkaitan teknis tugas operasional kepolisian

   e. Menyelenggarakan kelas internasional

   f. Kegiatan seminar workshop expo, dll
7. Menjadi protokol atas kegiatan international policing
8. Networking pengembangan jejaring dan membangun soft power dan smart power
9. Menjadi anggota dalam berbagai Asosiasi, Dewan, Forum internasional

International policing memerlukan grand strategi setidaknya menjabarkan 9 point di atas. Menyusun aturan hukum dan peraturan sebagai payung hukum. Menyiapkan SOP sebagai panduan operasionalnya. Menyiapkan SDM yang akan mengawaki dan mengoperasionalkan di dalam birokrasi maupun tugas di dalam masyarakat internasional.

Model pemolisian internasional diajarkan dalam berbagai studi kasus atau model pemolisian transplantasi untuk model polisi dengan pemolisian PBB di mission area sebagai peace keeper. Apa yang dilakukan pada pemolisiannya sebagai international policing (pemolisian antar bangsa: yang para petugasnya dari berbagai bangsa), namun ada kesamaan pola yang dikerjakan.

Pemolisian berbasis wilayah (dari level post monitor, province comander sampai dengan police head quarter) diimplementasikan sebagai penjaga, pengamat, jembatan penghubung, pelatih, back up system sampai kepolisian lokal bisa bekerja sebagai seharusnya.

Pemolisian berbasis pada fungsi-fungsi (ini tidak dikerjakan sepenuhnya seperti sebuah KOD (kesatuan operasional dasar), melainkan diprioritaskan untuk patroli, pengawalan, pengamanan obyek-obyek tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu (pemilihan umum, tugas-tugas rumah sakit/ kesehatan, penjinak bom, pengendali massa, patroli jarak jauh dan sebagainya). Selain itu juga ada pemolisian yang menjadi bagian diplomasi atau bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar terpelihara keteraturan sosial, keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya.

Pola-pola pemolisian pada daerah misi perdamaian PBB mengacu pada 4 unsur:

1. Kepemimpinan,
2. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarana, prasarana dan anggaran),
3. Operasional,
4. Capacity building.

Implementasi pemolisian pada saat kondisi kontijensi bisa mengacu pada pola-pola pemolisian transplantasi dengan menerapkan community policing/ polmas yang didukung dengan sistem-sistem online di bidang : kepemimpinan, administrasi, operasional dan capacity building.

Pola transplantasi dapat dilakukan pada tingkat Mabes, tingkat Polda. Dengan personil-personil kontijensi yang bersifat ad hoc dengan menunjuk pejabat-pejabat berdasar wilayah, fungsional adapun back up system dilakukan kepolisian terdekat juga dari pusat.

International policing yang diajarkan di Sebasa Polri merupakan bagian dari membangun Polri yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "POLICE SCIENCE" DI STIK PTIK [123]

"Untuk apa Ilmu Kepolisian bagi Polri?" Polisi dapat dilihat sebagai: Petugas, Fungsi, Institusi.

Polisi bekerja dalam pemolisian pada ranah birokrasi dan masyarakat

Keutamaan polisi dalam pemolisiannya adalah bagi : Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

Manusia sebagai mahkluk sosial dalam hidup dan kehidupannya untuk bertahan dan tumbuh berkembang memerlukan adanya produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Maslow kebutuhan manusia mencakup:

1. Kebutuhan Fisiologis
2. Kebutuhan Keamanan dan Rasa Aman
3. Kebutuhan Sosial
4. Kebutuhan Penghargaan
5. Kebutuhan Aktualisasi

Hidup dan kehidupan penuh dengan tantangan, hambatan dan ancaman yang bisa menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas

123 https://transindonesia.co/2024/12/26/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-police-science-di-stik-ptik/

Ancaman bagi hidup dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara setidaknya :

1. Faktor Alam
2. Faktor manusia
3. Faktor Infrastuktur, sistem dan teknologi dsb

Polisi dalam pemolisiannya di Indonesia menjaga sistem nasional agar keamanan dalam negeri agar negara mampu berdaulat, berdaya tahan dan berdaya tangkal serta berdaya saing.

Polisi dalam pemolisiannya diharapkan mampu sebagai:

1. Penjaga Kehidupan
2. Pembangun Peradaban
3. Pejuang Kemanusiaan

Polisi dalam pemolisiannya menunjukkan kinerjanya yang profesional, cerdas, bermoral dan modern

Sejalan dengan pemikiran di atas maka diperlukan education, training and coaching yang berbasis pada suatu ilmu pengetahuan yaitu ” Ilmu Kepolisian” Yang mengacu pemikiran Prof. Parsudi Suparlan maupun Baylei :

1. Sebagai ilmu antar bidang yang dapat dikembangkan dalam berbagai pendekatannya
2. Mempelajari dan mengembangkan teori dan konsep yang berkaitan dengan:
    a. Masalah sosial khususnya yang berkaitan atau berdampak pada keteraturan sosial
    b. Penegakan Hukum dan keadilan
    c. Kejahatan dan Penanganannya
    d. Polisi dan Pemolisiannya
    e. Isu isu penting yang terjadi dalam masyarakat.
    f. Teknik dan teknis dasar umum dan khusus kepolisian

3. Paradigma ilmu kepolisian dapat dilihat secara:

   a. Filosofis :

      Pengembangan ilmu kepolisian dapat dikaji dan dijelaskan secara epistimologi, ontologi, metodologi maupun aksiologi.

   b. Geo politik dan geo strategis

      Pengembangan ilmu kepolisian menjadi pilar NKRI dan konteks keamanan dan keteraturan sosial

   c. Yuridis

      Pengembangan ilmu kepolisian dilandasi aturan hukum dan dapat dikembangkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

   d. Globalisasi dan modernisasi

      Pengembangan ilmu kepolisian merupakan suatu kebutuhan atas perubahan yang begitu cepat

   e. Akademis,

      Pengembangan ilmu kepolisian dapat di kembangkan berbagai strata keilmuan ( S1, S2 dan S3), pengembangan kepemimpinan dan majerial, kompetensi khusus dan fungsional (cyber, forensik, untuk hal hal yang bersifat ekstra ordinary)

   f. Pragmatis,

      ilmu kepolisian dapat dikembangkan pada konsentrasi : keselamatan (safety) contoh (safety driving centre), keamanan (private security, industrial security, public security, cyber security maupun forensic security)

4. Pengembangan pola pengajarannya melalui Fakultas :

   a. Polisi dan pemolisian

   b. Manajemen Keamanan

   c. Manajemen Keselamatan

d. Intelejen
e. Hukum dan penegakan hukum
f. Penyelidikan dan penyidikan
g. Forensik
h. Siber dan teknologi kepolisian
i. Kajian konflik sosial
j. Kajian Terorisme
k. Kajian kejahatan luar biasa
l. Teknologi Kepolisian

5. Kurikulum dan pengajarannya dapat dikategorikan sbb :
   a. Pengajaran dasar ilmu kepolisian
      1) Filsafat ilmu pengetahuan
      2) Etika Publik
      3) Metodologi Penelitian
   b. Pengajaran pokok ilmu kepolisian
      1) Ilmu ilmu sosial
      2) Ilmu hukum, penegakan hukum dan keadilan
      3) Ilmu kriminologi
      4) Ilmu administrasi dan operasionalnya
      5) Ilmu teknologi informasi
      6) Hubungan antar suku bangsa ( konteks masyarakat Indonesia yang multikultural)
      7) Ilmu humaniora dan sebagainya
   c. Kapita Selekta yang berkaitan dengan isu isu penting dan aktual yang terjadi dalam masyarakat antara lain :
      1) Idiologi

2) Politik
3) Ekonomi
4) Sosial budaya
5) Keamanan
6) Pertahanan dan sebagainya

6. Membangun pendukung pengembangan ilmu kepolisian melalui :
   a. Pusat penelitian dan pengkajian
   b. Lembaga lembaga independen pendukung penelitian dan pengkajian
   c. Forum atau asosiasi dosen pengajar, alumni maupun pemerhati ilmu kepolisian
   d. Penerbitan buku
   e. Jurnal ilmiah
   f. Laboratorium sosial
7. Pengembangan pendidikan untuk kompetensi khusus dan pragmatis yang dapat dikembangkan antara lain :
   a. Safety driving centre
   b. Security training centre
   c. Sekolah penyidik
   d. Pendidikan ilmu kepolisian level D1 dan D3
   e. Kursus kursus singkat
   f. Pelatihan pelatihan bagi master trainer dan trainer dan sebagainya
8. Dosen yang memiliki integritas dan kualitas sebagai : peneliti, penulis, guru, dan ikon akademik dsb
9. Pengembangan Smart Policing yang mencakup : conventional policing, electronic policing dan forensic policing

10. Pemberdayaan media melalui manajemen media maupun intelejen media.

Point point di atas bisa terus dikembangkan secara dinamis dan terbuka yang diperlukan adanya ” Critical Thinking”

Ilmu kepolisian di era digital (revolusi Industri 4.0) menuju pada Society 5.0 berupaya mengatasi pemenuhan kebutuhan bagi bangsa beradab yang terus meningkat kualitas hidupnya.

Model pemolisian yang mungkin dikembangkan adalah model ” Smart Policing”

Point Point Smart Policing:

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian (policing)
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving
9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emerjensi maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern.

Pembelajaran ilmu kepolisian berbasis pada literasi Polisi dan Pemolisiannya untuk: Menjaga Kehidupan, Membangun Peradaban, dan Perjuangan bagi Kemanusiaan.

Memaknai peradaban yang begitu kompleks namun setidaknya dapat dipahami dengan : memahami aturan dan menerapkannya dalam kehidupan untuk adanya keteraturan sosial bagi semakin manusiawinya manusia.

Hubungan Polisi dengan peradaban melalui pemolisiannya dapat dipahami dari penegakan hukum dan keadilan bagi keteraturan sosial dan bagi semakin manusiawinya manusia.

Polisi dan pemolisiannya menegakan hukum sejatinya bagi pembangunan, menjaga dan merawat peradaban.

Hukum digunakan sebagai upaya menyelesaikan konflik secara beradab dan untuk mencegah pelanggaran hukum yang kontra produktif.

Semakin patuh hukum, keteraturan sosial terjaga dan kemanusiaan semakin meningkat kualitas hidupnya, dapat dikatakan semakin beradab.

Bagaimana membangun peradaban dalam pemolisian? Dengan membangun literasi. Literasi pilar peradaban. Literasi yang cukup atau memadai maka akan ada pencerahan, pengkayaan, pemberdayaan dan sebagai polisi pemolisiannya menjadi : profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya.

Membangun literasi dengan berbasis moral pada keutamaannya yaitu bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban.

Pendidikan menjadi dasar membangun literasi, melalui olah jiwa, olah rasa, olah raga sehingga ada kesadaran, kepekaan, kepedulian, tanggung jawab dan disiplin bagi keutamaannya.

Keteladanan dan kebijakan para pemimpin menjadi sangat penting bagi pembangunan literasi. Para pemimpin di semua lini wajib hukumnya memiliki kesadaran, tanggung jawab dan disiplin untuk mengimplementasikan melalui pemolisiannya.

Literasi dapat dimulai dari:

1. Lingkungan hidupnya yang asri dan ngangeni
2. Referensi yang memadai

3. Manajemen media yang menjadi wadah bagi produk produknya
4. Guru, pendidik dan mentor yang mencerahkan dan menjadi teladan
5. Kurikulum pembelajaran yang menstimuli untuk berpikir kritis, visioner, memecahkan masalah
6. Sumber daya manusia yang profesional, cerdas, bermoral dan modern
7. Program program unggulan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial maupun peradaban
8. Pikiran, Perkataan, Perbuatan dan Bela Rasanya bagi Kebaikan, Kebenaran, Perbaikan, Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang
9. Menjaga, Merawat Nilai Nilai Luhur Bangsa dan Kebhinekaanya
10. Mampu menjadikan Ikon atau Simbol Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban

Masih banyak hal yang dapat dikembangkan untuk literasi melalui aturan atau hukumnya, sumber daya manusianya maupun infrastruktur dan teknologinya.

STIK PTIK selain mengembangkan ilmu kepolisian juga menyiapkan bagi pemimpin dan kepemimpinan di masa depan.

Keutamaan pada pemimpin dan kepemimpinannya ada pada pada kebijakannya untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Membangun sumber daya manusia yang menjadi aset utama bangsa,
3. Produkarya yang kreatif inovatif dan berkualitas,
4. Membangun dan terus meningkatkan stem pelayanan publik yang prima
5. Membangun budaya patuh hukum

6. Memberdayakan semua sumberdaya semaksimal mungkin secara efektif dan efisien
7. Sistem Edukasi, training dikembangkan dalam berbagai coaching
8. Memberdayakan Media, IT dalam sistem on line yang berbasis elektronik
9. Membangun dan menata keteraturan sosial
10. Membangun sistem reward and punishment yang fair dan sesuai standar
11. Membangun birokrasi yang rasional
12. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
13. Transparan dan akuntabel
14. Membangun sistem pelayanan satu pintu one stop service
15. Mendukung clean and good governance dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
16. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
17. Membangun dan mengimplementasikan supremasi hukum
18. Mengembangkan olah jiwa, olah rasa dan olah raga di semua lini.

10 Point Akuntabilitas Profesi:

1. Moral (niat baik dan benar)
2. Hukum (secara Hukum benar / tidak melanggar)
3. Adminsitrasi (secara Administrasi benar / tidak melanggar)
4. Fungsional (sesuai SOP)
5. Berdampak penguatan institusi
6. Menunjukan Inisiatif Anti Korupsi
7. Memberikan pelayanan kepada publik secara prima
8. Visioner, proaktif dan problem solving
9. Dinamis dan dialogis

10. Secara sosial menunjukan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat dn sebagainya

Ilmu kepolisian yang berbasis literasi dalam pembelajarannya diharapkan mampu menyiapkan Polisi dalam pemolisiannya sebagai petugas, sebagai fungsi, maupun institusi yang keutamaannya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, mampu menunjukan kualitas: profesionalismenya, kecerdasannya, kesadarannya, dan modernitasnya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan dalam keteraturan sosial yang ditunjukan dalam pelayanannya yang berkaitan dengan: keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan yang berkualitas prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses) pada:

1. Private Security
2. Industrial Security
3. Public security
4. Ecological Security
5. Cyber Security
6. Forensic security.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "EMERGENCY AND CONTIGENCY POLICING" DI PUSDIK BRIMOB [124]

Indonesia sebagai negara majemuk yang memiliki potensi konflik sosial yang besar, di samping itu juga wilayah ring of fire yang rawan bencana, maka memerlukan Brimob sebagai model paramilitary policing sebagai fungsi utama dalam menangani kondisi emerjensi maupun kontijensi.

Brimob juga sebagai fungsi pendukung: operasional, teknologi dan forensik. Brimob dalam kompetensi menangani kejahatan dan gangguan eskalasi tinggi merupakan tugas fungsional.

Implementasi pembelajarannya dapat menggunakan model transpalation policing.Transplantasi di dalam konteks ini mengambil istilah kedokteran, yang diistilahkan dalam pertanian adalah sebagai bentuk cangkok/ diplasmakan, karena adanya kerusakan organ atau untuk menggantikan atau memperbaiki organ yang rusak.

Tatkala terjadi situasi kontijensi (baik dari faktor manusia, alam maupun infrastruktur), polisi dan pemolisianya bisa mengalami kerusakan sistem atau bahkan lumpuh total. Tatkala kepolisian tadi tak dapat menjalankan pemolisiannya tentu saja pelayanan- pelayanan kepolisian akan kacau, atau setidaknya terbengkalai. Pada saat kontijensi polisi dan pemolisianya bisa terkena imbas dan berdampak luas, karena polisi sendiri menjadi korban yang dirinyapun perlu ditolong/ di backup dari kesatuan-kesatuan lainya.

Konteks inilah pemolisian transplantasi sebagai model pemolisian pada saat kontijensi yang akan memback up dari tingkat polsek sampai

124 https://transindonesia.co/2024/12/26/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-emergency-and-contigency-policing-di-pusdik-brimob/

dengan tingkat Polda (disesuaikan konteks dampak kerusakannya/ pengaruh besarnya yang mengakibatkan tidak efektif pemolisiannya).

Model pemolisian transplantasi ini bisa melihat model polisi dengan pemolisian PBB di mission area sebagai peace keeper.

Apa yang dilakukan pada pemolisiannya sebagai international policing (pemolisian antar bangsa: yang para petugasnya dari berbagai bangsa), namun ada kesamaan pola yang dikerjakan.

Pemolisian berbasis wilayah (dari level post monitor, province comander sampai dengan police head quarter) diimplementasikan sebagai penjaga, pengamat, jembatan penghubung, pelatih, back up system sampai kepolisian lokal bisa bekerja sebagai seharusnya.

Pemolisian berbasis pada fungsi-fungsi (ini tidak dikerjakan sepenuhnya seperti sebuah KOD (kesatuan operasional dasar), melainkan diprioritaskan untuk patroli, pengawalan, pengamanan obyek-obyek tertentu dan kegiatan-kegiatan tertentu (pemilihan umum, tugas-tugas rumah sakit/ kesehatan, penjinak bom, pengendali massa, patroli jarak jauh dan sebagainya). Selain itu juga ada pemolisian yang menjadi bagian diplomasi atau bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar terpelihara keteraturan sosial, keamanan dan rasa aman warga yang dilayaninya.

Pola-pola pemolisian pada daerah misi perdamaian PBB mengacu pada 4 unsur:

1. Kepemimpinan,
2. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarana, prasarana dan anggaran),
3. Operasional,
4. Capacity building.

Implementasi pemolisian pada saat kondisi kontijensi bisa mengacu pada pola-pola pemolisian transplantasi dengan menerapkan community policing/ polmas yang didukung dengan sistem-sistem online di bidang : kepemimpinan, administrasi, operasional dan capacity building.

Pola transplantasi dapat dilakukan pada tingkat Mabes, tingkat Polda. Dengan personil-personil kontijensi yang bersifat ad hoc dengan

menunjuk pejabat-pejabat berdasar wilayah, fungsional adapun back up system dilakukan kepolisian terdekat juga dari pusat.

Pola pemolisiannya untuk lokasi yang parah berdampak luas dan memerlukan jangka waktu yang cukup lama (minimal 6/ lebih misalnya Tsunami Aceh: 2004, Gempa Jogja : 2006, gempa di Sulteng, Sulbar, gempa tsunami di Sumbar, kebakaran hutan, konflik-konflik Sara yang berkepanjangan dan sebagainya).

Emergency, Contigency Policing setidaknya mencakup :

1. Model Pemolisian Transplantasi sebagai penjaga, pengamat, jembatan penghubung, pelatih, back up system dsb, hingga yang diback up dapat berfungsi kembali.
2. Pola-pola pemolisian secara managerial setidaknya mencakup: 4 unsur:
    a. Kepemimpinan,
    b. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarana, prasarana dan anggaran),
    c. Operasional,
    d. Capacity building.
3. Implementasinya dapat mengacu pada community policing/ polmas
4. Di back up dengan sistem-sistem online yang berbasis elektronik
5. Personilnya bersifat ad hoc merupakan gabungan dari berbagai fungsi maupun antar wilayah
6. Perkantoran dengan membangun tenda-tenda lapangan, kontainer atau memanfaatkan tempat-tempat/ lokasi yang biasa diberdayagunakan.
7. Membangun posko-posko sebagai pusat K3i yang berisi peta-peta dan jaringan-jaringan elektronik maupun kontak- kontak person. Dapat dibuat pengkategorian : Merah : Rawan dua, Kuning : Rawan satu, hijau : kondisi normal. Model pergeseran pasukan untuk back up kontijensi dengan peta rute dari dan ke lokasi sasaran dengan berbagai alternatifnya serta pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Kesiapan Logistik, transportasi darat, laut maupun udara, ambulans, untuk evakuasi dan bantuan kemanusiaan.

9. Rumah sakit lapangan dan perlengkapan, obat obatan dan tenaga medisnya.
10. Operasionalnya dapat menerapkan model Asta Siap. Siap : Posko, Piranti Lunak, model penanganan lapangan, siap mitra, jejaring, personil, logistik, anggaran

Implementasi Emergency/ Contigency Policing dalam kondisi infrastruktur rusak dapat dibangun dari :

1 .Tingkat Polda, Polres dan Polsek (yang bisa dibangun dengan tenda-tenda lapangan, bekas-bekas kontainer atau memanfaatkan tempat-tempat/ lokasi yang biasa diberdayagunakan.
Selain itu juga dilengkapi pejabat (sebagai pemimpin, staf dan petugas- petugas lapangan). Membangun posko-posko sebagai pusat K3i yang berisi peta-peta dan jaringan-jaringan elektronik maupun kontak- kontak person sebagai jejaring. Situasi dan kondisi riil lapangan (bisa dibuat kategori (merah : Rawan 2, kuning : Rawan 1, hijau : kondisi normal), sistem-sistem pergeseran pasukan/ petugas-petugas untuk back up kontijensi (brimob, sabahara / pasukan gabungan), peta-peta rute dari dan ke lokasi sasaran ( dan berbagai alternatifnya).
2. Peralatan-peralatan komunikasi, HT, telepon, sistem-sistem komunikasi melalui media sosial, sebagai arana komunikasi, komando dan pengendalian serta koordinasi secara cepat dan real time.
3. Kendaraan bermotor (Sepeda motor, mobil double cabin, truck, bus, ambulan, alat berat) siap operator dan BBM-nya. Kesiapan bengkel lapangan, dan untuk penggantian suku cadang bila terjadi sesuatu kerusakan/ kecelakaan.
4. Helikopter, sebagai sarana evakuasi udara, pendistribusian bantuan, maupun untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan.
5. Gudang-gudang bantuan kemanusiaan dan pola-pola pendistribusian. Rumah sakit lapangan dan perlengkapan medisnya.
6. Posko-posko untuk pengendalian relawan dan pendistribusian bantuan dan sistem pendataan dan sebagainya.

Pemolisian transplantasi diimplementasikan tatkala korban cukup banyak, berdampak luas dan berkepanjangan, penangananya memerlukan

sinergi antar pemangku kepentingan di mana kepolisian lokal/ setempat tidak bisa berdaya/ tidak mampu beroperasional karena juga sebagai korban.

Pola Pemolisian transplantasi di saat kontijensi, diawaki oleh orang-orang yang memiliki kompetensi sebagai :

1. Pemimpin kewilayahan yang transformasional,
2. Petugas-petugas polisi profesional di bidangnya, yang siap membantu dan tidak menjadi benalu bagi kepolisian lokal,
3. Sarana prasarana dan perlengkapan sistem IT nya di back up dari pusat, bukan beban polisi lokal. Dalam kondisi darurat pola pemolisian transplantasi ini dapat segera dikirim sebagai backup kewilayahan dan sistem operasionalnya dengan model asta siap dengan satgas- satgasnya, Asta siap :
   a. Siap pilun,
   b. Siap posko,
   c. Siap latpraops,
   d. Siap cipkon masyarakat (jejaring masyarakat/ pemangku kepentingan) ,
   e. Siap mitra polisi sebagai soft power,
   f. Siap SDM (posko, satgas, dan pasukan- pasukan kontijensi),
   g. Siap sarpas (dengan IT-nya),
   h. Siap anggaranya yang menggunakan anggaran back up pusat. Satgas-satgas yang dibentuk secara fungsional : 1. Satgas preemtif mengemban fungsi intelejen maupun bimmas, 2. Satgas preventif mengemban fungsi sabhara maupun lalu lintas (pengaman jalur-jalur lalu lintas, evakuasi, bantuan, dan sebagainya), 3. Satgas represif (penegakkan hukum) yang mengemban fungsi reskrim, 4. Satgas kontijensi (Brimob, pasukan gabungan), 5. Satgas Pam wal VVIP/VIP (Pam obvit maupun lalu lintas), 6. Satgas bantuan (bantuan administrasi, operasional / kompi kerangka).

Pemolisian transplantasi merupakan model pemolisian yang bersifat ad hoc tatkala yang dibantu bisa segera pulih/ normal maka bisa segera ditutup/ dikembalikan.

Pembelajaran di Sespim pola penanganan emergency/ contigency policing dikaitkan dengan model pemolisian yang melandasi kebijakan nasional dan perintah presiden maupun perintah Kapolri.

Model pemolisian emergency/ contigency secara garis besar dapat dijabarkan dalam :

1. Pola pemolisiannya secara makro sampai dengan mikro dibuat model dalam panduan aman nusa satu, aman nusa dua dan aman nusa tiga.
2. Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat diprioritaskan untuk mengembalikan dan menjaga keteraturan sosial
3. Menjaga dan mendukung proses recovery dan produktifitas. Segera mengatasi tatkala ada permasalahan maupun potensi konflik sekecil apapun dengan segera dan sampai tuntas agar tidak meluas
4. Mengamankan sumber daya yang ada
5. Menjaga dan mengamankan segala sesuatu yang kontra produktif
6. Strategi mitigasi mengatasi gejolak ekonomi dalam negeri
7. Pengamanan bantuan termasuk anggaran dan pendistribusiannya
8. Menjaga dan mengamankan Investasi yang ada
9. Penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial
10. Sistem informasi untuk deteksi dini atas perubahan Iklim dan bencana alam
11. Siap dalam menangani hal hal ekstrim dan kondisi terburuk sekalipun dari evakuasi, penyelamatan sampai rehabilitasi
12. Model pemolisian penanganan berbagai ivent nasional maupun internasional
13. Pola Pengamanan Pemilu serentak
14. Pola Penanganan KKB dan KKP
15. Pola penanganan Cyber Security
16. Manajemen media
17. Pola pelayanan publik
18. Pola sinergitas TNI Polri maupun dengan para stakeholder lainnya sampai tingkat bawah.

# LEMDIKLAT MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "COMMUNITY POLICING AND ART POLICING" DI PUSDIK BINMAS [125]

Pusdik Binmas sebagai Bumi Community Policing akan mengajarkan dan mengembangkan model Community Policing dan Art Policing dalam pembelajarannya.

**Filosofi dan Strategi Community Policing**

Polisi bekerja melalui pemolisian pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada publik. Implementasi pemolisian sejak tahun 90an mulai mengembangkan community policing. Pasang surut pemahamannya menjadi dinamika implementasi pada penyelenggaraan tugas kepolisian. Community policing bukan fungsi melainkan suatu filosofi dan strategi. Ini yang sering kali dipahami sebagai fungsi. Bahkan ada yang menganggap kalau di community policingkan atau kalau dalam penyelenggaraan tugas Polri sebagai polmas (dipolmaskan) berarti diselesaikan di luar aturan hukum. Parah lagi malah sebagai ajang pemerasan atau penyuapan.

Pemahaman community policing yang keliru akan menjadi pembenaran bagi oknum polisi yang tidak peduli dengan kesusahan masyarakat bahkan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lapor polisi dipingpong sana sini. Membuat orang bingung dan kesal. Malah sudah kesusahan lapor polisi dipersulit bahkan dimintai duit. Perilaku para oknum ini menunjukan jiwa penolong dan tatkala dibiarkan

125 https://dailykepri.com/lemdiklat-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-community-policing-dan-art-policing-di-pusdik-binmas/
https://transindonesia.co/2024/12/28/lemdiklat-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-community-policing-and-art-policing-di-pusdik-binmas/

maka akan menjadi core value. Yang dapat merusak atau mencoreng citra kepolisian. Perilaku menyimpang tatkala dianggap hal biasa akan menjadi core value. Bener yen ora umum iku dianggep kleru, kleru yen umum iku dianggep bener. Benar jika tidak banyak dilakukan itu salah, salah ketika umum dilakukan dianggap benar.

Pemahaman community policing untuk diterapkan dalam polmas memang sudah berjalan namun di kalangan mahasiswa pada sekolah kepolisian atau bahkan dosennya memahami secara parsial. Pemolisian kontemporer yang dikategorikan community policing berbeda dengan community oriented policing. Sering kali ini disamakan. Community policing lebih dikaitkan adanya kesamaan persepsi antara polisi dalam warga komuniti yang dilayani karena saling mengenal dari hati ke hati. Secara filosofis community policing dapat dikategorikan sbb :

1. Polisi keberadaanya diterima dan didukung oleh warga yang dilayani dan menjadi bagian dari kehidupan mereka
2. Polisi memahami kebutuhan akan keamanan dan rasa aman dari warga yang dilayaninya
3. Polisi menyadari bahwa keberadaannya adalah sejajar dengan warga yang dilayani. Sehingga terbangun kemitraan yang dibentuk melalui wadah yang berupa forum, asosiasi atau dewan. Yang anggotanya representasi dari warga komuniti tsb.
4. Dialog antara polisi dengan warga komuniti dapat saling memahami dan keberadaan polisi dipercaya untuk menjembatani, mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
5. Polisi menjadi ikon kedekatan, kecepatan dan persahabatan
6. Keberadaan polisi dapan meminimalisir atau mengurangi ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas
7. Polisi lebih mengedepankan pencegahan
8. Keberhasilan polisi bukan sebatas pengungkapan kasus atau perkara namun juga adanya harmoni dan keteraturan sosial
9. Polisi mengimplementasikan pemolisiannya berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah
10. Polisi sebagai penolong melayani masyarakat dengan tulus dan bereaksi dengan cepat

Filosofi Community Policing secara garis besar dapat dipahami untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Community policing adalah tindakan anti premanisme termasuk juga crime in organization strategi community policing dapat dikembangkan dalam berbagai model pemolisian yang merupakan strategi berbasis wilayah, fungsi maupun dampak masalah untuk diselenggarakan di semua fungsi kepolisian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Model community policing dapat dikembangkan dalam banyak hal sesuai konteksnya, corak masyarakat dan kebudayaannya, juga dinamika perubahan yang terjadi. Satu prinsip seribu gaya. Prinsip dasar Community Policing ada pada point poin filosofi di atas yang di implementasikan dalam berbagai model pemolisiannya. Ketulusan melayani dan kecepatan bertindak menjadi ikon bahwa keberadaan polisi yang cepat dekat bersahabat ini aman, bermanfaat dan menyenangkan masyarakat.

Implementasi community policing dapat dikembangkan dalam art policing sebagai media Coolling System.

Kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban merupakan keutamaan polisi dalam pemolisiannya. Seni budaya dan pariwisata merupakan pilarnya. Di dalam masyarakat konflik dan berbagai hal yang kontra produktif akan merusak menghambat bahkan mematikan produktifitas. Kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban rusak akibat terjadinya berbagai hal yang kontra produktif antara lain :

1. Propaganda yang menyesatkan dan mengadu domba yang dibumbui ujaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan primordialisme
2. Pemberitaan dan informasi hoax
3. Pembenaran yang mengalahkan kebenaran dengan pemutarbalikan fakta
4. Black campaign
5. Premanisme di berbagai bidang dan sebagainya

Banyak hal lain yang dilakukan untuk pembodohan dan mengobok obok opini publik yang berujung konflik sosial dan chaos.

Art policing merupakan pemolisian dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata membangun cooling system untuk menyadarkan,

memberdayakan dan mengcounter atas hal hal yang kontra produktif di atas dengan daya nalar/ logika yang waras agar kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban tetap terjaga.

Art policing untuk adanya cooling system dapat dilakukan melalui media untuk :

1. Menyadarkan,
2. Menginspirasi,
3. Memotivasi,
4. Memberi solusi,
5. Mencounter issue hoax dan
6. Menghibur

Management media menjadi jembatan hati yang merupakan dialog peradaban dalam implementasi art policing antara lain :

1. Membangun portal atau web site atau bekerja sama dengan media main stream atau dengan apa saja yang dapat menjadi rujukan atas kebenaran atau sesuai fakta dalam pemberitaan.
2. Memberdayakan media sosial dengan berbagai informasi yang mencerdaskan dan menyadarkan agar tidak mudah terhasut untuk melakukan tindakan tindakan yang kontra produktif.

Di Lemdiklat Polri untuk pembelajaran dalam konteks cooling system pembelajaran melalui :

1. Model pod cast
    a. Peserta didik menampilkan keutamaan sebagai polisi
    b. Menceritakan pengalaman dan keahliannya dalam sharing pengetahuan
    c. Mendiskusikan pelajaran pelajaran di Sespim secara proaktif dan problem solving
    d. Mendiskusikan isue isue penting yang terjadi dalam masyarakat
2. Model coaching
    a. Dialog dengan para petugas di lapangan secara daring sd lini terdepan di wilayah masing masing peserta didik sebelum masuk Sespim.

b. Menyampaikan hal hal yang informatif edukatif serta inputing data dan ada dialog untuk solusinya

3. Model forum diskusi dan informasi
   a. Forum Bhabinkamtibmas
   b. Forum Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata
   c. Forum Ikatan Sakura Indonesia
   d. Forum Hukum dan Keadilan
   e. Forum Ilmu Kepolisian
   f. Forum Safety and Security dan sebagainya
4. Model membranding
   a. Kampung tertib, kampung tangguh dan sebagainya
   b. Local heroes
   c. Lomba dan pemberian penghargaan
   d. Kampung Iklim
   e. Desa Wisata dan sebagainya
5. Model expo atau pameran , FGD dan seminar
   a. Leaders Expo
   b. FGD, Seminar tentang kebhinekaan, toleransi, narkoba, korupsi dan sebagainya
   c. Pameran dan festival seni budaya
6. Model Kemitraan
   a. Kampus Kebangsaan
   b. Kemitraan dengan para stakeholders untuk membangun soft power dan smart power
   c. Bakti masyarakat dan sebagainya

Implementasi terdepan community policing ada pada Bhabinkamtibmas.

Karakter Bhabinkamtibmas :

1. Keberadaanya diterima dan didukung oleh warga yang dilayani dan menjadi bagian dari kehidupan mereka

2. Memahami kebutuhan akan keamanan dan rasa aman dari warga yang dilayaninya
3. Menyadari bahwa keberadaannya adalah sejajar dengan warga yang dilayani.
4. Mengedepankan Dialog antara polisi dengan warga komuniti dapat saling memahami.
5. Menjadi ikon kedekatan, kecepatan dan persahabatan
6. Meminimalisir atau mengurangi ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas
7. Mengedepankan pencegahan
8. Membangun Harmoni dan Keteraturan Sosial
9. Pemolisiannya berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah
10. Berjiwa Penolong melayani masyarakat dengan tulus dan bereaksi dengan cepat

Strategi Penguatan Bhabinkamtibmas;

1. Kebijakan ( political will yang kuat )
2. Kepemimpinan Yang Transformatif
3. Tim Transformasi sebagai sistem back up
4. Dukungan infrastruktur dan sistem sistem online yang berbasis elektronik
5. Adanya Call and Comand Centre sebagai Operation Room Pusat K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando Pengendalian dan Informasi)
6. Model model implementasi Bhabinkamtibmas sesuai Corak Masyarakat dan Kebudayaannya
7. Program Program Unggulan
8. Manajemen Media
9. Pilot Project
10. Monitoring Evaluasi dan Pengembangannya.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN,MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "SCIENTIFIC INVESTIGATION POLICING"DI DIKLAT RESERSE [126]

Hukum adalah ikon peradaban dan keadilan. Penegakan hukum dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk keadilan dan membamgun peradaban. Menegakan hukum bukan ajang balas dendam. Bukan semata mata mencari kesalahan dan menhalahkan, namun juga untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan. Polisi menegakan hukum sejatinya juga menegakan keadilan, karena demi semakin manusiawinya manusia. Hukum dan keadilan adalah demi kemanusiaan. Di situlah penegak hukum menunjukan pembelaannya dan keberpihakannya bagi kemanusian. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa.

Polisi menegakan hukum juga menegakan keadilan dan demi kemanusiaan, terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial, yang menjadi simbol peradaban. Hal tersebut tentu saja untuk mendukung pembangunan peradaban. Hukum ditegakan berbasis :

1. Supremasi hukum, karena hukum menjadi panglimanya.
2. Di dalam menegakan hukum keadilan menjadi yang utama dan pertama. Tatkala menegakan hukum tidak ditemukan keadilan,maka polisi dapat mengambil tindakan : diskresi, alternatif dispute resolution maupun restorative justice.
3. Pemegakan hukum dilakukan sejatinya untuk menyelesaikan konflik secara beradab, dan memiliki dampak pencegahan, agar tidak terjadi konflik yang lebih luas.

126 https://benuanews.com/lemdiklat-polri-mengajarkanmelatih-dan-mengembangkan-scientific-investigation-policingdi-diklat-reserse/

4. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah untuk membuktikan bukan untuk pengakuan tersangka ataupun mengadili. Sehingga diperlukan bukti secara makro dan makro yang berbasis pada ilmu pemgetahuan dan teknologi.
5. Polisi menegakan hukum merupakan bentuk perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada korban dan pencari keadilan.
6. Polisi menegakan hukum agar ada kepastian di dalam membangun budaya tertib dan patuh hukum. Yang juga untuk edukasi.
7. Polisi menegakan hukum secara :transparan dan akuntabel secara: moral, secara hukum, secara ainistratif, secara fungsional dan secara sosial.

Penegak hukum di dalam menegakan hukum ada etikanya sehingga jelas apa yang harus dilakukan dan jelas apa yang tidak boleh dilakukan. Di samping itu juga jelas sanksinya bila melakukan pelanggaran. Polisi di dalam menegakan hukum dan keadilan menunjukan sebagai : penjaga kehidupan,pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Tatkala sebaliknya yang terjadi adalah perusakan peradaban. peradaban dan keadilan. Penegakan hukum dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya untuk keadilan dan membamgun peradaban. Menegakan hukum bukan ajang balas dendam. Bukan semata mata mencari kesalahan dan menhalahkan, namun juga untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan. Polisi menegakan hukum sejatinya juga menegakan keadilan, karena demi semakin manusiawinya manusia. Hukum dan keadilan adalah demi kemanusiaan. Di situlah penegak hukum menunjukan pembelaannya dan keberpihakannya bagi kemanusian. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa.

Polisi menegakan hukum juga menegakan keadilan dan demi kemanusiaan, terbangun dan terpeliharanya keteraturan sosial, yang menjadi simbol peradaban.

Penegak hukum dikatakan juga penegak keadilan bukan sekedar memegang kitab yang berisi pasal pasal aturan, kewajiban maupun

sanksi lalu membacakan dan menyalah nyalahkan, namun juga melakukan bagaimana hukum ini dapat ditegakkan dipatuhi dengan kesadaran tanggung jawab dan adanya budaya disiplin patuh hukum. Keutamaan penegakkan hukum adalah untuk : kemanusiaan, keteraturan soaial dan peradaban, yang unsur unsurnyanya setidaknya mencakup untuk :

1. Menyelesaikan konflik scr beradab
2. Mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas
3. Melindungi korban dan para pencari keadilan
4. Membangun budaya patuh hukum
5. Ada kepastian
6. Edukasi

Hukum dalam suatu keadilan ini menjadi bagian sesuatu yang tidak terpisahkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegakkan hukum dituntut tegas namun humanis. Paradigma hukum dan penegakan hukum dapat dilihat dengan pendekatan :

1. Filosofis
2. Geopolitik dan geo strategis
3. Sosiologis
4. Globalisasi
5. Modernitas
6. Manajerial dan operasional
7. Pelayanan publik
8. Yuridis

Hal tsb dibangun dalam berbagai sistem sehinga proses penengakkan hukum ada bukti atau didukung alat bukti. Proses pembuktian inilah memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping sebagai alat bukti juga untuk meminimalisir sekecil kemungkinan adanya kesempatan terjadinya penyimpangan hingga

penyalahgunaan kewenangan. Maka di dalam penegakan hukum ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi satu kesatuan untuk mencapai keutamaannya. Hukum bagai pedang bermata dua tatkala ditangan orang yang keliru maka akan kontra produktif. Dengan demikian para penegak hukum di dalam menegakkan hukum dituntut adanya keadilan yang wajib mempertanggung jawabkan pekerjaannya secara : moral, hukum, administrasi, fungsional dan sosial.

Hukum sebagai ikon peradaban dapat berfungsi sebagaimana yang semestinya tatkala ada " trust" terhadap aparat penegak hukumnya maupun sistem sistem pendukungnya, sehingga masyarakat bangga tatkala patuh hukum dan bukan sebaliknya. Hukum mampu menjadi refleksi budaya bangsa dan refleksi tingkat modernitas yang hidup dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Di dalam negara yang modern dan demokratis maka acuannya antara lain dapat dilihat dari :

1. Terbangunnya supremasi hukum,
2. Hukum dan penegakkan hukum mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM,
3. Transparan
4. Akuntabel,
5. Berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat
6. Pengawasan dan pembatasan dan pertanggungjawaban penggunaan kewenangan para penegak hukum

Diskresi merupakan kebijaksanaan penegak hukum yang juga penegak keadilan. Demi : kemanusiaan, keadilan, kepentingan umum atau untuk edukasi. Landasan diskresi adalah nilai norma moralitas di luar itu menjadi potensi penyimpangan bahkan menjadi tindakan korupsi. Kebijaksanaan dlm diskresi adalah suatu ketulusan bukan pamrih atau rekayasa yang dibuat buat seolah olah baik diujungnya ada kepentingan sesuatu baik barang uang atau peluang kesempatan yang terkait dengan sumber daya.

Diskresi ini sebenarnya tidak sebatas perorangan, juga dapat diskresi birokrasi bisa juga diskresi justisia atau diskresi yang terkait restorative justice. Bisa juga dikaitkan untuk alternative dispute rosolution.

Kendali dari diskresi ada pada hati nurani dan moralitas penegak hukum untuk benar benar menunjukkan kebijaksanaanya bukan untuk memeras atau membackingi perkeliruan atau sesuatu yg ilegal.

Diskresi ini bisa digambarkan seperti kue donat ranah pada lobang tengah itulah ranah diskresi demi kemanusiaan, keadilan, kepentingan yang lebih luas dan edukasi yg dibatasi nilai, norma, etika, moral.

Diskresi pasif dapat dipahami semestinya penegak hukum bertindak tetapi tidak bertindak atau melakukan pembiaran karena menerima sesuatu atau suap. Sebaliknya diskresi aktif, yang semestinya penegak hukum tidak melakukan tindakan tetapi melakukan tindakkan karena ada keinginan atau harapan untuk mendapatkan sesuatu atau pemerasan.

Diskresi pada kebijakan publik ini merupakan suatu solusi jalan tengah untk memberikan dispensasi dengan persyaratan tertentu krn ada sesuatu dampak yang luas. Tindakan diskresi dalam kebijakan publik merupakan solusi dengan kesepakatan bersama yang merupakan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak karena ada kepentingan kemanusiaan atau bagi harkat hidup bagi banyak orang. Ini yang menjadi pertimbangan atau menjadi dasar menemukan akar masalah dan solusi yang diterima semua pihak.

Diskresi pada ranah kebijakan publik dapat juga merupakan keputusan berat yang harus diambil dengan berbagai resiko terburuknya. Namun apa yang menjadi keputusan itu merupakan sesuatu yang bijaksana yang tulus sesuai dengan landasan atau dasar diskresi tentu bukan bijaksini yang sarat kepentingan.

Penegak hukum wajib mempedomani etika profesi penyidik untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM, agar upaya paksa yang digunakan dalam penyidikan tidak untuk mengadili/ adanya kesewenang wenangan. Sehingga penyidikanya selain untuk

projustitia juga dapat untuk membangun, menyadarkan, mendidik dan membangun dengan mengimplementasikan birokrasi yang adil sehingga ada sinergitas antar pemangku kepentingan lainya bersama-sama untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Analogi di atas menunjukan bahwa ancaman tidak efektif untuk merubah perilaku. Semakin diancam semakin banyak penyimpangan. Karena ancaman sebenarnya akan menjadi sekat bagi air yang mengalir. air itu akan terus mengalir mencari peluang. "Trust but ferify" boleh percaya tetap mengawasi.

Merubah mind set adalah dengan membangun sistem, dan aturan agar perilaku berubah. Harapanya perubahan perilaku ini akan menjadi sebuah kebiasaan, yang mencerminkan kesadaran tanggung jawab dan disiplin. Polisi dalam menegakkan keadilan juga dituntut untuk mengedukasi dengan mengkondisikan dan menanamkan nilai secara implisit memberikan teladan. Disitulah kepekaan akan dihasilkan.

Polisi dalam menegakkan hukum dan keadilan diuntut kreatif dan inovatif untuk mampu mencari sistem, mencari situasi untuk merubah perilaku. Dan mampu mendapatkan keutamaan dari hal-hal yang kecil yang dilakukan mulai dari keluarga, sekolah, di tempat-tempat umum. Keutamaan-keutamaan inilah yang merupakan core value atas kesadaran, tanggung jawab dan disiplin. Membiasakan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik.

Salah satu produk kinerja kepolisian yang diharapkan masyarakat adalah penegakkan hukum yang secara signifikan dilihat dari pembuktian, pengungkapan, atau penuntasan perkara dan menyeret tersangkanya ke pengadilan. Profesionalisme polisi dalam bidang penegakkan hukum sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga, melindungi, mengatur, mendidik masyarakat agar dalam tata kehidupan sosialnya dapat berjalan saling mendukung dan melengkapi dan mampu mendukung meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Tugas polisi mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang salah satunya adalah menegakkan hukum. Agar hukum menjadi hidup dan mampu berfungsi sebagaimana yang seharusnya.

Penegakkan hukum yang dia kukan polisi dengan mempertimbangkan keadikan dan melihat faktor perbuatanya (tindakanya), pertanggung jawabannya, dan pidananya dengan membuktikan apakah tersangka benar-benar bersalah dan layak dikenai hukuman atau sanksi pidana. Dalam implementasinya, polisi memiliki kewenangan diskresi di luar jalur hukum untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan, dan edukasi. Sebaliknya, dalam menangani perkara atau kasus yang kontraproduktif dan bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktifitas bisa dilakukan penindakan dengan pengenaan pasal berlapis walaupun dalam satu peristiwa atau perkara pidana tidak boleh dijatuhi dengan hukuman yang sama.

Pemenuhan rasa keadilan dalam penegakkan hukum memang harus dimiliki dan diyakini oleh para penegak hukum. Terutama para petugas polisi, mereka tidak hanya sekadar menerapkan pasal-pasalnya tetapi memberi efek pencegahan, perlindungan korban dan para pencari keadilan, membangun kepatuhan hukum serta wibawa wibawa sebagai sandaran bagi penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pemenuhan rasa keadilan dalam penegakkan hukum oleh kepolisian antara lain:

1. Menjaga obyektifitas dan netralitas
2. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM
3. Menciptakan Transparansi
4. Menciptakan akuntabilitas kepada publik
5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
6. Bersikap profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan,
    a. cara holistik atau sistemik,
    b. cara membuktikan makna yang ada dibalik gejala atau fakta.
    c. bersikap proaktif,
    d. bertumpu problem solving,
    e. bersikap inovatif dan kreatif, dan

f. menempatkan SDM berkeahlian.

7. Menjadi bagian dari pusat unggulan (SDM, program, data, jejaring, sarpras, dan anggaran).
8. Melahirkan produk kinerja yang dirasakan signifikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menyelenggarakan penegakkan hukum, polisi tidak semata-mata mengungkap perkara dan membuktikannya sesuai dengan pasal-pasal undang-undangan peraturan-peraturan yang berlaku tetapi juga wajib memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kewajiban inilah yang merupakan sandaran atau landasan moral dan etika kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya. Artinya, polisi harus cerdas, bermoral, modern, transparan, akuntabel, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi mengimplementasikannya adalah sebagai berikut:

1. Ada political will yang kuat,
2. Komitmen moral dari para pemimpin pemimpinnya (di semua lini)
3. Menyiapkan SDM yang berkarakter (memiliki komitmen/ kompetensi/keunggulan) yang berbasis kompetensi
4. Menyiapkan infrastruktur dan sistem-sistem pendukungnya
5. Membentuk tim transformasi sebagai kendali mutu, back up dan sistem kontrol
6. Menyusun piranti-piranti lunak (hukum, pedoman, SOP dan sebagainya)
7. Menyusun program-program unggulan
8. Menentukan pilot project
9. Monitoring dan evaluasi

Di dalam proses penegakan hukum dan keadilan di era revolusi industri 4.0 merupakan implementasi Electronic policing sebagai

Model Pemolisian di Era Digital dengan adanya :

1. Sinergitas pemolisian internal maupun dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sistem virtual untuk memberikan pelayanan kepada publik yang terkait :Keamanan, Keselamatan, Hukum, Afministrasi, Informasi dan Kemanusiaan
2. Sistem sistem IT untuk mendukung pelayanan publik yang berstandar prima, dengan standar : Kecepatan, Ketepatan, Keakurasian, Transparansi, Akuntabilitas, Informatif, Mudah diakses
3. SIstem IT yang dibangun mampu untuk: Monitoring, Inputing data, Analisa data, Algoritma (dalam infografis info statistik dan info virtual yang merupakan prediksi antisipasi dan solusi), Quick response time
4. Para petugas memiliki kompetensi dan sense memberikan pelayanan publik secara profesional, cerdas, bermoral dan modern
5. Mengatasi kejadian yang kategori latihan dengan skenario untuk mengatasi Masalah keamanan, Masalah keselamatan, Gangguan dalam kehidupan sosial Melalui sistem K3i
6. Mendukung E goverment ( SPBE) melalui e policing
7. Mendukung Model Smart City
8. Dapat dikaitkan dengan big data system maupun one stop service system
9. Mendukung program big data system dan One Stop Service
10. Wujud akuntabilitas kepada publik dalam membangun inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan creative break trough

Selain E Policing penegak hukum juga memikirkan tentang Forensic policing untuk menangani new normal era.

Pemolisian dalam pendekatan forensik (forensic policing) merupakan model pemolisian untuk menghadapi berbagai permasalahan keteraturan sosial atas serangan, gangguan maupun kejahatan yang di desain sedemikian rupa dari berbagai cara yang berbasis nubika (

nuklir, biologi, kimia, fisika) maupun dari berbagai masalah sosial ( idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, dsb).

Forensic cops untuk mengimplementasikan forensic policing dbangun berbasis polisi super/ super cops yaitu polisi dengan pemolisiannya memiliki kompetensi berkualitas tinggi yang mampu mengatasi berbagai masalah keteraturan sosial dengan dampak luas dan bereskalasi tinggi. Juga mampu memberikan pelayanan kepada publik secara prima dalam situasi emerjensi maupun kontijensi.

Di era digital polisi super ini diharapkan mampu bekerja dalam smart policing yang mengharmonikan antara conventional policing, electronic policing maupun forensic policing untuk menghadapi berbagai gangguan kejahatan : aktual, virtual maupun secara forensik.

Secara aktual dapat dikategorikan dalam hal pemolisian yang manual atau bisa dikategorikan konvensional dan masih bertemu face to face atau less technology. Pemolisian secara virtual dapat dikategorikan model E Policing atau pemolisian secara elektronik yang berbasis pada back office, aplication ( dengan artificial intellegence) dan net work ( berbasis internet of thing) untuk mendukung terbangunnya big data system dan one stop service system.

Pemolisian forensik dalam konteks kenormalan baru dapat dikembangkan dalam berbagaimodel pola pemolisiannya maupun penyiapan petugas kepolisian yang berbasis replika genetika.

Polisi super dalam konteks aktual, virtual dan forensik merupakan basis bagi polisi dan pemolisiannya karena dalam era digital sekalipun cara aktual masih diperlukan dan kemampuan dasar pada penanganan kejahatan konvensional diperlukan polisi yang tangguh secara fisik atau otot prima. Pemolisian virtual mapun forensik diperlukan otak atau kemampuan secara intelejensia tinggi untuk mampu menghadapi kejahatan siber maupun kejahatan biologi, kimia nuklir maupun kejahatan di era kenormalan baru. Pelemahan atas pertahanan suatu bangsa dapat dimulai menggerus dari sumber dayanya, keamanan dan rasa aman. Masalah nuklir biologi kimia dan fisika ( nubika) maupun sosial pun menjadi trend kejahatan baru yang dapat menlumpuhkan

produktifitas masyarakat dan memicu terjadinya konflik sosial yang besar.

Sebagai contoh masa pandemi covid 19 yang melanda hampir dibseluruh dunia mampu melemahkan bahkan mematikan secara fisik maupun psikis. Kekuatan polisi super ini tentu juga dituntut memiliki spirit sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban sekaligus pejuang kemanusiaan.

Membangun polisi super tentu memerlukan energi besar dari proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, prmerupakan pemikiran prof satjipto rahardjo yang memikirkan bagaimana seorang petugas polisi memiliki otak otat dan hati nurani sebagai bhayangkara sejati ( penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan sbg pejuang kemanusiaan).

proses rekrutmen, proses pembentukan, proses edukasi, proses penggunaannya, proses pemeliharaan dan perawatan hingga proses pengakhiran dinasoses pemeliharaan dan perawatan hingga pengakhiran dinas. Polisi super dikembangkan dan dibangun secara O2H ( otak otot dan hati nuraninya).

Pemolisian di era digital kita dapat mengenal dan memahami E policing atau pemolisian yang on line dan berbasis elektronik. Sistem big data menjadi bagian one stop service. Di samping E policing kita perlu memahami dan mengembangkan forensic policing.

Forensic policing dibangun dan dikembangkan berbasis pada ilmu pengetahuan secara makro maupun mikro sebagai model pemolisian yang berkaitan dengan nuklir, biologi, kimia, fisika (nubika), ilmu sosial maupun ilmu ilmu lainnya.

Masalah keteraturan sosial yang terganggu atau terhambat bahkan rusak akibat nubika atau dampak masalah sosial perlu penanganan secara profesional tidak sebatas kulitnya melainkan sampai dengan tingkat yang paling mendasar. Dampak dari nubika dan sosial sangat luas yang berdampak pada hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Petugas kepolisian forensik ditumbuhkembangkan secara komprehensif mulai dari rekrutmen pendidikkan penggunaan

hingga pengakhiran dinasnya. Satuan tugas identifikasi, satuan tugas nubika, laboratorium forensik maupun penelitian dan pengembangan dapat menjadi pendukung forensic policing.

Di masa kenormalan baru paska pandemi covid 19 sekarang ini bisa dikatakan kegiatan sosial kemasyarakatan terdampak bahkan ada yang mati sama sekali tidak lagi bisa bertahan. Berbagai model pandemi atau kejahatan forensik yang mematikan manusia sebagai mahkluk sosial.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "ADMINISTRATION STRATEGIC POLICING" DI PUSDIK ADMINISTRASI [127]

Administrasi kepolisian bertujuan untuk Pelayanan Kepolisian yang berstandar prima. Dalam konteks administrasi kepolisian untuk membangun Petugas Polisi yang Profesional Cerdas Bermoral dan Modern. Yang memahami Keutamaan Polisi dalam Pemolisiannya untuk: Kemanusiaan, Keteraturan Sosial dan Peradaban.

Pelayanan Kepolisian mencakup :

1. Pelayanan Keamanan
2. Pelayanan Keselamatan
3. Pelayanan Hukum
4. Pelayanan Administrasi
5. Pelayanan Informasi
6. Pelayanan Kemanusiaan

Sistem administrasi mendukung Pelayanan kepolisian atas laporan atau aduan masyarakat yang berstandar Prima ( Cepat, Tepat, Akurat, Transparan, Akuntabel, Informatif dan Mudah diakses )

Institusi yang literasinya memadai maka administrasinya akan menjadi pilar profesionalisme dalam pelayanan publik yang berstandar prima, sekalipun tidak diawasi, dipaksa atau diancam. Literasi menunjukan core value yang aktual sejalan dengan yang ideal.

127 https://bitnews.id/berita/nasional/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-administration-strategic-policing-di-pusdik-administrasi/

Tingkat kesadaran, tanggung jawab maupun disiplinnya tinggi. Pola bekerjanya untuk mencapai mewujudkan keutamaannya.

Keutamaan polisi dslam pemolisiannya adalah bagi : kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Dengan demikian model model pemolisian secara : preemtif, preventif, represif maupun rehabilitasi tingkat keberhasilan dalam pelayanan publik di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, unformasi maupun kemanusiaan dilihat dan di ukur dari standar operasional procedure nya ( SOP).

SOP terdiri dari :

1. Job description dan Job Analysis
2. Standar Keberhasilan Pelaksanaan Tugas
3. Sistem Penilaian Kinerja
4. Sistem Reward and Punishment
5. Etika Kerja

Literasi secara umum dipahami adanya perubahan mind set untuk mengerjakan tugas pokoknya dengan kesadaran tanggung jawab dan disipkin dengan kualitas prima.

Merubah mind set memerlukan proses dan perjuangan panjang, langkah langkah membangun literasi yang memadai setidaknya mencakup :

1. Kebijakan yang menjadi political will yang mendukung reformasi birokrasi khususnya secara kultural
2. Pemimpin yang transformatif yang mampu menjadi ikon untuk perubahan
3. Menerapkan Strategi Strategi Membangun Birokrasi yang Rasional
    a. Bidang Administrasi yang mencakup: perencanaan, SDM, Logistik dan Anggaran
    b. Bidang Operasional : Rutin, Khusus, Kontijensi
    c. Capacity Building : Kreatifitas dan Inovasi

4. Membangun Sistem Pelayanan Publik yang Prima
5. Membangun Tim Transformasi sebagai Tim Manajemen ( back up system)
6. Membangun sistem sistem pelayanan secara on line yang berbasis elektronik
7. Menyiapkan Aturan, Hukum sd SOP sebagai acuan dan landasan kerja
8. Membuat Program Program Unggulan
9. Menerapkan pada Pilot Project
10. Monitoring, Evaluasi, penanganan kelemahan atau kesalahan dan Mengembangkan bagi yang berhasil

Point point di atas bisa dikembangkan sesuai fungsi, corak masyarakat dan kebudayaannya. Literasi tidak sebatas yang benda tetapi juga yang tak benda.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "SMART POLICING" DI PUSDIK INTEL [128]

Disrupsi di era vuca (volatility, unpredictable, complexity and ambiguity) selain cepat juga berdampak pada berbagai produktifitas dalam kehidupan juga pada keteraturan sosial. Tatkala pengendalian atau penanganan atas disrupsi tidak mampu mengimbangi atau tertinggal maka berbagai hal yang kontra produktif dan terganggunya keteraturan sosial akan bermunculan.

Tatkala bermunculan isu di era digital akan ada serangan yang berdampak gawat darurat atau emerjensi misalnya situasi menjadi "no electric dan no internet" tentu akan banyak masalah keteraturan sosial, yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Di sinilah perlu ada pemikiran bagaimana polisi dan pemolisiannya mampu menangani atau mengatasi disrupsi dengan berbagai dampaknya bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, secara proaktif dan problem solving.

Pada era digital atau revolusi industri 4.0 tata kehidupan sosial banyak bergantung dari listrik maupun internet dan sistem sistem aplikasi on line yang berbasis elektronik. Tatkala kenormalan baru serangan forensik muncul dalam berbagai hal yang berdampak chaos. Polisi dalam pemolisiannya tetap dituntut untuk bertugas secara: profesional, cerdas, bermoral dan modern dan fungsional atau smart.

128 https://transindonesia.co/2024/12/26/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-smart-policing-di-pusdik-intel/

Model smart policing merupakan model pemolisian yang mampu model orkestra yang mengharmonikan antara pemolisian konvensional, pemolisian elektronik maupun pemolisian forensik.

Smart policing model pemolisian untuk mengatasi berbagai masalah kontra produktif yang konvensional, masalah masalah siber atau virtual di era digital juga masalah masalah forensik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas model smart policing dapat diimplementasikan dengan model pendekatan wilayah, model fungsi, model dampak masalah pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Yang diimplementasikan dalam operasi kepolisian yang bersifat rutin, bersifat khusus maupun kontijensi.

Fungsi intelejen secara singkat dapat dipahami untuk: pengumpulan data, analisa data, produk dan networking. Semua itu untuk menemukan algoritma sebagai pola yang berulang secara terstruktur dari waktu ke watu untuk menghadapi sesuatu fenomena.

Wujud algoritma dapat berupa info grafis, info statistik atau info virtual lainnya. Yang dapat diisi atau dimainkan dalam suatu komunikasi, informasi secara langsung atau media. Yang dapat memprediksi, mengantisipasi dan memberi solusi.

Di era post truth media menjadi ruang komunikasi dan informasi yang tanpa sekat batas ruang dan waktu. Apa saja, di mana saja, kapan saja bahkan siapa saja bisa. Konten menjadi penting untuk berbagai tujuan. Operasi intelejen sejatinya operasi pencegahan.

Issue yang diusung dapat untuk menstimuli, memotivasi, memberi solusi sampai memprovokasi. Algoritma dapat dimainkan sesuai kebutuhan atau keinginan si pembuatnya.

Permainan algoritma berbasis pola waktu. Baik maupun buruk sesuatu yang menjadi latar belakang yang polanya sama untuk menggiring opini publik. Permainan algoritma media bisa seperti senjata cakra yang terus berputar mencari sasaran.

Apa yang di sasar tentu bukan satu bisa dua, tiga atau lebih. Data menjadi pilar algoritma untuk membuat konten. Sistem analisa dan

pengolahan menjadi berbagai produk dalam issue yang akan di share. Algoritma di media sosial bagai kilat "clap" singkat padat berulang dan terus dibarukan dari waktu ke waktu.

Kekuatan algoritma dalam mempengaruhi opini publik dilihat daru berapa banyak yang melihat, yang menyukai, yang menshare kembali atau memberi tanda tanda lainnya. Semakin banyak hal di atas dilakukan para netizen maka algoritma akan semakin kuat mempengaruhi dan menggiring opini publik.

Algoritma kesahihannya bukan pada benar atau salah, bukan baik atau buruk melainkan berapa banyak yang mempercayai. Era digital data dan sistem sistem pada back office, application dan network saling terkait.

Kekuatan ada karena ada energinya, algoritma kuat karena ada soft power dan smart powernya yang akan dapat diatasi melalui smart policing.

10 Point Smart Policing yang dapat diajarkan di Pusdik Intel antara lain:

1. Mengharmonikan dan dapat menyatukan antar model pemolisian (policing)
2. Siap memprediksi, menghadapi, merehabilitasi berbagai permasalahan yang mengganggu keteraturan sosial
3. Model pemolisian yang mampu berfungsi untuk lingkungan dan berbagai masalah konvensional, era digital, permasalahan yang berkaitan dengan forensik kepolisian
4. Dapat diimplementasikan tingkat lokal, nasional bahkan global
5. Mengatasi berbagai gangguan keteraturan sosial yang by design
6. Mengatasi keteraturan sosial dalam dunia virtual
7. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik secara prima dalam one stop service
8. Prediktif, proaktif dan problem solving

9. Menjembatani dan mengatasi dalam berbagai situasi dan kondisi emerjensi maupun kontijensi
10. Diawaki petugas polisi yang profesional, cerdas bermoral dan modern.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "COMMUNITY POLICING DALAM MODEL MOTHER POLICING" DI SEPOLWAN [129]

Mother policing merupakan model pemolisian dengan pendekatan kasih ibu. Polisi melalui pemolisiannya berupaya bagi kemanusiaan keteraturan sosial maupun peradaban. Mother policing salah satu model pengembangan community policing dalam mentransformasi kesadaran, tanggung jawab maupun disiplin bagi terbangunnya budaya patuh hukum melalui dialog peradaban dalam tindakan : preemtif, preventif, represif maupun rehabilitasi. Spirit kasih ibu menjadi model harmoni dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kasih ibu yang tulus dalam melayani, melindungi, mengayomi yang rela berkorban bagi anak anaknya ini yang menjadi model spirit pemolisian. Ibu dengan penuh kasih sayang berjuang bagi kemaslahatan anak anaknya, demikian halnya polisi bagi meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Program program pemolisian dengan model mother policing, diharapkan polisi berupaya memahami, melayani, bahkan berkorban bagi warga yang dilayani. Implementasi mother policing ini bisa memberdayakan kearifan lokal, yang sesuai corak masyarakat dan kebudayaannya. Dapat memberdayakan potensi maupun sumber daya yang ada, misalnya : guru, akademisi, pakar, media, kelompok kelompok kemasyarakatan, sektor bisnis, DPRD, Pemerintah Daerah dsb. Mkther policing dapat diimplementasikan melalui : edukasi, training dan coaching secara luring maupun daring.

129 https://transindonesia.co/2024/12/26/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-community-policing-dalam-model-mother-policing-di-sepolwan/

Mother policing dapat diimplementasikan melalui program program :

1. Polisi sahabat anak
2. Diseminasi guru
3. Polisi cilik
4. Taman lalu lintas
5. Cara aman ke sekolah
6. Art policing
7. Pembinaan komunitas
8. Ibu peduli keselamatan dan keamanan
9. Pameran
10. Sosialisasi kamtibmas
11. Safety driving centre
12. Program program cooling system
13. Forum atau dewan sebagai wadah atau board bagi pemolisian
14. Lomba maupun kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan
15. Rekayasa sosial / social engineering
16. Police go to campus
17. Police go to school
18. Berbagai program dan kegiatan kemitraan
19. Operasi kepolisian yang terpusat maupun kewilayahan
20. Kegiatan rutin yang ditingkatkan
21. Berbagai model pemolisian lainnya

Model pemolisian dengan spirit kasih ibu mengedepankan dialog dalam mencapai keutamaan dalam pemolisian ( kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban ). Di era vuca, model pemolisian tidak sebatas memanage melainkan mengharmonikan model orkestra. Para pemimpin dalam mengharmonikan pemolisian setidaknya mampu sebagai arranger maupun dirijen untuk terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial, tegaknya hukum, terbangunnya budaya patuh hukum,dan mampu memberikan pelayanan kepada publik secara prima.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "POLICE STUDIES BASED ON COMMUNITY POLICING" DI SEKOLAH POLISI NEGARA [130]

Pendidikan di SPN latar belakangnya adalah untuk mendidik calon petugas polisi tingkat bhayangkara maupun brigadir untuk menjadi :

1. Penjaga Kehidupan
2. Pembangun Peradaban
3. Pejuang Kemanusiaan

Keutamaan tugas polisi adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Memanusiawikan manusia atau semakin manusiawinya manusia ditanamkan di dalam pembelajaran di SPN.

Pendidikan di SPN landasan utamanya moralitas yang dibangun dengan pendekatan kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Pendidikan di SPN tegas dan humanis untuk mampu menghadapi berbagai masalah atau tantangan atas hidup atau kehidupan sekalipun ditujukan bagi kemanusiaan. Pendidikan di SPN bagi semakin manusiawinya. Pendidikan dimulai dari gurunya atau pengajarnya. Peran dan fungsi guru berpengaruh besar atas hasil didik dari pendidikan. Kualitas guru bukan sebatas pada intelektualnya namun juga moralitasnya.

Guru menjadi kunci bagi keberhasilan suatu pendidikan. Pendidikan yang mendidik setidaknya dapat dilihat dari :

130 https://transindonesia.co/2024/12/26/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-police-studies-based-on-community-policing-di-sekolah-polisi-negara/

1. Lembaga atau wadah yang merupakan institusi pendidikan
2. Implementasi atas visi dan misi pendidikan yang dilaksanakan berbasis pembangunan karakter secara konsisten dan konsekuen
3. Kualitas guru sebagai tenaga pengajar adalah orang orang yang mampu menjadi ikon dan layak dijadikan panutan atau pikiran perkataan dan perbuatannya
4. Sistem pengajaran pelatihan dan pengasuhannya yang berbasis pada standar standar pendidikan yang universal dan global walaupun juga menggunakan kearifan lokal
5. Kurikulum pelajarannya berbasis pada pencerdasan intelektual, emosional dan sosial
6. Pola pengajarannya dibangun dengan landasan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin
7. Infrastruktur dan sistem sistem pendukungnya atau sarana prasarananya untuk mendukung proses belajar berlatih dengan pendekatan holistik dan sistemik yang dinamis sesuai dengan kebutuhan kekinian
8. Tradisi dan nuansa akademis yang membudaya dlm lingkungan lembaga pendidikan
9. Ada wadah bagi penampungan pemikiran dan ide ide kreatif seperti jurnal maupun penerbitan
10. Kualitas rekrutmen peserta didik berbasis pada kejujuran transparan akuntabilitas secara : moral, secara administrasi, secara hukum yang berbasis pada standar nasional maupun internasional
11. Para peserta didik dapat merasakan dirinya tercerahkan
12. Prestasi peserta didik sebagai hasil didik yang fungsional dan mampu mjd ikon yang berkarakter
13. Pengakuan dan apresiasi dari masyarakat luas atas prestasi dan kinerjanya yang profesional cerdas bermoral dan modern

Proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan melalui cara apa saja. Di era digital labirin ruang dan waktu terbuka lebar tidak lagi tersekat

sekat. Mind set pendidikan harus mulai dirubah dan bukan semata mata pada ruang ruang kelas dan menghafal atau mendengar apa yang dikatakan para guru nya.

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di era digital dan kehadiran artificial intellegent akan menggeser pola pembelajaran. Lembaga pendidikan untuk tetap dapat menjamin kualitas atau hasil didik yang cerdas dan tercerahkan maka proses belajar dibangun atas dasar spiritualitas, moralitas, kesadaran, tanggung jawab, disiplin dan budaya serta kajian ilmu kepolisian (Police Studies). Baik dari penyelenggara atau lembaga pendidikan maupun para guru sampai kepada sistem pengajarannya. Kunci. Bagaimana mampu merubah mind set program belajar mengajar dari cara konvensional ke arah kekinian yang boleh dikatakan aktual maupun virtual. Reformasi.

Point Dasar kajian ilmu kepolisian yang dapat diterapkan dalam Pendidikan Pembentukan Petugas Polisi dalam berbagai tingkatan (tingkatan bhayangkara, tingkatan brigadir) di SPN (Sekolah Polisi Negara):

1. Mendidik calon polisi yang : profesional, cerdas, bermoral dan modern.
2. Kurikulum pendidikan yang setidaknya mencakup:
    a. Konsep teori yang berkaitan dengan :
        1) Masalah Sosial
        2) Keteraturan Sosial
        3) Kejahatan dan Penanganannya
        4) Hukum, Penegakan Hukum dan Keadilan
        5) HAM
        6) Polisi dan Pemolisiannya
        7) Administrasi,
        8) Operasional
        9) Masyarakat dan Kebudayaannya

10) Teknologi dan Informasi

11) Teknis dan teknik penyelidikan dan penyidikan

12) Teknis dasar tugas kepolisian umum

13) Etika publik sebagai pengajaran anti korupsi

14) Pembelajaran administrasi kepolisian

15) Pembelajaran operasional kepolisian yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi. Dsb

b. Studi kasus dan problem solving merupakan model simulasi penangan berbagai masalah yang dihadapi polisi dalam tugas di lapangan.

c. Issue issue penting yg terjadi dalam masyarakat

d. Praktek lapangan

e. Pembinaan mental spiritual, olah raga, seni budaya

f. Pengabdian masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Penjabaran point A sd F sbb:

3. Pendidikan dasar secara konseptual atau teoritikal, studi kasus, berlandaskan pada ilmu kepolisian

4. Issue issue penting yg terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan permasalahan aktual yang sedang menjadi perhatian publik, perhatian pimpinan maupun pemberitaan utama dari media main stream maupun media on line, media sosial yg mencakup pada;

a. Ideologi

b. Politik

c. Ekonomi

d. Sosial budaya

e. Keamanan

f. Pertahanan

g. Hukum

h. Teknologi informasi

Hal inipun dibahas scr manajerial dan operasionalnya.

5. Sistem Pelayanan Publik secara virtual maupun aktual pelayanan di bidang : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi dan kemanusiaan.

6. Praktek lapangan

Praktek lapangan dibuat model aplikasi maupun simulasi seperti :

a. Penerimaan laporan

b. Inputing data dan sistem komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi pada back office atau operation room

c. Penanganan TKP ( tempat kejadian perkara), sket TKP, Berita acara TKP, rekonstruksi baik pra saat maupun pasca.

d. Teknis penyelidikan perkara pidana

e. Teknis penyidikan perkara pidana

f. Teknis sistem penjagaan pengaturan pengawalan dan patroli

g. Komunikasi sosial

h. Teknis penindakkan pelanggaran

i. Teknis penanganan kecelakaan lalu lintas

j. Teknis penanganan gangguan keteraturan sosial

k. Teknis pengamanan kegiatan kemasyarakatan

l. Teknis pengamanan kegiatan protokoler, kegiatan politik

m. Teknis pengendalian massa

n. Pelajaran Bela diri ( bela diri kepolisian, judo, kendo, karate, tarkwondo dll)

o. Peraturan baris berbaris ( PBB)

p. Kebersihan dan kepedulian lingkungan (Ekologi dan Social Engineering )

q. Gaya hidup sbg petugas kepolisian dan sebaganya dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan

7. Pembinaan mental spiritual, olah raga, seni budaya
   a. Pembinaan mental spiritual
      1) Kegiatan keagamaan
      2) Meditasi dan olah batin
      3) Kegiatan kemanusiaan
   b. Pembinaan olah raga
      1) Perorangan
      2) Team
      3) Kompetisi
   c. Pembinaan seni budaya
      1) Seni musik
      2) Seni tari
      3) Seni drama, panggung dan pertunjukan
      4) Seni sastra dan sebagainya
8. Pengabdian masyarakat dan sosial
   a. Bakti sosial pada tempat tempat publik
   b. Latihan integrasi dengan mahasiswa atau lembaga pendidikan lainnya
   c. Pengkajian maupun penelitian
   d. Kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk :
      1) Membangun soft power, smart power dan jejaring
      2) Penanganan lokasi yang menjadi police hazard
      3) Live in dan sebagainya
9. Melatih Petugas Polisi untuk mengimplementasikan : Polisi model konvensional, Polisi Siber dan Polisi Forensik :

a. Petugas IT pada Back Office maupun Analisa yang menghasilkan Algoritma maupun Index Keamanan

b. Petugas administrasi

c. Petugas pengajar (dosen, instruktur/ pelatih)

d. Petugas Forensik

e. Petugas Laboratorium

f. Analis dan Auditor

g. Pengkaji dan Peneliti

10. Tim Transformasi atau Tim Back Up atau Tim Manajemen untuk monitoring dan evaluasi.

Community policing merupakan model pemolisian kontemporer lebih dikaitkan adanya kesamaan persepsi antara polisi dalam warga komuniti yang dilayani karena saling mengenal dari hati ke hati.

Secara filosofis dan strategis community policing dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Polisi keberadaanya diterima dan didukung oleh warga yang dilayani dan menjadi bagian dari kehidupan mereka
2. Polisi memahami kebutuhan akan keamanan dan rasa aman dari warga yang dilayaninya
3. Polisi menyadari bahwa keberadaannya adalah sejajar dengan warga yang dilayani. Sehingga terbangun kemitraan yang dibentuk melalui wadah yang berupa forum, asosiasi atau dewan. Yang anggotanya representasi dari warga komuniti tsb.
4. Dialog antara polisi dengan warga komuniti dapat saling memahami dan keberadaan polisi dipercaya untuk menjembatani, mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.
5. Polisi menjadi ikon kedekatan, kecepatan dan persahabatan
6. Keberadaan polisi dapan meminimalisir atau mengurangi ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas

7. Polisi lebih mengedepankan pencegahan
8. Keberhasilan polisi bukan sebatas pengungkapan kasus atau perkara namun juga adanya harmoni dan keteraturan sosial
9. Polisi mengimplementasikan pemolisiannya berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah
10. Polisi sebagai penolong melayani masyarakat dengan tulus dan bereaksi dengan cepat

Filosofi dan strategi Community Policing secara garis besar dapat dipahami untuk kemanusiaan, keteraturan sosial dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan terjaminnya keamanan dan rasa aman warga masyarakat. Community policing adalah tindakan anti premanisme termasuk juga crime in organization strategi community policing dapat dikembangkan dalam berbagai model pemolisian yang merupakan strategi berbasis wilayah, fungsi maupun dampak masalah untuk diselenggarakan di semua fungsi kepolisian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

# LEMDIKLAT POLRI MENGAJARKAN, MELATIH DAN MENGEMBANGKAN "ROAD SAFETY POLICING" DI PUSDIK LANTAS [131]

Mengapa perlu dibangun model Road Safety Policing dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcar Lantas?

Pekerjaan polantas melalui pemolisian untuk mencapai tujuan road safety dan mengimplementasikan UU LLAJ. Standar keberhasilannya dapat diukur melalui algoritma road safety yang mampu menunjukkan:

1. Tingkat kualitas keamanan lalu lintas
2. Tingkat keselamatan lalu lintas
3. Tingkat ketertiban
4. Tingkat kelancaran
5. Tingkat kualitas keselamatan berlalu lintas
6. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan
7. Terbangunnya budaya tertib
8. Pelayanan yg prima di bidang llaj
    a. Pelayanan keamanan
    b. Pelayanan keselamatan
    c. Pelayanan hukum
    d. Pelayanan administrasi

131 https://transindonesia.co/2024/12/27/lemdiklat-polri-mengajarkan-melatih-dan-mengembangkan-road-safety-policing-di-pusdik-lantas/

e. Pelayanan informasi

f. Pelayanan kemanusiaan

Semua itu pengukuranya ditunjukkan melalui algoritma yg berbasis info grafis info statistik info virtual yg on time real time dan any time.

Adapun landasan dasar pemolisiannya dalam memanage road safety adalah melalui :

1. Manajemen kebutuhan
2. Manajemen kapasitas
3. Manajemen prioritas
4. Manajemen kecepatan
5. Manajemen emergensi

Manajemen di atas diimplementasikan pada fungsi kepolisian dalam menangani lalu lintas melalui bidang :

1. Edukasi yang dikembangkan pd literasi road safety
2. Engineering yang berbasis pd penanganan black spot trouble spot, road safety kawasan ( perbatasan, hutan perkebunan pertanian, industri, lintasan, perkotaan, rawan bencana dll ). Selain itu juga untuk membuat model bagi antar moda transportasi angkutan umum, angkutan sungai danau dan penyeberangan, kajian jqlqn toll, dan beebagai lokasi yg dpt dikembangkan mjd rekayasa jalan.
3. Penegakkan hukum proses penegakkan hukum berbasis pd big data dan sistem2 etle, e sidik
4. Regident registrasi dan identifikasi kendaraan maupun pengemudi untuk : a. memberikan jaminan legitimasi keabsaan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor, b. Legitimasi pengoperasionalanya, c. Forensik kepolisian, d. Mendukung penegakkan hukum, traffic attitude record dan de merit point syste., e. Memberikan pelayanan di bidang lla dg standar prima.

5. K3i (komunikasi komando pemgendaliaan koordinasi dan informasi) yang mampu memantau dan memberikan pelayanan yg cepat dalam berbagai situasi baik rutin khusus maupun kontijensi.

6. Analisa dampak lalu lintas ( andalalin)

   Secara teknis andalalin mencakup :

   a .Cara pemetaan wilayah dan pengumpulan data sensus atau data dr stake holder maupun data di lapangan

   b. Penggunaan alat2 pemetaan manual maupun elektronik

   c. Peta data dan cara menganalisa dg mempertimbangkan yang berbasis pd :

      - Kebutuhan
      - Kapasitas
      - Prioritas
      - Kecepatan
      - Emergensi

   d. Hasil analisa berupa prediksi antisipasi dan solusi bagi lalu lintas pd saat rutin atau ada hal2 khusus maupun kontijensi

   e. Konsep dasar andalalin adalah smart city. Unsur unsur smart city dijadikan landasan pengkajiannya.

   f. Laporan atau produk dapat dijadikan bahan masukan maupun untuk jurnal

   g. Panduan penegakkan hukum atas pelanggaran andalalin

      Andalalin ini bs diarahkan ke Kawasan : industri bisnis perbatasan perkebunan hutan pariwisata dll, Lokasi black spot dan trouble spot, Lintasan, Perkotaan, Jaringan lalu lintas antar moda transportasi angkutan umum, ASDP

7. Kemitraan antar pemangku kepentingan melalui asosiasi atau forum LLAJ

8. Korwas PPNS

Program Program Dasar bagi Polisi menangani lalu lintas di era digital antara lain :

1. Road Safety Policing
2. IT for Road Safety
    a. TMC (Traffic Management Centre)
    b. SSC (Safety And Security Centre)
    c. ERI ( Electronic Registration and Identification)
    d. SDC ( Safety Driving Centre)
    e. Intan ( Intellegent Traffic Analysis)
    f. ETLE ( Electronic Traffic Law Enforcement)
    f. TAR ( Traffic Attitude Record)
    g. DMPS ( De Merit Point System)
    h. Smart Management
    i. IRSMS ( Integrated Road Safety Management System) / sistem data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
3. Literacy road safety
4. Road safety coaching
5. Intellegent road safety media management ( IRSMM)
6. Algoritma road safety
7. Road safety for tourism
8. Road safety border
9. Road safety high way police
10. Big data
11. One gate service system
12. Cyber cops
13. Road safety research and development

14. Safety driving/ riding centre
15. Sistem pengamanan kota
16. Emergency policing

Smart city menjadi model atas sistem yang cerdas atau fungsional dalam suatu kota untuk keamanan, kenyamanan, keselamatan, keteraturan sosial dan berbagai pelayanan publik yang prima. Model smart city dengan pendekatan E policing merupakan model implementasi pemolisian yang presisi yang mendukung SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik).

Smart city dengan pendekatan E policing berbasis IT for road safety dengan back office, application yang berbasis AI ( artificial intellegent ) dan net work yang berbasis IoT (internet of Think ) untuk memberikan pelayanan : keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan.

10 Point Pentingnya Smart City dalam Pendekatan Road Safety Policing

1. Mendukung SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik )
2. Model E Policing pada Fungsi Lalu Lintas
3. Didukung dg IT for Road Safety
4. Smart living and smart mobility
5. Quick Response Time
6. Berbasis Big Data System
7. One Stop Service
8. Pelayanan berstandar Prima
9. Sinergitas dengan para pemangku kepentingan lainnya
10. Mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat

Smart city dengan pendekatan E policing merupakan sistem yang mendukung berbagai program pemerintah maupun stakeholder lainnya. Dalam pendekatan road safety policing, program smart city

dapat mendukung RUNK (rencana umum nasional keselamatan) dengan divisi sebagai berikut :

1. TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung road safety management
2. SSC (Safety And Security Centre) untuk mendukung safer road
3. ERI ( Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer Vehicle
4. SDC ( Safety Driving Centre) untuk mendukung safer people
5. Intan ( Intellegent Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care

Sistem tersebut dioperasionalkan melalui smart management, yang dapat dijabarkan dalam : manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan manajemen emergency,

Smart city dengan pendekatan E policing dibangun untuk mendukung program program pemerintah antara lain :

1. ERP ( Electronic Road Pricing)
2 ETC ( Electronic Toll Collecting )
3 E Parking
4. E Banking
5. E samsat / Samsat digital
6. Punnic botton
7. Call and comand centre
8. Untuk mengatasi kondisi Emergency, maupun kontijensi
9. Big data system
10. One stop service

Smart city dalam sistem operasionalnya didukung berbagai program salah satunya ETLE ( electronic traffic law enforcemet) yang

dikembangkan pada program TAR ( traffic attitude record) dan de merit point system

Smart city merupakan sistem pengamanan kota dengan standar pelayanan prima ( cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses) menuju one stop service dengan berdasar big data system untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman selamat, tertib, lancar, asri dan ngangeni

Sistem sistem pelayanan Smart city dapat dilihat dalam bentuk algoritma yang berupa info grafis, info statistik maupun info virtual yang dapat diakses secara real time on time dan any time yang dapat dikembangkan menjadi index road safety

Smart city dalam pendekatan e policing dalam wujud pemolisian yang berbasis elektronik dalam mewujudkan keteraturan sosial yang dapat saling sinergis dalam sistem operasional yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi

10 Point Keberhasilan Smart City dalam Pendekatan Road Safety Policing

1. Back office, Application yg berbasis Artificial Intellegent dan Net Work yang berbasis Internet of things dapat berfungsi sebagaimana semestinya dan menghasilkan Algoritma Road Safety
2. Dapat menjadi Pusat K3i ( Komunikasi, Koordinasi, Komando dan Pengenadalian serta Informasi)
3. Didukung IT for Road Safety yang mencakup :
    a. TMC (Traffic Management Centre) untuk mendukung road safety management
    b. SSC (Safety And Security Centre) untuk mendukung safer road
    c. ERI ( Electronic Registration and Identification) untuk mendukung safer Vehicle
    d. SDC ( Safety Driving Centre) untuk mendukung safer people

e. Intan ( Intellegent Traffic Analysis) untuk mendukung post crash care

4. Diimplementasikan dalam Smart Management dan Smart Operation
5. Diawaki petugas polisi siber (cyber cops)
6. Didukung Management Media
7. Mampu memonitor situasi dan kondisi lalu lintas terutama pada kawasan black spot, trouble spot atau kawasan kawasan penting lainnya
8. Algoritma Road safety mampu memberikan prediksi antisipasi dan solusi yang dapat diakses on time dan real time serta any time
9. Mendukung Sistem Pengamanan Kota ( Sispam Kota )
10. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) melalui Big Data System dan One Stop Service Sistem

Kemanfaatan Smart City dalam pendekatan Road Safety Policing sebagai wujud implementasikan UU LLAJ

1. Kemanusiaan

   Segala usaha dan upaya yang dilakukan secara managerial maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa bertujuan mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar

2. Kamseltibcar lantas

   Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Di mana suatu masyarakat dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang memerlukan adanya produktifitas, yang dihasilkan dari aktivitas, yang didukung atau melalui lalu lintas. Selain itu lalu lintas dapat dilihat sebagai refleksi budaya bangsa.

3. Meningkatkan kualitas keselamatan

   Mausia adalah aset utama bangsa yang harus ditingkatkan kualitas keselamatannya dari membangun infrastruktur dan sistem sietemnya, membangun literasi dan edukasi, mengembangkan

sistem uji dan penerbitan SIM, mengembangkan sistem penegakan hukum, membangun penelitian dan pengkajian lalu lintas

4. Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan

   Tatkala kompetensi para pengguna lalu lintas dan sistem sistemnya saling mendukung maka apa yang dilakukan point 1, 2 dan 3 dijadikan standar untuk menilai atau mengukur kinerja. Fatalitas korban kecelakaan penyebab utamanya adalah KECEPATAN. maka sistem manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan emergency saling terkait satu dengan lainnya dan disinergikan dalam operasionalnya.

5. Memberikan pelayanan di bidang LLAJ yang mencakup pelayanan: a. keamanan, b. keselamatan, c. hukum, d. administrasi, e. informasi dan f. kemanusiaan secara prima

6. Kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ( NKRI )

   Dalam pendekatan geopolitik dan geostrategis road safety policing dalam menangani lalu lintas juga untuk kesatuan dan persatuan bangsa yang berada dalam kawasan NKRI. Sistem sistem yang saling terpadu saling terhubung sinergis, secara manual maupun elektronik dalam mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar.

7. Siap menghadapi globalisasi

   Di era globalisasi dunia tanpa sekat labirin ruang dan waktu. Secara aktuan jalur jalur lalu lintas mulai dibangun secara nasional maupun internasional salah satunya ide gahasan membangun BRI ( belt road inisiative )

8. Siap menghadapi disrupsi

   Disrupsi begitu cepat dan para pemangku kepentingan dan aparaturnya dituntut siap menghadapi untuk tetap eksis dan melayani publik secara prima. Dalam road safety poling menyiapkan IT for road safety sbb :

a. TMC (Traffic Management Centre sebagai back up untuk mendukung Road safety management yang penjurunya Bappenas)

b. SSC (Safety And Security Centre mendukung Safer Road yang penjurunya kementrian PUPERA)

c. ERI (Electronic Registration and Identification mendukung Safer Vihecle yang penjurunya kementrian Perhubungan)

d. SDC (Safety Driving Centre mendukung Safer People yang penjurunya Polri)

e. INTAN ( Intellegent Traffic Analysis mendukung Post Crash yang pendukungnya Kemenkes )

Dari ke lima point tsb Road safety policing membangun dan mengembangkan : a. TAR ( traffic attitude record) dan De merit point system untuk perpanjangan SIM, b. smart managemet dalam sistem manajemen dan pengelolaannya operasional secara online berbasis elektronik yang diawaki cyber cops untuk memberikan pelayanansecara virtual, c. Literasi Road Safety, d. SDC dalam sekolah mengemudi sistem uji dan penerbitan SIM, e. TARC ( traffic accident research centre ), f. RSRD ( road safety researach and development), g. intellegent Road safety, h. management media, i. Model pengelolaan smart city, j. Analisa dampak lalu lintas, k. Kajian kajian yang berbasis wilayah, berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah, l. Master trainer, trainer dan training serta road safety coaching, m. Etle ( penindakan pelanggaran secara elektronik), n. Penyelidikan dan Penyidikan lalu lintas yang berbasis pada macro dan micro evidence dan research o. Algoritma dan index road safety sebagai akuntabilitas kepada publik.

9. Siap di era kenormalan baru

Di era kenormalan baru road safety policing berbasis smart policing yang siap secara conventional policing, e policing dan forensic policing

10. Mendorong para pemangku kepentingan LLAJ ada sinergitas dan menjadi profesional serta modern

    Melalui RSPA ( Road Safety Partnership Action) sbgai forum road safety untuk bersama sama membangun sinergitas antar pemangku kepentingan dan mendorong terbangunnya Smart city.

    Hal tersebut di atas merupakan akuntabilitas kepada publik secara :

    a. moral,
    b. hukum,
    c. administrasi
    d. fungsional
    e. sosial.

# LEMDIKLAT POLRI MAHIR TERPUJI PATUH HUKUM DAN UNGGUL [132]

A. Biro Perencanaan dan Administrasi Lemdiklat Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar Lemdiklat Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul dengan melakukan bidang :

1. Administrasi yang mencakup :
   a. Prinsip Prinsip Managerial
      1) Perencanaan untuk mencapai tujuan Lemdiklat dalam program unggulan Lemdiklat ( Kampus : Integritas, Unggul, Modern, Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga.
      2) Pengorganisasian atas upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Lemdiklat yang sejalan dengan Program unggulan Lemdiklat.
      3) Pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dari masing masing biro untuk diimplementasikan di jajaran Lemdiklat.
      4) Pengawasan Proses Pembelajaran yang merupakan suatu dialog peradaban yang berbasis literasi dalam rangka mencapai tujuan Lemdiklat.
      5) Pengendalian pembelajaran di Lemdiklat Polri dengan membentuk tim transformasi secara ad hoc untuk Program Unggulan Lemdiklat dan Pembelajaran masing Lemdiklat yang dikerjakan Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan maupun Biro Kurikulum untuk masing masing Satuan Pendidikan.
   b. Menyusun Standar Operational Procedure (SOP) yang berisi:
      1) Job Description and Job Analysis.

132 https://polisiindonesia.id/2024/12/28/cdl-lemdiklat-polri-mahir-terpuji-patuh-hukum-dan-unggul/

2) Standar Keberhasilan Pelaksanaan Tugas.
3) Sistem Penilaian Kinerja.
4) Sistem Reward and Punishment.
5) Etika Kerja yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksinya.

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia untuk mencapai standar Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul di Tingkat Lemdiklat maupun Satuan Pendidikan.

d. Melakukan Branding SDM unggul di Lemdiklat dan Jajarannya (Setiap Satdik minimal ada 10 orang).

e. Memberikan Penghargaan atau Lemdiklat Award.

f. Pembinaan Logistik yang berstandar prima.

g. Pemeliharaan dan Perawatan SDM, Infrastruktur dan Sistem sistem pendukung, Logistik, Lingkungan.

h. Pembinaan Anggaran sesuai dengan apa yang direncanakan point (a) sampai dengan (g).

i. Melakukan Pembinaan bidang Perencanaan dan Administrasi di Satuan Pendidikan Jajaran Lemdiklat.

B. Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan Lemdiklat Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar Lemdiklat Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul dalam mendukung Program unggulan Lemdiklat Polri (Kampus Integritas, Unggul, Modern dan Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga) dengan melakukan bidang :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan di Satuan Pendidikan Jajaran Lemdiklat agar dapat melaksanakan Program Unggulan Lemdiklat dan mencapai tujuan hasil didik Lemdiklat yang Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul.
2. Peningkatan Kualitas Dosen,Guru, Widya Iswara, Instruktur agar mampu mentransformasi dan mencerahkan para peserta didik dalam dialog peradaban.
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam berbagai implementasi literasi polisi dan pemolisian nya antara lain :
   a. Media Manajemen.

b. Pod cast.
c. Lemdiklat Branding.
d. Lemdiklat Expo.
e. Penerbitan Buku.
f. Penerbitan Jurnal.
g. Debat Akademik.
h. Kegiatan Bersama antar kelembagaan.
i. Menyelenggarakan FGD, Seminar, Work Shop.
j. Bench Mark dalam dan luar negeri.

4. Peningkatan Kualitas Sistem Pembelajaran secara langsung maupun virtual yang terkait dengan biro kurikulum :
   a. Sespim Lemdiklat Polri mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” LEADERSHIP, MANAGERIAL AND POLICING MODEL”.
   b. Akademi Kepolisian mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” SMART MANAGEMENT AND SMART OPERATION POLICING”.
   c. STIK PTIK mengajarkan, melatih dan mengembangkan “POLICE SCIENCE”.
   d. Setukpa mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” FIRST LINE SUPERVISOR POLICING”.
   e. Pusdik Brimob mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” EMERGENCY AND CONTIGENCY POLICING”.
   f. Pusdik Polair mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” MARITIME POLICING”.
   g. Pusdik Binmas mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” COMMUNITY POLICING dan ART POLICING”.
   h. Sebasa Polri mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” INTERNATIONAL POLICING”.
   i. Diklat Reserse mengajarkan, melatih dan mengembangkan “SCIENTIFIC INVESTIGATION POLICING”.
   j. Pusdik Lantas mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” ROAD SAFETY POLICING”.

k. Pusdik Sabhara mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” PROACTIVE AND PROBLEM SOLVING POLICING”.

l. Pusdik mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” SMART POLICING”.

m. Pusdik Administrasi mengajarkan, melatih dan mengembangkan “ADMINISTRATION STRATEGIC POLICING”.

n. Sepolwan mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” COMMUNITY POLICING dalam Model MOTHER POLICING”.

0. Sekolah Polisi Negara mengajarkan, melatih dan mengembangkan “POLICE STUDIES BASED ON COMMUNITY POLICING”.

5. Peningkatan Kualitas Kerja Sama antar Kelembagaan dalam dan luar negeri.

6. Peningkatan Kualitas citra Lemdiklat dan Jajarannya.

7. Menyelenggarakan Tradisi Lemdiklat di Jajarannya.

a. Buka Tutup Pendidikan.
b. HUT Satdik.
c. Ikrar dan Penyumpahan.
d. Yudisium dan Apresiasi dan sebagainya.

C. Biro Kurikulum Lemdiklat Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar Lemdiklat Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul dengan melakukan bidang Kurikulum yang berkaitan dengan Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Kepolisian Sesuai dengan Keunggulan dan Fokus masing masing Satuan Pendidikan dalam mendukung Kampus Integritas, Unggul, Modern dan Hijau Bahagia Sehat Jiwa raga :

1. Sespim Lemdiklat Polri mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” LEADERSHIP, MANAGERIAL AND POLICING MODEL”.

2. Akademi Kepolisian mengajarkan, melatih dan mengembangkan ” SMART MANAGEMENT AND SMART OPERATION POLICING”.

3. STIK PTIK mengajarkan, melatih dan mengembangkan "POLICE SCIENCE".
4. Setukpa mengajarkan, melatih dan mengembangkan " FIRST LINE SUPERVISOR POLICING".
5. Pusdik Brimob mengajarkan, melatih dan mengembangkan " EMERGENCY AND CONTIGENCY POLICING".
6. Pusdik Polair mengajarkan, melatih dan mengembangkan "MARITIME POLICING".
7. Pusdik Binmas mengajarkan, melatih dan mengembangkan " COMMUNITY POLICING dan ART POLICING".
8. Sebasa Polri mengajarkan, melatih dan mengembangkan " INTERNATIONAL POLICING".
9. Diklat Reserse mengajarkan, melatih dan mengembangkan "SCIENTIFIC INVESTIGATION POLICING".
10. Pusdik Lantas mengajarkan, melatih dan mengembangkan " ROAD SAFETY POLICING".
11. Pusdik Sabhara mengajarkan, melatih dan mengembangkan " PROACTIVE AND PROBLEM SOLVING POLICING".
12. Pusdik mengajarkan, melatih dan mengembangkan "SMART POLICING".
13. Pusdik Administrasi mengajarkan, melatih dan mengembangkan "ADMINISTRATION STRATEGIC POLICING".
14. Sepolwan mengajarkan, melatih dan mengembangkan " COMMUNITY POLICING dalam Model MOTHER POLICING".
15. Sekolah Polisi Negara mengajarkan, melatih dan mengembangkan "POLICE STUDIES BASED ON COMMUNITY POLICING".

D. Biro Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar Lemdiklat Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul dalam mendukung Program unggulan Lemdiklat Polri (Kampus Integritas, Unggul, Modern dan Hijau Bahagia Sehat Jiwa Raga) dengan melakukan bidang :

1. Pengkajian pada Biro Biro Lemdiklat maupun Proses Pembelajaran di masing masing Satuan Pendidikan.
2. Implementasi Literasi dan produknya di masing masing Satuan Pendidikan dalam program satu hari satu ide.
3. Mengembangkan bagian Tik info menjadi Iteration Centre.
4. Mengkaji alumni Lemdiklat yang sudah menduduki jabatan dan memiliki kewenangan.
5. Mengembangkan Manajemen Media.
6. Membuat Penerbitan.
7. Membuat jurnal ilmiah.
8. Mendukung pengembangan STIK menjadi Unipol.
9. Menyusun dan memperbaharui aturan aturan Pembelajaran di Lemdiklat Polri.

E. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam mendukung Program Unggulan Lemdiklat yang Mahir Terpuji Patuh Hukum dan Unggul melakukan :

1. Sertifikasi kepada Master Trainer dan Trainer di Satuan Pendidikan Jajaran Lemdiklat (Dengan cara modifikasi Virtual dan Aktual)
2. Meningkatkan Kualitas Asesor.
3. Mendukung dan Mensertifikasi Tugas Fungsional Polri.
4. Mengembangkan Sistem Uji Kompetensi dalam kaitan Simulasi, Praktek dengan dukungan IT.
5. Membuat standar sertifikasi bagi.
   a. Petugas Pelaksana.
   b. Supervisor.
   c. Instruktur.
   d. Auditor.
6. Model model skema uji dikolaborasi dengan Biro Bin diklat maupun Kurikulum untuk dijadikan model Pembelajaran.
7. Mendukung Biro Renmin untuk pemberian Penghargaan dan Apresiasi.

# MAHIR TERPUJI PATUH HUKUM DAN UNGGUL REFLEKSI PERILAKU ORGANISASI LEMDIKLAT POLRI [133]

Kualitas Literasi suatu Institusi Terefleksi dari Perilaku Organisasinya.

Literasi yang memadai akan mencerahkan dan mendorong perilaku organisasinya profesional, cerdas, bermoral dan modern. Demikian juga sebaliknya.

Literasi refleksi dari kepemimpinan, administrasi, operasional dan capacity-nya.

Pemimpin dengan kepemimpinannya yang peduli pada literasi passionnya pada pencapaian tujuan dengan mengimplementasikan keutamaannya.

Kebijakan pemimpin yang literasinya memadai akan bijaksana bagi keutamaan institusi dan mencerahkan

Membangun literasi pada suatu institusi dapat dimulai dari keteladanan pemimpinnya, pikiran, perkataan dan perbuatannya bagi keutamaannya yang akan diikuti anak buahnya dan menjadi core value.

Core value menjadi spirit membangun yang aktual sesuai dengan yang ideal.

Core value diterapkan melalui model kesadaran, tanggung jawab dan disiplin yang bisa dibuat pada etika kerja yang secara rinci dijabarkan pada Standart operation procedure (SOP).

133 https://polisiindonesia.id/2024/12/28/cdl-lemdiklat-polri-mahir-terpuji-patuh-hukum-dan-unggul/
https://tagarpolisi.com/2024/12/31/mahir-terpuji-patuh-hukum-dan-unggul-refleksi-perilaku-organisasi-lemdiklat-polri/

SOP merupakan jabaran dari:

1. Job description dan Job analysis.
2. Standardisasi keberhasilan pelaksanaan tugas.
3. Sistem penilaian kinerja.
4. Sistem reward and punishment.
5. Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan sanksi bila melanggar.

SOP menjadi landasan membangun core value sehingga literasi dapat terbangun.

Sebaliknya tatkala SOP diabaikan maka core value antara yang aktual berbeda bahkan bertentangan dengan yang ideal.

Membangun literasi sejatinya membangun sumberdaya manusia sebagai aset institusi agar dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin bekerja dengan profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Membangun literasi merupakan passion untuk merubah mind set yang sejatinya juga sebagai landasan reformasi secara kultural. Hal tersebut dapat dimulai dari:

1. Hukum dan aturan aturannya hingga SOP nya.
2. Infrastruktur dan sistem sistemnya yang dapat meminimalisir kesempatan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan.
3. SDM yang akan mengawakinya.

Literasi refleksi perilaku organisasi terlihat dari :

1. Pemimpin dan Kepemimpinannya.
2. Kebijakan kebijakannya.
3. Core value nya sebagai basis budaya organisasi.
4. Aturan, SOP hingga Etika kerjanya.
5. Tingkat kualitas Kinerjanya.

6. Tingkat kualitas pelayanan publiknya.
7. Tingkat transparansinya.
8. Tingkat akuntabilitasnya.
9. Tingkat dukungan dari mitranya (Soft power dan Smart power nya).
10. Tingkat kualitas kepercayaan publik.

Polisi dapat dilihat sebagai petugas, sebagai fungsi maupun sebagai institusi melaksanakan tugasnya melalui pemolisian. Ranah tugasnya ada pada birokrasi maupun masyarakat.

Pemolisian dengan pendekatan perilaku organisasi dilihat tindakan yang dilakukan pada tingkat manajerial maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial dengan adanya jaminan keamanan maupun rasa aman dalam masyarakat.

Pemolisian dapat berbasis wilayah,berbasis fungsi dan berbasis dampak masalah. Pemolisian diimplementasikan untuk melayani kepada publik.

Institusi yang melaksanakan pelayanan kepada publik merupakan suatu profesi yang dilandasi profesionalisme dan ketulusan hati.

Semua aktifitas penggunaan kewenangan dan kekuasaan nya diawasi dibatasi dan dipertanggung jawabkan.

Tanggung jawab kepada publik dalam penggunaan kewenangan dan kekuasaan meliputi secara:

1. Moral
2. Hukum
3. Administrasi
4. Fungsional
5. Sosial

Perilaku organisasi pelayanan kepada publik merupakan upaya untuk memberikan pelayanan prima di bidang:

1. Keamanan
2. Keselamatan
3. Hukum
4. Administrasi
5. Informasi
6. Kemanusiaan

Lemdiklat Polri sebagai institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan Polri yang melakukan proses pembelajarannya melalui dialog peradaban yang berbasis moral, dan literasi dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian untuk mencapai hasil didik polisi yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.

Proses pembelajaran di Lemdiklat Polri dimulai dari para gurunya sebagai kunci dari perilaku organisasinya.

Keutamaan guru di Lemdiklat Polri

1. Menginspirasi dan menjadi role model atau memberikan contoh dalam pikiran perkataan dan perbuatannya.
2. Menstimuli untuk berbuat baik dan benar.
3. Memotivasi semangat dalam proses pembelajaran.
4. Menanamkan keutamaan sebagai polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum.
5. Mentransformasi melalui dialog peradaban.
6. Tegas namun penuh welas asih.
7. Berbasis moralitas dengan kesadaran, tanggung jawab dan disiplin.
8. Mendidik dan melatih menghadapi situasi krisis (Emergensi maupun kontijensi).

9. Berpikir kritis, kreatif dan inovatif.

10. Menyiapkan menjadi siapa sebagai" Polisi yang transformatif ".

Dialog peradaban merupakan model transformasi dalam membimbing maupun mencerahkan kepada para peserta didik agar mampu menemukan melaksanakan keutamaan polisi dalam pemolisian nya.

Polisi dalam pemolisian nya dituntut sehat semangat dan smart dengan jiwa bahagia yang mencerahkan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Semua itu dapat dicapai dengan membuka ruang dialog peradaban bagi semakin manusiawinya manusia.

Menyiapkan calon pemimpin di masa depan di Sespim Lemdiklat Polri melalui suatu "Dialog Peradaban".

Keutamaan pembelajaran di Lemdiklat Polri dengan mentransformasi dan mencerahkan atas keutamaan kepolisian (Kemanusiaan, Keteraturan sosial dan Peradaban) yang dapat dikatakan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan.